



2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029



Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.

BUPATI SERANG



MUHAMMAD NAJIB HAMAS, S.E., M.M.

WAKIL BUPATI SERANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA





SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang. Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan provinsi Daerah, ke dalam struktur dan pola penempatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi Daerah yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil Pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

15. Program . . .

15. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.
16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, dan RTRW Daerah Tahun 2011-2031.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. RKPD.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (11,55/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Visi pada RPJMD Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia” yang merupakan kondisi yang dicita-citakan sekaligus akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa kebahagiaan yang didefinisikan sebagai perwujudan hasil pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman baik secara fisik, sosial, maupun emosional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Daerah merupakan suatu wilayah dengan penduduk yang beragam baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu, Daerah harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga akan melahirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

Kabupaten Serang Bahagia akan dapat diwujudkan melalui 2 (dua) upaya atau pendekatan utama pembangunan yaitu melalui:

1. Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dilakukan pada kehidupan baik itu sejahtera finansial, mental, kesehatan, dan spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat di semua wilayah di Daerah.

2. Menciptakan lingkungan yang nyaman

Menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan upaya mendasar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Serang sebagai daerah dengan hunian, pendidikan, kreatifitas dan industri secara harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi Daerah, dirumuskan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Daerah yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Daerah yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Daerah sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 135

Kata Pengantar



Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M

BUPATI SERANG

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini telah diselesaikan dengan baik.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terukur, dan partisipatif. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

RPJMD ini diharapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, berkeadilan dan bahagia. Partisipasi aktif seluruh pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Serang yang Bahagia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, November 2025

Bupati Serang

Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd.,MM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Serang	5
1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN	6
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Serang Dengan RPJMD Provinsi Banten ...	8
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Serang	9
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan KLHS RPJMD	9
1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	10
1.3.7 Hubungan antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Serang	10
1.3.8 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lainnnya	10
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.4.1 Maksud	10
1.4.2 Tujuan	11
1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Serang	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	22
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	22
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	22
2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah	22
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	34
2.1.2.1 Potensi Lahan Produktif	34
2.1.2.2 Kondisi dan Potensi Kawasan Pesisir	35
2.1.2.3 Potensi Geologi	37
2.1.2.4 Potensi Pertanian	38
2.1.2.5 Potensi Peternakan	41
2.1.2.6 Potensi Perikanan	42
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	45
2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	46
2.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan	47
2.1.3.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Air	50
2.1.3.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah	55
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	58
2.1.4.1. Indeks Ketahanan Energi	58
2.1.4.2. Indeks Ketahanan Air (Neraca Air)	59
2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan	61
2.1.4.4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	62
2.1.4.5. Konsumsi Listrik Per Kapita	62
2.1.4.6. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	63

2.1.5	Lingkungan Hidup Berkualitas.....	65
2.1.5.1.	Kondisi Pemanfaatan Lahan	65
2.1.5.2.	Kesesuaian Pemanfaatan Lahan	66
2.1.5.3.	Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	69
2.1.5.4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	71
2.1.5.5.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	73
2.1.5.6.	Potensi Pengelolaan Sampah	74
2.1.6	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	75
2.1.6.1.	Kawasan Rawan Bencana	75
2.1.6.2.	Indeks Risiko Bencana	78
2.1.6.3.	Indeks Ketahanan Daerah	79
2.1.7	Demografi Kabupaten Serang	79
2.1.7.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencatatan Sipil	80
2.1.7.2.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang	81
2.1.7.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	83
2.1.7.4.	Sex Rasio Penduduk.....	84
2.1.7.5.	Distribusi Kepadatan Penduduk	85
2.1.7.6.	Komposisi Penduduk Menurut Umur.....	87
2.1.8	Analisis Proyeksi Kependudukan 2025-2029	88
2.1.8.1.	Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	88
2.1.8.2.	Distribusi Penduduk	89
2.1.8.3.	Bonus Demografi.....	92
2.1.8.4.	Penduduk Usia Lanjut (Tua).....	94
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	95
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi.....	95
2.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	95
2.2.1.2.	Kemiskinan	97
2.2.1.3.	PDRB Per Kapita.....	102
2.2.1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	103
2.2.1.5.	Indeks GINI	104
2.2.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	105
2.2.2	Kesehatan Untuk Semua	107
2.2.2.1.	Umur Harapan Hidup	108
2.2.2.2.	Angka Kematian Ibu (AKI).....	109
2.2.2.3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	111
2.2.2.4.	Prevalensi Stunting.....	111
2.2.2.5.	Insidensi Tuberkolosis	113
2.2.2.6.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	114
2.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	115
2.2.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	120
2.2.3.2	Harapan Lama Sekolah	122
2.2.3.3	Angka Literasi/Numerasi	123
2.2.3.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	125
2.2.3.5	Indeks Literasi Digital.....	126
2.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	127

	2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	127
2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	128
	2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	128
	2.2.5.2. Cakupan Warisan Budaya Skala Kabupaten	129
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	133
	2.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	133
	2.2.6.2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	134
	2.2.6.3. Indeks Pembangunan Gender	136
	2.2.6.4. Indeks Pemberdayaan Gender	137
	2.2.6.5. Indeks Ketimpangan Gender	138
	2.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda	139
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	140
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	140
	2.3.1.1. Angka Ketergantungan	140
2.3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	141
	2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan	141
	2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	142
	2.3.2.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	142
	2.3.2.4. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	144
	2.3.2.5. Kewirausahaan	145
	2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	145
	2.3.2.7. Indeks Inovasi Daerah	146
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	147
	2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau	147
	2.3.3.2. Indeks Ekonomi Inklusif	148
2.3.4	Transformasi Digital	149
	2.3.4.1. Indeks Masyarakat Digital	149
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	150
	2.3.5.1. Modal Tetap Bruto	150
	2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa	151
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	154
	2.3.6.1. Indeks Infrastruktur (Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan) ...	154
	2.3.6.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	156
	2.3.6.3. Fasilitas Perlengkapan Jalan, Ketersediaan PJU dan lainnya	157
	2.3.6.4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	159
	2.3.6.5. Persentase Desa Mandiri	164
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	166
	2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	166
	2.3.7.2. Tingkat Inflasi	167
2.4	Aspek Pelayanan Umum	168
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	168
	2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum	168
	2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	169
	2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik	170
	2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional	171

2.4.1.5.	Indeks Reformasi Birokrasi	172
2.4.1.6.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	173
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	174
2.4.2.1.	Persentase Penegakan Perda	174
2.4.2.2.	Persentase Capaian Aksi HAM.....	176
2.4.2.3.	Indeks Rasa Aman	177
2.4.2.4.	Kondisi Situasi Politik, Kemanan dan Ketertiban Daerah.	178
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	178
2.4.3.1.	Indeks Daya Saing Daerah	179
2.4.4	Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah.....	179
2.4.5	Standar Pelayanan Minimal	200
2.4.6	Kerjasama Daerah	207
2.4.7	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan APBD Provinsi	211
2.4.8	BUMD Kabupaten Serang.....	212
2.4.9	Pendanaan Non-APBD.....	214
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	215
2.5.1	Gambaran Kondisi Keuangan Daerah 5 Tahun Terakhir	216
2.5.1.1	Kinerja Keuangan Daerah	216
2.5.2	Neraca Daerah.....	219
2.5.3	Proyeksi Keuangan Daerah 5 Tahun 2025–2030.....	222
2.5.3.1	Proyeksi Pendapatan Daerah	257
2.5.3.2	Proyeksi Belanja Daerah.....	258
2.5.3.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah	260
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	260
2.6.1	Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Serang	260
2.6.2	Isu-Isu Strategis	278
2.6.3.1	Lingkungan Strategis	279
2.6.3.2	Kelompok Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029	298
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	302
3.1	Visi dan Misi	302
3.1.1	Visi	302
3.1.2	Misi	304
3.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	308
3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	320
3.3.1	Strategi Pembangunan Daerah	320
3.3.2	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Serang	412
3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	439
3.4.1	Cascading dan Crosscutting dalam RPJMD.....	455
3.5	Program Nasional yang Disinergikan.....	477
3.5.1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP).....	477
3.5.2	Kabupaten Layak Anak (KLA).....	477
3.5.3	Pengarusutamaan Gender (PUG).....	478
3.5.4	Kabupaten Serang Sehat	478
3.5.5	Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting (P3S)	479

3.5.6	Program Makan Bergizi Gratis.....	480
3.5.7	Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	480
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
DAERAH		483
4.1	Program Perangkat Daerah	483
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	598
4.2.1	Indikator Kinerja Utama	598
4.2.2	Indikator Kinerja Daerah	604
BAB V PENUTUP		625
5.1	Kesimpulan.....	625
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	625
5.3	Manajemen Resiko.....	626
5.4	Pedoman Transisi	627
5.5	Penutup.....	628

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3. 1 Hubungan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	6
Tabel 1.3. 2 Hubungan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Serang Tahun 2025-2029	7
Tabel 1.3. 3 Hubungan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029	8
Tabel 2.1. 1 Ketinggian Wilayah Kabupaten Serang	24
Tabel 2.1. 2 Kemiringan Lahan Kabupaten Serang	26
Tabel 2.1. 3 Jenis dan Luas Sebaran Batuan Kabupaten Serang.....	26
Tabel 2.1. 4 Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang	27
Tabel 2.1. 5 Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Serang	30
Tabel 2.1. 6 Jumlah Hari Hujan Di Kabupaten Serang (Hari) Tahun 2020 – 2024	32
Tabel 2.1. 7 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Serang (mm/tahun) Tahun 2020 – 2024	32
Tabel 2.1. 8 Jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering di Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.1. 9 Suhu Udara Di Kabupaten Serang (°C) Tahun 2020 – 2024	33
Tabel 2.1. 10 Tingkat Kelembaban Di Kabupaten Serang (%) Tahun 2020 – 2024	34
Tabel 2.1. 11 Potensi Lahan Produktif Di Kabupaten Serang Tahun 2015	35
Tabel 2.1. 12 Luas Wilayah Administrasi Kawasan Pesisir Kabupaten Serang.....	35
Tabel 2.1. 13 Sebaran Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Serang	36
Tabel 2.1. 14 Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Serang 2020–2024	39
Tabel 2.1. 15 Luas Tanam dan Luas Panen Pertanian (Hektar) Kabupaten Serang 2020 – 2024	40
Tabel 2.1. 16 Lahan LP2B di Kabupaten Serang.....	40
Tabel 2.1. 17 Kebutuhan Pangan Masyarakat Kabupaten Serang Tahun 2023	41
Tabel 2.1. 18 Data Populasi Peternakan Kabupaten Serang Tahun 2024	41
Tabel 2.1. 19 Produksi Perikanan Kabupaten Serang 2020 – 2024	42
Tabel 2.1. 20 Produksi Komoditas Budidaya Perikanan Kabupaten Serang 2020 – 2024 (Ton)	43
Tabel 2.1. 21 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Serang 2020 – 2023 (Ton).....	43
Tabel 2.1. 22 Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Serang.....	48
Tabel 2.1. 23 Status Daya Dukung Pangan (Non Beras) Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2043	49
Tabel 2.1. 24 Status Daya Dukung Pangan (Beras) Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2043	49
Tabel 2.1. 25 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Serang	51
Tabel 2.1. 26 Luas Status Baku Mutu Air	53
Tabel 2.1. 27 Tabel Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Serang	54
Tabel 2.1. 28 Data Timbulan Sampah di Kabupaten Serang.....	56
Tabel 2.1. 29 Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Listrik Terpasang PT. PLN di Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2023	58
Tabel 2.1. 30 Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN Berdasarkan Golongan Tarif di Kabupaten Serang Tahun 2014 – 2021	58
Tabel 2.1. 31 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	61
Tabel 2.1. 32 PoU Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	62
Tabel 2.1. 33 Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Listrik Terpasang PT. PLN di Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2023	63

Tabel 2.1. 34 Jumlah Pelanggan dan Jumlah Air Yang Disalurkan Oleh PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2020-2023	65
Tabel 2.1. 35 Penggunaan Lahan di Kabupaten Serang Tahun 2022.....	65
Tabel 2.1. 36 Tingkat Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2023	67
Tabel 2.1. 37 Tingkat Kesesuaian Perwujudan Struktur Ruang RTRW Kab. Serang Tahun 2023 ...	68
Tabel 2.1. 38 Rencana dan Realisasi RTRW di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 2.1. 39 Capaian Nilai IKA, IKU, ITV dan IKLH Kabupaten Serang dan Provinsi Banten	70
Tabel 2.1. 40 Target dan Realisasi Jumlah KK Akses Aman Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024 Kabupaten Serang	72
Tabel 2.1. 41 Data Penanganan Sampah Tahun 2020-2024 di Kabupaten Serang.....	73
Tabel 2.1. 42 Potensi Sampah per Kecamatan pada Tahun 2024 Kabupaten Serang	74
Tabel 2.1. 43 Data Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024.....	78
Tabel 2.1. 44 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Banten Tahun 2021-2023	79
Tabel 2.1. 45 Jumlah Penduduk Tercatat Kabupaten Serang Tahun 2024	80
Tabel 2.1. 46 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	82
Tabel 2.1. 47 Jumlah Penduduk Tercatat Kabupaten Serang Tahun 2024.....	83
Tabel 2.1. 48 Sex Ratio di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	85
Tabel 2.1. 49 Sex Ratio Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	86
Tabel 2.1. 50 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Serang	89
Tabel 2.1. 51 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	90
Tabel 2.1. 52 Perkiraan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan	91
Tabel 2.1. 53 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Serang.....	93
Tabel 2.2. 1 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah).....	96
Tabel 2.2. 2 Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) di Kabupaten Serang	101
Tabel 2.2. 3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Ribuan Orang) Kabupaten Serang 2020-2024	103
Tabel 2.2. 4 IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024	106
Tabel 2.2. 5 Kondisi Sarana Kesehatan Tahun 2024	107
Tabel 2.2. 6 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2023-2024.....	108
Tabel 2.2. 7 UHH menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024.....	109
Tabel 2.2. 8 Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan PAUD dan Raudhatul Athfal Kabupaten Serang sampai Tahun 2025.....	117
Tabel 2.2. 9 Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Serang sampai Tahun 2025	117
Tabel 2.2. 10 Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Serang sampai Tahun 2025	118
Tabel 2.2. 11 Data Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Tahun 2025	119
Tabel 2.2. 12 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Genggam/HP di Provinsi Banten Tahun 2020-2023.....	127
Tabel 2.2. 13 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Di Provinsi Banten	127
Tabel 2.2. 14 Daftar Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Serang	129
Tabel 2.2. 15 Ragam Seni Budaya di Kabupaten Serang.....	131

Tabel 2.2. 16 Capaian iBangga Kabupaten Serang Tahun 2024.....	135
Tabel 2.2. 17 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024	136
Tabel 2.2. 18 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024	137
Tabel 2.2. 19 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2023.....	138
Tabel 2.2. 20 Capaian IPP Tahun 2020-2023	139
Tabel 2.3. 1 Angka Ketergantungan Kabupaten Serang Tahun 2020–2024.....	140
Tabel 2.3. 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020–2024 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)	143
Tabel 2.3. 3 Jumlah UMKM di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	145
Tabel 2.3. 4 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024.....	146
Tabel 2.3. 5 Presentase Sampah Terangkut Tahun 2020 – 2024	148
Tabel 2.3. 6 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Banten Tahun 2017 – 2021	148
Tabel 2.3. 7 Pilar dan Sub Pilar dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	149
Tabel 2.3. 8 Hasil Pengukuran IMDI Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	150
Tabel 2.3. 9 Negara Tujuan Ekspor dan Import Kabupaten Serang	152
Tabel 2.3. 10 Volume Neraca Ekspor dan Impor beserta Negara Tujuan	152
Tabel 2.3. 11 Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Serang	154
Tabel 2.3. 12 Jumlah Kendaraan Kabupaten Serang Tahun 2020-2023	155
Tabel 2.3. 13 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Serang Tahun 2020–2024.....	155
Tabel 2.3. 14 Ketersediaan Standar Fasilitas Terminal Tipe C di Kabupaten Serang	157
Tabel 2.3. 15 Jumlah Terminal di Kabupaten Serang	158
Tabel 2.3. 16 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Kendaraan Uji Pengujian Bermotor Kabupaten Serang Tahun 2020-2024.....	158
Tabel 2.3. 17 Jumlah Moda Angkutan Umum Menurut Jenis di Kabupaten Serang	159
Tabel 2.3. 18 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024.....	159
Tabel 2.3. 19 Luasan Kumuh Kabupaten Serang per-Kecamatan tahun 2020-2024	160
Tabel 2.3. 20 Jumlah RTLH di Kabupaten Serang per-Kecamatan Tahun 2020-2024	161
Tabel 2.3. 21 Jumlah RTLH di Kabupaten Serang per-Kecamatan Berdasarkan SK Bupati Tahun 2024.....	162
Tabel 2.3. 22 Daftar Perumahan yang telah Menyerahkan PSU Tahun 2020-2024	163
Tabel 2.3. 23 Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2020-2024.....	165
Tabel 2.4. 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024.....	169
Tabel 2.4. 2 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serang Tahun 2020-2023	172
Tabel 2.4. 3 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020-2024	174
Tabel 2.4. 4 Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2024	176
Tabel 2.4. 5 Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang Polres Serang	177
Tabel 2.4. 6 Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kabupaten Serang Polres Cilegon	177
Tabel 2.4. 7 Jumlah Demo Tahun 2019-2023 di Polres Serang.....	178
Tabel 2.4. 8 Jumlah Demo Tahun 2019-2023 di Polres Cilegon.....	178
Tabel 2.4. 9 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022–2024 (%)	179

Tabel 2.4. 10 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	180
Tabel 2.4. 11 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	200
Tabel 2.4. 12 Kerjasama Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020-2023.....	207
Tabel 2.4. 13 Rencana Pembangunan Infrastruktur Bersumber Dari APBN dan APBD Provinsi ...	211
Tabel 2.4. 14 Rencana Dukungan Pendanaan Kegiatan Non-APBD 2025-2030	215
 Tabel 2.5. 1 Realisasi APBD Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 (Rp).....	217
Tabel 2.5. 2 Neraca Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	221
Tabel 2.5. 3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025–2030	224
Tabel 2.5. 4 Proyeksi Kerangka Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025-2030 (dalam Rupiah)	226
 Tabel 2.6. 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	261
Tabel 2.6. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.....	271
Tabel 2.6. 3 Luas Kawasan Peruntukan Industri	292
Tabel 2.6. 4 Daftar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Serang Tahun 2022	293
Tabel 2.6. 5 Daftar Nama Desa Wisata di Kabupaten Serang.....	297
Tabel 2.6. 6 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2020-2024	298
 Tabel 3.1. 1 Keterkaitan Visi pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dengan Visi pada RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025- 2029.....	306
Tabel 3.1. 2 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029.....	307
 Tabel 3.2. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	312
 Tabel 3.3. 1 Perumusan Strategi Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	321
Tabel 3.3. 2 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Serang dan RPJMD Provinsi Banten.....	336
Tabel 3.3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	365
Tabel 3.3. 4 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	377
Tabel 3.3. 5 Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	413
Tabel 3.3. 6 Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah	440
 Tabel 3.4. 1 Penyelarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029.....	442
Tabel 3.4. 2 Pemetaan Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Nasional dalam Asta Cita Presiden.....	450
Tabel 3.4. 3 Program Perangkat Daerah dalam Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029	452
Tabel 3.4. 4 Cascading dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029.....	456
Tabel 3.4. 5 Target Indikator PKG Kementerian Kesehatan	481
Tabel 3.4. 6 Target Pemeriksaan Kesehatan Gratis.....	482

Tabel 4.1. 1 Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2030	484
Tabel 4.2. 1 Indikator Makro RPJMN dan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	599
Tabel 4.2. 2 Indikatif Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	600
Tabel 4.2. 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2030.....	604

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. 1 Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Layak Minum Tahun 2020-2024	64
Grafik 2.1. 2 Capaian Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Layak Minum Masyarakat Tahun 2024 – 2024 di Kabupaten Serang (%)	64
Grafik 2.1. 3 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2024 (%)	69
Grafik 2.1. 4 Capaian IKA, IKU dan IKTL Tahun 2020-2024	70
Grafik 2.1. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023	71
Grafik 2.1. 6 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2020–2024	81
Grafik 2.1. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	83
Grafik 2.1. 8 Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur (5 Tahunan) Kabupaten Serang Tahun 2024 (dalam persentase)	84
Grafik 2.1. 9 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	87
Grafik 2.1. 10 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur	93
 Grafik 2.2. 1 Perkembangan Nilai ADHK, dan LPE Tahun 2020-2024	96
Grafik 2.2. 2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024	97
Grafik 2.2. 3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2020-2024 (Ribu Jiwa)	98
Grafik 2.2. 4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	98
Grafik 2.2. 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten Tahun 2020-2024	99
Grafik 2.2. 6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten Tahun 2020-2024	100
Grafik 2.2. 7 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024	101
Grafik 2.2. 8 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	102
Grafik 2.2. 9 TPT (Persen) Kabupaten Serang 2020-2024	104
Grafik 2.2. 10 Indeks Gini Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2020-2024	105
Grafik 2.2. 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020-2024	106
Grafik 2.2. 12 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 2020-2024	109
Grafik 2.2. 13 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	110
Grafik 2.2. 14 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024	111
Grafik 2.2. 15 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2021-2024	112
Grafik 2.2. 16 Prevalensi Stunting di Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2025	113
Grafik 2.2. 17 Insiden Tuberkulosis di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	114
Grafik 2.2. 18 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	115
Grafik 2.2. 19 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	120
Grafik 2.2. 20 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024	121

Grafik 2.2. 21 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	122
Grafik 2.2. 22 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2024	123
Grafik 2.2. 23 Angka Lilterasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Kabupaten Serang Tahun 2021–2024	123
Grafik 2.2. 24 Angka Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Tahun 2021–2024.....	124
Grafik 2.2. 25 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2022-2024.....	126
Grafik 2.2. 26 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020–2024.....	128
Grafik 2.2. 27 Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024 ..	132
Grafik 2.2. 28 Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Tahun 2021-2023.....	133
Grafik 2.2. 29 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Serang Tahun 2021–2024	135
Grafik 2.2. 30 Indeks Pembangunan Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2024.....	135
 Grafik 2.3. 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	141
Grafik 2.3. 2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB Tahun 2020-2024.....	142
Grafik 2.3. 3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	144
Grafik 2.3. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Serang 2020-2024	146
Grafik 2.3. 5 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2023 (Juta Rupiah)	150
Grafik 2.3. 6 Ekspor Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)	151
Grafik 2.3. 7 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Serang Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)	166
Grafik 2.3. 8 Inflasi Kabupaten Serang Tahun 2020–2024 (%)	167
 Grafik 2.4. 1 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Serang Tahun 2022-2024.....	168
Grafik 2.4. 2 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	170
Grafik 2.4. 3 Ringkasan Indeks SPI 2024 Pemerintah Kabupaten Serang.....	171
Grafik 2.4. 4 Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	175
Grafik 2.4. 5 Penegakan Perda Kabupaten Serang Tahun 2020–2024	175
Grafik 2.4. 6 Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Tratibum dan Perda Kabupaten Serang Tahun 2021–2024	175
 Grafik 2.5. 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020– 2024 (Miliar Rupiah)	218

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 1.3. 2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	5
Gambar 2.1. 1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Serang	22
Gambar 2.1. 2 Peta Kelas Lereng Kabupaten Serang	25
Gambar 2.1. 3 Peta Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang	27
Gambar 2.1. 4 Peta Daerah Aliran Sungai	28
Gambar 2.1. 5 Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten Serang	28
Gambar 2.1. 6 Peta Sumber Daya Air	29
Gambar 2.1. 7 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	47
Gambar 2.1. 8 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	50
Gambar 2.1. 9 Peta Status Mutu Air.....	52
Gambar 2.1. 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Serang.....	77
Gambar 2.6. 1 Skema Perumusan Isu Srategis Kabupaten Serang.....	279
Gambar 2.6. 2 Peta Rencana Struktur Ruang Pemerintah Kabupaten Serang.....	284
Gambar 2.6. 3 Rumusan Isu Srategis RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	299
Gambar 2.6. 4 Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029	300
Gambar 2.6. 5 Keterkaitan Isu Strategis RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029	301
Gambar 3.1. 1 Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Serang.....	302
Gambar 3.1. 2 Konsep RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	455



BAB I PENDAHULUAN

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Serang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun melalui perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Serang Bahagia.

Pelaksanaan Pilkada serentak seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024 dan dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025 bagi Daerah yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Pilkada serentak pada tahun 2024, Kabupaten Serang salah satu Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada 19 April 2025 dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang resmi dilantik oleh Gubernur Banten pada tanggal 27 Mei 2025 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2317 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Serang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Sesuai amanat pada Pasal 70 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari tahapan rencana pembangunan priode ke-I RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2045. Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penjabarannya dilakukan secara tematik-holistik, integratif, dan spasial menyelaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah sebagai penguatan modal dasar pembangunan yang berkesinambungan. Penyelarasan juga dilakukan secara teknokratik, politis, bottom-up, top-down terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam mendukung tercapainya Asta Cita Presiden serta mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045.

Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Serang sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pembangunan sektoral dan spasial harus menerapkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36).

Dalam rangka mengintegrasikan isu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan muatan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, maka dalam dokumen RPJMD telah memasukkan rekomendasi maupun isu strategis hasil perumusan KLHS RPJMD 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);

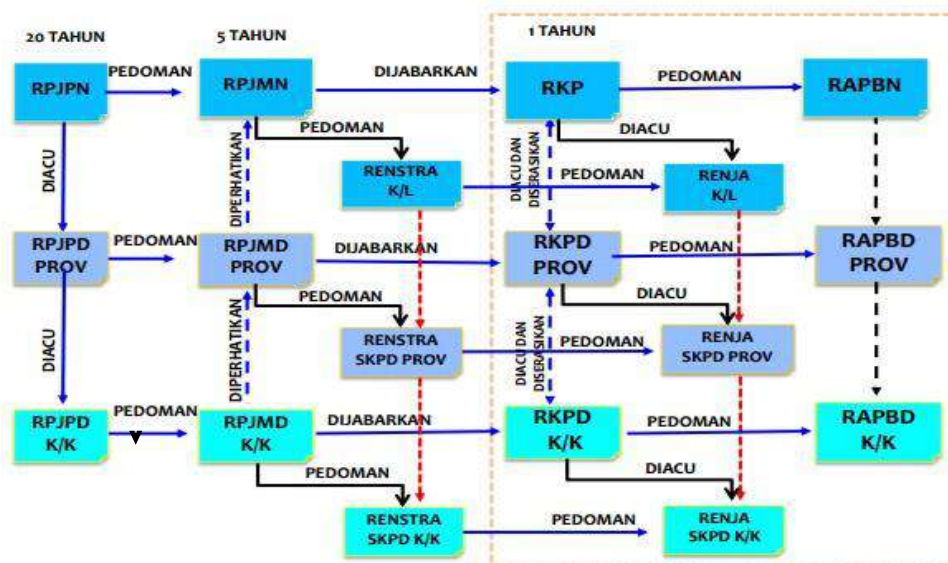
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5290);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2045;

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 123);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Serang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam proses penyusunannya seperti RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045, dan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011–2031. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

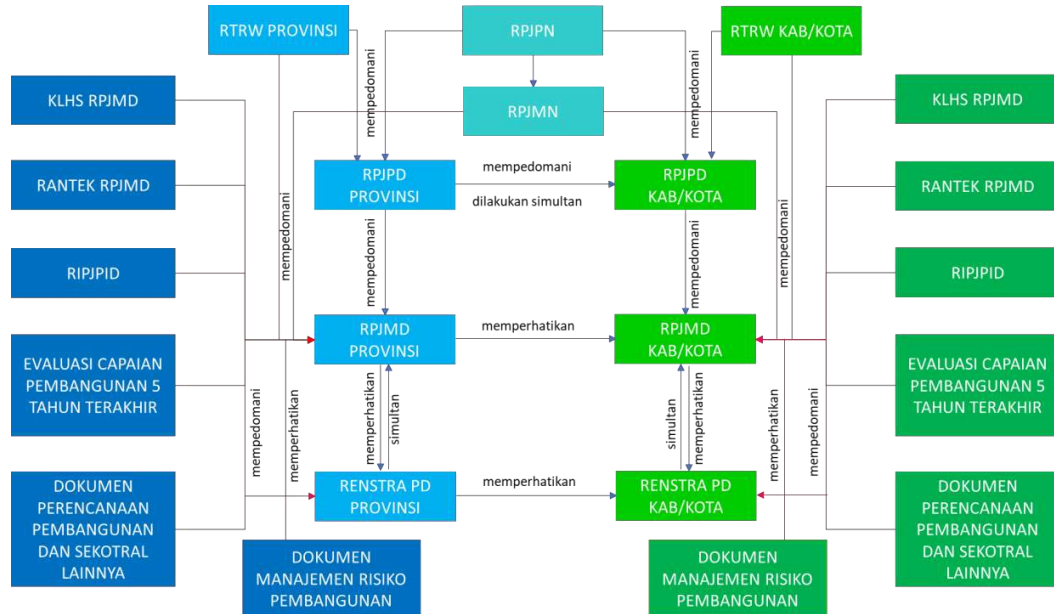
Gambar 1.3. 1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 juga memperhatikan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025–2029, Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Daerah (RIPJPD) Tahun 2025–2029, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable*

Development Goals (SDGs) sehingga substansi pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan tersebut dapat selaras menjadi masukan muatan dalam penyusunan RPJMD.

Gambar 1.3. 2
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Serang

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari tahap kesatu RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045. Berdasarkan hal tersebut, sasaran pokok yang akan diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berbudaya;
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif;
3. Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman;
4. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif;
5. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari risiko kerentanan sosial;
6. Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas;
7. Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif, dan tangguh.

Sasaran pokok tahap kesatu RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 dijadikan acuan penyusunan isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Isu strategis dari rancangan teknokratis ini dijadikan referensi dalam penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025–2029, setelah diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. 1
Hubungan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD
Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

RPJPD TAHUN 2025–2045	RPJMD TAHUN 2025–2029
VISI	
KABUPATEN SERANG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN AGAMIS	TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA
MISI	
1. Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3. Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan
4. Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima
5. Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang

1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap visi dan misi asti cita presiden yang dituangkan ke dalam prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Analisis visi dan misi asti cita presiden yang dituangkan ke dalam prioritas nasional diintegrasikan dengan isu yang diusung oleh Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan RPJMD Kabupaten Serang. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. 2
Hubungan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Serang
Tahun 2025-2029

RPJMN TAHUN 2025–2029	RPJMD TAHUN 2025–2029
VISI	
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA
MISI	
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM)	6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Serang Dengan RPJMD Provinsi Banten

Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang juga memperhatikan RPJMD Provinsi Banten terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, dan indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Serang. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025 – 2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. 3
Hubungan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

No	RPJMD BANTEN 2025–2029	RPJMD TAHUN 2025–2029
VISI		
1	BANTEN MAJU, ADIL, MERATA TIDAK KORUPSI	TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA
MISI		
1	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima (M-5)
		Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang (M-6)
2	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, unggul, dan Potensial	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah (M-2)
		Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan (M-3)
		Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan (M-4)
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan (M-1)
4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah (M-2)
5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima (M-5)

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Serang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 berpedoman pada RTRW Kabupaten Serang tahun 2011–2031 sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Kabupaten Serang, baik dalam rencana struktur maupun pola ruang. Keselarasan hubungan antara RPJMD dengan RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi pemanfaatan ruangnya. Dengan demikian tujuan pembangunan akan tercapai, kesenjangan wilayah berkurang tetapi tetap sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan, sehingga akan terwujud keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. RTRW Kabupaten Serang mengamanatkan hal-hal yang harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah dan sektoral sebagai berikut:

1. Menynergikan keterpaduan pengembangan wilayah dengan daerah sekitar;
2. Pengembangan daerah yang produktif melalui peningkatan sediaan ruang untuk pembangunan (investasi), pembangunan sarana-prasarana daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar (papan/rumah). Kabupaten Serang dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 pada Pasal 40 telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
3. Pengembangan kota yang nyaman melalui penyediaan area terbuka sebesar 20% dari luas kota sebagai RTH; dan
4. Mengakomodir kebijakan strategis nasional (sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025).

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan KLHS RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 merupakan upaya strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, proses pembangunan ini juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, penyusunan RPJMD membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai panduan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS memberikan arahan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab, sehingga dampak negatif pembangunan dapat diminimalkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Serang memastikan bahwa RPJMD 2025–2029 telah mempertimbangkan indikator TPB yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta tata kelola kelembagaan yang tersusun dalam KLHS RPJMD 2025–2029. KLHS RPJMD juga bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah agar sejalan dengan amanat peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjaga keberlanjutan

sumber daya alam untuk generasi saat ini dan masa depan. Dengan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup, sekaligus mendukung pencapaian target *SDGs* secara terukur dan berkelanjutan.

1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.7 Hubungan antara RPJMD dengan RKPd Kabupaten Serang

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPd) sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan yang didalamnya memuat penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPd juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPd. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 juga digunakan untuk mengakomodir penyusunan Perubahan RKPd Kabupaten Serang Tahun 2025 dan RKPd Kabupaten Serang Tahun 2026 yang telah dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025- 2029.

1.3.8 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah pusat dan dokumen perencanaan multi-sektoral, antara lain *SDGs*, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Serang, dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia industri dan dunia usaha dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang secara berkesinambungan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2025-2029
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Serang

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB ini juga memuat pencapaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang periode RPJMD sebelumnya, realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029.

BAB ini juga menguraikan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan, serta tantangan nasional, tantangan global, dan isu strategis Kepala Daerah. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan perumusan isu strategis daerah yang akan diselesaikan melalui RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang menguraikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025–2029 disertai indikator kinerja dan targetnya, yang digunakan untuk menjawab isu strategis daerah selama periode RPJMD Tahun 2025–2029. Selain itu, BAB ini juga memuat strategi dan arah kebijakan guna lebih memfokuskan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta arah pengembangan wilayah periode Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, serta Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, BAB ini juga memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, BAB ini juga memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi menggambarkan aspek kondisi geografis wilayah pemerintah daerah Kabupaten Serang. Aspek geografi dari suatu daerah juga memiliki peran penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut. Memahami karakteristik geografis suatu daerah penting dalam perencanaan pembangunan, manajemen sumber daya alam, dan penanganan masalah lingkungan.

Aspek demografi dari suatu daerah mengacu pada karakteristik penduduk di wilayah tersebut. mencakup berbagai variabel yang mempengaruhi ukuran, komposisi, dan distribusi populasi. Pemahaman demografi pada suatu daerah penting dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Serang terletak di ujung barat Pulau Jawa pada koordinat antara 5°50' - 6°21' Lintang Selatan, serta 105°0' - 106°22' Bujur Timur dan memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa.

Gambar 2.1. 1
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

Secara geografis Kabupaten Serang berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Serang di sebelah Utara, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang di sebelah Selatan, Kota Cilegon dan Selat Sunda di sebelah Barat, dan Kabupaten Tangerang di sebelah Timur. Wilayahnya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke barat yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Serang memiliki seluas 1.469,92 km². Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan luas sebesar 123,092 km² dan luas wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bandung dengan luas wilayah sebesar 25,786 km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa
1.	Cinangka	Cinangka	123,092	14
2.	Padarincang	Padarincang	97,636	14
3.	Ciomas	Sukadana	56,614	11
4.	Pabuaran	Pasanggrahan	40,075	8
5.	Gunungsari	Gunungsari	53,435	7
6.	Baros	Baros	36,069	14
7.	Petir	Mekarbaru	49,223	15
8.	Tunjung Teja	Tunjung Jaya	42,399	9
9.	Cikeusal	Cikeusal	56,286	17
10.	Pamarayan	Pamarayan	45,021	10
11.	Bandung	Bandung	25,786	8
12.	Jawilan	Jawilan	44,947	9
13.	Kopo	Kopo	36,514	10
14.	Cikande	Cikande	49,052	13
15.	Kibin	Ciagel	30,577	9
16.	Kragilan	Kragilan	38,049	12
17.	Waringinkurung	Waringinkurung	46,325	11
18.	Mancak	Labuan	97,939	14
19.	Anyar	Anyar	67,903	12
20.	Bojonegara	Bojonegara	36,974	11
21.	Pulo Ampel	Sumuranja	45,985	9
22.	Kramatwatu	Kramatwatu	56,556	15
23.	Ciruas	Citerep	33,621	15
24.	Pontang	Pontang	60,394	11
25.	Lebak Wangi	Teras Bendung	34,743	10
26.	Carenang	Panenjoan	29,071	8
27.	Binuang	Binuang	28,724	7
28.	Tirtayasa	Tirtayasa	59,697	14
29.	Tanara	Cerukcuk	47,213	9
Jumlah			1.469,92	326

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Letak geografis Kabupaten Serang yang berbatasan dengan wilayah perairan Selat Sunda dan Laut Jawa merupakan posisi yang strategis dalam konteks pelayaran dan perdagangan internasional. Kawasan perairan Selat Sunda dan Laut Jawa merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Jalur ALKI I difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, dan sebaliknya serta dari Selat Singapura melalui Laut Natuna atau sebaliknya.

Sementara itu dalam simpul jaringan transportasi Trans Jawa – Pulau Sumatera, Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dilalui Jalan Tol Tangerang-Merak yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa serta dilalui oleh jalur kereta api. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak ± 70 km dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), yang berpotensi menjadi daerah pemasok kebutuhan kawasan metropolitan tersebut. Dari sisi kegiatan ekonomi, Kabupaten Serang memiliki beberapa sektor kegiatan yang berkembang dan menjadi pemasok kebutuhan untuk wilayah dalam dan luar negeri. Kegiatan yang berkembang tersebut antara lain kegiatan industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.

A. Kondisi Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian antara 0 - 1.778 m dari permukaan laut (mdpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang, sehingga secara topografi tidak akan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Ketinggian tertinggi di wilayah Kabupaten Serang terletak di Puncak Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, Kasemen, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, Serang hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

Penyebaran wilayah perbukitan berada di wilayah bagian barat yang menyebar dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 100 m. Sedangkan satuan pegunungan menempati bagian selatan dan ujung utara sebelah barat. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Serang didominasi oleh ketinggian kurang dari 500 mdpl yang meliputi kurang lebih 97,5% dari luas wilayah dan tersebar pada semua wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Ciomas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Serang memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Serang berada pada area dataran rendah.

Tabel 2.1. 1
Ketinggian Wilayah Kabupaten Serang

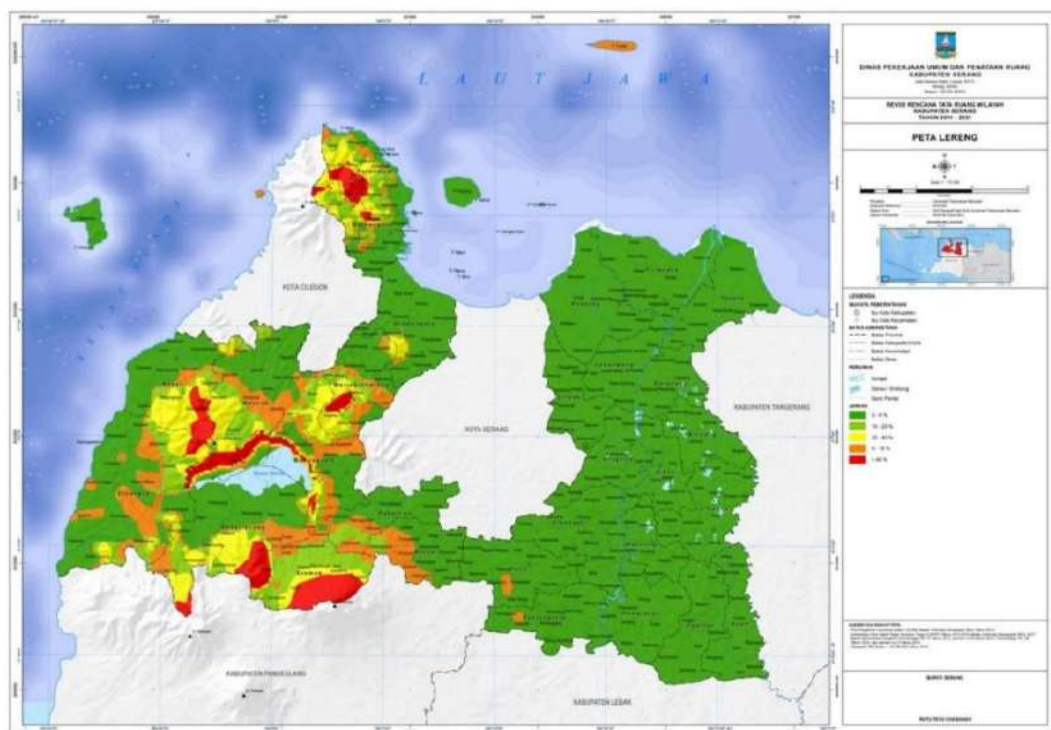
No.	Ketinggian	Luasan	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0-59 mdpl	87.511,44	59,45
2.	59-187 mdpl	34.892,40	23,70

No.	Ketinggian	Luasan	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
3.	187-393 mdpl	17.025,40	11,57
4.	393-677 mdpl	6.024,16	4,09
5.	677-1040 mdpl	1.210,15	0,82
6.	1040-1722 mdpl	550,45	0,37
Jumlah		147.214,00	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

Kemiringan lereng merupakan tingkat kemiringan yang diperoleh dari beda tinggi permukaan tanah pada jarak antara dua buah titik. Pentingnya kemiringan lereng ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan lahan, baik ditinjau dari kendala lingkungan maupun dampaknya.

Gambar 2.1. 2
Peta Kelas Lereng Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2025

Kemiringan tanah (lereng) selain mempengaruhi bentuk wilayah, juga akan mempengaruhi tinggi perkembangan erosi. Jika dilihat dari kelas lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Serang merupakan wilayah dengan kelas lereng 0-2% dengan luas wilayah sebesar 87.511,14 ha atau lebih dari 59% luas total wilayah Kabupaten Serang.

Tabel 2.1. 2
Kemiringan Lahan Kabupaten Serang

No.	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0 - 2%	87.511,14	59,64
2.	2 - 15%	37.939,27	25,86
3.	15 - 25%	10.002,89	6,82
4.	25 - 40%	8.876,42	6,05
5.	>40%	2.405,29	1,64
Jumlah		146.735,01	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011- 2031

B. Kondisi Geologi

Secara umum, sebagian besar wilayah Kabupaten Serang terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai utara dan bagian timur Kabupaten Serang. Jenis batuan dan struktur geologi tersebut dibagi dalam beberapa kelompok antara lain; (1) batuan gunung api, (2) batuan terobosan, (3) endapan permukaan, dan (4) struktur geologi.

Secara litologi, jenis batuan yang paling mendominasi di Kabupaten Serang adalah tuf, tuf batu apung dan batu pasir tufaan (endapan vulkanik) yang mencapai 29,58% dari total luas Kabupaten Serang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

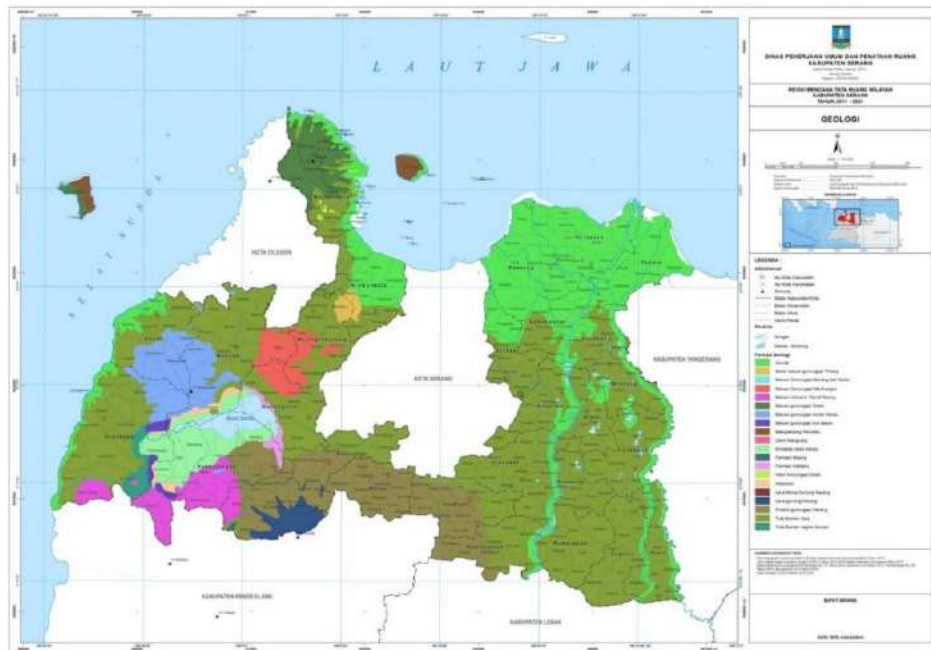
Tabel 2.1. 3
Jenis dan Luas Sebaran Batuan Kabupaten Serang

No	Litologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Basal	4.446	3,03
2.	Breksi vulkanik, lahar, lava, dan tufa	13.010	8,87
3.	Lava andesit dan breksi vulkanik	20.323	13,85
4.	Lempung lanauan, lempung pasiran, lempung organik, mengandung pecahan cangkang kerang (endapan rawa)	8.340	5,68
5.	Lempung, lempung pasiran (endapan sungai dan limpas banjir)	13.859	9,44
6.	Lempung, pasir dan kerikil (endapan sungai dan limpas banjir)	9.155	6,24
7.	Lumpur, lempung, lanau, pasir dan kerikil (endapan Rawa Danau)	6.651	4,53
8.	Pasir halus-sedang, sedikit lanau dan pecahan cangkang kerang (endapan pantai)	3.392	2,31
9.	Tuf, tuf batu apung dan batu pasir tufaan (endapan vulkanik)	43.411	29,58
10.	Tuf, tuf batu apung, batu pasir tufaan dan breksi tufaan (endapan vulkanik)	24.148	16,46
Jumlah		146.735	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Serang, DPUPR Kabupaten Serang, 2023

Jenis tanah di Kabupaten Serang sebagian besar berjenis Aluvial, dengan luas sebarannya kurang lebih 107.851,50 ha atau 73,50% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan, dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah ini banyak mengandung pasir dan liat, tidak banyak mengandung unsur-unsur zat hara. Ciri-cirinya berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit lepas-lepas dan peka terhadap erosi. Kadar kesuburannya sedang hingga tinggi tergantung bagian induk dan iklim.

Gambar 2.1. 3
Peta Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2025

Tanah aluvial ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan. Selain tanah alluvial, Kabupaten Serang juga memiliki jenis tanah lain seperti latosol, mediteran dan regosol, untuk lebih jelasnya mengenai luas masing-masing jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

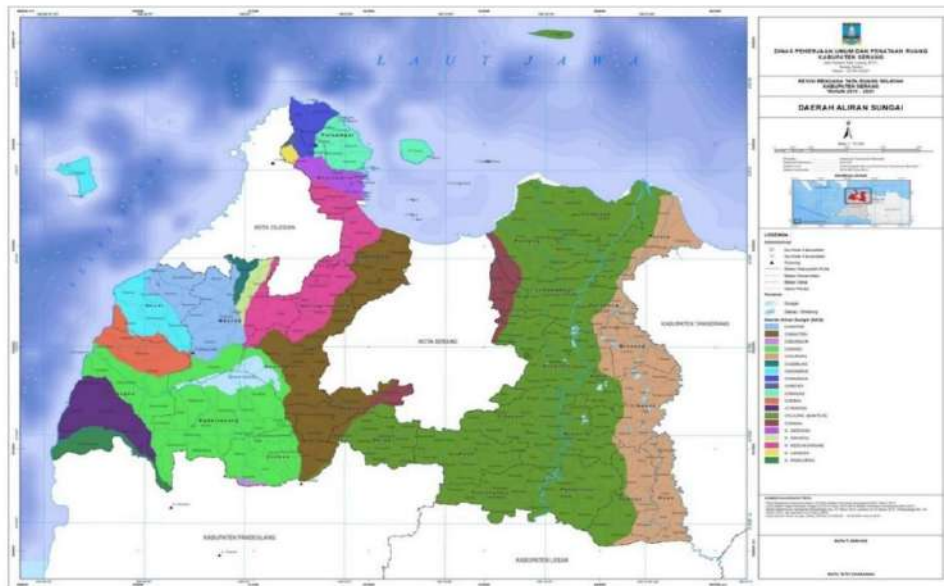
Tabel 2.1. 4
Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	107.851,50	73,50
2	Latosol	25.765,67	17,56
3	Mediteran	5,77	0,00
4	Regosol	13.112,07	8,94
Jumlah		146.735,01	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

C. Kondisi Hidrologi

Gambar 2.1. 4
Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2025

Kondisi Hidrologi di wilayah Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari DAS Cidurian, DAS Ciujung, DAS Cidanau dan DAS Cibanten. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang ada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 km). Selain itu terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai), yakni pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan.

Di Kabupaten Serang hanya ada SWS Ciujung-Ciliman, yang terdiri dari DAS-DAS Cidurian, Ciujung, dan Cibanten. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat, Selat Sunda. Di sebelah selatannya terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yakni pada umumnya ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten.

Gambar 2.1. 5 Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten Serang



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Serang, DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% merupakan daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (peneplainisasi) dan 10% berupa dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Gambar 2.1. 6
Peta Sumber Daya Air



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2025

1) Air Permukaan dan Penyebarannya

Seperti telah disebutkan, Kabupaten Serang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang keduanya mengalir ke arah utara dan bermuara di Laut Jawa. Selain itu juga terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Cidanau dan Sungai Anyar serta beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara di Selat Sunda.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang.

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai ini mengalir ke arah barat

dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT Krakatau Steel yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung.

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk spring belt pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering.

2) Air Tanah dan Penyebarannya

Air tanah merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya, baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) air tanahnya, sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah tersebut berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air tanah (groundwater basin).

Kondisi air tanah di Kabupaten Serang umumnya dangkal, yaitu antara 0,5 m – 7 m dari permukaan tanah dan cenderung mengikuti pola permukaan tanah. Air tanah di Kabupaten Serang tersedia dalam jumlah yang relatif cukup dan terdapat dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- Akuifer menerus dalam bentuk sarang, termasuk air tanah dalam kondisi tertekan dan setengah tertekan;
- Akuifer tidak menerus dalam batuan berkekar, misalnya kekar dalam lava;
- Kombinasi akuifer menerus dan tidak menerus.

Pada umumnya air tanah bebas di daerah dataran mempunyai kedalaman antara 0,5 m – 3,0 m; sedangkan di daerah perbukitan kedalamannya ± 15 m. Penyebaran sumber air tanah ini terdapat di bagian tenggara dimana air tanah membentuk mata air di lereng Gunung Karang.

Tabel 2.1. 5
Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Serang

CAT		LINGKUP WILAYAH			Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (Juta m ³ /Th)	
No.	Nama	Luas (km ²)	Kab/Kota	Provinsi		Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)
1.	Rawadanau	375	Kab. Serang & Kab. Pandeglang.	Banten	- Endapan Rawadanau, terutama pasir dan kerikil. - Tuf Banten Atas, terdiri atas tuf batu apung, batu pasir tufan, tuf hablur, dan tuf kaca. - Tuf Banten Bawah, terdiri atas tuf breksi, tuf batu apung, tuf lapili, dan tuf pasiran. - Batuan gunung api G. Karang, terdiri atas breksi, lava, tuf, dan lahar. - Batuan gunung api Danau tua, terdiri atas lava andesit-basal, breksi gunung api, dan tuf.	180	13
2.	Serang-Tangerang	2.822	Kota Serang; Kab. Serang; Kota Cilegon; Kab. Lebak; Kab. Pandeglang;	Banten & Jabar	- Endapan pematang pantai, terdiri atas pasir halus-kasar. - Endapan sungai, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal. - Endapan kipas gunung api, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal.	1.075	18

CAT		LINGKUP WILAYAH		Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (Juta m ³ /Th)	
No.	Nama	Luas (km ²)	Kab/Kota	Provinsi	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)
			Kota Tangerang; Kab. Tangerang; Kab. Bogor.			
				▪ Tuf Banten, terdiri atas tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan. ▪ Batuan gunung api G. Gede dan G. Karang, terdiri atas lava, breksi, dan lahar. ▪ Foramsi (F.) Bojong, terutama disusun oleh batu pasir tufan.		

Sumber: Peta Cekungan Air tanah P. Jawa dan P. Madura, Badan Geologi, 2023

D. Kondisi Klimatologi

1) Tipe Iklim

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data yang tersedia selama 5 tahun terakhir (2020-2024) sesuai metoda klasifikasi iklim oleh Schmidth-Fergusson, di wilayah Kabupaten Serang secara umum termasuk dalam klasifikasi beriklim C (agak basah). Namun jika dipilah lebih spesifik secara kewilayahan kemungkinan di Kabupaten Serang mempunyai iklim yang tidak sama/seragam, karena semakin ke arah hulu (pegunungan/selatan) curah hujan dan jumlah hari hujan agaknya semakin tinggi dan lebih sering dibandingkan dengan wilayah bagian utara dan barat yang berada pada kawasan pesisir karena jumlah curah hujan dan hari hujan cenderung semakin rendah dan jarang.

2) Curah Hujan

Jumlah hari hujan di Kabupaten Serang menunjukkan intensitas yang cenderung tinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2020 hingga 2024, meskipun pada tahun 2023 menunjukkan penurunan intensitas jumlah hari hujan. Pada tahun 2020, wilayah Kabupaten Serang mengalami hujan selama 156 hari atau rata-rata 13 hari per bulan terjadi hujan. Di tahun tersebut, pada bulan September hujan yang terjadi tidak dapat diukur sehingga datanya tidak ada pada bulan tersebut. Pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2021 terjadi hujan sebanyak 229 hari atau rata-rata 19 hari per bulan terjadi hujan dan pada tahun 2022 terjadi hujan sebanyak 235 hari atau rata-rata 19 hari per bulan terjadi hujan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan November pada tahun 2021 dan bulan Januari pada tahun 2023. Pada tahun 2023, hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang mengalami penurunan intensitas yang signifikan dengan intensitas terjadi hujan sebanyak 176 hari atau rata-rata 14 hari per bulan terjadi hujan. Penurunan intensitas hujan yang terjadi pada tahun tersebut terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Data Jumlah hari hujan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 6
Jumlah Hari Hujan Di Kabupaten Serang (Hari) Tahun 2020 – 2024

Bulan	Tahun				Jumlah Total	Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023		
Januari	25	24	24	27	100	25,0
Februari	22	24	23	24	93	23,3
Maret	25	25	21	18	89	22,3
April	22	17	20	12	71	17,8
Mei	15	14	24	24	77	19,3
Juni	6	21	22	22	71	17,8
Juli	4	10	11	9	34	8,5
Agustus	4	13	13	8	38	9,5
September	0	18	16	3	37	9,3
Oktober	3	12	19	3	37	9,3
November	11	26	21	14	72	18,0
Desember	19	25	21	12	77	19,3
Jumlah Total	156	229	235	176	796	199,0
Rata-Rata	13,0	19,1	19,6	14,7	66,3	16,58

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2021-2024, BPS Kabupaten Serang

Jika dilihat dari curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan jumlah curah hujan sebesar 6.208,5 mm per tahun atau rata-rata curah hujan 1.552,1 mm per tahun dengan jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1.833,70 mm per tahun dan intensitas curah hujan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1.262,50 mm per tahun. Sementara itu, jumlah curah hujan perbulan juga sangat bervariasi dari yang terendah sebesar 133,4 mm per tahun atau rata-rata 33,4 mm per tahun pada bulan Agustus dan yang tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 895,4 mm per tahun atau rata-rata 223,9 mm per tahun.

Tabel 2.1. 7
Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Serang (mm/tahun) Tahun 2020 – 2024

Bulan	Tahun				Jumlah Total	Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023		
Januari	332,5	198,7	109,1	148,7	789,0	197,3
Februari	180,3	283,2	121	310,9	895,4	223,9
Maret	204,3	120,4	289	276,5	890,2	222,6
April	150,7	234	184,5	130,1	699,3	174,8
Mei	102,5	49,9	191,6	69,1	413,1	103,3
Juni	10,2	127,6	114,6	151,3	403,7	100,9
Juli	14,4	45,3	43,1	89	191,8	48,0
Agustus	1	31,3	101,1	0	133,4	33,4
September	0	207,9	56,6	0,5	265,0	66,3
Oktober	11	90,5	200,4	0	301,9	75,5
November	75,4	209,2	156,7	138,2	579,5	144,9

Bulan	Tahun				Jumlah Total	Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023		
Desember	180,2	235,7	152,5	77,8	646,2	161,6
Jumlah Total	1.262,50	1.833,70	1.720,20	1.392,10	6.208,5	1.552,1
Rata-Rata	105,2	152,8	143,4	116,0	517,4	129,3

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2021-2024, BPS Kabupaten Serang

Dalam pengklasifikasian iklim dikenal Bulan Basah, Bulan Lembab dan Bulan Kering. Dalam penilaian/penghitungan tipologi iklim yang digunakan biasanya adalah jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering. Sesuai dengan data yang ada, jumlah Bulan Kering terkecil terjadi pada tahun 2022 sebanyak 2 bulan sedangkan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 5 bulan. Untuk jumlah Bulan Basah, paling banyak terjadi pada tahun 2022 sejumlah 10 bulan dan terkecil terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah Bulan Basah sebanyak 6 bulan. Untuk lebih lengkapnya, data bulan basah dan bulan kering di Kabupaten Serang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 8
Jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering di Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

Tahun	Bulan Kering	Bulan Basah
2020	5	6
2021	3	8
2022	2	10
2023	6	6
2024	6	6

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2021-2024, BPS Kabupaten Serang

3) Suhu Udara

Parameter lain penyusun iklim adalah suhu udara. Rata-rata suhu udara di wilayah Kabupaten Serang selama tahun 2020 hingga 2024 adalah sebesar 27,6°C dengan rentang rata-rata suhu antara 27,3°C – 28,0°C. Data rentang rata-rata suhu udara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. 9 Suhu Udara Di Kabupaten Serang (°C) Tahun 2020 – 2024

Bulan	Tahun					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Januari	27,6	26,9	27,5	27,3	27,4	27,325
Februari	27,6	26,9	27,1	27,2	28,9	27,2
Maret	27,5	27,4	27,5	27,5	27,98	27,475
April	27,8	27,4	27,9	28,0	28,61	27,775
Mei	28,1	28,3	27,7	28,5	28,43	28,15
Juni	27,8	26,1	26,7	27,6	28,05	27,05
Juli	27,5	27,2	27,5	27,2	27,11	27,35
Agustus	27,5	27,3	27,4	27,5	27,98	27,425
September	27,8	26,8	27,5	28,1	28,3	27,55
Oktober	27,8	28	27,5	29,3	28,9	28,15
November	27,8	27,4	27,6	28,7	28,22	27,875
Desember	27,1	27,5	27,3	28,7	27,77	27,65
Rata-Rata	27,7	27,3	27,4	28,0	28,14	27,6

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2024, BPS

4) Kelembaban Udara

Parameter lain penyusun iklim adalah kelembaban. Rata-rata tingkat kelembaban udara di Kabupaten Serang adalah sebesar 80% selama tahun 2020 hingga 2024. Data tentang tingkat kelembaban udara di Kabupaten Serang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. 10
Tingkat Kelembaban Di Kabupaten Serang (%) Tahun 2020 – 2024

Bulan	Tahun					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Januari	84	83	80	80	84,87	82,37
Februari	84	85	82	82	83,72	83,34
Maret	84	82	81	82	86,21	83,04
April	84	82	79	79	85,17	81,83
Mei	83	81	83	79	85,42	82,28
Juni	82	81	83	82	83,4	82,28
Juli	79	79	80	80	83,03	80,21
Agustus	79	79	80	77	77,53	78,51
September	77	76	79	70	75,99	75,60
Oktober	79	78	79	71	74,02	76,20
November	80	79	79	78	81,53	79,51
Desember	80	82	80	75	81,84	79,77
Rata-Rata	81,3	80,6	80,4	77,9	81,89	80,42

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2024 BPS

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Potensi Lahan Produktif

Wilayah produktif adalah wilayah dengan potensi lahan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai lahan penanaman komoditas pertanian maupun tanaman yang memiliki nilai ekonomis baik berupa tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Lahan produktif ini berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sumber pangan maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain fungsi tersebut, saat ini di beberapa daerah lahan pertanian juga dimanfaatkan sebagai tempat dan tujuan wisata minat khusus.

Pada tahun 2015, potensi lahan produktif di Kabupaten Serang adalah seluas 120.658,69 ha atau sebesar 82,23% dari luas Kabupaten Serang. Dari keseluruhan jumlah luas lahan produktif tersebut sekitar 90,50% atau seluas 109.195,69 ha adalah lahan produktif yang telah diusahakan/digarap. Lahan produktif yang telah diusahakan tersebut berupa perkebunan, kebun campuran, lading/tegalan, sawah dan tambak.

Komposisi terbesar dari lahan produktif yang telah diusahakan tersebut berupa sawah dengan luas mencapai 60.628,31 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 59.308,16 ha dan sawah tadah hujan sebesar 1.320,15 ha. Sementara itu potensi lahan produktif lainnya yang belum diusahakan adalah sebesar 11.463 ha yang berupa rawa, padang rumput, semak belukar dan tanah kosong. Untuk lebih lengkapnya data potensi lahan produktif di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. 11
Potensi Lahan Produktif Di Kabupaten Serang Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan		Rasio Terhadap Luas Kabupaten (%)
		(Ha)	(%)	
A.	Lahan Diusahakan	109.195,69	90,50	74,42
1	Perkebunan Besar	401,41	0,33	0,27
2	Kebun Campuran	33.127,49	27,46	22,58
3	Ladang/Tegalan	7.803,94	6,47	5,32
4	Sawah Irigasi	59.308,16	49,15	40,42
5	Sawah Tadah Hujan	1.320,15	1,09	0,90
6	Tambak	7.234,54	6,00	4,93
B.	Lahan Belum Diusahakan	11.463,00	9,50	7,81
7	Rawa	1.481,16	1,23	1,01
8	Padang Rumput	2.077,15	1,72	1,42
9	Semak Belukar	6.491,89	5,38	4,42
10	Tanah Kosong	1.412,80	1,17	0,96
Luas Keseluruhan (A + B)		120.658,69	100,00	82,23

Sumber: Dokumen Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Serang 2011 – 2031, (diolah)

Berdasarkan pertimbangan terkait fungsi strategis lahan produktif bagi suatu wilayah maka dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031 ditetapkan rencana peruntukan untuk mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif yang ada di Kabupaten Serang. Kawasan tersebut meliputi kawasan peruntukan hutan rakyat sebesar 5.540 ha, kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 32.229,36 ha, kawasan peruntukan perikanan seluas 224 ha dan kawasan perkebunan seluas 24.973 ha.

2.1.2.2 Kondisi dan Potensi Kawasan Pesisir

1) Kawasan Pesisir

Kawasan atau daerah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dengan kata lain, kawasan pesisir ini mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan (laut). Untuk wilayah daratan, batas kawasan pesisir adalah wilayah administrasi kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan (laut).

Secara lebih lengkap lingkup wilayah dan luas kecamatan yang termasuk kawasan pesisir di Kabupaten Serang disajikan dalam tabel Luas Wilayah Administrasi Kawasan Pesisir Kabupaten Serang.

Tabel 2.1. 12
Luas Wilayah Administrasi Kawasan Pesisir Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	
			km ²	%
1.	Cinangka	Cinangka	111,47	24,69
2.	Anyar	Anyar	56,81	12,58
3.	Pulo Ampel	Sumuranja	32,56	7,21
4.	Bojonegara	Bojonegara	30,30	6,71
5.	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	10,76
6.	Pontang	Pontang	58,09	12,86

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	
			km ²	%
7.	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	14,27
8.	Tanara	Cerukcuk	49,30	10,92
Jumlah			451,58	100,00

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2024

Potensi sumber daya yang ada dan telah berkembang di kawasan pesisir meliputi sumber daya kelautan dan perikanan, daya tarik/obyek wisata, jasa kepelabuhanan dan sektor industri. Kegiatan budidaya perikanan/tambak banyak dikembangkan diwilayah Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Pengembangan industri dan jasa kepelabuhanan berkembang di kawasan pesisir Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara dan Pulo Ampel, sedangkan kegiatan wisata banyak berkembang di kawasan Pantai Barat Kabupaten Serang yang meliputi kawasan Anyer dan Cinangka.

2) Daerah Kepulauan

Wilayah Kabupaten Serang memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar ke arah barat dan utara yang terdapat pada enam kecamatan di pesisir yaitu Kecamatan Anyer, Cinangka, Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang dan Tirtayasa. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki karakteristik dan luasan yang berbeda, yang umumnya pembentukannya berasal dari pulau-pulau karang yang kemudian ditumbuhi oleh vegetasi pantai dan perairan. Salah satu potensi yang sudah dimanfaatkan dari perairan sekitar pulau-pulau ini adalah sebagai area penangkapan ikan karena perairan pulau-pulau ini merupakan tempat berkembang biak ikan-ikan. Menurut informasi para nelayan, hampir semua pulau-pulau kecil yang ada memiliki cukup banyak ketersediaan ikan, sehingga pulau-pulau ini merupakan daerah fishing ground para nelayan. Di samping potensi ikan, pulau-pulau ini memiliki vegetasi pantai yang masih alami dimana menjadi tempat tinggal burung-burung.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder bahwa pada saat ini ada tiga pulau sudah dilakukan pemanfaatannya, baik untuk hunian masyarakat maupun untuk pengembangan pariwisata serta untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya yaitu Pulau Sangiang, Pulau Panjang dan Pulau Tunda. Pulau-pulau kecil ini memiliki potensi sumber daya unggulan, di samping sebagai daerah konservasi, juga memiliki potensi wisata bahari, wisata lingkungan (ecotourism), perikanan pesisir dan perikanan laut.

Tabel 2.1. 13
Sebaran Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Desa	Nama Pulau	Estimasi Luas (Ha)	Keterangan
1.	Anyer	Cikoneng	Sangiang	781,45	Berpenghuni
2.	Cinangka	Cinangka	• Karang Cawene	4,38	Tidak Berpenghuni
			• Karang Parejakah	3,50	Tidak Berpenghuni
3.	Pulo Ampel	Salira	• Salira	1,49	Tidak Berpenghuni
			• Kalih Utara	3,5	Tidak Berpenghuni
		Pulo Ampel	• Kalih Selatan	2,8	Tidak Berpenghuni
		Pulo Panjang	• Pulau Panjang	745,61	Berpenghuni
			• Semut	0,35	Tidak Berpenghuni
4.	Bojonegara	Margagiri	• Tarahan	8,75	Tidak Berpenghuni
		Bojonegara	• Kemanisan	2,29	Tidak Berpenghuni

No.	Kecamatan	Desa	Nama Pulau	Estimasi Luas (Ha)	Keterangan
			• Cikantung	0,38	Tidak Berpenghuni
5.	Pontang	Susukan	• Pamujan Besar	15,46	Tidak Berpenghuni
		Domas	• Pamujan Kecil	1,66	Tidak Berpenghuni
6.	Tirtayasa	Wargasara	• Tunda	222,86	Berpenghuni
			• Kubur	3,10	Tidak Berpenghuni
			• Pisang	3,10	Tidak Berpenghuni
			• Lima	3,28	Tidak Berpenghuni

Sumber: RZWP3K Kabupaten Serang, 2023

2.1.2.3 Potensi Geologi

Sumber daya mineral merupakan modal dasar yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Namun demikian perlu diingat, bahwa pemanfaatan dan pengembangan sumber daya mineral dengan kapasitas yang besar merupakan usaha padat modal dan berjangka panjang. Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Serang belum banyak diketahui dengan pasti penyebarannya, kualitas dan kuantitas cadangannya. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Serang termasuk potensi jenis bahan galian yang terdiri dari:

1) Andesit

Andesit merupakan batuan beku luar, termasuk batuan yang bersifat intermediate dan berbutir halus sampai sedang. Bahan galian ini dijumpai di Gunung Karang dan Gunung Pinang. Penyebaran andesit di Gunung Karang, seluas 7.625 ha dengan potensi deposit terindikasi sekitar 110.781.872.000 m³. Di Gunung Pinang seluas 1.625 Ha dengan potensi deposit diperkirakan sebanyak 412.643.614 m³. Dari jumlah cadangan tersebut memperlihatkan bahwa bahan galian tersebut cukup potensial untuk diusahakan.

2) Diorit

Diorit merupakan batuan beku dalam, termasuk batuan yang bersifat intermediate dan berbutir kasar. Kenampakan di lapangan berupa hasil pembekuan magma. Penyebaran diorit di Gunung Karang seluas 125 ha, dengan deposit cadangan diperkirakan 24.920.330 m³. Sedang di wilayah Baros seluas 251 ha, dengan jumlah deposit diperkirakan 45.677.527 m³.

3) Basalt

Basalt merupakan batuan beku luar yang terbentuk akibat pembekuan magma dan sebagian besar terbentuk sebagai lava. Penyebarannya dapat dijumpai di Gunung Pinang sebelah barat Kramatwatu. Penyebaran basalt di Gunung Pinang meliputi seluas 775 ha, dengan perkiraan deposit sebanyak 412.643.614 m³. Bahan galian ini berada pada kawasan hutan produksi yang akan diubah statusnya menjadi hutan lindung atau hutan wisata, sehingga tidak dapat diusahakan atau ditimbang. Kegunaan basalt dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti untuk bahan konstruksi bangunan maupun untuk ornamen.

4) Pasir Batu (Sirtu)

Batuan ini merupakan endapan aluvial yang berasal dari rombakan batuan yang berada di hulu sungai atau disekitarnya, tersusun dari berbagai jenis batuan, berukuran dari pasir, kerikil,

kerakal hingga bongkahan. Penyebaran sirtu di sepanjang Sungai Cidaun, Ciujung dan Anyer dengan luas penyebaran $\pm 4.843,75$ ha. Jumlah diperkirakan sebanyak 96.875.000 m³. Melihat bahwa daerah sempadan sungai merupakan wilayah lindung, sebaiknya penambangan/pemanfaatan bahan galian ini dilakukan secara tradisional sehingga tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Kegunaannya bahan ini sebagai bahan urugan dan bahan untuk campuran adukan beton atau bahan bangunan.

5) Batu Apung

Batu apung merupakan hasil letusan gunung berapi yang mengalami pendinginan secara mendadak. Bentuknya menyudut hingga menyudut tanggung. Penyebarannya ditemukan di bagian selatan Rawa Dano, antara Padarincang hingga Baros, sehingga lokasi ini mudah dicapai. Penyebaran batu apung di daerah ini cukup luas dan cadangannya sulit dihitung karena bercampur dengan mineral lain. Lokasi ini terletak di kawasan lindung sekitar Rawa Dano, sehingga sulit diusahakan secara besar-besaran. Kegunaan bahan galian ini untuk bahan abrasi dan bahan beton ringan.

Di sektor energi, potensi panas bumi cukup prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Serang, dimana hal tersebut terindikasi dengan adanya mata air panas (hotspring) di beberapa tempat. Panas bumi ini selain dapat dikembangkan untuk tujuan pariwisata juga dapat dikembangkan menjadi pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan dan merupakan sumber energi terbarukan sebagaimana yang telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Di wilayah Kabupaten Serang mata air panas terinventarisasi di sekitar kawasan Rawa Dano dan Batukuwung, Kecamatan Padarincang. Berdasarkan hasil penyelidikan terdahulu terindikasi potensi panas bumi sebesar kurang lebih 700 Mw, di daerah G. Karang dan kawasan Kaldera Danau Banten (Rawa Dano). Selain potensi panas bumi seperti yang telah disampaikan di atas, di wilayah Kabupaten Serang juga terdapat indikasi adanya potensi minyak bumi yang diidentifikasi sebagai Blok Banten dengan luas kurang lebih 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) km², meliputi perairan Laut Jawa di wilayah utara Kabupaten Serang dan perairan Selat Sunda di wilayah barat Kabupaten Serang.

2.1.2.4 Potensi Pertanian

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang ketersediaan energi dan protein serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Serang dikarenakan nilai produksinya setiap tahun mengalami peningkatan dan menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Serang. Potensi sektor pertanian di Kabupaten Serang terdiri dari sub sektor pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Potensi sektor ini pada dasarnya terdapat hampir di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

Tabel 2.1. 14
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Serang 2020–2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Komoditas Utama Padi dan Palawija						
-Padi Sawah	Ton	558.974	571.663	550.752	561,197	576.649
-Jagung	Ton	6.208	7.350	2.736	2,288	2.747
-Ubi Kayu	Ton	-		7.469	5,768	1353
-Ubi Jalar	Ton	2.298		2.847	2,712	728
-Kacang Tanah	Ton	947	1.632	1.066	697	405
-Kacang Kedelai	Ton	123	-	222	200	229
Hortikultura						
-Durian	Ton	19.033	8.322,94	11.308,43	21.364	350
-Sedap Malam	Tangkai	312.867	501.000	358.500	222.976	26.000
Sayuran						
-Bawang daun	Kuintal	503	787	788	463	13
-Bawang merah	Kuintal	11.617	9.888,35	10.550,50	2.828	118,92
-Bayam	Kuintal	19.934	19.778,70	8.112,40	3.539	188
-Cabe besar	Kuintal	-	7.797	4.755	1080	113
-Cabe rawit	Kuintal	10.031	9.431	7.648	3.241	288
-Jamur tiram	Kuintal	1.559	412	160	599	54
-Kacang panjang	Kuintal	21.273	24.880	21.715	6.020	208
-Kangkung	Kuintal	39.686	37.039	12.118	6.802	57
-Mentimun	Kuintal	32.966	29.085	22.123	11.496	298
-Melon	Kuintal	1.330	367	485	247	23
-Sawi	Kuintal	27.295	24.243	14.901	8.180	395
-Semangka	Kuintal	10.200	1.550	1.962	11.156	40
-Terong	Kuintal	10.925	9.961	8.188	4.879	37
-Tomat	Kuintal	4.900	2.732	3.584	1.272	6
-Buncis	Kuintal			23	60	-
Daging						
-Daging Sapi	Kg	829.152	475.209	462.852	493.502	1.948.134
-Daging Itik	Kg	854.574	853.741	1.904.882	1.989.582	9.698.381
-Daging kerbau	Kg	906.150	966.381	642.162	402.562	75.851

Sumber: DKPP Kabupaten Serang, 2025

Pada Tabel diatas terlihat bahwa produksi padi sawah cenderung meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 571.663 ton akan tetapi menurun di tahun 2022 menjadi sebesar 550.752 ton dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 576.649 ton. Hal tersebut seiring dengan luas tanam padi yang juga meningkat di tahun 2024 yaitu mencapai 106.265 hektar. Produksi padi serta luas tanam padi di tahun 2024 mencapai angka tertinggi selama periode 2020-2024.

Tabel 2.1. 15
Luas Tanam dan Luas Panen Pertanian (Hektar) Kabupaten Serang 2020 – 2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam Padi	Ha	102.651	104.134	100.938	97,573	106.265
Luas Panen Padi	Ha	101.079	99.137	99.534	96,926	101.403
Luas Tanam Jagung	Ha	1.185	1.800	772	576	775
Luas Panen Jagung	Ha	1.227	1.647	634	516	485
Luas Tanam Kedelai	Ha	135	-	257	236	204
Luas Panen Kedelai	Ha	117	-	211	174	208

Sumber: DKPP Kabupaen Serang, 2023

Pada Tabel diatas terlihat bahwa luas tanam mencerminkan rencana dan upaya penanaman, sedangkan luas panen mencerminkan realisasi atau hasil akhir dari upaya tersebut. Adanya risiko-risiko membuat hasil panen tidak selalu sesuai dengan rencana tanam seperti gagal panen, alih fungsi lahan. Sedangkan pada luas panen jagung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2021, dan pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan luas panen yang signifikan. Dalam konteks pertanian, ada istilah "carry over" dapat diartikan sebagai luas tanam yang dilakukan pada tahun sebelumnya, tetapi baru dipanen pada tahun berikutnya, dapat terlihat dalam tabel luas panen jagung lebih besar dari luas tanam jagung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Serang memiliki luasan kawasan pertanian sebagai berikut.

Tabel 2.1. 16
Lahan LP2B di Kabupaten Serang

Kategori Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
Kawasan Tanaman Pangan	32.299,36 Ha	Bagian dari kawasan pertanian secara umum
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	28.084,29 Ha	hanya ditetapkan sebagai KP2B
Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	4.145,06 Ha	Kondisi Saat ini berupa kebun/hutan, bukan Lahan Sawah Dilindungi
Kawasan Perkebunan	24.965,00 Ha	Berada di luar kategori LP2B dan LCP2B

Sumber: DKPP Kabupaen Serang, 2025

Pada tahun 2011, Dinas Pertanian Kabupaten Serang telah menyusun kajian LP2B secara paralel dengan proses RTRW dan menghasilkan draft usulan LP2B, namun saat pengusulan ke DPRD usulan penetapan LP2B tidak berhasil dilanjutkan dan belum memiliki landasan hukum formal secara spesifik. Kondisi 2025 lahan di Kabupaten Serang saat ini menurun 1.800 Ha hal ini dikarenakan alih fungsi lahan menjadi industri dan perumahan. Pada tahun 2025 akan dilakukan Kajian Teknis / DED (Detail Engineering Design) LP2B terbaru.

Tabel 2.1. 17
Kebutuhan Pangan Masyarakat Kabupaten Serang Tahun 2023

Keterangan	Beras	Kacang Tanah	Bawang Merah	Bawang Putih	Cabe Merah	Cabe Rawit	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam
Kebutuhan (Kg/Kap/Thn)	84,2	0,1	33	15,5	3,3	2,9	0,2	7,9	109,6
Kebutuhan 1 tahun (Ton)	138.745	190	54.405	25.558	5.361	4.815	255	13.034	180.516
Kebutuhan bulan normal (Ton)	11.280	15	4.423	2.078	436	391	21	1.060	14.676
Kebutuhan minggu normal (Ton)	2.256	3	885	416	87	78	4	212	2.935

Sumber: DKPP Kabupaen Serang, 2023

Tabel diatas menunjukkan jumlah kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Serang pada tahun 2023. didominasi oleh kebutuhan konsumsi telur ayam dan beras. Terlihat bahwa kebutuhan beras pada tahun 2023 sebesar 84,2 kg dan telur ayam 109,6 kg. Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperhatikan tingkat percepatan produksi padi dari tingkat konsumsi masyarakat akan beras sebagai pangan utama agar kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi. Oleh karena itu diperlukan perhatian terhadap daerah mana saja yang memilki tingkat produksi dan konsumsi beras yang tinggi agar dapat dilakukan pemetaan sehingga menjadi informasi penting untuk kebijakan cadangan pangan Kabupaten Serang.

2.1.2.5 Potensi Peternakan

Peternakan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu dalam upaya pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dapat memacu pengembangan wilayah. Salah satu bentuk usaha peternakan yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan yaitu ternak sapi potong dan ayam potong. Sementara itu, program pengembangan peternakan dihadapkan dengan permasalahan semakin menyempitnya lahan peternakan.

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan peternakan sapi potong. Kabupaten Serang memilki luas lahan yang cukup luas untuk digunakan sebagai tempat pengembangan peternakan lahan pertanian bukan sawah seluas 53.963 ha.

Tabel 2.1. 18
Data Populasi Peternakan Kabupaten Serang Tahun 2024

NO	KOMODITI TERNAK	POPULASI AWAL (PO)	POPULASI AKHIR (Pt)	DATA PRODUKSI (Kg)	
				PRODUKSI DAGING	PRODUKSI TELUR (Kg)
1	Kerbau	5.301	4.976	75.851	
2	Sapi Potong	6.803	4.875	1.948.134	
3	Domba	9.691	10.941	291.993	
4	Kambing	43.955	41.379	145.179	

NO	KOMODITI TERNAK	POPULASI AWAL (PO)	POPULASI AKHIR (Pt)	DATA PRODUKSI (Kg)	
				PRODUKSI DAGING	PRODUKSI TELUR (Kg)
5	Ayam Buras	226.791	224.582	86.095	
6	Ayam Ras Pedaging	8.330.939	8.413.041	46.050.056	
7	Ayam Ras Petelur	4.916.627	4.876.693	548.430	16.708.971
8	Itik	263.815	261.194	9.698.381	

Sumber: DKPP Kabupaen Serang, 2024

Berdasarkan data diatas, maka diperlukan pengembangan Populasi Peternakan yang sekarang menjadi salah satu komoditi unggulan daerah Kabupaten Serang karena mampu menghasilkan produksi yang tinggi guna pemenuhan protein hewani dan telah mempunyai pasar tersendiri, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kabupaten Serang.

2.1.2.6 Potensi Perikanan

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Serang, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Di Kabupaten Serang, 4 (empat) indikator yang digunakan adalah: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan tangkap, dan jumlah produksi perikanan budidaya. Selama periode 2020–2024, rata-rata pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Serang adalah sekitar 2,23% per tahun, dengan fluktuasi yang menunjukkan ketidakstabilan, khususnya di tahun 2023 yang mengalami penurunan bernilai negatif sebesar -0,06%. Pada tahun 2024 tumbuh kembali sebesar 1,39% menunjukkan terjadinya pemulihan moderat.

Tabel 2.1. 19
Produksi Perikanan Kabupaten Serang 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	41.245,76	42.391,35	56.747,91	58.118,45	59.434,24
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	10.130,48	7.781,24	7.212,77	7.794,03	7.226,67
Konsumsi ikan Kg/Kapita	37,21	37,21	42,03	33,81	1,79
Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan (%)	4,33	1,49	4	-0,06	1,39

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Serang, 2024

Potensi perikanan budidaya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk mengembangkan sub sektor perikananannya. Kondisi makro perekonomian yang dapat dilihat dari sub sektor perikanan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan saja, namun juga perlu melihat tingkat konsumsi ikan dan nilai produksi perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Total produksi perikanan budidaya di Kabupaten Serang mengalami kenaikan pada kurun waktu tahun 2020-2024. Angka yang dicapai di tahun 2020 adalah 41.245,76 ton dan naik menjadi 59.434,24 ton pada tahun 2024.

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang bisa menjadi alternatif selain daging. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menetapkan standar konsumsi ikan sebesar 36 kilogram per kapita per tahun.

Tabel 2.1. 20
Produksi Komoditas Budidaya Perikanan Kabupaten Serang 2020 – 2024 (Ton)

Komoditas Budidaya Perikanan	2020	2021	2022	2023	2024
Ikan Air Tawar					
Mas	139,31	139,66	141,38	1.335,74	144,67
Nila	228,86	238,87	240,16	152,60	270,79
Gurame	9,61	10,07	9,75	269,80	11,22
Patin	3,23	3,38	3,41	10,83	3,97
Lele	1.089,96	1.122,21	1.235,51	3,87	1.314,96
Lainnya	0,40	-	-	-	
Total Budidaya Air Tawar	1.471,37	1.514,20	1.630,21	1.772,84	1.745,61
Tambak					
Bandeng	2.679,35	2.866,50	3.324,05	3.671,43	3.539,20
Udang	379,72	410,46	525,78	587,69	800,82
Rumput Gracillaria (BB)	22.416,00	23.160,00	36.721,50	38.148,49	42.973,14
Mujair	309,99	325,87	328,82	352,20	320,95
Belanak	231,94	243,41	244,35	250,88	243,28
Ikan Lainnya	1,05	2,90	5,15	5,43	4,17
Total Budidaya Tambak	26.018,05	27.009,14	41.149,65	43.016,12	47.881,56
Laut					
RL Cotoni (BB)	13.740,00	13.802,34	13.950,97	13.314,74	9.792,37
Kerang hijau	6,81	6,62	6,95	4,87	4,71
Komoditas Aquatik Lainnya	9,53	9,60	9,71	9,89	9,99
Total Budidaya Laut	13.756,34	13.818,56	13.967,63	13.329,50	9.807,07
Total Produksi Kmoditas Budidaya Perikanan	41.245,76	42.341,90	56.747,49	58.118,46	59.434,24

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Serang, 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi komoditas budidaya perikanan di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2020-2024 didominasi oleh jenis budidaya tambak yaitu rumput Gracillaria (BB) dengan rata-rata produksi 59.84% dari total produksi komoditas budidaya perikanan. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Serang didominasi oleh produksi yang berasal dari komoditas rumput laut Gracillaria (BB).

Produksi perikanan dengan angka tertinggi pada tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 10.130,48 ton. Selama periode 2020-2024, rata-rata produksi perikanan tangkap di Kabupaten Serang adalah sebesar 8.229,63 ton yang didominasi oleh jenis ikan Kembung dan Teri Indian.

Tabel 2.1. 21
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Serang 2020 – 2023 (Ton)

No.	Jenis Ikan	2020	2021	2022	2023
1	Alu-alu Besar; Barakuda Besar (Sphyrna barracuda)	85,23	64,37	174,95	142,15
2	Bandeng Laki (Albula forsteri)	-	23,33	41,49	57,56
3	Baronang (Siganus vulpinus)	-	9,40	1,50	2,58
4	Bawal Hitam (Parastromateus niger)	-	8,96	76,81	20,60
5	Belanak (Chelon subviridis)	13,42	408,89	201,64	99,80
6	Belanak (Crenemugil seheli)	0,22	-	-	38,93

No.	Jenis Ikan	2020	2021	2022	2023
7	Beloso (<i>Synodus variegatus</i>)	3,57	474,40	181,24	65,30
8	Cendro (<i>Lestrolepis japonica</i>)	28,46	6,46	88,16	146,70
9	Cucut (<i>Rhizoprionodon acutus</i>)	-	-	-	55,02
10	Cucut Lanjam (<i>Carcharhinus Fitzroyensis</i>)	-	-	51,56	136,32
11	Cumi-cumi (<i>Loligo chinensis</i>)	744,37	340,87	202,09	4,54
12	Ekor Kuning (<i>Paracaesio kusakarii</i>)	148,07	8,80	0,77	85,29
13	Gabus Laut (<i>Rachycentron canadum</i>)	101,61	91,62	39,88	18,37
14	Gebel (<i>Platax boersii</i>)	-	-	0,27	1,27
15	Gurita (<i>Octopus aegina</i>)	-	-	0,24	12,82
16	Japuh (<i>Dussumieria acuta</i>)	-	393,22	38,92	41,15
17	Kaci (<i>Plectorhinchus flavomaculatus</i>)	-	-	-	14,25
18	Kakap (<i>Liopropoma randalli</i>)	-	774,68	67,95	906,35
19	Kakap Jenaha (<i>Lutjanus gibbus</i>)	-	7,57	7,55	47,15
20	Kakap Merah (<i>Etelis coruscans</i>)	-	566,63	58,53	18,93
21	Kakap Merah (<i>Lutjanus bitaeniatus</i>)	153,39	50,45	46,01	38,64
22	Kakap Merah Bakau (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)	-	-	-	5,20
23	Kakap Putih (<i>Plectorhinchus gibbosus</i>)	15,61	0,33	33,08	31,30
24	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	332,77	375,26	465,62	2.245,82
25	Keong Macan (<i>Babylonia spirata</i>)	-	-	-	-
26	Kepiting (<i>Carpilius maculatus</i>)	11,42	17,50	4,26	0,18
27	Kepiting Bakau (<i>Scylla serrata</i>)	-	-	2,14	0,16
28	Kerapu Balong (<i>Epinephelus epistictus</i>)	-	49,34	35,47	66,90
29	Kerapu Balong (<i>Epinephelus merra</i>)	151,69	55,78	24,24	38,45
30	Kerapu Batu (<i>Cephalopholis aitha</i>)	-	-	118,41	38,35
31	Kerapu Karang (<i>Cephalopholis boenack</i>)	135,46	68,85	37,16	151,85
32	Kerapu Macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)	-	-	48,08	13,93
33	Kuniran; Biji Nangka (<i>Parupeneus cyclostomus</i>)	-	-	40,98	17,24
34	Kuniran; Biji Nangka (<i>Upeneus vittatus</i>)	89,45	80,48	87,36	33,78
35	Kurisi (<i>Nemipterus hexodon</i>)	31,53	12,34	58,71	24,08
36	Kurisi (<i>Pentapodus setosus</i>)	-	-	159,17	45,14
37	Kuro; Senangin (<i>Polydactylus microstomus</i>)	426,75	208,02	85,80	46,88
38	Kuwe (<i>Carangoides armatus</i>)	-	-	280,64	117,19
39	Kuwe (<i>Carangoides malabaricus</i>)	-	7,71	0,82	129,95
40	Kuwe (<i>Caranx sexfasciatus</i>)	208,63	8,61	50,58	30,73
41	Kuwe Gerong (<i>Caranx ignobilis</i>)	126,19	1,83	96,27	74,96
42	kuwe mangali (<i>Gnathanodon speciosus</i>)	-	-	-	2,42
43	Layang Lidi; Layar Deles (<i>Decapterus macrosoma</i>)	-	-	89,26	19,37
44	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	-	-	45,03	26,51
45	Lemuru (<i>Sardinella lemuru</i>)	-	-	-	10,52
46	Manyung Besar (<i>Arius thalassinus</i>)	779,26	197,26	381,98	123,03

No.	Jenis Ikan	2020	2021	2022	2023
47	Manyung Jahal (<i>Plicofollis argyroleuron</i>)	-	167,66	167,67	200,13
48	Pari Kodok (<i>Neotrygon kuhlii</i>)	4,80	32,67	-	28,54
49	Peperek Topang (<i>Leiognathus equulus</i>)	576,99	359,53	210,79	44,85
50	Petek (<i>Aurigequula fasciata</i>)	390,43	14,16	48,88	13,84
51	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	10,94	57,52	103,88	503,55
52	Rebon (<i>Mysis sp</i>)	-	-	-	-
53	Samgeh (<i>Chrysochir aureus</i>)	54,05	0,42	0,43	2,51
54	Sebelah (<i>Psettodes erumei</i>)	-	-	13,72	7,53
55	Selanget (<i>Anodontostoma chacunda</i>)	-	-	51,73	15,55
56	Selar Bentong (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	322,81	395,66	495,89	250,05
57	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	41,47	315,81	338,16	155,19
58	Sembilang Karang (<i>Plotosus lineatus</i>)	-	-	22,35	7,66
59	Siro (<i>Amblygaster sirm</i>)	-	-	252,25	83,10
60	Talang-talang (<i>Scomberoides lysan</i>)	-	201,19	43,58	12,44
61	Talang-talang (<i>Scomberoides tala</i>)	438,05	-	144,98	127,45
62	Tembang (<i>Sardinella gibbosa</i>)	157,89	95,97	113,38	56,11
63	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	453,54	220,75	294,05	172,75
64	Teri Gepeng (<i>Stolephorus waitei</i>)	-	-	34,07	9,84
65	Teri Indian (<i>Stolephorus indicus</i>)	2.011,92	821,68	466,89	224,31
66	Teri Nasi (<i>Encrasicholina devisi</i>)	921,98	232,31	219,27	58,65
67	Teri Nasi (<i>Encrasicholina punctifer</i>)	-	172,80	33,67	223,60
68	Tetengkek (<i>Megalaspis cordyla</i>)	1,10	-	51,35	28,01
69	Today (<i>Tetrapturus angustirostris</i>)	39,75	34,29	29,21	26,16
70	Tongkol (<i>Auxis thazard</i>)	641,67	345,87	535,44	251,21
71	Tongkol Abu-abu (<i>Thunnus tonggol</i>)	-	-	97,89	28,45
72	Udang Api Api (<i>Metapenaeus monoceros</i>)	165,80	-	11,24	14,46
73	Udang Jambret (<i>Mesopodopsis orientalis</i>)	310,20	-	2,85	0,27
74	Udang Krosok Kuning (<i>Megokris granulatus</i>)	-	-	4,54	0,14
	TOTAL	10.130,48	7.781,24	7.212,77	7.794,03

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Serang, 2023

Kendala-kendala yang dihadapi terkait capaian indikator ini adalah ketidaklengkapan dokumen yang dimiliki oleh para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk mendapatkan tanda daftar usahanya, diantaranya belum memiliki ijin lingkungan usaha dari instansi terkait, belum memiliki akte yang dikeluarkan oleh notaris, sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan terhadap pertumbuhan sektor perikanan.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kabupaten Serang, sebagai bagian dari Provinsi Banten di Indonesia, memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan daerah dan nasional. Kabupaten Serang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Kabupaten Serang dapat berperan dalam pengembangan ekonomi regional dengan mempromosikan investasi, mengembangkan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Kabupaten Serang memiliki wilayah

yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Peran strategisnya adalah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan alam, termasuk hutan, lahan basah, dan ekosistem lainnya, untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal dan regional. Melalui pengelolaan yang baik dan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, Kabupaten Serang dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Guna mendukung semua peranan strategis di Kabupaten Serang berikut penjelasan Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah Kabupaten Serang yang berbasis jasa ekosistem.

2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Percepatan pertambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang di dasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Kabupaten Serang memiliki beberapa catatan terkait Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kerentanan Daerah yaitu:

- a) DDLB Kabupaten Serang secara keseluruhan sebesar 5,59 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman baik. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Serang memiliki daya tampung bangunan yang relatif cukup untuk pengembangan wilayah. Namun dalam pengembangannya, perlu diperhatikan dan dipertimbangan terlebih pada karakteristik wilayahnya seperti pada Kawasan Rawan Bencana maupun Kawasan Konservasi.
- b) Perlu usaha lebih kuat agar indeks daya dukung lahan untuk pangan DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan semakin meningkat.
- c) Berdasarkan perhitungan nilai daya dukung air, Kabupaten Serang berada pada kisaran nilai baik. Namun perhitungan tersebut hanya didasarkan pada kebutuhan air terhadap jumlah penduduk, lahan basah dan lahan kering. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kebutuhan yang belum masuk ke dalam perhitungan. Hasil perhitungan koefisien Daya Dukung Lindung (DDL) Kabupaten Serang termasuk dalam kategori sedang sebesar 0,44.
- d) Jasa ekosistem pemurnian air di Kabupaten Serang Sebagian besar berada pada kelas sedang dan rendah.
- e) Jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Serang Sebagian besar berada pada kelas sedang dan tinggi.

Dalam perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) digunakan pendekatan supply dan demand. Perhitungan DDTLH meliputi perhitungan penduduk terhadap tekanan lahan, Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, analisis kualitas sungai dan daya tampung sampah.

2.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

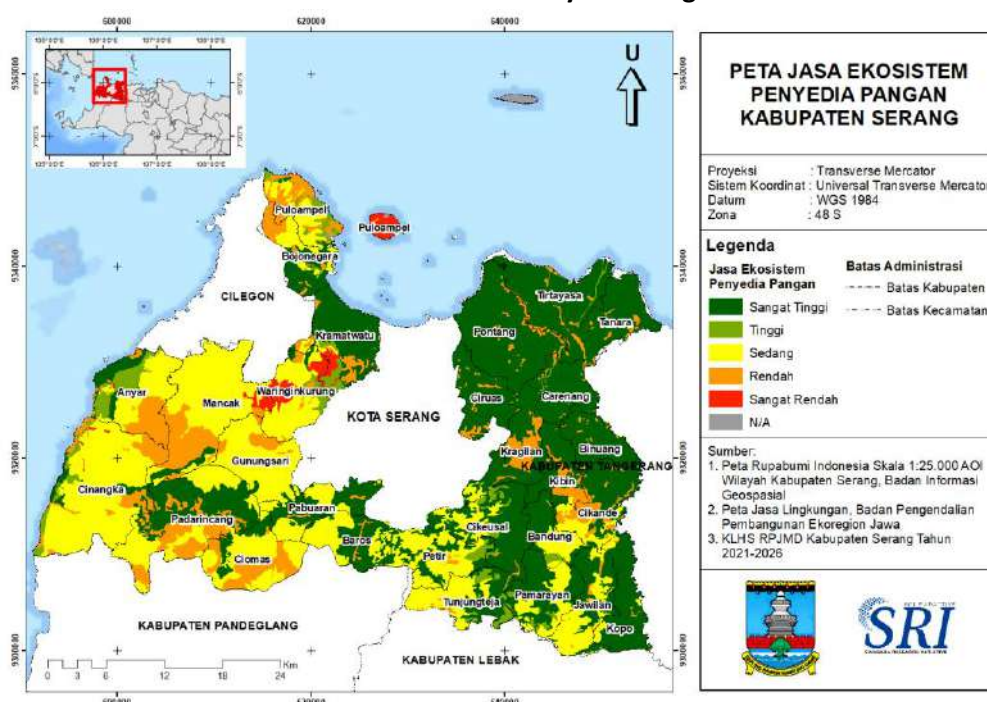
Jasa ekosistem sebagai penyedia pangan didefinisikan sebagai ketersediaan tanaman dan hewan yang dapat dimakan, dengan indikator stok total dan rata-rata (dalam kg/ha). Indikator kinerjanya adalah luasan produktivitas bersih (dalam kkal/ha/tahun). Berdasarkan pada hasil kajian KLHS RPJMD tahun 2021-2026 diketahui bahwa jasa lingkungan sebagai penyedia pangan didominasi kelas sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyedia pangan masih mampu memberikan dukungan terhadap kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Serang.

Isu strategis pertanian dan ketahanan pangan pada KLHS RPJMD 2025-2029 dengan permasalahan Adanya populasi penduduk dengan kerawanan pangan baik sedang /berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan dan Menurunnya daya dukung pertanian lahan basah dan kering yang menurun akibat dampak perubahan iklim dan rusaknya jaringan irigasi. Melihat dari permasalahan berikut, direkomendasikan kebijakan berikut :

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil serta akses terhadap lahan, sumberdaya produktif, pengetahuan, hingga sumberdaya nonpertanian.
2. Pengembangan program daya dukung lahan pertanian akibat perubahan iklim
3. Bidang pertanian dan Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Perbaikan irigasi pertanian, khususnya pada lahan yang rentan terdampak oleh perubahan iklim global.

Wilayah yang memiliki penyediaan pangan kelas sangat tinggi didominasi di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Tanara, Ciruas, Cikeusl dan Cerenang. Meskipun demikian pada beberapa wilayah terdapat kecamatan yang memiliki klasifikasi sangat rendah yaitu pada Kecamatan Waringinkurung, Puloampel, Kramatwatu dan Mancak. Kecamatan Puloampel merupakan wilayah pulau yang tidak memiliki lahan pertanian. Berikut disajikan gambar peta jasa lingkungan penyedia pangan dan tabel luas kelas jasa ekosistem penyedia pangan.

Gambar 2.1. 7
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Wilayah yang memiliki penyediaan pangan kelas sangat tinggi didominasi di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Tanara, Ciruas, Cikesal dan Cerenang. Meskipun demikian pada beberapa wilayah terdapat kecamatan yang memiliki klasifikasi sangat rendah yaitu pada Kecamatan Waringinkurung dan Puloampel, Kramatwatu dan Mancak. Kecamatan Puloampel merupakan wilayah pulau yang tidak memiliki lahan pertanian. Luas kelas jasa ekosistem penyedia pangan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 22
Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Kategori					Jumlah Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Anyar	17,77	1.528,06	2.423,53	1.245,17	902,06	6.116,58
2	Bandung		10,24	1.068,62	167,41	1.300,24	2.546,51
3	Baros		117,49	1.756,75		1.877,56	3.751,81
4	Binuang		119,90	33,11		2.788,94	2.941,95
5	Bojonegara		772,71	860,08	118,78	1.494,79	3.246,37
6	Carenang		110,00		65,61	3.104,86	3.280,47
7	Ciknde		977,56	1.004,79		2.831,06	4.813,42
8	Cikeusal		47,22	1.037,80	587,58	3.955,44	5.628,04
9	Cinangka	76,90	1.600,71	9.267,55	594,56	611,80	12.151,53
10	Ciomas		1.747,51	2.982,23		759,89	5.489,63
11	Ciruas		332,39			3.310,60	3.642,98
12	Gunungsari		618,52	4.424,18		207,98	5.250,68
13	Lebak Wangi		145,21	1.654,23		2.216,45	4.015,89
14	Jawilan		136,89	2.111,64		2.157,88	4.406,42
15	Kibin		666,59	42,95	48,04	2.229,77	2.987,34
16	Kopo		39,07	342,89		3.394,44	3.776,40
17	Kragilan		1.090,73	247,61	26,89	3.083,26	4.448,49
18	Kramatwatu	306,49	597,21	218,21	560,52	3.800,51	5.482,93
19	Mancak	305,04	2.348,37	6.546,41		438,68	9.638,49
20	Pabuaran		95,21	1.548,79		2.167,83	3.811,83
21	Padarincang		2.725,02	3.226,32		3.947,96	9.899,30
22	Pamarayan	0,03	0,71	1.457,51	257,82	2.818,93	4.535,99
23	Petir		75,07	3.009,37	270,00	1.512,75	4.867,18
24	Pontang		355,79		14,20	7.385,95	7.755,94
25	Puloampel	592,51	1.426,11	1.399,75	604,97	88,29	4.111,63
26	Tanara		330,32		13,91	4.148,24	4.492,46
27	Tirtayasa		280,74	17,56	113,29	5.141,81	5.553,41
28	Tunjungteja		120,09	2.141,53	531,99	1.471,07	4.264,67
29	Waringinkurung	898,73	302,30	2.905,12	391,52	151,92	4.649,59
Jumlah Total		2.197,45	18.717,76	51.728,53	5.612,24	69.300,96	147.557,95

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Meskipun kelas jasa ekosistem penyedia pangan didominasi dengan kelas sangat tinggi, namun proyeksi penyediaan pangan tahun 2029 perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan. Beberapa wilayah yang memiliki klasifikasi warna merah dan oranye dapat melalui substitusi beras dengan wilayah yang memiliki stok pangan yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data terkait Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Pangan serta Ketahanan Pangan di Kabupaten Serang, diperoleh kesimpulan mengenai hasil analisis DDDT-LH. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai jenis sumber daya alam dan jasa lingkungan, jumlah ketersediaan (supply), jumlah kebutuhan (demand), selisih antara keduanya, serta status DDDT-LH. Perhitungan ini juga didasarkan pada proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Serang yang terus meningkat, yaitu sebanyak 1.763.439 jiwa pada tahun 2023; 1.956.188 jiwa pada 2028; 2.148.937 jiwa pada 2033; 2.341.686 jiwa pada 2038; dan diperkirakan mencapai 2.534.434 jiwa pada tahun 2043. Adapun rincian hasil kesimpulan analisis DDDT-LH Pangan Kabupaten Serang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1. 23
Status Daya Dukung Pangan (Non Beras) Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2043

2023				
Jenis Pangan	Ketersediaan (kkal/tahun)	Kebutuhan (kkal/tahun)	Selisih	Status
Non Beras	45.386.457.700	1.383.858.951.438	(1.338.472.493.738)	Terlampai
2043				
Jenis Pangan	Ketersediaan (kkal/tahun)	Kebutuhan (kkal/tahun)	Selisih	Status
Non Beras	45.386.457.700	1.988.897.277.688	(1.943.510.819.988)	Terlampai

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, diketahui bahwa ketersediaan pangan non beras di Kabupaten Serang, baik pada tahun 2023 maupun 2043, belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari adanya selisih yang menunjukkan defisit antara jumlah kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply). Pada tahun 2023, ketersediaan pangan non beras tercatat sebesar 45.386.457.700 kkal per tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 1.383.858.951.438 kkal per tahun, sehingga terjadi defisit sebesar 1.338.472.493.738 kkal per tahun. Situasi serupa juga terjadi pada tahun 2043, di mana jumlah ketersediaan tetap berada di angka 45.386.457.700 kkal per tahun, namun kebutuhan meningkat signifikan hingga mencapai 1.988.897.277.688 kkal per tahun. Dengan demikian, Kabupaten Serang dikategorikan memiliki status —Terlampai|| dalam pemenuhan kebutuhan pangan non beras. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekurangan pasokan pangan non beras sudah terjadi sejak tahun dasar 2023 dan diperkirakan akan semakin memburuk pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan langkah strategis dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 2.1. 24
Status Daya Dukung Pangan (Beras) Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2043

2023				
Jenis Pangan	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Selisih	Status
Beras	218.303,21	199.269	19.035	Belum Terlampaui
2043				
Jenis Pangan	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Selisih	Status
Beras	218.303,21	286.391	(68.088)	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

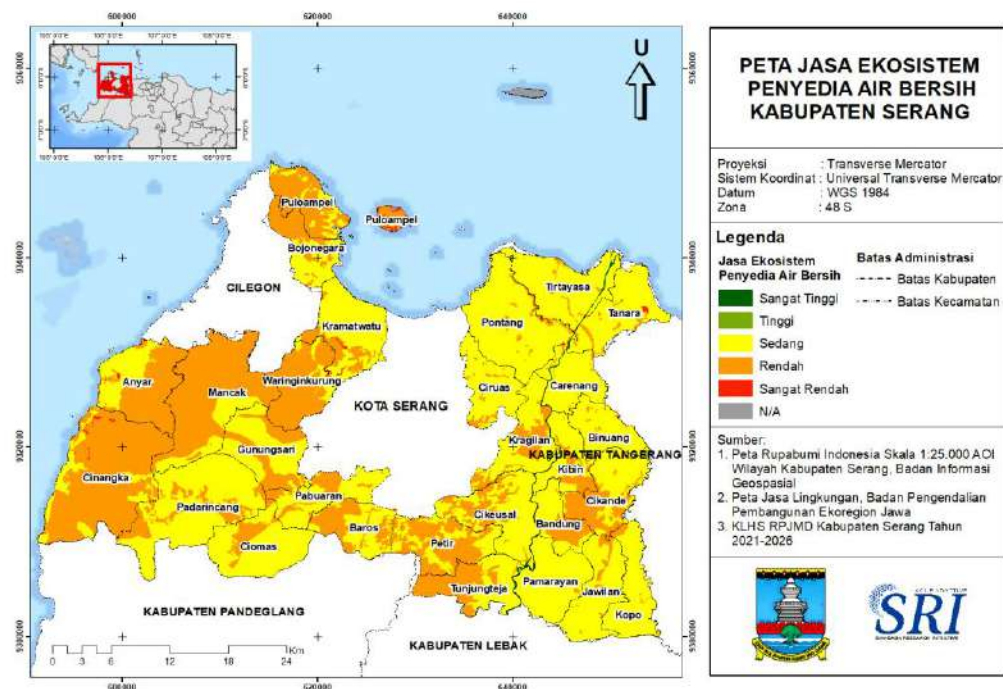
Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 ketersediaan pangan jenis beras di Kabupaten Serang masih berada dalam kondisi aman. Hal ini ditunjukkan oleh adanya selisih positif antara jumlah ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) yang menghasilkan surplus. Pada tahun tersebut, ketersediaan beras mencapai 218.303,21 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat sebesar 199.269 ton, sehingga terdapat surplus sebanyak 19.035 ton dan statusnya dikategorikan “Belum Terlampaui”. Namun, kondisi ini diproyeksikan akan berubah dalam 20 tahun mendatang. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, pada tahun 2043 ketersediaan beras yang tetap berada di angka 218.303,21 ton diperkirakan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat menjadi 286.391 ton. Akibatnya, terjadi defisit sebesar 68.088 ton yang menyebabkan status berubah menjadi “Terlampaui.” Melihat potensi perubahan signifikan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang direncanakan sejak sekarang untuk menghadapi tantangan jangka panjang, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan beras hingga dua dekade ke depan.

2.1.3.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air memiliki definisi peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam satuan m³ dan indikator kinerjanya adalah kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis.

Gambar 2.1. 8

Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Serang didominasi oleh kelas sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Serang rentan terjadi kekeringan pada saat kemarau panjang. Beberapa kecamatan bahkan memiliki wilayah yang masuk dalam kelas sangat rendah yaitu Kecamatan Puloampel, Tanara, Cinangka dan Kramatwatu. Namun terdapat juga kecamatan yang memiliki klasifikasi sangat tinggi yaitu Kecamatan Tirtayasa, Cikeusal, Carenang, Kibin, Kopo dan Tunjungteja. Wilayah-wilayah yang memiliki klasifikasi sangat rendah sangat rawan mengalami kekeringan.

Permasalahan kelangkaan air telah menjadi masalah yang serius beberapa tahun terakhir di Kabupaten Serang. Meskipun ambang batas air menunjukkan nilai yang positif, namun demikian kelangkaan terhadap sumber air terjadi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Serang. Di tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang mencatat terdapat 200 ha area sawah yang mengalami kekeringan di daerah Kecamatan Pamarayan lantaran kemarau yang telah melanda wilayah Kabupaten Serang (TVRI News, 2024). Selain permasalahan kelangkaan air, ada pula permasalahan sulitnya air bersih akibat limbah yang mencemari sungai. Pada tahun 2024, Kecamatan Tanara menjadi salah satu kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih akibat tercemarnya sungai Ciujung. Limbah yang mencemari sungai menyebabkan air sungai berbau menyengat dan berwarna hitam. Banyak warga yang merasa dirugikan akibat tercemarnya Sungai Ciujung ini karena Sebagian besar warga mengandalkan sungai untuk kebutuhan pengairan pertanian dan perikanan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar (Kompas, 2024).

Tabel 2.1. 25
Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Serang

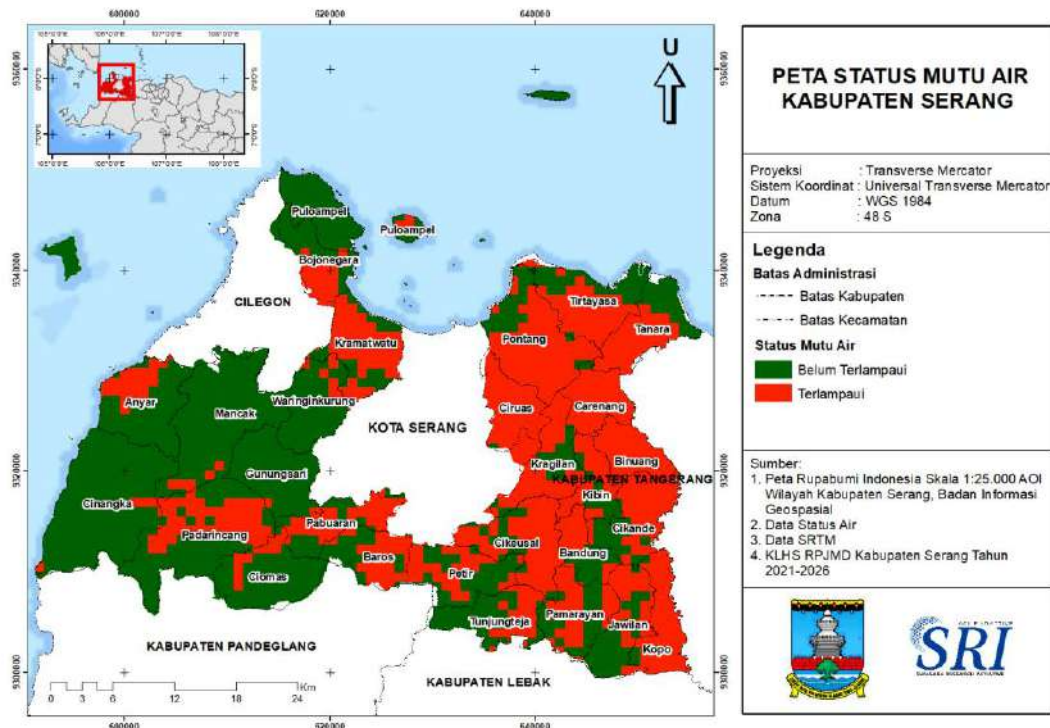
No.	Kecamatan	Kategori				Jumlah Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	
1	Anyar	17,77	3.951,59	2.147,22		6.116,58
2	Bandung		981,53	1.545,03	19,95	2.546,51
3	Baros		1.774,40	1.977,41		3.751,81
4	Binuang		153,01	2.788,94		2.941,95
5	Bojonegara		1.521,60	1.724,77		3.246,37
6	Carenang		110,00	3.104,28	66,19	3.280,47
7	Ciknde		1.982,35	2.831,06		4.813,42
8	Cikeusal		1.528,13	3.995,35	104,56	5.628,04
9	Cinangka	76,90	10.589,10	1.485,53		12.151,53
10	Ciomas		860,96	4.628,67		5.489,63
11	Ciruas		332,39	3.310,60		3.642,99
12	Gunungsari		1.860,34	3.390,34		5.250,68
13	Lebak Wangi		375,81	3.801,53		4.177,34
14	Jawilan		351,94	4.054,48		4.406,42
15	Kibin		709,54	2.188,57	89,23	2.987,34
16	Kopo		170,96	3.605,44		3.776,40
17	Kragilan		1.343,77	3.030,00	74,72	4.448,49
18	Kramatwatu	55,82	1.066,08	4.361,03		5.482,93
19	Mancak		8.047,22	1.591,27		9.638,49
20	Pabuaran		1.089,88	2.721,95		3.811,83
21	Padarincang		1.844,60	8.054,69		9.899,29
22	Pamarayan	0,03	31,67	4.462,51	40,77	4.534,98
23	Petir		3.084,44	1.782,75		4.867,19
24	Pontang	3,03	352,76	7.385,95	14,20	7.755,94
25	Puloampel	127,09	3.254,42	730,13		4.111,64
26	Tanara	39,49	290,82	4.148,24	13,91	4.492,46
27	Tirtayasa		280,99	5.159,38	113,04	5.553,41
28	Tunjungteja		2.261,62	1.928,87	74,19	4.264,68
29	Waringinkurung	24,97	4.081,18	543,44		4.649,59
Jumlah Total		345,10	54.283,11	92.479,43	610,75	147.718,40

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Status baku mutu air adalah indikator yang dibutuhkan untuk melihat kualitas air. Status baku mutu air dikatakan baik apabila status mutu air belum terlampaui, sebaliknya apabila status mutu air terlampaui maka air dikatakan memiliki kualitas yang kurang baik atau kurang layak.

Gambar 2.1. 9

Peta Status Mutu Air



Sumber: KLHS RPJMD 2025-2045

Berdasarkan pada KLHS RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 diketahui bahwa status baku mutu air dominan adalah belum terlampaui. Namun jumlah ini hampir sama dengan air yang memiliki status baku mutu air terlampaui. Kecamatan Cinangka merupakan salah satu kecamatan yang memiliki status baku mutu air belum terlampaui yang paling banyak. Sedangkan Kecamatan Cikeusal adalah kecamatan yang memiliki status baku mutu air yang paling banyak terlampaui. Berikut tabel luasan status baku mutu air.

Tabel 2.1. 26
Luas Status Baku Mutu Air

No.	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Jumlah Total
1	Anyar	4.351,82	1.749,21	6.101,03
2	Bandung	1.150,22	1.396,29	2.546,51
3	Baros	1.460,45	2.164,29	3.624,74
4	Binuang		2.941,95	2.941,95
5	Bojonegara	1.691,54	1.550,00	3.241,54
6	Carenang	109,20	3.171,27	3.280,47
7	Ciknde	1.403,12	3.410,30	4.813,42
8	Cikeusal	1.134,25	4.469,80	5.604,05
9	Cinangka	11.744,89	363,61	12.108,50
10	Ciomas	4.536,90	853,69	5.390,59
11	Ciruas	46,11	3.427,78	3.473,89
12	Gunungsari	5.103,69	146,99	5.250,68

No.	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Jumlah Total
13	Lebak Wangi	2.081,22	2.124,55	4.205,77
14	Jawilan	2.193,37	2.213,05	4.406,42
15	Kibin	904,84	2.082,50	2.987,34
16	Kopo	258,98	3.517,42	3.776,40
17	Kragilan	1.157,87	3.237,15	4.395,02
18	Kramatwatu	1.438,31	4.016,98	5.455,29
19	Mancak	9.039,78	453,50	9.493,28
20	Pabuaran	1.420,56	2.375,03	3.795,59
21	Padarincang	5.860,34	4.033,35	9.893,69
22	Pamarayan	1.874,35	2.660,64	4.534,99
23	Petir	2.538,05	2.294,33	4.832,38
24	Pontang	1.610,02	6.113,41	7.723,43
25	Puloampel	3.951,42	244,41	4.195,83
26	Tanara	1.571,83	2.931,38	4.503,21
27	Tirtayasa	2.283,80	3.470,71	5.754,51
28	Tunjungteja	2.644,83	1.619,46	4.264,29
29	Waringinkurung	4.030,65	618,83	4.649,48
Jumlah Total		77.592,41	69.651,88	147.244,29

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Tabel 2.1. 27 Tabel Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Serang

Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan Total (m ³ /tahun)	Selisih	Ambang Batas (Jiwa)	Status DDDTLH (Ha)		Total Luas (Ha)
				Belum Terlampaui	Terlampaui	
5.666.708.267,71	1.443.621.682,51	4.223.086.585,20	65.586.901,25	27.437,56	109.238,72	136.676,28

Sumber : RPJPD Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa total ketersediaan air di Kabupaten Serang mencapai 5.666.708.267,71 m³ per tahun, sedangkan total kebutuhan air masyarakat hanya sebesar 1.443.621.682,51 m³ per tahun. Dengan demikian, Kabupaten Serang memiliki surplus air sebesar 4.223.086.585,20 m³ per tahun dengan ambang batas penduduk mencapai 65.586.901,25 jiwa. Kondisi ini menunjukkan situasi yang positif karena kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya potensi konflik atau permasalahan akibat kekurangan pasokan air. Capaian ini perlu dijaga agar kestabilan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air di masa mendatang tetap terjamin. Meskipun secara keseluruhan Kabupaten Serang dikategorikan surplus air, hasil analisis status DDDTLH menunjukkan kondisi yang lebih kompleks. Tercatat luas lahan sebesar 27.437,56 hektare berstatus “Belum Terlampaui”, sedangkan 109.238,72 hektare berstatus “Terlampaui”. Artinya, meskipun ketersediaan air secara total masih mencukupi, sebagian besar wilayah Kabupaten Serang menghadapi tekanan lingkungan di mana daya dukung dan daya

tampungnya tidak lagi optimal untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber air bersih, serta melindungi kualitas lingkungan hidup di wilayah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas wilayah dengan status “Belum Terlampaui” sehingga Kabupaten Serang terhindar dari risiko penurunan kemampuan lingkungan dalam mendukung kebutuhan air masyarakat.

2.1.3.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah

Estimasi timbulan sampah per hari untuk setiap penduduk di Kabupaten Serang mencapai 0,7 kg/hari. Berdasarkan data timbulan sampah diketahui bahwa Kecamatan Cikande menjadi salah satu kecamatan yang menghasilkan timbulan sampah terbesar di Kabupaten Serang yaitu mencapai 81 ton/hari. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk yang banyak di kecamatan tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduknya maka timbulan sampah yang dihasilkan semakin banyak. Proyeksi sampah yang mencapai 1.179,6 ton/hari pada tahun 2045, sangat disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencari alternatif pembangunan TPA di wilayah Kabupaten Serang.

Sejak tahun 2022, Kabupaten Serang belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dikarenakan TPA Cilowong yang berlokasi di Kota Serang telah diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Serang tidak bisa lagi membuang sampah ke TPA Cilowong. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2023 dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 sampai sekarang untuk melakukan pembuangan sampah ke TPA.

Pemerintah Kabupaten Serang juga telah membangun TPST incenerator yang telah beroperasi di Kecamatan Kibin dan direncanakan tahun 2026 akan dibangun TPST3R di Kecamatan Anyar. Disamping itu, pada 2026 Pemerintah Kabupaten Serang juga direncanakan akan membangun kerjasama dengan Pemerintah Kota Serang agar bisa membuang sampah ke TPA Cilowong.

Pemerintah Kabupaten Serang telah mengeluarkan Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan. Di dalam perda tersebut terdapat upaya penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan sampah melalui upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah. Upaya pengelolaan sampah ini harus dipahami oleh setiap penduduk di Kabupaten Serang, sehingga penanganan dan pengurangan sampah dapat diimplementasikan dengan baik. Berikut disajikan tabel data timbulan sampah.

Tabel 2.1. 28
Data Timbulan Sampah di Kabupaten Serang

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024			
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
1	Cinangka	60,815	0.7	42.6	60,815	0.7	42.6	61,910	0.7	43.3	61,910	0.7	43.34	62,652	0.70	43.86	160.08
2	Padarincang	69,647	0.7	48.8	69,647	0.7	48.8	72,386	0.7	50.7	72,386	0.7	50.67	71,652	0.70	50.16	183.07
3	Ciomas	42,771	0.7	29.9	42,771	0.7	29.9	44,764	0.7	31.3	44,764	0.7	31.33	44,201	0.70	30.94	112.93
4	Pabuaran	43,155	0.7	30.2	43,155	0.7	30.2	46,182	0.7	32.3	46,182	0.7	32.33	44,402	0.70	31.08	113.45
5	Gunungsari	23,517	0.7	16.5	23,517	0.7	16.5	24,924	0.7	17.4	24,924	0.7	17.45	24,675	0.70	17.27	63.04
6	Baros	59,302	0.7	41.5	59,302	0.7	41.5	62,477	0.7	43.7	62,477	0.7	43.73	61,335	0.70	42.93	156.71
7	Petir	61,896	0.7	43.3	61,896	0.7	43.3	64,489	0.7	45.1	64,489	0.7	45.14	65,250	0.70	45.68	166.71
8	Tunjung Teja	47,101	0.7	33.0	47,101	0.7	33.0	49,035	0.7	34.3	49,035	0.7	34.32	49,362	0.70	34.55	126.12
9	Cikeusal	76,980	0.7	53.9	76,980	0.7	53.9	80,893	0.7	56.6	80,893	0.7	56.63	80,223	0.70	56.16	204.97
10	Pamarayan	59,805	0.7	41.9	59,805	0.7	41.9	62,877	0.7	44.0	62,877	0.7	44.01	62,903	0.70	44.03	160.72
11	Bandung	38,418	0.7	26.9	38,418	0.7	26.9	39,206	0.7	27.4	39,206	0.7	27.44	40,721	0.70	28.50	104.04
12	Jawilan	59,739	0.7	41.8	59,739	0.7	41.8	63,401	0.7	44.4	63,401	0.7	44.38	61,520	0.70	43.06	157.18
13	Kopo	53,552	0.7	37.5	53,552	0.7	37.5	56,488	0.7	39.5	56,488	0.7	39.54	54,757	0.70	38.33	139.90
14	Cikande	110,569	0.7	77.4	110,569	0.7	77.4	114,503	0.7	80.2	114,503	0.7	80.15	115,713	0.70	81.00	295.65
15	Kibin	61,020	0.7	42.7	61,020	0.7	42.7	60,229	0.7	42.2	60,229	0.7	42.16	61,348	0.70	42.94	156.74
16	Kragilan	80,302	0.7	56.2	80,302	0.7	56.2	83,273	0.7	58.3	83,273	0.7	58.29	81,814	0.70	57.27	209.03
17	Waringin Kurung	48,859	0.7	34.2	48,859	0.7	34.2	50,631	0.7	35.4	50,631	0.7	35.44	50,876	0.70	35.61	129.99
18	Mancak	48,247	0.7	33.8	48,247	0.7	33.8	50,994	0.7	35.7	50,994	0.7	35.70	49,378	0.70	34.56	126.16
19	Anyar	58,726	0.7	41.1	58,726	0.7	41.1	59,700	0.7	41.8	59,700	0.7	41.79	60,626	0.70	42.44	154.90
20	Bojonegara	50,286	0.7	35.2	50,286	0.7	35.2	51,213	0.7	35.8	51,213	0.7	35.85	52,714	0.70	36.90	134.68
21	Pulo Ampel	39,297	0.7	27.5	39,297	0.7	27.5	40,654	0.7	28.5	40,654	0.7	28.46	40,607	0.70	28.42	103.75
22	Kramatwatu	100,119	0.7	70.1	100,119	0.7	70.1	102,144	0.7	71.5	102,144	0.7	71.50	103,300	0.70	72.31	263.93
23	Ciruas	82,622	0.7	57.8	82,622	0.7	57.8	85,690	0.7	60.0	85,690	0.7	59.98	85,547	0.70	59.88	218.57

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024			
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
24	Pontang	47,248	0.7	33.1	47,248	0.7	33.1	48,845	0.7	34.2	48,845	0.7	34.19	49,688	0.70	34.78	126.95
25	Lebak Wangi	38,893	0.7	27.2	38,893	0.7	27.2	40,215	0.7	28.2	40,215	0.7	28.15	40,584	0.70	28.41	103.69
26	Carenang	39,362	0.7	27.6	39,362	0.7	27.6	41,002	0.7	28.7	41,002	0.7	28.70	41,032	0.70	28.72	104.84
27	Binuang	31,739	0.7	22.2	31,739	0.7	22.2	33,350	0.7	23.3	33,350	0.7	23.35	32,860	0.70	23.00	83.96
28	Tirtayasa	46,349	0.7	32.4	46,349	0.7	32.4	49,623	0.7	34.7	49,623	0.7	34.74	48,758	0.70	34.13	124.58
29	Tanara	42,294	0.7	29.6	42,294	0.7	29.6	44,501	0.7	31.2	44,501	0.7	31.15	43,635	0.70	30.54	111.49
	Kabupaten Serang	1,622,630	20	1,136	1,622,630	20	1,136	1,685,599	20	1,180	1,685,599	20	1,179.92	1,682,133	20.30	1,177.49	4,297.85

Sumber : DLH Kabupaten Serang, 2025

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Indeks Ketahanan Energi

1) Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Listrik Terpasang

PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik berdasarkan data BPS dari tahun 2020-2023 telah menyalurkan daya pada pelanggan di wilayah Kabupaten Serang sebesar 1.961.285.900 VA, dengan daya terbesar disalurkan sebesar 434.602.000 VA pada tahun 2019. Jumlah daya yang disalurkan pertahun perpelanggan adalah sebesar 1.090,70 VA dengan jumlah daya terbesar disalurkan pada tahun adalah sebesar 1.432,43 VA yaitu pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya jumlah daya listrik terpasang yang disalurkan kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. 29
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Listrik Terpasang PT. PLN di Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Pelanggan (Sambungan)	Jumlah Daya Listrik Terpasang (VA)
1	2020	387.803	284.050.000
2	2021	404.785	n.a
3	2022	421.303	n.a
4	2023	436.416	2.348.866.531
5	2024	453.891	2.456.444.617

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2025

2) Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah pelanggan listrik mengalami fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Menurut data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2020 tercatat jumlah pelanggan listrik PT. PLN sebanyak 321.175, dengan jumlah pelanggan terbanyak berasal dari pelanggan rumah tangga dengan jumlah sebanyak 305.021 atau sebesar 94,97dari jumlah keseluruhan pelanggan pada tahun yang sama. Jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2020 tercatat sebanyak 305.021 pelanggan. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. 30
Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN Berdasarkan Golongan Tarif di Kabupaten Serang Tahun 2014 – 2021

No.	Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Sambungan)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sosial	6.772	7.452	7.824	8.403	n.a.	7.833	8.403	n.a.
2	Rumah Tangga	249.002	276.624	289.530	305.021	n.a.	289.530	305.021	n.a.
3	Usaha	3.736	4.156	5.162	6.821	n.a.	5.162	6.821	n.a.
4	Industri	263	176	182	191	n.a.	182	191	n.a.
5	Pemerintah	214	229	238	256	n.a.	238	256	n.a.
6	Jalan Umum	406	442	457	483	n.a.	457	483	n.a.
Jumlah		260.393	289.079	303.411	321.175	n.a.	303.402	321.175	

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2025

2.1.4.2. Indeks Ketahanan Air (Neraca Air)

Neraca Air atau Imbangan Air mengilustrasikan seberapa besar debit sungai yang didistribusikan dan dimanfaatkan untuk keperluan domestic, industri, PDAM, irigasi dan lain-lain. Sisa debit yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan spam terekapitulasi pada tiap daerah aliran sungai (DAS).

1) DAS Cidanau

Rekapitulasi besarnya debit andalan, pemakaian air dan sisa air yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a)	Sungai Cidanau		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 2,13 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 3,87 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= -1,74 m ³ /det (defisit)
b)	Sungai Cidungiang-Cibetung		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,62 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,04 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 0,58 m ³ /det (surplus)
c)	Sungai Cikalumpang		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,09 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,01 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 0,08 m ³ /det (surplus)
Total DAS Cidanau			
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 2,84 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 3,99 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air yang bisa dimanfaatkan)	Q	= -1,15 m ³ /det (defisit)

2) DAS Cidurian

Rekapitulasi besarnya debit andalan, pemakaian air dan sisa air yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a)	Sungai Cibeurem-Neglasari		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,91 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,32 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 0,59 m ³ /det (surplus)
b)	Sungai Cidurian-Cikande Parigi		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 13,90 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 6,54 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 7,36 m ³ /det (surplus)

c) Sungai Cidurian Hulu		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 1,72 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 0,99 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 0,73 m ³ /det (surplus)

Total DAS Cidurian

Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 16,53 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 7,85 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air yang bisa dimanfaatkan)	Q	= 8,68 m ³ /det (surplus)

3) DAS Ciujung

Rekapitulasi besarnya debit andalan, pemakaian air dan sisa air yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a) Ciujung-Pamarayan		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 43,95 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 20,23 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 23,72 m ³ /det (surplus)
b) Ciujung Hulu-Bojongmanik		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 8,24 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 2,72 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 5,52 m ³ /det (surplus)
c) Ciberang Jembatan Keong		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 16,55 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 9,31 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 7,33 m ³ /det (surplus)
d) Sungai Ciberang Sabagi		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 9,26 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 5,36 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 3,89 m ³ /det (surplus)
e) Sungai Cilaki-Jahe		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 6,00 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 3,09 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 2,91 m ³ /det (surplus)
f) Sungai Cisimeut-Cidamar		
Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 2,72 m ³ /det
Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 1,18 m ³ /det
Neraca Air (Sisa air)	Q	= 1,54 m ³ /det (surplus)

g)	Sungai Ciujung Jembatan Rangkasbitung		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 41,22 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 27,96 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 13,25 m ³ /det (surplus)
h)	Sungai Ciujung-Kebin / Keragilan		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 47,00 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 30,18 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 16,82 m ³ /det (surplus)
i)	Bendung Pamarayan		
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 9,27 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 5,81 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air)	Q	= 3,46 m ³ /det (surplus)
Total DAS Cidurian			
	Debit andalan rata-rata tahunan sebesar	Q	= 184,18 m ³ /det
	Air yang terpakai rata-rata tahunan sebesar	Q	= 105,84 m ³ /det
	Neraca Air (Sisa air yang bisa dimanfaatkan)	Q	= 78,34 m ³ /det (surplus)

2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur (Badan Pangan Nasional, 2023). Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Tabel 2.1. 31
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	77,07	77,7	78,63	79,26	81,39

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Berdasarkan tabel diatas, selama periode tahun 2020-2023 Kabupaten Serang memiliki ketahanan pangan yang baik di tiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IKP sebesar 77,07 dengan kategori baik dan cenderung meningkat hingga tahun 2024 mencapai 81,39 dengan kategori sangat baik atau sangat tahan akan ketahanan pangannya.

2.1.4.4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan gizi penduduk adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau prevalence of undernourishment (PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/prevalence of undernourishment (PoU) merupakan salah satu indikator strategis dalam mencapai tujuan SDG's kedua, yaitu tanpa kelaparan. Seseorang masuk dalam kriteria tidak cukup pangan jika konsumsi makanan tidak cukup untuk dapat hidup aktif dan sehat (Kementan, 2022). PoU dapat digunakan untuk mengetahui, menilai, dan menganalisis kondisi ketidakcukupan gizi masyarakat yang berbasis kewilayahan. Ketidakcukupan konsumsi pangan memiliki dampak yang serius terutama kaitannya dengan kasus stunting, wasting, dan underweight pada anak.

pemerintah perlu memberikan perhatian pada dimensi-dimensi ketahanan pangan untuk mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tingkat provinsi. Pemerintah harus berfokus pada 4 dimensi sekaligus, yakni dimensi keterjangkauan (availability), dimensi akses (access), dimensi pemanfaatan (utilization), dan dimensi stabilitas (stability). Upaya yang perlu dilakukan pemerintah di antaranya adalah menurunkan persentase penduduk miskin, meningkatkan produksi rata-rata padi, dan memberdayakan wilayah tertinggal. Berikut adalah nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau prevalence of undernourishment (PoU) Kabupaten Serang.

Tabel 2.1. 32
PoU Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

Uraian	PoU Kabupaten Serang (%)					
	2020	2021	2022	2023	2024	%Pertumbuhan
PoU	2,44	3,03	2,90	3,23	2,13	0,03 %

Sumber : Buku Saku PoU Badan Pangan Nasional

Berdasarkan tabel diatas, dalam rentang tahun 2020-2024 angka PoU Kabupaten Serang mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 nilai PoU mencapai 2,44%, dan pada tahun 2024 nilainya mencapai 2,13%. Penurunan PoU dari tahun 2023 ke 2024 cukup signifikan sebesar 1,10 persen. Hal ini menjadi indikator perbaikan status ketahanan pangan di Kabupaten Serang pada tahun 2024. Nilai PoU (Prevalence of Undernourishment) fluktuatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dinamis dan saling terkait seperti ketersediaan pangan, harga pangan, kondisi sosial politik, kondisi ekonomi wilayah, perubahan iklim dan kebijakan pemerintah. Semakin tinggi angka PoU menunjukkan semakin banyak pula penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.

2.1.4.5. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah perbandingan antara jumlah penjualan tenaga listrik dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah (mengacu pada Statistik Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM). Akses terhadap listrik sangat penting untuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Konsumsi listrik per kapita yang tinggi dapat mengindikasikan akses yang lebih baik terhadap layanan listrik. Indikator konsumsi listrik per kapita dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, bahkan seringkali mengindikasikan tingkat industrialisasi dan urbanisasi yang tinggi di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel dibawah, konsumsi listrik per kapita Kabupaten Serang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang membutuhkan pasokan listrik yang lebih tinggi, tingginya angka investasi diwilayah Kabupaten Serang dikarenakan mendukung perkembangan kegiatan industri, produksi, transportasi, dan layanan publik karena akses masyarakat terhadap listrik sangat tinggi.

Tabel 2.1. 33
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Listrik Terpasang PT. PLN di Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2023

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	1.622.630	1.640.115	1.661.374	1.682.133
2	Jumlah Daya Listrik Terpasang (VA)	284.050.000	n.a	n.a	2.348.866.531
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	175,05	n.a	n.a	1396,36

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2025 (diolah)

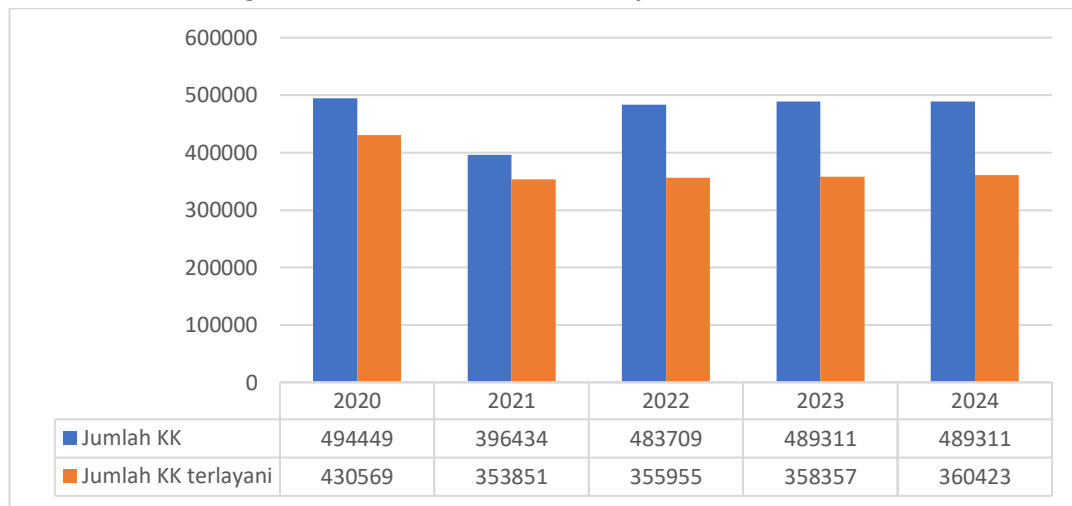
2.1.4.6. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses terhadap air layak minum merupakan hal penting yang menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan berkelanjutan khususnya bagi kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga merupakan komitmen bersama baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan tingkat nasional maupun global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2023 dimana salah satunya terkait akses terhadap air layak minum. Pemerintah Kabupaten Serang bersama pemangku kepentingan lainnya terus memprioritaskan masalah air layak minum menjadi agenda utama dengan cara menyiapkan perencanaan, investasi dan kerangka pendanaan dalam pembangunan infrastruktur bidang air layak minum.

Berdasarkan data Grafik dibawah ini, jumlah KK yang memiliki akses terhadap air layak minum pada tahun 2020-2024 menunjukan trend yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah KK yang memiliki akses terhadap air layak minum mencapai 87,08% atau setara 430.569 KK dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 89,26% atau setara dengan 353.851 KK. Namun pada tahun 2022, jumlah KK yang memiliki akses terhadap air layak minum mengalami penurunan mencapai 73,59% atau hanya 355.955 KK pada tahun tersebut. Pada tahun 2023 jumlah KK yang memiliki akses terhadap air layak minum mengalami penurunan mencapai 73,24% atau hanya 358.357 KK. Hal ini disebabkan terjadi penambahan jumlah rumah tangga sebanyak 5.602 rumah tangga atau menjadi sebanyak 489.311 KK. Sedangkan penambahan akses air minum hanya sebanyak 2.402 rumah tangga. Penambahan akses air minum ini dilaksanakan melalui pendanaan dana DAK, APBD (Program Pamsimas APBD & SPAM APBD) dan APBN (Pamsimas).

Grafik 2.1. 1

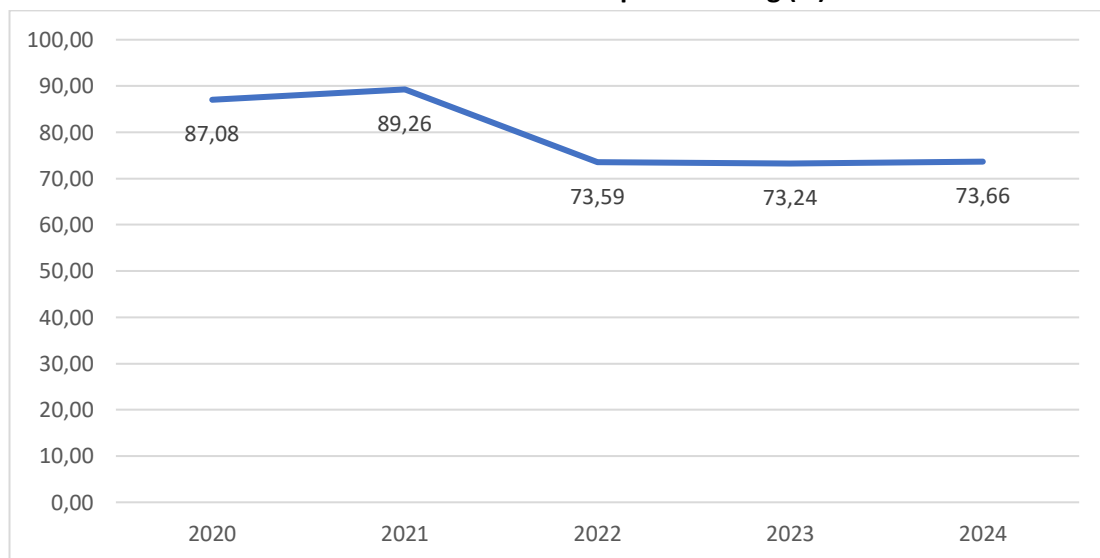
Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Layak Minum Tahun 2020-2024



Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2024 (diolah)

Grafik 2.1. 2

Capaian Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Layak Minum Masyarakat Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Serang (%)



Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan air layak minum untuk masyarakat adalah melalui penyediaan air layak minum melalui sistem perpipaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang. Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini, terlihat bahwa jumlah pelanggan PDAM mengalami dinamika jumlah pelanggan.

Sementara itu, untuk jumlah air yang disalurkan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 disalurkan sebanyak 426.053 m3 air layak minum dan pada tahun 2023 jumlah air layak minum yang disalurkan berkisar 3.031.321.871 m3 artinya terjadi peningkatan jumlah air yang disalurkan hampir mencapai 2,5 juta m3.

Tabel 2.1. 34
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Air Yang Disalurkan Oleh PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Pelanggan (Sambungan)	Jumlah Air Disalurkan (m3)
1	2020	25.929	426.053
2	2021	n.a.	n.a.
3	2022	26.926	450.807
4	2023	28.375	3.031.321.871

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Kondisi Pemanfaatan Lahan

Sesuai dengan data penggunaan lahan tahun 2022, penggunaan lahan di Kabupaten Serang di dominasi oleh lahan non terbangun seluas 126.121,21 ha atau 85,65% luas kabupaten serang. Kawasan non terbangun ini berupa hutan, lahan pertanian maupun lahan yang tidak digunakan seperti tanah kosong, semak belukar dan padang rumput. Sedangkan luas lahan kawasan terbangun pada tahun 2022 adalah seluas 21.131,40 ha atau 14,35% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Kawasan terbangun ini dipergunakan untuk hunian dan industri.

Penggunaan lahan non terbangun sebagian besar penggunaannya berupa sawah dengan padi terus menerus seluas 51.162,80 Ha atau sekitar 34,74% luas Kabupaten Serang. Lahan sawah ini tersebar di hampir semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Dominasi lahan terbesar kedua pada kawasan non terbangun adalah lahan hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi seluas 44.030,49 ha atau sekitar 29,9%. Hutan lahan tinggi ini juga tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Serang. Penggunaan lahan lainnya yang cukup besar di kawasan non terbangun adalah berupa semak belukar seluas 11.099,71 ha atau sekitar 7,54% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Lahan semak belukar ini terletak di bagian selatan yaitu di sekitar Kecamatan Mancak, Gunungsari, Padarindang dan Ciomas.

Pada lahan terbangun teridentifikasi lahan yang mendominasi adalah permukiman dan tempat kegiatan yaitu seluas 14.490,81 ha atau sekitar 9,84%. Sedangkan kegiatan dengan bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran menempati lahan seluas 5.344,27 ha atau sekitar 3,63% yang tersebar di sekitar koridor Kragilan-Kibin-Cikande dan disekitar Bojonegara. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 35
Penggunaan Lahan di Kabupaten Serang Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	Lahan Non Terbangun	126.121,21	85,65
1	Danau/ telaga alami	497,19	0,34
2	Dermaga Laut	24,79	0,02
3	Hamparan pasir pantai non-vulkanik	18,68	0,01
4	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	44.030,49	29,90

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
5	Hutan mangrove primer kerapatan tinggi	193,37	0,13
6	Kebun campuran	7.669,59	5,21
7	Kolam air tawar lain	110,44	0,07
8	Ladang/tegalan dengan palawija	515,52	0,35
9	Lahan terbuka lain	2.584,67	1,76
10	Laut	0,47	0,00003
11	Rawa pesisir bervegetasi	22,43	0,02
12	Saluran irigasi	47,51	0,03
13	Sawah dengan padi terus menerus	51.162,80	34,74
14	Semak belukar	11.099,71	7,54
15	Sungai	759,64	0,52
16	Tambak ikan/udang	7.383,91	5,01
B.	Lahan Terbangun	21.131,40	14,35
17	Bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran	5.344,27	3,63
18	Pariwisata/Rekreasi pantai	123,22	0,08
19	Pelabuhan	0,73	0,00005
20	Penambangan terbuka lain	702,67	0,48
21	Permukaan diperkeras lain	216,76	0,15
22	Permukiman dan tempat kegiatan	14.490,81	9,84
23	Peternakan	252,94	0,17
Jumlah Total (A + B)		147.252,61	100,00

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024

2.1.5.2. Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan dokumen acuan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam dokumen RTRW tersebut telah ditetapkan rencana pola ruang yang merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang yang mekanismenya dilakukan melalui proses perijinan pemanfaatan ruang. Selain rencana pola ruang, dalam RTRW juga telah ditetapkan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) yang merupakan instrument pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam konteks perijinan pemanfaatan ruang, RTRW sebagai acuan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang sebenarnya masih kurang detail mengingat skala peta dan kedalaman substansinya masih bersifat umum (skala wilayah kabupaten).

Untuk itu, sebagai jalan keluarnya Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan atau Kawasan tertentu yang diprioritaskan. RDTR merupakan operasionalisasi dari RTRW yang didalamnya memuat rencana pola ruang yang berpedoman pada KUPZ dalam RTRW.

Tingkat ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang dapat dihitung atau diukur dari seberapa besar tingkat capaian pemanfaatan ruang suatu Kawasan peruntukan (rencana pola ruang) pada suatu wilayah dibandingkan dengan luas rencana suatu kawasan peruntukan yang telah ditetapkan dalam dokumen tata ruang.

Melalui perhitungan atau pengukuran perbandingan antara rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang terhadap RTRW mencapai nilai 97,65% atau seluas 144.393,39 ha. Sedangkan sisanya seluas 3.436,82 ha belum terwujud. Untuk mengetahui hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. 36
Tingkat Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2023

No	Rencana Pola Ruang		Kondisi Faktual											Per wujudan (%)	Kategori Penilaian
	Kawasan Peruntukan/ Zona	Luasan (Ha)	KKPR (Ha)	Data & Informasi Geospasial (Ha)	Dokumen Kehutanan (Ha)	Hak Kepemilikan Tanah							Total Luasan (Ha)		
						HGB	HGU	Hak Milik	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf	Kosong			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Kawasan Lindung														
1	Kawasan Badan Air	935,11	-	935,11	-	2,87	-	29,52	8,61	-	0,04	70,06	935,11	100%	Terwujud
2	Kawasan Hutan Lindung	716,94	-	710,87	-	-	-	0,40	0,68	-	-	-	710,87	99%	Terwujud
3	Kawasan Perlindungan Setempat	4.490,48	17,06	2.847,31	-	173,47	0,60	438,94	41,97	9,09	0,84	676,67	2.864,37	63%	Tidak Terwujud
4	Kawasan Suaka Alam	5.063,44	-	3.801,59	-	0,26	-	31,07	0,36	-	-	3,59	3.801,59	75%	Tidak Terwujud
5	Kawasan Pelestarian Alam	1.174,99	-	1.157,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157,40	99%	Terwujud
6	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	747,54	-	735,50	-	-	-	48,37	0,07	-	-	115,72	735,50	98%	Terwujud
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	378,06	60,94	145,08	-	-	-	50,22	-	-	-	34,27	206,02	38%	Tidak Terwujud
B.	Kawasan Budi Daya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4.396,36	-	4.322,94	-	-	-	56,37	-	-	-	14,84	4.322,94	98%	Terwujud
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.288,25	1,02	1.272,26	-	1,58	-	43,65	-	5,78	-	109,71	1.273,27	99%	Terwujud
3	Kawasan Hutan Rakyat	5.540,04	21,23	5.366,32	-	42,02	-	268,42	24,55	34,83	-	274,79	5.387,55	97%	Terwujud

No	Rencana Pola Ruang		Kondisi Faktual											Per wujudan (%)	Kategori Penilaian
	Kawasan Peruntukan/ Zona	Luasan (Ha)	KKPR (Ha)	Data & Informasi Geospasial (Ha)	Dokumen Kehutanan (Ha)	Hak Kepemilikan Tanah							Total Luasan (Ha)		
						HGB	HGU	Hak Milik	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf	Kosong			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Kawasan Tanaman Pangan	32.22 9,36	0,14	32.22 9,36	-	34,7 0	-	4.60 3,83	41,6 0	-	11,4 3	7.35 9,44	32.22 9,49	100 %	Terwujud
5	Kawasan Perkebunan	24.96 4,42	0,16	24.96 4,42	-	156, 58	-	1.52 4,65	6,64	-	3,60	2.96 8,81	24.96 4,57	100 %	Terwujud
6	Kawasan Perikanan Budi Daya	223,9 9	129, 32	223,9 9	-	-	-	77,1 2	-	-	-	97,5 4	353,3 1	100 %	Terwujud
7	Kawasan Peruntukan Industri	26.30 9,34	7.04 3,78	26.30 9,34	-	3.34 9,24	137, 33	3.98 6,95	87,5 1	87,2 4	0,52	4.93 0,52	33.35 3,11	100 %	Terwujud
8	Kawasan Pariwisata	3.287, 31	52,2 2	3.287, 31	-	184, 62	-	431, 95	8,05	-	3,62	649, 29	3.339, 53	100 %	Terwujud
9	Kawasan Permukiman Perkotaan	32.12 7,33	230, 02	32.12 7,33	-	1.41 0,06	19,9 5	5.55 7,73	205, 64	6,57	16,9 0	4.64 4,72	32.35 7,35	100 %	Terwujud
10	Kawasan Permukiman Perdesaan	3.957, 26	0,05	3.957, 26	-	21,9 8	-	679, 81	12,7 2	-	1,55	592, 15	3.957, 30	100 %	Terwujud

Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Sementara itu, untuk tingkat realisasi perwujudan struktur ruang di Kabupaten Serang mencapai angka 91% atau seluas 2.875,66 ha. Sedangkan sisanya seluas 280,27 ha masih belum terwujud untuk mengetahui data rinci nya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. 37
Tingkat Kesesuaian Perwujudan Struktur Ruang RTRW Kab. Serang Tahun 2023

Jenis	Klasifikasi		Total	Prosentase	
	Belum Terwujud	Terwujud		Belum Terwujud	Terwujud
Jaringan Energi	11,75	265,29	277,04	4%	96%
Jaringan Sumber Daya Air	87,89	52,85	140,74	62%	38%
Jaringan Telekomunikasi	-	363,21	363,21	0%	100%
Jaringan Transportasi	180,63	2.194,32	2.374,94	8%	92%
Kab.Serang	280,27	2.875,66	3.155,93	9%	91%

Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020-2024 menunjukan tren yang meningkat di tiap tahunnya terkait dengan realisasi RTRW di Kabupaten Serang. Pada tahun 2020 realisasi RTRW sebesar 75.079,07 ha dan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 144.393,39 ha dari rencana peruntukan RTRW sebesar 147.830,21 ha.

Tabel 2.1. 38
Rencana dan Realisasi RTRW di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

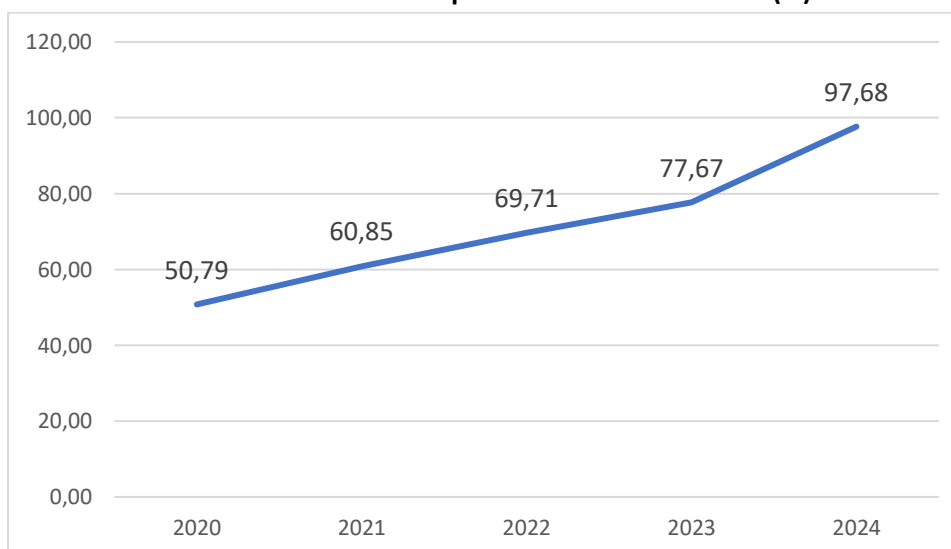
No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW (ha)	75.079,07	89.953,71	103.049,71	114.826,82	144.393,39
2	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	147.830,21	147.830,21	147.830,21	147.830,21	147.830,21

Sumber: Hasil Analisis Rasio Kesesuaian Tata Ruang (RTRW Kabupaten Serang)

Jika dilihat dari Grafik dibawah ini, ketaatan terhadap RTRW menunjukan realisasi yang positif. Peningkatan pada tiap tahunnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya dan berkomitmen untuk melakukan Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dalam RTRW hingga di tahun 2024 mencapai 97,67%.

Kenaikan persentase ketaatan dari tahun 2020-2024 mengindikasikan peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Peningkatan ketaatan ini merupakan akibat dari peningkatan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan dan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Grafik 2.1. 3
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Hasil Analisis Rasio Kesesuaian Tata Ruang (RTRW Kabupaten Serang) 2024, diolah

2.1.5.3. Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Salah satu sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja utama adalah indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,5- 68,5 (KLHK RI, 2019).

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional yang digeneralisasi dari nilai IKLH seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di

Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Capaian nilai dari masing-masing Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/ITV) di Kabupaten Serang selama periode tahun 2020-2024, sangat dinamis atau fluktuatif, walaupun selisihnya untuk tiap tahun pada masing-masing indeks tidak terlalu besar. Fluktuasi nilai Indeks Kualitas Air (IKA) kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) tingginya kadar pencemaran yang berasal dari limbah rumah tangga maupun non rumah tangga; (2) Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya debit air sungai sehingga konsentrasi kadar pencemar di air meningkat; dan (3) masih banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan termasuk pada badan perairan (sungai).

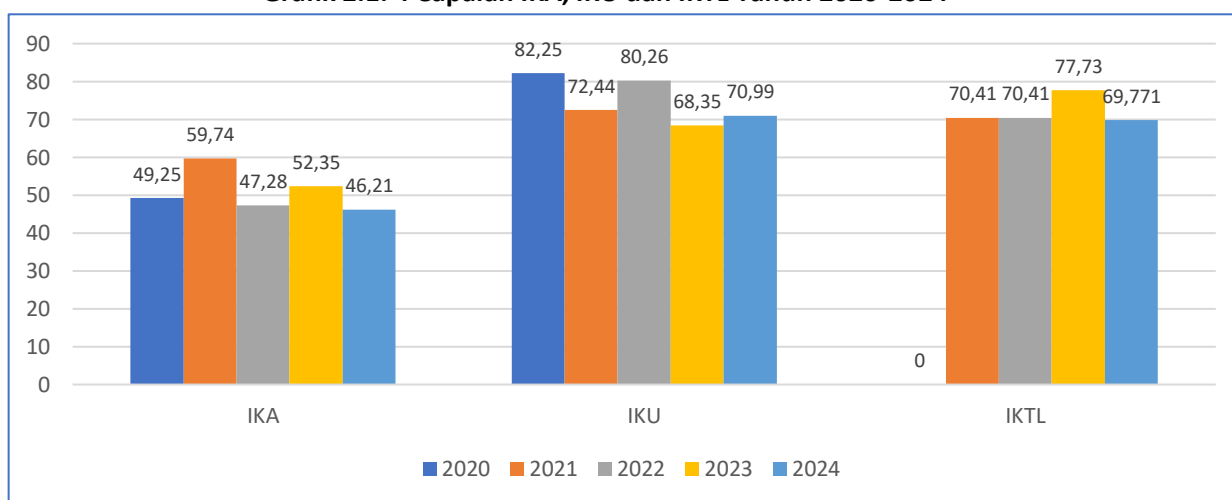
Tabel 2.1. 39 Capaian Nilai IKA, IKU, ITV dan IKLH Kabupaten Serang dan Provinsi Banten

Uraian	Kabupaten Serang				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	49,25	59,74	47,28	52,35	46,21
IKU	82,25	72,44	80,26	68,35	70,99
ITV	69,98	70,41	70,41	77,73	69,771
IKLH	67,44	67,818	65,701	64,389	61,406
Uraian	Provinsi Banten				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	50,56	54,95	55,49	58,93	54,32
IKU	72,83	74,14	73,97	66,67	69,84
ITV	37,98	39,21	38,96	43,13	43,03
IKLH	59,37	64,14	63,41	62,52	62,54

Sumber : DLH Kabupaten Serang, 2025

Sementara itu, untuk indikasi penyebab nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan adalah: (1) semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor; (2) masih adanya aktivitas sektor industri yang menggunakan bahan emisi yang tidak ramah energi; (3) kurangnya ruang terbuka hijau; dan (4) masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk lebih lengkapnya capaian nilai indeks untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

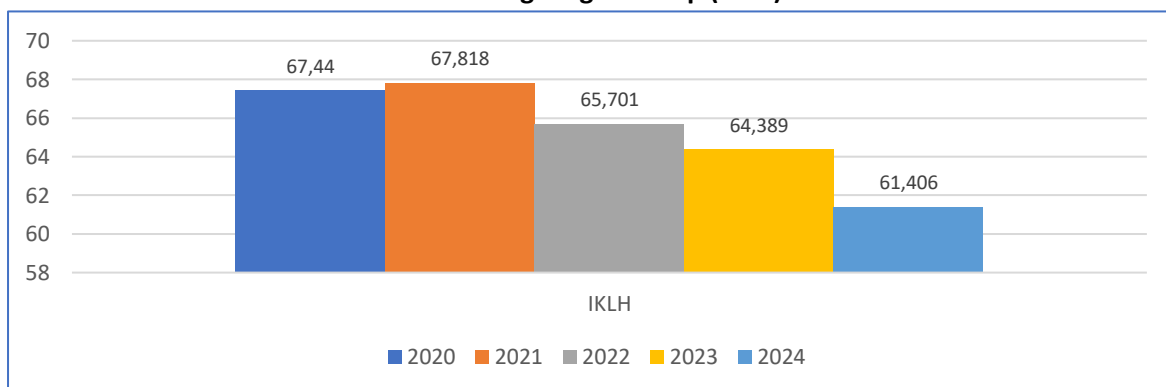
Grafik 2.1. 4 Capaian IKA, IKU dan IKTL Tahun 2020-2024



Sumber : DLH Kabupaten Serang, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan hidup suatu wilayah. Penggunaan IKLH menjadi krusial dalam menyusun kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). Untuk menilai kinerja suatu program perbaikan kualitas lingkungan hidup, nilai IKLH dapat digunakan sebagai indikator keberhasilannya daya dukung, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilannya. Selain itu IKLH juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Grafik 2.1. 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023



Sumber: LKIP, LPPD DLH Kab.Serang

Berdasarkan grafik di atas, capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKLH mencapai 67,44 meningkat pada tahun 2021 mencapai 67,818. Akan tetapi, pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan mencapai 65,701 dan di tahun 2023 mencapai 64,389 dan pada tahun 2024 yaitu 61,406. Penurunan itu di akibatkan dari Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak memenuhi target dikarenakan makin meningkatnya potensi beban pencemaran akibat meningkatnya aktivitas manusia di wilayah Kabupaten Serang. Kegiatan industrialisasi, konversi lahan hijau menjadi lahan usaha (perumahan, industri dan usaha lainnya), meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak lulus uji emisi menjadi potensi beban cemaran udara. Kondisi tersebut di perburuk oleh musim kemarau yang lebih panjang di tahun 2024, Pelaksanaan uji emisi kendaraan dan penghijauan terutama di wilayah wilayah industri harus direalisasikan dengan optimal untuk mengelola kualitas udara, pengawasan terhadap industri-industri peleburan harus menjadi prioritas untuk mengendalikan potensi beban cemaran udara.

2.1.5.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Salah satu poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan (SDGs) adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan SDGs di bidang akses air bersih dan sanitasi adalah

memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam adalah mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level. Dalam mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan tersebut, Kabupaten Serang telah menentukan target jumlah KK dengan akses aman air limbah serta realisasi jumlah KK yang terlayani akses aman air limbah domestik dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.1. 40 Target dan Realisasi Jumlah KK Akses Aman Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024 Kabupaten Serang

TAHUN	Target Jumlah KK Akses Aman Air Limbah	Jumlah KK Akses Aman Air Limbah	%
2020	39.6434	2.191	0,55%
2021	40.8041	2.291	0,56%
2022	48.3709	7.251	1,50%
2023	48.9311	4.715	0,96%
2024	48.9311	4.865	0,99%

Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat realisasi akses aman air limbah di Kabupaten Serang selama 5 tahun terakhir dimana persentase jumlah rumah tangga dengan akses air limbah di setiap tahunnya belum mencapai 1%. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini Kabupaten Serang masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), sehingga indikator akses aman air limbah yang digunakan di Kabupaten Serang hanya berdasarkan data KK yang telah melakukan penyedotan air limbah di septic tank masing-masing selama 5 tahun terakhir. Sangat disayangkan Kabupaten Serang masih belum dapat mendata pengolahan air limbah.

Berdasarkan data perkembangan akses aman air limbah dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pencapaian program masih berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Target jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diharapkan memperoleh akses aman air limbah menunjukkan tren peningkatan dari 39.643 KK pada tahun 2020 menjadi 48.931 KK pada tahun 2024. Namun demikian, realisasi capaian belum menunjukkan kemajuan signifikan dan cenderung jauh lebih rendah dibandingkan target tahunan.

Pada tahun 2020, capaian akses aman air limbah baru mencapai 2.191 KK atau setara 0,55% dari target yang ditetapkan. Kinerja pada tahun 2021 relatif stagnan dengan capaian 2.291 KK atau 0,56%. Perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah KK yang memperoleh akses aman air limbah meningkat menjadi 7.251 KK, sehingga persentase pencapaian mencapai 1,50%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun ini. Namun, peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2023, capaian menurun menjadi 4.715 KK atau 0,96%, dan meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 4.865 KK (0,99%), persentase pencapaian tetap berada di bawah 1%. Tren fluktuatif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan konsisten dan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, pendanaan, maupun sosial.

Secara keseluruhan, kinerja pencapaian akses aman air limbah dalam periode 2020–2024 masih tergolong sangat rendah. Capaian yang tidak mencapai 2% dari target setiap tahunnya mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi intervensi, efektivitas program, serta mekanisme monitoring dan pelaksanaan di lapangan. Upaya perbaikan dan penguatan perlu segera dilakukan agar target peningkatan akses sanitasi dapat dicapai secara lebih optimal pada periode berikutnya.

2.1.5.5. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu, atau dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kilogram) gravimetri atau volume (liter) volumetri (Tchobanoglous, 1993). Besarnya timbulan sampah secara nyata diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan terhadap sampah dari berbagai sumber melalui sampling yang representatif. Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan. Perhitungan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Serang yang menggunakan skala kuantitas per orang terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Serang. Sementara itu dalam upaya pengelolaan sampah sejak tahun 2021-2024, Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), hanya 2 TPS 3R, 2 TPST dan 44 Bank Sampah sehingga persentase penanganan sampah di kabupaten serang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. 41 Data Penanganan Sampah Tahun 2020-2024 di Kabupaten Serang

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
A.	Data Dasar						
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.622.630	1.647.790	1.678.915	1.682.133	1.756.816
2	Standar Timbulan Sampah Perhari	m3/org	0,00225	0,00225	0,00225	0,00225	0,00225
3	Timbulan Sampah Perhari	m3/org	3.650,918	3.707,528	3.777,559	3.784,799	3.952,836
4	Timbulan Sampah Pertahun	m3	1.332.585	1.353.248	1.378.809	1.381.452	1.442.785
B.	Penanganan/ Pengangkutan Sampah						
1	Target Penanganan Sampah (70% Timbulan sampah)	m3/tahun	932.809	947.273	965.166	967.016	1.009.950
2	Total Jumlah Sampah Terangkut (realisasi)	m3	98.339	106.675	93.187	452.267	412.409
3	Persentase Penanganan Sampah	%	10,54	11,26	9,66	46,77	40,83
C.	Pengurangan Sampah						
1	Target Pengurangan Sampah (30% Timbulan Sampah)	m3/tahun	399.775	405.974	413.643	414.436	432.836
2	Total Jumlah Sampah Berkurangnya (realisasi)	m3	11.054	7.399	13.944	12.287	182.685
3	Persentase Pengurangan Sampah	(%)	2,77	1,82	3,37	2,96	42,21
D.	Penanganan Sampah						
1	Total Target Penanganan dan Pengurangan Sampah	m3	1.332.585	1.353.248	1.378.809	1.381.452	1.442.785
2	Total Realisasi Penanganan dan Pengurangan Sampah	m3	109.393	114.073	107.131	464.553	595.094
3	Persentase Pengelolaan Sampah (Penanganan dan Pengurangan)	%	8,21	8,43	7,77	33,63	41,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

2.1.5.6. Potensi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga adalah: Memisahkan sampah sesuai jenisnya, Membuat pupuk dari sampah organik, Melakukan daur ulang pada sampah anorganik, Menggunakan tas kain untuk berbelanja, Memanfaatkan bank sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu menjaga kebersihan lingkungan, pengurangan sampah, pemberian usul dan saran suatu kegiatan, Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan dan penghijauan lingkungan kantor dan sekolah (Adiwiyata), penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup (Pramuka Lingkungan) , dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat (P2WKSS), berikut potensi sampah per Kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2.1. 42 Potensi Sampah per Kecamatan pada Tahun 2024 Kabupaten Serang

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Perhari / ton	Timbulan sampah (M3)	Timbulan Sampah (Ton/tahun)
1.	KRAMATWATU	105422	73,80	221,39	26.935
2.	WARINGINKURUNG	53053	37,14	111,41	13.555
3.	BOJONEGARA	53294	37,31	111,92	13.617
4	PULO AMPEL	41616	29,13	87,39	10.633
5.	CIRUAS	87373	61,16	183,48	22.324
6.	KRAGILAN	86535	60,57	181,72	22.110
7.	PONTANG	50494	35,35	106,04	12.901
8.	TIRTAYASA	51607	36,12	108,37	13.186
9.	TANARA	46909	32,84	98,51	11.985
10.	CIKANDE	119175	83,42	250,27	30.449
11.	KIBIN	63475	44,43	133,30	16.218
12.	CARENANG	42889	30,02	90,07	10.958
13.	BINUANG	34896	24,43	73,28	8.916
14.	PETIR	67723	47,41	142,22	17.303
15.	TUNJUNG TEJA	51313	35,92	107,76	13.110
16.	BAROS	64719	45,30	135,91	16.536
17.	CIKEUSAL	83828	58,68	176,04	21.418
18.	PAMARAYAN	65686	45,98	137,94	16.783
19.	KOPO	58866	41,21	123,62	15.040
20	JAWILAN	66308	46,42	139,25	16.942
21.	CIOMAS	47734	33,41	100,24	12.196
22.	PABUARAN	48583	34,01	102,02	12.413
23.	PADARINCANG	76570	53,60	160,80	19.564
24.	ANYAR	62053	43,44	130,31	15.855
25.	CINANGKA	64662	45,26	135,79	16.521
26.	MANCAK	52365	36,66	109,97	13.379
27.	GUNUNGSARI	26025	18,22	54,65	6.649
28.	BANDUNG	41567	29,10	87,29	10.620
29.	LEBAK WANGI	42076	29,45	88,36	10.750
Jumlah		1.756.816	1.230	3.689	448.866

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Mencermati jumlah total potensi timbunan sampah sebagaimana tabel diatas serta belum tersedianya fasilitas pengelolaan akhir sampah di wilayah Kabupaten Serang merupakan faktor utama pemicu permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang. Untuk itu, diperlukan solusi tepat dalam mengatasi masalah persampahan tersebut.

Langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pengelolaan sampah antara lain dengan pembangunan TPST Kibin dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pengolahan sampah. Selain itu, telah dilakukan upaya-upaya pelibatan masyarakat melalui program Bank Sampah maupun gerakan pengolahan sampah melalui kegiatan 3R.

Permasalahan sampah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Serang mendorong Pemerintah Indonesia menginisiasi program pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bentuk intervensi memecahkan permasalahan sampah di daerah.

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 33 daerah kabupaten/kota yang menjadi calon lokasi penerima program PSEL. Program PSEL ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah timbunan sampah namun juga menjadi potensi sumber energi baru di kabupaten/kota yang memiliki masalah pengelolaan sampah, termasuk Kabupaten Serang.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Kawasan Rawan Bencana

Kadaan geofisika Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng (plate) yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan daerah pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke barat dan lempeng Asia Tenggara (lempeng Sunda atau lempeng Eurasia) yang bergerak ke selatan. Di samping ketiga lempeng besar tersebut terdapat juga lempeng mikro yang disebut dengan platelet Sumatera, di mana gerakannya berbeda dan bervariasi menurut lokasi. Di bagian utara terdapat lempeng Filipina.

Interaksi antara lempeng Indonesia-Australia dengan Eurasia antara lain tercermin oleh bentuk Palung Sunda yang memanjang sejajar dengan busur Sunda. Bentuk palung ini terjadi akibat dari kegiatan penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Sunda, di mana di selatan Pulau Jawa berarah barat- timur dan pergerakannya ke arah tegak lurus selatan-utara, sedangkan di barat daya Pulau Sumatera berarah barat laut-tenggara mengarah barat daya-timur laut, namun menyerong barat laut-tenggara. Pertemuan lempeng-lempeng bumi ini yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, dan juga kemungkinan tsunami.

Kondisi geologi di Selat Sunda sangat mempengaruhi sifat geologi dan geofisika Provinsi Banten secara umum maupun Kabupaten Serang secara khusus. Pengaruh tersebut tercermin dari:

- 1) Adanya ujung patahan atau sesar Sumatera (sesar Semangko) di Sumatera yang memanjang sampai Selat Sunda, yang merupakan jenis sesar geser aktif dengan panjang 1.650 km, yang memiliki pergerakan lateral antara 20 – 25 km dan percepatan horizontal 6 cm/tahun;
- 2) Bentuk umum daerah sebelah utara wilayah Propinsi Banten yang bermorfologi dataran dengan dominasi batuan sedimen atau alluvium atau perbukitan di Gunung Gede, sedangkan daerah selatan yang bermorfologi perbukitan/pegunungan dibentuk oleh batuan-batuan beku, metamorf, dan batuan hasil kegiatan gunung api (vulkanik);
- 3) Intensitas struktur patahan (fault) dan lipatan (fold) yang lebih tinggi di daerah selatan dibandingkan dengan daerah bagian utara;

- 4) Arah sungai yang umumnya mengalir dari selatan dan tengah yang berupa perbukitan bergelombang ke arah utara yang umumnya berupa dataran pantai, sedangkan di Kabupaten Serang bagian barat daya dan bagian barat laut Kabupaten Pandeglang pola pengaliran air permukaannya mengarah dari timur ke barat;
- 5) Adanya mata air panas di sekitar Rawa Dano, yang menunjukkan sisa-sisa kegiatan volkanisme, dan Rawa Dano merupakan kawah purba;
- 6) Terdapatnya gunung berapi seperti Gunung Anak Krakatau yang sangat aktif dan merupakan bentukan sejak sekitar tahun 1930an setelah peristiwa letusan Krakatau tahun 1883 yang menghancurkan bagian tengah gunungapi itu sehingga sangat terkenal; serta perbukitan Gunung Karang, Gunung Condong dan Gunung Pulasari di bagian selatan Kabupaten Serang
- 7) Tingginya tingkat kegempaan di bagian selatan Propinsi Banten, meskipun untuk di Kabupaten Serang lebih banyak terasa di wilayahnya bagian selatan;
- 8) Pernah terjadinya tsunami akibat letusan Gunungapi Krakatau tahun 1883 yang menggempakan dunia waktu itu karena tenaga dan tinggi gelombang tsunami yang dihasilkannya, dan menyapu dataran pesisir sekeliling dan tepi Selat Sunda, termasuk perairan barat Kabupaten Serang.

Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Serang antara lain:

1. Banjir

Kawasan rawan banjir umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu bahkan hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan kecamatan Pontang, bahkan di beberapa kecamatan yang masih termasuk dalam DAS Ciujung. Beberapa kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cikande, Kecamatan Carenang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Padarincang. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan. Hal ini lebih terlihat di wilayah muara Sungai Ciujung.

2. Gunung Api

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada di wilayah pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka. Selain itu terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar Gunung Karang di wilayah Serang bagian Selatan.

3. Tanah Longsor

Kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Serang yang sangat bervariasi dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah perbukitan memiliki potensi adanya bencana tanah longsor. Wilayah yang rawan terkena bencana tanah longsor ini biasanya dikawasan perbukitan atau lereng perbukitan. Beberapa kawasan yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan Gunung Karang yang meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. Selain itu juga di beberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Waringin Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel.

4. Gempa Bumi

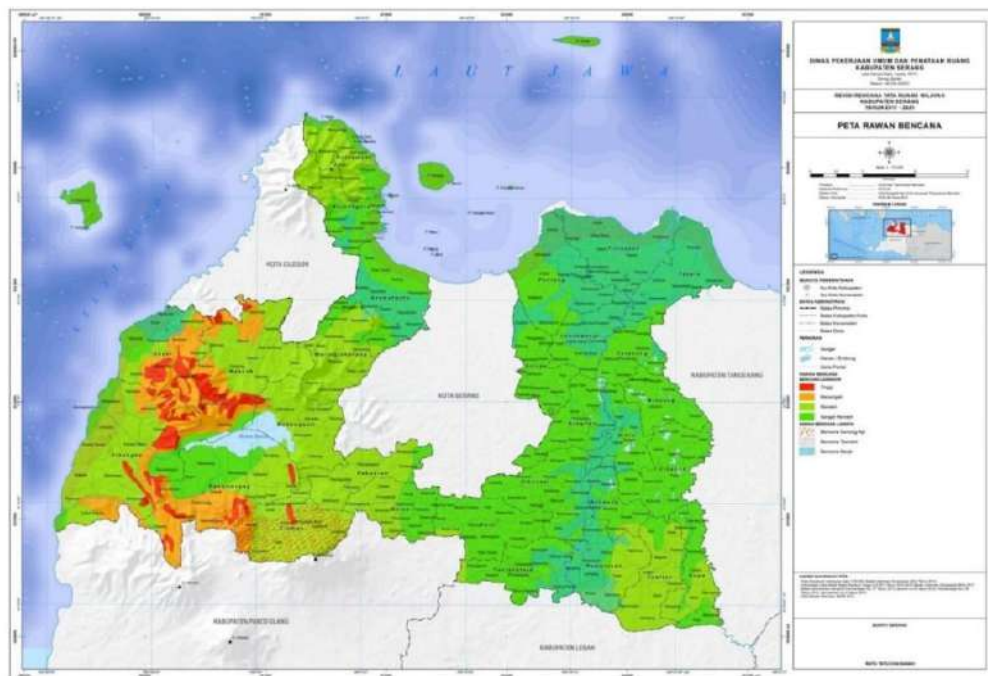
Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gunung Anak Krakatau) maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama adalah wilayah pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan pesisir Selat Sunda).

5. Tsunami

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah dikawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi karena terletak pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung Anak Krakatau.

Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat kerawannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

Gambar 2.1. 10
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

6. Bencana Industri

Selain potensi atau risiko bencana alam di wilayah Kabupaten Serang juga ada risiko bencana akibat kegagalan teknologi terutama pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar lokasi pabrik/industri. Kawasan yang berpotensi terdampak bencana kegagalan industri antara lain adalah di bagian timur dan barat wilayah Kabupaten Serang antara di wilayah Kecamatan Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Anyar, Ciruas, Kragilan, Kibin, Cikande, Kopo dan Jawilan.

7. Bencana Non Alam dan Bencana Sosial

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

2.1.6.2. Indeks Risiko Bencana

Kondisi geologi di Selat Sunda sangat mempengaruhi sifat geologi dan geofisika Provinsi Banten secara umum maupun Kabupaten Serang secara khusus, membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengu-rangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mengeluarkan indeks risiko bencana (IRB) sebagai gambaran status kebencanaan di suatu wilayah.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan factor bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian yang ada di Kabupaten Serang berdasarkan risiko bencana yang ada.

Tabel 2.1. 43
Data Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Pandeglang	177,46	177,46	203,05	169,21	192,52
Kab. Lebak	182,04	182,04	199,57	172,98	185,64
Kab. Tangerang	146,93	146,93	130,45	141,43	125,22
Kab. Serang	203,20	176,14	154,18	136,82	123,30
Kota Tangerang	136,00	132,80	116,80	104,55	95,74
Kota Cilegon	128,15	121,23	115,97	119,49	111,01
Kota Serang	168,56	168,56	156,20	140,12	127,57
Kota Tangerang Selatan	96,61	87,44	79,86	73,06	68,10

Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana (IRBI); BNPB, 2024

Berdasarkan tabel diatas, risiko bencana di Kabupaten Serang menunjukan tren positif dengan kecenderungan penurunan Indeks Risiko Bencana pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 IRB Kabupaten Serang tercatat sebesar 203,20 dan terus mengalami penurunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai IRB sebesar 136,82. Meskipun adanya penurunan nilai indeks tersebut, risiko bencana di Kabupaten Serang masih masuk dalam kategori tinggi.

2.1.6.3. Indeks Ketahanan Daerah

Tingginya potensi bencana di Provinsi Banten belum diiringi dengan kemampuan dan kapasitas daerah kabupaten/ kota di Provinsi Banten dalam menghadapi bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/ kota berada dalam rentang Rendah-Sedang. Hal ini berimplikasi pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) kabupaten/ kota dan provinsi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan penanggulangan bencana (pra bencana – tanggap darurat – pascabencana) baik yang dilakukan melalui kewenangan Pemerintah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (BNPB Provinsi Banten, 2023). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpang-susunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Tabel 2.1. 44 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Banten Tahun 2021-2023

KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKD Tahun 2021	Nilai IKD Tahun 2022	Nilai IKD Tahun 2023	Nilai IKD Tahun 2024
Kab. Pandeglang	0,78	0,84	0,77	0.76
Kab. Lebak	0,66	0,32	0,63	0.29
Kab. Tangerang	0,70	0,70	0,69	0.74
Kab. Serang	0,58	0,81	0,68	0.71
Kota Tangerang	0,35	0,52	0,59	0.58
Kota Cilegon	0,56	0,75	0,56	0.64
Kota Serang	0,46	0,45	0,58	0.61
Kota Tangerang Selatan	0,50	0,53	0,58	0.61

Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana (IRBI); BNPB, 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam menghadapi potensi bencana memiliki nilai yang berbeda-beda karena struktur geografis yang berbeda juga pada tiap wilayah. Pada tahun 2021, Kabupaten Serang memiliki nilai IKD sebesar 0,58 dengan kategori tinggi secara kapasitas ketahanan daerah dalam menanggulangi bencana, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai IKD menjadi sebesar 0,68 dari tahun sebelumnya (2022). Penurunan nilai IKD ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Serang perlu lebih bekerja keras untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam hal kebencanaan.

2.1.7 Demografi Kabupaten Serang

Demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena memahami karakteristik penduduk suatu wilayah untuk menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Faktor-faktor demografi seperti jumlah penduduk, struktur usia, pertumbuhan populasi dan distribusi geografis memiliki dampak langsung terhadap ekonomi, sosial dan infrastruktur suatu negara. Pembangunan yang baik harus mempertimbangkan kondisi kependudukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Dengan memahami dan mengelola dinamika penduduk, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing suatu negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pola maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Serang.

2.1.7.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencatatan Sipil

Penduduk sebagai sektor utama dalam pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Penduduk yang tercatat di suatu wilayah adalah angka populasi yang dihitung berdasarkan data administrasi kependudukan. Data ini mencakup seluruh individu yang terdaftar secara resmi dalam dokumen kependudukan. Keakuratan data ini bergantung pada pelaporan aktif dari masyarakat. Data pencatatan sipil berfokus pada administrasi kependudukan dibandingkan aspek sosial ekonomi.

Tabel 2.1. 45 Jumlah Penduduk Tercatat Kabupaten Serang Tahun 2024

No.	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cinangka	33.775	32.093	65.868	3,68
2	Padarincang	40.172	38.285	78.457	4,38
3	Ciomas	25.293	23.551	48.844	2,73
4	Pabuaran	25.498	24.114	49.612	2,77
5	Gunungsari	13.644	12.814	26.458	1,48
6	Baros	34.313	31.986	66.299	3,70
7	Petir	35.517	33.493	69.010	3,85
8	Tunjung Teja	26.786	25.449	52.235	2,92
9	Cikeusal	43.192	42.270	85.462	4,77
10	Pamarayan	34.689	32.489	67.178	3,75
11	Bandung	21.504	20.959	42.463	2,37
12	Jawilan	34.799	32.618	67.417	3,76
13	Kopo	31.247	28.952	60.199	3,36
14	Cikande	61.455	59.773	121.228	6,77
15	Kibin	32.655	32.250	64.905	3,62
16	Kragilan	44.733	43.851	88.584	4,94
17	Waringinkurung	27.650	26.684	54.334	3,03
18	Mancak	27.722	25.667	53.389	2,98
19	Anyar	32.178	30.922	63.100	3,52
20	Bojonegara	27.603	26.633	54.236	3,03
21	Pulo Ampel	21.338	20.902	42.240	2,36
22	Kramatwatu	54.584	52.570	107.154	5,98
23	Ciruas	44.985	43.818	88.803	4,96
24	Pontang	25.962	25.460	51.422	2,87
25	Lebak Wangi	21.543	21.244	42.787	2,39
26	Carenang	22.147	21.750	43.897	2,45
27	Binuang	18.027	17.616	35.643	1,99
28	Tirtayasa	26.649	25.823	52.472	2,93
29	Tanara	24.321	23.778	48.099	2,68
Kabupaten		913.981	877.814	1.791.795	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2024

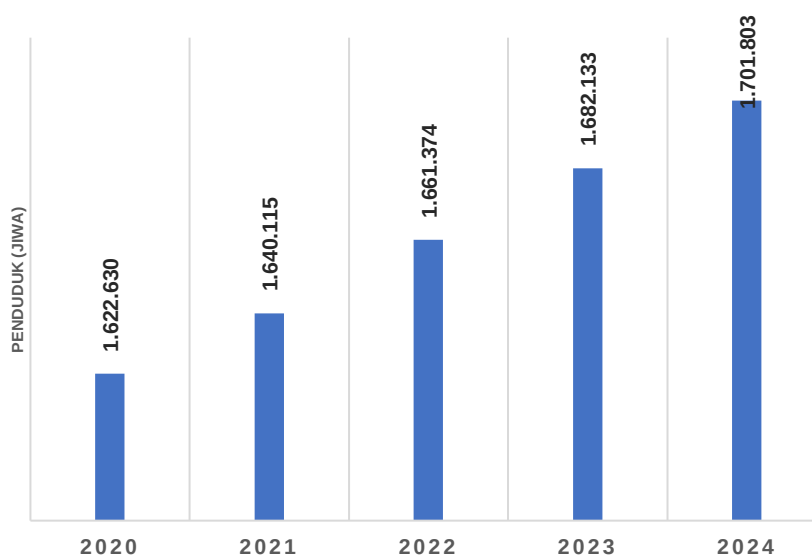
Dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Serang yang tercatat pada tahun 2024 semester II sebesar 1.791.795 orang, kecamatan Cikande merupakan kecamatan terbanyak penduduk yang tercatat yaitu mencapai 121.228 orang atau sebesar 6,77 persen dari total penduduk Kabupaten Serang yang tercatat. Sedangkan kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk tercatat terendah sebanyak 26.458 orang atau sebesar 1,48 persen dari total penduduk Kabupaten Serang yang tercatat.

2.1.7.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Manusia sebagai spesies yang paling dominan di bumi memiliki jumlah yang paling banyak, untuk itu jumlah penduduk umumnya meningkat atau cenderung stabil. Namun hal ini bukan berarti jumlah penduduk tidak bisa menurun.

Jumlah penduduk menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang berpengaruh terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan, kondisinya kondusif dan konstruktif, tentunya tidak hanya dari sisi jumlahnya yang mencukupi struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai. Jumlah penduduk yang besar jika dengan kualitas yang rendah tidak akan mampu memberi dukungan positif pada pembangunan, yang terjadi justru akan menjadi beban pembangunan. Bahkan dapat memberikan dampak lainnya seperti hasil dari pembangunan sebelumnya yang telah tercapai akan sirna apabila jumlah penduduk yang besar pertumbuhannya dan tidak terkendali. Maka itu, jumlah penduduk harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

Grafik 2.1. 6
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, Jumlah penduduk Kabupaten Serang di tahun 2024 mencapai 1.701.803 orang dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cikande dengan jumlah 117.436 orang atau sebesar 6,90 persen

dari total penduduk Kabupaten Serang. Jika melihat karakteristiknya, Kecamatan Cikande merupakan wilayah konsentrasi ekonomi industri pengolahan dan jasa. Sedangkan, jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk 25.064 orang atau sebesar 1,47 persen dari total penduduk Kabupaten Serang.

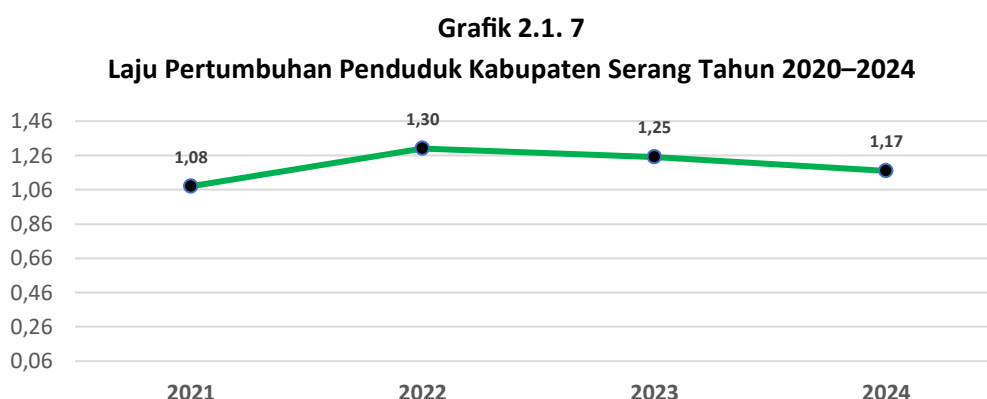
Tabel 2.1. 46
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

No.	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cinangka	60.815	58.607	59.002	62.652	63.250
2	Padarincang	69.647	67.772	68.259	71.652	72.303
3	Ciomas	42.771	45.898	46.692	44.201	44.669
4	Pabuaran	43.155	44.228	44.752	44.402	44.807
5	Gunungsari	23.517	24.111	24.543	24.675	25.064
6	Baros	59.302	60.738	61.552	61.335	62.003
7	Petir	61.896	64.315	65.639	65.250	66.381
8	Tunjung Teja	47.101	49.554	50.539	49.362	50.119
9	Cikeusal	76.980	80.664	82.097	80.223	81.301
10	Pamarayan	59.805	62.359	63.618	62.903	63.945
11	Bandung	38.418	39.913	40.801	40.721	41.502
12	Jawilan	59.739	61.333	62.085	61.520	62.100
13	Kopo	53.552	54.328	54.818	54.757	55.143
14	Cikande	110.569	110.254	111.869	115.713	117.436
15	Kibin	61.020	62.682	62.997	61.348	61.432
16	Kragilan	80.302	79.780	80.263	81.814	82.291
17	Waringinkurung	48.859	50.187	50.976	50.876	51.546
18	Mancak	48.247	49.802	50.342	49.378	49.740
19	Anyar	58.726	57.980	58.533	60.626	61.247
20	Bojonegara	50.286	51.586	52.498	52.714	53.527
21	Pulo Ampel	39.297	39.455	39.902	40.607	41.036
22	Kramatwatu	100.119	98.632	99.537	103.300	104.340
23	Ciruas	82.622	80.145	80.856	85.547	86.509
24	Pontang	47.248	46.548	47.248	49.688	50.508
25	Lebak Wangi	38.893	38.440	38.937	40.584	41.147
26	Carenang	39.362	39.073	39.581	41.032	41.587
27	Binuang	31.739	32.908	33.394	32.860	33.228
28	Tirtayasa	46.349	45.265	45.915	48.758	49.568
29	Tanara	42.294	43.558	44.129	43.635	44.074
Kabupaten Serang		1.622.630	1.640.115	1.661.374	1.682.133	1.701.803

Sumber: BPS Kabupaten Serang

Dilihat dari grafik di atas, jumlah penduduk Kabupaten Serang mengalami pertumbuhan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada rentang tahun 2020-2024 sebesar 1,2 persen

per tahun. Laju pertumbuhan penduduk sendiri merupakan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu yang dihitung dalam persentase per tahun. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Dalam perencanaan pembangunan memahami laju pertumbuhan penduduk sangat penting untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Pada grafik di atas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Serang pada periode 2021-2024 cenderung fluktuatif dan laju pertumbuhan per tahun tersebut masuk dalam kategori tidak ideal dimana menurut ahli demografi idealnya laju pertumbuhan di angka 0,5-1 persen per tahunnya. Pertumbuhan yang terlalu tinggi menyebabkan beban ekonomi dan sosial yang berat sedangkan pertumbuhan yang terlalu rendah menyebabkan kurangnya tenaga kerja di masa depan.

2.1.7.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk sebagai sektor utama dalam pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Penduduk yang tercatat di suatu wilayah adalah angka populasi yang dihitung berdasarkan data administrasi kependudukan. Data ini mencakup seluruh individu yang terdaftar secara resmi dalam dokumen kependudukan. Keakuratan data ini bergantung pada pelaporan aktif dari masyarakat. Data pencatatan sipil berfokus pada administrasi kependudukan dibandingkan aspek sosial ekonomi.

Tabel 2.1. 47 Jumlah Penduduk Tercatat Kabupaten Serang Tahun 2024

No.	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cinangka	33.775	32.093	65.868	3,68
2	Padarincang	40.172	38.285	78.457	4,38
3	Ciomas	25.293	23.551	48.844	2,73
4	Pabuaran	25.498	24.114	49.612	2,77
5	Gunungsari	13.644	12.814	26.458	1,48
6	Baros	34.313	31.986	66.299	3,70
7	Petir	35.517	33.493	69.010	3,85
8	Tunjung Teja	26.786	25.449	52.235	2,92
9	Cikeusal	43.192	42.270	85.462	4,77
10	Pamarayan	34.689	32.489	67.178	3,75
11	Bandung	21.504	20.959	42.463	2,37

No.	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk
12	Jawilan	34.799	32.618	67.417	3,76
13	Kopo	31.247	28.952	60.199	3,36
14	Cikande	61.455	59.773	121.228	6,77
15	Kibin	32.655	32.250	64.905	3,62
16	Kragilan	44.733	43.851	88.584	4,94
17	Waringinkurung	27.650	26.684	54.334	3,03
18	Mancak	27.722	25.667	53.389	2,98
19	Anyar	32.178	30.922	63.100	3,52
20	Bojonegara	27.603	26.633	54.236	3,03
21	Pulo Ampel	21.338	20.902	42.240	2,36
22	Kramatwatu	54.584	52.570	107.154	5,98
23	Ciruas	44.985	43.818	88.803	4,96
24	Pontang	25.962	25.460	51.422	2,87
25	Lebak Wangi	21.543	21.244	42.787	2,39
26	Carenang	22.147	21.750	43.897	2,45
27	Binuang	18.027	17.616	35.643	1,99
28	Tirtayasa	26.649	25.823	52.472	2,93
29	Tanara	24.321	23.778	48.099	2,68
Kabupaten		913.981	877.814	1.791.795	100

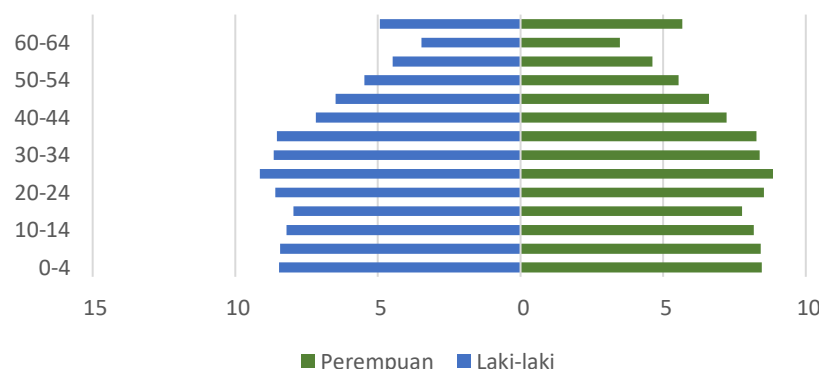
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2024

Dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Serang yang tercatat pada tahun 2024 semester II sebesar 1.791.795 orang, kecamatan Cikande merupakan kecamatan terbanyak penduduk yang tercatat yaitu mencapai 121.228 orang atau sebesar 6,77 persen dari total penduduk Kabupaten Serang yang tercatat. Sedangkan kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk tercatat terendah sebanyak 26.458 orang atau sebesar 1,48 persen dari total penduduk Kabupaten Serang yang tercatat.

2.1.7.4. Sex Rasio Penduduk

Sex rasio penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk berjenis kelamin perempuan. Sex ratio yang seimbang sangat penting dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan keseimbangan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan stabilitas sosial. Ketimpangan gender dalam populasi dapat menimbulkan tantangan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengelola isu ini secara berkelanjutan.

Grafik 2.1. 8 Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur (5 Tahunan) Kabupaten Serang Tahun 2024 (dalam persentase)



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, Kabupaten Serang di tahun 2024 memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 868,4 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebesar 833,4 ribu orang dengan demikian sex ratio Kabupaten Serang tahun 2024 sebesar 104 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tahun 2024 terdapat sejumlah 104 orang penduduk laki-laki untuk 100 orang penduduk perempuan.

Tabel 2.1. 48
Sex Ratio di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sex Ratio	2020	2021	2022	2023	2024
	105	105	105	104	104

Sumber: BPS Kabupaten Serang

Pada tren sex ratio dari tahun 2020 hingga tahun 2024, Kabupaten Serang masih dalam sex ratio yang seimbang dimana nilai ideal sex ratio berkisar 100-105 laki-laki per 100 perempuan. Hal ini juga menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk perempuan cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk laki-laki.

2.1.7.5. Distribusi Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk, kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Kepadatan penduduk memiliki pengaruh besar terhadap perencanaan pembangunan karena menentukan bagaimana sumber daya, infrastruktur dan layanan publik harus dikelola. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya

Kabupaten Serang memiliki wilayah sebesar 1,467,37 Km² dengan Kepadatan Penduduk di tahun 2024 sebesar 1.160 jiwa/km² yang artinya secara rata-rata, setiap satu kilometer persegi wilayah di Kabupaten Serang didiami oleh 1.160 orang penduduk.

Dilihat dari distribusi penduduk per wilayah di Kabupaten Serang, kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada Kecamatan Ciruas selama 5 (lima) tahun terakhir. Kecamatan Ciruas dipilih sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Serang dan pusat perekonomian dari Kabupaten Serang setelah Kota Serang terbentuk. Aktivitas perekonomian yang tinggi mendorong masyarakat untuk tinggal menetap di Kecamatan Ciruas. Selain itu perkembangan industri dan perdagangan di Kecamatan lainnya yang berdekatan dengan Kecamatan Ciruas sebagai salah satu faktor alasan masyarakat menetap di Kecamatan Ciruas. Daya tarik masyarakat ini yang mendorong terciptanya banyaknya perumahan penduduk di Kecamatan Ciruas.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Gunungsari yang dimana Kecamatan ini pun memiliki jumlah penduduk terendah di Kabupaten Serang. Penduduk Kecamatan Gunungsari, mayoritas bekerja sebagai petani. Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang rendah kurang menarik untuk ditinggali oleh masyarakat karena terbatasnya kesempatan kerja. Banyak generasi muda yang memilih pindah ke wilayah kota karena lebih banyak peluang ekonomi, fasilitas modern dan gaya hidup yang lebih menarik.

Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. 49
Sex Ratio Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Luas		Kepadatan Penduduk jiwa/km ²)				
		km ²	%	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cinangka	111,47	7,60	546	526	529	562	567
2	Padarincang	99,12	6,75	703	684	689	723	729
3	Ciomas	48,53	3,31	881	946	962	911	920
4	Pabuaran	79,14	5,39	545	559	565	561	566
5	Gunungsari	48,6	3,31	484	496	505	508	516
6	Baros	44,07	3,00	1.346	1.378	1.397	1.392	1.407
7	Petir	46,96	3,20	1.318	1.370	1.398	1.389	1.414
8	Tunjung Teja	39,52	2,69	1.192	1.254	1.279	1.249	1.268
9	Cikeusal	88,25	6,01	872	914	930	909	921
10	Pamarayan	41,92	2,86	1.427	1.488	1.518	1.501	1.525
11	Bandung	25,18	1,72	1.526	1.585	1.620	1.617	1.648
12	Jawilan	38,95	2,65	1.534	1.575	1.594	1.579	1.594
13	Kopo	44,69	3,05	1.198	1.216	1.227	1.225	1.234
14	Cikande	50,53	3,44	2.188	2.182	2.214	2.290	2.324
15	Kibin	33,51	2,28	1.821	1.871	1.880	1.831	1.833
16	Kragilan	36,33	2,48	2.210	2.196	2.209	2.252	2.265
17	Waringinkurung	51,29	3,50	953	978	994	992	1.005
18	Mancak	74,03	5,05	652	673	680	667	672
19	Anyar	56,81	3,87	1.034	1.021	1.030	1.067	1.078
20	Bojonegara	30,3	2,06	1.660	1.703	1.733	1.740	1.767
21	Pulo Ampel	32,56	2,22	1.207	1.212	1.225	1.247	1.260
22	Kramatwatu	48,59	3,31	2.060	2.030	2.049	2.126	2.147
23	Ciruas	34,49	2,35	2.396	2.324	2.344	2.480	2.508
24	Pontang	58,09	3,96	813	801	813	855	869
25	Lebak Wangi	31,71	2,16	1.227	1.212	1.228	1.280	1.298
26	Carenang	32,8	2,24	1.200	1.191	1.207	1.251	1.268
27	Binuang	26,17	1,78	1.213	1.257	1.276	1.256	1.270
28	Tirtayasa	64,46	4,39	719	702	712	756	769
29	Tanara	49,3	3,36	858	884	895	885	894
Jumlah		1.467,37	100	1.106	1.118	1.132	1.146	1.160

Sumber: BPS Kabupaten Serang

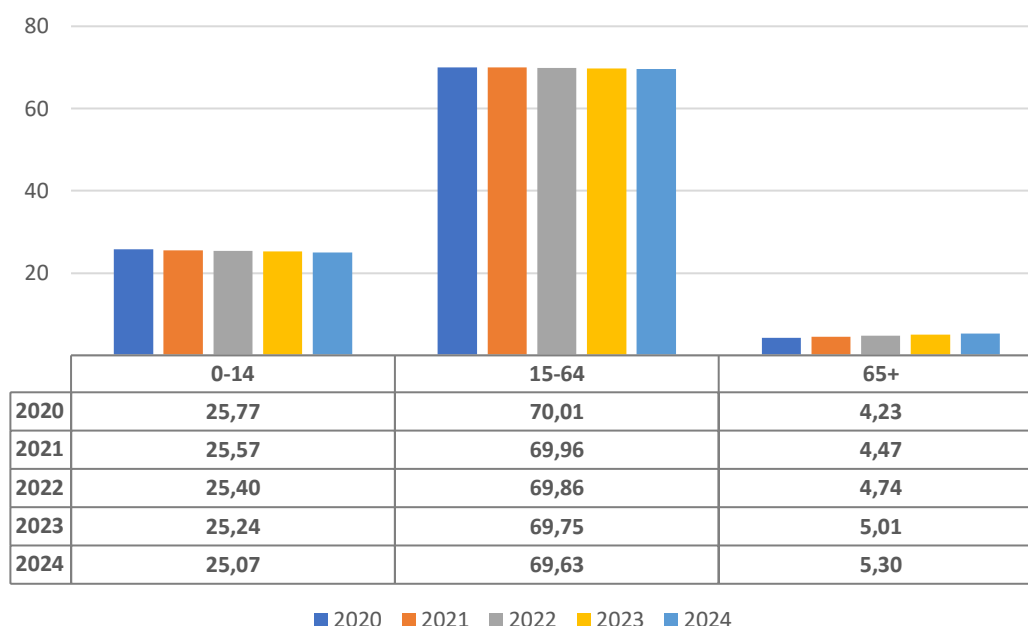
Informasi mengenai sebaran penduduk per Kecamatan ini sangat penting karena berkaitan dengan segala kebutuhan dasar dari penduduk itu sendiri seperti ketersediaan akses pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan lainnya. Data ini akan menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan.

2.1.7.6. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan umur untuk memahami struktur demografi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan dan kebijakan pembangunan. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijakan agar pembangunan berjalan optimal.

Klasifikasi penduduk berdasarkan umur dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama diantaranya usia muda (0-14 tahun) yang merupakan kelompok anak-anak dan remaja yang masih bergantung pada orang tua, usia produktif (15-64 tahun) yang merupakan kelompok tenaga kerja utama dalam masyarakat dan usia lanjut (65 tahun ke atas) yang merupakan kelompok lansia yang sebagian besar tidak lagi bekerja dan bergantung pada keluarga.

Grafik 2.1. 9
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Serang
Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Serang didominasi usia produktif, namun kelompok umur ini mengalami penurunan persentase dari total jumlah penduduk setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar 70,01 persen menurun menjadi 69,63 persen di tahun 2024. Usia produktif di Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun terakhir masuk ke dalam kategori ideal yang artinya pada periode ini Kabupaten Serang mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi dari pada penduduk usia tidak produktif.

Pada kelompok usia muda juga mengalami penurunan persentase dari total jumlah penduduk dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menurun sebesar 0,7 persen, sedangkan untuk kelompok usia lansia mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 4,23 persen di tahun 2020 menjadi 5,30 persen dari total jumlah penduduk di tahun 2024.

2.1.8 Analisis Proyeksi Kependudukan 2025-2029

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh melalui pelayanan pendidikan formal dan informal di dukung oleh pelayanan kesehatan dan perumahan untuk menjadikan manusia yang cerdas, sehat dan peduli lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan rencana pembangunan yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan tersebut.

Serangkaian pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek yang ada di setiap proses pembangunan. Maka dari itu, pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah.

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan. Data kependudukan diantaranya jumlah penduduk, persebaran penduduk dan penduduk menurut kelompok umur dapat dibutuhkan dalam menyusun program pembangunan. Dalam pembangunan kedepannya, perencana dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, namun dapat disayangkan sumber data kependudukan belum cukup sempurna pencatatannya sehingga pemanfaatan data belum maksimal.

2.1.8.1. Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunan menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana disusun melainkan juga informasi-informasi sebelumnya dan informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dapat diperoleh dari hasil survei dan sensus sedangkan untuk mengetahui gambaran data kependudukan di masa yang akan datang diperlukan perkiraan.

Perencana dan pengambil kebijakan harus mampu memperkirakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Perkiraan dalam perencanaan yang dimaksud salah satunya terkait dengan aspek kependudukan yaitu proyeksi penduduk dimana proyeksi ini dapat memetakan kebutuhan-kebutuhan mendatang seperti sarana diantaranya perumahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, rekreasi dan kebudayaan, pemerintah dan pelayanan umum serta untuk prasarana diantaranya air bersih, energi listrik, telekomunikasi, drainase dan limbah, dan prasarana diantaranya air bersih, energi listrik, telekomunikasi, drainase dan limbah, dan persampahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik dua puluh tahunan, lima tahunan dan satu tahun.

Proyeksi penduduk merupakan jumlah penduduk berdasarkan penghitungan ilmiah menggunakan metode-metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Indonesia sendiri telah mengeluarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050 berdasarkan masing-masing Provinsi. Dari hasil olahan penghitungan yang dilakukan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, perkiraan Kabupaten Serang mengalami peningkatan jumlah penduduk 3,98 persen dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Tabel 2.1. 50
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Serang

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	868.453	877.310	885.900	894.110	902.060	909.660
Perempuan	833.350	843.010	852.440	861.600	870.510	879.180
Rasio	104	104	104	104	104	103
Jumlah Penduduk	1.701.803	1.720.320	1.738.340	1.755.710	1.772.570	1.788.840

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS Kabupaten Serang

Pada proyeksi 5 (lima) tahun kedepan di Kabupaten Serang, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang dimana perkiraan sex ratio tahun 2025 hingga 2028 masih di angka 104 seperti tahun 2024, namun ada perkiraan penurunan sex ratio di tahun 2029 menjadi 103. Perkiraan penurunan sex ratio ini akan memiliki dampak yang besar di Kabupaten Serang pada masa yang akan datang.

Dampak yang akan memungkinkan terjadi pada aspek sosial adalah ketimpangan gender dalam keluarga dan masyarakat yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam pembentukan keluarga karena jumlah laki-laki yang lebih sedikit mengakibatkan perempuan lebih sulit mendapatkan pasangan dan dapat terjadi perubahan dalam peran gender seperti meningkatnya peran perempuan dalam kepemimpinan atau pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Kemudian dampak sosial lainnya yang luas dapat meningkatnya fenomena pernikahan antar negara seperti yang terjadi di beberapa negara dengan ketimpangan gender tinggi. Selain itu juga dapat terjadi perubahan dalam struktur sosial dimana jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak akan menyebabkan perubahan kebijakan sosial misalnya peningkatan kesejahteraan perempuan, kebijakan cuti melahirkan atau kebijakan perlindungan perempuan yang lebih baik.

Pada aspek ekonomi dampak yang terjadi menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor yang didominasi laki-laki yang menyebabkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi karena perempuan mampu masuk ke dunia kerja. Kemudian adanya potensi ketidakseimbangan dalam kesejahteraan dimana banyaknya perempuan yang tidak menikah akan berdampak pada meningkatnya rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan yang sering kali memiliki risiko kemiskinan lebih tinggi. Serta dampak terhadap konsumsi seperti akan memungkinkan terjadi penurunan pasar yang menargetkan konsumen laki-laki.

Penurunan sex ratio juga berpengaruh pada demografi seperti menurunnya angka kelahiran yang menyebabkan krisis populasi di masa depan, penuaan populasi lebih cepat seperti jumlah penduduk lanjut usia yang akan lebih cepat meningkat dibandingkan generasi muda dan kemudian akan menjadi beban ekonomi bagi kelompok usia produktif. Selain itu, dampak pada aspek demografi juga dapat memunculkan migrasi tenaga kerja yang memungkinkan migrasi tenaga kerja laki-laki dari daerah lain bahkan negara luar untuk mengisi sektor-sektor tertentu.

2.1.8.2. Distribusi Penduduk

Pada perencanaan pembangunan, dibutuhkan proyeksi penduduk berdasarkan wilayah untuk menentukan kebijakan yang tepat dengan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia. Proyeksi jumlah penduduk per wilayah ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik untuk perencanaan pembangunan dalam menentukan kebijakan di tingkat nasional, regional maupun lokal. Manfaat dalam melakukan proyeksi penduduk berdasarkan wilayah memudahkan dalam menentukan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum

serta perencanaan perumahan dan tata kota. Pada aspek ekonomi, manfaat juga dirasakan dengan menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja per wilayah dan mendukung pengembangan sektor ekonomi yang sesuai. Selain itu, dalam menentukan kebutuhan sekolah dan kebutuhan fasilitas kesehatan juga perlu menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan wilayah.

Perkiraan jumlah penduduk berdasarkan wilayah mampu mengurangi risiko overpopulasi dan degradasi lingkungan dengan membatasi ekspansi pemukiman di kawasan rawan bencana atau konservasi alam dan perencanaan dalam menentukan kebutuhan pangan dan air bersih. Wilayah yang mengalami perkiraan pertumbuhan penduduk yang tinggi perlu disiapkan strategi untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi yang baru di wilayah lain agar tidak terjadi penumpukan di satu wilayah saja.

Tabel 2.1. 51
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cinangka	63.250	63.802	64.332	64.835	65.315	65.770
Padarincang	72.303	72.901	73.473	74.013	74.527	75.012
Ciomas	44.669	45.106	45.528	45.931	46.320	46.691
Pabuaran	44.807	45.179	45.535	45.871	46.192	46.494
Gunungsari	25.064	25.438	25.806	26.167	26.523	26.872
Baros	62.003	62.627	63.230	63.809	64.366	64.901
Petir	66.381	67.476	68.561	69.629	70.685	71.726
Tunjung Teja	50.119	50.846	51.562	52.263	52.951	53.626
Cikeusal	81.301	82.326	83.329	84.303	85.254	86.179
Pamarayan	63.945	64.951	65.945	66.922	67.886	68.833
Bandung	41.502	42.263	43.021	43.770	44.515	45.253
Jawilan	62.100	62.634	63.147	63.632	64.095	64.534
Kopo	55.143	55.486	55.807	56.103	56.378	56.629
Cikande	117.436	119.084	120.708	122.287	123.843	125.360
Kibin	61.432	61.466	61.475	61.453	61.407	61.334
Kragilan	82.291	82.703	83.082	83.422	83.730	84.002
Waringinkurung	51.546	52.182	52.803	53.406	53.994	54.565
Mancak	49.740	50.064	50.369	50.651	50.915	51.157
Anyar	61.247	61.824	62.381	62.912	63.422	63.909
Bojonegara	53.527	54.308	55.078	55.831	56.572	57.298
Pulo Ampel	41.036	41.436	41.822	42.192	42.547	42.887
Kramatwatu	104.340	105.304	106.233	107.118	107.966	108.774
Ciruas	86.509	87.411	88.285	89.124	89.935	90.714
Pontang	50.508	51.300	52.082	52.851	53.609	54.355
Lebak Wangi	41.147	41.684	42.210	42.722	43.222	43.710
Carenang	41.587	42.115	42.632	43.135	43.625	44.103
Binuang	33.228	33.573	33.908	34.229	34.540	34.838
Tirtayasa	49.568	50.350	51.124	51.884	52.634	53.371
Tanara	44.074	44.481	44.872	45.245	45.602	45.943

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS Kabupaten Serang

Pada proyeksi jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Cikande masih menjadi Kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak dan Kecamatan Gunungsari menjadi Kecamatan yang jumlah penduduknya terendah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Jumlah penduduk di setiap wilayah

berpengaruh terhadap kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Selain itu, kepadatan penduduk menjadi indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Maka, suatu wilayah yang diperkirakan mengalami kepadatan penduduk yang tinggi, harus adanya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial dengan menentukan bantuan sosial, program Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berdasarkan proyeksi penduduk.

Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat pemukiman, pusat kemajuan daerah dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Dalam hal ini, luas wilayah tidak mencukupi kebutuhan penduduk akan ruang di suatu pemukiman dapat menimbulkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali dimana dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, munculnya kawasan-kawasan kumuh kota dengan rumah-rumah yang tidak layak huni, turunnya kualitas lingkungan, tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada dan terganggunya stabilitas keamanan.

Tabel 2.1. 52
Perkiraan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk 2024	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cinangka	111,47	567	572	577	582	586	590
Padarincang	99,12	729	735	741	747	752	757
Ciomas	48,53	920	929	938	946	954	962
Pabuaran	79,14	566	571	575	580	584	587
Gunungsari	48,6	516	523	531	538	546	553
Baros	44,07	1.407	1.421	1.435	1.448	1.461	1.473
Petir	46,96	1.414	1.437	1.460	1.483	1.505	1.527
Tunjung Teja	39,52	1.268	1.287	1.305	1.322	1.340	1.357
Cikeusal	88,25	921	933	944	955	966	977
Pamarayan	41,92	1.525	1.549	1.573	1.596	1.619	1.642
Bandung	25,18	1.648	1.678	1.709	1.738	1.768	1.797
Jawilan	38,95	1.594	1.608	1.621	1.634	1.646	1.657
Kopo	44,69	1.234	1.242	1.249	1.255	1.262	1.267
Cikande	50,53	2.324	2.357	2.389	2.420	2.451	2.481
Kibin	33,51	1.833	1.834	1.835	1.834	1.832	1.830
Kragilan	36,33	2.265	2.276	2.287	2.296	2.305	2.312
Waringinkurung	51,29	1.005	1.017	1.029	1.041	1.053	1.064
Mancak	74,03	672	676	680	684	688	691
Anyar	56,81	1.078	1.088	1.098	1.107	1.116	1.125
Bojonegara	30,3	1.767	1.792	1.818	1.843	1.867	1.891
Pulo Ampel	32,56	1.260	1.273	1.284	1.296	1.307	1.317
Kramatwatu	48,59	2.147	2.167	2.186	2.205	2.222	2.239
Ciruas	34,49	2.508	2.534	2.560	2.584	2.608	2.630
Pontang	58,09	869	883	897	910	923	936
Lebak Wangi	31,71	1.298	1.315	1.331	1.347	1.363	1.378
Carenang	32,8	1.268	1.284	1.300	1.315	1.330	1.345
Binuang	26,17	1.270	1.283	1.296	1.308	1.320	1.331
Tirtayasa	64,46	769	781	793	805	817	828

Kecamatan	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk 2024	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tanara	49,3	894	902	910	918	925	932
Kabupaten Serang	1467,37	1.160	1.172	1.185	1.197	1.208	1.219

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS Kabupaten Serang

Dari hasil penghitungan, perkiraan kepadatan penduduk di Kabupaten Serang meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 0,8 persen. Pada tahun 2029, diperkirakan setiap satu kilometer persegi wilayah Kabupaten Serang didiami oleh 1.219 orang penduduk. Untuk kepadatan penduduk per wilayah masih berada di Kecamatan Ciruas yang menjadi Kecamatan terpadat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kecamatan Ciruas memiliki luas 2,35% dari total luas wilayah Kabupaten Serang dan masuk ke dalam 5 (lima) Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Serang. Perkiraan kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah kedepannya seperti kemacetan, pengangguran, kelangkaan lahan dan penurunan kualitas hidup. Kepadatan penduduk dapat diatasi melalui pemerataan pembangunan, pengendalian kelahiran, peningkatan infrastruktur serta pengelolaan tata ruang kota yang lebih baik. Untuk solusi jangka panjang seperti Pendidikan, pembangunan ekonomi daerah dan transportasi massal sangat penting mengurangi tekanan di wilayah kota. Perlu adanya strategi yang tepat, kepadatan penduduk dikendalikan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepadatan penduduk terendah diproyeksikan untuk 5 (lima) tahun kedepan berada di Kecamatan Gunungsari yang artinya Kecamatan ini masih menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah. Wilayah dengan kepadatan penduduk rendah kurang menarik bagi masyarakat karena keterbatasan ekonomi, infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, strategi yang tepat, wilayah ini dapat menjadi alternatif yang nyaman dan menarik untuk ditinggali seperti membangun kawasan industri dan ekonomi baru, mendukung wirausaha dan UMKM, dan mengembangkan sektor pertanian modern yang mampu menarik petani muda dan wirausahawan agribisnis. Selain itu, perlu adanya ketersediaan akses transportasi yang memadai agar memudahkan konektivitas dengan wilayah besar dan memperluas jaringan internet dan telekomunikasi. Wilayah dengan kepadatan penduduk rendah bisa berkembang menjadi kawasan potensial yang baru dengan promosi gaya hidup sehat seperti mengembangkan perumahan yang nyaman dan terjangkau dengan menawarkan lingkungan bersih dan sehat dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan, membangun fasilitas Pendidikan dan kesehatan yang memadai, meningkatkan ruang publik dan tempat rekreasi.

2.1.8.3. Bonus Demografi

Pada perencanaan pembangunan diperlukan juga proyeksi penduduk berdasarkan umur untuk merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dengan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk di setiap kelompok umur.

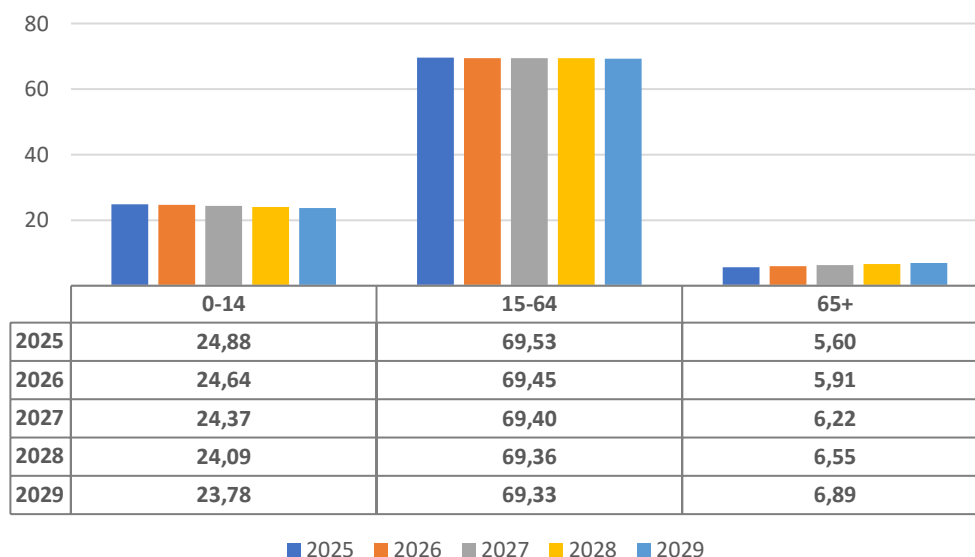
Tabel 2.1. 53
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Serang

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	426.686	427.930	428.290	427.920	426.940	425.340
15-64 Tahun	1.184.929	1.196.080	1.207.350	1.218.510	1.229.500	1.240.260
>65 Tahun	90.188	96.310	102.700	109.280	116.130	123.240
Angka Ketergantungan	43,62	43,83	43,98	44,09	44,17	44,23

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS Kabupaten Serang

Penghitungan pada proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terlihat adanya perkiraan peningkatan jumlah penduduk kelompok usia produktif dari berjumlah 1.184.929 orang di tahun 2024 menjadi 1.240.260 di tahun 2029. Begitu pula ada perkiraan peningkatan jumlah penduduk kelompok usia lanjut dari 90.188 orang di tahun 2024 menjadi 123.240 orang di tahun 2029. Perbedaan perkiraan terjadi di kelompok usia muda dimana perkiraan jumlah penduduk usia muda cenderung fluktuatif pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Kenaikan terjadi dari tahun 2024 hingga tahun 2026 dan menurun di tahun 2027 hingga tahun 2029.

Grafik 2.1. 10
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS Kabupaten Serang

Persentase jumlah penduduk usia produktif dalam perkiraan untuk 5 (lima) tahun kedepan mengalami penurunan di setiap tahunnya yang akan berpengaruh pada angka ketergantungan di Kabupaten Serang. Berdasarkan penghitungan, perkiraan jumlah penduduk usia muda yang cenderung fluktuatif namun tidak dengan persentase dari total jumlah penduduk per tahunnya yang digambarkan mengalami penurunan persentase. Namun, untuk kelompok usia lanjut pada persentase mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk usia lanjut setiap tahunnya.

Perkiraan untuk 5 (lima) tahun kedepan, Kabupaten Serang masih mengalami bonus

demografi, namun perlu diwaspadai adanya penurunan persentase jumlah penduduk produktif setiap tahunnya. Bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian dari instrument yang sangat baik dalam mengurangi kemiskinan. Dengan semua penduduk usia produktif bekerja, maka akan terjadi akumulasi yang lebih besar karena semua tenaga kerja yang bekerja mampu mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi, artinya penduduk usia produktif yang bekerja memiliki hubungan positif dengan GDP per kapita. Dalam memanfaatkan bonus demografi dan menghindari dampak negatif dari bonus demografi maka kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan kualitas yang memadai seperti bukan hanya terkait dengan kapasitas otak namun juga kapasitas fisik dari sumber daya manusia. Perencanaan dan Kebijakan sosial ekonomi yang tepat akan menjadi hal yang fundamental untuk mengoptimalkan dampak dari bonus demografi yang terjadi.

2.1.8.4. Penduduk Usia Lanjut (Tua)

Penurunan persentase jumlah penduduk produktif pada perkiraan kedepan mengakibatkan kenaikan angka ketergantungan di Kabupaten Serang. Pada saat ini, Kabupaten Serang memiliki angka ketergantungan sebesar 43,62 di tahun 2024 dan diperkirakan mencapai 44,23 di tahun 2029 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung setidaknya 44 orang penduduk usia tidak produktif. Bertambahnya persentase jumlah penduduk tidak produktif dapat menciptakan kondisi buruk jika tidak dikelola dengan baik.

Fenomena demografi bukan hanya memberikan manfaat dalam pembangunan melainkan menjadi tantangan. Penduduk usia tua menjadi bagian dari fenomena demografi yang terjadi yang dimana harus menjadi perhatian bersama. Pada proyeksi penduduk berdasarkan umur dijelaskan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Serang mencapai 123.240 orang di Tahun 2029 dengan persentase 6,89 persen dari perkiraan total jumlah penduduk di tahun 2029. Peningkatan persentase jumlah penduduk lanjut usia berpengaruh terhadap persentase jumlah penduduk tidak produktif, yang sudah dijelaskan sebelumnya hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hampir setiap negara di dunia saat ini memasuki masa penuaan penduduk dimana penduduk usia tua mengalami penambahan yang sangat drastis. Penduduk usia tua bertambah merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan utamanya ketika pembangunan kesehatan mampu meningkatkan harapan hidup serta menurunkan angka fertilitas. Namun bertambahnya penduduk usia tua juga memberikan tantangan. Keberadaan penduduk usia tua dengan segala pengalaman dapat dimanfaatkan menjadi aset dalam menggerakkan pembangunan yang dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Agar tetap dapat berkontribusi dalam pembangunan, penduduk usia tua harus tetap sehat dan aktif karena jika tidak peningkatan jumlah lansia akan menciptakan beban demografi atas pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk usia tua akan meningkatkan tuntutan ekonomi dan sosial. Proses penuaan menyebabkan beban ketergantungan orang tua meningkat, angkatan kerja kemudian menyusut sehingga rasio modal menjadi tenaga kerja naik dan investasi turun.

Penduduk usia tua digambarkan sebagai kelompok penduduk rentan karena seiring bertambahnya usia yang secara alamiah mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif sehingga rentan terhadap masalah kesehatan. Selain itu, tantangan lainnya terhadap penduduk usia tua adalah kemandirian finansial. Penduduk usia tua umumnya sudah tidak produktif dan tidak memiliki kemandirian secara ekonomi dimana tidak semua memiliki jaminan sosial, dana pensiun

atau bahkan pendanaan lainnya yang mampu menopang kebutuhan mereka. Pemerintah memiliki tugas dalam menetapkan langkah untuk memastikan penduduk usia tua agar bisa tetap mandiri, sejahtera dan bermartabat.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan) memiliki beberapa point yang menjadi target pembangunan daerah terkait kelanjutusiaan antara lain: (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; (2) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia; (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan (5) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lanjut usia. Meningkatnya jumlah penduduk usia tua menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Serang untuk dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan dari penduduk usia tua tersebut yang kedepannya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Inflasi.

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dan menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

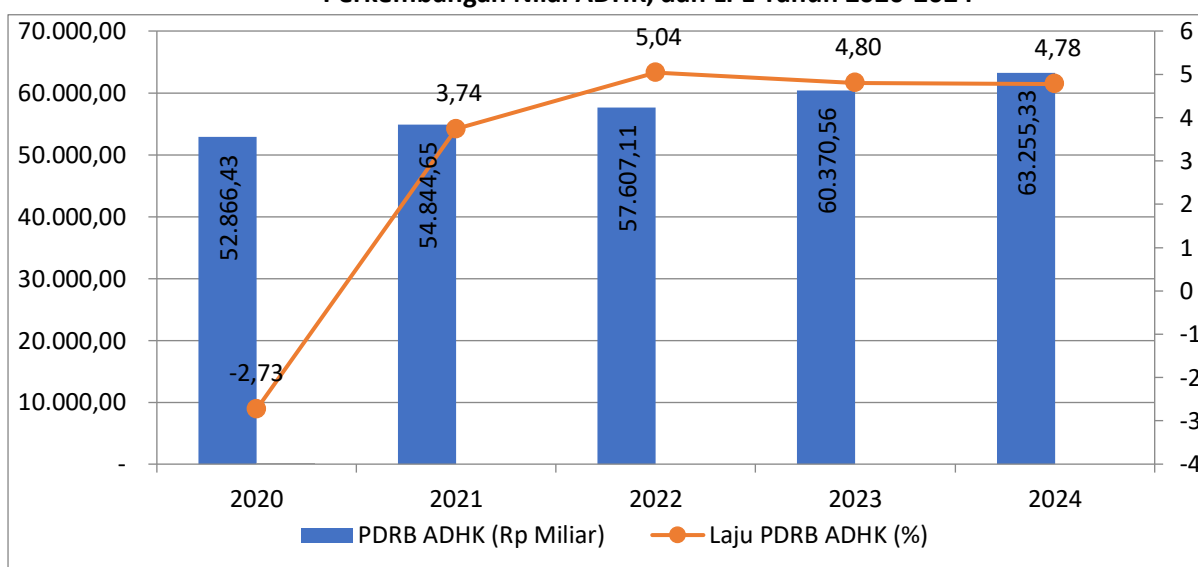
Tabel 2.2. 1
Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah)

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	52.866,43	54.844,65	57.607,11	60.370,56	63.255,33

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024

Berdasarkan data Kabupaten Serang periode 2020-2024, menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung meningkat. Pada awal periode PDRB ADHK pada tahun 2020 mencapai 52.866,43 miliar rupiah hingga tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 63.255,33 miliar rupiah. Perekonomian di Kabupaten Serang berhasil pulih kembali pasca pandemi Covid-19.

Grafik 2.2. 1
Perkembangan Nilai ADHK, dan LPE Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024

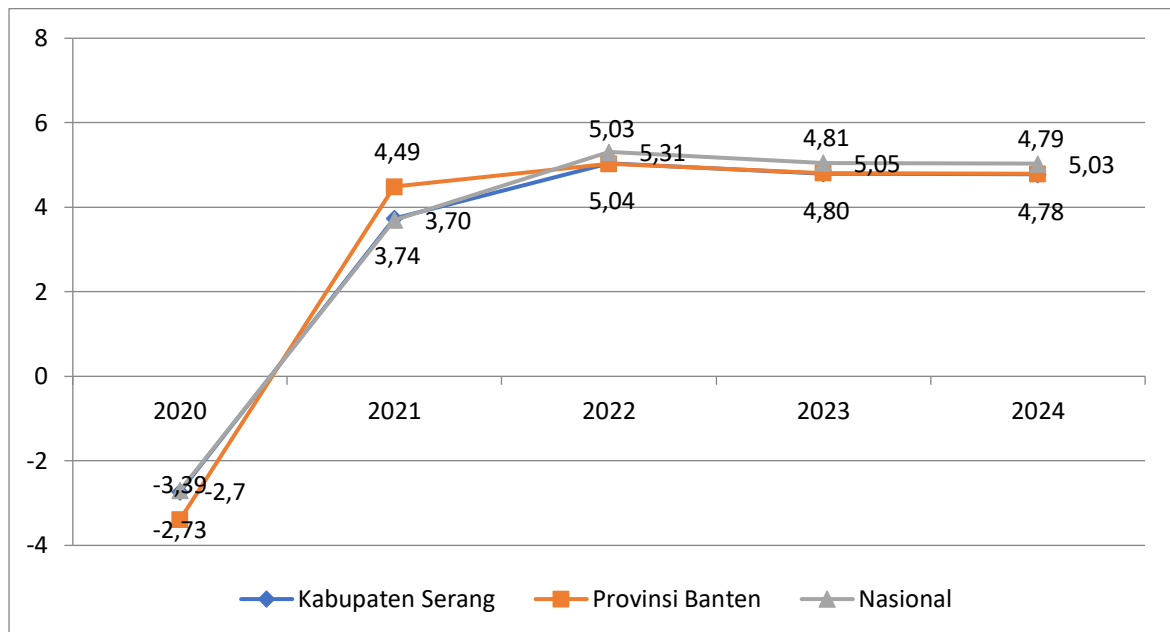
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang menunjukkan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19, dimulai dengan fase kontraksi signifikan pada tahun 2020 dengan angka pertumbuhan negatif sebesar -2,73% akibat adanya pembatasan aktivitas sosial dan bisnis (PSBB) yang melumpuhkan sektor-sektor kunci, terutama industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar PDRB Serang, serta penurunan drastis pada konsumsi rumah tangga.

Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kuat dengan pertumbuhan positif menjadi 3,74%, didorong oleh pelonggaran bertahap pada pembatasan mobilitas, adaptasi bisnis terhadap new normal, dan bangkitnya kembali permintaan domestik dan global. Puncak pemulihan terjadi pada tahun 2022 ketika laju pertumbuhan mencapai level tertinggi sebesar 5,03%, yang didorong oleh normalisasi penuh kegiatan ekonomi, peningkatan investasi, serta kinerja solid sektor industri pengolahan yang didukung oleh membaiknya rantai pasok. Namun, pada tahun 2023 dan perkiraan 2024, laju pertumbuhan cenderung mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 4,80% dan 4,78% secara berturut-turut; penurunan ini bukan

mengindikasikan kelesuan, melainkan merupakan fase normalisasi pertumbuhan setelah lonjakan rebound pasca-pandemi, ditambah adanya tekanan dari perlambatan ekonomi global dan efek basis perbandingan tinggi dari tahun 2022, meskipun secara keseluruhan, kinerja ekonomi Kabupaten Serang tetap berada di level yang sehat dan stabil.

Grafik 2.2. 2

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024

2.2.1.2. Kemiskinan

A. Presentase Penduduk Miskin

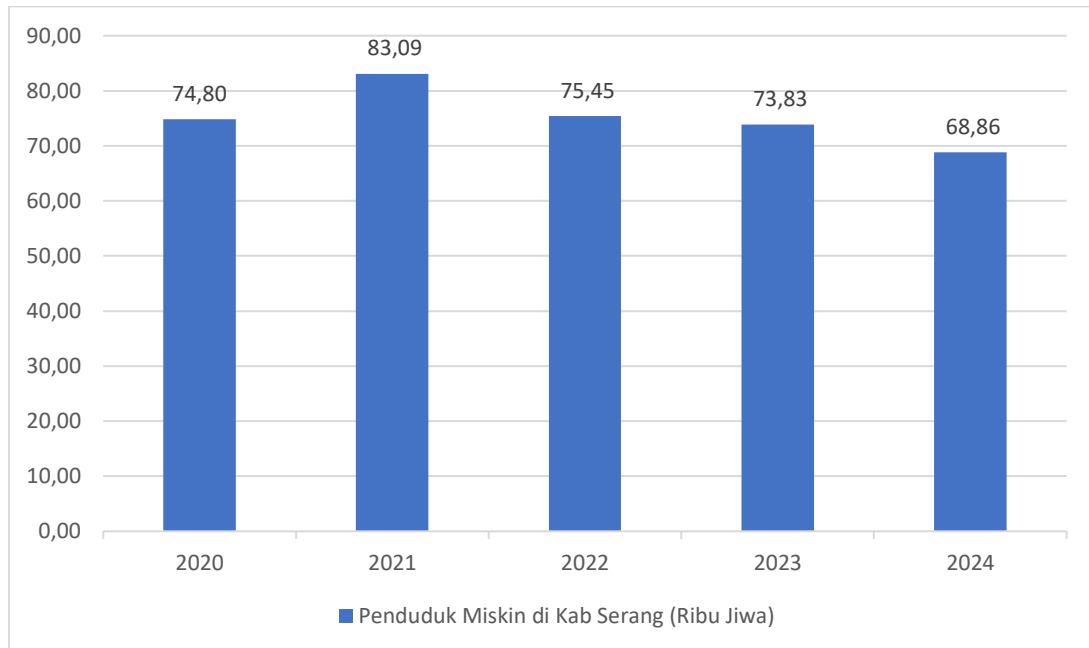
Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Grafik 2.2. 3

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2020-2024 (Ribu Jiwa)

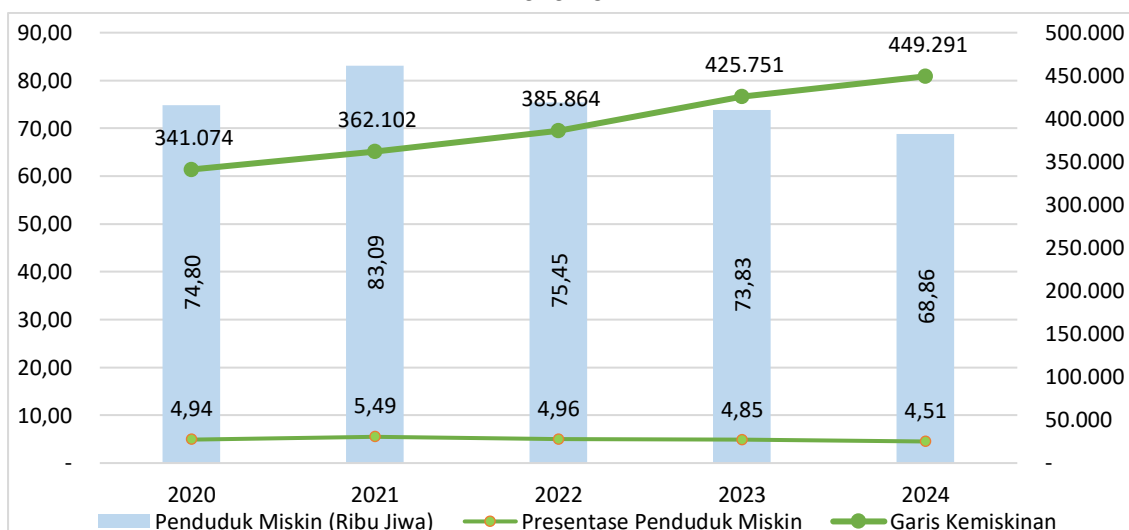


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Pada grafik diatas menunjukkan angka tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,09 ribu jiwa kemudian bergerak turun hingga tahun 2024 sebesar 68,86 ribu jiwa. Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut.

Grafik 2.2. 4

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang dan BPS Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan Grafik di atas, selama periode 2020-2024, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 27.054,- per tahun. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 341.074,- per kapita per bulan, dan

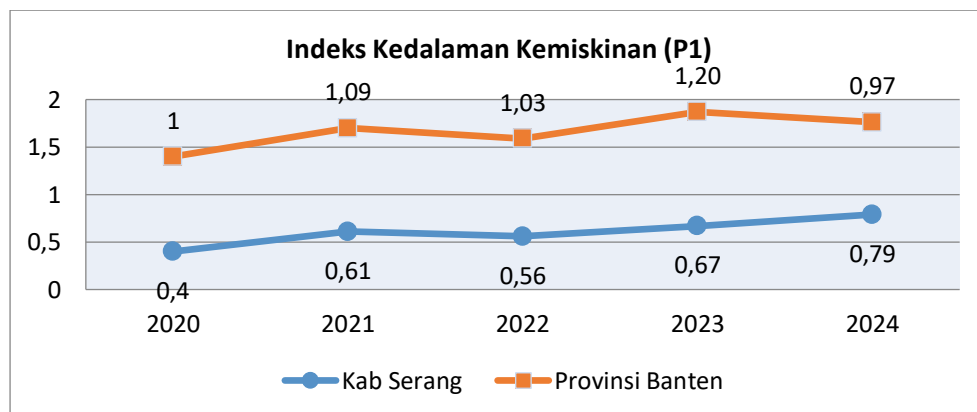
terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 449.291,- per kapita per bulan pada tahun 2024. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 74,80 ribu jiwa atau 4,94% dari total penduduk, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 83,09 ribu jiwa atau 5,49% dari total penduduk, hal ini disebabkan pandemi covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Setelah mencapai puncak pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2024 menjadi 68,86 ribu jiwa (4,51%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Serang memberikan hasil yang cukup baik, namun fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Garis kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kebutuhan dasar untuk keluar dari kemiskinan juga semakin tinggi. Persentase penduduk miskin cenderung menurun, ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan cukup efektif.

B. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahannya (P2)

Untuk mengukur kemiskinan bukan hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Grafik 2.2. 5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten
Tahun 2020-2024

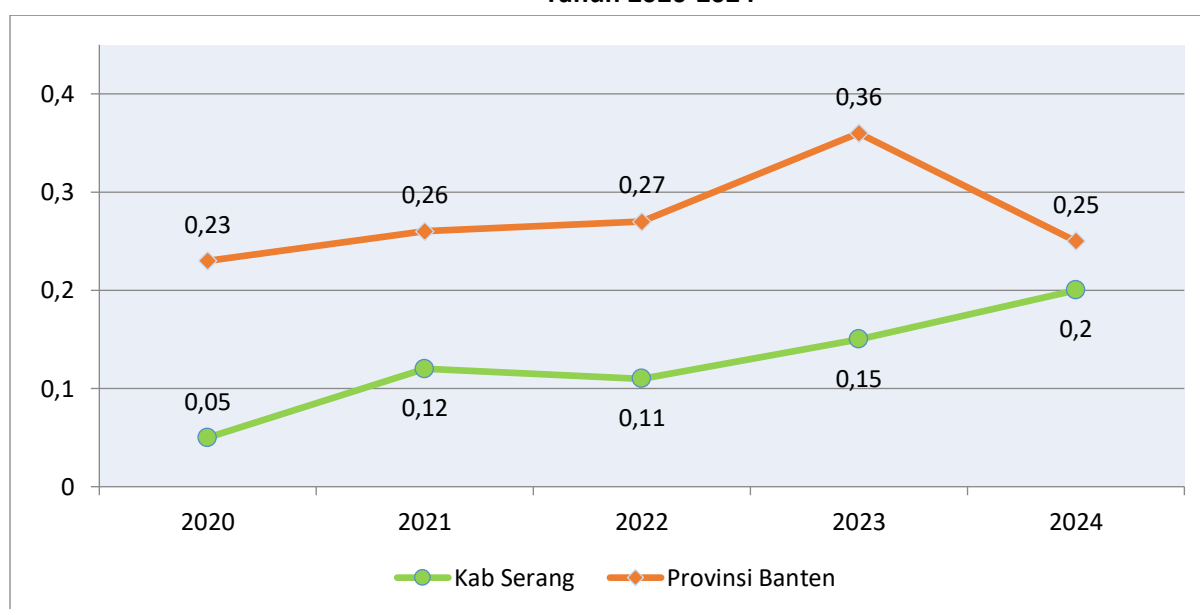


Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

Berdasarkan Grafik diatas, nilai indeks kedalaman (P1) di Kabupaten Serang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 merupakan angka tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu mencapai 0,79 hampir sama dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Banten yaitu sebesar 0,97. Kendati demikian, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serang merosot tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,4 berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Banten yang terus meningkat sampai pada tahun 2021 mencapai 1,09 walaupun sempat turun di tahun 2022 yaitu sebesar 1,03.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Serang selalu lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Serang cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit bila dibandingkan dengan Provinsi Banten. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2.2. 6
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten
Tahun 2020-2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024 (diolah)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Serang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif namun memiliki angka tertinggi pada tahun 2024 mencapai 0,2. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) terendah Kabupaten Serang selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,05. Bila dilihat dari grafik diatas, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Serang hampir selalu lebih rendah dari Provinsi Banten.

C. Kemiskinan Ekstrem

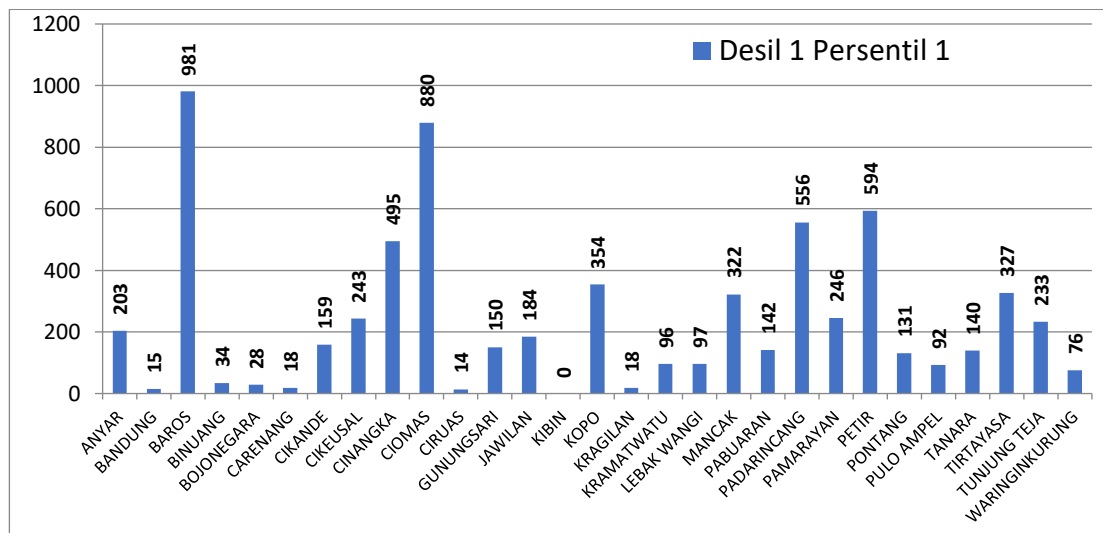
Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Kemenko PMK adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang hidup dibawah USD 2,15 per kapita per hari. Menurut Bank Dunia Purchasing Power Parities (PPP) menjadi sebesar USD 3.00. Bank Dunia atau World Bank menyarankan agar pemerintah Indonesia tetap menggunakan standar penghitungan garis kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang tertuang dalam The World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia" yang rilis pada 13 Juni 2025. Masyarakat dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 20.000/orang/hari atau Rp. 595.242/orang/bulan (BPS,2024).

Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Serang tahun 2024 adalah sebesar 0,64%

yang artinya jumlah penduduk miskin ekstrem berada pada desil 1, persentil 1. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah penduduk Kabupaten Serang pada persentil 1 sebanyak 6.828 jiwa.

Berdasarkan Grafik dibawah ini, bahwa sebaran kemiskinan berdasarkan desil 1 persentil 1 terdapat kecamatan dengan jumlah sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Serang yaitu berada di Kecamatan Baros dengan jumlah 981 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah di wilayah Kabupaten Serang terdapat pada kecamatan Kibin dengan jumlah 0 jiwa.

Grafik 2.2. 7
Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Kemenko PMK, 2024

Tabel 2.2. 2
Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) di Kabupaten Serang

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Esktre
2021	0,62
2022	0,75
2023	0,34
2024	0,64

Sumber: TKPK Provinsi Banten, 2024

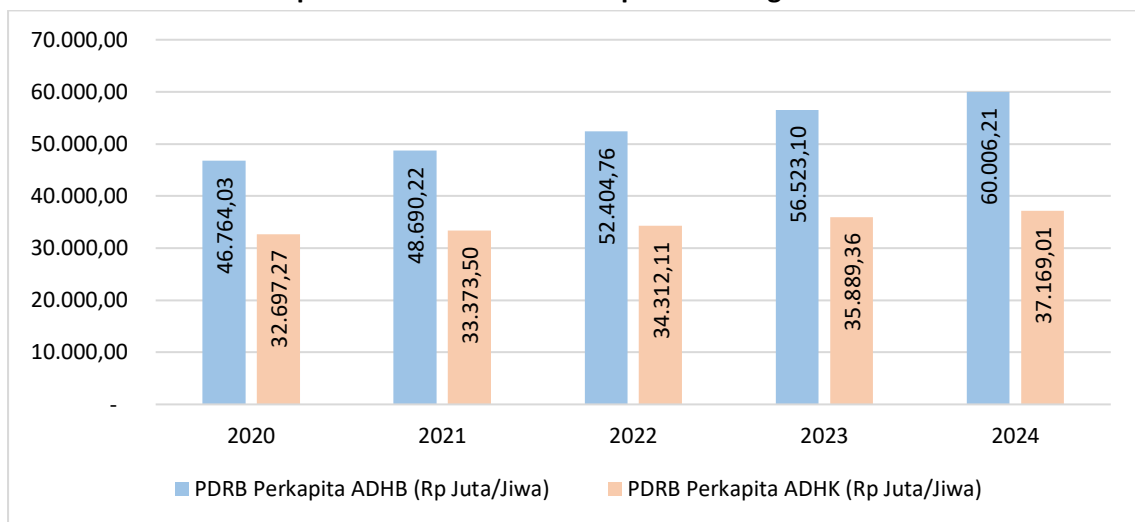
Menurut tabel diatas presentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Serang tahun 2022 adalah sebesar 0,75%, semakin meningkat dari tahun 2021 sebesar 0,62% dan menurun menjadi 0,34% pada tahun 2023. Namun di tahun 2024, kembali meningkat menjadi 0,64%. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa pada tahun 2024 target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Untuk itu dibutuhkan program konvergensi/keterpaduan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam menyasar penerima manfaat. Dan pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Grafik 2.2. 8

PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Grafik di atas, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Serang mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik itu dengan perhitungan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB mencapai 46.764,03 juta rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 60.006,21 juta rupiah. Demikian pula dengan PDRB ADHK yang mencapai 32.697,27 juta rupiah pada tahun 2020, mengalami peningkatan 37.169,01 juta rupiah pada tahun 2024.

Seperti penjelasan sebelumnya, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun demikian, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (transfer out) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Indonesia sedang berupaya mencapai cita-cita menjadi negara maju. Harapannya, setelah 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, ekonomi akan membaik, termasuk ekonomi digital. Sebagai negara maju, pendapatan per kapita yang dirancang oleh Bappenas di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian, mensyaratkan pendapatan perkapita minimal USD 23.000. Saat ini pendapatan perkapita Kabupaten Serang baru sebesar 55.327.506 Rupiah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara melibatkan faktor ekonomi, sosial dan kebijakan antara lain:

a) Pendidikan

Pendapatan perkapita akan meningkat jika kualitas pendidikannya baik, dengan investasi dalam sistem pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja kedepannya.

b) Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan energi, karena infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

c) Tatakelola pemerintahan yang baik

Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan usaha yang stabil.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lainnya, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,55% pada periode 2020-2024 seiring dengan meningkatnya penduduk usia kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja maka angkatan kerja pun akan bertambah.

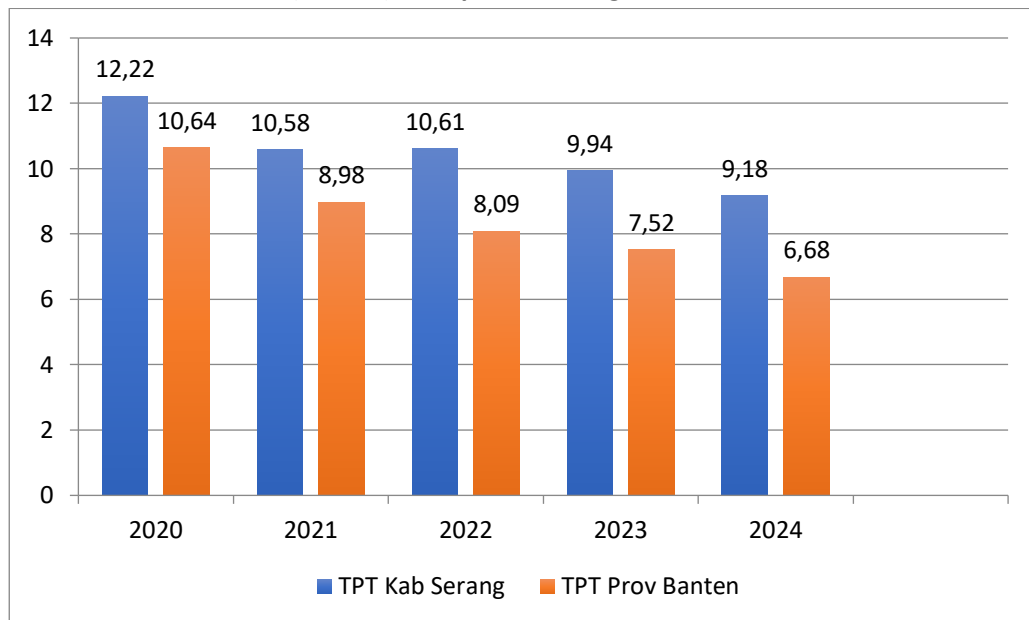
Tabel 2.2. 3
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Ribuan Orang) Kabupaten Serang 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	1.102,85	1.111,65	1.119,99	1.260,37	1.277,73
Angkatan Kerja	699,86	709,94	719,65	796,82	865,90
Bekerja	614,32	634,83	643,28	717,58	786,38
Pengangguran	85,54	75,11	76,37	79,24	79,52
Bukan Angkatan Kerja	402,99	401,72	400,34	463,55	411,84
Penduduk Usia Kerja	1.102,85	1.111,65	1.119,99	1.260,37	1.277,73

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2020-2024, TPT Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2020, angka TPT di Kabupaten Serang mencapai angka 12,22%. TPT di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan hingga tahun 2024.

Grafik 2.2. 9
TPT (Persen) Kabupaten Serang 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2020-2024

Grafik diatas menunjukkan presentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten serang pada 2020-2024. Dari grafik tersebut terlihat bahwa TPT Kabupaten Serang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang berpengaruh pada pergerakan sebuah perekonomian di suatu daerah. Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya TPAK dan peningkatan tersebut diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja tersebut dapat berdampak terhadap semakin menurunnya angka pengangguran.

Dengan demikian, semakin sedikitnya angka pengangguran ini berarti orang yang memiliki pekerjaan sudah lebih banyak dan orang tersebut memiliki pendapatan, sehingga dengan pendapatannya tersebut dapat meningkatkan investasi dalam bentuk tabungan yang berdampak pada pendapatan wilayah akan meningkat melalui pajak (pajak penghasilan) dan ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

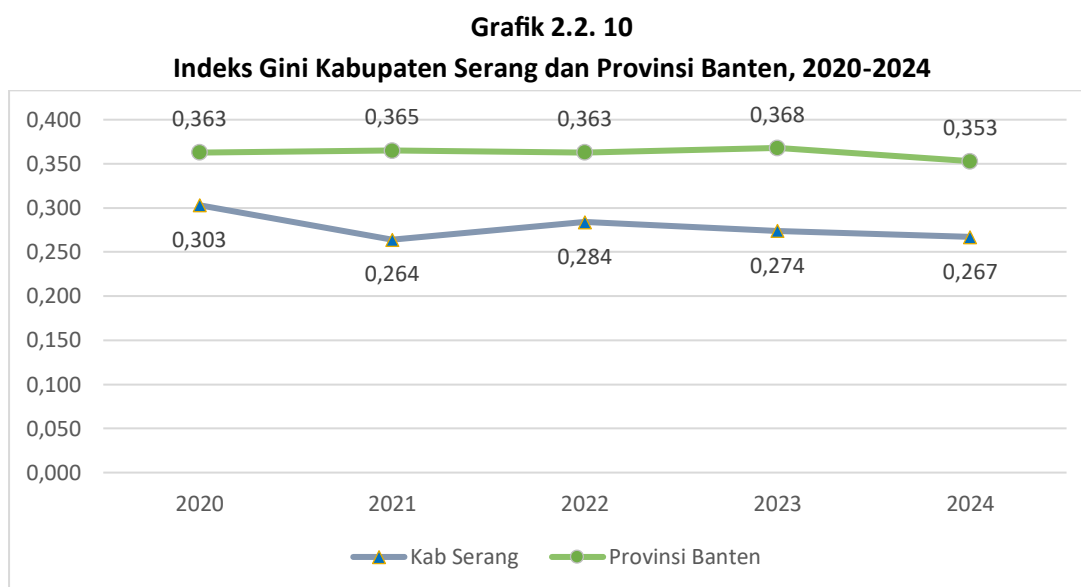
2.2.1.5. Indeks GINI

Ketimpangan antar wilayah dapat diartikan sebagai tidak meratanya distribusi pendapatan atau distribusi sumber daya lainnya ke setiap wilayah. Pergeseran aktifitas ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri salah satu penyebab ketimpangan ini karena semakin banyak masyarakat yang bekerja disektor yang lebih menjanjikan dan berakibat ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Gini Ratio adalah salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dengan melihat tingkat ketimpangan ekonomi di dalamnya. Semakin besar ketimpangan terjadi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi

tidak terjadi secara merata sehingga terjadi deviasi dari rata-rata pengeluaran per kapita antar kota/kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam satu negara.

Terdapat keterkaitan antara ketimpangan dengan pembangunan wilayah, dimana cepatnya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan ketimpangan, oleh sebab itu permasalahan ketimpangan perlu segera ditangan karena dapat menghambat proses pembangunan wilayah. Secara Umum Indeks Gini Kabupaten Serang berada diatas Provinsi Banten, dan nilainya fluktuatif dari tahun 2020 sebesar 0,303 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,264. Periode 2020-2024 nilai indeks gini Kabupaten Serang menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun hingga mencapai angka 0,267 pada tahun 2024.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

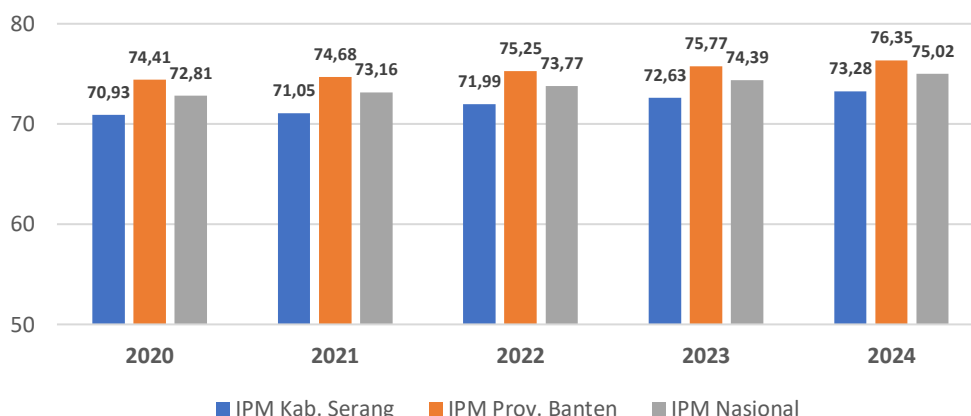
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. IPM merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari 3 (tiga) aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Daerah dengan IPM yang tinggi memiliki penduduk yang berpendidikan, sehat dan memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup layak dengan kondisi tersebut dapat mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik.

IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak yang kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai akhir IPM suatu wilayah. Pada dimensi kesehatan, indikator yang diukur adalah Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu mengukur perkiraan rata-rata usia hidup penduduk disuatu wilayah dimana semakin tinggi angka UHH, semakin baik kondisi kesehatan masyarakatnya. Kemudian, dimensi pengetahuan yang memiliki kontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) terdapat 2 (dua) indikator yang diukur, pertama Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki sistem pendidikan, yang kedua Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas. Semakin tinggi angka HLS dan RLS, maka semakin baik kesempatan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dimensi

terakhir yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator Pengeluaran Riil per Kapita. Indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan konsumsi riil yang telah disesuaikan dengan inflasi yang artinya semakin tinggi Pengeluaran Riil per Kapita, semakin besar peluang masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.

Grafik 2.2. 11

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Banten 2023

Berdasarkan grafik di atas, IPM Kabupaten Serang dari tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2024 mencapai 73,28 yang dimana pertumbuhan IPM Kabupaten Serang masuk ke dalam kategori tinggi. Pada grafik juga terlihat bahwa IPM Kabupaten Serang masih berada di bawah IPM Provinsi Banten dan Nasional. Namun, menurut Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menjelaskan di tahun 2024 bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten Serang sebesar 0,89 persen yang artinya lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten sebesar 0,77 persen dan Nasional sebesar 0,85 persen. Pertumbuhan IPM yang terjadi di Kabupaten Serang mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang mengalami peningkatan. Kedepannya, dampak positif dari kenaikan IPM ini harus didukung oleh kebijakan yang tepat agar manfaatnya merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Selain itu, meningkatnya IPM, Kabupaten Serang memiliki potensi menjadi daerah yang kompetitif dalam pembangunan global.

Tabel 2.2. 4 IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun					Pertumbuhan IPM 2020-2024 (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten Pandeglang	68,86	69,02	69,70	70,28	70,88	2,93
Kabupaten Lebak	66,39	66,5	67,19	67,68	68,33	2,92
Kabupaten Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56	76,19	2,83
Kabupaten Serang	70,93	71,05	71,99	72,63	73,28	3,31
Kota Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98	81,53	2,13
Kota Cilegon	76,80	77,11	77,68	78,24	78,83	2,64
Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43	76,90	2,19
Kota Tangerang Selatan	82,70	82,98	83,28	83,57	84,16	1,77
Provinsi Banten	74,41	74,68	75,25	75,77	76,35	2,61

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Pada periode tahun 2020-2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup bervariasi. Dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati peringkat 3 (tiga) IPM terendah diatas Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Meskipun demikian, pertumbuhan IPM Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan pertumbuhan IPM tertinggi di Provinsi Banten sebesar 3,31. Kabupaten Serang memiliki peran besar dalam mendorong meningkatnya IPM Provinsi Banten. Capaian nilai IPM tentu saja menjadi target bagi setiap daerah dalam mengukuhkan wilayahnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Serang di masa mendatang dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan bagian penting dalam pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu sasaran transformasi sosial untuk Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia Sehat melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan target stunting di bawah 5 (lima) persen dan menuntaskan TBC dan kusta.

Kesehatan untuk semua dilakukan dimulai dari meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan akses layanan kesehatan yang merata sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang artinya kesehatan harus dapat dijangkau oleh setiap orang. Kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Negara dengan masyarakat yang sehat dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, merangsang inovasi dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Untuk mencapai kesehatan untuk semua, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mewujudkannya.

Untuk mencapai kesehatan untuk semua, diperlukan Sumber daya kesehatan yang lengkap dimulai dari tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan serta perbekalan kesehatan termasuk sediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan. Selain itu dibutuhkan juga dukungan dari seluruh fasilitas kesehatan swasta yang ada di Kabupaten Serang.

Tenaga kesehatan (sumber daya manusia kesehatan) merupakan semua orang yang bekerja aktif dan profesional di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat, bidan), tenaga kefarmasian (apoteker), tenaga kesehatan Masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan serta tenaga keteknisan medis. SDM kesehatan juga meliputi tenaga pendukung dan penunjang kesehatan yang mengabdikan diri dalam management dan Upaya kesehatan.

Tabel 2.2. 5
Kondisi Sarana Kesehatan Tahun 2024

No	Uraian	Kondisi Tahun 2024			
		Jumlah Seluruhnya	Layak	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
SARANA KESEHATAN					
1	Rumah Sakit	8	8	-	-
2	Puskesmas	31	20	7	4
3	Puskesmas Pembantu	31	-	-	31
4	Poliklinik (Klinik Swasta)	110	110	-	-
5	Posyandu	1538	158	9	1371 (tidak ada bangunan)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2025

Sarana dan prasarana kesehatan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, puskesmas, dan laboratorium kesehatan daerah. Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Serang Adalah :

Tabel 2.2. 6 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2023-2024

TENAGA KESEHATAN		Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2021	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2023	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2024
1		2	3	4	5
1	Dokter Umum	157	167	157	244
2	Dokter Spesialis	168	176	126	188
3	Perawat	1090	1113	1206	1157
4	Bidan	880	883	877	871
5	Farmasi	38	81	92	79
6	Ahli Gizi	-	-	61	42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2025

Untuk perbekalan kesehatan mencakup berbagai kebutuhan untuk penyelenggaraan kesehatan diantaranya :

- Sediaan Farmasi yang berupa obat-obatan
- Alat kesehatan berupa peralatan medis yang digunakan dalam pemeriksaan dan pengobatan
- Perbekalan kesehatan (PKRT) yang berupa produk-produk kesehatan lainnya untuk kebutuhan rumah tangga

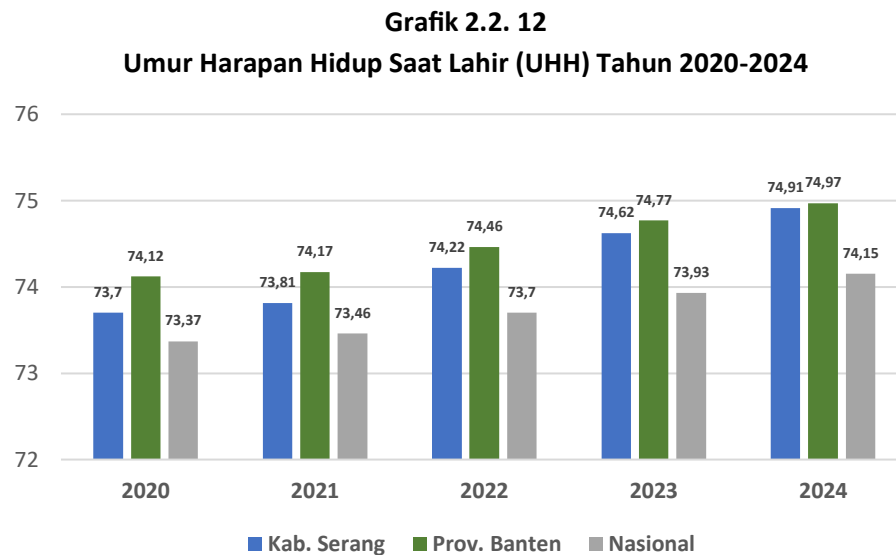
2.2.2.1. Umur Harapan Hidup

Pada proses pembangunan perlu adanya indikator untuk mengukur kualitas kesehatan di suatu wilayah agar pemerintah mampu mengevaluasi kinerja yang kedepannya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Indikator yang dimaksud adalah Umur Harapan Hidup (UHH), yaitu rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat diartikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk di suatu negara. Meningkatnya fasilitas kesehatan serta meningkatnya daya beli masyarakat akan mendorong meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi, mampu memiliki pendidikan yang lebih baik dan memperoleh pekerjaan yang memadai, hal ini akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Serang saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 1,21 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,41 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Serang adalah 73,70 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,91 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,29 tahun atau 0,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,41 persen per tahun. UHH Kabupaten Serang dari periode tahun 2020 hingga tahun 2024 telah di atas rata-rata Nasional, namun masih di bawah rata-rata Provinsi Banten. Salah satu faktor penyebab rendahnya Umur Harapan Hidup di Kabupaten Serang dibandingkan Umur Harapan

Hidup Provinsi Banten adalah masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Serang. Perkembangan UHH Kabupaten Serang, UHH Provinsi Banten dan UHH Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Pada tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Banten, UHH Kabupaten Serang menempati urutan ke 6 (enam) dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten, di atas Kabupaten Pandeglang (74,22) dan Kabupaten Lebak (73,99). Perkembangan UHH Kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. 7
UHH menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pandeglang	73,10	73,22	73,63	74,01	74,22
Kabupaten Lebak	72,93	73,04	73,43	73,80	73,99
Kabupaten Tangerang	74,56	74,59	74,91	75,18	75,34
Kabupaten Serang	73,70	73,81	74,22	74,62	74,91
Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02	75,3	75,50
Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51	74,81	75,03
Kota Serang	74,43	74,54	74,84	75,13	75,31
Kota Tangerang Selatan	75,16	75,16	75,4	75,64	75,80
Provinsi Banten	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

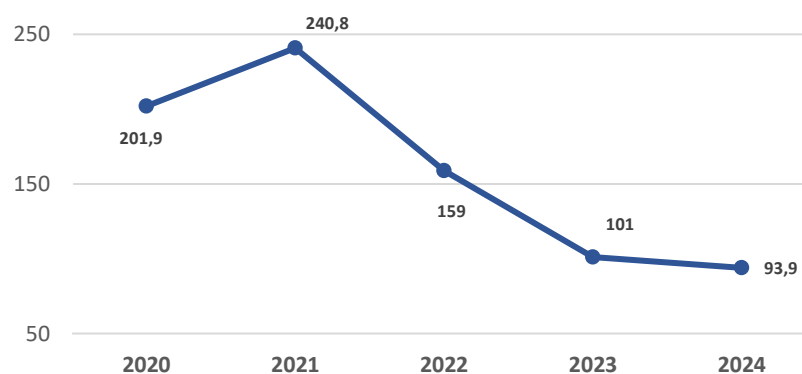
2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap meningkatnya derajat kesehatan. AKI mampu mendorong keberhasilan pembangunan karena dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat. AKI yang tinggi dapat berdampak pada pembangunan

dimana menyebabkan negara kehilangan tenaga produktif, meningkatnya tingkat morbiditas dan mortalitas pada anak.

AKI mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Perkembangan kondisi AKI Kabupaten Serang kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.2. 13
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Serang
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2023

Berdasarkan Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Serang selama tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 201,9/100.000 KH, naik drastis menjadi 240,8/100.000 KH di tahun 2021 dan turun pada tahun 2022 menjadi 159/100.000 KH, kemudian turun kembali menjadi 101/100.000 KH pada tahun 2023, dan mengalami turun kembali pada tahun 2024 menjadi 93,9/100.000 KH AKI Kabupaten Serang.

Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan dan infeksi. Selain itu penyebab kematian ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Faktor masyarakat seperti masih adanya kendala biaya dan tidak memiliki asuransi kesehatan, tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, ketidaktahuan manfaat USG dan Laboratorium, jadwal posyandu yang tidak tepat dan lain sebagainya. Faktor Tenaga Kesehatan seperti Konseling Gizi belum optimal, pemantauan minum tablet tambah darah tidak berkelanjutan, penyakit penyerta yang ditangani belum tepat dan lain sebagainya. Sektor FKTP Tk.1 seperti Stabilisasi Pra-Rujukan belum adekuat, pelayanan belum sesuai SOP, pemantauan paska rujukan tidak jalan, sistem rujukan yang membutuhkan waktu lama (SISRUTE). Sektor FKTL/RS seperti pelayanan belum sesuai SOP, pemantauan Pasca Rujukan tidak jalan, pasien dipulangkan saat belum stabil.

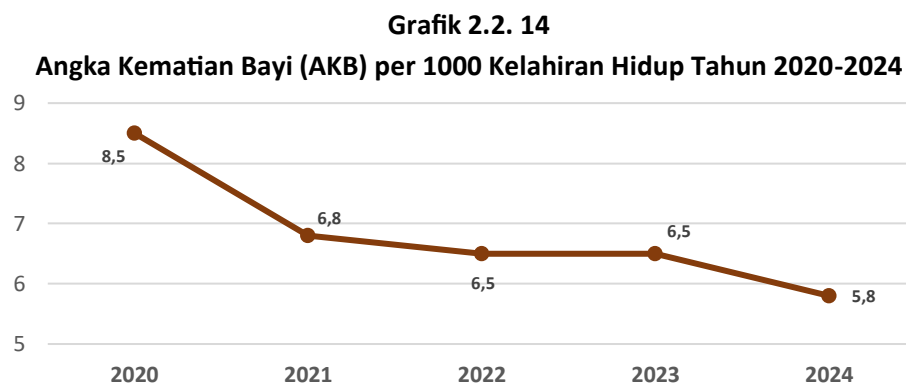
Di lihat dari faktor penyebab diatas dalam menurunkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Serang diperlukan segera dilakukan dengan mengupayakan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan, melakukan pencegahan untuk tidak timbulnya kasus stunting

baru peningkatan pendampingan kelas ibu , seperti ibu hamil, nifas dan balita melalui pemberdayaan posyandu yang mengampu 6 SPM.

2.2.2.3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu indikator penting untuk menilai derajat kesehatan dan sosial ekonomi suatu negara, karena bayi sangat rentan dengan keadaan kesehatan dan kesejahteraan yang buruk. AKB dapat berpengaruh terhadap pembangunan yang salah satunya pada aspek demografi . AKB mencerminkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak (dan orang lain dalam masyarakat), termasuk perawatan kesehatan anak-anak.

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan. Kondisi AKB di Kabupaten Serang dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2024

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan AKB di Kabupaten Serang selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan AKB cenderung menurun, pada tahun 2020 sebesar 8,5/1.000 KH, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 6,8/1000 KH, dan turun kembali pada tahun 2022 - 2023 dengan hasil yang sama yaitu 6,5/1000 KH, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 5,8/1000 KH. Dalam menurunkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Serang diperlukan upaya penanganan melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil dan balita serta optimalisasi peran Posyandu.

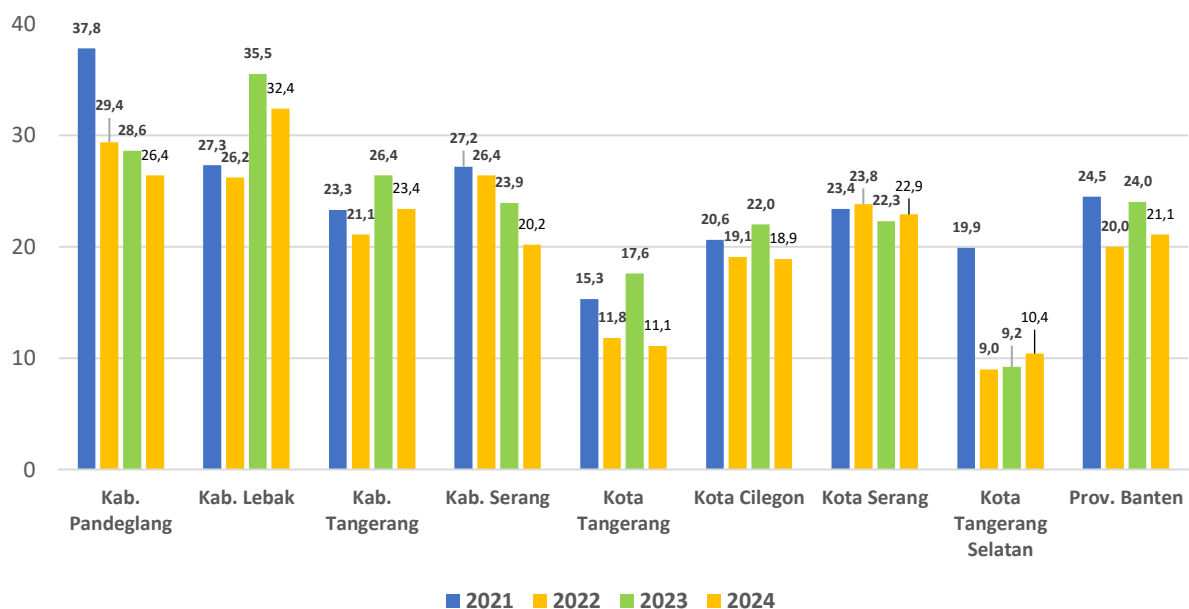
2.2.2.4. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. (Trihono, Peneliti pada Balitbangkes Indonesia).

Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang ditunjukkan bahwa Prevalensi Stunting dijadikan indikator daerah dan merupakan tematik pembangunan, sehingga penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Kabupaten Serang. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2024 sebesar 20,20 persen turun 3,70 persen dari Tahun 2023 sebesar 23,9 persen (SSGI, 2025).

Secara umum, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Banten, prevalensi stunting di Kabupaten Serang sudah menunjukkan kinerja yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dengan ditandai selalu menurunnya angka prevalensi stunting. Penurunan terjadi dari 27,20 persen pada Tahun 2021 menjadi 26,40 persen pada Tahun 2022, kemudian turun menjadi 23,90 persen pada Tahun 2023 dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 20,20. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Serang sudah menunjukkan hasil yang efektif.

Grafik 2.2. 15
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian Kesehatan RI 2024

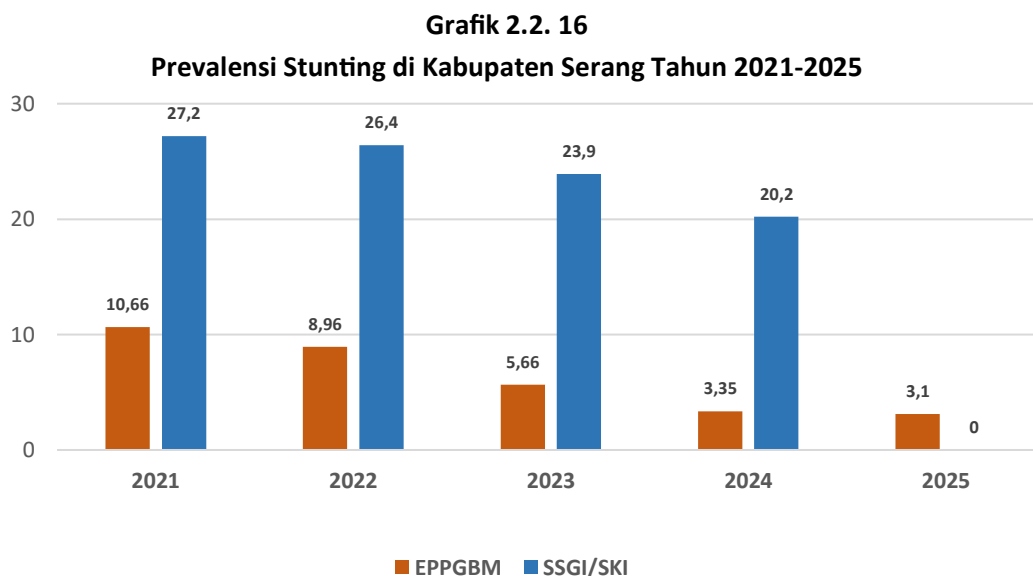


Prevalensi stunting di Kabupaten Serang mengalami penurunan disebabkan oleh intervensi yang dilakukan menyasar pada faktor determinan penyebab terjadinya stunting antara lain :

1. Sanitasi yang buruk
Praktik sanitasi yang tidak memadai seperti penggunaan jamban yang tidak layak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka stunting. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan balita rentan terhadap berbagai penyakit yang mempengaruhi status gizi mereka sehingga intervensi yang dilakukan berupa peningkatan akses sanitasi layak bagi keluarga beresiko stunting;
2. Anemia pada remaja putri
Tingginya prevalensi anemia pada remaja putri dapat berdampak pada kesehatan mereka saat hamil dimasa depan, yang kemudian meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan sehingga intervensi yang dilakukan berupa pemberian TTD dan skrining bagi remaja putri;
3. Akses air bersih
Akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi layak juga menjadi penyebab meningkatnya kasus stunting. Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak sehingga intervensi yang dilakukan berupa peningkatan cakupan layanan akses air minum yang layak bagi keluarga beresiko stunting;
4. Asupan nutrisi yang tidak memadai

Kurangnya keanekaragaman pangan dan kualitas asupan makanan pada anak dapat menyebabkan kekurangan gizi, yang merupakan penyebab langsung stunting sehingga intervensi yang dilakukan berupa penganekaragaman konsumsi pangan lokal dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Meskipun angka prevalensi stunting mengalami penurunan setiap tahunnya baik itu hasil dari EPPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) maupun SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), namun ada kesenjangan yang cukup tinggi dari hasil SSGI yang dilaksanakan oleh Kemenkes dengan hasil ePPGBM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya sasaran yang belum mengakses layanan kesehatan sehingga ketika dilakukan survei status gizi terhadap sasaran banyak ditemukan anak beresiko stunting.



Sumber: Data EPPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025 dan Data SSGI/SKI Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021-2024

Masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Serang akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, maka

Untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting yang berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif dan strategi secara komprehensif, terintegrasi serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Serang antara lain: pendekatan berbasis data, komitmen dan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor-faktor kunci dalam upaya ini untuk mencegah agar tidak timbulnya kasus stunting baru, yang mencakup perbaikan sanitasi, peningkatan akses air bersih, edukasi gizi, penanganan anemia pada remaja putri, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, penyediaan pangan yang baik, melakukan inovasi terbaru dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal secara maksimal.

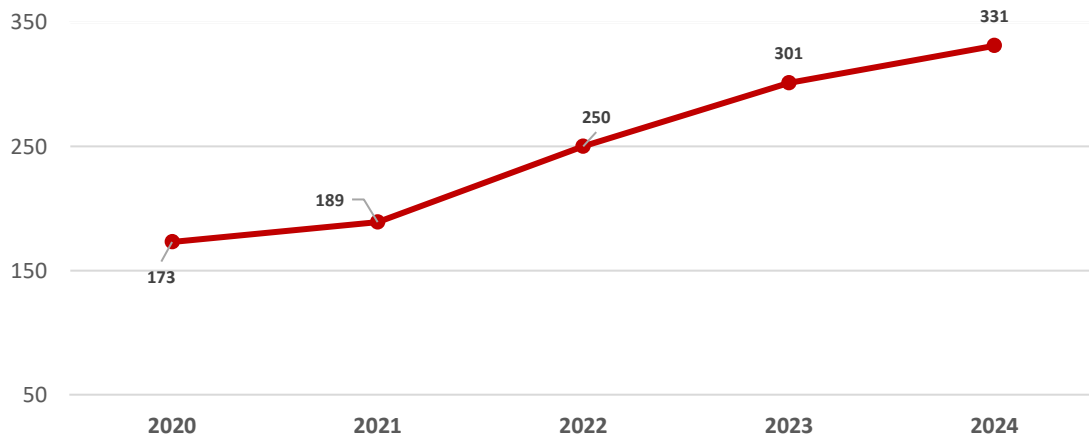
2.2.2.5. Insidensi Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Insidensi Tuberkulosis (TB) merujuk pada jumlah kasus baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu, angka ini

menggambarkan jumlah kasus tuberkulosis di populasi, tidak hanya kasus tuberkulosis yang datang di pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program. Angka ini biasanya diperoleh melalui penelitian Cohort atau permodelan (modelling) yang dilakukan setiap tahun oleh WHO.

Grafik 2.2. 17

Insiden Tuberkulosis di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2024

Berdasarkan Grafik diatas, insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Serang tahun 2020-2024 angkanya meningkat. Pada tahun 2020 insiden Tuberkulosis sebesar 173 per 100 ribu penduduk dan naik pada tahun 2021 menjadi 189 per 100 ribu penduduk, kemudian naik setiap tahunnya hingga di tahun 2024 sebesar 331 per 100 ribu penduduk. Angka insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Serang masih tinggi untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis tahun 2030 yaitu menurunkan insidensi tuberkulosis 65 per 100 ribu penduduk. Untuk itu upaya penemuan kasus sedini mungkin, pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam memutus penularan TBC di masyarakat. Upaya percepatan penanganan kasus Tuberkulosis selain dilakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan perlu juga dilakukan upaya promotif berbasis keluarga dan Masyarakat, penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan maka dari itu wajib melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

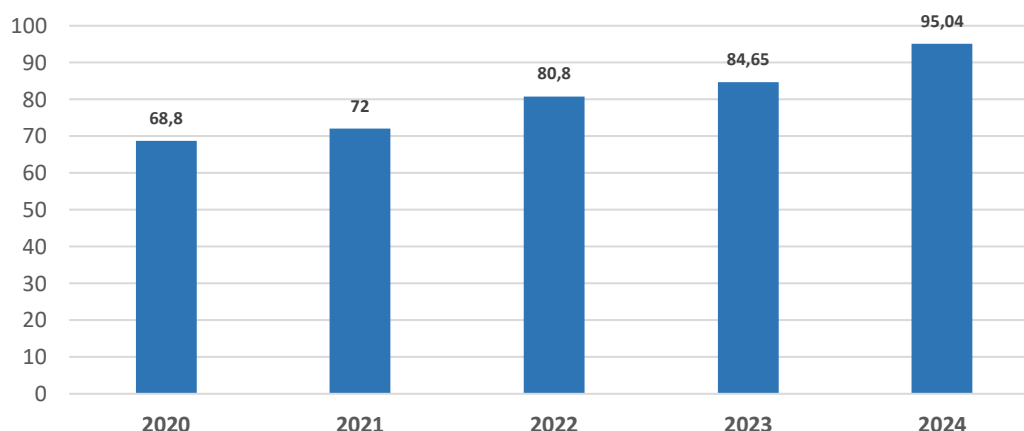
Target program penanggulangan TB secara Nasional yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050, maka dari itu Strategi Nasional penanganan TB terdiri dari penguatan kepemimpinan program TB, peningkatan akses layanan TB yang bermutu, pengendalian faktor risiko TB, peningkatan kemitraan TB, peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB dan Penguatan manajemen program TB.

2.2.2.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah. Cakupan Kepesertaan JKN memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status ekonomi, mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Program ini berfokus pada peningkatan keSejahteraan masyarakat dengan menyediakan sistem yang inklusif, terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan

masyarakat. Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Perkembangan kepesertaan JKN dapat dilihat pada grafik 2.2.19 berikut.

Grafik 2.2. 18
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Serang
Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2024

Dilihat dari Grafik diatas, kepesertaan JKN di Kabupaten Serang tahun 2020-2024 angkanya terus meningkat, pada tahun 2020 persentase kepesertaan JKN sebesar 68,8 persen dan naik pada tahun 2021 menjadi 72 persen kemudian naik, tahun 2022 sebesar 80,8 dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 84,85 dan pada tahun 2024 naik kembali menjadi 95,04 persen dari 1.730.532 penduduk Kabupaten Serang telah memiliki perlindungan finansial untuk mengakses layanan kesehatan. Baik dari anggaran APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten maupun pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, ataupun bukan pekerja.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya secara merata dan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah Pendidikan yang memberikan akses, kesempatan dan standar yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis maupun gender. Pendidikan yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan pekerjaan. Prinsip utama Pendidikan berkualitas yang merata adalah Pendidikan yang dapat di akses oleh semua orang tanpa diskriminasi di setiap wilayah secara merata dengan kualitas pengajaran yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, Pendidikan berkualitas yang merata harus disertai dengan fasilitas Pendidikan yang memadai untuk mendukung kenyamanan belajar siswa dan efektivitas pengajaran guru serta keterjangkauan biaya Pendidikan bagi semua kalangan. Prinsip lainnya, Pendidikan berkualitas yang merata juga harus mencakup kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus, masyarakat adat dan kelompok minoritas. Sistem Pendidikan harus selalu dievaluasi dan diperbaiki dengan terus berinovasi menerapkan teknologi, metode pembelajaran modern dan kurikulum yang fleksibel. Pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat maju, sejahtera dan berdaya saing.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyediaan sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang bersertifikasi guna menunjang pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Serang. Berikut jumlah sarana dan prasarana serta jumlah sekolah yang tersebar di Kabupaten Serang.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Serang, pembagian kewenangan antar level pemerintahan dan kementerian menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Pada tingkat kabupaten, kewenangan utama meliputi pengelolaan layanan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP beserta satuan pendidikan sederajat. Namun demikian, terdapat jenjang pendidikan lain yang secara regulatif berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Serang, seperti RA, MI, dan MTs yang menjadi kewenangan Kementerian Agama, serta SMA/SMK yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Untuk jenjang Madrasah Aliyah, kewenangan berada pada Kanwil Kemenag Provinsi.

Meskipun terdapat pembagian kewenangan tersebut, keseluruhan data terkait satuan pendidikan lintas otoritas tersebut tetap menjadi bagian integral dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serang. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk memperoleh gambaran utuh tentang kondisi pelayanan pendidikan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Serang, tanpa membedakan kewenangan administratif pengelola sekolah. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan basis data yang lengkap, mulai dari jumlah satuan pendidikan, jumlah peserta didik, sebaran sekolah per kecamatan, hingga capaian layanan pendidikan di seluruh jenjang.

Integrasi data sekolah kewenangan provinsi maupun Kemenag menjadi penting karena capaian pembangunan pendidikan secara keseluruhan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini tidak hanya dipengaruhi oleh satuan pendidikan yang dikelola pemerintah kabupaten, melainkan juga oleh keberadaan dan kualitas layanan pendidikan yang berada di bawah kewenangan provinsi dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, tanpa memasukkan data lintas kewenangan tersebut, perencanaan daerah akan kehilangan gambaran komprehensif mengenai tingkat akses dan mutu pendidikan bagi seluruh warga Kabupaten Serang.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Serang tetap harus memasukkan dan mengolah data dari sekolah-sekolah kewenangan provinsi maupun Kemenag sebagai dasar pengambilan kebijakan, perumusan strategi, serta penetapan target pembangunan pendidikan ke depan. Pengintegrasian data ini juga menjadi dasar untuk memastikan keselarasan kebijakan antar level pemerintahan, mendorong kolaborasi antar instansi, serta menjamin bahwa arah pembangunan daerah mampu menjawab kesenjangan layanan pendidikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Serang

Tabel 2.2. 8

Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan PAUD dan Raudhatul Athfal Kabupaten Serang sampai Tahun 2025

SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH RUANGAN	KONDISI BANGUNAN				REALISASI PERBAIKAN KURUN WAKTU 2022-2025			SISA PERBAIKAN KURUN WAKTU 2022-2025		
			BAIK	RINGAN (≤ 30%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)	RINGAN (≤ 30%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)	RINGAN (≤ 30%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)
		R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS
PAUD NEGERI	2	7	0	0	7	0		7	0		0	0
PAUD SWASTA	1103	1676	784	0	801	91		7	3		794	88
RA SWASTA	209	780	643	102	32	3	0	0	0	0	0	0
JUMLAH												

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten Serang, 2025

Tabel 2.2. 9

Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Serang sampai Tahun 2025

SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH RUANGAN	KONDISI BANGUNAN				REALISASI PERBAIKAN KURUN WAKTU 2022-2025		SISA PERBAIKAN KURUN WAKTU 2022-2025	
			BAIK	RINGAN (≤ 30%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)
		R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS
SD NEGERI	707	4720	581	2131	1925	298	72	143	1853	155
SD SWASTA	39	348	224	106	13	5	0	0	13	5
MI NEGERI	4	121	111	7	3	0	-	-	-	-
MI SWASTA	142	1362	923	205	166	68	-	-	-	-
JUMLAH	746									

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten Serang, 2025

Tabel 2.2. 10
Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah
Kabupaten Serang sampai Tahun 2025

SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH RUANGAN	KONDISI BANGUNAN DI TAHUN 2025				REALISASI PERBAIKAN KURUN WAKTU 2021 - 2025		
			BAIK	RINGAN (≤ 30%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)	RINGAN (≤ 30%)	SEDANG (>30% - 45%)	BERAT (> 45%)
		R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS	R.KELAS
SMP NEGERI	90	1216	662	353	152	49	0	193	83
SMP SWASTA	117	711	255	184	159	113	0	3	3
MTs NEGERI	5	142	120	20	1	1	-	-	-
MTs SWASTA	205	1726	1249	276	156	45	-	-	-
JUMLAH									

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten Serang, 2025

Tabel 2.2. 11 Data Satuan Pendidikan PAUD/RA, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH PAUD	GURU PAUD	GURU RA	JUMLAH SEKOLAH SD	GURU SD	GURU MI	JUMLAH SEKOLAH SMP	GURU SMP	GURU MTs
1	Anyar	39	140	40	27	236	52	5	74	170
2	Bandung	21	46	18	19	147	25	6	57	54
3	Baros	43	164	30	25	185	74	6	127	88
4	Binuang	31	96	9	12	121	56	7	70	69
5	Bojonegara	26	104	27	22	168	0	3	82	74
6	Carenang	26	81	19	18	140	38	6	72	94
7	Cikande	53	143	170	35	314	146	14	160	120
8	Cikeusal	52	124	37	44	324	42	8	127	123
9	Cinangka	46	146	48	37	296	62	12	135	113
10	Ciomas	38	120	15	28	191	25	4	60	83
11	Ciruas	51	129	51	34	365	33	7	110	119
12	Gunung Sari	22	63	12	13	82	16	4	49	42
13	Jawilan	35	76	34	19	155	145	12	116	98
14	Kibin	32	103	7	24	192	12	7	77	18
15	Kopo	46	123	20	24	191	101	9	78	143
16	Kragilan	61	153	18	32	319	21	15	181	45
17	Kramatwatu	58	207	112	33	391	31	15	213	89
18	Lebak Wangi	26	67	9	22	154	24	3	56	96
19	Mancak	43	112	10	28	202	32	6	63	92
20	Pabuaran	31	96	12	20	162	55	4	66	102
21	Padarincang	41	126	19	39	292	99	9	113	145
22	Pamarayan	36	86	62	25	166	187	5	93	95
23	Petir	57	142	23	25	228	114	7	99	145
24	Pontang	35	89	32	26	192	52	6	74	120
25	Pulo Ampel	24	65	36	20	154	0	3	25	121
26	Tanara	21	71	10	21	153	62	3	45	154
27	Tirtayasa	39	113	15	26	188	59	7	74	132
28	Tunjung Teja	46	140	16	23	183	39	9	75	89
29	Waringinkurung	32	97	0	26	222	17	5	82	94
TOTAL		1111	3222	911	747	6113	1619	207	2653	2927

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten Serang, 2025

Informasi terkait Data Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP Tahun 2025 ini menyajikan informasi mengenai jumlah sekolah dan tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan di masing-masing kecamatan, baik negeri maupun swasta. Data ini menggambarkan kondisi terkini penyebaran layanan pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan. Jumlah satuan pendidikan dan tenaga pendidik yang tercantum merupakan hasil pendataan terbaru yang telah diverifikasi oleh pihak terkait, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengembangan sarana-prasarana pendidikan di wilayah setempat.

Tabel 2.2. 11 Data Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH PAUD	GURU PAUD	JUMLAH SEKOLAH SD	GURU SD	JUMLAH SEKOLAH SMP	GURU SMP
1	Anyar	39	140	27	236	5	74
2	Bandung	21	46	19	147	6	57
3	Baros	43	164	25	185	6	127
4	Binuang	31	96	12	121	7	70
5	Bojonegara	26	104	22	168	3	82
6	Carenang	26	81	18	140	6	72
7	Cikande	53	143	35	314	14	160
8	Cikeusal	52	124	44	324	8	127
9	Cinangka	46	146	37	296	12	135
10	Ciomas	38	120	28	191	4	60
11	Ciruas	51	129	34	365	7	110
12	Gunung Sari	22	63	13	82	4	49
13	Jawilan	35	76	19	155	12	116
14	Kibin	32	103	24	192	7	77
15	Kopo	46	123	24	191	9	78
16	Kragilan	61	153	32	319	15	181
17	Kramatwatu	58	207	33	391	15	213
18	Lebak Wangi	26	67	22	154	3	56
19	Mancak	43	112	28	202	6	63
20	Pabuaran	31	96	20	162	4	66
21	Padarincang	41	126	39	292	9	113
22	Pamarayan	36	86	25	166	5	93
23	Petir	57	142	25	228	7	99
24	Pontang	35	89	26	192	6	74
25	Pulo Ampel	24	65	20	154	3	25
26	Tanara	21	71	21	153	3	45
27	Tirtayasa	39	113	26	188	7	74
28	Tunjung Teja	46	140	23	183	9	75
29	Waringinkurung	32	97	26	222	5	82
TOTAL		1111	3222	747	6113	207	2653

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2025

Selain data sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang dan Kemenag Kabupaten Serang, integrasi data sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten untuk jenjang SMA dan sederajat serta Madrasah Aliyah yang kewenangannya berada pada Kanwil Kemenag Provinsi Banten juga menjadi penting karena capaian pembangunan pendidikan secara keseluruhan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sehingga, dengan memasukkan data lintas kewenangan tersebut, perencanaan daerah dapat tergambar secara komprehensif mengenai tingkat akses dan mutu pendidikan bagi seluruh warga Kabupaten Serang.

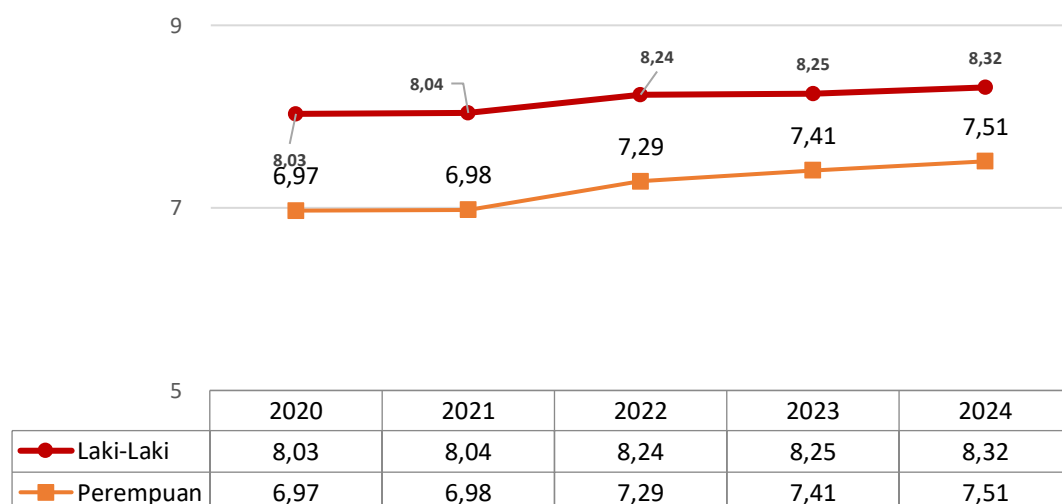
Adapun data jenjang pendidikan tingkat SMA dan sederajat di Kabupaten Serang diantaranya; SMA Negeri berjumlah 29 sekolah, SMK Negeri berjumlah 12 sekolah, MA Negeri berjumlah 3 sekolah, SMA Swasta berjumlah 70 sekolah, SMK Swasta berjumlah 18 sekolah dan MA Swasta berjumlah 90 sekolah, sehingga total jenjang pendidikan tingkat SMA/sederajat berjumlah 222 sekolah.

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator Pendidikan yang menggambarkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Menghitung RLS sangat penting dalam perencanaan pembangunan Pendidikan, ekonomi dan sosial. Indikator ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan Pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif karena dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah.

Cakupan penduduk yang digunakan dalam menghitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun, usia ini dipilih karena seseorang umumnya telah menyelesaikan Pendidikan formalnya baik di tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi pada usia tersebut. Jika RLS tinggi artinya mayoritas penduduk memiliki kesempatan belajar lebih lama dan besar kemungkinan penduduk memiliki keahlian dan daya saing yang lebih baik di dunia kerja. Sebaliknya jika RLS rendah menunjukkan adanya keterbatasan akses Pendidikan dan kualitas SDM yang minim keterampilan dan berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.2. 19
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

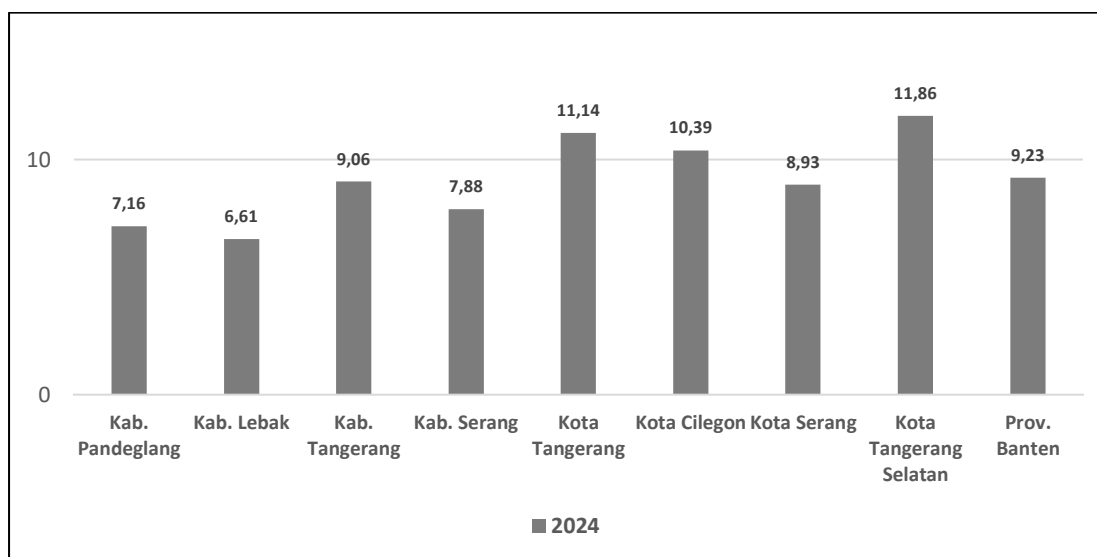


Sumber: BPS Kabupaten Serang

RLS Kabupaten Serang yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 0,38 tahun atau sekitar 5,06 persen. Di tahun 2024, RLS Kabupaten Serang mencapai 7,88 tahun yang artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun Kabupaten Serang menempuh Pendidikan sampai setingkat SD atau maksimal pada kelas VII SMP atau sederajat. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena akan berdampak negatif pada aspek kehidupan. Melihat dari polanya, ada kenaikan RLS Kabupaten Serang setiap tahunnya, harapannya pada tahun-tahun yang akan datang RLS ini akan terus naik

jika diimbangi dengan strategi yang matang. Peningkatan RLS dapat dilakukan melalui akses Pendidikan untuk semua, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan program non-formal dan program kejar paket, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, meningkatkan peran teknologi dalam Pendidikan serta yang paling utama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan.

Grafik 2.2. 20
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Jika disandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada data RLS tahun 2024, Kabupaten Serang berada di posisi peringkat tiga terbawah di atas Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. RLS Kabupaten Serang masih berada di bawah Provinsi yang mencapai 9,23 tahun pada tahun 2024. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlu adanya strategi yang matang untuk mendorong peningkatan RLS agar penduduk Kabupaten Serang semakin tinggi kualitas hidupnya sehingga terciptanya sejahtera dan maju.

Terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Serang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen tercatat sebanyak 12.809 dengan kategori DO dan LTM. Adapun anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 9.132 orang, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DO	LTM	JUMLAH
SD/MI	1.140 orang	3.519 orang	4.659 orang
SMP/MTs	2.689 orang	5.431 orang	8.120 orang
BPB			9.132 orang
TOTAL	3.829 orang	8.950 orang	21.911 orang

Sumber : Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen Tahun 2025

Strategi yang dilakukan untuk mengurangi angka anak tidak sekolah diantaranya melalui kegiatan koordinasi berupa verifikasi dan validasi data untuk pemutakhiran data dengan pihak terkait, melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM dan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti; pemberian bantuan biaya personil terhadap anak tidak sekolah di tingkat SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.

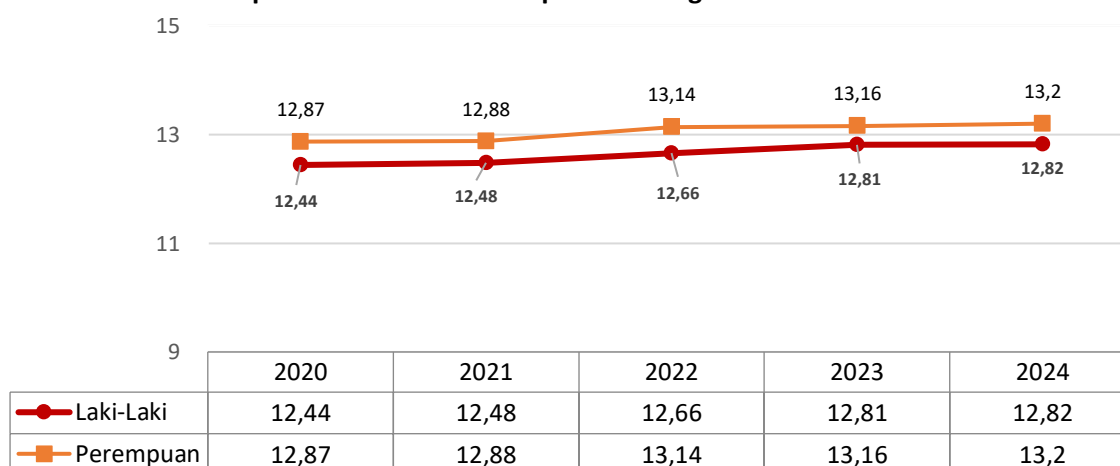
2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator Pendidikan yang bertujuan menghitung rata-rata jumlah tahun Pendidikan yang diperkirakan akan dijalani oleh anak-anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas (usia resmi masuk sekolah di Indonesia). HLS mencerminkan potensi masa depan Pendidikan seseorang berdasarkan kondisi Pendidikan yang berlaku saat ini di suatu wilayah.

Indikator HLS merupakan salah satu bagian yang penting pada dimensi pengetahuan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia, begitu juga dengan indikator RLS. Selain itu, HLS digunakan untuk membantu merencanakan kebijakan Pendidikan dan pembangunan untuk memperbaiki sistem Pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Pada hasil penghitungan jika menunjukkan HLS tinggi maka artinya anak-anak memiliki akses Pendidikan yang lebih luas dan panjang yang mencerminkan bahwa suatu daerah atau negara memiliki sistem Pendidikan yang berkualitas dan aksesibilitas yang baik. Begitu juga jika HLS rendah yang dimana menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kemungkinan besar terputus pendidikannya lebih awal.

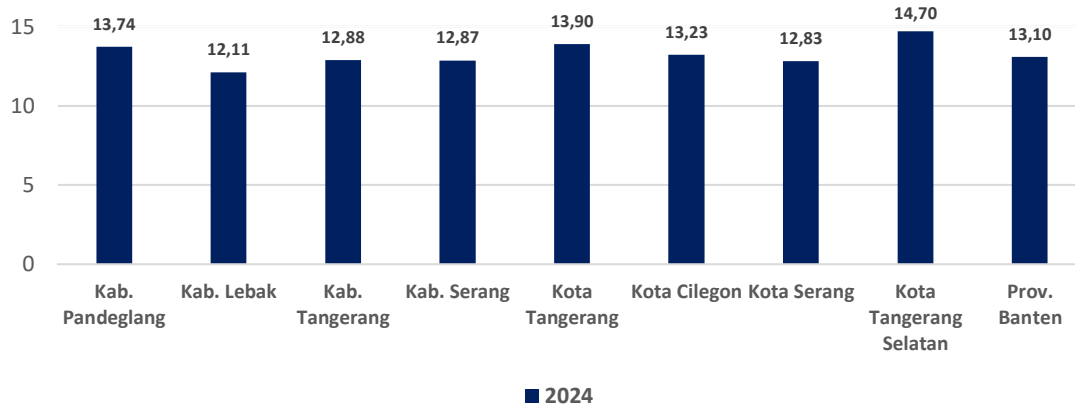
Grafik 2.2. 21
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Perkembangan HLS Kabupaten Serang mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024. Kenaikan yang terjadi sebesar 0,3 atau sekitar 2,4 persen. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa HLS Kabupaten Serang mencapai 12,89 tahun yang artinya anak-anak pada usia 7 tahun saat ini diharapkan akan bersekolah hingga kelas XII SMA atau sederajat. Melihat dari perkembangan angka HLS, Kabupaten Serang tergolong sedang, harapannya mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan menyusun strategi yang tepat seperti memperluas akses Pendidikan, keterjangkauan biaya Pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan membuat program Pendidikan yang fleksibel.

Grafik 2.2. 22
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang

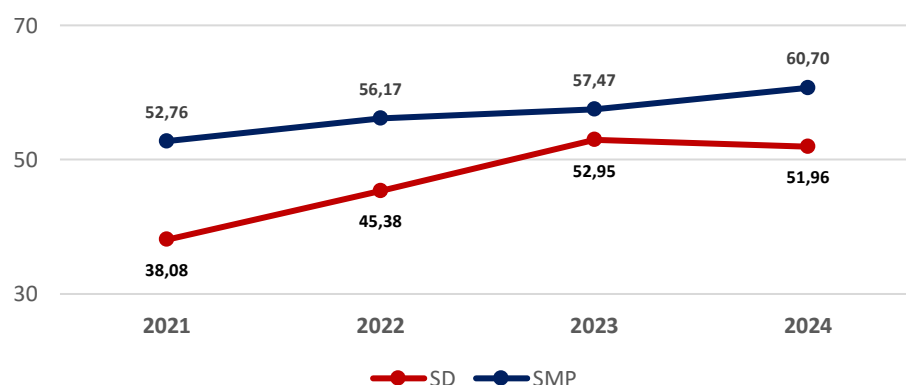
Jika disandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, HLS Kabupaten Serang pada tahun 2024 berada di posisi ke-6 (enam) di atas Kota Serang dan Kabupaten Lebak dan berada di bawah Provinsi Banten dengan HLS sebesar 13,10 tahun. Kedepannya yang telah dijelaskan sebelumnya perlu adanya strategi yang tepat dalam upaya untuk meningkatkan HLS di Kabupaten Serang agar dapat setara dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.

2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah. Semakin tinggi angka literasi dan numerasi maka semakin baik pula kualitas Pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Secara singkatnya, kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis dan memahami informasi tertulis. Kemampuan literasi penting bagi murid di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai dasar pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta bekal daya saing pada era globalisasi dan teknologi.

Grafik 2.2. 23 Angka Literasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Kabupaten Serang Tahun 2021–2024



Sumber: Rapor Pendidikan

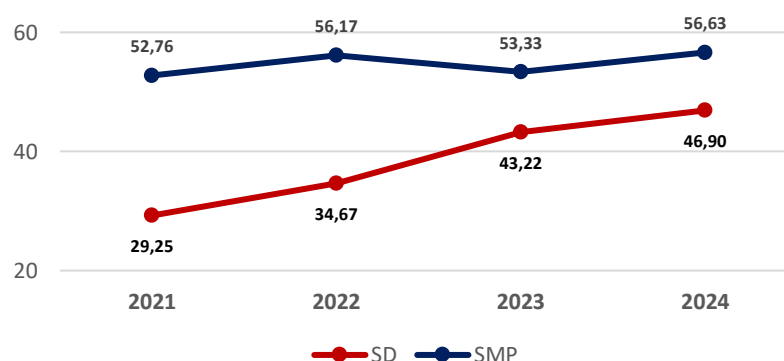
Berdasarkan hasil Asesmen Nasional, capaian kemampuan literasi Kabupaten Serang pada jenjang Pendidikan SD cenderung fluktuatif pada periode 2021-2024. Dari tahun 2021 mengalami kenaikan hingga di tahun 2024 dari 38,08 menjadi 52,95 di tahun 2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 51,96. Sedangkan pada jenjang SMP, capaian kemampuan literasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 52,76 menjadi 60,70 di tahun 2024.

Pada capaian di tahun 2024 dijelaskan bahwa kemampuan literasi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Serang memiliki level kemampuan literasi sedang atau sekitar 51,96 persen murid SD dan 60,70 persen murid SMP yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan literasi, dan masih adanya 48,04 persen murid SD serta 39,30 persen murid SMP yang telah menghadapi kesulitan dalam memahami, menganalisis dan menggunakan informasi secara efektif yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Strategi peningkatan kemampuan literasi pada peserta didik dapat dilakukan dengan meningkatkan kebiasaan membaca sejak dini yang dapat dilakukan baik di rumah maupun di sekolah, mengembangkan kurikulum berbasis literasi dengan lebih banyak teks informatif dan analitis serta memperkuat literasi digital agar peserta didik lebih kritis terhadap informasi di internet.

Kemampuan literasi berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selain itu, kemampuan literasi dapat mencegah penyebaran informasi palsu yang sedang marak terjadi dimasyarakat dengan memungkinkan individu bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Kesadaran pentingnya literasi yang dimulai pada peserta didik dapat pula meningkatkan partisipasi sosial dan politik di masa depan, hal ini juga dapat menciptakan budaya kebiasaan belajar sepanjang hayat di masyarakat.

Selain kemampuan literasi, peserta didik juga harus memiliki kemampuan numerasi, yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara. Kemampuan ini berfungsi untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami konsep angka dan operasi matematika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian peserta didik juga harus mampu menganalisis data dan pola matematis seperti memahami tabel, diagram dan statistik dasar. Kemampuan numerasi juga dapat membantu peserta didik untuk memecahkan masalah dengan menerapkan konsep matematika yaitu berpikir logis.

Grafik 2.2. 24
Angka Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
Tahun 2021–2024



Sumber: Rapor Pendidikan

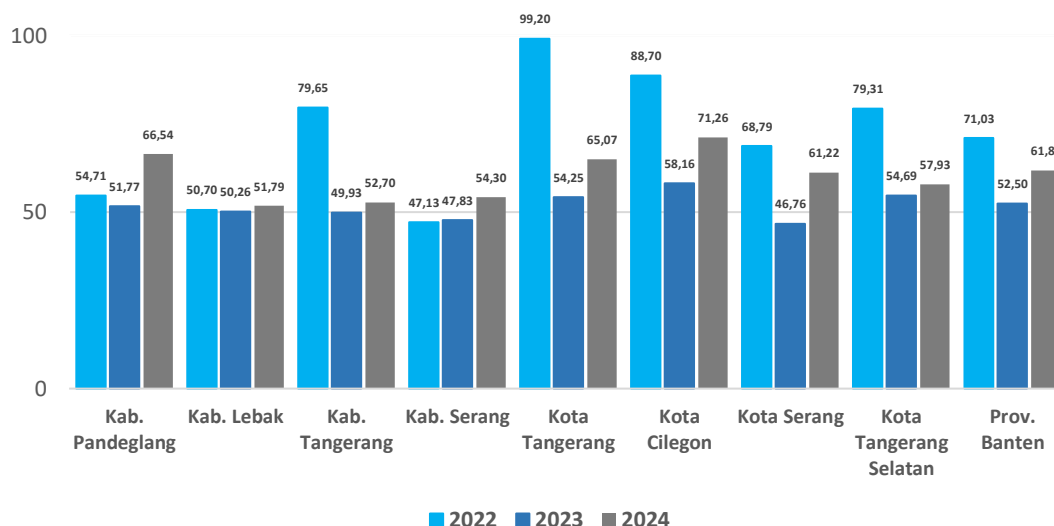
Pada grafik di atas yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional dijelaskan bahwa capaian kemampuan numerasi di Kabupaten Serang pada jenjang SD mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021 hingga 2024 yang mencapai 46,90. Sedangkan pada capaian kemampuan numerasi pada jenjang SMP dalam kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 capaian mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan di tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 sebesar 56,63. Capaian pada tahun 2024 menjelaskan bahwa kemampuan numerasi Kabupaten Serang berada pada level sedang dimana ada 46,90 persen murid SD dan 56,63 persen murid SMP yang telah mencapai kompetensi minimum. Sedangkan masih adanya 53,10 persen murid SD dan 43,37 persen murid SMP yang belum mencapai kompetensi minimum dalam kemampuan numerasi. Masih rendahnya capaian kemampuan literasi disebabkan masih banyaknya murid yang kesulitan dalam memahami dan menerapkan konsep matematika dan juga masih ada banyaknya murid mengalami kecemasan sehingga kurang percaya diri dalam mengerjakan soal-soal numerik.

Kondisi saat ini mendorong harus adanya strategi yang tepat untuk peningkatan kemampuan numerasi seperti mengajarkan matematika dengan pendekatan kontekstual dan aplikatif, mengurangi kecemasan terhadap matematika dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif dan menggunakan teknologi dan alat bantu visual untuk mempermudah pemahaman konsep. Kemampuan numerasi pada peserta didik akan memiliki manfaat yang besar untuk kedepannya seperti membantu individu dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan dan kemajuan karir. Selain itu, masyarakat dengan numerasi tinggi akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi di masa depan.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki akses dan kemampuan dalam membaca, menulis, memahami, serta menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. IPLM dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis tetapi juga mencakup literasi informasi, literasi digital serta budaya dan kewargaan. Secara umum, IPLM mencerminkan bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam meningkatkan budaya membaca dan akses literasi di berbagai wilayah Indonesia. IPLM juga dapat mengetahui kondisi setiap unsur pembangun literasi masyarakat yang meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per-hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan jumlah anggota perpustakaan.

Grafik 2.2. 25
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi
Tahun 2022-2024



Sumber: Laporan Akhir Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dari hasil Laporan Akhir Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI, Nilai IPLM Kabupaten Serang mengalami kenaikan selama periode 2022-2023. Pada tahun 2022 dan 2023 nilai IPLM Kabupaten Serang masuk ke dalam kategori rendah sebesar 47,13 dan 47,83 yang artinya pembangunan literasi masyarakat belum memenuhi standar yang ditetapkan serta memerlukan pembinaan yang insentif untuk seluruh unsur. Di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 54,30 dan mampu merubah kategori menjadi sedang yang dimana pembangunan literasi masyarakat sudah memenuhi standar namun berada dalam kategori sedang. IPLM Kabupaten Serang masih berada di bawah IPLM Provinsi Banten selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Dari grafik di atas, ada harapan untuk kedepannya IPLM Kabupaten Serang terus meningkat setiap tahunnya dengan upaya bersama dengan melakukan pemerataan layanan perpustakaan, meningkatkan koleksi perpustakaan, meningkatkan tenaga perpustakaan, meningkatkan kunjungan masyarakat per Hari ke perpustakaan, meningkatkan perpustakaan yang dibina sesuai SNP, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan meningkatkan anggota perpustakaan.

2.2.3.5 Indeks Literasi Digital

Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon. Telepon/HP pada saat ini bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun lebih berkembang lagi menjadi alat untuk berbagi dan menerima informasi seiring adanya jaringan internet. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten, tercatat pengguna telepon genggam atau HP di wilayah Kabupaten Serang mengalami fluktuasi dimana persentase pengguna HP terbanyak ada di tahun 2022 dengan jumlah 70,25% penduduk Kabupaten menggunakan telepon genggam.

Tabel 2.2. 12
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Genggam/HP di Provinsi Banten Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	50,23	51.56	57.59	55.22
Kab. Lebak	47,01	48.87	53.94	53.34
Kab. Tangerang	63,50	69.09	71.68	68.97
Kab. Serang	56,71	58.49	62.42	61.66
Kota Tangerang	76,26	80.81	80.33	82.42
Kota Cilegon	74,63	78.51	75.87	75.77
Kota Serang	65,93	67.96	65.99	65.04
Kota Tangerang Selatan	76,79	81.95	81.71	84.58
Provinsi Banten	64,40	68.2	70.25	69.87

Sumber: BPS Provinsi Banten

Proporsi Pengguna Internet. Jumlah pengguna internet dapat menjadi indikasi banyaknya individu yang memiliki akses terhadap internet dalam berkomunikasi maupun berbagi informasi. Jumlah pengguna internet khususnya pada penduduk yang berumur lebih dari 5 tahun keatas di Kabupaten Serang mengalami tren naik dari tahun 2019-2023. Kenaikan tersebut kemungkinan adanya penggunaan metode pengajaran online (dalam jaringan/daring) pada masa Pandemi Covid-19 pada periode tahun 2019-2021.

Tabel 2.2. 13
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	34,65	42,43	54,36	52,69
Kab. Lebak	35,29	42,20	49,28	51,15
Kab. Tangerang	58,49	71,47	73,51	72,46
Kab. Serang	45,85	54,62	61,46	64,15
Kota Tangerang	76,03	82,19	81,5	85,36
Kota Cilegon	66,12	74,13	77,04	83,67
Kota Serang	57,91	67,61	67,87	67,41
Kota Tangerang Selatan	79,17	83,08	85,16	85,18
Provinsi Banten	58,63	67,14	70,73	71,73

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen

perlindungan sosial yang adaptif, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja. Sejak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Serang telah bekerja sama dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non ASN sampai tingkat desa sebagai upaya perluasan perlindungan sosial. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Serang pada tahun 2024 mencapai 60,73% dari total seluruh pekerja yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Serang.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

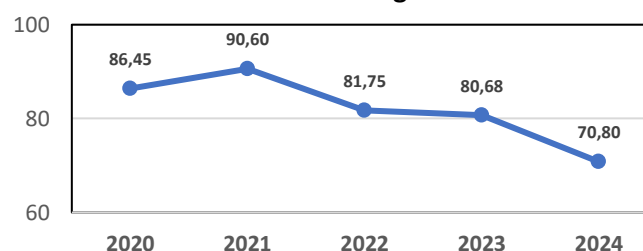
2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari definisi tersebut, kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama.

Daerah wajib untuk ikut andil dan aktif dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Atas mandat tersebut, daerah mengukur kerukunan umat beragama melalui perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Grafik 2.2. 26

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020–2024



Sumber: Laporan Akhir Kajian IKUB 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IKUB Kabupaten Serang pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2022-2024 yang sebelumnya mengalami kenaikan. Hingga tahun 2024, IKUB Kabupaten Serang mencapai 70,80, hal ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Serang berada pada kondisi baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar.

Dalam laporan akhir kajian IKUB tahun 2024 menerangkan kemungkinan konflik yang terjadi di masyarakat umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadah yang berada dalam ranah kewenangan pemerintahan. Kondisi ini mendorong perlunya upaya meningkatkan peran pemerintah dalam meminimalkan resiko konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan tersebut. Upaya yang dimaksud seperti optimalisasi peran pemerintah dalam hal sosialisasi dan penerapan aturan-aturan perizinan tempat ibadah yang tidak diskrimatif serta perlu ditumbuhkannya kembali nilai-nilai sosial dalam rangka meminimalkan prasangka sosial.

2.2.5.2. Cakupan Warisan Budaya Skala Kabupaten

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Serang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Serang sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Jaseng dalam kurikulum muatan local ditingkat pendidikan namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Serang seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Upaya pelestarian di bidang Kebudayaan di Kabupaten Serang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pelestarian budaya dibagi menjadi dua yaitu pelestarian budaya berwujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan daerah bertujuan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan budaya daerah, meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah baik berupa benda maupun tak benda. Salah satu contoh yang harus dijaga dan dilindungi adalah Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini harus kita lakukan bersama agar tetap lestari sehingga anak cucu kita bisa mengetahui sejarah yang terjadi dimasa lalu melalui situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang. Berikut daftar nama situs cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang. Penetapan Cagar Budaya sebagai warisan budaya Kabupaten Serang saat ini belum melalui kajian tim ahli cagar budaya. Berdasarkan SK Bupati Nomor 430/Kep.173-Huk/2017 Tentang Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Daerah Kabupaten Serang, berikut adalah daftar nama situs cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang.

Tabel 2.2. 14 Daftar Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Serang

No.	Nama Situs Cagar Budaya	Alamat Situs Cagar Budaya	Jenis Situs Bcb	Nomor Inventaris	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bendungan Lama Pamarayan	Kp. Pamarayan Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan	Struktur	022.01.01.04.07	Bangunan Bendungan
2	Makam Kramat Kole	Kp. Kramat Kole Ds.Pamarayan Kec. Pamarayan	Struktur	036.01.01.03.94	
3	Gunung Santri	Kp. Gunung Santri Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara	Struktur	012.0101.03.94	Makam Kramat Syeh Muhamad Sholeh Bin Abdur Rohman
4	Menara Masjid Baitul Mutaqim	Kp. Beji Ds.Bojonegara Kec. Bojonegara	Bangunan	018.01.01.04.03	Menara Masjid Kuno/Beji
5	Makam Dan Batu Nisan Kampung Kapaten	Kec. Bojonegara	Benda		Batu Nisan Kuno
6	Sdn 1 Bojonegara	Kp. Gedong Ds.Bojonegara Kec. Bojonegara	Bangunan		Bangunan Sekolah
7	Situs Batu Bergores Cirampones	Kp. Rampones Ds. Sindang Mandi Kec. Baros	Benda	016.01.01.01.01	Tapak Kaki, Batu Bergores, Lumpang Batu/Batu Berlubang
8	Situs Batu Lingga	Kp. Batu Lingga Ds. Sidamukti Kec.Baros	Benda	001.01.01.01.94	Tujuh Buah Batu (Menhir)
9	Batu Tapak Kaki (Tapak Sutan) Dan Batu Keris Sukacai	Kp. Kadu Cokrom Ds. Sukacai Kec.Baros	Benda	017.01.01.01.01	Lumpang Batu/Batu Berlubang, Batu Bergores
10	Makam Katengahan Pangeran Jayakarta	Kp. Katengahan Ds. Margasana Kec.Kramatwatu	Struktur	011.01.01.03.94	Makam Pangeran Jayakarta

No.	Nama Situs Cagar Budaya	Alamat Situs Cagar Budaya	Jenis Situs Bcb	Nomor Inventaris	Ket
11	Lemah Tamba	Kp. Pancuran Ds. Lebak Wana Kec. Kramatwatu	Struktur	013.01.01.03.01	Sumur Tua
12	Situs Tasik Kardi	Kp. Margasana Ds. Margasana Kec. Kramatwatu	Struktur	007.01.01.03.94	Danau Buatan
13	Pengindelan Abang	Kp. Margasana Ds. Margasana Kec. Kramatwatu	Bangunan	006.01.01.03.94	Bangunan Penyaringan Air
14	Menara Pecinan Tinggi	Kp. Darmayon Ds. Pamekang Kec. Kramatwatu	Bangunan	005.01.01.03.94	Bekas Masjid Kuno
15	Situs Patapan	Kp. Patapan Pasir Ds. Negara Kec. Kibin	Struktur	003.01.01.02.94	Kursi Batu Dan Susunan Batu
16	Situs Tirtayasa	Kp. Tirtayasa Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa	Struktur	023.01.01.03.07	Bangunan Benteng
17	Makam Sultan Ageng Tirtayasa	Kp. Tirtayasa Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa	Struktur	024.01.01.03.07	Bangunan Makam
18	Makam Pangeran Singaraja	Kp. Singaraja Ds. Pontang Kec. Pontang	Struktur	010.01.01.03.94	Makam Islam
19	Batu Peta	Kec. Mancak	Benda	027.01.01.03.07	Batu Prasejarah
20	Masjid Cikoneng	Kp. Cikoneng Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Bangunan	018.01.01.04.03	Masjid Kuno
21	Stasiun Kereta Api Anyar Lor	Kp. Kapuh Ds. Anyar Kec. Anyar	Bangunan	002.01.01.01.94	Bangunan Stasiun Kereta Api
22	Stasiun Kereta Api Anyar Kidul	Kp. Cikoneng Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Bangunan	022.01.01.04.07	Bangunan Stasiun
23	Mercusuar Anyar	Kp. Bojong Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Menara Bangunan	009.01.01.04.94	Menara Mercusuar
24	Pulau Sanghyang	Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Bangunan	014.01.01.04.01	Bangunan Bungker
25	Batu Lesung	Kp. Parigi Ds. Grogol Indah Kec. Anyar	Struktur	027.01.01.01.07	Peninggalan Megalitik (Lumpang Batu)
26	Sirit Badug	Kp. Badug Ds. Grogol Indah Kec. Anyar	Struktur	028.01.01.01.07	Peninggalan Megalitik (Menhir)
27	Makam Sangaji	Kec. Anyar	Struktur	028.01.01.03.07	Komplek Makam
28	Makam K.H. Syam'un	Kp. Kamasan. Ds. Kamasan Kec. Cinangka	Bangunan	025.01.01.03.07	Makam
29	Patilasan Nyi Mas Gamparan	Kp. Tanjung Sari Ds. Tanjung Sari Kec. Pabuaran	Bangunan	029.01.01.03.07	Bangunan Dan Sumber Mata Air
30	Stasiun Kereta Api Cikeusal	Kp. Pasar Baru Ds. Cikeusal Kec. Cikeusal	Bangunan	020.01.01.04.05	Bangunan Stasiun
31	Polsek Ciruas	Jl. Raya Serang Jkt Ranjeng Ciruas	Bangunan	031.01.01.04.16	Bangunan Kantor
32	Rumah Kuno Kampung Bojong	Kp. Bojong Ds. Kadikaran Ciruas	Struktur		Bangunan
33	Makam Pangeran Sunyalaras	Kp. Tanara Ds. Tanara Kec. Tanara	Bangunan	023.01.01.03.07	Makam
34	Jembatan Irigasi Sultan	Kp. Cikotok Ds. Lempuyang Kec. Tanara	Bangunan		Bangunan Jembatan
35	Makam Cina	Kp. Pesisir Ds. Lantan Kec. Tanara	Struktur		Makam
36	Naskah Kuno Kh. Kholid	Kec. Tanara	Benda	028.01.01.01.07	Naskah Kuno
37	Masjid Jami Nawawi	Kp. Pesisir Ds. Pedaleman Kec. Tanara	Bangunan		Masjid Kuno
38	Rumah Kampung Setu	Ds. Waringin Kurung Kec. Warngin Kkurung	Bangunan		Bangunan Rumah
39	Stasiun Catang	Ds. Bojong Catang Kec. Tunjung Teja	Bangunan		Bangunan Setasiun

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Adanya keberagaman budaya di Kabupaten Serang dapat mendukung terwujudnya pembangunan nasional karena dengan adanya budaya akan menjadi daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Keanekaragaman budaya memiliki banyak manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Serang yang dapat membantu membangun masyarakat yang lebih toleran, mempromosikan inovasi dan kreativitas, dan menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

Keanekaragaman seni budaya daerah yang ada di wilayah Kabupaten Serang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Serang yang harus dilindungi dalam rangka pemajuan kebudayaan dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Keragaman ini telah melahirkan budaya yang sangat kaya dan unik di Kabupaten Serang, seperti kesenian budaya silat kaserangan, debus, tradisi keagamaan rebo wakasan, panjang mulud, senjata tradisional golok ciomas dan berbagai makanan khas bontot, garang asem, pecak bandeng, sate bandeng, ceplis dan lain sebagainya. Berdasarkan SK Bupati No 430/Kep.587-Huk/2018, berikut adalah ragam seni budaya yang telah ditetapkan sebagai aset daerah di Kabupaten Serang.

Tabel 2.2. 15 Ragam Seni Budaya di Kabupaten Serang

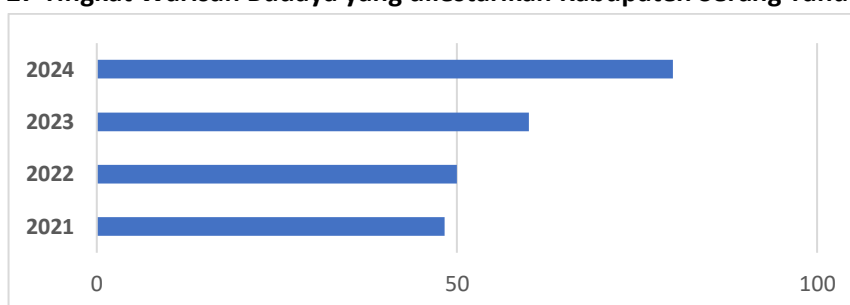
No.	Nama Seni Budaya Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	SILAT KASERANGAN	Seni bela diri khas Kaserangan yang merupakan gabungan jurus-jurus dari beberapa aliran silat yang hidup di Kabupaten Serang khususnya dan umumnya di Provinsi Banten, seperti Terumbu, Bandrong, TTKDH dan lain-lain.
2	RINGKANG JAWARI	Seni tarian kreasi baru yang tercipta dari cerita kesultanan Banten yang mengungkapkan kegigihan Wanita banten
3	DEBUS	Seni tradisional yang berkembang di Kesultanan banten. Debus awalnya diajarkan kepada prajurit di Kesultanan Banten untuk menjaga kesultanan dari serangan musuh, dan selanjutnya debus difungsikan sebagai sarana penyebaran agama islam, karena didalamnya terkandung makna-makna syariat islam
4	TERBANG GEDE	Seni tradisional yang menurut tokohnya, identik dengan peringatan Isro Mi'roj Nabi Besar Muhammad SAW yang menerima wahyu 5 (lima) waktu sholat dari Allah SWT. Terbang gede menurut suku katanya adalah terbang besar yang memiliki 5 (lima) alat music yaitu : koneng, kempul, bibit, kela dan bedug terbang gede.
5	BELUK	Seni suara yang dimainkan dengan nada tinggi dan melengking tanpa syair
6	SYAMAN	Seni dzikir yang mengangungkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
7	RUDAT	Seni tradisional yang bernuansa Islami yang dimainkan pada hari besar dan ngarak pengantin
8	GACLE	Seni akrobat yang memainkan manusia diikat dan bisa lepas sendiri dan hilang orangnya
9	WEWE	Seni boneka-boneka besar seperti ondel-ondel
10	BANDRONG LESUNG	Lahir dari kebiasaan Masyarakat sesaat setelah panen dengan menumbuk padi di lesung untuk menghilangkan lelah dan letih yang dimainkan oleh kaum ibu dari lesung yang diadukan dengan alu
11	BUAYA PUTIH	Lahir dari cerita rakyat di rawa danau terkait dengan kejadian seekor buaya putih yang ditaklukan seorang santri dari pesantren disekitar rawa danau saat santri mau nikah tetiba ada buaya putih untuk dipersembahkan kepada santrinya
12	WAYANG GARING	Tampilan seni wayang kulit yang dimainkan oleh salah satu warga langsung dengan musiknya
13	WAYANG GOLEK	Seni budaya yang menjadi potensi budaya di Kabupaten Serang
14	PATINGTUNG	Seni tradisi yang memiliki alat music yang khas 3 (tiga) goong kecil yang digantung. Kesenian ini hanya dimiliki oleh Kabupaten Serang yang biasa dimainkan untuk mengiringi silat dan debus
15	UBRUG	Seni theater rakyat yang dipentaskan dengan konsep Garapan tanpa naskah
16	LAIS	Seni theater akrobat semacam naik sepeda yang dimainkan di atas tali tambang
17	JALANGKUNGAN	Seni yang ada di Ciomas dengan menggunakan kayu sebagai penompang
18	KUDA LUMPING	Kesenian khelaran yang ada di Pontang beruda kuda-kudaan yang terbuat dari kulit bambu dan diiringi dengan musik patingtung
19	KENDANG PENCA	Seni bela diri yang tersebar di Kabupaten Serang

No.	Nama Seni Budaya Daerah	Keterangan
20	GAMBUS	Seni music islami yang menyanyikan lagu-lagu arab
21	LIONG	Seni atraksi etnis thionghoa yang memainkan liong
22	PANTUN	Tradisi lisan berupa rangkaian kata dua baris pertanyaan dan dua baris jawaban yang mengandung arti dengan Bahasa kiasan yang disesuaikan dengan Bahasa setempat
23	DONGENG	Tradisi lisan berupa dongeng/cerita yang disampaikan secara temurun dari generasi ke generasi berikutnya
24	GENJRING	Seni musik tradisional dengan alat musik yang menyerupai rebana atau rudad biasa, biasanya dipentaskan pada peringatan hari-hari besar islam dan acara~acara perhelatan
25	YALIL	Seni suara dengan suara tinggi, biasa disebut buka pintu pada acara pengantenan/pernikahan
26	MARHABAN	Tradisi mesyarakat saat mendoakan bayi yang baru lahir
27	QOSIDAH	Seni suara/musik bercorak Islami yang menggunakan rebana sebagai media musiknya dan yang dinyanyikan lagu-lagu Islami
28	KERINDING	Seni musik yang bunyinya dihasilkan dari sebilah bambu dan dimainkan saat menunggu padi mau panen
29	KETIMPLUNGAN	Seni musik yang menggunakan alat musik menyerupai terbang gede yang dimainkan pada hari-hari besar islam
30	WAWACAN SYEH	Seni budaya membaca kitab Syeh Abdul Khodir Djaelani
31	RATIBAN	Seni vocal untuk tolak bala
32	BANDRONG	Seni silat yang berkembang di daerah Bojonegara dan Pulo Ampel dengan gerakan khas di bawah
33	RAMPAK BEDUG YUDHA	Seni bedug yang dimainkan secara bersama-sama atau rampak yang hidup di Kecamatan Bandung
34	TARI KREASI BARU	Seni tari kreasi baru yang diciptakan setelah Provinsi Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat

Sumber: SK Bupati Serang No 430/Kep.587-Huk/2018

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Serang digunakan indikator Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan, dalam kurun waktu 2021-2024 nilai Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan mengalami kenaikan setiap tahunnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen untuk melestarikan pembangunan kebudayaan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Perkembangan nilai Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.2. 27 Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024



Sumber: Dindikbud Kabupaten Serang 2024

Kendala-kendala yang dihadapi terkait capaian indikator tingkat warisan budaya yang dilestarikan adalah belum tersusunnya jadwal/schedule didalam pelaksanaan pembinaannya, belum optimalnya antusias dan kerjasama yang baik dari kelompok sejarah, serta belum optimalnya Tenaga Juru pelihara yang bertugas didalam menjaga dan melindungi keberadaan situs cagar budaya.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

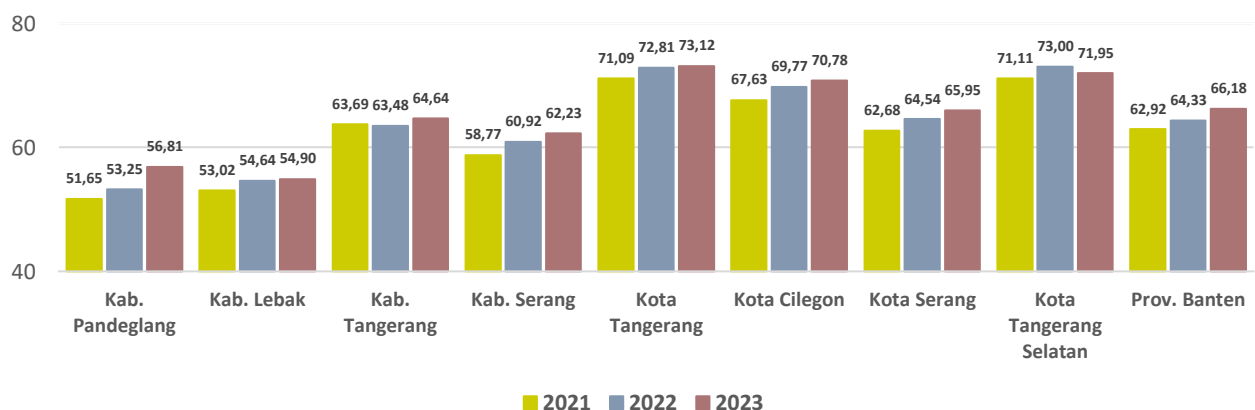
2.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014). Anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan ke depan. Kita semua tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi generasi tangguh yang mampu menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang semakin berat. Merekalah sebagai penentu keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, kita semua harus memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yaitu dengan memenuhi haknya dan memberikan perlindungan bagi anak. Dengan segala kerentanan yang ada pada anak, mereka harus benar-benar mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi. Hak anak juga mencakup hak untuk mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, bermain, mendapatkan makanan, mendapatkan jaminan kesehatan, rekreasi, berkreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya.

Salah satu empat pilar hak anak yang harus diberikan oleh pemerintah adalah hak perlindungan, yaitu hak yang dimiliki setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional serta sosialnya. Dengan ini, perlu adanya indikator yang mencerminkan kesejahteraan anak untuk digunakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif guna upaya memberikan pemenuhan hak perlindungan terhadap anak, yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Grafik 2.2. 28
Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Tahun 2021-2023



Sumber: KemenPPPA

Pada grafik di atas, IPA Kabupaten Serang mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023, meskipun masih berada di bawah IPA Provinsi Banten. Jika disandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada peringkat tiga terbawah di atas Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Masih rendahnya nilai IPA di Kabupaten Serang mengindikasikan bahwa upaya penyediaan hak anak dan perlindungan anak masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya pada upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, penyediaan layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya maupun upaya perlindungan khusus anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan dan hukum terkait perlindungan anak, meningkatkan akses Pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak, perlindungan dalam dunia digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Harapannya, IPA Kabupaten Serang terus meningkat dan mampu melebihi Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota lainnya.

2.2.6.2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

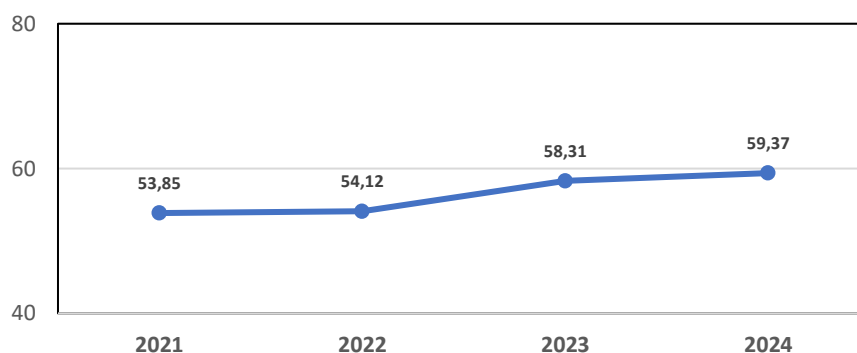
Keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya baik lingkungan fisik, sosial maupun buatan. Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat.

Keluarga memiliki struktur dalam menjalankan peran dan fungsi serta tugas untuk mencapai tujuannya berdasarkan berbagai perkembangan keluarga. Dalam pembangunan nasional, perlu adanya pendekatan kombinasi antara individu dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga pada pengertian yang tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan pembangunan keluarga adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Untuk itu perlu disusun suatu pengukuran yang merujuk kepada pembangunan keluarga, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Pada penghitungannya, terdapat 3 (tiga) dimensi yang membentuk diantaranya ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Dimensi ketentraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian, untuk dimensi kemandirian merupakan kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Serta pada dimensi kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasi diri. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori nilai di bawah 40 menunjukkan iBangga yang kurang baik (rentan), nilai antara 40-70 menunjukkan iBangga yang cukup baik (berkembang) dan nilai di atas 70 menunjukkan iBangga yang baik (tangguh).

Grafik 2.2. 29

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Serang Tahun 2021–2024



Sumber: BKKBN

Tabel 2.2. 16

Capaian iBangga Kabupaten Serang Tahun 2024

iBangga Tahun 2024		
Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
54,07	51,88	72,16

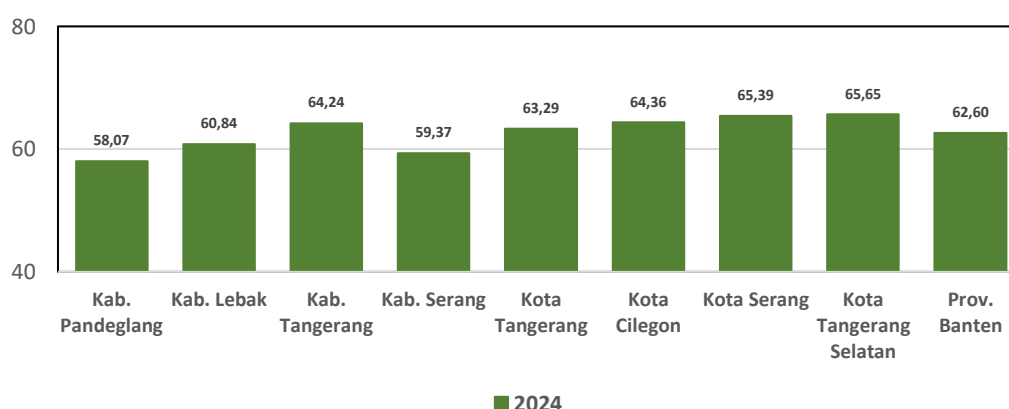
Sumber: BKKBN

Pencapaian iBangga di Kabupaten Serang mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dan menunjukkan iBangga yang cukup baik (berkembang). Pada tahun 2024, iBangga Kabupaten Serang mencapai 59,37 dengan nilai dimensi ketentraman sebesar 54,07, kemudian dimensi kemandirian 51,88 dan dimensi kebahagiaan 72,16. Melihat dari dimensi ketentraman yang masih rendah artinya di Kabupaten Serang masih ada indikator penilaian terkait kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan dan keharmonisan keluarga yang masih belum optimal.

Begitu juga dengan dimensi kemandirian yang dimana penilaian pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga dan akses media online yang belum optimal. Namun pada dimensi kebahagiaan, penilaian interaksi keluarga dan interaksi sosial mendapatkan penilaian baik.

Grafik 2.2. 30

Indeks Pembangunan Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2024



Sumber: BKKBN

Bila disandingkan dengan iBangga Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2024, Kabupaten Serang berada pada urutan kedua terbawah di atas Kabupaten Pandeglang dan berada di bawah iBangga Provinsi Banten. Dari penilaian iBangga dari tahun 2021, perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai iBangga Kabupaten Serang diantaranya dengan melakukan pengembangan desain besar pembangunan keluarga yang holistik, integratif, berkesinambungan dan memperhatikan aspek kewilayahan, dan melakukan persiapan kehidupan berkeluarga melalui bimbingan perkawinan hingga pelayanan konseling. Pemberian edukasi, informasi, sosialisasi dan pendampingan juga perlu dilakukan kepada keluarga dalam melakukan pengasuhan serta pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, meningkatnya pengembangan keluarga juga berpengaruh dari perwujudan lingkungan yang nyaman dan aman bagi keluarga. Dan yang paling utama dari upaya meningkatkan iBangga adalah dengan melakukan penguatan data keluarga, karena ketersediaan data ini yang akan membantu menyusun kebijakan pembangunan keluarga.

2.2.6.3. Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan semua penduduk tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun jenis kelamin. Hal tersebut dapat kita lihat pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan kemajuan pembangunan. Namun, IPM belum dapat menjelaskan kesenjangan capaian pembangunan antar kelompok gender, karena capaian pembangunan yang diukur dengan IPM merupakan ukuran pembangunan manusia secara umum tanpa melihat capaian masing-masing jenis kelamin. Untuk itu, perlu adanya penghitungan untuk mengukur pembangunan manusia dengan mempertimbangkan hasil pembangunan yang dicapai menurut gender yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG menggabungkan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi dan peran perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan kesehatan di suatu wilayah. Tujuan indikator IPG adalah untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender tercapai dengan cara membandingkan pencapaian antara perempuan dan laki-laki di berbagai dimensi pembangunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 IPG Kabupaten Serang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan IPG Kabupaten Serang berada di atas rata-rata IPG Provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Serang tergolong baik. Secara rinci perkembangan IPG Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. 17 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pandeglang	86,71	86,83	86,93	87,09	87,23
Kabupaten Lebak	79,81	79,87	80,2	80,75	81,22
Kabupaten Tangerang	90,98	91,08	91,24	91,67	91,69
Kabupaten Serang	92,14	91,98	92,32	92,49	92,54
Kota Tangerang	95,06	94,72	94,73	94,89	94,95
Kota Cilegon	87,22	87,25	87,57	88,05	88,29
Kota Serang	92,28	92,47	92,63	92,49	92,61
Kota Tangerang Selatan	93,58	93,8	93,96	94,23	94,47
Provinsi Banten	91,74	91,83	92,18	92,48	92,52

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio perbandingan paling sempurna.

2.2.6.4. Indeks Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan dan kemampuan. Isu gender masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, maka itu perlu adanya pemberdayaan gender guna menimalkan ketidakadilan gender dalam segala aspek. Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. IDG ini menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam bidang ekonomi, kehidupan politik, pengambilan keputusan yang menitikberatkan pada partisipasi.

Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari perkembangan nilai IDG. Analisis yang lebih mendalam tentang pemberdayaan gender dapat dilihat dari perkembangan komponen penyusun IDG, yaitu keterlibatan di parlemen, persentase tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi serta sumbangan dalam pendapatan kerja.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, IDG Kabupaten Serang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih berada di bawah IDG Provinsi Banten. Dalam capaian per tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung fluktuatif dimana terdapat penurunan IDG di tahun 2022 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.2. 18
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Kab Pandeglang	63,52	63,16	64,07	65,22	70,10
Kab Lebak	58,68	58,24	57,16	60,08	66,83
Kab Tangerang	61,53	62,17	63,35	63,84	69,37
Kab Serang	59,48	59,93	58,79	61,91	60,50
Kota Tangerang	65,03	64,86	64,09	63,02	65,21
Kota Cilegon	52,32	52,81	51,30	52,16	53,69
Kota Serang	61,26	61,66	62,39	62,98	58,38
Kota Tangerang Selatan	73,85	73,08	72,67	72,36	70,59
Provinsi Banten	68,76	69,09	68,55	69,87	66,48

Sumber: BPS Provinsi Banten

Kedepannya, perlu upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan IDG dengan cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan, meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan

perempuan serta perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya, isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan digaungkan lebih tegas di masyarakat.

2.2.6.5. Indeks Ketimpangan Gender

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), kesetaraan gender menjadi salah satu fokus atau tujuan yang harus segera diatasi. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan.

Ketimpangan gender merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian global. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Ketimpangan ini tidak hanya membatasi potensi individu, tetapi juga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kaum perempuan belum memperoleh kesetaraan yang sama dalam memperoleh hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender yang lebih besar akan berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan pencapaian hasil-hasil pembangunan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hadir sebagai alat untuk mengukur dan memahami sejauh mana ketimpangan ini terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. IKG merupakan indeks komposit yang terdiri atas tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Tabel 2.2. 19 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kab Pandeglang	0,580	0,583	0,573	0,561	0,502
Kab Lebak	0,605	0,626	0,616	0,600	0,567
Kab Tangerang	0,486	0,457	0,433	0,402	0,251
Kab Serang	0,563	0,554	0,560	0,544	0,531
Kota Tangerang	0,279	0,311	0,324	0,284	0,328
Kota Cilegon	0,338	0,354	0,443	0,260	0,248
Kota Serang	0,508	0,521	0,544	0,530	0,543
Kota Tangerang Selatan	0,171	0,155	0,170	0,200	0,176
Provinsi Banten	0,484	0,475	0,478	0,464	0,453

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, IKG Kabupaten Serang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berada di atas IKG Provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Serang. Pada tahun 2020 IKG Kabupaten Serang mencapai 0,563 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,554 dan kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,560, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 0,544 yang dimana semakin rendah IKG maka kesetaraan semakin baik. Pada tahun 2024, IKG menyentuh di angka 0,531 maka kesetaraan semakin baik. IKG memiliki hubungan yang seharusnya berlawanan dengan IPM, IPG dan IDG. IKG yang rendah idealnya diikuti dengan angka IPM, IPG dan IDG yang tinggi dan berlaku sebaliknya. Dari capaian IPM Kabupaten Serang terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya dan nilai IKG Kabupaten Serang

cenderung menurun yang artinya pembangunan manusia yang sudah baik, cenderung sudah merata akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan.

Pembangunan manusia dan kesetaraan gender saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan satu sama lain. Kesetaraan gender berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Saat semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya akan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan sejahtera yang pada akhirnya akan tercipta pula pembangunan manusia yang berkualitas.

2.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi pemuda dan melihat kemajuan pembangunan pemuda di berbagai aspek. Indeks Pembangunan Pemuda memiliki lima domain: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun berdasarkan 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda, yaitu: 1) domain pendidikan (3 indikator); 2) domain kesehatan dan kesejahteraan (4 indikator); 3) domain lapangan dan kesempatan kerja (2 indikator); 4) domain partisipasi dan kepemimpinan (3 indikator); 5) domain gender dan diskriminasi (3 indikator).

Rekapitulasi capaian IPP beserta domainnya ditampilkan pada tabel dibawah ini. Untuk tingkat kabupaten/kota, capaian masing-masing indikator tidak dapat disajikan karena keterbatasan ketersediaan data, capaian IPP beserta setiap domain pembentuknya memiliki nilai yang berada pada rentang 0-100. Angka 0 (nol) merupakan capaian IPP atau domain pembentuknya paling rendah yang dapat diperoleh, sementara itu angka 100 (seratus) merupakan capaian paling tinggi yang dapat diperoleh. Semakin tinggi capaian IPP dan/atau domain pembentuknya mengindikasikan semakin tingginya kualitas pembangunan pemuda secara keseluruhan atau pada domain tertentu.

Tabel 2.2. 20
Capaian IPP Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Angka IPP			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	64,76	40,55	48,70	49,73
Kabupaten Lebak	56,13	41,30	49,62	49,39
Kabupaten Tangerang	72,93	47,37	56,61	59,47
Kabupaten Serang	65,20	48,85	59,75	54,80
Kota Tangerang	75,38	62,67	63,21	64,31
Kota Cilegon	83,23	56,75	67,82	64,34
Kota Serang	66,22	51,63	59,86	62,46
Kota Tangerang Selatan	72,49	60,27	62,76	68,58
Provinsi Banten	50,16	55,82	57,73	61,90

Sumber : Bappenas, Dokumen Rekapitulasi Indeks Pembangunan Pemuda 2020-2023, Tahun 2025

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappenas, nilai IPP Kabupaten Serang tahun 2020-2023 menempati posisi ketiga terbawah setelah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Dari tahun 2020-2023 trend IPP Kabupaten Serang semakin menurun, hal ini mengindikasikan bahwa indeks pembangunan pemuda masih rendah dipengaruhi rendahnya lima domain yang mempengaruhi IPP yaitu: Pendidikan dan Pelatihan, kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, Inklusivitas dan Gender.

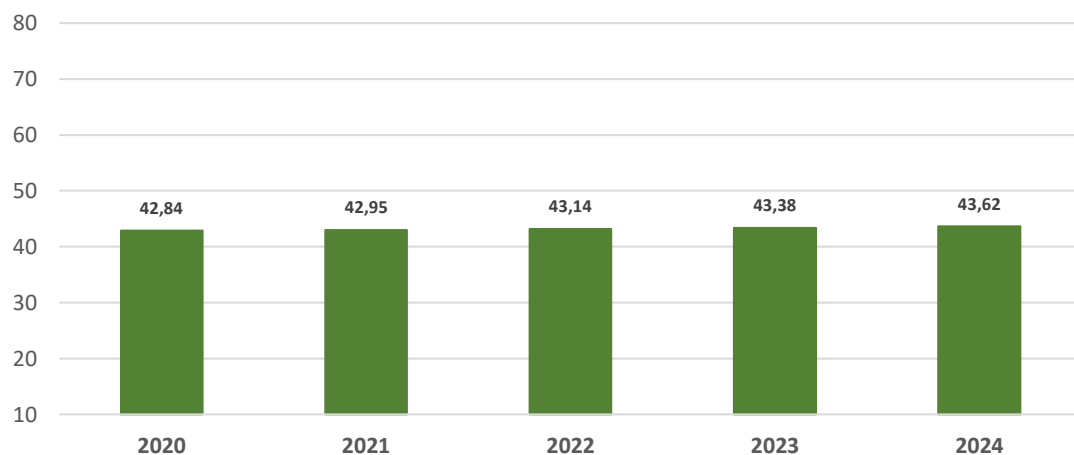
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Penduduk menurut umur dapat menentukan jumlah penduduk produktif dan tidak produktif di suatu wilayah yang kemudian dapat mengukur angka ketergantungan. Angka ketergantungan menggambarkan tingkat beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang bergantung pada mereka. Usia produktif terdiri dari penduduk usia 15-64 tahun sedangkan usia tidak produktif terdiri dari penduduk usia 0-14 tahun (usia muda) dan penduduk usia 65 tahun ke atas (usia lansia). Angka ketergantungan sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena dapat digunakan untuk merancang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, dapat mengembangkan sistem kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi, namun perlu dilihat juga jumlah pertumbuhan lansia dan hal ini perlu diwaspadai karena akan menjadi beban berat di masa depan.

Tabel 2.3. 1
Angka Ketergantungan Kabupaten Serang Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang

Dari penjelasan sebelumnya pada bagian penduduk menurut umur, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Serang pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan namun pada persentase dari total jumlah penduduk per tahunnya mengalami penurunan yang artinya ada kenaikan angka ketergantungan selama periode tersebut yaitu dari angka 42,84 menjadi 43,62. Hal ini menjelaskan bahwa sebelumnya di tahun 2020 setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung setidaknya 42-43 orang penduduk usia tidak produktif, bertambah di tahun

2024 menjadi menanggung sebanyak 43-44 orang penduduk usia tidak produktif dengan demikian terjadi peningkatan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh usia produktif di Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada kondisi ini, Kabupaten Serang memiliki lebih sedikit penduduk tidak produktif dan Kabupaten Serang sendiri masuk dalam kategori angka ketergantungan yang rendah yaitu kurang dari 50 persen di periode 5 (lima) tahun terakhir ini.

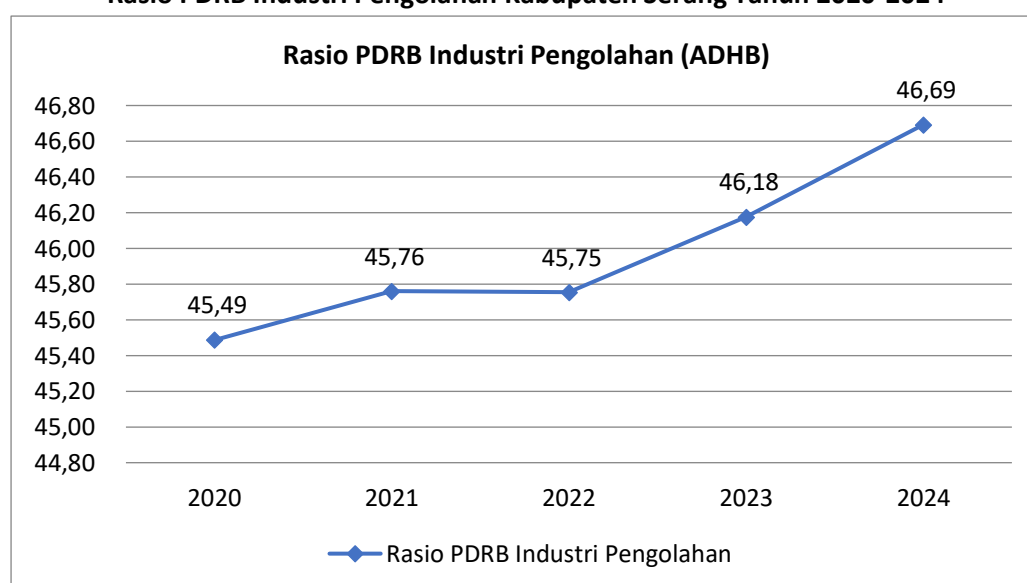
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Indikator dari keberhasilan pembangunan daerah salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada nilai PDRB. PDRB dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pada pendekatan produksi, terdapat 17 sektor ekonomi yang berperan dalam penyusunan PDRB. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan pada PDRB Kabupaten Serang dengan kontribusi terhadap PDRB ADHB sebesar 45,49% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 46,69%.

Grafik 2.3. 1

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

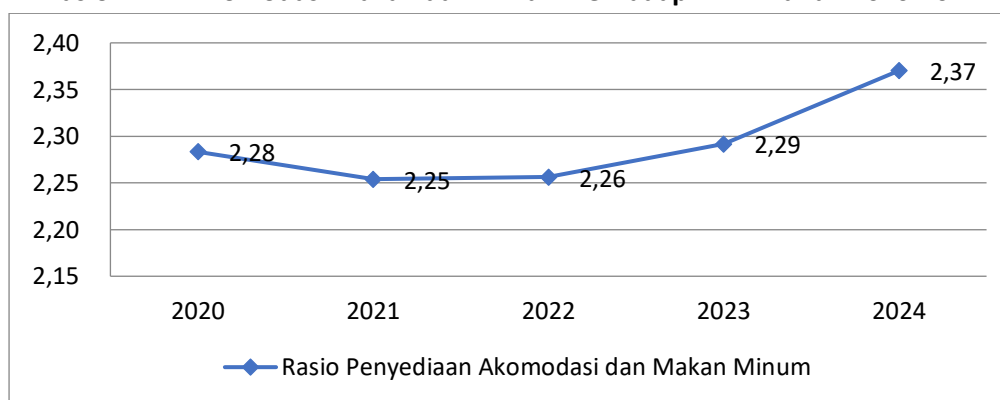
Sektor industri pengolahan memiliki peranan penting dalam proses laju pembangunan ekonomi Kabupaten Serang. Dengan berkembangnya sektor industri pengolahan maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Semakin meningkatnya PDRB Industri Pengolahan disebabkan tingginya tingkat investasi di Kabupaten Serang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa industri pengolahan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah karena melalui pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. diharapkan dapat menciptakan peluang pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan pada gilirannya nanti meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit bisnis atau pelaku ekonomi, termasuk sektor formal maupun informal. Pada pendekatan produksi, terdapat salah satu sektor yang berperan dalam meningkatkan sektor pariwisata yaitu sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang merupakan elemen penting dalam mendukung industri pariwisata, karena sektor ini secara langsung berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan selama mereka berada di suatu destinasi.

Grafik 2.3. 2

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Pada Grafik 2.3.3 kontribusi sektor pariwisata yang di gambarkan dengan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Serang masih relatif kecil berkisar 2-3 %. Diharapkan kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Serang akan semakin meningkat karena Kabupaten Serang merupakan daerah dengan banyak destinasi wisata mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata pantai, wista sejarah dan agro wisata.

2.3.2.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Berdasarkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa baik PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) seluruh sektor yang ada selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya. Walaupun secara umum seluruh sektor yang ada mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan Tabel dibawah ini, Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang, PDRB Kabupaten Serang selama periode 2020–2024 sebagian besar disumbang oleh sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 48,22%, disusul oleh sektor Konstruksi rata-rata sebesar 10,33%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,31%. Adapun untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan ke 4 (empat) dimana berkontribusi terhadap PDRB ADHK sebesar 8,73%.

Sektor dengan rata-rata kontribusi terendah terhadap PDRB ADHK terlihat pada beberapa sektor dengan kontribusi dibawah 1% terhadap PDRB ADHK pada tahun 2020-2024. Sektor jasa lainnya dengan capaian rata-rata sebesar 0,99% terhadap PDRB ADHK, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dengan capaian rata-rata sebesar 0,62% terhadap PDRB ADHK, sektor pengadaan

listrik dan gas dengan capaian rata-rata sebesar 0,45%, sektor jasa Perusahaan dengan capaian rata-rata sebesar 0,21% terhadap PDRB ADHK, sektor pertambangan dan penggalian dengan capaian rata-rata sebesar 0,10% terhadap PDRB ADHK, serta sektor pengadaan air dengan capaian rata-rata sebesar 0,04% terhadap PDRB ADHK.

Sektor pertanian menunjukkan kecenderungan stabil pada setiap tahunnya. Transformasi perekonomian dari primer ke sektor industri dan jasa menunjukkan peningkatan yang signifikan berdasarkan angka kontribusi PDRB tertinggi di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang sebagai salah satu lumbung berasnya Provinsi Banten, mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar (leading sector) dalam perekonomian Kabupaten Serang sehingga dapat dikatakan struktur ekonomi di Serang merupakan tipe agraris. Karena perekonomian Kabupaten Serang pada umumnya berbasis pada pertanian, maka pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan penting sehingga diharapkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 2.3. 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020–2024 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)

NO	Sektor PDRB	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4766,75	9,02	4837,85	8,82	5031,47	8,73	5028,39	8,33	5097,92	8,06
2	Pertambangan dan Penggalian	54,45	0,10	53,32	0,10	53,93	0,09	54,87	0,09	56,9	0,09
3	Industri Pengolahan	25291	47,84	26376,6	48,09	27708	48,10	29479,51	48,83	31145,08	49,24
4	Pengadaan Listrik, Gas	233,62	0,44	250,76	0,46	273,38	0,47	265,84	0,44	271,25	0,43
5	Pengadaan Air	20,93	0,04	21,72	0,04	21,84	0,04	22,95	0,04	24,26	0,04
6	Konstruksi	5338,03	10,10	5734,12	10,46	6064,97	10,53	6174,77	10,23	6475,64	10,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4981,56	9,42	5077,93	9,26	5363,14	9,31	5585,87	9,25	5743,69	9,08
8	Transportasi dan Pergudangan	2030,97	3,84	2143,98	3,91	2318,77	4,03	2433,09	4,03	2551,1	4,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1271,57	2,41	1319,19	2,41	1420,36	2,47	1537,26	2,55	1661,91	2,63
10	Informasi dan Komunikasi	714,41	1,35	748,71	1,37	794,38	1,38	856,5	1,42	895,24	1,42
11	Jasa Keuangan	1376,98	2,60	1438,05	2,62	1528,19	2,65	1519,04	2,52	1504,74	2,38
12	Real Estate	2972,99	5,62	3050,88	5,56	3220,82	5,59	3390,91	5,62	3523,1	5,57
13	Jasa Perusahaan	117,34	0,22	116,84	0,21	119,54	0,21	128,19	0,21	137,03	0,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1060,06	2,01	1061,02	1,93	1065,9	1,85	1086,64	1,80	1208,49	1,91
15	Jasa Pendidikan	1785,43	3,38	1732,63	3,16	1707,98	2,96	1810,42	3,00	1895,07	3,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323,21	0,61	347,45	0,63	356,07	0,62	384,29	0,64	420,38	0,66
17	Jasa lainnya	527,09	1,00	533,63	0,97	558,39	0,97	612,02	1,01	643,52	1,02
	PDRB	52866,4	100	54844,7	100	57607,1	100	60370,56	100	63255,33	100

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Selama periode 2020–2024, struktur PDRB menunjukkan pola yang relatif konsisten dengan dominasi sektor Industri Pengolahan. Sektor ini terus mengalami peningkatan baik secara nominal

maupun persentase, dari Rp25.291 miliar (47,84%) pada tahun 2020 menjadi Rp31.145 miliar (49,24%) pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa industri pengolahan menjadi motor utama perekonomian daerah, dengan tren penguatan kontribusi tiap tahunnya.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung stagnan secara nilai nominal, namun kontribusinya menurun dari 9,02% pada tahun 2020 menjadi 8,06% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Sektor Konstruksi cukup stabil dengan kontribusi sekitar 10%, sedikit meningkat secara nominal dari Rp5.338 miliar (2020) menjadi Rp6.475 miliar (2024). Sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bertahan di kisaran 9%, namun cenderung menurun tipis dari 9,42% (2020) menjadi 9,08% (2024).

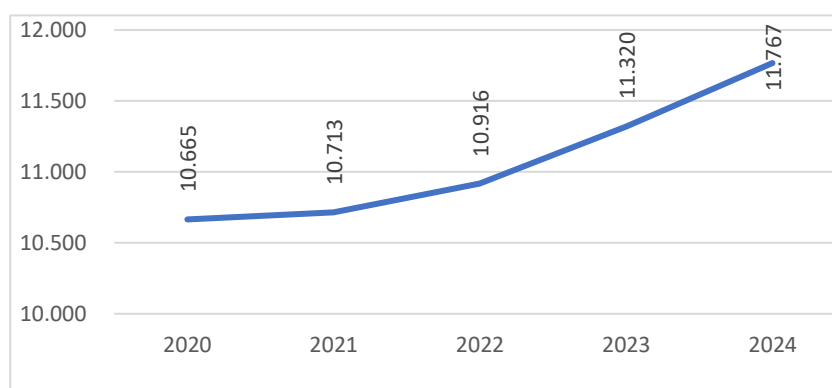
Sektor jasa menunjukkan perkembangan positif, terutama Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Transportasi meningkat kontribusinya dari 3,84% (2020) menjadi 4,03% (2024), sedangkan akomodasi naik dari 2,41% menjadi 2,63% pada periode yang sama. Kenaikan ini menggambarkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sektor lain seperti Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan relatif stabil dengan kontribusi kecil (1–3%), meskipun sektor kesehatan menunjukkan tren peningkatan seiring kesadaran masyarakat pasca pandemi. Sementara itu, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib cenderung stagnan di bawah 2%, dan Jasa Keuangan justru menurun kontribusinya dari 2,60% (2020) menjadi 2,38% (2024).

2.3.2.4. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi per kapita merupakan jumlah rata-rata pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun non-dasar. Indikator ini sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk, karena semakin besar pengeluaran per kapita umumnya mencerminkan meningkatnya daya beli serta kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan grafik, pengeluaran per kapita menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 nilai pengeluaran tercatat sebesar 10.665, meningkat menjadi 10.713 pada 2021 dan terus naik menjadi 10.916 pada 2022. Lonjakan lebih signifikan terlihat pada 2023 dengan nilai 11.320, hingga akhirnya mencapai 11.767 pada 2024. Kenaikan bertahap ini mencerminkan pertumbuhan kemampuan konsumsi masyarakat dan mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi selama periode tersebut.

Grafik 2.3. 3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2020-2024

2.3.2.5. Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Pengembangan Kewirausahaan daerah dilakukan dengan mengikuti norma tertentu, dengan menekankan pada penciptaan dan pengembangan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas untuk tiap fase Wirausaha. Setiap upaya untuk mengembangkan kewirausahaan harus mengikuti standar, prosedur, dan kriteria tertentu, sesuai dengan fase wirausaha. Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan salah satu fokus penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, UMKM dimasukkan dalam RPJMD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

UMKM merupakan sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Serang jumlah UMKM rata-rata per tahun tercatat sebanyak 47.789, dengan dominasi pada sektor perdagangan, makanan-minuman, kerajinan.

Tabel 2.3. 3
Jumlah UMKM di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Mikro	45.492	43.109	48.030	48.514	48.801
Kecil	4.568	0	17	17	17
Menengah	360	0	6	6	6
Total	50.420	43.109	48.053	48.537	48.824
Rata-Rata	47.789				

Sumber: Diskomperindag Tahun 2020-2024

Selanjutnya, program pengembangan UMKM difokuskan untuk menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kapasitas wirausaha, oleh karena itu sasaran program ditujukan untuk calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan, sesuai fase-fase wirausaha.

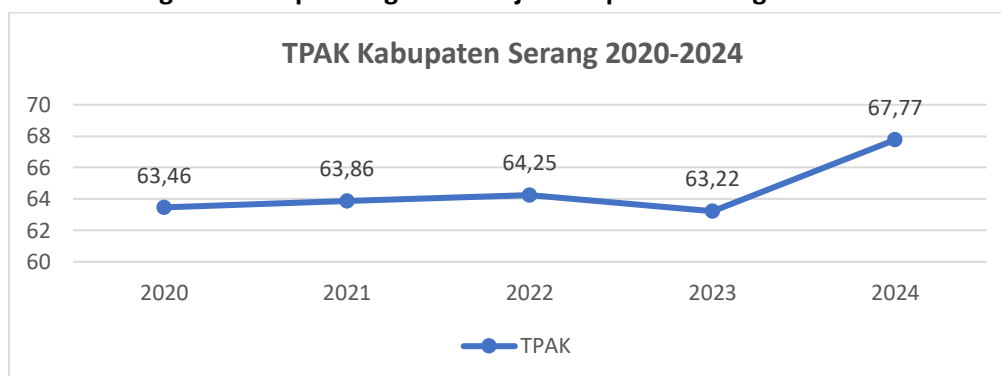
2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dari penduduk yang termasuk dalam pasar kerja yaitu yang bekerja atau yang mencari pekerjaan. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu umur, yang dimaksud umur menurut Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan penduduk yang tergolong dalam usia produktif yang dinyatakan dalam satuan jumlah atau angka. Umur tenaga kerja berkaitan langsung dengan kondisi fisik seseorang tenaga kerja dalam melakukan kegiatannya.

Grafik 2.3. 4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Serang 2020-2024



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas TPAK Kabupaten Serang periode 2020-2024, menunjukkan bahwa TPAK cenderung meningkat. Pada tahun 2020 TPAK mencapai 63,46%, hingga tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 67,77%. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka semakin tinggi pula angkatan kerja yang sama dalam satu kelompok. Begitu juga sebaliknya, jika semakin tinggi jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula jumlah yang termasuk ke dalam golongan yang bukan angkatan kerja, dan mengakibatkan kecilnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Meningkat atau menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan demografi. Faktor-faktor yang dianggap penting pengaruhnya yaitu upah, umur, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi nasional yang relatif membaik.

2.3.2.7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menciptakan dan menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah. Pemerintah daerah yang mengutamakan inovasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Tabel 2.3. 4

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat
Kab. Pandeglang	1,831	Sangat Inovatif	50,83	Inovatif	47,56	Inovatif	43,87	Inovatif	4,30	Inovatif
Kab. Lebak	1,390	Sangat Inovatif	46,46	Inovatif	53,88	Inovatif	45,22	Inovatif	45,50	Inovatif
Kab. Tangerang	2,274	Sangat Inovatif	41,16	Inovatif	54,70	Inovatif	61,49	Sangat Inovatif	63,15	Sangat Inovatif
Kab. Serang	1,839	Sangat Inovatif	35,77	Inovatif	41,44	Inovatif	42,74	Inovatif	36,90	Inovatif
Kota Tangerang	10,762	Sangat Inovatif	62,7	Sangat Inovatif	53,23	Inovatif	60,39	Sangat Inovatif	65,50	Sangat Inovatif

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat
Kota Cilegon	340	Kurang Inovatif	17,16	Kurang Inovatif	37,06	Inovatif	39,42	Inovatif	42,49	Inovatif
Kota Serang	232	Kurang Inovatif	49,71	Inovatif	60,56	Sangat Inovatif	54,03	Inovatif	57,12	Inovatif
Kota Tangerang Selatan	3,793	Sangat Inovatif	51,66	Inovatif	59,88	Inovatif	60,15	Sangat Inovatif	50,45	Inovatif
Provinsi Banten	8,191	Sangat Inovatif	60,52	Sangat Inovatif	50,41	Inovatif	56,92	Inovatif	45,57	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinis, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Serang pada tahun 2020 mencapai skor 1,839, yang dikategorikan sebagai "Inovatif". Pada tahun berikutnya, Kementerian Dalam Negeri melakukan penyesuaian metode penilaian IID yang mempengaruhi hasil skor dan predikat pada tiap daerah. Pada tahun 2021 hingga 2024, IID Kabupaten Serang mengalami hasil yang fluktuatif namun stagnan pada predikat "inovatif" dengan perolehan nilai indeks inovasi sebesar 35,77 (2021), 41,44 (2022), 42,74 (2023), dan 36,90 (2024).

Jika dibandingkan dengan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, IID Kabupaten Serang masih relatif rendah bahkan belum mencapai kembali daerah dengan predikat sangat inovatif semenjak tahun 2020, bahkan IID Kabupaten serang memiliki skor yang relatif lebih rendah dari skor IID Provinsi Banten. Pemerintah Kabupaten Serang perlu untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam hal bagaimana inovasi tercipta dan terimplementasi dengan baik serta segala administrasi yang mendukung penguatan inovasi dalam lingkup internal Pemerintah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Transformasi Ekonomi Indonesia menjadikan Ekonomi Hijau sebagai game-changer dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan mendorong Indonesia lepas dari Middle-Income Trap sebelum 2045. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Selain meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek, ekonomi hijau juga melindungi kesejahteraan untuk jangka yang lebih panjang.

Sasaran ekonomi hijau salah satunya yaitu peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar lingkungan memiliki indeks komposit terendah, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya persentase sampah terkelola di Kabupaten Serang, hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan lingkungan yang lebih tepat untuk mewujudkan ekonomi hijau. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) penyaluran sampah yang banyak ditemui terdiri dari proses pengumpulan sampah dari permukiman atau sumber sampah lain, pengangkutan sampah untuk dibuang di tempat penampungan sementara (TPS), dan proses terakhir yaitu pembuangan di tempat pemrosesan akhir. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat

dari beberapa faktor yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan pelayanan masih rendah, TPA yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.

Tabel 2.3. 5
Presentase Sampah Terangkut Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Sampah Terangkut	107.552,93	106.674,50	92.758,6	412.409,30	452.266,88
Total Timbunan Sampah	N/A	378.903	378.903	311.174,22	448.866,49
Persentase Penanganan Sampah	11,53	12,51	10,88	33,86	31,35
Persentase Pengurangan Sampah	27,51	3,05	3,82	1,01	12,66
Persentase Cakupan Penanganan Sampah	39,04	15,56	14,7	34,87	44,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Serang, 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa presentase sampah terangkut di Kabupaten Serang sangat kecil dikarenakan kurangnya armada pengangkut sampah, manajemen sampah yang belum memadai, hal itu tercermin dari presentase sampah terangkut yang rata-rata hanya sebesar 30,12%. Tetapi pemerintah Kabupaten Serang dalam hal penanganan sampah telah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri oleh masing-masing kecamatan. Saat ini sudah ada 15 kecamatan yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara mandiri. Hal itu diharapkan dapat meningkat presentase pengelolaan sampah di Kabupaten Serang.

2.3.3.2. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Tabel 2.3. 6 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Banten Tahun 2017 – 2021

KABUPATEN/ KOTA	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Pandeglang	4,96	4,97	5,07	4,95	5,20
Kab. Lebak	5,06	5,04	5,20	5,01	5,31
Kab. Tangerang	5,50	5,61	5,65	5,55	5,73
Kab. Serang	5,03	5,10	5,23	5,08	5,46
Kota Tangerang	5,60	5,81	5,80	5,71	6,01
Kota Cilegon	5,85	5,90	6,05	5,86	6,03
Kota Serang	5,24	5,26	5,55	5,41	5,52
Kota Tangerang Selatan	5,41	5,48	5,53	5,26	5,52
Provinsi Banten	5,59	5,60	5,95	5,48	6,09

Sumber: Bappenas, 2023

Berdasarkan tabel diatas, kualitas Pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang cenderung meningkat pada periode tahun 2017-2021. Secara rata-rata, nilai indeks tumbuh sebesar 1,59% per tahun. Pada tahun 2021, Kabupaten Serang termasuk dalam kategori memuaskan dengan perolehan indeks sebesar 5,46. Namun nilai indeks tersebut masih lebih kecil dibandingkan nilai indeks provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang menyebabkan Kabupaten Serang berada pada peringkat ke-3 terbawah (lebih tinggi dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Salah satu pilar pendukung inklusifitas ekonomi di Kabupaten Serang yaitu perluasan akses dan kesempatan masyarakat dalam kegiatan perekonomian seperti kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1. Indeks Masyarakat Digital

Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI pertama dilakukan pada tahun 2022 dengan bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) disusun berdasarkan 4 (empat) pilar infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3. 7
Pilar dan Sub Pilar dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

No.	Pilar	Sub Pilar
1.	Infrastruktur dan Ekosistem	a. Akses dan Adopsi Teknologi Digital b. Ekosistem Pembelajaran c. Digitalisasi Pemerintah
2.	Keterampilan Digital	a. Komplementaritas b. Pengenalan TIK c. Keamanan TIK
3.	Pemberdayaan	a. Pengguna atau Konsumen b. Penyedia atau Penjual
4.	Pekerjaan	a. Kebutuhan Tenaga Kerja Bidang Digital (<i>Demand</i>) b. Ketersediaan Tenaga Kerja Bidang Digital (<i>Supply</i>)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Hasil pengukuran IMDI kabupaten dan kota di Provinsi Banten dapat kita lihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.3. 8 Hasil Pengukuran IMDI Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

Nilai/Skor	2022			2023			2024		
	Nasional	Banten	Kab. Serang	Nasional	Banten	Kab. Serang	Nasional	Banten	Kab. Serang
IMDI	37,80	44,38	35,88	43,18	44,30	41,17	43,34	45,70	43,43
Infrastruktur dan Ekosistem	44,24	40,89	36,82	57,09	61,78	60,05	52,70	61,37	60,79
Keterampilan Digital	49,35	60,58	41,05	56,59	55,92	50,55	58,25	57,02	52,78
Pemberdayaan	22,06	26,46	20,61	26,19	27,18	23,81	25,66	28,64	26,22
Pekerjaan	40,35	49,47	45,62	32,14	31,15	30,18	38,09	35,69	34,54
Nilai IMDI Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten									
Kab/ Kota	2022			2023			2024		
Kota Cilegon	48,29			47,85			45,68		
Kota Serang	40,70			44,42			45,33		
Kota Tangerang	41,15			45			43,81		
Kota Tangerang Selatan	48,47			46,93			49,82		
Lebak	49,54			40			45,17		
Pandeglang	43,14			40			45,17		
Serang	35,88			41,17			43,43		
Tangerang	46,15			44,87			43,46		

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

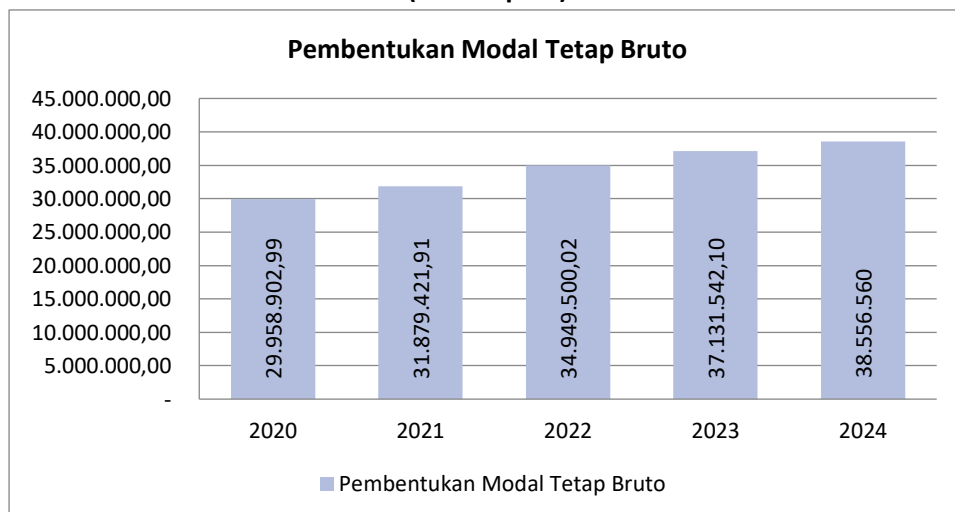
Hasil pengukuran IMDI ini tidak ditujukan untuk membandingkan daya saing masyarakat digital antar daerah, melainkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antarpemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1. Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran berupa barang modal yang usia penggunaannya diatas satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi yang meliputi gedung, mesin serta perlengkapan, peralatan lainnya. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu cara dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Dalam jangka panjang PMTB mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.3. 5 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2023
(Juta Rupiah)



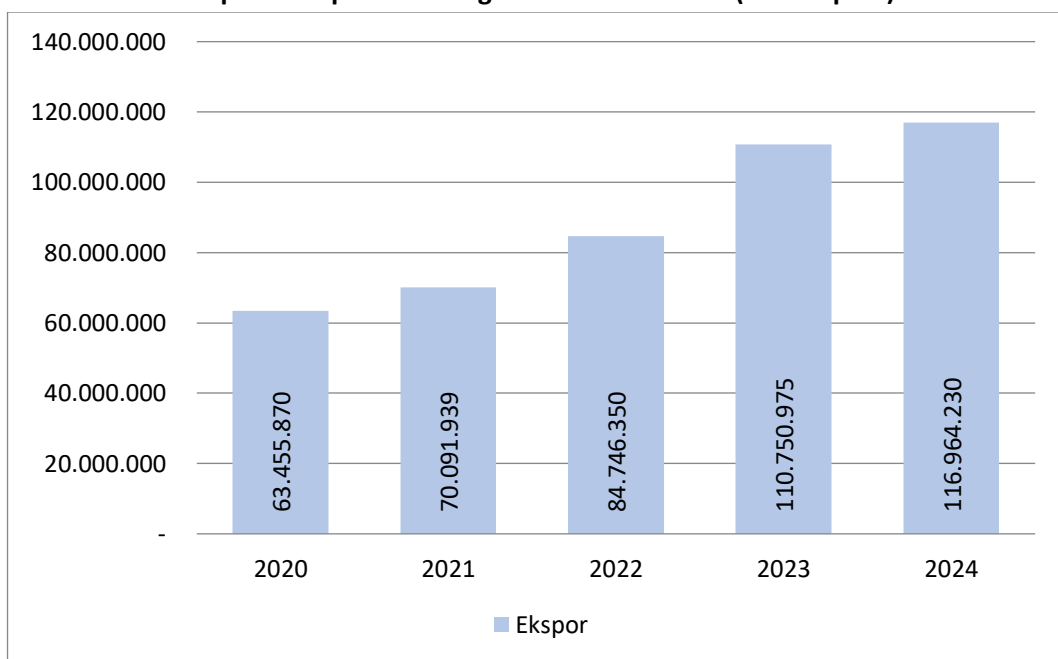
Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

PMBT di Kabupaten Serang cenderung meningkat setiap tahunnya yang menandakan adanya investasi fisik, pada tahun 2020 modal tetap bruto di Kabupaten Serang mencapai 29,95 triliun, dan pada tahun 2023 mencapai 37,13 triliun dan naik pada tahun 2024 menjadi sebesar 38,5 triliun. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan ini bertujuan untuk menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan investasi fisik yang direalisasikan pada bangunan maupun alat-alat transportasi. Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Maka, dengan meningkatnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serang.

2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Ekspor ialah barang & jasa yg dibuat disuatu wilayah dan dijual dinegara lain.

Grafik 2.3. 6
Ekspor Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020-2024

Ekspor di Kabupaten Serang meningkat setiap tahunnya yang menandakan tumbuhnya permintaan dalam negeri yang menyebabkan lahirnya industri-industri besar di Kabupaten Serang, pada tahun 2020 nilai ekspor mencapai 63,45 triliun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 116,96 triliun. Ekspor akan memberikan efek yang positif ke terhadap perekonomian di Kabupaten Serang. Peningkatan ekspor dilakukan oleh pemerintah dengan cara menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga.

Tabel 2.3. 9
Negara Tujuan Ekspor dan Import Kabupaten Serang

NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN
1	CHINA	11	JAPAN	21	SWITZERLAND	31	GREECE	41	SOUTH AFRICA	51	SOUTH AFRICA
2	BELGIUM	12	ITALY	22	TURKEY	32	SWEDEN	42	RUSSIAN FEDERATION	52	RUSSIAN FEDERATION
3	UNITED STATES OF AMERICA	13	DENMARK	23	POLAND	33	BULGARIA	43	AUSTRIA	53	AUSTRIA
4	INDIA	14	FRANCE	24	CAMBODIA	34	ROMANIA	44	EGYPT	54	EGYPT
5	NETHERLANDS	15	PHILIPPINES	25	PAKISTAN	35	IRELAND	45	NORWAY	55	NORWAY
6	GERMANY	16	SPAIN	26	HONDURAS	36	SRI LANKA	46	LATVIA	56	LATVIA
7	VIET NAM	17	BANGLADESH	27	UNITED KINGDOM	37	PERU	47	PORTUGAL	57	PORTUGAL
8	MALAYSIA	18	JORDAN	28	TAIWAN	38	SINGAPORE	48	CHILE	58	CHILE
9	REPUBLIC OF KOREA	19	BRAZIL	29	COSTA RICA	39	CZECH REPUBLIC	49	MYANMAR	59	MYANMAR
10	THAILAND	20	AUSTRALIA	30	UNITED ARAB EMIRATE	40	TANZANIA	50	MEXICO	60	MEXICO

Sumber: Diskoumperindag Kabupaten Serang, 2025

Pada tabel diatas menunjukan negara tujuan ekspor dari setiap industri yang ada di Kabupaten Serang, seperti produk alas kaki, sparepart otomotif, tekstil, furniture, makanan, dll. China merupakan negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor terbesar disusul oleh Belgia dan Amerika.

Tabel 2.3. 10 Volume Neraca Ekspor dan Impor beserta Negara Tujuan

Negara	2022		2023		2024		2025	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
ANGOLA	0	0.00	0	0.00	4	1,362,952.70	7	1,502,235.43
ARGENTINA	0	0.00	3	119,638.31	5	231,102.99	4	438,028.92
AUSTRALIA	22	697,835.48	154	4,070,494.90	101	2,562,714.98	74	1,993,300.48
BANGLADESH	0	0.00	87	3,993,542.91	63	2,613,128.09	33	1,262,878.23
BELARUS	0	0.00	0	0.00	1	902.16	0	0.00
BELGIUM	0	0.00	12	323,894.21	2	16,039.28	9	641,761.01
BENIN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18,112.30
BOLIVIA	0	0.00	0	0.00	1	25,595.30	0	0.00
BOSNIA AND HERZEGOVINA	0	0.00	1	30,486.36	1	22,855.38	0	0.00
BRAZIL	0	0.00	74	4,015,577.05	150	9,520,700.45	154	9,156,278.85
CAMBODIA	0	0.00	61	1,160,529.99	128	2,245,468.20	86	1,651,241.15
CAMEROON	0	0.00	1	17,988.07	0	0.00	0	0.00
CANADA	0	0.00	0	0.00	8	285,462.12	2	281,394.37
CHILE	0	0.00	5	175,288.91	11	452,781.50	9	236,581.85
CHINA	0	0.00	180	254,411,424.36	181	205,264,008.69	239	137,100,181.46
COLOMBIA	0	0.00	2	45,026.42	4	586,245.19	0	0.00
COSTA RICA	0	0.00	9	527,152.40	15	734,861.85	10	615,264.08
CROATIA	0	0.00	1	29,055.62	0	0.00	0	0.00
CZECH REPUBLIC	0	0.00	2	77,414.40	0	0.00	0	0.00
EGYPT	0	0.00	2	209,394.25	82	6,017,241.26	34	2,930,456.35
EL SALVADOR	0	0.00	0	0.00	1	20,939.52	1	54,508.80
FINLAND	0	0.00	2	265,910.40	18	2,696,344.55	24	4,575,059.18
FRENCH POLYNESIA	0	0.00	0	0.00	1	22,473.20	0	0.00
GERMANY	0	0.00	1	44,044.00	1	23,187.17	2	157.45
GHANA	0	0.00	6	1,358,150.40	8	1,281,038.40	15	2,493,424.00
GREECE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10,473.05
GUINEA	0	0.00	0	0.00	1	24,000.00	3	88,000.00
HONDURAS	0	0.00	26	1,182,793.15	32	1,354,078.57	35	1,711,047.82
HONG KONG	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,128.32
INDIA	103	3,574,590.96	1280	54,835,874.60	1662	87,603,420.41	1499	64,754,782.98

Negara	2022		2023		2024		2025	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	0	0.00	0	0.00	1	180,387.00	0	0.00
ISRAEL	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9,545.07
JAPAN	0	0.00	213	17,005,907.60	264	16,189,971.89	219	17,673,802.39
JORDAN	0	0.00	47	4,409,516.98	12	715,135.36	0	0.00
KAZAKSTAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	13,719.96
KENYA	0	0.00	3	319,483.87	54	6,847,592.62	52	5,476,156.00
KUWAIT	0	0.00	0	0.00	1	9,090.00	0	0.00
LITHUANIA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23,339.12
MACAU	0	0.00	1	64,855.52	0	0.00	0	0.00
MADAGASCAR	0	0.00	0	0.00	1	15,300.00	1	13,725.00
MALAYSIA	20	632,523.40	420	19,131,571.45	482	21,120,787.69	334	13,888,175.08
MAURITIUS	0	0.00	0	0.00	1	22,079.79	1	6,963.61
MEXICO	0	0.00	5	257,033.32	2	51,052.66	4	21,730.48
MONGOLIA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	6,623.75
MOROCCO	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	228,041.97
MOZAMBIQUE	0	0.00	0	0.00	2	91,079.27	14	739,656.44
MYANMAR	0	0.00	3	166,330.75	1	92,400.00	0	0.00
NEPAL	0	0.00	0	0.00	1	48,196.91	5	267,188.06
NEW CALEDONIA	0	0.00	1	18,435.47	0	0.00	0	0.00
NEW ZEALAND	0	0.00	2	36,387.72	2	14,671.29	3	71,294.78
NIGERIA	0	0.00	1	122,400.00	2	106,189.15	8	1,045,042.82
OMAN	0	0.00	1	13,480.27	4	499,626.70	0	0.00
PAKISTAN	3	94,796.80	45	2,940,151.75	45	4,250,732.84	39	3,321,527.16
PANAMA	0	0.00	1	119,980.50	0	0.00	1	3,784.51
PARAGUAY	0	0.00	0	0.00	1	34,661.89	1	2,128.32
PERU	0	0.00	6	411,751.72	3	108,100.00	1	72,680.00
PHILIPPINES	7	192,277.20	140	8,840,281.88	128	6,175,784.31	133	5,862,418.02
PORTUGAL	0	0.00	1	35,844.00	0	0.00	1	34,820.50
REPUBLIC OF KOREA	51	2,430,838.60	287	11,039,759.92	393	15,692,334.56	209	62,396,910.31
ROMANIA	0	0.00	0	0.00	2	307,027.92	5	956,678.68
RUSSIAN FEDERATION	0	0.00	4	161,259.20	3	53,677.45	4	71,765.97
SAUDI ARABIA	0	0.00	2	98,496.00	1	33,696.00	1	64,646.51
SENEGAL	0	0.00	2	183,600.00	1	32,005.87	2	269,521.44
SINGAPORE	3	34,050.41	21	395,206.60	26	582,123.30	14	255,477.89
SOUTH AFRICA	0	0.00	4	242,237.52	26	1,816,148.57	50	3,733,781.29
SPAIN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67,073.52
SRI LANKA	0	0.00	30	416,762.12	36	830,811.02	23	933,376.54
SUDAN	0	0.00	1	30,466.56	0	0.00	0	0.00
TAIWAN	0	0.00	5	65,579.20	8	261,913.69	2	45,038.51
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	0	0.00	5	250,610.91	4	345,204.04	16	1,309,759.39
THAILAND	31	2,471,006.44	345	18,189,407.08	380	23,792,964.83	309	15,904,429.71
TOGO	0	0.00	0	0.00	4	204,294.80	1	71,966.57
TUNISIA	0	0.00	4	35,237.70	3	41,182.00	7	68,228.00
TURKEY	0	0.00	41	3,729,814.95	28	2,839,049.20	32	2,107,998.65
UGANDA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	142,965.83
UKRAINE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	62,920.00
UNITED ARAB EMIRATES	0	0.00	55	2,046,375.70	70	4,153,624.01	44	2,855,170.88
UNITED KINGDOM	0	0.00	43	1,221,808.72	26	678,551.21	15	396,999.26
UNITED STATES OF AMERICA	0	0.00	404	32,238,110.33	538	47,898,776.46	352	25,063,096.39
URUGUAY	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3,574.56
VIET NAM	25	732,485.88	369	15,164,719.49	444	33,815,454.69	365	16,583,600.70
YEMEN	0	0.00	1	12,960.00	11	2,246,048.25	19	3,853,059.65
ZAMBIA	0	0.00	0	0.00	3	566,086.40	2	196,032.00
TOTAL	265	10,860,405.17	4422	466,309,505.51	5495	517,731,355.61	4547	417,713,731.37

Sumber: Diskoumperindag Kabupaten Serang, 2025

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1. Indeks Infrastruktur (Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan)

Ketersediaan jalan sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan dapat mempermudah akses dan konektivitas antarwilayah maupun antardaerah. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan ekonomi, jalan sebagai salah satu indikator infrastruktur dapat pula mendorong kemajuan sosial suatu daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kendaraan dan data panjang jalan di Kabupaten Serang, untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut.

Tabel 2.3. 11
Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Serang

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Beton	513,98	584,12	793,34	805,32	885,34
2	Aspal	61,7	11,35	81,96	75,5	55,16
3	Kerikil	34,65	5,66	144,04	118,85	59,17
4	Tanah	0	0	0	4,72	4,72
Jumlah		601,13	610,33	1019,34	1004,39	1.004,39

Sumber: Data Kondisi DD1 Tahunan Bidang Bina Marga DPUPR dan SK Bupati Kabupaten Serang

Tabel di atas menunjukkan jenis-jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Serang, terdiri dari: aspal, kerikil, tanah, dan beton. Jenis dan panjang jalan yang dimiliki suatu daerah penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut. Berbekal logika itulah maka dapat dihitung panjang jalan yang ada di Kabupaten Serang yang mencapai 601,13 km pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 610,33 km.

Sementara itu, pada tahun 2020 ke tahun 2022 terjadi perubahan dan jenis permukaan jalan antara aspal yang turun dan beralih pada jenis perkerasan beton. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa sebagian besar jalan diubah ke jenis permukaan beton dengan meningkatnya jumlah panjang jalan dengan permukaan beton di setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi perubahan jenis permukaan jalan antara aspal yang turun dan beralih pada jenis perkerasan beton. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa sebagian besar jalan diubah ke jenis permukaan beton dengan meningkatnya jumlah panjang jalan dengan permukaan beton pada tahun 2023 menjadi 805,32 km dari sebelumnya sebanyak 793,34 km pada tahun 2022. Dan sampai pada tahun 2024, panjang jalan dengan jenis permukaan beton di Kabupaten Serang mencapai 885,34 km.

Tabel 2.3. 12
Jumlah Kendaraan Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan (unit)			
		2020	2021	2022	2023
1	Mobil Penumpang	95.261	96.441	96.524	96.856
2	Bus	18.224	16.231	15.625	15.710
3	Truck	53.884	50.774	54.821	55.265
4	Sepeda Motor	2.416.614	2.624.758	2.646.924	2.712.875
Jumlah		2.583.983	2.788.204	2.813.894	2.880.706

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, 2025 ‘

Selanjutnya, terdapat perubahan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Serang. Terlihat jika jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada tahun 2020-2023 mengalami kenaikan, dari sejumlah 2.583.983 unit pada tahun 2020 menjadi 2.880.706 unit pada 2023. Dengan demikian, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada kurun waktu 2020-2023 berkisar antara 0,00025 hingga 0,00035.

Artinya, setiap kendaraan di Kabupaten Serang akan memakan ruang jalan sebesar 0,00025 - 0,00035 kilometer. Atau dengan kata lain pada tahun 2023, setiap 1 km panjang jalan melayani sebanyak 2.869 kendaraan bermotor yang terdiri dari 97 mobil penumpang, 16 unit bus, 56 truk, dan 2701 motor. Kabupaten Serang melalui dokumen LKPJ Bupati tahun 2020-2024 juga melaporkan hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah fokus infrastruktur yang terkait dengan rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan. Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten Serang antara lain adalah peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan dan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan. Informasi mengenai pencapaian pemerintah daerah terkait urusan tersebut disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. 13
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Serang Tahun 2020– 2024

No	Kondisi Permukaan Jalan	Panjang jalan (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	513,31	576,55	773.86	587,89	676,18
2	Sedang	28,25	9,00	48.92	5,88	5,88
3	Rusak	48,12	8,72	75.92	285,17	258,46
4	Rusak Berat	20,65	6,86	120.64	125,45	63,87
Jumlah		601,13	610,33	1.019,34	1.004,39	1.004,39

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Serang, 2025

Di dalam tabel tersebut, jumlah panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang pada tahun 2021 sepanjang 610,33 km. Kemudian terdapat peningkatan status jalan desa sepanjang 418,01 km yang menjadi jalan Kabupaten Serang sehingga pada Tahun 2022 total jalan Kabupaten sepanjang 1.019,34 km. Ditunjukkan jika persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2022, namun mengalami penurunan di tahun 2022-2023 dikarenakan adanya peningkatan status jalan desa menjadi kewenangan kabupaten. Dan persentase kondisi permukaan jalan dalam kondisi baik kembali meningkat di tahun 2024.

Pada tahun 2023, tingkat kondisi jalan baik mengalami penurunan yang cukup signifikan

sepanjang 587,89 km dibandingkan tahun 2022 sepanjang 773,86 km, dan kondisi jalan sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang 5,88 km dibandingkan tahun 2022 sepanjang 48,92. Sementara itu kondisi jalan rusak dan rusak berat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tingkat kondisi jalan rusak sepanjang 285,17 km dibandingkan tahun 2022 sepanjang 75,92 km, dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 125,45 km dibandingkan tahun 2022 sepanjang 120,64 km.

Pada tahun 2024, Kabupaten Serang Kembali dapat meningkatkan persentase Panjang jalan dalam kondisi baik dari 587,89 km menjadi 676,18 km. Persentase jalan dalam kondisi baik tersebut berturut-turut mencapai 85,39% (2020), 94,47% (2021), 75,92% (2022), 58,53% (2023), dan 67,32% (2024).

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, terdapat beberapa indikator yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk dicapai. Pada tahun 2020-2024, terdapat empat (4) unit terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Adapun indikator ketersediaan pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dengan jumlah empat (4) unit pelabuhan dari tahun 2020-2024.

2.3.6.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja layanan infrastruktur adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Prioritas Kabupaten Serang tahun 2024 sebesar 2,62 setara dengan 65,62 dengan kriteria cukup puas. Secara terperinci nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Prioritas Kabupaten Serang tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur pada layanan infrastruktur jalan raya (jalan kewenangan pemerintah Kabupaten Serang) bernilai 3,09 setara dengan 77,15 dengan kriteria sangat puas.
- b. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Prioritas pada layanan infrastruktur jembatan (jembatan kewenangan pemerintah Kabupaten Serang) bernilai 2,72 setara dengan 68,12, termasuk pada kriteria cukup puas.
- c. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Prioritas pada layanan infrastruktur transportasi darat (kewenangan pemerintah Kabupaten Serang) bernilai 2,26 setara dengan 56,49 termasuk pada kriteria cukup puas.
- d. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Prioritas pada layanan infrastruktur air bersih (kewenangan pemerintah Kabupaten Serang) bernilai 2,67 setara dengan 66,76 termasuk pada kriteria cukup puas.
- e. Capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur pada layanan perumahan/permukiman (kewenangan pemerintah Kabupaten Serang) bernilai 2,38 setara dengan 59,61 termasuk pada kriteria cukup puas.

Pada tahun 2023, Kabupaten Serang memperoleh nilai IKLI sebesar 78,54 dengan predikat layanan berkategori baik (B). Hasil tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 meskipun secara nilai kepuasan masyarakat menunjukkan kepuasan yang positif dari segi kinerja layanan infrastruktur, penurunan nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Serang pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

kurangnya pemeliharaan, serta dampak bencana alam yang merusak fasilitas. Namun capaian tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dimana yang ditargetkan sebesar 55% pada tahun 2023 atau meningkat 142,8%.

2.3.6.3. Fasilitas Perlengkapan Jalan, Ketersediaan PJU dan lainnya

Sebagai kota yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat serta sebagai kota perdagangan dan jasa, jaringan transportasi, Kabupaten Serang memiliki peran yang strategis dalam mendukung pergerakan regional (antar kota) dan dalam kota. Kabupaten Serang memiliki 5 (lima) stasiun Kereta Api yang melayani pergerakan komuter penduduk dari dan ke Jakarta, yaitu :

1. Stasiun Jambu Baru terletak di Kecamatan Tunjung Teja;
2. Stasiun Catang terletak Kecamatan Tunjung Teja;
3. Stasiun Cikeusal terletak di Kecamatan Cikeusal;
4. Stasiun Tonjong Baru terletak di Kecamatan Kramatwatu.

Selain stasiun, Kabupaten Serang juga memiliki terminal penumpang sebagai simpul transportasi darat, yaitu Terminal Tipe C di Kecamatan Anyer, Tanara, Cikande Permai dan Tunjung Teja. Ketersediaan fasilitas Terminal Tipe C disajikan dalam tabel di bawah ini, dimana terlihat bahwa pemenuhan standar ketersediaan fasilitas Terminal Tipe C baru sebesar 50%.

Tabel 2.3. 14
Ketersediaan Standar Fasilitas Terminal Tipe C di Kabupaten Serang

No	Fasilitas Yang Tersedia	Ada	Tidak
1	Jalur Keberangkatan umum	√	
2	Jalur kedatangan kendaraan	√	
3	Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan penjemput	√	
4	Tempat parkir kendaraan	√	
5	Fasilitas pengolahan lingkungan hidup		√
6	Perlengkapan jalan	√	
7	Fasilitas pengolahan teknologi	√	
8	Media informasi	√	
9	Penanganan pengemudi		√
10	Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus		√
11	Fasilitas pengawasan penumpang	√	
12	Ruang tunggu keberangkatan	√	
13	Jalur kedatangan penumpang	√	
14	Ruang pembelian tiket		√
15	Ruang pembelian tiket bersama		√
16	Outlet pembelian tiket secara online		√
17	Pusat informasi		√
18	Papan perambuan dalam terminal	√	
19	Papan pengumuman		√
20	Layanan Bagasi		√
21	Ruang penitipan barang		√
22	Tempat berkumpul darurat		√
23	Jalur evakuasi bencana dan terminal		√

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2024

Tabel 2.3. 15
Jumlah Terminal di Kabupaten Serang

Kecamatan	Nama Terminal	Titik koordinat	Luas Terminal
Tunjung Teja	Tunjung Teja	6.282288, 102345633	± 3000 M ²
Cikande	Cikande	42186 -621896. 106.346035	± 900 M ²
Tanara	Tanara	-6.030841° , 106.378408	± 12000 M ²
Anyar	Anyar	-6.054642'105.929501	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2024

a) Terminal Tunjung Teja

Terminal Tunjung Teja beralamatkan di Jl. Raya Petir Serang Ds, Tunjung Pertelon, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten 42174, dengan titik koordinat 6.282288, 102345633, dengan luas ± 3000 M².

Kendaraan yang masuk Terminal Tunjung Teja antara lain angkutan perdesaan dan bus perintis.

b) Terminal Cikande

Terminal Cikande berada di dalam perumahan beralamatkan di Jl. Perum Cikande Permai No. i 7, Situterate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan titik koordinat 42186 -621896. 106.346035, dengan luas terminal ± 900 M².

c) Terminal Tanara

Terminal Tanara beralamatkan di Jl. Syekh Nawawi, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten 42194, dengan titik koordinat -6.030841°, 106.378408 dengan luas terminal ± 12000 M².

d) Terminal Anyar

Terminal Anyar beralamatkan di Jl. Raya Pasar Baru Anyar Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, dengan titik koordinat -6.054642' 105.929501. Terminal Anyar memiliki 2 lintasan untuk kendaraan parkir dan kendaraan yang melintas. Dalam hal mendukung keselamatan perhubungan, Kabupaten Serang telah memiliki prasarana dan sarana pengujian laik kendaraan. Data jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji KIR di Kabupaten Serang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. 16
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Kendaraan Uji Pengujian Bermotor Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

NO.	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	JUMLAH KENDARAAN YANG DIUJI		
			Rata-Rata per Hari	Rata-Rata per Bulan	Akumulasi 1 Tahun
1	2020	7935 Unit	28 Unit	856 Unit	10274 Unit
2	2021	8202 Unit	28 Unit	866 Unit	10398 Unit
3	2022	8475 Unit	36 Unit	1094 Unit	13136 Unit
4	2023	11651 Unit	29 Unit	862 Unit	10345 Unit
5	2024	11955 Unit	25 Unit	768 Unit	9227 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2024

Tabel 2.3. 17
Jumlah Moda Angkutan Umum Menurut Jenis di Kabupaten Serang

Jenis	Jumlah
Bus	-
Angkutan Kota Roda 2	-
Angkutan Kota Roda 4	58
Taksi	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2024

Fasilitas perlengkapan berfungsi untuk memberikan informasi tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan guna mendukung keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 25 disebutkan bahwa fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan (PJU), fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

Tabel 2.3. 18
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

No.	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	RPPJ	12	16	13	10	10	buah
2	Rambu standar	128	128	36	-	-	buah
3	Marka Jalan	2249	61038	4516	5005	2386	m'
4	Alat Penerangan Jalan (PJU)	-	770	287	424	230	titik
5	Delineator (Patok tikungan)	-	370	-	69	87	buah
6	Safety mirror (Cermin Tikung)	-	8	-	-	10	buah
7	Guardrail (Pagar pengaman jalan)	-	-	-	-	60	m'
8	Warning Light (Lampu Peringatan)	-	2	-	-	6	buah

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2024

2.3.6.4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

A. Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Bupati Kabupaten Serang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi acuan dalam penanganan permukiman kumuh, merinci kondisi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagai bagian dari verifikasi kawasan kumuh secara nasional. Setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk melakukan peninjauan kembali untuk diverifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di masing-masing provinsi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data SK hasil peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SK tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh yang efektif dan relevan dengan kondisi terkini.

Penanganan permukiman kumuh memerlukan kolaborasi antara berbagai instansi. Pembagian kewenangan dalam penanganan kumuh terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan dukungan finansial, sedangkan provinsi berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator dalam implementasi kebijakan tersebut. Di tingkat kabupaten/kota, penanganan langsung dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan instansi terkait. Terdapat data Pembagian Kewenangan Kawasan Kumuh sesuai SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2024, sebagai berikut

1. Kewenangan Kabupaten: 626,01 ha (136 Desa, 178 Kampung, 351 RT)
2. Kewenangan Provinsi: 252,75 ha (21 Desa, 43 Kampung, 139 RT)
3. Kewenangan Pusat: 235,16 ha (13 Desa, 42 Kampung, 112 RT)

Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Serang selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi. Berikut adalah rincian data serta analisis sebab dan akibat dari perubahan yang terjadi.

Tabel 2.3. 19 Luasan Kumuh Kabupaten Serang per-Kecamatan tahun 2020-2024

URUTAN	KECAMATAN	LUASAN		
		2020	2022	2024
1	ANYER	3.2	149.5	121.87
2	BANDUNG	4.7	53.8	114.10
3	BAROS	2.8	176.6	80.76
4	BINUANG	14.6	22.1	65.32
5	BOJONEGARA	1.4	54.7	57.54
6	CARENANG	15.7	82.9	56.87
7	CIKANDE	13.6	143.3	55.26
8	CIKEUSAL	2.25	87.9	51.34
9	CINANGKA	9.6	207.6	47.48
10	CIOMAS	8.1	36	45.48
11	CIRUAS	34.55	65.45	43.96
12	GUNUNGSARI	3.2	81.4	42.10
13	JAWILAN	11.2	36	36.34
14	KIBIN	1.17	39.1	34.38
15	KOPO	1.5	59.5	33.08
16	KRAGILAN	41.9	56.9	32.14
17	KRAMATWATU	12.09	107.9	26.79
18	LEBAKWANGI	4.5	80.3	25.96
19	MANCAK	5	6.9	22.96
20	PABUARAN	1.6	38.7	18.29
21	PADARINCANG	7.6	26	16.58
22	PAMARAYAN	17.8	54.1	13.51
23	PETIR	4.2	73.5	13.24
24	PONTANG	36.7	152.4	12.87
25	PULO AMPEL	5.3	43.2	12.45
26	TANARA	4	135.7	12.08
27	TIRTAYASA	0.1	147.5	11.81
28	TUNJUNG TEJA	5.63	168	6.04
29	WARINGIN KURUNG	13.2	103.5	3.31
TOTAL		287.19	2.490.45	1.113,92

Sumber: Dinas PRKP, 2024

Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 845/KEP.113-HUK.DPKPTB/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang, luas kawasan kumuh mencapai total 287,19 Ha. Kawasan ini tersebar di 65 desa yang berada di 29 kecamatan. Pada tahun 2022, dilakukan pemutakhiran data Kawasan kumuh, kemudian disahkan menjadi SK Kawasan Kumuh tahun 2022 Nomor 648/KEP.86-HUK.DPKPTB/2022. Pemutakhiran data bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih rinci lokasi-lokasi yang masuk dalam kategori kumuh, sehingga jumlah kawasan yang terdata mengalami peningkatan signifikan. Luas kawasan kumuh mengalami peningkatan signifikan menjadi 2.490,45 Ha., kawasan kumuh teridentifikasi di 181 desa dari total 326 desa yang ada di Kabupaten Serang Kecamatan dengan luas kawasan kumuh terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan total 207,60 Ha, sedangkan Kecamatan Mancak memiliki luas kawasan kumuh terkecil, yaitu 6,90 Ha. Pada tahun 2024 dilakukan pemutakhiran data kembali, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD periode selanjutnya. Berdasarkan Keputusan Bupati Serang terbaru Nomor 648/KEP.830-HUK.DPRKP/2024, luas kawasan kumuh mengalami penurunan menjadi 1.113,93 Ha. Kawasan kumuh tercatat berada di 602 RT/RW yang tersebar di 170 desa pada 29 kecamatan. Analisis Keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Serang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022, program-program kolaboratif dan penyesuaian data berhasil menurunkan luas kawasan kumuh secara substansial pada tahun 2024. Keberhasilan penyelesaian Kawasan kumuh menjadi bukti bahwa intervensi yang terencana dan sinergi dapat memberikan hasil yang nyata dalam penanganan kawasan kumuh.

Namun demikian, permasalahan mendasar di area Kawasan kumuh seperti persampahan dan penyediaan air bersih masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian khusus. Penyebab utama adalah sulitnya mendirikan TPS/TPS3R karena desa-desa tidak memiliki lahan yang memadai. Selain itu, Kabupaten Serang sendiri belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga penanganan sampah menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Selain itu penyediaan air bersih juga masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pesisir utara yang sumber airnya adalah air payau.

B. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor: 460/Kep.228-Huk.Dinsos/2019 data dasar RTLH didapat sebanyak 8.884 unit rumah. Untuk itu penanganan RTLH di Kabupaten Serang perlu peran stakeholder terkait untuk pengentasannya. Berikut adalah rincian data serta analisis sebab dan akibat dari perubahan yang terjadi yang diperoleh dari berbagai sumber pendanaan, penanganan RTLH di Kabupaten Serang selama tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang bervariasi.

Tabel 2.3. 20 Jumlah RTLH di Kabupaten Serang per-Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah RTLH	Jumlah Penanganan RTLH				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ANYAR	124	13	45	53	24	51
2	BANDUNG	237	13	5	6	23	0
3	BAROS	680	111	145	0	22	51
4	BINUANG	226	35	51	17	36	7
5	BOJONEGARA	56	13	10	31	17	3
6	CARENANG	197	11	30	14	18	16
7	CIKANDE	250	13	86	84	38	43
8	CIKEUSAL	500	139	65	45	26	16

No	Kecamatan	Jumlah RTLH	Jumlah Penanganan RTLH				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	CINANGKA	591	70	261	78	38	71
10	CIOMAS	655	374	209	52	145	64
11	CIRUAS	55	12	0	25	18	11
12	GUNUNG SARI	80	13	10	8	17	8
13	JAWILAN	465	80	68	32	35	4
14	KIBIN	181	69	35	28	21	3
15	KOPO	431	86	30	49	26	14
16	KRAGILAN	41	12	0	27	25	7
17	KRAMATWATU	32	13	30	33	43	4
18	LEBAK WANGI	164	52	57	37	17	10
19	MANCAK	300	35	30	44	23	14
20	PABUARAN	127	262	120	35	94	77
21	PADARINCANG	570	307	111	67	33	24
22	PAMARAYAN	842	162	46	0	37	29
23	PETIR	699	160	214	7	19	4
24	PONTANG	158	42	10	16	40	8
25	PULO AMPEL	42	10	15	14	17	4
26	TANARA	338	83	40	28	18	0
27	TIRTAYASA	109	42	106	30	18	4
28	TUNJUNG TEJA	725	265	30	18	19	70
29	WARINGINKURUNG	9	10	10	24	38	0
TOTAL		8.884	2.507	1.869	902	945	617

Sumber: DPRKP, 2025

Pada tahun 2023, DPRKP telah menyelesaikan pendataan ulang RTLH di 29 kecamatan. Hasil pendataan yang tercatat sebanyak 8.196 unit RTLH, telah ditetapkan di SK Bupati Nomor 978/kep.64-huk.DPRKP/2024 tentang data dasar bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni (BSP-RTLH) di Kabupaten Serang:

Tabel 2.3. 21 Jumlah RTLH di Kabupaten Serang per-Kecamatan Berdasarkan SK Bupati Tahun 2024

No	Kecamatan	2024
1	ANYAR	185
2	BANDUNG	227
3	BAROS	483
4	BINUANG	204
5	BOJONEGARA	145
6	CARENANG	107
7	CIKANDE	467
8	CIKEUSAL	613
9	CINANGKA	504
10	CIOMAS	449
11	CIRUAS	242
12	GUNUNG SARI	69
13	JAWILAN	218
14	KIBIN	144
15	KOPO	207
16	KRAGILAN	95
17	KRAMATWATU	103
18	LEBAK WANGI	157
19	MANCAK	325
20	PABUARAN	211
21	PADARINCANG	549
22	PAMARAYAN	806
23	PETIR	572
24	PONTANG	160
25	PULO AMPEL	72

No	Kecamatan	2024
26	TANARA	115
27	TIRTAYASA	176
28	TUNJUNG TEJA	521
29	WARINGINKURUNG	70
TOTAL		8,196

Sumber: DPRKP, 2025

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan upaya penanganan RTLH secara terpadu dengan stakeholder terkait dalam menuntaskan RTLH di Kabupaten Serang. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan DPRKP Kabupaten Serang.

1. Memberikan data dasar RTLH tahun 2024 ke berbagai stakeholder terkait,
2. Melakukan Kerjasama penanganan RTLH sesuai data dasar agar penanganan RTLH dapat terukur dan tepat sasaran.
3. Melakukan sinkronisasi data dasar sesuai dengan nama dan alamat (*by name by address*) setiap tahunnya agar penanganan RTLH tidak salah sasaran.

Dari upaya-upaya diatas, penangan RTLH di Kabupaten Serang dapat terukur dan tepat sasaran. Dari jumlah penanganan sebanyak 1.310 unit, terdapat 617 unit yang sesuai dengan data base 2024 ini atau sebanyak 47,1%.

C. Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan

Prasarana dan sarana umum pada perumahan adalah fasilitas fisik dan penunjang yang penting untuk kelayakan dan kenyamanan hidup dilingkungan perumahan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan, seperti jalan, drainase, tempat pembuangan sampah dan fasilitas lainnya yang memungkinkan lingkungan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Sesuai dengan ketentuan, pengembangan (developer) berkewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun kepada pemerintah daerah. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan. Penyerahan PSU ini berupa tanah beserta dan/atau tanpa bangunan diatasnya. Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara aktif telah mendorong para pengembang untuk melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan. Capaian pelaksanaan kegiatan penyerahan PSU diwilayah Kabupaten Serang pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. 22 Daftar Perumahan yang telah Menyerahkan PSU Tahun 2020-2024

No.	Nama Perumahan	Lokasi	Tahun Penyerahan
1.	Griya Lebak Indah Griya Asri	Desa Lebak Wana, Kecamatan Kramatwatu	2020
2.	Bukit Pelamunan Permai	Desa Pelamunan Kecamatan Kramatwatu	2020
3.	Pondok Cilegon Indah	Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu	2020
4.	Bumi Cikande Permai	Desa Cikande Kecamatan Cikande	2020
5.	Graha Cisait	Desa Cisait Kecamatan Kragilan	2020
6.	Bumi Ciruas Permai 1	Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas	2020
7.	Bumi Ciruas Permai 2	Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas	2020
8.	Griya Serdang Indah	Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu	2020

No.	Nama Perumahan	Lokasi	Tahun Penyerahan
9.	Harjatani Permai	Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu	2020
10.	Puri Mas	Desa Situterte Kecamatan Cikande	2020
11.	Puri Teratai	Desa Situterte Kecamatan Cikande	2020
12.	Ciujung Damai	Desa Kendayakan kecamatan Kragilan	2020
13.	Kramat Permai	Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu	2020
14.	Yomon Eka Harapan Jaya	Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu	2020
15.	Puri Kencana	Desa Blokan Kecamatan Bandung	2021
16.	Bumi Baros Hasanah	Desa Sukamanah Kecamatan Baros	2021
17.	Graha Serdang Metropolis	Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu	2021
18.	Griya Cilegon	Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu	2021
19.	Bintang Metropolis	Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu	2021
20.	Villa Permata Hijau	Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu	2021
21.	Bukit Kawi Permai	Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu	2021
22.	Griya Waringin Indah	Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung	2022
23.	Ciujung City	Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan	2022
24.	Griya Serang Kharisma	Desa Pelamunan Kecamatan Kramatwatu	2023
25.	Pondok Dewata Cikande	Desa Cikande Kecamatan Cikande	2023
26.	Bumi Nagara Lestari	Desa Nagara Kecamatan Kibin	2024
27.	Pesona Sindaheula	Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran	2024
28.	Bumi Kendayakan Permai	Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan	2024
29.	Taman Krakatau	Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung	2024
30.	Kampung Bahagia	Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan	2024
31.	Griya Sukadalem Indah	Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung	2024
32.	Cisait Puri Pratama	Desa Cisait Kecamatan Kragilan	2024
33.	Harjatani Heritage Estate	Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu	2024

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, 2025

Beberapa faktor yang menyebabkan pengembang belum melakukan penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah, antara lain adalah: (1) belum selesainya pembangunan seluruh PSU atau tidak sesuainya PSU dengan standar yang ditetapkan; (2) terjadinya alih fungsi PSU dari fasilitas umum menjadi fasilitas komersial; (3) Penyediaan PSU oleh pengembang tidak sesuai dengan site plan atau ijin yang diberikan baik dari sisi jenis, jumlah maupun kualitasnya; (4) pengembang sulit dilacak keberadaannya terutama untuk perumahan yang sudah lama dibangun; dan (5) Pengembang menunggu semua unit rumah yang dibangun terjual semua. Untuk meningkatkan kesadaran pengembang dalam penyerahan PSU, upaya yang telah dilaksanakan adalah melalui sosialisasi dan pengawasan/monitoring ke kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang.

2.3.6.5. Persentase Desa Mandiri

Dalam mendukung pembangunan, perlu upaya yang dilakukan melalui tingkatan bawah yaitu Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah dalam upayanya menyusun rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan Desa, perlu adanya alat untuk mengukur status perkembangan Desa yang biasa disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

Tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa dan

menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Pada penghitungannya, indeks komposit yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi Sosial (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar IDM diklasifikasi dalam 5 (lima) status yang diantaranya Desa Mandiri (Desa Sembada), Desa Maju (Desa pra-Sembada), Desa Berkembang (Desa Madya), Desa Tertinggal (Desa pra Madya) dan Desa sangat Tertinggal (Desa Pratama).

Tabel 2.3. 23
Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2020-2024

Status/Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desa Mandiri	3	3	4	12	15
Desa Maju	46	50	64	68	83
Desa Berkembang	255	254	254	245	227
Desa Tertinggal	22	19	4	1	1
Desa sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah Desa	326	326	326	326	326

Sumber: KemendesPDT

Berdasarkan tabel di atas, ada penambahan pada status Desa Mandiri di Kabupaten Serang setiap tahunnya dimana pada tahun 2024 terdapat 15 (lima belas) Desa yang sudah berstatus Desa Mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 4,6 persen Desa Mandiri di Kabupaten Serang yang dimana Desa tersebut telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pada jumlah status Desa Maju juga mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 83 (delapan puluh tiga) Desa di tahun 2024 yang artinya ada sekitar 25,46 persen Desa yang telah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Status Desa berkembang menjadi kategori yang terbanyak di Kabupaten Serang sekitar 69,63 persen atau sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh).

Desa yang berpotensi menjadi Desa Maju dengan memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Kemudian, adanya penurunan jumlah Desa tertinggal menjadi 1 (satu) Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurangnya kemampuan untuk mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Kabupaten Serang tidak terdapat Desa sangat tertinggal yang artinya tidak ada Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, menjelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah dan desa perlu adanya upaya mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dengan menggunakan Indeks Desa. Setelah terbitnya Permendes PDTT RI No. 9

Tahun 2024 tersebut, maka pengukuran pembangunan desa beralih dari IDM menjadi Indeks Desa.

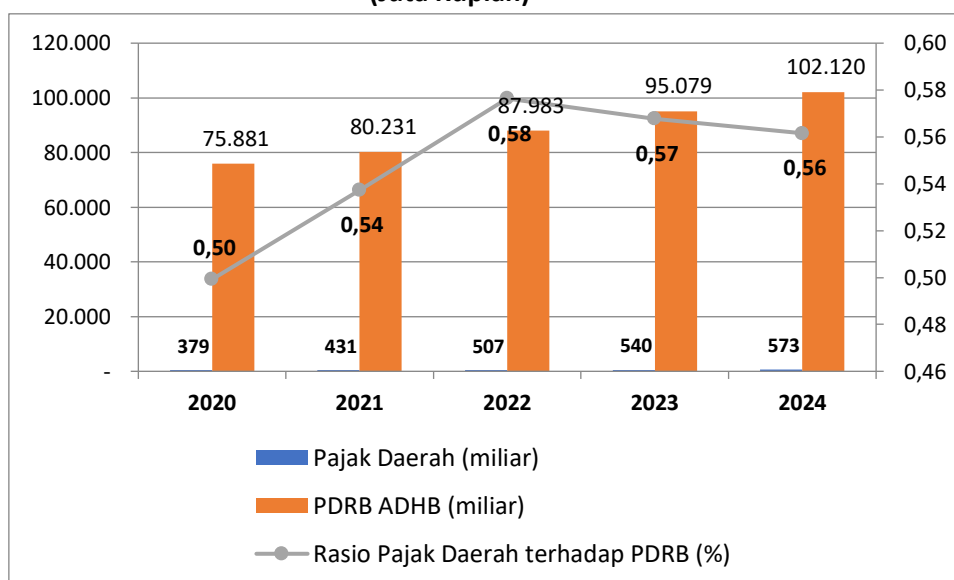
Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintah Desa. Keenam dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Indeks Desa diharapkan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan desa, mulai dari tingkat nasional hingga desa, serta menjadi dasar untuk mengalokasikan Dana Desa dan menyusun kebijakan pembangunan desa lainnya.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar, hal ini dikarenakan jenis pajak daerah Kabupaten Serang lebih banyak dibandingkan sumber PAD lainnya. Jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Serang relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Serang. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Grafik 2.3. 7 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Serang Tahun 2020–2024
(Juta Rupiah)



Sumber: CALK Kab. Serang, BPS Kabupaten Serang, 2020-2024 (diolah)

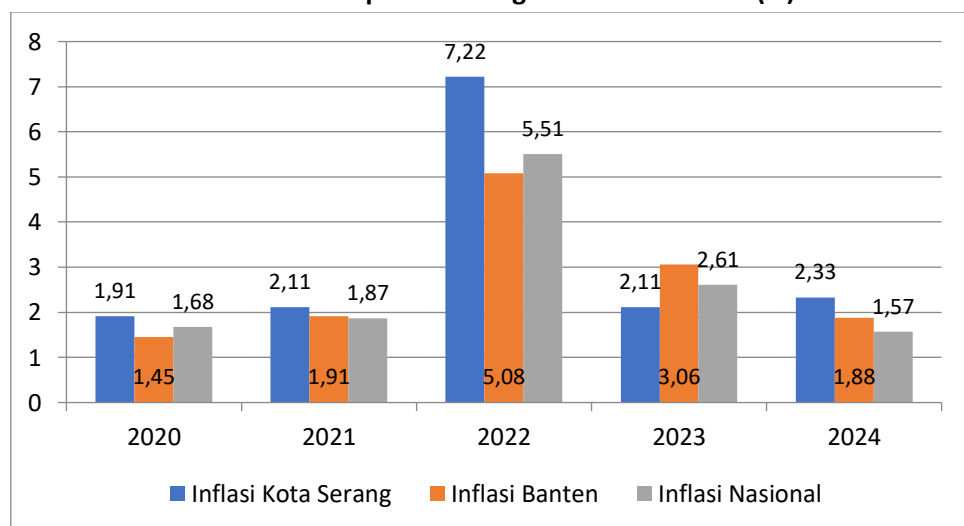
Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa PDRB dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Serang mencapai 75,88 triliun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 102,12 triliun. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang dilihat dari sektor pajak daerah dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan.

Besarnya rasio pajak daerah terhadap PDRB rata-rata hanya sebesar 0,55%, pajak daerah terdiri dari penerimaan pajak hotel, pajak katering, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan sumber lain, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi bangunan perkotaan (PBB), dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.3.7.2. Tingkat Inflasi

Inflasi Kabupaten Serang direpresentasikan oleh inflasi yang terjadi di Kota Serang. Pada tahun 2022, inflasi IHK Kota Serang menjadi yang tertinggi dibandingkan kota lainnya. Inflasi Kota Serang tercatat sebesar 7,22% (yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Banten yang tercatat sebesar 5,08% (yoy). Menurut kelompok pengeluaran, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada 4 (empat) kelompok, terutama didorong andil kelompok transportasi yaitu bensin, angkutan dalam dan luar kota.

Grafik 2.3. 8 Inflasi Kabupaten Serang Tahun 2020–2024 (%)



Sumber: BPS Kota Serang, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa inflasi kota serang dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dan selalu berada diatas Provinsi Banten dan Nasional. Pada tahun 2024 inflasi Kota Serang mencapai 2,33%. Perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya kenaikan, terjadi deflasi y-on-y sebesar 1,32 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,90 pada Februari 2024 menjadi 104,50 pada Februari 2025. Tingkat deflasi m-to-m dan tingkat deflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,85 persen dan 2,14 persen. Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

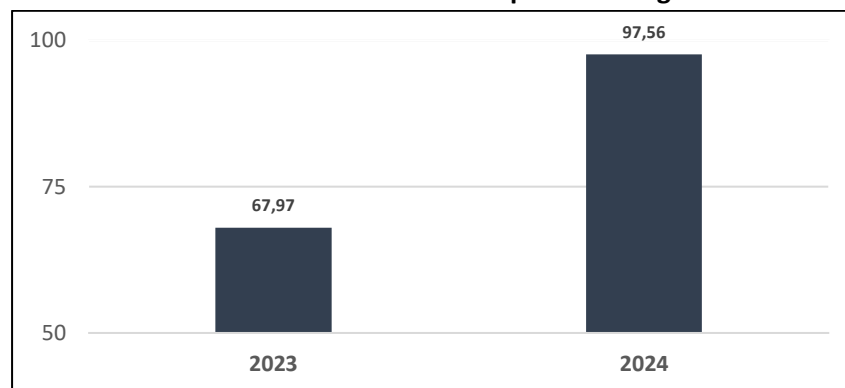
2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

IRH adalah instrumen yang dirancang untuk mengukur dan memantau efektivitas reformasi hukum di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa regulasi yang ada berkualitas, tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya pembenahan sistem hukum di Indonesia. Dengan adanya IRH, diharapkan tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, dan regulasi yang efektif serta efisien.

Penilaian IRH dilakukan berdasarkan 4 (empat) variabel utama yaitu variabel pertama dengan memperkuat koordinasi harmonisasi regulasi untuk menilai sejauh mana Kementerian Hukum berperan dalam mengoordinasikan harmonisasi peraturan di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, kemudian variabel kedua yaitu mendorong kualitas reregulasi dan deregulasi untuk melihat evaluasi terhadap upaya peninjauan ulang atau pencabutan peraturan yang tidak relevan, berdasarkan hasil revidu yang komprehensif, variabel ketiga mendorong penyederhanaan regulasi dengan mengukur efektivitas dalam menyederhanakan regulasi di berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan dan variabel keempat meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan dengan menilai kemampuan dan keahlian ASN dalam merancang peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.

Grafik 2.4. 1 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Serang Tahun 2022-2024



Sumber: Kemenkum RI

Berdasarkan grafik di atas terkait dengan penilaian IRH, Kabupaten Serang mendapatkan nilai 97,56 di tahun 2024 sebagai apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam melaksanakan reformasi hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Namun, masih adanya saran perbaikan terhadap reformasi hukum di Kabupaten Serang seperti data administrasi laporan evaluasi terhadap Perda eksisting yang belum tersedia dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang belum konsisten dan optimal dalam publikasi peraturan daerah Kabupaten Serang.

2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan publik dan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah Langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, efisien dan transparan. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, diharapkan layanan publik dapat menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta meningkatkan efektivitas birokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital digunakan Indeks SPBE. Indeks SPBE ini dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja lembaga/instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis digital/elektronik.

Tabel 2.4. 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	2,43	2,64	2,64	3,23	3,73
Kategori	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: Kementerian PAN RB

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dari kategori cukup di tahun 2020 naik menjadi kategori baik di tahun 2021 hingga tahun 2023 dan kemudian menjadi kategori sangat baik di tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,73 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE yang bermuara pada cita-cita utama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Harapan kedepannya, Kabupaten Serang terus berupaya meningkatkan implementasi SPBE melalui berbagai inisiatif seperti dengan menyediakan satu pusat penyimpanan data pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu platform terpadu, meningkatkan sistem enkripsi dan regulasi keamanan data dan memperluas akses digital hingga ke pelosok wilayah. Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Serang. Adapun dari Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Serang, sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, beberapa langkah dan program kegiatan penerapan SPBE yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan aspek kebijakan internal berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital SPBE Kabupaten Serang yang merupakan penyempurnaan dari kebijakan internal sebelumnya dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kabupaten Serang.
2. Penyelenggara SPBE juga telah berjalan sangat baik dengan tim koordinasi SPBE yang terstruktur dan solid serta didukung oleh semua pihak dalam pelaksanaan SPBE. Kolaborasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk mendukung

penyelenggaraan SPBE baik dari pihak SPBE pusat, antar instansi pemerintahan, akademisi maupun pihak ketiga.

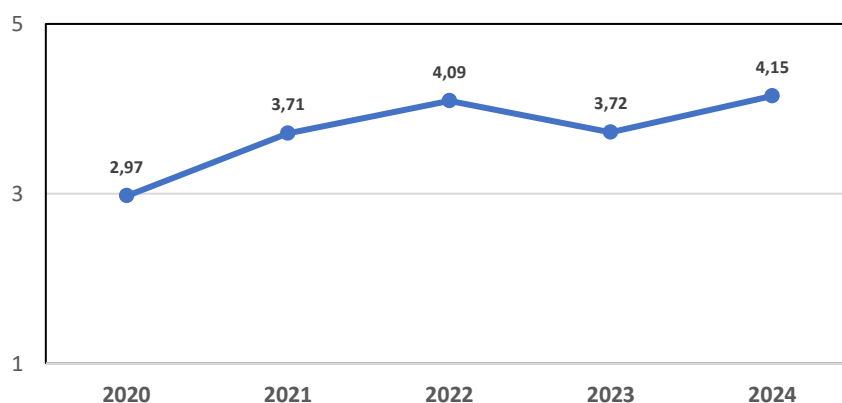
3. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik juga telah menggunakan aplikasi berbagi pakai dan telah melakukan optimalisasi pada aplikasi yang digunakan sehingga pelayanan menjadi lebih efisien baik dari sisi kinerja. Optimalisasi dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur khusus sehingga beberapa permasalahan terkait aplikasi kepegawaian dan kinerja kepegawaian dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu penggunaan layanan publik terutama penggunaan aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dimanfaatkan untuk pelayanan perijinan dan investasi serta layanan publik sektor 3 dengan penggunaan aplikasi SERANGOPEN dapat mempercepat program prioritas pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hibah. Pada layanan administrasi pemerintah, penggunaan aplikasi berbagi pakai seperti **SIPD, SRIKANDI, SP4N LAPOR, MYSAPK, dan LPSE** juga memberikan efisiensi kinerja maupun anggaran dalam berbagai layanan.

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur untuk melihat kinerja pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan digitalisasi agar lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Untuk memastikan kualitas layanan, pemerintah merancang Indeks Pelayanan Publik sebagai alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang berikan. Komponen penilaian Indeks Pelayanan Publik mencakup beberapa aspek diantaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan, inovasi pelayanan dan kepuasan pengguna layanan.

Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui Indeks Pelayanan Publik, pemerintah terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada instansi pemerintah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme.

Grafik 2.4. 2 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Serang Tahun 2020–2024



Sumber: Kemenpan RB RI

Pada capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Serang selama tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Kenaikan terjadi dalam kurun waktu 2020-2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 menjadi 4,15 dari skala 5 dengan kategori A- (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang telah memiliki unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.

Diantara OPD yang dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB terkait Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kategori penilaian yang meliputi; kebijakan standar pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.

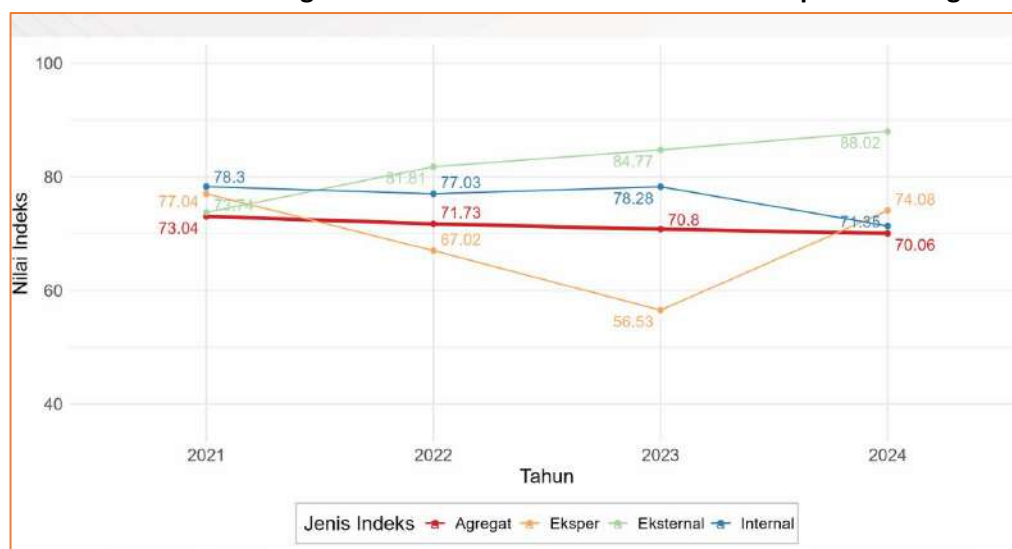
Dalam implementasi Indeks Pelayanan Publik terdapat tantangan pemerintah dimana ada keterbatasan SDM yang kompeten serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Kendala lainnya adanya perbedaan kualitas layanan di berbagai wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai serta tantangan teknologi dan inovasi untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pelaksanaan layanan publik.

2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah hasil pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IIN berfungsi untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). Survei ini mengumpulkan data dari berbagai pihak, termasuk persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan. SPI merupakan survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur kemajuan upaya pencegahan korupsi di pemerintah pusat dan daerah. Indeks integritas nasional bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat integritas di seluruh Indonesia dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi.

Grafik berikut menampilkan skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Pemerintah Kabupaten Serang pada SPI tahun 2021-2024:

Grafik 2.4. 3 Ringkasan Indeks SPI 2024 Pemerintah Kabupaten Serang



Sumber: KPK, Dokumen Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024

Grafik diatas menunjukan perubahan skor SPI yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks SPI dari Pemerintah Kabupaten Serang berada pada angka 73,04. Kemudian, terjadi penurunan yang minor di tahun 2022 menjadi 71,73. Berikutnya, pada tahun 2023, indeks SPI dari Pemerintah Kabupaten Serang berada pada angka 70,8. Kemudian, terjadi penurunan yang sangat minor di tahun 2024 menjadi 70,06, Responden internal yang merupakan pegawai di Pemerintah Kabupaten Serang memberikan penilaian yang berubah antarwaktu. Di tahun 2023, Nilai indeks SPI dari responden internal Pemerintah Kabupaten Serang berada pada angka 78,28. Kemudian, terjadi penurunan yang minor di tahun 2024 menjadi 71,35.

Dalam upaya memahami tingkat integritas yang tercermin dari hasil survei, menjadi langkah strategis untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja suatu lembaga dalam hal integritas. Melalui pendekatan ini, suatu lembaga dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana suatu organisasi mengatasi tantangan, terutama dalam menciptakan budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Data ini juga menjadi dasar untuk menetapkan target yang realistis dan mendorong inovasi dalam upaya peningkatan integritas. Akhirnya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam mendukung keberlanjutan institusional.

2.4.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik perlu dilakukan pembaharuan. Pembaharuan ini dilaksanakan melalui proses perubahan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang disebut dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi (good governance) dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, perlu adanya langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam komitmen untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder. Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk melihat sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, kita dapat mengukurnya melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Dengan meningkatkan skor IRB, pemerintah dapat menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.4. 2
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

Penilaian	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Reformasi Birokrasi	50,15	51,43	54,72	71,78
Kategori Nilai	CC	CC	CC	BB

Sumber: Menpan RB RI

Dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serang mengalami kenaikan dari Tahun 2020 dengan nilai 50,15 menjadi 71,78 di Tahun 2023 dimana perubahan kategori penilaian dari CC (cukup) menjadi BB (baik) yaitu reformasi birokrasi telah diterapkan dengan baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kedepannya, untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, instansi pemerintah harus fokus pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi indikator utama penilaian dengan menggunakan langkah-langkah strategis diantaranya manajemen perubahan dengan membangun budaya reformasi, penataan perundang-undangan dengan menyederhanakan regulasi, penataan dan penguatan organisasi dengan melakukan reformasi struktur pemerintahan, penataan tata laksana dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik, penataan manajemen SDM Aparatur dengan meningkatkan profesionalisme ASN, penguatan akuntabilitas dengan memastikan kinerja ASN terukur, penguatan pengawasan dengan melakukan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada kepuasan masyarakat.

2.4.1.6. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal, harus bersifat terpadu, sistemik dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaksanaan yang kuat dari berbagai kalangan terutama di kalangan penyelenggara Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan Pengawasan Kearsipan secara Nasional atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang –undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan yang merupakan tanggungjawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ANRI menyusun laporan Pengawasan Kearsipan Nasional (LHKPN) yang disusun berdasarkan laporan hasil pengawasan kearsipan eksternal yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan kearsipan pada seluruh obyek pengawasan dan laporan hasil pengawasan kearsipan internal yang diterima dari obyek pengawasan.

Adapun fungsi LHKPN ini dapat menjadi referensi bagi ANRI dan obyek pengawasan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dan untuk bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan mewujudkan tertib arsip dinamis dan terselamatkan arsip statis pada pencipta arsip.

Nilai pengawasan kearsipan Adalah angka yang diberikan setelah proses pengawasan dilakukan. Untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan kearsipan telah dilaksanakan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan, kita dapat mengukurnya melalui Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan. meningkatnya Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK) Pemerintah dapat mengetahui sejauhmana penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan.

Adapun Capaian kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut.

Tabel 2.4. 3 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Tangerang	AA (Sangat Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	BB (sangat baik)	A (Memuaskan)
2.	Kota Cilegon	A (Memuaskan)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	A (Memuaskan)	BB (Sangat Baik)
3.	Kabupaten Lebak	B Baik)	CC (cukup)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
4.	Kota Tangerang	BB (sangat baik)	C (Kurang)	B (Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)
5.	Kota Tangerang Selatan	CC (Cukup)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
6.	Kota Serang	CC (cukup)	D (Sangat kurang)	CC (Cukup)	CC (Cukup)	C (Kurang)
7.	Kabupaten Serang	CC (cukup)	C (Kurang)	CC (cukup)	C (Kurang)	CC (Cukup)
8.	Kabupaten Pandeglang	CC (Cukup)	C (kurang)	C (kurang)	Tidak diberikan kategori	CC (Cukup)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 2025

Faktor yang dinilai dalam pengawasan kearsipan adalah kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan statis ,tingkat digitalisasi arsip, sarana dan prasarana kearsipan , Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan arsip.

Dalam capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Serang mengalami peningkatan pada tahun 2020 (CC) , tahun 2022 (CC) dan tahun 2024 (CC). Untuk meningkatkan point Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan perlunya pemenuhan Aspek Penilaian Eksternal sebesar 60% dan Penilaian Internal sebesar 40%. Peningkatan Nilai Hasil Pengawasan mengindikasikan bahwa penyelenggaraan tata Kelola kearsipan telah dilaksanakan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

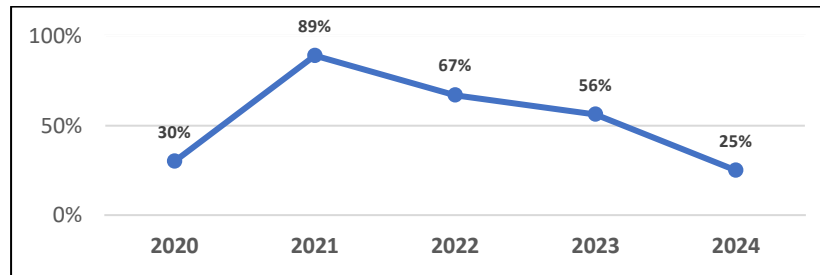
2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah Tindakan atau perilaku yang mengganggu kondisi aman, damai dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk gangguan seperti kebisingan berlebihan, perkelahian di tempat umum, vandalism, pembuangan sampah sembarangan hingga pelanggaran aturan lalu lintas. Perbuatan tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial. Untuk menjaga ketertiban, pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur perilaku di ruang publik, baik melalui peraturan daerah (Perda) maupun hukum pidana, dengan sanksi berupa teguran, denda atau hukuman lebih berat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dampak negatif pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum sangat beragam dan dapat merugikan masyarakat dalam berbagai aspek diantaranya gangguan kenyamanan dan keamanan yang akan menurunkan kualitas hidup. Jika pelanggaran dibiarkan, maka akan menimbulkan rusaknya nilai sosial dan moral di masyarakat dan menimbulkan konflik antar warga yang akan dapat berakibat jangka panjang dengan menurunnya citra dan daya tarik wilayah sehingga akan berdampak pada perekonomian.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ada beberapa kasus pelanggaran terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Serang seperti pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Satpol PP melakukan penyesuaian pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

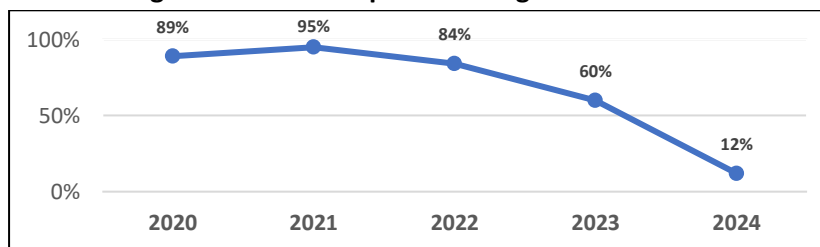
Grafik 2.4. 4
Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Serang Tahun 2020–2024



Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang

Berdasarkan grafik di atas, persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum cenderung fluktuatif, dengan persentase tertinggi pada Tahun 2021 yaitu 89% sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 25%. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

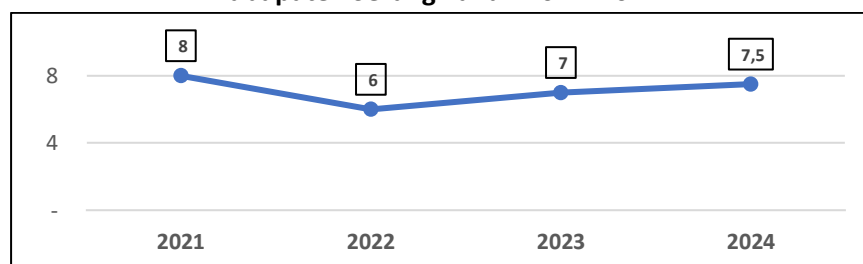
Grafik 2.4. 5
Penegakan Perda Kabupaten Serang Tahun 2020–2024



Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang

Pada penegakan Perda Kabupaten Serang melalui Satpol PP selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 adanya perbedaan capaian persentase dimana capaian persentase tertinggi mencapai 95% pada tahun 2021 namun mengalami penurunan hingga 12% di tahun 2024. Masih tingginya angka pelanggaran Perda disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat/perorangan serta badan hukum terhadap penegakan peraturan yang berlaku dalam hal penegakan Peraturan Daerah melalui pemantauan, penindakan dan pengawasan pada dukungan yang memadai.

Grafik 2.4. 6 Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Tratibum dan Perda
Kabupaten Serang Tahun 2021–2024



Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang

2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati dan dilindungi oleh semua orang termasuk negara dan lembaga. Pemerintah melakukan upaya untuk memastikan bahwa HAM menjadi bagian dari kebijakan publik melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Maka itu, pada perencanaan pembangunan sejatinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM terutama bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Program yang dijalankan mencerminkan komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM, baik secara nasional maupun internasional.

RANHAM dijalankan melalui berbagai aksi yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan yang nyata di berbagai sektor. Aksi-aksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dipenuhi, dilindungi dan dihormati dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan melaksanakan aksi-aksi ini diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara inklusif dan berkeadilan dengan memperhatikan hak-hak setiap individu dan kelompok masyarakat. Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati banyak generasi dan sedang berada pada generasi ke-5 (lima) dimana generasi pertama pada periode 1999-2003, generasi kedua pada periode 2004-2009, generasi ketiga pada periode 2011-2014, generasi keempat periode 2015-2019 dan generasi kelima pada periode 2021-2025. Secara umum, perkembangan capaian aksi HAM menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.

Tabel 2.4. 4
Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Pandeglang	36,11	41,58	88,33	96,70
Kab. Lebak	86,08	92,05	87,14	93,00
Kab. Tangerang	42,48	55,70	84,29	85,80
Kab. Serang	92,58	87,45	87,61	83,90
Kota Cilegon	67,74	24,97	49,53	100,00
Kota Tangerang	85,30	84,25	92,39	86,10
Kota Serang	78,78	65,25	68,33	91,40
Kota Tangerang Selatan	91,18	84,20	90,49	97,80
Provinsi Banten	8,45	33,05	39,79	68,10

Sumber: Kementerian HAM RI

Pada capaian aksi HAM selama tahun 2021 hingga tahun 2024, Kabupaten Serang konsisten melakukan pelaporan aksi HAM meskipun dengan capaian yang belum optimal. Perlu diketahui,

pada pelaksanaan pelaporan aksi HAM setiap tahunnya berbeda sesuai yang tertuang dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM Tahun 2021-2025 dimana terdapat pembagian sasaran strategis pertahunnya. Pada implementasinya, Kabupaten Serang belum optimal dalam menerapkan aksi HAM pada setiap kegiatan di Perangkat Daerah. Hal ini, disebabkan belum terintegrasinya RANHAM terhadap dokumen perencanaan pembangunan.

Integrasi RANHAM dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia dengan mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan strategis, peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Peran utama RANHAM dalam perencanaan pembangunan adalah memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan mengakomodasi HAM. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak merugikan dan justru dapat memperkuat pemenuhan hak asasi manusia bagi semua masyarakat.

2.4.2.3. Indeks Rasa Aman

Angka kriminalitas dapat bermanfaat dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Angka kriminalitas juga dapat menjadi acuan untuk melakukan perencanaan dalam upaya dan partisipasi pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan baik tingkat desa hingga tingkat daerah. Berikut tabel yang menggambarkan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Serang yang dimana wilayah hukum dimiliki oleh Polres Kabupaten Serang dan sebagian wilayah lainnya oleh Polres Kota Cilegon.

Tabel 2.4. 5

Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang Polres Serang

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	67	103	109	96	75
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	0	2	1	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	27	46	32	45	10
4.	Jumlah kasus penganiayaan	45	80	93	97	64
5.	Jumlah kasus pencurian	365	247	253	265	387
6.	Jumlah kasus penipuan	120	121	165	123	106
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	1	3	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	787	766	785	779	1.137
9.	Jumlah penduduk	898.376	898.376	900.137	977.889	977.889
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,88	0,85	0,87	0,80	1,16

Sumber: POLRES Kabupaten Serang, 2025

Tabel 2.4. 6

Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kabupaten Serang Polres Cilegon

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	19	22	20	9	19
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	2	1	1	0
3.	Jumlah kejahatan seksual	0	1	1	4	0
4.	Jumlah kasus penganiayaan	7	14	10	16	3
5.	Jumlah kasus pencurian	29	37	32	47	24
6.	Jumlah kasus penipuan	3	3	19	10	2
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	0	0	0

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	84	114	118	137	64
9.	Jumlah penduduk	239.042	234.196	257.371	260.740	265.836
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,35	0,49	0,46	0,53	0,24

Sumber: POLRES Kota Cilegon, 2025

2.4.2.4. Kondisi Situasi Politik, Kemanan dan Ketertiban Daerah.

Demonstrasi atau yang biasa disebut unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-undang. Ketentuan demonstrasi diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Definisi menurut UU No. 9 Tahun 1998 bahwa Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Demonstrasi dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang merupakan wujud dari hak dan tanggung jawab setiap warga negara sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas serta asas manfaat. Berikut Tabel Demonstrasi di wilayah Kabupaten Serang.

Tabel 2.4. 7
Jumlah Demo Tahun 2019-2023 di Polres Serang

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidang politik	0	0	0	0	0
2.	Ekonomi	1	1	1	1	1
3.	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0
4.	Jumlah unjuk rasa	204	217	50	85	35

Sumber: Bakesbangpol, 2025

Tabel 2.4. 8
Jumlah Demo Tahun 2019-2023 di Polres Cilegon

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidang politik	0	0	0	0	0
2.	Ekonomi	0	0	0	0	0
3.	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0
4.	Jumlah unjuk rasa	1	1	1	1	1

Sumber: Bakesbangpol, 2025

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah dapat bersaing secara efektif dalam konteks pembangunan. IDSD mengukur berbagai faktor yang memengaruhi daya saing suatu daerah dalam konteks perekonomian, sosial, dan lingkungan yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan meningkatkan daya saing, daerah dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menarik investasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Tabel 2.4. 9

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022–2024 (%)

Kabupaten/Kota	Skor Indeks		
	2022	2023	2024
Kab. Pandeglang	2,54	2,88	3,19
Kab. Lebak	2,51	2,99	3,45
Kab. Tangerang	3,45	3,59	3,70
Kab. Serang	2,93	3,14	3,68
Kota Tangerang	0	3,81	4,16
Kota Cilegon	3,17	3,26	3,60
Kota Serang	0	3,32	3,85
Kota Tangerang Selatan	0	3,81	4,31
Provinsi Banten	3,62	3,60	3,87

Sumber: BRIN, 2022-2024

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Serang pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami tren yang meningkat meskipun skor yang diperoleh Kabupaten Serang masih relative lebih rendah dibandingkan dengan skor Provinsi Banten. Pada tahun 2022, skor IDSD Kabupaten Serang mencapai skor 2,93, kemudian meningkat pada tahun berikutnya sebesar 3,14 (2023) dan 3,68 (2024). Tren yang semakin positif di tiap tahunnya menjelaskan bahwa kondisi daerah Kabupaten Serang sebagai daerah yang cukup baik dalam berdaya saing dengan daerah lainnya.

2.4.4 Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan pemerintahan daerah digunakan untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Indikator ini penting sebagai dasar evaluasi, akuntabilitas, dan perbaikan kinerja. IKK mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Capaian IKK urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. 10 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	66.833,00	48.435,00	72,47	50.423,000	64.889,000	77,707	61.546,00	67.452,00	91,244	69.385,00	50.047,00	72,13
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	182.250,00	182.250,00	100,00	189.294,000	189.294,000	100	195.966,00	195.966,00	100	200.603,00	200.603,00	100,00
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85.015,00	84.587,00	99,50	86.345,000	86.557,000	99,755	89.199,00	89.383,00	99,794	92.128,00	91.953,00	99,81
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7.705,00	7.705,00	100,00	6.728,000	7.102,000	100	16.802,00	17.577,00	95,59	13.267,00	4.893,00	36,88
5	Kesehatan	Rasio daya tampung RS rujukan	1.668.093,00	1.216,00	0,07	1.238,000	1.711.653,000	0,72	956,00	1.730.532,00	0,55	1.791.795,00	1.296,00	0,07
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	16,00	8,00	50,00	18,000	21,000	85,714	4,00	6,00	66,666	8,00	6,00	75,00

N o	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	34.490,00	30.395,00	88,13	29.376,000	32.401,000	90,664	33.516,00	33.442,00	94,565	35.664,00	32.668,00	91,60
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	31.261,00	30.269,00	96,83	29.017,000	31.141,000	93,179	33.808,00	33.808,00	100	34.042,00	29.402,00	86,37
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	32.930,00	31.045,00	94,28	32.439,000	32.572,000	99,592	31.274,00	33.100,00	94,483	33.948,00	29.932,00	88,17
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	153.448,00	136.741,00	89,11	147.845,000	155.261,000	95,224	155.261,00	155.261,00	100	168.336,00	167.174,00	99,31
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.957,00	27.795,00	77,30	37.713,000	41.387,000	91,123	202.892,00	202.892,00	100	292.731,00	292.731,00	100,00
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1.084.542,00	901.063,00	83,08	1.095.209,000	1.104.891,000	99,124	1.047.693,00	1.133.799,00	92,405	1.167.428,00	1.037.026,00	88,83
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	80.650,00	62.774,00	77,84	97.949,000	117.292,000	83,509	105.354,00	120.297,00	87,578	150.015,00	135.029,00	90,01

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		kesehatan sesuai standar												
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.047,00	43.047,00	100,00	273.606,000	285.062,000	95,981	251.729,00	323.557,00	77,8	325.914,00	198.384,00	60,87
15	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.066,00	11.066,00	100,00	16.573,000	16.573,000	100	18.811,00	18.811,00	100	18.950,00	18.490,00	97,57
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.139,00	2.139,00	100,00	2.255,000	2.255,000	100	1.815,00	2.225,00	81,573	2.225,00	1.882,00	84,58
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	6.793,00	5.973,00	87,93	18.736,000	18.736,000	100	34.300,00	34.300,00	100	37.064,00	37.064,00	100,00
18	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	25.949,00	25.949,00	100,00	36.237,000	42.586,000	85,091	37.597,00	44.092,00	85,269	46.302,00	41.820,00	90,32
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	1,00	1,00	100,00	0,000	1,000	0	0,00	1,00	0	1,00	0,00	0,00

N o	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota												
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabuptaen/Kota	1,00	1,00	100,00	0,000	1,000	0	0,00	1,00	0	1,00	0,00	0,00
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	7.928,99	6.466,63	81,56	7.479,890	7.928,990	94,336	4.204,90	9.307,436	45,177	9.307,44	3.852,46	41,39
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	396.434,00	353.851,00	89,26	355.955,000	483.709,000	73,589	358.357,00	489.311,00	73,237	489.311,00	360.427,00	73,66
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	324.682,00	262.519,00	80,85	350.984,000	483.709,000	72,561	368.190,00	489.311,00	75,246	489.311,00	354.324,00	72,41

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		pengolahan air limbah domestik												
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	46.283,00	46.283,00	100,00	47.491,000	47.491,000	100	49.415,00	49.415,00	100	50.708,00	50.708,00	100,00
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	601,13	585,55	97,41	851,050	1.025,510	82,988	620,15	1.004,39	61,743	1.004,39	682,06	67,91
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	300,00	226,00	75,33	226,000	300,000	75,333	283,00	300,00	94,333	448,00	358,00	79,91
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	192,00	192,00	100,00	192,000	192,000	100	249,00	249,00	100	221,00	221,00	100,00
28	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	35,00	0,00	0,00	0,000	1,000	0	0,00	1,00	0	1,00	0,00	0,00
29	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1,00	1,00	100,00	0,000	1,000	0	0,00	1,00	0	1,00	1,00	100,00
30	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	212,72	74,47	35,01	78,180	243,500	32,107	82,18	239,50	34,313	287,19	112,58	39,20

N o	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
31	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya persentase Rumah Layak Huni	324.682	322.102	99,21	333.619	331.941	99,5	343.700	342.967	99,79	351.363	351.872	100,14
32	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4.550	4.550	100,00	24.897	60.513	41,143	4.245	72.731	5,836	78.750	48.038	61,00
33	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	20,00	20,00	100,00	80,000	80,000	100	22,00	22,00	100	37,00	37,00	100,00
34	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	4,00	4,00	100,00	4,000	5,000	80	4,00	5,00	80	5,00	5,00	100,00
35	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.623.409,00	1.623.409,00	100,00	1.711.653,000	1.711.653,000	100,00	436.517,00	436.517,00	100,00	341.362,00	324.294,00	95,00
36	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.623.409,00	1.623.409,00	100,00	1.711.653,000	1.711.653,000	100,00	2.250,00	436.517,00	2.250	242.052,00	3.300,00	1,36
37	Ketentraman dan	Jumlah warga negara yang	6.601,00	6.601,00	100,00	15.920,000	15.920,000	100,00	10.121,00	10.121,00	100,00	108,00	108,00	100,00

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran												
38	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81,00	81,00	100,00	64,000	79,000	81,013	209,00	210,00	99,523	113,00	109,24	96,67
39	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,73	11,96	93,95	11,960	11,960	12,29	12,29	12,29	7,12	12,73	10,90	85,62
40	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	919,00	720,00	78,35	1.189,000	1.659,000	71,67	93,00	93,00	100	83,00	77,00	92,77
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	11.863,00	11.863,00	100,00	16.076,000	16.076,000	100	5.326,00	5.326,00	100	8.900,00	8.427,00	94,69

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		bencana daerah kabupaten/kota												
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	8,00	0,00	0,00	9,000	9,000	100	9,00	18,00	50	19,00	9,12	48,00
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	131.760,00	118.632,00	90,04	407,000	131.760,000	0,309	192,00	516,00	37,209	1,00	0,00	0,00
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	131.760,00	54.992,52	41,74	57.607,109	131.760,000	47,721	60.370,56	130.693,00	46,192	152.405,00	63.255,33	41,50
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	764,00	568,00	74,35	34,000	764,000	4,45	494,00	764,00	64,659	513,00	308,00	60,04
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	20.925,00	6.731,00	32,17	3.786,000	16.714,000	22,652	11.499,00	12.275,00	93,678	28.466,00	14.592,00	51,26
47	Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3.050.839.910.851	8.180.699.600	0,27	203.685.119.320,000	2.649.333.850.583,000	7,688	891.860.962.890,00	3.402.785.895.823,00	26,209	3.187.390.683.663	774.535.936.130	24,30

N O	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Perlindungan Anak													
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	541.308,00	83,00	0,02	92,000	92,000	100	63,00	63,00	100	100,00	100,00	100,00
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	554.741,00	95,00	0,02	42,000	839.855,000	5,001	13,00	848.914,00	1,531	613.649,00	398.872,00	65,00
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	626,00	337,55	53,92	348,150	626,000	55,615	393,18	626,00	62,807	248,72	410,82	165,17
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2.374.025,00	2.226.477,00	93,78	4.931.046,000	4.931.046,000	100	71.318.622,00	71.318.622,00	100	8.321.970,96	8.167.889,21	98,15
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	26,00	26,00	100,00	230.157,000	230.157,000	100	244.157,00	244.157,00	100	229.711,00	229.711,00	100,00
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan	2.374.025,00	2.226.477,00	93,78	4.931.046,000	4.931.046,000	100	71.318.622,00	71.318.622,00	100	8.167.889,21	8.167.889,21	100,00

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		dalam rangka penanaman modal.												
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1,00	1,00	100,00	0,000	1,000	0	0,00	1,00	0	1,00	0,00	0,00
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	2.374.025,00	2.226.477,00	93,78	4.931.046,000	4.931.046,000	100	43.971.740,00	43.971.740,00	100	8.167.889,21	8.167.889,21	100,00
56	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	2,00	2,00	100,00	2,000	2,000	100	7,00	7,00	100	1,00	0,00	0,00
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	67,82	N/A	-	65,70	N/A	-	64,389	N/A	-	61,406	N/A
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	106.674,50	106.674,50	100,00	524.890,600	852.532,149	61,568	424.695,90	1.217.903,07	34,871	1.442.785,00	634.951,87	44,01
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	131,00	32,00	24,43	21,000	92,000	22,286	21,00	72,00	29,166	97,00	50,00	51,55
60	Admniistrasi Kependudukan dan	Perekaman KTP elektronik	1.191.291,00	1.152.416,00	96,74	1.192.070,000	1.222.694,000	97,495	1.222.822,00	1.230.033,00	99,413	1.257.890,00	1.257.890,00	100,00

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pencatatan Sipil													
61	Admniistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	504.144,00	186.825,00	37,06	205.243,000	488.936,000	41,977	234.026,00	501.271,00	46,686	533.870,00	329.974,00	61,81
62	Admniistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	515.957,00	478.094,00	92,66	489.722,000	550.196,000	89,009	488.788,00	516.630,00	94,61	545.154,00	518.607,00	95,13
63	Admniistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	58,00	25,00	43,10	25,000	30,000	83,333	19,00	30,00	63,333	29,00	25,00	86,21
64	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	19,00	9,00	47,37	15,000	19,000	78,947	1,00	4,00	25	1,00	0,00	0,00
65	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	254,00	50,00	19,69	64,000	254,000	25,197	245,00	245,00	96,456	245,00	18,00	7,35
66	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,29	1,91	116,59	2,26	2,15	104,87	2,24	2,18	102,68	2,21	2,35	93,67
67	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Prevalence Rate/mCPR) Contraceptive	271.600,00	191.316,00	70,44	199.756,000	276.093,000	72,351	202.824,00	280.419,00	72,328	283.074,00	200.020,00	70,66

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
68	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	271.600,00	30.480,00	11,22	29.793,000	276.093,000	10,791	29.662,00	280.419,00	10,577	283.074,00	31.223,00	11,03
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	16,00	4,00	25,00			0,52	-	-	0,639	Belum ada target	44,60	N/A
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	260,00	95,31	36,66			0,27	-	-	0,25	Belum ada target	0,16	N/A
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	58,00	29,00	50,00	29,000	58,000	50	58,00	58,00	100	58,00	58,00	100,00
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	19,00	19,00	100,00	21,000	21,000	100	21,00	21,00	100	9,00	9,00	100,00
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.623.409,00	1.143.520,00	70,44	1.711.653,000	1.711.653,000	69,11	1.125.146,00	1.125.146,00	100	1.162.816,00	1.162.816,00	100,00
74	Komunikasi dan Informatika	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	3.971.632.715,00	3.441.730.258,00	86,66			96,151			88,336	585.160.221,00	585.160.221,00	100,00

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
75	Komunikasi dan Informatika	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	12,00	9,00	75,00			91,667			100	8,00	8,00	100,00
76	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	841,00	632,00	75,15	650,000	864,000	75,231	669,00	669,00	100	695,00	80,00	11,51
77	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	43.109,00	1.649,00	3,83	8.753,000	48.053,000	18,215	2.009,00	48.514,00	4,141	48.824,00	2.009,00	4,11
78	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	7.906.732.000.000	- 2.171.023.566.637	- 27,46	979.906.563.640,000	5.735.708.433.363,000	17,084	3.575.179.784.997,00	6.715.614.997.003,00	53,236	10.290.794.782.000	8.673.769.672.068	84,29
79	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	433.532,00	71,00	0,02	72,000	429.779,000	0,017	132,00	420.877,00	0,031	436.655,00	150,00	0,03
80	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	433.532,00	118,00	0,03	120,000	429.779,000	0,028	120,00	420.877,00	0,028	436.655,00	122,26	0,03
81	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	-	-	0,00	-	-	80	-	-	0	100,00	65,00	65,00
82	Statistika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58,00	29,00	50,00	58,000	58,000	100	58,00	58,00	100	58,00	58,00	100,00

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
83	Statistika	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	58,00	29,00	50,00	58,000	58,000	100	58,00	58,00	100	58,00	58,00	100,00
84	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1,00	0,00	0,00	184,000	645,000	28,527	0,00	1,00	0	645,00	397,00	61,55
85	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	39,00	39,00	100,00	39,000	39,000	100	38,00	38,00	100	38,00	15,00	39,47
86	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0,00	0,00	0,00			0	-	-	0	100,00	68,79	68,79
87	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00	0,00	0,00			47,13	-	-	47,83	100,00	54,30	54,30
88	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	1.466,00	416,00	28,38			57,803	-	-	50,045	100,00	49,98	49,98
89	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	6,00	0,00	0,00			0	-	-	100	100,00	51,38	51,38

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat												
90	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	-	63.623,55	N/A	63.994,750	51.198,480	63.994,75	65.930,19	42.419,27	65.930,19	43.451,40	67.161,00	154,57
91	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4.969,00	-334,00	-6,72	8.915,000	4.635,000	192,341	6.323,00	13.550,00	46,664	19.839,00	18.344,00	92,46
92	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang pergi ke Kabupaten/Kota	1.369.074,00	103.544,00	7,56	691.797,000	1.472.618,000	46,977	362.806,00	2.164.415,00	16,762	2.527.221,00	754.694,00	29,86
93	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	3.771,00	224.835,00	5962,21	279.100,000	823.925,000	34,35	288.240,00	801.540,00	35,96	888.147,00	319.378,00	35,96
94	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	1.805,46	N/A	1.985.076,180	87.983.132,910	2.256	1.985,08	87.983,13	2,256	102.120,37	23.079,00	22,60
95	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	17.000.000.000	24.424.557.769,00	143,67	17.010.000.000	34.554.358.874	203,14	17.020.000.000	40.534.393.229	238,16	17.030.000.000	42.087.583.589	247,14
96	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	104.717,00	578.677,00	552,61	575.548,000	99.534,000	578,243	516.197,00	96.925,00	579,001	102.530,00	580.901,00	566,57
97	Pertanian	Persentase Penurunan	2.888,00	-768,00	-26,59	477,000	2.120,000	22,5	-534,00	2.597,00	-20,562	147,00	45,00	30,61

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular												
98	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1,00	1,00	100,00	0,000	1,000	0	0,00	1,00	0	1,00	1,00	100,00
99	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	386,00	374,00	96,89	399,000	411,000	97,08	420,00	432,00	97,222	426,00	414,00	97,18
100	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	26.128,00	24.925,33	95,40	20.605.715,000	20.963.266,000	98,294	20.103,00	33.097,00	60,739	34.350,00	23.444,00	68,25
101	Perdagangan	Persentase alat-alat; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	1.162.485,00	572,00	0,05	1.898.457,000	2.137.588,000	88,813	2.222.111,00	2.222.111,00	100	1.483.020,00	1.483.020,00	100,00
102	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	9.133,00	146,00	1,60	4.944,000	43.109,000	11,469	484,00	48.053,00	1,007	75,00	37,50	50,00
103	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	-	-	0,00			50			0	100,00	70,00	70,00

N O	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK												
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	9,00	9,00	100,00	1,000	1,000	100	2,00	2,00	100	1,00	1,00	100,00
105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	9,00	9,00	100,00	0,000	1,000	0	2,00	2,00	100	1,00	1,00	100,00
106	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	9,00	9,00	100,00	2,000	5,000	40	1,00	1,00	100	1,00	0,00	0,00

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
107	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	341,00	310,00	90,91			100	-	-	100	341,00	341,00	100,00
108	Sekretariat Daerah	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	1,00	0,00	0,00			0			0	1,00	0,00	0,00
109	Sekretariat Daerah	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2.308,00	1.527,00	66,16			78,615			77,072	5.127,00	4.877,00	95,12
110	Sekretariat Daerah	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	454.296.107.474	- 67.730.719.040	- 14,91			19,028			34,902			
111	Kuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	3.050.839.910.851	379.833.328.209	12,45	396.198.081.571,000	3.116.192.574.479,000	12,714	380.508.891.502,00	3.282.084.705.499,00	11,593	3.485.630.577.521	409.879.792.915	11,76
112	Kuangan	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80.202,29	79.108,66	98,64	808.234.793.841,000	3.093.372.061.110,000	26,128	878.927.795.941,00	3.249.599.477.630,00	27,047	3.490.580.570.407	944.295.326.625	27,05
113	Kuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	3.050.839.910.851	1.960.759.965.215	64,27	2.122.979.058.646,000	3.116.192.574.479,000	68,345	2.270.209.497.575,00	3.282.084.705.499,00	69,169	3.485.630.577.521	2.376.258.366.781	68,17

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Umum (dikurangi transfer expenditures)												
114	Keuangan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	1.136.420.595,872	912.387.140,969	80,29	1.224.730.342.825,000	2.649.333.850.583,000	46,228	588.179.070.183,00	2.786.373.382.632,00	21,109	2.990.176.884.290	707.806.338.174	23,67
115	Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3.357.038.611,606	3.050.839.910,851	90,88	3.116.192.574.479,000	3.374.850.689.479,000	7,664	3.282.084.705.499,00	3.551.958.313.223,00	7,597	3.629.980.830.732	3.485.630.577.521	96,02
116	Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	964.246.077.181	791.086.613,633	82,04	808.234.793.841,000	976.125.245.938,000	17,199	878.927.795.941,00	1.061.558.897.765,00	17,204	1.010.531.276.784	944.295.326.625	93,45
117	Keuangan	Manajemen Aset	4,00	4,00	100,00			4			4	4,00	4,00	100,00
118	Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.964.976.597,938	120.713.268,994	4,07			3,596			1,083	3.629.980.830.732	30.334.674.917,00	0,84
119	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	961,00	2.361,00	245,68	2.573,000	3.340,000	77,036	1.982,00	2.678,00	74,01	2.547,00	1.851,00	72,67
120	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	465,00	173,00	37,20	294,000	3.340,000	8,802	493,00	2.678,00	18,409	2.547,00	490,00	19,24

No	Urusan	IKK Outcome	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 2 1	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	N/A	N/A	91,000	294,000	30,952	30,00	493,00	6,085	490,00	16,00	3,27
1 2 2	Inspektorat Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,11	32,95	94,86	3,50	3,26	93,14	3,60	3,07	85,28	3,70	3,204	86,59
1 2 3	Inspektorat Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	3,00	N/A			3			3	Belum ada target	3,00	N/A
1 2 4	Inspektorat Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	10	WTP	WTP	10	WTP	WTP	100,00

Sumber: LPPD Kabupaten Serang Tahun 2020-2024

2.4.5 Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, standar pelayanan minimal (SPM) didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM memberikan arahan terkait kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, dan aparat pengawasan dalam penyelenggaraan layanan publik. Capaian penerapan SPM Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.4. 11 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 (dalam Persen)

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	URUSAN PENDIDIKAN									
1	PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	48,435	72,47	48,435	72,47	61,546	92,01	54582	78,67
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada wilayah Kabupaten	66,833		66,833		66,894		69385	
2	PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar yang sudah tamat atau sedang belajar	182,25	100	182,25	100	284,336	100	290239	99,15
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	182,25		182,25		284,336		292731	
	URUSAN KESEHATAN									
1	PELAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pendidikan kesetaraan	7,705	100	7,705	100	16,802	95,6	12950	97,61
		Jumlah anak usia 7-18 tahun	7,705		7,705		17,577		13267	
2	PELAYANAN	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	30,395	93,86	30,395	93,86	33,516	95	35664	100

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	KESEHATAN	antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten								
	IBU HAMIL	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota	32,385		32,385		35,442		35664	
3	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten	30,269	96,83	30,269	96,83	30,119	88	34042	100
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten	31,261		31,261		34,147		34042	
4	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	31,045	99,31	31,045	99,31	31,274	96	33948	100
		Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten	31,261		31,261		32,521		33948	
5	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan kesehatan	136,741	89,11	136,741	89,11	155,261	100	168336	100
		Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten	153,448		153,448		155,261		168336	
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten	34,499	62,68	34,499	62,68	202,892	100	217475	74,29
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di	55,041		55,041		202,892		292731	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
		wilayah kerja Kabupaten								
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumah orang usia 15-59 tahun di kabupaten yang Mendapat pelayanan skrining kesehatan	1.084.542	100	1.084.542	100	1.047.693	92	1014519	86,90
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	1.084.542		1.084.542		1.133.799		1167428	
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan	62,774	77,8	62,774	77,8	105,354	88	121176	80,78
		Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja Kabupaten	80,65		80,65		120,297		150015	
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	43,047	100	43,047	100	251,729	78	198385	60,87
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka Prevalensi kabupaten	43,047		43,047		323,557		325914	
10	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah penderita diabetes melitus usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11,066	100	11,066	100	18,811	100	18490	97,57
		Jumlah estimasi diabetes melitus usia $\geq$ 15 tahun	11,066		11,066		18,811		18950	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
		yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten								
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten yang Mendapat pelayanan kesehatan jiwa	2,139	100	2,139	100	1,815	82	2225	100
		Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten	2,139		2,139		3,61		2225	
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan Pemeriksaan penunjang	2,619	36,6	2,619	36,6	30,61	100	37064	100
		Jumlah orang yang terduga TBC	7,156		7,156		30,61		37064	
13	PELAYAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan pelayanan	12,79	31,2	12,79	31,2	37,597	85	41861	90,41
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten	41,022		41,022		44,092		46302	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Jumlah warga negara yang terlayani	1.455.725	89,67	1.455.725	89,67	6	100	360423	73,66
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan Hari	1.623.409		1.623.409		6		489311	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Jumlah warga negara yang terlayani	1.075.417	66,24	1.075.417	66,24	1.355.804	71,84	354324	72,41
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	1.623.409		1.623.409		1.711.653		489311	
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS									
1	PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KAB/KOTA	Jumlah rumah yang direhab/dibangun	0	0	0	0		0		
		Jumlah total rumah yang seharusnya direhab/dibangun	0				0			
		Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024							0 1	0
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Jumlah warga negara yang terlayani	0	0	0	0	0	0		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	0		0		0			
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni							0 1	0
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN	Jumlah total yang Terlayani	275	100	1.623.409	100	1	100		

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN PERDA SESUAI MUTU DAN PELAYANAN GANTI RUGI									
		Jumlah total yang harus dilayani	275		1.623.409		1			
2	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada							0	0
									285	
3	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP JUMLAH PENEGAKAN PERDA SESUAI MUTU	Jumlah total yang Terlayani	20	100	20	100	2,25	0,52		
		Jumlah total yang harus dilayani	20		20		436,517			
4	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah total yang Terlayani	1.623.409	100	1.623.409	100	2,25	100		
		Jumlah total yang harus dilayani	1.623.409		1.623.409		2,25			
5	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana							341362	100
									341362	
6	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah total yang Terlayani	1.623.409	100	1.623.409	100	10,121	100		
		Jumlah total yang harus dilayani	1.623.409		1.623.409		10,121			
7	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							3300	1,36
									242052	
8	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN	Jumlah total yang Terlayani	6,601	100	6,601	100	353	99,72		

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	BENCANA									
		Jumlah total yang harus dilayani	6,601		6,601		354			
9	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							108	100
									108	
10	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Jumlah total yang Terlayani	31	100	31	100	0	0		
		Jumlah total yang harus dilayani	31		31		0			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							113	100
									113	
	URUSAN SOSIAL									
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah total yang Terlayani	142	70,65	142	70,65	2	100	77	92,77
		Jumlah total yang harus dilayani	201		201		2		83	
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah total yang Terlayani	506	83,33	506	83,33	41	100	5	100
		Jumlah total yang harus dilayani	606		606		41		5	
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah total yang Terlayani	72	64,3	72	64,3	50	100	30	96,77
		Jumlah total yang harus dilayani	112		112		50		31	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah total yang Terlayani	0	0	0	0	10	100	1	100
		Jumlah total yang harus dilayani	0		0		10		1	
5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah total yang Terlayani	11,863	100	11,863	100	5326	100	8900	100
		Jumlah total yang harus dilayani	11,863		11,863		5326		8900	

2.4.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah didefinisikan sebagai usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Kerjasama dapat dilakukan dengan daerah lain (KSDD), dengan pihak ketiga seperti perseorangan, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan (KSDPK), maupun dengan pemerintah daerah atau Lembaga di luar negeri (KSDPL).

Berikut adalah data kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten Serang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. 12
Kerjasama Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

No.	Nomor Perjanjian	Mou/PKS	Pihak	Tentang	Tahun
1	134.4/PKS.1387/Huk.DKPP/2022	PKS	DISKAN KAB SERANG, PD USAHA TANI BUNGSU	PENGLOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG	2022
2	441.4/PKS 01 TAPEM.BAPPEDA/2022	PKS	BAPPEDA, DINKES, DISDIKBUD, DKBP3A, YAYASAN CARE PEDULI	PROMOTING A SUSTAINABLE AND FOOD SECURE WORLD (PROSPER III) MELALUI UKS DI KAB SERANG	2022

No.	Nomor Perjanjian	Mou/PKS	Pihak	Tentang	Tahun
3	441.4/PKS 02 TAPEM.DINKES/2022	PKS	DINKES, YAYASAN CARE PEDULI	PROMOTING A SUSTAINABLE AND FOOD SECURE WORLD (PROSPER III) MELALUI UKS DI KAB SERANG	2022
4	441.4/PKS 03 TAPEM.DISDIKBUD/2022	PKS	DISDIKBUD, YAYASAN CARE PEDULI	PROMOTING A SUSTAINABLE AND FOOD SECURE WORLD (PROSPER III) MELALUI UKS DI KAB SERANG	2022
5	441.4/PKS 04 TAPEM.DKBP3A/2022	PKS	DKBP3A, YAYASAN CARE PEDULI	PROMOTING A SUSTAINABLE AND FOOD SECURE WORLD (PROSPER III) MELALUI UKS DI KAB SERANG	2022
6	640/MOU-23-Huk/2022	MOU	PEMPROV BANTEN, PEMKOT SERANG DAN PEMDA SERANG	PENGELOLAAN DAN REVITALISASI KAWASAN BANTEN LAMA	2022
7	119/MoU.42.Huk/2022	MOU	PEMDA LEBAK, PEMDA SERANG	KERJA SAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH	2022
8	180/MoU.44-Huk/2022	MOU	PEMKAB PANDEGLANG, PEMKAB SERANG	KERJA SAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH	2022
9	134/KSB 79 HUK.TAPEM/2022	MOU	PEMKAB SERANG, PD. USAHA TANI BUNGSU	PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG	2022
10	570/PKS.83.Huk.Koperindag/2022	PKS	DISKOPERINDAG, YAYASAN CARE PEDULI	PEMBERIAN BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA DESA CIAGEL, DESA KIBIN DAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN KIBIN KAB. SERANG	2022
11	6601/PKS 84 Huk. DLh/2022	PKS	DLH, YAYASAN CARE PEDULI	PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CIAGEL KECAMATAN KIBIN KAB. SERANG	2022
12	690/PKS 85 Huk.PERKIM/2022	PKS	DPKPTB, YAYASAN CARE PEDULI	PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA CIAGEL KECAMATAN KIBIN KAB. SERANG	2022
13	100/MoU.69-Huk/2022	MOU	PEMKOT TANGERANG, PEMKAB SERANG	KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH	2022
14	100/PKS.38-Huk.DISKOMINFOSATIK/2022	PKS	DISKOMINFO KOTA TANGERANG, DISKOMINFO KAB. SERANG	IMPLEMENTASI APLIKASI SMART CITY KOTA TANGERANG	2022
15	073/831-Disdikbud.2023	PKS	DISDIKBUD KAB SERANG, FAKULTAS MIPA ITB	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER PENGAJARAN (S2) ITB BAGI GURU TUGAS BELAJAR PEMKA SERANG	2023
16	074/KSB 07-TAPEM/2023	MOU	PEMKAB SERANG, ITB	TRIDARMA PERGURUAN TINGGI	2023
17	073/PKS.01/TAPEM-DISKAN/2023	PKS	DISKAN KAB SERANG, FAKULTAS ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN UNPAD	PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA INSTITUSI DI KABUPATEN SERANG	2023

No.	Nomor Perjanjian	Mou/PKS	Pihak	Tentang	Tahun
18	581/PKS.02/TAPEM-BPKAD/2023	PKS	PEMDA SERANG, BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN	PENGELOLAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DOMESTIK BANK BJB	2023
19	032/PPP.03/TAPEM-BPKAD/2023	PKS	PEMDA SERANG, BAWASLU KAB. SERANG	PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMKAB SERANG KEPADA BAWASLU KAB SERANG	2023
20	518/KSB.05/TAPEM/2023	MOU	PEMDA SERANG, HIPMIKIMDO	PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAB. SERANG	2023
21	660.1/KSB.08-TAPEM/2023	MOU	PEMKAB SERANG, PT CHANDRA ASRI	PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK AN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KONSEP EKONOMI SIRKULAR	2023
22	032/PPP.09/TAPEM-BPKAD/2023	PERJANJIAN PINJAM PAKAI	PEMDA SERANG, DESA PEGANDIKAN KECAMATAN LEBAK WANGI	PINJAM PAKAI LAHAN/ TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG	2023
23	713/NK.11.TAPEM/2023	NOTA KESEPAKATAN	OMBUDSMAN RI, PEMDA SERANG	SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SERANG	2023
24	134.4/KESBER.12.TAPEM/X/2023	MOU	PEMDA SERANG, PEMKOT SERANG	PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN	2023
25	134.4/KESBER.13.TAPEM/VIII/2023	MOU	PEMDA SERANG PEMKOT CILEGON	KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	2023
26	032/PKS.14.TAPEM-BPKAD/VIII/2023	PKS	PEMDA SERANG, YAYASAN PANDU PERTIWI	SEWA LAHAN TANAH FASOS FASUM MILIK PEMKAB SERANG DI PERUM CITRA GARDEN BMW DESA WANAYASA KEC. KRAMATWATU	2023
27	670/KESBER.15-TAPEM/2023	MOU	PEMDA SERANG, PLN UNIT P3 BANTEN UTARA	KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN DI WILAYAH KABUPATEN SERANG	2023
28	074/KSB 19-HUK.TAPEM/2023	MOU	PEMDA SERANG, UNPAD	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2023
29	031/PPP.19.TAPEM-BPKAD/IX/2023	PERJANJIAN PINJAM PAKAI	PEMDA SERANG, DESA CITAMAN KEC. CIOMAS	PINJAM PAKAI LAHAN/ TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG	2023
30	134.4/KSB.20/Huk.TAPEM/2023	MOU	PEMDA SERANG, PEMDA BANDUNG	PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK	2023
31	410/PKS.20.TAPEM-DPMD/IX/2023	PKS	BPJS KETENAGAKERJAAN, DPMD KAB SERANG	PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA SE-KABUPATEN SERANG	2023

No.	Nomor Perjanjian	Mou/PKS	Pihak	Tentang	Tahun
32	074/NK 21-HUK.TAPEM/2023	NK	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV, PEMDA SERANG	SINERGITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI, DALAM IMPLEMENTASI TRIDHARMA SERTA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	2023
33	134.4/PKS.21.TAPEM-DISNAKERTRANS/IX/2023	PKS	DISNAKER KAB TOLITOLI DISNAKER KAB SERANG	PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DAN SATUAN PERMUKIMAN JANJA, KAWASAN TRANSMIGRASI BASIDONDO, KEC. LAMPASIO, KAB TOLITOLI	2023
34	032/PPP.23.TAPEM-BPKAD/IX/2023	PPP	PEMDA SERANG, BAZNAZ KAB SERANG	PINJAM PAKAI GEDUNG EX. RUMAH SINGGAH RSDP DIATAS LAHAN/TANAH SELUAS 418 M ² MILIK PEMDA	2023
35	440/PKS.24.TAPEM-DPMD/IX/2023	PKS	BPJS KESEHATAN CABANG SERANG, DPMD KAB SERANG	PELAKSANAAN PROGRAM PESIAR DI DESA ANYAR KEC ANYAR	2023
36	119/KESBER.27 TAPEM/X/2023	MOU	PEMDA SERANG, BPIPI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2023
37	2331/IKMA/BPIP/IND/X/2023	MOU	PEMDA SERANG, BPIPI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2023
38	521/KESBER.28.TAPEM/XI/2023 PJ007/09010/II/2023	MOU	PEMDA, BULOG	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG	2023
39	521/PKS.29.TAPEM-DKPP/IX/2023	PKS	DKPP, BULOG	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG	2023
40	556/KESBER.30-TAPEM/XII/2023	MOU	PEMDA, PHRI	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN SERANG	2023
41	09/S/BPC-SRG/II/2023	MOU	PEMDA, PHRI	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN SERANG	2023
42	556/KESBER.31-TAPEM/XII/2023	MOU	PEMDA, HPI	PENGEMBANGAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA KABUPATEN SERANG	2023
43	02/DPCHPI/KAB-SER/XII-2023	MOU	PEMDA, HPI	PENGEMBANGAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA KABUPATEN SERANG	2023
44	556/KESBER.32-TAPEM/XII/2023	MOU	PEMDA, ASITA	PENGEMBANGAN PROMOSI KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERANG	2023

No.	Nomor Perjanjian	Mou/PKS	Pihak	Tentang	Tahun
45	556/PKS.33-TAPEM-DISPORAPAR/XII/2023	PKS	DISPORAPAR, PHRI	KONEKTIVITAS DESTINASI WISATA UTAMA DENGAN DESA WISATA	2023
46	568/KESBER.34-TAPEM/XII/2023 PER/84/122023	MOU	BPJS TENAGAKERJA, PEMDA	JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SERANG	2023
47	568/PKS.35-DPMD-TAPEM/XII/2023 PER/84/122023	PKS	BPJS TENAGAKERJA, DPMD	PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJAAN BAGI PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN SERANG	2023
48	032/KESBER.36-TAPEM/XII/2023	MOU	PEMDA, CV AAT BIN HAJI ARIF DURIAN BANTEN	PENGELOLAAN SENTRA HASIL BUMI DAN PRODUK UMKM DESA LUWUK KEC GUNUNG SARI	2023
49	009/ABHA/XII/2023	MOU	PEMDA, CV AAT BIN HAJI ARIF DURIAN BANTEN	PENGELOLAAN SENTRA HASIL BUMI DAN PRODUK UMKM DESA LUWUK KEC GUNUNG SARI	2023
50	032/PPP.37/TAPEM-BPKAD/2023	PERJANJIAN PINJAM PAKAI	BPKAD, KEJAKSAAN	PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KAB SERANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG	2023

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, 2025

2.4.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan APBD Provinsi

Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD Provinsi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat Provinsi) di daerah merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional dan regional untuk mempercepat pemerataan pembangunan, konektivitas, serta pelayanan publik.

Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan APBD Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Serang tahun 2024 yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. 13
Rencana Pembangunan Infrastruktur Bersumber Dari APBN dan APBD Provinsi

No	Uraian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. APBD Provinsi							
1	Penataan Bangunan Gedung	25.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
2	Rumah Tidak Layak Huni	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	Sarana Prasarana Kesehatan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
II. APBN (DAK Fisik)							
A Bidang Pendidikan							
1	Rehab/Bangun Ruang Sekolah SD	10.578.397.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2	Rehab/Bangun Ruang Sekolah SMP	23.561.499.800	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000

N o	Uraian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Rehab/Bangun Ruang Sekolah PAUD	740.129.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4	Belanja Sarana Prasarana/Penunjang SD	1.623.641.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5	Belanja Sarana Prasarana/Penunjang SMP	3.474.236.200	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
6	Belanja Sarana Prasarana/Penunjang PAUD	127.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
7	Belanja Sarana Prasarana/Penunjang Pendidikan Kesetaraan		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B	Bidang Kesehatan						
1	Rehab/Bangun Gedung Kesehatan	7.677.880.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2	Belanja Sarana Prasarana/Penunjang Kesehatan	20.258.292.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
C	Bidang Jalan						
1	Rekonstruksi Jalan	23.575.661.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
D	Bidang Air Minum						
1	Rehab/Bangun Instalasi Pengolahan Air Minum	2.306.841.350	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2	Uprating Instalasi Pengolahan Air	11.958.689.650	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
3	Belanja Sarana Prasarana/Penunjang Pengolahan Air	672.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
E	Bidang Sanitasi						
1	Rehab/Bangun Tangki Septik	8.115.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Belanja Prasarana/Penunjang Sanitasi	210.748.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
F	Bidang Irigasi						
1	Rehab/Bangun Irigasi	5.217.770.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Belanja Prasarana/Penunjang Irigasi	260.888.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
G	Bidang Pertanian						
1	Rehab/Bangun Sarana Pertanian	1.708.506.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2	Belanja Prasarana/Penunjang Pertanian	87.732.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000

2.4.8 BUMD Kabupaten Serang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah

(Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda), dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian yang termaktum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. BUMD utama di Kabupaten Serang saat ini terdiri dari dua entitas dalam pelayanan publik yaitu PT BPR Serang (Perseroda) bergerak di bidang Perbankan mikro dan UMKM, menyediakan layanan keuangan lokal dan Perumda Tirta Albantani.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Serang yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1977 berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 1977. Sebagai perusahaan pelayanan publik yang bergerak dalam bidang sistem penyediaan air minum di wilayah kabupaten serang, PDAM telah berubah nama menjadi perusahaan umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Al Banteni pada tanggal 12 Maret 2020 melalui Perda Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2020.

Visi dari BUMD Tirta Al-Bantani adalah “Menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan air yang berkualitas”. Sedangkan untuk misi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan air bersih prima pada semua lapisan masyarakat
2. Mendukung perkembangan industri pasokan air

Unit Pelayanan Air Minum PERUMDA Tirta Al Bantani terbagi menjadi 3 wilayah yang berada di Serang Barat, Serang Tengah dan Serang Timur. Kami melayani : - Pendaftaran Pelanggan, - Pembayaran Tagihan Air, - Pembukaan Kembali Sambungan Rumah serta - Pengaduan Keluhan Pelanggan. Calon pelanggan ataupun pelanggan PERUMDA Tirta Al Bantani dapat secara langsung mendatangi kantor-kantor UPAM terdekat untuk mengetahui informasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) memiliki sejarah panjang dalam mendorong pengembangan kesempatan berusaha dan kerja bagi masyarakat pedesaan guna meningkatkan pendapatan daerah. Berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996, Perseroan awalnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK), dengan modal dasar awal sebesar Rp 250.000.000,00. Kepemilikan saham awal terdiri atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (45%), Pemerintah Kabupaten Serang (40%), dan PT Bank Jabar (15%).

Seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan pengembangan, terjadi beberapa penyesuaian, antara lain:

- (a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diperlukan penyesuaian struktur kelembagaan untuk memberdayakan lembaga keuangan pedesaan dan mendorong perekonomian lokal.
- (b) Dengan terbentuknya Provinsi Banten (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000), serta peningkatan status Serang sebagai ibu kota provinsi, modal dasar disesuaikan menjadi Rp 1.000.000.000,00 sesuai SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35 KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.
- (c) Pada tahun 2003, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2003, kepemilikan saham disusun ulang dengan proporsi: Pemerintah Kabupaten Serang (55%), Pemerintah Provinsi Banten (15%), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (15%), dan PT Bank Jabar (15%)

Pada tahun 2006, untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, PD BPR LPK Serang melakukan penggabungan (merger) beberapa unit usaha dari kecamatan di Kabupaten Serang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia pada tahun 2008.

Perubahan modal dasar kembali dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 8 Tahun 2010, menetapkan modal dasar sebesar Rp 100.000.000.000,00 tanpa mengubah komposisi kepemilikan. Kemudian, untuk memperkuat identitas dan kemudahan pengenalan masyarakat, nama lembaga diubah menjadi PD BPR Serang dan disetujui oleh Bank Indonesia pada 2011.

Sejalan dengan perkembangan usaha dan transformasi lembaga keuangan di Indonesia, status hukum PD BPR Serang berubah menjadi Perseroan Terbatas melalui Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-66/KR.011/2019 dan S-37/KR.011/2020, resmi menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda).

Pasal 314 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Atas hal tersebut PT. BPR Serang (Perseroda) telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil Keputusan Sirkuler terkait perubahan nomenklatur perusahaan serta menandatangani pada tanggal 20 November 2024 sebagai pengganti Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) yakni menyetujui keputusan perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda);
- (b) Menyatakan hasil Keputusan Sirkuler dalam suatu Akta Notaris Lia Shinta Dewi, S.H., M.Kn. Nomor 35 Tanggal 21 November 2024 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda);
- (c) Menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan mengenai hasil Keputusan Sirkuler menyetujui keputusan perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan persetujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0075454.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Serang

2.4.9 Pendanaan Non-APBD

Guna mendukung percepatan pembangunan daerah, maka objek pendanaan non-APBD menjadi salah satu hal yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah. Dalam rangka dukungan atas percepatan permasalahan pembangunan daerah dan keselerasan terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka dukungan dari berbagai pihak terutama dari perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Serang atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) / Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam membantu menyukseskan berbagai percepatan pembangunan di Kabupaten Serang. Beberapa hal berikut ini kegiatan yang dapat dibiayai melalui pendanaan non-APBD.

Tabel 2.4. 14 Rencana Dukungan Pendanaan Kegiatan Non-APBD 2025-2030

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Masjid Terapung	Kecamatan Cinangka
2	Lahan Rutilahu	Di kawasan sekitar perusahaan/ wilayah Kabupaten Serang
3	Pendidikan dan Pelatihan	Bagi angkatan kerja/ <i>fresh graduated</i>
4	Kesehatan	Pemeriksaan Kesehatan/ Sarana dan prasarana kesehatan/ Pendukung kesehatan
5	Sosial	Bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin/ rentan, kegiatan sosial kemasyarakatan
6	Kebencanaan	Bantuan siap siaga kebencanaan
7	Lingkungan Hidup	Air bersih, air minum, penanaman pohon
8	Bantuan UMKM	Bantuan usaha ekonomi kreatif, bantuan usaha mikro, kecil dan menengah

Sumber: Bapperida Kabupaten Serang, 2025

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbagai literatur dan best practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “revenue dan expenditure”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam

jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBD/Perubahan APBD.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

2.5.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah 5 Tahun Terakhir

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020–2024 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasar pada hal tersebut, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah pada umumnya. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah mencakup: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.

2.5.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan APBD Kabupaten Serang meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. 1 Realisasi APBD Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 (Rp)

No	Uraian	Tahun				
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
1	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	701.215.210.764	791.086.613.633	808.234.793.841	878.932.689.941	944.314.942.625
B	Pendapatan Transfer	1.940.567.149.150	2.126.698.078.829	2.243.660.752.897	2.360.342.962.129	2.535.579.868.449
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	217.288.456.910	216.898.969.712	41.478.947.397	10.272.840.346	10.893.241.588
	JUMLAH PENDAPATAN	2.859.070.816.824	3.134.683.662.174	3.093.374.494.135	3.249.548.492.416	3.490.788.052.662
2	BELANJA					
A	Belanja Operasi	2.078.900.818.912	2.243.251.062.004	2.255.257.787.098	2.425.562.062.591	2.561.521.309.939
B	Belanja Modal	371.988.142.668	401.561.919.410	394.080.632.394	360.811.320.041	428.320.239.751
C	Belanja Tidak Terduga	88.318.571.008	1.471.653.080	527.046.146	119.786.500	397.087.640
D	Belanja Transfer	425.769.065.350	404.601.482.650	466.331.677.750	495.591.536.367	495.056.605.591
	JUMLAH BELANJA	2.964.976.597.938	3.050.886.117.144	3.116.197.143.388	3.282.084.705.499	3.485.295.242.921
	SURPLUS/DEFISIT	- 105.905.781.114	83.797.545.030	- 22.822.649.253	- 32.536.213.083	5.492.809.741
3	PEMBIAYAAN					
A	Penerimaan Pembiayaan	219.050.727.587	143.099.446.473	120.792.491.503	69.969.842.685	32.866.807.668
B	Pengeluaran Pembiayaan	59.150.000.000	106.104.500.000	27.999.999.565	4.566.821.934	7.482.125.637
	PEMBIAYAAN NETO	159.900.727.587	36.994.946.473	92.792.491.938	65.403.020.751	25.384.682.031
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53.994.946.473	120.792.491.503	69.969.842.685	32.866.807.668	30.877.491.772

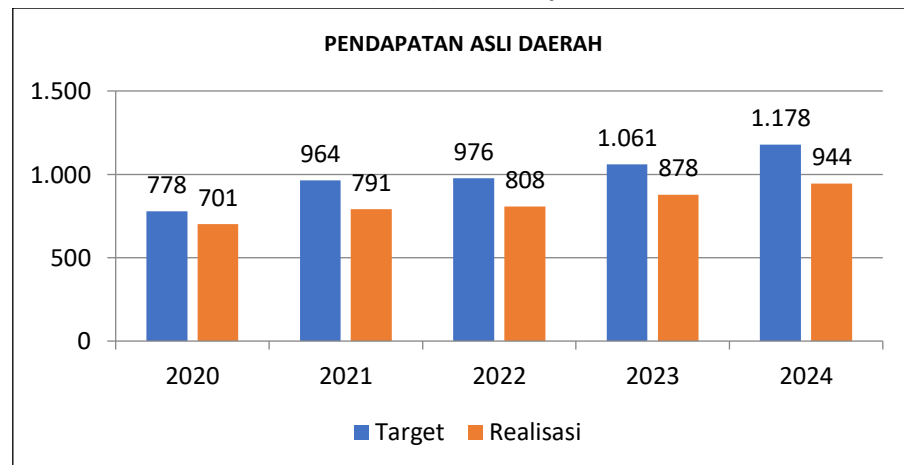
Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Serang, 2020–2024

Tabel diatas menunjukkan perkembangan APBD Kabupaten Serang pada periode tahun 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut total pendapatan daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3 persen per tahun. Sedangkan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pendapatan daerah yang mencapai rata-rata sebesar 2 persen, sebesar Rp. 2,96 trilyun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3,48 trilyun pada tahun 2024. Dari segi pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -14 persen, dari Rp. 65 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 25 miliar pada tahun 2024. Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah terlihat hampir setiap tahun terjadi defisit pada APBD Kabupaten Serang, kecuali pada tahun 2021 dan tahun 2024 yang mengalami surplus anggaran. Pada tahun 2021 dan tahun 2024 mengalami surplus anggaran dengan nilai anggaran sebesar yang mencapai Rp.83,79 miliar dan 5,49 miliar.

A. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang dalam kurun tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang relatif besar, yaitu dari sebesar Rp. 701,2 milyar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp. 944,2 miliar pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan perbandingannya dengan target tercantum pada grafik berikut.

Grafik 2.5. 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020– 2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: CALK BPKAD Kabupaten Serang, 2020-2024 (data diolah)

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun 2020-2024 sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, mencakup: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer, dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun 2020–2024 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel diatas didominasi dari pos Pendapatan Transfer. Proporsi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif. Proporsi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar 68%, dan mengalami kenaikan sampai sekitar 73% pada tahun 2024.

Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama sekitar 25% pada tahun 2020; dan naik menjadi sekitar 27% pada tahun 2024. Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan belum adanya peningkatan derajat Kemandirian

Kuangan Daerah (KKD). Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah proporsinya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) mengalami penurunan dari 7,6% pada tahun 2020 menjadi 0,31% pada tahun 2024.

B. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Serang menunjukkan besaran yang terus meningkat dalam kurun waktu 2020–2024. Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp.2.965 miliar dari target anggaran sebesar Rp. 3.145 miliar, naik menjadi sekitar Rp. 3.485 miliar dari target anggaran sebesar Rp.3.770 miliar pada tahun 2024.

Selama periode tahun 2020-2024 rencana belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka dibawah target 100 persen. Presentase realisasi belanja selama peridoe tersebut berkisar dari sebesar 93,38 persen sampai dengan 92,44 persen. Namun, selama periode tersebut, persentase realisasi belanja daerah Kabupaten Serang mengalami tren yang selalu meningkat.

C. Kinerja Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Serang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Perkembangan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang menunjukkan tren penurunan dari sebesar Rp.219 miliar pada tahun 2020, tahun 2023 sebesar Rp.69,96 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp.32,86 miliar.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah (KUD). Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Serang dialokasikan untuk: (i) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, (ii) Pembayaran Pokok Utang, dan (iii) Pemberian Pinjaman Daerah. Pada tahun 2020 pembiayaan daerah sebesar Rp. 59,15 miliar rupiah, pada tahun 2023 sebesar Rp.4,56 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp.7,48 miliar.

2.5.2 Neraca Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Neraca Daerah merupakan neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban (utang), dan Ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset meliputi seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah. Kewajiban merupakan hutang-hutang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sementara itu ekuitas dana merupakan kekayaan bersih dari pemerintah daerah yang didapatkan dari selisih antara aset dan kewajiban. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai ke tingkat rincian objek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus

dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa: (i) Aset, (ii) Kewajiban (utang), dan (iii) Ekuitas Dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Penggambaran Neraca Daerah mempunyai manfaat, antara lain:

1. Untuk mengetahui posisi aset, hutang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah;
2. Untuk mengetahui likuiditas atau ketersediaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan operasional pemerintahan; dan
3. Untuk menilai kemampuan keuangan jangka panjang atau kebutuhan investasi yang dilakukan.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama kurun waktu 2020–2024 dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.5. 2
Neraca Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	A. Aset Lancar	302.796.923.875,27	321.509.432.350,60	287.208.108.502,15	267.868.614.167,97	209.662.848.353,52
	B. Investasi Jangka Panjang	202.638.198.445,27	151.344.717.862,29	181.746.009.709,91	187.883.334.224,78	193.271.561.951,21
	C. Aset Tetap	3.225.582.584.805,67	3.825.458.244.966,58	4.094.777.104.021,12	4.129.583.131.742,55	4.201.664.442.044,33
	D. Aset Lainnya	123.839.963.691,91	146.719.035.078,55	168.602.147.594,45	204.921.636.418,39	304.328.131.913,40
	E. Properti Investasi					25.303.239.942
	JUMLAH ASET	3.854.857.670.818,12	4.445.031.430.258,02	4.732.333.369.827,63	4.790.256.716.553,69	4.934.230.224.204,46
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	61.832.257.290,18	165.089.323.653,07	95.497.861.778,45	116.995.351.294,00	148.357.705.087,67
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	61.832.257.290,18	165.089.323.653,07	95.497.861.778,45	116.995.351.294,00	148.357.705.087,67
3	EKUITAS					
	Ekuitas	3.793.025.413.527,94	4.279.942.106.604,95	4.636.835.508.049,18	4.673.261.365.259,69	4.785.872.519.116,79
	JUMLAH EKUITAS	3.793.025.413.527,94	4.279.942.106.604,95	4.636.835.508.049,18	4.673.261.365.259,69	4.785.872.519.116,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.854.857.670.818,12	4.445.031.430.258,02	4.732.333.369.827,63	4.790.256.716.553,69	4.934.230.224.204,46

Sumber: CALK BPKAD Kabupaten Serang, 2020-2024

2.5.3 Proyeksi Keuangan Daerah 5 Tahun 2025–2030

1) Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025–2029

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024, Pendapatan Daerah tahun 2025–2029 diharapkan dapat meningkat. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2025–2029, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
 - b. Meningkatkan retribusi daerah
 - c. Mengembangkan potensi daerah, seperti pariwisata dan UMKM.
 - d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).
 - e. Melakukan koordinasi aktif dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana transfer khusus.
 - f. Memperluas basis pajak dengan memasukan sektor- sektor baru ke dalam objek pajak serta menciptakan jenis- jenis retribusi baru yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah untuk sektor- sektor tertentu.
 - h. Memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - i. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
 - j. Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 - k. Melakukan inventarisasi dan penilaian aset daerah secara berkala.
 - l. Memanfaatkan aset daerah dalam meningkatkan PAD melalui sewa, kerjasama atau privatisasi.
2. Memanfaatkan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui:
 - a. Melakukan perhitungan potensi pajak daerah seakurat mungkin sehingga target PAD sama atau minimal mendekati potensi PAD.
 - b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala didukung dengan teknologi informasi yang terintegrasi dan menetapkan wajib pajak berdasarkan skala prioritas dilihat dari potensi dan kontribusinya.
 - c. Mencari wajib pajak baru dengan menelusuri lokasi untuk memperoleh data subjek/objek pajak baru yang belum terdaftar.
 - d. Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
 - e. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
 - f. Melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak dan retribusi yang terlambat atau menunggak pembayaran, dan melakukan pengenaan sanksi.

- g. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan “jemput bola” khususnya untuk wajib pajak potensial.
 - h. Memberlakukan reward dan punishment kepada wajib pajak dan petugas pemungutan pajak.
 - i. Melakukan investasi alat sehingga perhitungan dan pemungutan dapat dilakukan secara cepat, langsung dan akurat (online), antara lain alat tapping box (kotak perekaman).
 - j. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai urgensi pajak bagi pembangunan daerah.
 - k. Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 - l. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak dan retribusi.
 - m. Peningkatan pelayanan pajak melalui penetapan kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan secara online.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD.
 6. Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK-BLUD.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 disusun dengan berbasis pada asumsi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2020–2024 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BLUD serta trend unsur PAD lainnya.
2. Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Proyeksi perhitungan pendapatan dana transfer mengalami penurunan signifikan dari tahun 2025 ke 2026 disebabkan adanya kebijakan terkait pengurangan transfer keuangan ke daerah dan dana desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat. Adapun dana transfer pada tahun 2027 dan seterusnya diproyeksikan naik hanya pada angka 1 (satu) % saja. Hal ini disebabkan belum pastinya kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan dana transfer setelah tahun 2026. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2025–2029, telah diasumsikan dana transfer khusus, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan baseline DAK Tahun 2025. Asumsi proyeksi dana DAK dalam pendapatan transfer, selanjutnya disesuaikan dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2025–2029 dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2025–2029. Proyeksi DAK 2025–2029, dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi kombinasi sumber dana atas setiap program/kegiatan dan sub kegiatan, yang berpotensi akan didanai dari DAK (baik DAK Fisik ataupun DAK Non Fisik. Substansi belanja DAK berbasis proposal based, yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, pendapatan lain-lain atas investasi (dividen), pendapatan lain-lain atas kerja sama dan dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025–2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. 3
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025–2030

No	Uraian	Base Line Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Target 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN							
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	944.314.942.625	1.024.952.874.498	1.163.359.126.485	1.191.969.802.563	1.221.295.745.542	1.293.319.382.164	1.301.063.255.152
	Pendapatan Pajak Daerah	573.381.060.252	725.174.381.504	809.859.443.494	830.105.929.581	850.858.577.821	919.367.163.599	923.560.835.235
	Hasil Retribusi Daerah	336.443.197.168	252.193.558.920	245.778.394.367	251.922.854.226	258.220.925.582	260.803.134.838	263.411.166.186
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217	18.932.083.377	18.932.083.377	18.932.083.377	18.932.083.377	18.932.083.377	18.932.083.377
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.889.752.988	28.652.850.697	88.789.205.247	91.008.935.378	93.284.158.763	94.217.000.350	95.159.170.354
B	PENDAPATAN TRANSFER	2.535.579.868.449	2.482.925.368.577	2.022.704.325.955	2.066.711.316.198	2.063.360.682.907	2.083.994.289.736	2.104.834.232.633
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.274.102.342.000	1.857.292.639.000	1.899.645.512.373	1.894.624.221.044	1.913.570.463.254	1.932.706.167.887
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah		208.823.026.577	165.411.686.955	167.065.803.825	168.736.461.863	170.423.826.481	172.128.064.746
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.893.241.588	84.022.267.716	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000
	Pendapatan Hibah	10.893.241.588	11.425.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	72.597.267.716	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.490.788.052.662	3.591.900.510.791	3.197.863.452.440	3.270.481.118.760	3.296.456.428.449	3.389.113.671.900	3.417.697.487.785
2	BELANJA							
A	BELANJA OPERASI	2.561.521.309.939	2.794.558.412.192	2.641.639.128.375	2.602.639.128.375	2.616.564.484.337	2.677.564.484.337	2.656.148.300.222
	Belanja Pegawai	1.325.832.224.608	1.559.795.221.210	1.512.250.231.397	1.512.250.231.397	1.512.250.231.397	1.512.250.231.397	1.512.250.231.397
	Belanja Barang dan Jasa	1.050.074.683.873	1.085.815.521.591	1.058.912.508.978	1.058.912.508.978	1.058.912.508.978	1.083.912.508.978	1.105.092.971.266
	Belanja Bunga	0	306.250.000	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	179.022.715.458	138.848.424.791	59.716.388.000	20.716.388.000	34.641.743.962	70.641.743.962	28.045.097.559
	Belanja Bantuan Sosial	6.591.686.000	9.792.994.600	10.760.000.000	10.760.000.000	10.760.000.000	10.760.000.000	10.760.000.000
B	BELANJA MODAL	428.320.239.751	262.584.329.170	132.977.422.420	144.006.837.394	156.056.791.121	187.714.034.572	237.714.034.572
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	397.087.640	9.443.620.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
D	BELANJA TRANSFER	495.056.605.591	553.191.641.200	513.835.152.991	513.835.152.991	513.835.152.991	513.835.152.991	513.835.152.991
	Belanja Bagi Hasil		77.134.700.400	111.042.660.991	111.042.660.991	111.042.660.991	111.042.660.991	111.042.660.991
	Belanja Bantuan Keuangan		476.056.940.800	402.792.492.000	402.792.492.000	402.792.492.000	402.792.492.000	402.792.492.000

No	Uraian	Base Line Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Target 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH BELANJA	3.485.295.242.921	3.619.778.002.562	3.298.451.703.786	3.270.481.118.760	3.296.456.428.449	3.389.113.671.900	3.417.697.487.785
	SURPLUS / DEFISIT	5.492.809.741	-27.877.491.771	-100.588.251.346	0	0	0	0
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.866.807.668	65.877.491.772	100.588.251.346	-	0	0	0
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.482.125.637	38.000.000.000	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	25.384.682.031	27.877.491.772	100.588.251.346	-	0	0	0
	SILPA TAHUN BERJALAN	30.877.491.772	1	0	0	0	0	0

Sumber: Bapperida 2025, diolah

Tabel 2.5. 4 Proyeksi Kerangka Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025-2030 (dalam Rupiah)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
DINAS PENDIDIKAN	TOTAL PAGU PROGRAM	1.173.406.449.460	1.145.244.924.114	1.145.244.924.114	1.145.244.924.114	1.145.244.924.114	1.145.244.924.114
	TOTAL PAGU PRIORITAS	113.991.382.771	94.768.359.822	94.768.359.822	94.768.359.822	94.768.359.822	94.768.359.822
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	792.240.441.666	786.076.881.774	786.076.881.774	786.076.881.774	786.076.881.774	786.076.881.774
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PAGU PROGRAM	359.597.665.894	357.797.293.010	357.797.293.010	357.797.293.010	357.797.293.010	357.797.293.010
	PAGU PRIORITAS	93.891.002.471	94.497.092.592	94.497.092.592	94.497.092.592	94.497.092.592	94.497.092.592
	MDA, Ngaji, TPQ, MDTA (RA, MI, MTS)	35.779.250.000	45.300.600.000	45.300.600.000	45.300.600.000	45.300.600.000	45.300.600.000
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0	18.519.600.000	18.519.600.000	18.519.600.000	18.519.600.000	18.519.600.000
	Beasiswa PAUD, SD, SMP	4.396.376.000	4.347.438.000	4.347.438.000	4.347.438.000	4.347.438.000	4.347.438.000
	Rehab Ruang Sekolah dan Bangunan Pendukung Sekolah	4.079.092.471	23.362.588.592	23.362.588.592	23.362.588.592	23.362.588.592	23.362.588.592
	Sarana Prasarana Sekolah dan Pendukung Sekolah	49.636.284.000	2.966.866.000	2.966.866.000	2.966.866.000	2.966.866.000	2.966.866.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PAGU PROGRAM	434.468.300	161.896.530	161.896.530	161.896.530	161.896.530	161.896.530
	PAGU PRIORITAS	434.468.300	161.896.530	161.896.530	161.896.530	161.896.530	161.896.530
	Perda 7 2020 Takmiliyah	434.468.300	161.896.530	161.896.530	161.896.530	161.896.530	161.896.530
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PAGU PROGRAM	20.049.962.000	4.156.000	4.156.000	4.156.000	4.156.000	4.156.000
	PAGU PRIORITAS	19.632.250.000	0	0	0	0	0
	Insentif Guru NON PNS	19.632.250.000	0	0	0	0	0
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PAGU PROGRAM		12.030.000	12.030.000	12.030.000	12.030.000	12.030.000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PAGU PROGRAM	707.270.000	706.371.300	706.371.300	706.371.300	706.371.300	706.371.300
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PAGU PROGRAM	74.162.000	109.370.700	109.370.700	109.370.700	109.370.700	109.370.700
	PAGU PRIORITAS	33.662.000	109.370.700	109.370.700	109.370.700	109.370.700	109.370.700
	Optimalisasi Kesenian Tradisional	33.662.000	109.370.700	109.370.700	109.370.700	109.370.700	109.370.700
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PAGU PROGRAM	21.459.600	35.063.000	35.063.000	35.063.000	35.063.000	35.063.000
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PAGU PROGRAM	281.020.000	341.861.800	341.861.800	341.861.800	341.861.800	341.861.800

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
DINAS DINAS KESEHATAN	TOTAL PAGU PROGRAM	371.585.139.210	328.291.642.339	327.541.642.339	327.541.642.339	327.541.642.339	328.291.642.339
	TOTAL PAGU PRIORITAS	108.809.416.231	84.088.050.793	83.338.050.793	83.338.050.793	83.338.050.793	83.338.050.793
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	213.221.362.567	201.906.669.895	201.906.669.895	201.906.669.895	201.906.669.895	201.906.669.895
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	147.749.602.075	118.143.614.402	117.393.614.402	117.393.614.402	117.393.614.402	118.143.614.402
	PAGU PRIORITAS	102.237.016.231	80.695.650.793	79.945.650.793	79.945.650.793	79.945.650.793	79.945.650.793
	DAU Belanja Obat-obatan	12.427.284.972	9.125.573.000	9.125.573.000	9.125.573.000	9.125.573.000	9.125.573.000
	Obat-obatan Gizi	214.838.000	297.459.000	297.459.000	297.459.000	297.459.000	297.459.000
	Bagi Hasil Cukai Rokok BPJS Kes PBPB dan BP Pemda	54.100.200.000	38.800.125.000	38.800.125.000	38.800.125.000	38.800.125.000	38.800.125.000
	DAU BPJS Kes PBPB dan BP Pemda	26.293.187.200	26.999.884.200	26.999.884.200	26.999.884.200	26.999.884.200	26.999.884.200
	Pembangunan Gedung Kesehatan dan Penunjang	6.476.023.059	2.673.009.593	2.673.009.593	2.673.009.593	2.673.009.593	2.673.009.593
	Belanja Alat Kesehatan, Kedokteran dan Penunjang	960.883.000	1.022.000.000	1.022.000.000	1.022.000.000	1.022.000.000	1.022.000.000
	Jasa Tenaga Kesehatan	1.164.600.000	777.600.000	777.600.000	777.600.000	777.600.000	777.600.000
	Hibah Bidang Kesehatan	600.000.000	1.000.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PAGU PROGRAM	9.738.357.868	7.833.530.642	7.833.530.642	7.833.530.642	7.833.530.642	7.833.530.642
	PAGU PRIORITAS	6.572.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000
	Jasa Tenga Kesehatan	6.572.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000	3.392.400.000
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PAGU PROGRAM	515.866.200	350.569.100	350.569.100	350.569.100	350.569.100	350.569.100
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PAGU PROGRAM	359.950.500	57.258.300	57.258.300	57.258.300	57.258.300	57.258.300
1.02.07 PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	PAGU PROGRAM	-	-	-	-	-	-
RSDP	TOTAL PAGU PROGRAM	381.974.296.965	318.862.685.780	304.862.685.780	304.862.685.780	304.862.685.780	331.288.721.749
	PAGU PRIORITAS	92.504.751.780	105.504.751.780	91.504.751.780	91.504.751.780	91.504.751.780	117.930.787.749
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	321.364.975.017	303.862.685.780	303.862.685.780	303.862.685.780	303.862.685.780	303.862.685.780
	PAGU PRIORITAS	90.504.751.780	90.504.751.780	90.504.751.780	90.504.751.780	90.504.751.780	90.504.751.780

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan ASN BLUD Pegawai	55.772.089.000	55.772.089.000	55.772.089.000	55.772.089.000	55.772.089.000	55.772.089.000
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan Non ASN BLUD Barjas	34.732.662.780	34.732.662.780	34.732.662.780	34.732.662.780	34.732.662.780	34.732.662.780
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	60.609.321.948	15.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	27.426.035.969
	PAGU PRIORITAS	2.000.000.000	15.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	27.426.035.969
	Gedung Bangunan RS / Alat Kesehatan		14.000.000.000	0	0	0	26.000.000.000
	Jamian Kesehatan Kelas 3	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.426.035.969
DPUPR	TOTAL PAGU PROGRAM	169.007.036.067	133.996.096.915	127.080.390.526	148.725.799.492	163.707.282.931	222.080.390.526
	TOTAL PAGU PRIORITAS	72.288.038.714	84.155.584.032	70.295.826.933	88.090.515.900	97.945.106.935	152.945.106.936
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	36.670.427.094	33.818.163.318	33.818.163.318	33.818.163.318	33.818.163.318	33.818.163.318
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PAGU PROGRAM	5.507.193.940	2.778.698.000	2.778.698.000	2.778.698.000	2.778.698.000	2.778.698.000
	PAGU PRIORITAS	489.480.753	1.497.345.432	1.497.345.432	1.497.345.432	1.497.345.432	1.497.345.432
	Jaringan Irigas dan Pemeliharaannya	489.480.753	1.497.345.432	1.497.345.432	1.497.345.432	1.497.345.432	1.497.345.432
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PAGU PROGRAM	19.386.020.116	2.282.307.562	2.282.307.562	2.282.307.562	2.282.307.562	2.282.307.562
	PAGU PRIORITAS	3.692.346.365	1.647.700.000	1.647.700.000	1.647.700.000	1.647.700.000	1.647.700.000
	Jaringan Air Minum dan Pemeliharaannya	3.692.346.365	1.647.700.000	1.647.700.000	1.647.700.000	1.647.700.000	1.647.700.000
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PAGU PROGRAM	7.988.684.819	2.962.995.640	2.962.995.640	2.962.995.640	2.962.995.640	2.962.995.640
	PAGU PRIORITAS	6.462.267.877	2.913.720.000	2.913.720.000	2.913.720.000	2.913.720.000	2.913.720.000
	Pengadaan Gedung, Peralatan dan Pengolahan Sampah	6.462.267.877	2.913.720.000	2.913.720.000	2.913.720.000	2.913.720.000	2.913.720.000
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAGU PROGRAM	3.765.384.181	1.430.358.071	1.430.358.071	1.430.358.071	1.430.358.071	1.430.358.071
	PAGU PRIORITAS	959.157.831	632.300.000	632.300.000	632.300.000	632.300.000	632.300.000
	Pemeliharaan Pengolahan Air Limbah	959.157.831	632.300.000	632.300.000	632.300.000	632.300.000	632.300.000
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PAGU PROGRAM	3.874.792.543	2.445.106.338	2.445.106.338	2.445.106.338	2.445.106.338	2.445.106.338
	PAGU PRIORITAS	2.390.118.490	2.098.990.350	2.098.990.351	2.098.990.352	2.098.990.353	2.098.990.354

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase	2.390.118.490	2.098.990.350	2.098.990.351	2.098.990.352	2.098.990.353	2.098.990.354
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAGU PROGRAM	19.397.927.162	5.893.569.100	3.500.000.000	20.145.408.966	35.126.892.405	58.500.000.000
	PAGU PRIORITAS	10.316.928.985	5.256.000.000	2.350.720.000	20.145.408.966	30.000.000.000	55.000.000.000
	Bangunan Gedung dan Pemeliharaan	10.316.928.985	5.256.000.000	2.350.720.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Gedung Pemerintahan	0	0	0	0	0	50.000.000.000
	Bangunan Pusat Oleh-oleh dan Wisata 2027	0	0	0	15.145.408.966	0	0
	Bangunan Pusat Ekraf dan Budaya 2028	0	0	0	0	25.000.000.000	0
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PAGU PROGRAM	1.941.322.528	4.517.761.900	4.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	14.000.000.000
	PAGU PRIORITAS	731.389.825	4.239.000.000	2.100.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
	Fasos/Fasum Kecamatan dan Ruang Publik	731.389.825	4.239.000.000	2.100.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAGU PROGRAM	63.641.564.392	74.041.123.389	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	100.000.000.000
	PAGU PRIORITAS	47.147.548.588	65.870.528.250	59.155.051.150	59.155.051.150	59.155.051.150	89.155.051.150
	Bangun dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan	47.147.548.588	65.870.528.250	59.155.051.150	59.155.051.150	59.155.051.150	89.155.051.150
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAGU PROGRAM	2.948.301.396	696.302.640	1.105.313.640	1.105.313.640	1.105.313.640	1.105.313.640
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAGU PROGRAM	3.186.692.896	2.930.496.957	2.257.447.957	2.257.447.957	2.257.447.957	2.257.447.957
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PAGU PROGRAM	414.400.000	199.214.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PAGU PROGRAM	284.325.000	0	0	0	0	0
	PAGU PRIORITAS	98.800.000	0	0	0	0	0
	Lahan Persampahan / Fasilitas Lainnya	98.800.000	0	0	0	0	0
DPRKP	TOTAL PAGU PROGRAM	34.255.958.351	35.942.176.938	32.749.349.574	37.079.250.284	37.079.250.284	43.749.349.574
	TOTAL PAGU PRIORITAS	17.684.484.550	25.023.237.000	20.109.697.000	23.439.597.710	23.439.597.710	30.109.697.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	9.489.541.883	9.746.036.879	9.337.638.263	9.337.638.263	9.337.638.263	9.337.638.263
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PAGU PROGRAM	732.876.400	108.552.000	148.237.952	148.237.952	148.237.952	148.237.952
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PAGU PROGRAM	5.690.976.787	1.084.933.100	1.999.914.760	1.999.914.760	1.999.914.760	1.999.914.760

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	PAGU PRIORITAS	3.096.484.550	807.057.000	1.184.697.000	1.184.697.000	1.184.697.000	1.184.697.000
	Rehabilitasi kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan)	3.096.484.550	807.057.000	1.184.697.000	1.184.697.000	1.184.697.000	1.184.697.000
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PAGU PROGRAM	6.565.820.856	8.693.827.900	6.250.000.000	9.579.900.710	9.579.900.710	16.250.000.000
	PAGU PRIORITAS	5.828.000.000	8.260.000.000	5.725.000.000	9.054.900.710	9.054.900.710	15.725.000.000
	Bantuan Rutilahu	5.828.000.000	8.260.000.000	5.725.000.000	9.054.900.710	9.054.900.710	15.725.000.000
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PAGU PROGRAM	11.776.742.425	16.295.043.340	14.963.559.052	15.963.559.052	15.963.559.052	15.963.559.052
	PAGU PRIORITAS	8.760.000.000	15.956.180.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000
	Bangunan Fasilitas Umum, Sarpras dan Pemeliharaanya	8.760.000.000	15.956.180.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAGU PROGRAM	0	13.783.719	49.999.547	49.999.547	49.999.547	49.999.547
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
SATPOL PP	TOTAL PAGU PROGRAM	13.863.354.077	13.266.736.679	13.266.736.680	13.266.736.681	13.266.736.682	13.266.736.683
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	11.358.809.341	12.214.265.893	12.214.265.893	12.214.265.893	12.214.265.893	12.214.265.893
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PAGU PROGRAM	2.504.544.736	1.052.470.786	1.052.470.787	1.052.470.788	1.052.470.789	1.052.470.790
BPBD	TOTAL PAGU PROGRAM	17.074.467.337	15.293.193.436	15.293.193.437	15.293.193.438	22.793.193.437	15.293.193.438
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	7.500.000.000	0
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	10.470.259.335	10.163.834.236	10.163.834.236	10.163.834.236	10.163.834.236	10.163.834.236
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PAGU PROGRAM	3.069.490.406	2.178.097.344	2.178.097.344	2.178.097.344	2.178.097.345	2.178.097.346
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PAGU PROGRAM	3.534.717.596	2.951.261.856	2.951.261.857	2.951.261.858	10.451.261.856	2.951.261.856
	PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	7.500.000.000	0
	Pengadaan Kendaraan Kebakaran	0	0	0	0	7.500.000.000	0
DINAS SOSIAL	TOTAL PAGU PROGRAM	15.100.143.511	11.974.705.272	11.974.705.273	11.974.705.274	11.974.705.275	16.342.360.548

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	TOTAL PAGU PRIORITAS	5.528.451.600	4.021.953.000	4.021.953.000	4.021.953.000	4.021.953.000	8.217.555.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	7.611.326.383	7.127.223.972	7.127.223.972	7.127.223.972	7.127.223.972	7.121.652.148
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PAGU PROGRAM	1.044.973.200	898.126.200	898.126.201	898.126.202	898.126.203	689.471.100
	PAGU PRIORITAS	882.800.000	882.800.000	882.800.000	882.800.000	882.800.000	632.800.000
	Tenaga Ahli TKSK	382.800.000	382.800.000	382.800.000	382.800.000	382.800.000	382.800.000
	Hibah Karang Taruna	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	250.000.000
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PAGU PROGRAM	6.925.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.900.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PAGU PROGRAM	406.855.447	94.939.900	94.939.900	94.939.900	94.939.900	204.839.900
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PAGU PROGRAM	5.032.640.856	3.150.612.200	3.150.612.200	3.150.612.200	3.150.612.200	7.574.604.400
	TOTAL PAGU PRIORITAS	3.964.994.600	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	7.000.000.000
	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin/Rentan (UEP)	3.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	7.000.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (KUBE)	464.994.600	0	0	0	0	0
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	TOTAL PAGU PROGRAM	932.795.575	668.428.000	668.428.000	668.428.000	668.428.000	713.618.000
	PAGU PRIORITAS	680.657.000	639.153.000	639.153.000	639.153.000	639.153.000	584.755.000
	Pangan Siaga Bencana	574.911.000	533.268.400	533.268.400	533.268.400	533.268.400	542.770.000
	Barang Siaga Bencana	105.746.000	105.884.600	105.884.600	105.884.600	105.884.600	41.985.000
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		64.627.050	35.075.000	35.075.000	35.075.000	35.075.000	36.275.000
DISNAKERTRANS	TOTAL PAGU PROGRAM	10.061.612.077	11.519.457.782	11.519.457.782	11.519.457.782	11.519.457.782	11.519.457.782
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.017.017.615	1.826.020.000	1.826.020.000	1.826.020.000	1.826.020.000	1.826.020.000
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	8.289.950.327	8.336.713.917	8.336.713.917	8.336.713.917	8.336.713.917	8.336.713.917
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PAGU PROGRAM	95.866.250	130.900.000	130.900.000	130.900.000	130.900.000	130.900.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PAGU PROGRAM	884.861.956	2.114.195.900	2.114.195.900	2.114.195.900	2.114.195.900	2.114.195.900
	PAGU PRIORITAS	721.253.816	1.601.020.000	1.601.020.000	1.601.020.000	1.601.020.000	1.601.020.000
	Pelatihan Angkatan Kerja	721.253.816	1.601.020.000	1.601.020.000	1.601.020.000	1.601.020.000	1.601.020.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PAGU PROGRAM	452.233.984	665.453.500	665.453.500	665.453.500	665.453.500	665.453.500
	PAGU PRIORITAS	295.763.799	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000
	Job Fair	295.763.799	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PAGU PROGRAM	204.382.300	198.037.465	198.037.465	198.037.465	198.037.465	198.037.465
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PAGU PROGRAM	134.317.260	74.157.000	74.157.000	74.157.000	74.157.000	74.157.000
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PAGU PROGRAM						
DISKETAPANG DAN PERTANIAN	TOTAL PAGU PROGRAM	34.755.984.413	23.336.304.708	23.336.304.709	23.336.304.710	23.336.304.711	23.336.304.712
	TOTAL PAGU PRIORITAS	2.503.380.352	5.755.504.373	5.755.504.374	5.755.504.375	5.755.504.376	5.755.504.377
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	29.288.037.090	14.620.370.717	14.620.370.717	14.620.370.717	14.620.370.717	14.620.370.717
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PAGU PROGRAM	713.366.631	489.402.160	489.402.160	489.402.160	489.402.160	489.402.160
	PAGU PRIORITAS	575.775.592	385.677.160	385.677.160	385.677.160	385.677.160	385.677.160
	LPMDes (Lumbung Pangan Masyarakat Desa)	575.775.592	385.677.160	385.677.160	385.677.160	385.677.160	385.677.160
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	272.266.000	325.205.000	325.205.000	325.205.000	325.205.000	325.205.000
	PAGU PRIORITAS	0	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000
	Cadangan Beras	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	0	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PAGU PROGRAM	44.410.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PAGU PROGRAM	125.135.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	1.764.905.096	5.853.734.871	5.853.734.871	5.853.734.871	5.853.734.871	5.853.734.871
	PAGU PRIORITAS	1.390.619.000	5.090.539.213	5.090.539.213	5.090.539.213	5.090.539.213	5.090.539.213

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	Belanja Pupuk	400.000.000	3.519.143.613	3.519.143.613	3.519.143.613	3.519.143.613	3.519.143.613
	Bibit dan Sarana Ternak/Pertanian (Bawang Merah)	990.619.000	1.571.395.600	1.571.395.600	1.571.395.600	1.571.395.600	1.571.395.600
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	776.152.760	796.840.500	796.840.500	796.840.500	796.840.500	796.840.500
	PAGU PRIORITAS	472.375.760	0	0	0	0	0
	Belanja Pemeliharaan Irigasi	472.375.760	0	0	0	0	0
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PAGU PROGRAM	226.042.500	75.439.360	75.439.360	75.439.360	75.439.360	75.439.360
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	199.785.316	43.693.300	43.693.300	43.693.300	43.693.300	43.693.300
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	0	18.245.200	18.245.201	18.245.202	18.245.203	18.245.204
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PAGU PROGRAM	1.345.884.020	1.074.773.600	1.074.773.600	1.074.773.600	1.074.773.600	1.074.773.600
	PAGU PRIORITAS	64.610.000	14.288.000	14.288.001	14.288.002	14.288.003	14.288.004
	Belanja Bahan Bibit Tanaman	64.610.000	14.288.000	14.288.001	14.288.002	14.288.003	14.288.004
DLH	TOTAL PAGU PROGRAM	39.367.057.220	47.756.906.774	45.417.532.774	45.417.532.774	45.417.532.774	45.417.532.774
	TOTAL PAGU PRIORITAS	21.654.606.722	25.959.621.443	22.620.731.444	22.620.731.445	22.620.731.446	22.620.731.447
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	13.719.387.400	19.390.982.808	19.390.982.808	19.390.982.808	19.390.982.808	19.390.982.808
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PAGU PROGRAM	333.227.130	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PAGU PROGRAM	903.013.641	839.793.480	839.793.480	839.793.480	839.793.480	839.793.480
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PAGU PROGRAM	885.230.432	264.270.043	264.270.043	264.270.043	264.270.043	264.270.043
	PAGU PRIORITAS	400.000.000	186.400.000	186.400.000	186.400.000	186.400.000	186.400.000
	Belanja Bibit Tanaman	400.000.000	186.400.000	186.400.000	186.400.000	186.400.000	186.400.000
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PAGU PROGRAM	50.000.000	56.800.000	56.800.000	56.800.000	56.800.000	56.800.000
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PAGU PROGRAM	177.747.350	65.165.000	65.165.000	65.165.000	65.165.000	65.165.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	83.334.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	PAGU PRIORITAS	83.334.000	0	0	0	0	0
	Edukasi Persampahan edukasi dan penyediaan alat persampahan)	83.334.000	0	0	0	0	0
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	60.065.000	52.134.000	52.134.000	52.134.000	52.134.000	52.134.000
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PAGU PROGRAM	134.084.500	57.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PAGU PROGRAM	23.020.967.767	26.928.161.443	24.588.787.443	24.588.787.443	24.588.787.443	24.588.787.443
	PAGU PRIORITAS	21.171.272.722	25.773.221.443	22.434.331.444	22.434.331.445	22.434.331.446	22.434.331.447
	pembayaran pembuangan sampah ke TPA (Tipping Fee)	9.029.940.002	12.629.598.000	11.629.598.000	11.629.598.000	11.629.598.000	11.629.598.000
	Honor Petugas Persampahan	6.021.793.904	2.818.408.512	2.818.408.512	2.818.408.512	2.818.408.512	2.818.408.512
	Operasional Kendaraan Sampah	2.098.894.000	2.197.264.931	2.197.264.931	2.197.264.931	2.197.264.931	2.197.264.931
	Bahan Habis Pakai Persampahan	50.720.000	539.060.000	539.060.000	539.060.000	539.060.000	539.060.000
	Belanja Modal Alat Persampahan	2.923.212.000	5.250.000.000	5.250.000.001	5.250.000.002	5.250.000.003	5.250.000.004
	Pemeliharaan Kendaraan Persampahan	1.046.712.816	2.338.890.000	2.338.890.001	2.338.890.002	2.338.890.003	2.338.890.004
DISDUKCAPIL	TOTAL PAGU PROGRAM	20.284.523.800	18.266.322.195	18.266.322.195	18.266.322.195	18.266.322.195	18.266.322.195
	TOTAL PAGU PRIORITAS	2.927.901.390	1.049.067.000	2.055.155.000	2.055.155.000	2.055.155.000	2.055.155.000
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	20.055.264.000	18.125.657.595	18.125.657.595	18.125.657.595	18.125.657.595	18.125.657.595
	PAGU PRIORITAS	2.927.901.390	1.049.067.000	2.055.155.000	2.055.155.000	2.055.155.000	2.055.155.000
	Belanja modal Alat Pelayanan Kependudukan	1.157.286.390	220.335.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Belanja Bahan Habis Pakai Administrasi Kependudukan	1.770.615.000	828.732.000	1.555.155.000	1.555.155.000	1.555.155.000	1.555.155.000
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PAGU PROGRAM	41.960.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PAGU PROGRAM	26.442.800	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PAGU PROGRAM	132.237.000	72.735.600	72.735.600	72.735.600	72.735.600	72.735.600
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PAGU PROGRAM	28.620.000	7.929.000	7.929.000	7.929.000	7.929.000	7.929.000
DPMD	TOTAL PAGU PROGRAM	28.038.100.994	27.481.294.963	27.481.294.964	27.481.294.965	27.481.294.966	27.481.294.967

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	TOTAL PAGU PRIORITAS	17.535.640.882	18.271.298.000	18.271.298.000	18.271.298.000	18.271.298.000	18.271.298.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	8.111.347.174	8.365.201.363	8.365.201.363	8.365.201.363	8.365.201.363	8.365.201.363
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	PAGU PROGRAM	159.284.080	24.200.000	24.200.001	24.200.002	24.200.003	24.200.004
	PAGU PRIORITAS	159.284.080	24.200.000	24.200.000	24.200.000	24.200.000	24.200.000
	Supporting KPP Kemendes (Cikedung)	159.284.080	24.200.000	24.200.000	24.200.000	24.200.000	24.200.000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PAGU PROGRAM	83.738.100	35.165.000	35.165.000	35.165.000	35.165.000	35.165.000
	PAGU PRIORITAS	83.738.100	35.165.000	35.165.000	35.165.000	35.165.000	35.165.000
	Supporting KPP Kemendes (Cikedung)	83.738.100	35.165.000	35.165.000	35.165.000	35.165.000	35.165.000
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PAGU PROGRAM	8.027.265.532	7.231.191.600	7.231.191.600	7.231.191.600	7.231.191.600	7.231.191.600
	PAGU PRIORITAS	6.143.939.032	6.427.896.000	6.427.896.000	6.427.896.000	6.427.896.000	6.427.896.000
	BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.540.739.032	5.051.696.000	5.051.696.000	5.051.696.000	5.051.696.000	5.051.696.000
	Pilkades	0	198.000.000	198.000.000	198.000.000	198.000.000	198.000.000
	PAM Pilkades	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000
	Pembinaan dan Pelatihan Adminstrasi Desa	603.200.000	898.200.000	898.200.000	898.200.000	898.200.000	898.200.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PAGU PROGRAM	11.656.466.108	11.825.537.000	11.825.537.000	11.825.537.000	11.825.537.000	11.825.537.000
	PAGU PRIORITAS	11.148.679.670	11.784.037.000	11.784.037.000	11.784.037.000	11.784.037.000	11.784.037.000
	Reward Kader Posyandu	9.228.000.000	9.228.000.000	9.228.000.000	9.228.000.000	9.228.000.000	9.228.000.000
	PKK	548.151.500	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	BUMDESMA	224.918.350	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	TTG	106.305.800	38.101.000	38.101.000	38.101.000	38.101.000	38.101.000
	LKBB	1.041.304.020	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Belanja JKK dan JKM	373.734.000	1.494.936.000	1.494.936.000	1.494.936.000	1.494.936.000	1.494.936.000
DKBP3A	TOTAL PAGU PROGRAM	32.597.176.629	25.986.885.523	25.986.885.524	25.986.885.525	25.986.885.526	25.986.885.527
	TOTAL PAGU PRIORITAS	400.000.000	300.300.000	300.300.000	300.300.000	300.300.000	300.300.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	9.565.260.838	10.583.139.284	10.583.139.284	10.583.139.284	10.583.139.284	10.583.139.284
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PAGU PROGRAM	195.752.950	485.999.472	485.999.472	485.999.472	485.999.472	485.999.472
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PAGU PROGRAM	225.639.975	118.560.000	118.560.000	118.560.000	118.560.000	118.560.000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PAGU PROGRAM	19.301.325	49.999.984	49.999.984	49.999.984	49.999.984	49.999.984
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PAGU PROGRAM	2.820.750	11.999.763	11.999.763	11.999.763	11.999.763	11.999.763
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PAGU PROGRAM	654.903.100	26.455.000	26.455.000	26.455.000	26.455.000	26.455.000
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PAGU PROGRAM	618.870.460	627.509.122	627.509.122	627.509.122	627.509.122	627.509.122
	PAGU PRIORITAS	400.000.000	300.300.000	300.300.000	300.300.000	300.300.000	300.300.000
	UPTD PPA	200.000.000	250.300.000	250.300.000	250.300.000	250.300.000	250.300.000
	Kabupaten Serang Layak Anak	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PAGU PROGRAM	767.836.750	473.735.850	473.735.850	473.735.850	473.735.850	473.735.850
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PAGU PROGRAM	11.981.525.481	5.274.487.048	5.274.487.048	5.274.487.048	5.274.487.048	5.274.487.048
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PAGU PROGRAM	8.565.265.000	8.335.000.000	8.335.000.001	8.335.000.002	8.335.000.003	8.335.000.004
DISHUB	TOTAL PAGU PROGRAM	45.476.563.866	43.535.158.011	43.535.158.011	43.535.158.011	43.535.158.011	43.535.158.011
	TOTAL PAGU PRIORITAS	22.234.312.698	20.355.023.609	20.355.023.609	20.355.023.609	20.355.023.609	20.355.023.609
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	14.052.786.171	14.424.634.402	14.424.634.402	14.424.634.402	14.424.634.402	14.424.634.402
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAGU PROGRAM	27.964.186.135	26.064.883.169	26.064.883.169	26.064.883.169	26.064.883.169	26.064.883.169
	PAGU PRIORITAS	22.234.312.698	20.355.023.609	20.355.023.609	20.355.023.609	20.355.023.609	20.355.023.609
	Pengadaan PJU	9.606.820.000	4.618.740.000	4.618.740.000	4.618.740.000	4.618.740.000	4.618.740.000
	Pemeliharaan PJU	1.857.660.000	5.750.934.000	5.750.934.000	5.750.934.000	5.750.934.000	5.750.934.000
	Pengadaan Rambu-Rambu	628.660.000	257.088.000	257.088.000	257.088.000	257.088.000	257.088.000
	Pemeliharaan Rambu-rambu	632.617.522	456.929.168	456.929.168	456.929.168	456.929.168	456.929.168
	Listrik PJU BPJT	9.508.555.176	9.985.349.609	9.985.349.609	9.985.349.609	9.985.349.609	9.985.349.609

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAGU PROGRAM	1.339.440.160	995.065.944	995.065.944	995.065.944	995.065.944	995.065.944
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	PAGU PROGRAM	13.705.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAGU PROGRAM	2.106.446.400	2.050.274.496	2.050.274.496	2.050.274.496	2.050.274.496	2.050.274.496
DISKOMINFOSATIK	TOTAL PAGU PROGRAM	23.974.532.108	14.181.109.638	14.181.109.638	14.181.109.638	14.181.109.638	14.181.109.638
	TOTAL PAGU PRIORITAS	11.041.252.000	4.388.386.000	4.388.386.000	4.388.386.000	4.388.386.000	4.388.386.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	9.717.262.074	8.046.484.426	8.046.484.426	8.046.484.426	8.046.484.426	8.046.484.426
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PAGU PROGRAM	8.198.974.180	3.369.940.904	3.369.940.904	3.369.940.904	3.369.940.904	3.369.940.904
	PAGU PRIORITAS	7.003.500.000	2.716.010.000	2.716.010.000	2.716.010.000	2.716.010.000	2.716.010.000
	PPID dan Kanal Pengaduan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Media Nasional, Luar Ruangan dan Online	6.257.500.000	2.121.500.000	2.121.500.000	2.121.500.000	2.121.500.000	2.121.500.000
	Publikasi	196.000.000	94.510.000	94.510.000	94.510.000	94.510.000	94.510.000
	Serang Gawe	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PAGU PROGRAM	5.246.636.014	2.487.282.404	2.487.282.404	2.487.282.404	2.487.282.404	2.487.282.404
	PAGU PRIORITAS	4.037.752.000	1.672.376.000	1.672.376.000	1.672.376.000	1.672.376.000	1.672.376.000
	Internet Gratis Ruang Publik (smart city)	4.000.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000
	Pengembangan Aplikasi E-Gov (Lisensi)	37.752.000	256.376.000	256.376.000	256.376.000	256.376.000	256.376.000
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PAGU PROGRAM	524.187.936	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PAGU PROGRAM	287.471.904	240.401.904	240.401.904	240.401.904	240.401.904	240.401.904
DISKOUOPERINDAG	TOTAL PAGU PROGRAM	18.434.970.721	15.423.581.874	15.423.581.874	15.423.581.874	15.423.581.874	15.423.581.874
	TOTAL PAGU PRIORITAS	3.515.289.340	2.713.792.000	2.713.792.000	2.713.792.000	2.713.792.000	2.713.792.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	11.883.789.911	12.093.602.645	12.093.602.645	12.093.602.645	12.093.602.645	12.093.602.645
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PAGU PROGRAM	126.043.500	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PAGU PROGRAM	150.610.000	66.299.744	66.299.744	66.299.744	66.299.744	66.299.744
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PAGU PROGRAM	41.090.000	12.705.200	12.705.200	12.705.200	12.705.200	12.705.200
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PAGU PROGRAM	1.045.255.500	53.792.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000
	PAGU PRIORITAS	662.000.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000
	Dukungan Kopdes Merah Putih	662.000.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000	53.792.000
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PAGU PROGRAM	54.000.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PAGU PROGRAM	1.900.569.524	199.962.313	199.962.313	199.962.313	199.962.313	199.962.313
	PAGU PRIORITAS	1.684.020.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi UMKM Pelaku UMKM	1.684.020.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PAGU PROGRAM	277.240.200	1.521.721.372	1.521.721.372	1.521.721.372	1.521.721.372	1.521.721.372
	PAGU PRIORITAS	123.900.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000
	Pelatihan UMKM Pelaku UMKM	123.900.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000
2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	PAGU PROGRAM		0	0	0	0	0
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PAGU PROGRAM	4.250.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PAGU PROGRAM	954.020.744	30.822.600	30.822.600	30.822.600	30.822.600	30.822.600
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PAGU PROGRAM	160.490.850	63.171.000	63.171.000	63.171.000	63.171.000	63.171.000
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PAGU PROGRAM	510.038.920	196.575.000	196.575.000	196.575.000	196.575.000	196.575.000
	PAGU PRIORITAS	410.200.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Pameran Trade Expo Kab. Serang	410.200.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PAGU PROGRAM	136.744.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PAGU PROGRAM	196.169.340	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	PAGU PRIORITAS	196.169.340	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000
	Pameran APKASI	196.169.340	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PAGU PROGRAM	958.720.032	823.880.000	823.880.000	823.880.000	823.880.000	823.880.000
	PAGU PRIORITAS	439.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	Pelatihan Sumber Daya Industri	335.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	Pameran Dekranasda	104.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PAGU PROGRAM	16.750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PAGU PROGRAM	19.188.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
DPMPTSP	TOTAL PAGU PROGRAM	14.918.476.033	13.851.824.773	13.851.824.774	13.851.824.775	13.851.824.776	13.851.824.777
	TOTAL PAGU PRIORITAS	70.750.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU PROGRAM	13.865.132.583	13.165.724.273	13.165.724.273	13.165.724.273	13.165.724.273	13.165.724.273
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	379.314.375	157.994.400	157.994.400	157.994.400	157.994.400	157.994.400
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	70.750.000	134.704.000	134.704.001	134.704.002	134.704.003	134.704.004
	PAGU PRIORITAS	70.750.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Pameran Penanaman Modal	70.750.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	127.805.000	84.957.000	84.957.000	84.957.000	84.957.000	84.957.000
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	281.534.200	125.844.100	125.844.100	125.844.100	125.844.100	125.844.100
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	193.939.875	182.601.000	182.601.000	182.601.000	182.601.000	182.601.000
DISPORAPAR	TOTAL PAGU PROGRAM	15.619.983.423	12.979.779.538	12.207.102.253	12.207.102.254	12.207.102.255	12.207.102.256
	TOTAL PAGU PRIORITAS	7.519.100.000	6.016.200.000	5.016.200.001	5.016.200.002	5.016.200.003	5.616.200.004
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	6.350.499.323	5.956.141.299	5.956.141.299	5.956.141.299	5.956.141.299	5.956.141.299
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PAGU PROGRAM	546.553.000	316.605.000	316.605.001	316.605.002	316.605.003	316.605.004
	PAGU PRIORITAS	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	Hibah KNPI	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PAGU PROGRAM	6.397.562.800	5.451.116.334	4.678.439.048	4.678.439.048	4.678.439.048	4.678.439.048
	PAGU PRIORITAS	6.190.300.000	5.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.800.000.000
	Hibah KONI	5.600.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.600.000.000
	Hibah KORMI	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Bonus Atlet	390.300.000	0	0	0	0	0
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PAGU PROGRAM	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	PAGU PRIORITAS	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Hibah Pramuka	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAGU PROGRAM	1.131.659.800	421.559.505	421.559.505	421.559.505	421.559.505	421.559.505
	PAGU PRIORITAS	297.000.000	127.700.000	127.700.000	127.700.000	127.700.000	127.700.000
	Penetapan Integrasi Wisata Halal dan Religi, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Bantuan Sarpras Pariwisata, Sosialisasi Daya Tarik Wisata/ Desa Wisata	297.000.000	127.700.000	127.700.000	127.700.000	127.700.000	127.700.000
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAGU PROGRAM	689.028.500	279.182.400	279.182.400	279.182.400	279.182.400	279.182.400
	PAGU PRIORITAS	437.300.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
	Pengelolaan Media Pariwisata dan Ekraf (Influencer dan penyelenggaraan acara)	437.300.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAGU PROGRAM	14.580.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAGU PROGRAM	240.100.000	248.675.000	248.675.000	248.675.000	248.675.000	248.675.000
	PAGU PRIORITAS	94.500.000	42.500.000	42.500.001	42.500.002	42.500.003	42.500.004
	Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	94.500.000	42.500.000	42.500.001	42.500.002	42.500.003	42.500.004
DPKD	TOTAL PAGU PROGRAM	20.904.578.679	8.155.664.253	8.155.664.253	8.155.664.253	8.155.664.253	8.155.664.253
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	9.649.013.521	7.677.443.538	7.677.443.538	7.677.443.538	7.677.443.538	7.677.443.538

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAGU PROGRAM	10.986.238.650	313.346.263	313.346.263	313.346.263	313.346.263	313.346.263
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PAGU PROGRAM		16.573.752	16.573.752	16.573.752	16.573.752	16.573.752
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAGU PROGRAM	259.276.560	146.300.700	146.300.700	146.300.700	146.300.700	146.300.700
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PAGU PROGRAM	10.049.948	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PAGU PROGRAM		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DINAS PERIKANAN	TOTAL PAGU PROGRAM	14.022.880.689	13.374.745.129	13.374.745.129	13.374.745.129	13.374.745.129	13.374.745.129
	TOTAL PAGU PRIORITAS	2.651.198.051	1.912.526.688	1.912.526.689	1.912.526.690	1.912.526.691	1.912.526.692
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	9.607.178.748	10.546.381.734	10.546.381.734	10.546.381.734	10.546.381.734	10.546.381.734
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAGU PROGRAM	709.059.036	609.260.156	609.260.156	609.260.156	609.260.156	609.260.156
	PAGU PRIORITAS	105.707.000	359.404.500	359.404.500	359.404.500	359.404.500	359.404.500
	Pengembangan Nelayan Kecil dan Bantuan Sarpras	105.707.000	359.404.500	359.404.500	359.404.500	359.404.500	359.404.500
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAGU PROGRAM	3.174.133.345	2.085.749.757	2.085.749.757	2.085.749.757	2.085.749.757	2.085.749.757
	PAGU PRIORITAS	2.247.559.691	1.529.726.106	1.529.726.106	1.529.726.106	1.529.726.106	1.529.726.106
	Pelatihan Gapokdakan dan Bantuan Sarpras	2.247.559.691	1.529.726.106	1.529.726.106	1.529.726.106	1.529.726.106	1.529.726.106
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU PROGRAM	67.395.000	11.970.400	11.970.400	11.970.400	11.970.400	11.970.400
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAGU PROGRAM	465.114.560	121.383.082	121.383.082	121.383.082	121.383.082	121.383.082
	PAGU PRIORITAS	297.931.360	23.396.082	23.396.083	23.396.084	23.396.085	23.396.086
	Pembinaan Ijin Usaha, Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Fasilitas Usaha Mikro Perikanan	297.931.360	23.396.082	23.396.083	23.396.084	23.396.085	23.396.086
SETDA	TOTAL PAGU PROGRAM	82.160.454.166	73.072.822.510	73.072.822.510	73.072.822.510	73.072.822.510	80.654.292.251
	TOTAL PAGU PRIORITAS	6.875.000.000	7.489.000.000	7.489.000.001	7.489.000.002	7.489.000.003	12.150.000.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH							
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	66.140.675.541	60.242.278.100	60.242.278.100	60.242.278.100	60.242.278.100	63.808.047.140

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	3.500.000.000
	Fasilitasi dan Operasional KD/WKD dan Sekretariat Daerah (umum dan faspim tambahan 1,5M)	0	0	0	0	0	1.500.000.000
	Pelantikan KD/WKD						2.000.000.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAGU PROGRAM	12.581.924.270	11.325.202.810	11.325.202.810	11.325.202.810	11.325.202.810	14.040.755.700
	PAGU PRIORITAS	6.725.000.000	7.425.000.000	7.425.000.000	7.425.000.000	7.425.000.000	8.500.000.000
	Belanja Tenaga Ahli Bantuan Hukum	1.160.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000
	Honorarium Keterangan Ahli (Banhuk)	414.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	500.000.000
	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	100.400.000	0	0	0	0	0
	Hibah Kesra/MTQ dll	4.370.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000
	Hibah Beasiswa Lanjutan	680.600.000	0	0	0	0	0
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM	3.437.854.355	1.505.341.600	1.505.341.600	1.505.341.600	1.505.341.600	2.805.489.411
	PAGU PRIORITAS	150.000.000	64.000.000	64.000.001	64.000.002	64.000.003	150.000.000
	TPID	150.000.000	64.000.000	64.000.001	64.000.002	64.000.003	150.000.000
SET DPRD	TOTAL PAGU PROGRAM	113.332.140.326	123.464.984.877	123.464.984.878	123.464.984.879	123.464.984.880	124.025.836.735
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	3.000.000.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD							
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	62.857.155.798	69.129.547.805	69.129.547.805	69.129.547.805	69.129.547.805	69.690.399.660
	PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	3.000.000.000
	Pelantikan DPRD						2.000.000.000
	Pelantikan KD/WKD						1.000.000.000
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PAGU PROGRAM	50.474.984.528	54.335.437.072	54.335.437.073	54.335.437.074	54.335.437.075	54.335.437.075
BAPPERIDA	TOTAL PAGU PROGRAM	18.369.468.213	15.402.096.390	15.402.096.390	15.402.096.390	15.402.096.390	15.402.096.390
	TOTAL PAGU PRIORITAS	2.598.780.000	929.785.477	929.785.477	929.785.477	929.785.477	929.785.477
5.01 PERENCANAAN							
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	12.668.891.603	12.276.164.080	12.276.164.080	12.276.164.080	12.276.164.080	12.276.164.080

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU PROGRAM	3.267.444.496	1.581.262.381	1.581.262.381	1.581.262.381	1.581.262.381	1.581.262.381
	PAGU PRIORITAS	2.248.780.000	929.785.477	929.785.477	929.785.477	929.785.477	929.785.477
	Optimalisasi Perencanaan Pengendalian	1.354.204.496	929.785.477	929.785.477	929.785.477	929.785.477	929.785.477
	Dokrenda RKPD dan RPJMD	894.575.504	0	0	0	0	0
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU PROGRAM	1.338.414.014	720.090.929	720.090.929	720.090.929	720.090.929	720.090.929
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PAGU PROGRAM	1.094.718.100	0	0	0	0	0
	PAGU PRIORITAS	350.000.000	0	0	0	0	0
	Dukungan Data RPJMD (Indeks Kebahagiaan)	350.000.000	0	0	0	0	0
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PAGU PROGRAM	0	824.579.000	824.579.000	824.579.000	824.579.000	824.579.000
	PAGU PRIORITAS	0	200.000.000	200.000.001	200.000.002	200.000.003	200.000.004
	Dukungan Data RPJMD (Indeks Kebahagiaan)	0	200.000.000	200.000.001	200.000.002	200.000.003	200.000.004
5.02 KEUANGAN							
BPKAD	TOTAL PAGU PROGRAM	618.865.521.260	575.669.736.585	575.669.736.585	575.669.736.585	575.669.736.585	575.669.736.585
	TOTAL PAGU PRIORITAS	571.274.621.200	534.250.472.991	534.250.472.991	534.250.472.991	534.250.472.991	534.250.472.991
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	42.783.139.710	41.946.271.520	41.946.271.520	41.946.271.520	41.946.271.520	41.946.271.520
	PAGU PRIORITAS	7.920.360.000	9.802.320.000	9.802.320.000	9.802.320.000	9.802.320.000	9.802.320.000
	Sewa Kendaraan Dinas	7.920.360.000	9.802.320.000	9.802.320.000	9.802.320.000	9.802.320.000	9.802.320.000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PAGU PROGRAM	572.695.708.050	531.553.702.765	531.553.702.765	531.553.702.765	531.553.702.765	531.553.702.765
	PAGU PRIORITAS	563.354.261.200	524.448.152.991	524.448.152.991	524.448.152.991	524.448.152.991	524.448.152.991
	Fasilitasi TAPD	719.000.000	613.000.000	613.000.000	613.000.000	613.000.000	613.000.000
	BTT	9.443.620.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	DD, ADD, BKK, BHPRD	553.191.641.200	513.835.152.991	513.835.152.991	513.835.152.991	513.835.152.991	513.835.152.991
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PAGU PROGRAM	3.386.673.500	2.169.762.300	2.169.762.300	2.169.762.300	2.169.762.300	2.169.762.300
BAPENDA	TOTAL PAGU PROGRAM	68.856.600.164	58.356.803.206	58.356.803.206	58.356.803.206	58.356.803.206	58.356.803.206
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.484.486.000	1.485.388.000	1.485.388.000	1.485.388.000	1.485.388.000	1.485.388.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	61.416.537.542	52.438.969.506	52.438.969.506	52.438.969.506	52.438.969.506	52.438.969.506
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PAGU PROGRAM	7.440.062.622	5.917.833.700	5.917.833.700	5.917.833.700	5.917.833.700	5.917.833.700
	PAGU PRIORITAS	1.484.486.000	1.485.388.000	1.485.388.000	1.485.388.000	1.485.388.000	1.485.388.000
	Belanja Barang Untuk Masyarakat	187.554.000	417.028.000	417.028.000	417.028.000	417.028.000	417.028.000
	Aset Tak Berwujud (Software)	700.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	Souvenir	297.072.000	168.500.000	168.500.000	168.500.000	168.500.000	168.500.000
	Pajak Award	299.860.000	299.860.000	299.860.000	299.860.000	299.860.000	299.860.000
BKPSDM	TOTAL PAGU PROGRAM	24.896.015.829	11.163.405.015	11.163.405.015	11.163.405.015	11.163.405.015	11.163.405.015
	TOTAL PAGU PRIORITAS	12.365.054.202	1.866.543.000	1.866.543.001	1.866.543.002	1.866.543.003	1.866.543.004
5.03 KEPEGAWAIAN							
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	17.668.553.629	8.266.703.365	8.266.703.365	8.266.703.365	8.266.703.365	8.266.703.365
	PAGU PRIORITAS	8.014.442.202	194.040.000	194.040.000	194.040.000	194.040.000	194.040.000
	Gaji P3K	8.014.442.202	194.040.000	194.040.000	194.040.000	194.040.000	194.040.000
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAGU PROGRAM	4.406.808.200	1.654.214.250	1.654.214.250	1.654.214.250	1.654.214.250	1.654.214.250
	PAGU PRIORITAS	1.766.978.000	621.150.000	621.150.000	621.150.000	621.150.000	621.150.000
	Pengadaan ASN dan Promosi Mutasi ASN	1.766.978.000	621.150.000	621.150.000	621.150.000	621.150.000	621.150.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PAGU PROGRAM	2.820.654.000	1.242.487.400	1.242.487.400	1.242.487.400	1.242.487.400	1.242.487.400
	PAGU PRIORITAS	2.583.634.000	1.051.353.000	1.051.353.001	1.051.353.002	1.051.353.003	1.051.353.004
	Diklat ASN	2.583.634.000	1.051.353.000	1.051.353.001	1.051.353.002	1.051.353.003	1.051.353.004
INSPEKTORAT	TOTAL PAGU PROGRAM	26.148.652.326	29.430.194.028	29.430.194.029	29.430.194.030	29.430.194.031	29.430.194.032
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.644.948.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH							
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	23.834.872.026	26.267.352.028	26.267.352.028	26.267.352.028	26.267.352.028	26.267.352.028
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PAGU PROGRAM	1.644.948.000	2.546.155.000	2.546.155.001	2.546.155.002	2.546.155.003	2.546.155.004
	PAGU PRIORITAS	1.644.948.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengawasan dan Monitoring Kinerja Perangkat Daerah	1.644.948.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PAGU PROGRAM	668.832.300	616.687.000	616.687.000	616.687.000	616.687.000	616.687.000
BAKESBANGPOL	TOTAL PAGU PROGRAM	54.149.729.200	11.208.150.730	11.208.150.730	11.208.150.730	81.383.910.731	12.738.506.882
	TOTAL PAGU PRIORITAS	44.993.152.000	4.690.093.000	4.690.093.001	4.690.093.002	74.690.093.003	5.190.093.004
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK --> Unsur Pemerintahan Umum							
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	6.525.154.700	5.955.552.730	5.955.552.730	5.955.552.730	5.955.552.730	6.573.998.680
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PAGU PROGRAM	2.467.518.200	1.131.368.000	1.131.368.000	1.131.368.000	1.131.368.000	1.867.518.200
	PAGU PRIORITAS	1.400.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
	Paskibra	1.400.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	HANI	0	0	0	0	0	500.000.000
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PAGU PROGRAM	42.890.171.500	2.736.143.000	2.736.143.000	2.736.143.000	72.911.903.000	2.911.903.000
	PAGU PRIORITAS	42.240.652.000	2.661.903.000	2.661.903.000	2.661.903.000	72.661.903.000	2.661.903.000
	Hibah Banparpol	2.661.903.000	2.661.903.000	2.661.903.000	2.661.903.000	2.661.903.000	2.661.903.000
	Hibah Pileg Pilkada dan PAM	39.578.749.000	0	0	0	70.000.000.000	0
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PAGU PROGRAM	434.110.000	52.103.000	52.103.000	52.103.000	52.103.001	52.103.002
	PAGU PRIORITAS	300.000.000	0	0	0	0	0
	Pembinaan Ormas	300.000.000	0	0	0	0	0
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PAGU PROGRAM	777.406.800	185.905.000	185.905.000	185.905.000	185.905.000	185.905.000
	PAGU PRIORITAS	350.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	Hibah FKUB	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	IKUB	150.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PAGU PROGRAM	1.055.368.000	1.147.079.000	1.147.079.000	1.147.079.000	1.147.079.000	1.147.079.000
	PAGU PRIORITAS	702.500.000	908.190.000	908.190.001	908.190.002	908.190.003	908.190.004
	Fasilitasi FORKOPIMDA	702.500.000	908.190.000	908.190.001	908.190.002	908.190.003	908.190.004
7.01 KECAMATAN							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
1. KECAMATAN ANYAR	TOTAL PAGU PROGRAM	5.171.855.020	6.026.607.248	6.026.607.248	6.026.607.248	6.026.607.248	6.026.607.248
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.627.647.056	5.202.583.648	5.202.583.648	5.202.583.648	5.202.583.648	5.202.583.648
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.181.504.144	517.033.600	517.033.600	517.033.600	517.033.600	517.033.600
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		112.337.020	55.020.000	55.020.000	55.020.000	55.020.000	55.020.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.538.000	22.180.000	22.180.000	22.180.000	22.180.000	22.180.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		179.955.000	179.790.000	179.790.000	179.790.000	179.790.000	179.790.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		55.873.800	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. KECAMATAN BANDUNG	TOTAL PAGU PROGRAM	3.303.121.912	3.461.038.760	3.461.038.761	3.461.038.762	3.461.038.763	3.461.038.764
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.109.678.912	3.126.334.760	3.126.334.760	3.126.334.760	3.126.334.760	3.126.334.760
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		69.527.000	55.483.000	55.483.000	55.483.000	55.483.000	55.483.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		61.247.000	63.840.000	63.840.000	63.840.000	63.840.000	63.840.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		51.269.000	198.981.000	198.981.000	198.981.000	198.981.000	198.981.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11.400.000	11.400.000	11.400.001	11.400.002	11.400.003	11.400.004
3. KECAMATAN BAROS	TOTAL PAGU PROGRAM	4.530.783.756	4.384.681.328	4.384.681.328	4.384.681.328	4.384.681.328	4.384.681.328
	TOTAL PAGU PRIORITAS	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.297.735.340	3.548.664.928	3.548.664.928	3.548.664.928	3.548.664.928	3.548.664.928
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		868.670.416	544.302.800	544.302.800	544.302.800	544.302.800	544.302.800
	Persampahan & Lingkungan 2030	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		101.639.000	50.281.500	50.281.500	50.281.500	50.281.500	50.281.500

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9.823.000	16.352.600	16.352.600	16.352.600	16.352.600	16.352.600
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		175.228.000	189.426.900	189.426.900	189.426.900	189.426.900	189.426.900
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		77.688.000	35.652.600	35.652.600	35.652.600	35.652.600	35.652.600
4. KECAMATAN BINUANG	TOTAL PAGU PROGRAM	3.126.868.592	3.540.041.536	3.540.041.536	3.540.041.536	3.540.041.536	3.540.041.536
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.854.688.992	2.999.506.136	2.999.506.136	2.999.506.136	2.999.506.136	2.999.506.136
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67.629.200	130.740.800	130.740.800	130.740.800	130.740.800	130.740.800
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		51.664.400	83.677.200	83.677.200	83.677.200	83.677.200	83.677.200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29.942.000	17.479.200	17.479.200	17.479.200	17.479.200	17.479.200
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		50.983.000	208.638.200	208.638.200	208.638.200	208.638.200	208.638.200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		71.961.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5. KECAMATAN BOJONEGARA	TOTAL PAGU PROGRAM	3.291.673.666	3.638.961.904	3.638.961.904	3.638.961.904	3.638.961.904	3.638.961.904
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.098.978.866	3.372.038.104	3.372.038.104	3.372.038.104	3.372.038.104	3.372.038.104
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100.605.800	95.556.800	95.556.800	95.556.800	95.556.800	95.556.800
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		21.510.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17.876.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		28.002.000	131.167.000	131.167.000	131.167.000	131.167.000	131.167.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		24.701.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
6. KECAMATAN CARENANG	TOTAL PAGU PROGRAM	2.983.825.864	3.401.996.664	3.401.996.664	3.401.996.664	3.401.996.664	3.401.996.664
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.782.967.864	3.068.894.295	3.068.894.295	3.068.894.295	3.068.894.295	3.068.894.295

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67.804.000	74.122.369	74.122.369	74.122.369	74.122.369	74.122.369
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		16.779.000	39.220.000	39.220.000	39.220.000	39.220.000	39.220.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		95.875.000	180.210.000	180.210.000	180.210.000	180.210.000	180.210.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.400.000	30.240.000	30.240.000	30.240.000	30.240.000	30.240.000
7. KECAMATAN CIKANDE	TOTAL PAGU PROGRAM	5.129.364.028	4.867.837.040	4.867.837.040	4.867.837.040	4.867.837.040	4.867.837.040
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.250.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.665.533.800	3.814.621.368	3.814.621.368	3.814.621.368	3.814.621.368	3.814.621.368
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.327.509.728	795.542.672	795.542.672	795.542.672	795.542.672	795.542.672
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.250.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		38.330.500	66.052.000	66.052.000	66.052.000	66.052.000	66.052.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.490.000	11.226.000	11.226.000	11.226.000	11.226.000	11.226.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		62.430.000	149.543.000	149.543.000	149.543.000	149.543.000	149.543.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		32.070.000	30.852.000	30.852.000	30.852.000	30.852.000	30.852.000
8. KECAMATAN CIKEUSAL	TOTAL PAGU PROGRAM	3.198.167.808	3.341.130.808	3.341.130.808	3.341.130.808	3.341.130.808	3.341.130.808
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.904.253.308	3.002.888.408	3.002.888.408	3.002.888.408	3.002.888.408	3.002.888.408
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		77.445.000	56.649.000	56.649.000	56.649.000	56.649.000	56.649.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		57.817.500	55.080.000	55.080.000	55.080.000	55.080.000	55.080.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.930.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		139.272.000	188.433.400	188.433.400	188.433.400	188.433.400	188.433.400

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		14.450.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
9. KECAMATAN CINANGKA	TOTAL PAGU PROGRAM	4.867.048.531	4.500.314.572	4.500.314.572	4.500.314.572	4.500.314.572	4.500.314.572
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.050.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.504.215.051	3.386.195.612	3.386.195.612	3.386.195.612	3.386.195.612	3.386.195.612
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.137.173.480	797.326.860	797.326.860	797.326.860	797.326.860	797.326.860
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.050.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		59.714.000	57.686.100	57.686.100	57.686.100	57.686.100	57.686.100
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	8.222.000	8.222.000	8.222.000	8.222.000	8.222.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		101.453.000	212.540.000	212.540.000	212.540.000	212.540.000	212.540.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		64.493.000	38.344.000	38.344.000	38.344.000	38.344.000	38.344.000
10. KECAMATAN CIOMAS	TOTAL PAGU PROGRAM	4.361.562.632	4.140.256.088	4.140.256.088	4.140.256.088	4.140.256.088	4.140.256.088
	TOTAL PAGU PRIORITAS	850.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.174.832.304	3.117.679.912	3.117.679.912	3.117.679.912	3.117.679.912	3.117.679.912
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		913.716.328	777.160.176	777.160.176	777.160.176	777.160.176	777.160.176
	Persampahan & Lingkungan 2030	850.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		57.234.000	39.860.000	39.860.000	39.860.000	39.860.000	39.860.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		53.076.000	21.520.000	21.520.000	21.520.000	21.520.000	21.520.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		84.804.000	148.336.000	148.336.000	148.336.000	148.336.000	148.336.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		77.900.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000
11. KECAMATAN CIRUAS	TOTAL PAGU PROGRAM	5.750.468.128	5.933.320.800	5.933.320.800	5.933.320.800	5.933.320.800	5.933.320.800
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.175.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.281.574.092	4.995.999.796	4.995.999.796	4.995.999.796	4.995.999.796	4.995.999.796
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.249.636.136	679.596.504	679.596.504	679.596.504	679.596.504	679.596.504
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.175.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		86.465.000	59.891.000	59.891.000	59.891.000	59.891.000	59.891.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17.693.000	11.474.000	11.474.000	11.474.000	11.474.000	11.474.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		66.529.900	142.559.500	142.559.500	142.559.500	142.559.500	142.559.500
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		48.570.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000
12. KECAMATAN GUNUNGSARI	TOTAL PAGU PROGRAM	3.165.391.238	3.503.399.760	3.503.399.760	3.503.399.760	3.503.399.760	3.503.399.760
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.961.301.538	3.203.150.760	3.203.150.760	3.203.150.760	3.203.150.760	3.203.150.760
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.890.000	70.863.000	70.863.000	70.863.000	70.863.000	70.863.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		36.630.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.504.000	11.733.000	11.733.000	11.733.000	11.733.000	11.733.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		66.061.200	147.214.000	147.214.000	147.214.000	147.214.000	147.214.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.004.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000	43.250.000	43.250.000
13. KECAMATAN JAWILAN	TOTAL PAGU PROGRAM	3.054.066.559	3.624.054.555	3.624.054.557	3.624.054.559	3.624.054.561	3.624.054.563
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.861.822.859	3.353.826.555	3.353.826.555	3.353.826.555	3.353.826.555	3.353.826.555
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		51.838.000	70.060.000	70.060.000	70.060.000	70.060.000	70.060.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		38.597.000	36.420.000	36.420.001	36.420.002	36.420.003	36.420.004
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	5.000.000	5.000.001	5.000.002	5.000.003	5.000.004
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		58.544.700	138.903.000	138.903.000	138.903.000	138.903.000	138.903.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43.264.000	19.845.000	19.845.000	19.845.000	19.845.000	19.845.000
14. KECAMATAN KIBIN	TOTAL PAGU PROGRAM	5.768.491.741	5.388.562.760	5.388.562.760	5.388.562.760	5.388.562.760	5.388.562.760
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.300.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.007.743.475	4.690.404.560	4.690.404.560	4.690.404.560	4.690.404.560	4.690.404.560
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.365.373.416	530.020.000	530.020.000	530.020.000	530.020.000	530.020.000
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.300.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		61.658.900	27.672.000	27.672.000	27.672.000	27.672.000	27.672.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		94.314.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		103.257.100	110.586.200	110.586.200	110.586.200	110.586.200	110.586.200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		136.144.050	23.880.000	23.880.000	23.880.000	23.880.000	23.880.000
15. KECAMATAN KOPO	TOTAL PAGU PROGRAM	3.617.085.083	3.742.172.920	3.742.172.920	3.742.172.920	3.742.172.920	3.742.172.920
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.428.803.883	3.370.522.520	3.370.522.520	3.370.522.520	3.370.522.520	3.370.522.520
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		57.918.000	69.035.000	69.035.000	69.035.000	69.035.000	69.035.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		56.485.200	78.651.200	78.651.200	78.651.200	78.651.200	78.651.200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		54.753.000	159.164.200	159.164.200	159.164.200	159.164.200	159.164.200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.125.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
16. KECAMATAN KRAGILAN	TOTAL PAGU PROGRAM	6.019.404.296	6.111.878.704	6.111.878.704	6.111.878.704	6.111.878.704	6.111.878.704
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.350.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.491.184.186	5.119.575.800	5.119.575.800	5.119.575.800	5.119.575.800	5.119.575.800
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.403.016.754	768.153.104	768.153.104	768.153.104	768.153.104	768.153.104
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.350.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		52.941.400	52.512.800	52.512.800	52.512.800	52.512.800	52.512.800
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9.336.900	9.168.400	9.168.400	9.168.400	9.168.400	9.168.400

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		31.892.700	127.068.600	127.068.600	127.068.600	127.068.600	127.068.600
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.032.356	35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000
17. KECAMATAN KRAMATWATU	TOTAL PAGU PROGRAM	6.483.627.385	6.281.319.136	6.281.319.136	6.281.319.136	6.281.319.136	6.281.319.136
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.200.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.044.819.057	5.246.127.136	5.246.127.136	5.246.127.136	5.246.127.136	5.246.127.136
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.253.683.328	799.403.600	799.403.600	799.403.600	799.403.600	799.403.600
	Persampahan & Lingkungan 2030	1.200.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		126.701.000	49.365.200	49.365.200	49.365.200	49.365.200	49.365.200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.282.000	7.126.300	7.126.300	7.126.300	7.126.300	7.126.300
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		19.396.000	146.338.000	146.338.000	146.338.000	146.338.000	146.338.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.746.000	32.958.900	32.958.900	32.958.900	32.958.900	32.958.900
18. KECAMATAN LEBAKWANGI	TOTAL PAGU PROGRAM	3.186.042.352	3.540.789.712	3.540.789.712	3.540.789.712	3.540.789.712	3.540.789.712
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.013.956.352	3.308.469.712	3.308.469.712	3.308.469.712	3.308.469.712	3.308.469.712
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.800.000	37.830.000	37.830.000	37.830.000	37.830.000	37.830.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		60.885.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.535.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		55.066.000	131.790.000	131.790.000	131.790.000	131.790.000	131.790.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.800.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
19. KECAMATAN MANCAK	TOTAL PAGU PROGRAM	3.433.198.292	3.648.392.616	3.648.392.616	3.648.392.616	3.648.392.616	3.648.392.616
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.260.213.792	3.368.247.916	3.368.247.916	3.368.247.916	3.368.247.916	3.368.247.916
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.457.000	83.298.700	83.298.700	83.298.700	83.298.700	83.298.700

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	Persampahan & Lingkungan 2030	0	0	0	0	0	0
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		47.691.500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	8.445.000	8.445.000	8.445.000	8.445.000	8.445.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		77.674.000	159.956.000	159.956.000	159.956.000	159.956.000	159.956.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17.162.000	18.445.000	18.445.000	18.445.000	18.445.000	18.445.000
20. KECAMATAN PABUARAN	TOTAL PAGU PROGRAM	4.097.960.301	4.219.166.656	4.219.166.656	4.219.166.656	4.219.166.656	4.219.166.656
	TOTAL PAGU PRIORITAS	950.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.806.823.765	3.542.047.656	3.542.047.656	3.542.047.656	3.542.047.656	3.542.047.656
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.019.427.536	411.836.000	411.836.000	411.836.000	411.836.000	411.836.000
	Persampahan & Lingkungan 2030	950.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		91.679.000	52.845.000	52.845.000	52.845.000	52.845.000	52.845.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.848.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		95.390.000	175.858.000	175.858.000	175.858.000	175.858.000	175.858.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		76.792.000	31.435.000	31.435.000	31.435.000	31.435.000	31.435.000
21. KECAMATAN PADARINCANG	TOTAL PAGU PROGRAM	3.686.382.359	3.670.353.088	3.670.353.088	3.670.353.088	3.670.353.088	3.670.353.088
	TOTAL PAGU PRIORITAS	850.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.590.844.494	2.937.595.588	2.937.595.588	2.937.595.588	2.937.595.588	2.937.595.588
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		919.882.365	375.126.500	375.126.500	375.126.500	375.126.500	375.126.500
	Persampahan & Lingkungan 2030	850.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		62.016.500	136.510.000	136.510.000	136.510.000	136.510.000	136.510.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.076.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		38.197.000	174.356.000	174.356.000	174.356.000	174.356.000	174.356.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		70.366.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
22. KECAMATAN PAMARAYAN	TOTAL PAGU PROGRAM	3.200.369.155	3.711.261.760	3.711.261.760	3.711.261.760	3.711.261.760	3.711.261.760

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.993.349.155	3.388.200.060	3.388.200.060	3.388.200.060	3.388.200.060	3.388.200.060
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		74.854.000	74.021.700	74.021.700	74.021.700	74.021.700	74.021.700
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		48.976.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.740.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		52.570.000	160.340.000	160.340.000	160.340.000	160.340.000	160.340.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		24.880.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
23. KECAMATAN PETIR	TOTAL PAGU PROGRAM	3.382.931.160	3.661.764.712	3.661.764.712	3.661.764.712	3.661.764.712	3.661.764.712
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.242.348.360	3.294.782.062	3.294.782.062	3.294.782.062	3.294.782.062	3.294.782.062
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		71.043.400	137.271.650	137.271.650	137.271.650	137.271.650	137.271.650
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		29.955.400	53.710.600	53.710.600	53.710.600	53.710.600	53.710.600
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.210.000	9.988.400	9.988.400	9.988.400	9.988.400	9.988.400
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		32.674.000	145.075.200	145.075.200	145.075.200	145.075.200	145.075.200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		2.700.000	20.936.800	20.936.800	20.936.800	20.936.800	20.936.800
24. KECAMATAN PONTANG	TOTAL PAGU PROGRAM	4.688.905.724	5.035.385.848	5.035.385.848	5.035.385.848	5.035.385.848	5.035.385.848
	TOTAL PAGU PRIORITAS	950.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.355.585.188	4.329.413.000	4.329.413.000	4.329.413.000	4.329.413.000	4.329.413.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		992.828.836	473.191.712	473.191.712	473.191.712	473.191.712	473.191.712
	Persampahan & Lingkungan 2030	950.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		161.527.400	45.430.000	45.430.000	45.430.000	45.430.000	45.430.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		62.508.000	143.431.136	143.431.136	143.431.136	143.431.136	143.431.136
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		112.856.300	35.520.000	35.520.000	35.520.000	35.520.000	35.520.000
25. KECAMATAN PULOAMPEL	TOTAL PAGU PROGRAM	3.125.875.634	3.211.129.760	3.211.129.760	3.211.129.760	3.211.129.760	3.211.129.760
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.882.156.634	2.858.279.760	2.858.279.760	2.858.279.760	2.858.279.760	2.858.279.760
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		73.964.000	69.615.000	69.615.000	69.615.000	69.615.000	69.615.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		91.490.000	70.250.000	70.250.000	70.250.000	70.250.000	70.250.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.760.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		45.505.000	170.510.000	170.510.000	170.510.000	170.510.000	170.510.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		24.000.000	31.425.000	31.425.000	31.425.000	31.425.000	31.425.000
26. KECAMATAN TANARA	TOTAL PAGU PROGRAM	4.108.836.718	3.857.669.136	3.857.669.136	3.857.669.136	3.857.669.136	3.857.669.136
	TOTAL PAGU PRIORITAS	950.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.892.560.390	2.799.425.408	2.799.425.408	2.799.425.408	2.799.425.408	2.799.425.408
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		984.556.328	830.776.328	830.776.328	830.776.328	830.776.328	830.776.328
	Persampahan & Lingkungan 2030	950.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		72.388.000	44.502.400	44.502.400	44.502.400	44.502.400	44.502.400
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.172.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		140.045.000	163.315.000	163.315.000	163.315.000	163.315.000	163.315.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17.115.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000
27. KECAMATAN TIRTAYASA	TOTAL PAGU PROGRAM	4.197.842.500	4.272.073.140	4.272.073.140	4.272.073.140	4.272.073.140	4.272.073.140
	TOTAL PAGU PRIORITAS	750.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.121.607.124	3.620.577.240	3.620.577.240	3.620.577.240	3.620.577.240	3.620.577.240
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		789.668.376	354.991.900	354.991.900	354.991.900	354.991.900	354.991.900

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGUINDIKATIFTAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	8	10	12	14	16
	Persampahan & Lingkungan 2030	750.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		107.405.000	63.570.000	63.570.000	63.570.000	63.570.000	63.570.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.622.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		95.834.000	172.394.000	172.394.000	172.394.000	172.394.000	172.394.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		68.706.000	50.180.000	50.180.000	50.180.000	50.180.000	50.180.000
28. KECAMATAN TUNJUNGTEJA	TOTAL PAGU PROGRAM	2.986.933.133	3.168.911.616	3.168.911.616	3.168.911.616	3.168.911.616	3.168.911.616
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0	0	0	0	0	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.759.166.133	2.842.399.616	2.842.399.616	2.842.399.616	2.842.399.616	2.842.399.616
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		82.200.000	67.508.000	67.508.000	67.508.000	67.508.000	67.508.000
	Persampahan & Lingkungan 2030						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		23.400.000	41.675.000	41.675.000	41.675.000	41.675.000	41.675.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100.467.000	154.474.000	154.474.000	154.474.000	154.474.000	154.474.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		16.300.000	46.455.000	46.455.000	46.455.000	46.455.000	46.455.000
29. KECAMATAN WARINGINKURUNG	TOTAL PAGU PROGRAM	4.358.051.882	4.077.841.184	4.077.841.184	4.077.841.184	4.077.841.184	4.077.841.184
	TOTAL PAGU PRIORITAS	900.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.214.369.354	2.968.464.436	2.968.464.436	2.968.464.436	2.968.464.436	2.968.464.436
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		916.786.328	803.526.648	803.526.648	803.526.648	803.526.648	803.526.648
	Persampahan & Lingkungan 2030	900.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		67.729.200	65.417.000	65.417.000	65.417.000	65.417.000	65.417.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		115.207.000	191.427.500	191.427.500	191.427.500	191.427.500	191.427.500
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40.560.000	43.005.600	43.005.600	43.005.600	43.005.600	43.005.600

Sumber: Bapperida 2025, diolah

2.5.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2025–2029, didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen pendapatan daerah. Termasuk dalam asumsi ini, telah memperhitungkan variabel pada RPJMN 2025–2029, yang berpotensi mempengaruhi dan menimbulkan adanya risiko fiskal atas optimisasi baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp. 1.024.952.874.498,-, dan target tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1.163.359.126.485,- mengalami kenaikan sebesar 13,50%, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada tahun 2025 yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2026.

Pada tahun 2027 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mencapai Rp. 1.191.969.802.563,- dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 9,15%, maka Pada tahun 2030 proyeksi pendapatan sebesar Rp. 1.301.063.255.152,-.

Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah Tahun 2025–2029, didasarkan atas baseline tahun 2023 dan 2024. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Tahun 2023 sebesar 4,80% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,04%. Terjadi penurunan adanya koreksi pada komponen pajak daerah, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, PBB dan BPHTB. Pajak Daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 725.174.381.504,- dan diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp. 923.560.835.235,- pada tahun 2030, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata sebesar 27,36 % per tahun.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pada pos pendapatan daerah, diprediksi terdapat potensi kenaikan juga yang terjadi pada pos retribusi daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi jasa usaha. Hasil retribusi daerah diproyeksikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 252.193.558.920,- dan proyeksi pada tahun 2030 diproyeksikan menjadi Rp. 263.411.166.186,-, mengalami kenaikan sekitar 4,45% pertahun.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Proyeksi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang bersumber dari bagi hasil laba Perusda Pemerintah Kabupaten Serang, didasarkan atas proyeksi laba bersih yang dihasilkan Perusda atas rencana bisnis Perusda tahun 2025–2030. Ketentuan bagi hasil laba Perusda mempedomani, peraturan daerah atas pendirian Perusda. Kombinasi antara proyeksi laba Perusda, dengan rencana bisnis Perusda tahun 2025–2030 dengan bagi hasil sebagai hasil kekayaan daerah yang dipisahkan diselaraskan dengan rencana penyertaan modal kepada Perusda tahun 2025–2030.

Penyertaan modal kepada Perusda mempedomani peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan diawali dengan kajian atas kelayakan rencana investasi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 18.932.083.377,- dan pada tahun 2030 tetap sebesar Rp. 18.932.083.377,-.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber pendapatan BLUD rata-rata diproyeksikan tumbuh muliai tahun 2027 sebesar 1,96% per tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD

Pemerintah Kabupaten Serang dan Puskesmas. Namun demikian pendapatan ini, selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 28.652.850.697 pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 95.159.170.354,- pada tahun 2030.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing dana transfer. Proyeksi dana transfer akan sangat dipengaruhi dalam asumsi yang digunakan dalam APBD, terkait dana transfer ke daerah dan kebijakan APBN Tahun 2025–2029. Sedangkan transfer antar daerah, yang bersumber dari bagi hasil pemerintah provinsi kepada kab/kota dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, akan dipengaruhi oleh kebijakan APBD pemerintah provinsi Tahun 2025–2029.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam proyeksi tahun 2025–2030, diasumsikan bersumber dari pendapatan hibah hasil kerja sama daerah dengan baseline data tahun 2024, untuk belanja hibah sebesar Rp. 11.425.000.000,- pada APBD tahun 2025 dan Rp. 11.800.000.000,- untuk proyeksi tahun 2030.

2.5.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan review dan rasionalisasi belanja daerah
- 2) Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
- 3) Memperkuat sistem pengendalian internal.
- 4) Mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung pada masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
- 6) Belanja daerah dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual.
- 7) Pengalokasian belanja daerah menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja, artinya pengalokasian anggaran mendasarkan pada tolok ukur yang jelas dan target kinerja yang terukur.
- 8) Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 9) Belanja diutamakan untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, belanja yang mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.
- 10) Pemilahan program/kegiatan unggulan didasarkan atas prinsip *Money Follow Program*.
- 11) Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Struktur Belanja Daerah Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah, rata-rata sebesar 78,83% per tahun, dalam proyeksi belanja daerah tahun 2025–2030. Struktur belanja operasi ini, didominasi rasio belanja

pegawai rata-rata sebesar 44,99% dari belanja daerah tahun 2025–2030, dengan pertumbuhan beban belanja pegawai rata-rata sebesar 0,62% per tahun. Sedangkan rasio belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah tahun 2025–2030 rata-rata sebesar 30,50%. Belanja operasi tahun 2025–2030 secara umum mengalami penurunan sebesar 7,53%.

Belanja operasi merupakan belanja rutin sehari-hari, untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja operasi sebesar Rp. 2.794.558.412.192,- pada APBD tahun 2025, diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 2.656.148.300.222,- pada tahun 2030. Struktur belanja operasi, meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan meningkat pada tahun 2025, dibandingkan dengan *baseline* tahun 2024 sebesar 15%. Kenaikan ini mendasarkan pada asumsi adanya penerimaan ASN pemerintah daerah tahun 2025, yang berdampak terhadap beban gaji pokok, tunjangan dan tunjangan kinerja pegawai. Kenaikan beban belanja perlu diantisipasi dengan pencermatan asumsi nilai DAU, yang salah satunya untuk pemenuhan beban belanja pegawai. Belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp. 1.559.795.221.210,- dan mengalami penurunan mulai tahun 2026 hingga 2030 menjadi sebesar Rp. 1.512.250.231.397,-, hal ini dikarenakan terjadi perpindahan status kepegawaian penyuluh pertanian menjadi pegawai pemerintah pusat serta adanya angka pensiun PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 31,82%, dengan beban belanja barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp. 1.085.815.521.591,- menjadi sebesar Rp. 1.105.092.971.266,- untuk proyeksi tahun 2030. Kenaikan belanja barang dan jasa diasumsikan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

c. Belanja Hibah (Termasuk Banparpol)

Belanja hibah, mengalami kenaikan pada tahun 2024, untuk mengakomodir belanja hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, kepada KPU, Bawaslu, TNI dan POLRI, mempedomani peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, yang tahapannya dimulai sejak tahun 2022. Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak diasumsikan sebesar 60 milyar rupiah pada pemilihan umum tahun 2029.

d. Belanja Bantuan sosial

Belanja bantuan sosial 2025-2030 diproyeksikan akan mengalami kenaikan sekitar 22,28%. Belanja bantuan sosial tahun 2025 sebesar Rp. 9.792.994.600,- menjadi sebesar Rp. 10.760.000.000,- untuk proyeksi tahun 2030.

2. Belanja Modal

Mempedomani amanat peraturan perundang-undangan tentang alokasi belanja infrastruktur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sebesar 25% dari dana transfer umum (DAU dan DBH), belanja modal tahun pada APBD 2025 sebesar Rp. 262.584.329.170,- atau 7,25% dari belanja daerah, menjadi sebesar Rp. 237.714.034.572 atau 6,96% dari belanja daerah untuk proyeksi tahun 2030.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga, sementara diasumsikan turun sebesar 20,58% dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan mendesak. Belanja

tidak terduga pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 9.443.620.000,- menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tahun 2030.

4. Belanja Transfer

Dalam RPJMD tahun 2025–2029, asumsi belanja transfer pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 553.191.641.200,- diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 513.835.152.991,- pada tahun 2030.

2.5.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisis realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Serang merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai "kesenjangan" atau "gap" antara kondisi ideal yang diinginkan dan kondisi riil yang ada saat ini. Kesenjangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan.. Perspektif lain menjelaskan bahwa mandatori pembangunan sesuai lingkungan dinamis dari pemerintah pusat maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang ini disebut isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal.

2.6.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Serang

Permasalahan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029 diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tergambarkan pada BAB II gambaran kondisi umum daerah dengan memperhatikan muatan dalam kajian lingkungan hidup strategi (KLHS) RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 dan RPPJD Kabuapten Serang tahun 2025-2045.

Tabel 2.6. 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
1. Pendidikan		
Belum berhasil menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 7,88 tahun atau hanya pada tingkatan SMP kelas 7 meskipun harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,87 atau pada tingkatan SMA kelas 12, Kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP pada tingkatan “sedang” (literasi (51,96) dan Numerasi (46,90) SD; literasi (60,70) dan numerasi (56,63) SMP).	Masih banyak sekolah yang belum mempunyai ruang penunjang lainnya.	a. Masih adanya kesenjangan dalam mengakses kesempatan belajar terutama untuk masyarakat miskin, yang mana biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin mahal; b. Belum meratanya akses pendidikan di setiap wilayah terutama untuk akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi c. Ketersediaan sarana/prasarana dan SDM pendidikan yang sesuai standar masih belum mencukupi secara kualitas maupun kuantitas; d. Belum optimalnya layanan pendidikan khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi untuk mengembangkan kapasitas peserta didik agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat; e. Belum optimalnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempercepat wajib belajar 13 tahun.
2. Kesehatan		
Promosi pola hidup sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai serta meningkatkan deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular. Hal ini dijelaskan oleh; (i) indeks keluarga sehat (IKS) yang masih tergolong dalam kategori keluarga tidak sehat dengan nilai kurang dari 0,50, (ii) jumlah kasus TBC signifikan meningkat. Kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan untuk menekan terjadinya balita yang menderita stunting, hal ini dijelaskan oleh angka prevalensi stunting. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini tergambarkan oleh: (i) adanya kasus kematian ibu yang berdampak pada angka kematian ibu yang masih cenderung tinggi, (ii) angka kematian bayi menunjukkan adanya kasus kematian bayi di Kabupaten Serang.	Keterbatasan anggaran pembangunan Kesehatan, terutama penanganan penduduk miskin, promosi Kesehatan, penanggulangan gizi buruk dan pelayanan kesehatan daerah terpencil dan perbatasan.	a. Derajat kesehatan yang masih rendah, dijelaskan oleh angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi; b. akses terhadap fasilitas kesehatan dan puskesmas pembantu masih rendah; c. Jumlah SDM kesehatan yang masih rendah; d. indikasi penyakit menular dan TBC masih cukup tinggi; e. penanganan masalah stunting yang masih belum optimal.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas terlihat dari indikator yang masih di bawah target dari urusan PUPR pada tahun 2023, yaitu: Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (75,56%), Panjang jalan kondisi baik (58,53%), Panjang jalan dengan jenis permukaan jalan beton (80,18%). Belum optimalnya pengelolaan tata ruang sesuai dengan RTRW, tergambarkan dari tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang RTRW kawasan yang masih belum terwujud sesuai dengan rencana pola ruangnya antara lain (i) kawasan perlindungan setampat (63%), (ii) kawasan suaka alam (75%), (iii) Kawasan ekosistem mangrove (38%). Berdasarkan tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang RTRW menjelaskan bahwa jaringan sumber daya air (62%) masih belum optimal. Sarana prasarana terkait kebutuhan air minum dan pengelolaan limbah masih belum optimal, ditandai indikator rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum (73,24%) pada tahun 2023, rumah tangga dengan akses air limbah (0,99%) pada tahun 2024.	a. Pengembangan infrastruktur Kabupaten yang berbasis lingkungan masih minim; b. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Serang masih banyak yang rusak berat; c. Ketersediaan dan Kualitas Sanitasi Dasar Lingkungan Permukiman masih rendah.	a. Aksesibilitas kebutuhan air minum layak di Kabupaten Serang masih menunjukkan pencapaian yang belum maksimal; b. Jumlah keluarga yang mempunyai akses jamban masih rendah; c. Masih terdapat kondisi jalan dan jembatan yang belum baik; d. Tingkat realisasi pemanfaatan ruang terhadap RTRW belum optimal.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Data dasar rumah tidak layak huni tidak sesuai dengan kondisi asli Kabupaten Serang, sehingga angka tercapai (100,14%) namun secara eksisting masih banyak rumah tidak layak huni. Diperlukan pemutakhiran data secara menyeluruh untuk penanganan RTLH selanjutnya.	Akses Masyarakat terhadap Perumahan yang Layak dan Terjangkau.	a. Rumah tidak layak huni masih cukup tinggi; b. Masih tingginya kawasan kumuh di Kabupaten Serang.
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat		
Risiko bencana yang masih cukup tinggi (IRB 2023: 136,82; kategori “sedang”) di wilayah Kabupaten Serang belum direspon secara optimal dalam mempersiapkan diri, mencegah, mengatasi, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari bencana (indeks ketahanan daerah 2023: 0,68).	Belum adanya masterplan kebencanaan dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).	a. Penegakan ketertiban masyarakat terhadap keamanan dan kepatuhan peraturan daerah masih belum optimal; b. Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal.
6. Sosial		

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
Masih belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada yang disebabkan oleh jumlah PPKS yang sangat banyak sehingga proses pengentasannya membutuhkan waktu yang lama ditambah dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan PPKS masih terbatas. Belum adanya rumah singgah atau shelter rumah aman menjadi permasalahan pokok dalam penanganan PPKS. Adanya pengelolaan database PPKS yang belum berjalan dengan baik dapat menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan public seperti pemantauan, pendistribusian dan pemanfaatan Bantuan Sosial dan Program Kesejahteraan Sosial lainnya.	a. Tingginya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar; b. Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.	a. Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi; b. Upaya penanganan kemiskinan yang belum optimal serta terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan struktur permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin; c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Serang masih tinggi; d. Tingginya lansia telantar.
7. Tenaga Kerja		
Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 9,18% (tahun 2024) dan berada di atas rata-rata Provinsi Banten.	a. Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri; b. Masih tingginya tingkat pengangguran.	a. Ketersediaan SDM dengan kesesuaian kebutuhan industri yang tidak <i>link and match</i>; b. Daya saing SDM dan kapasitas Pendidikan vokasi belum optimal.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan menyebabkan adanya ketimpangan gender di Kabupaten Serang. Tahun 2024 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,531 point yang menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh Masih rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan politik. Selain itu belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan (responsif gender) menyebabkan ketimpangan dapat terjadi. Dalam hal perlindungan anak, masih belum optimalnya tata kelola kelembagaan perlindungan anak, yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya	Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, akan tetapi rasio pendudukan laki-laki dan Perempuan hampir sama.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi belum optimal.

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemanfaatan data terpilah anak sebagai dasar perencanaan dan intervensi pembangunan. Hal ini menyebabkan masih banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak menjadi masalah yang harus segera diselesaikan sebagaimana ditandai oleh capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2024 yang baru mencapai 62,23%. Indeks ini menunjukkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dapat diberikan oleh pemerintah.		
9. Pangan		
Mata rantai produksi dan distribusi komoditas pangan seperti komoditas padi, jagung, dan kedelai perlu diperkuat karena adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan luas lahan dan panen pertanian mengalami penurunan, sehingga ketergantungan ketersediaan pangan dari daerah sekitar masih terjadi apalagi untuk wilayah yang masih dalam cakupan rentan terhadap ketahanan pangan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan masih cenderung tinggi, sehingga perlu kebijakan pengendalian rawan pangan dan potensi ketidakcukupan konsumsi pangan.	Rehabilitasi, operasi pemeliharaan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan belum optimal.	Berkurangnya lahan pertanian dan atau alih fungsi lahan produktif pangan.
10. Pertanahan		
Belum optimalnya transparansi pertanahan di wilayah.		Alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan yang mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan hidup.
11. Lingkungan		

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
Permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Serang tercermin dari indikator Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami penurunan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (64,40) pada tahun 2024. Hal ini disebabkan Indeks Kualitas Udara (70,99) tidak memenuhi target dikarenakan makin meningkatnya potensi beban pencemaran serta rendahnya kualitas air (46,21) di Kabupaten Serang yang mempengaruhi indeks kualitas air dari adanya pencemaran air yang bersumber dari berbagai aktivitas ekonomi, seperti aktivitas industri dan rumah tangga. Selain itu, indeks tutupan vegetasi juga mengalami penurunan (69,77). Belum optimalnya penanganan sampah pun masih menjadi masalah yang terjadi di Kabupaten Serang dimana rata-rata hanya 34,87% sampah yang terangkut pada tahun 2023 dikarenakan Kabupaten Serang belum memiliki TPA, kurangnya armada pengangkut sampah, serta manajemen sampah yang belum memadai.	a. Pemantauan kualitas udara terutama di daerah sekitar industri; b. Kurangnya pengawasan dan sanksi lingkungan terhadap industri-industri di Kabupaten Serang.	a. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Serang akibat pencemaran air yang bersumber dari berbagai aktivitas ekonomi dan rumah tangga; b. Pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah sampah yang tidak terolah; c. Perubahan iklim yang ekstrem; d. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memadai.
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Kepemilikan akte kelahiran masih di bawah target (94,61%) dan kartu identitas anak (46,69%).		a. Belum mencukupinya sarana dan prasarana versi terbaru sesuai dengan kebutuhan standar aplikasi digitalisasi; b. Belum optimalnya akses internet bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi pelayanan administrasi penduduk.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Pembangunan Desa perlu ditingkatkan agar desa mampu memenuhi kesejahteraan masyarakatnya dengan berketahanan sosial, berketahanan ekonomi dan berketahanan ekologi secara berkelanjutan yang didukung dengan perubahan desa menjadi desa mandiri dan desa maju yang masing-masing baru mencapai 4,60% untuk desa mandiri dan 25,46% untuk desa maju dari total desa di Kabupaten Serang.		a. Lembaga desa dan kapasitas desa dalam upaya menjadikan Desa Mandiri masih belum optimal; b. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintah masih belum baik dan perlu ditingkatkan.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
Angka ketergantungan yang meningkat pada tahun 2024 sebesar 43,64 tidak memberikan dampak yang cukup baik bagi adanya Bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Serang karena beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif cenderung meningkat. Pembangunan keluarga di Kabupaten Serang masih belum optimal, tergambarkan dari indeks pembangunan keluarga (59,37) terutama pada dimensi ketentraman (54,07) dan kemandirian (51,88) yang masih relatif rendah.		Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program penggunaan alat kontrasepsi masih belum optimal.
15. Perhubungan		
Layanan dan infrastruktur transportasi publik masih rendah	a. Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor di jalan yang berdampak pada bertambahnya titik kepadatan dan kemacetan lalu lintas; b. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi ASDP dengan rencana pengembangan wilayah; c. Banyaknya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ANDAL-Lalin.	a. Sarana prasarana penerangan jalan umum yang masih perlu di tingkatkan; b. Dukungan keamanan dan kenyamanan pada transportasi umum belum optimal; c. Kepatuhan trafil dan trayek angkutan umum yang belum optimal; d. Pengelolaan sistem transportasi umum yang belum terintegrasi.
16. Komunikasi dan Informatika		
Implementasi <i>e-Government</i> belum optimal memberikan pelayanan digital, cepat, mudah, dan murah sehingga masyarakat terlayani dengan baik, antara lain diindikasikan dari indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,73.	a. Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem informasi dalam mengembangkan Kabupaten Serang yang unggul, nyaman dan sejahtera; b. Peningkatan implementasi <i>e-Government</i> Pemerintah Daerah.	Aksesibilitas teknologi informasi seperti ketersediaan jaringan internet pada suatu wilayah serta pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan pemerintahan masih belum optimal.
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
Kontribusi sektor UMKM dalam peningkatan perekonomian masih rendah. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain pemberdayaan UMKM masih belum optimal, strategi hulu-hilir pemasaran produk belum terarah, dan akses terhadap permodalan masih minim.	Penumbuhkan koperasi-koperasi baru dan menghidupkan koperasi yang tidak aktif agar diperbanyak.	Produktivitas UMKM dan Koperasi masih perlu ditingkatkan.
18. Penanaman Modal		

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
Produktivitas sektor-sektor unggulan dari hulu ke hilir masih belum optimal untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Serang.		Iklim investasi penanaman modal di kabupaten Serang perlu ditingkatkan.
19. Kepemudaan dan Olahraga		
Partisipasi dan pembinaan pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga masih belum optimal.		a. Kualitas dan peran aktif generasi muda masih belum optimal; b. Kualitas sumber daya atlet dan pelatih yang belum optimal.
20. Statistika		
Ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral masih belum optimal dijelaskan oleh Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.		Keterbukaan dan akses data di Kabupaten Serang perlu ditingkatkan.
21. Persandian		
Pengaturan keamanan pada penggunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal.		a. Belum optimalnya sarana dan prasarana persandian; b. Belum optimalnya pengelolaan asset persandian; c. Belum kuatnya tata Kelola keamanan informasi; d. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia pemerintah.
22. Kebudayaan		
Pelestarian, pengelolaan, dan penyebarluasan budaya Kabupaten Serang masih belum optimal.	Sarana dan Prasarana Kesenian belum memadai.	Kurangnya pembinaan terhadap benda, situs, maupun kawasan cagar budaya.
23. Perpustakaan		
Tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masih dalam kategori sedang, diindikasikan oleh indeks pembangunan literasi masyarakat mencapai 54,30 pada tahun 2024.		a. Belum meratanya layanan perpustakaan; b. Belum mencukupinya koleksi dan tenaga perpustakaan; c. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat; d. Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP; e. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi; f. Masih rendahnya jumlah kepesertaan anggota perpustakaan.
24. Kearsipan		
Pengelolaan arsip masih rendah.		Pengelolaan arsip secara digital masih belum optimal.
25. Kelautan dan Perikanan		
Sektor kelautan dan perikanan belum optimal dikarenakan beberapa hal antara lain pengelolaan dan pelestarian ekosistem kelautan dan perikanan yang belum optimal dan		a. Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
terarah baik dari hulu sampai dengan hilir, akses modal dan teknologi yang masih rendah kepada nelayan, masih cukup tingginya risiko pencemaran air oleh limbah domestik dan industri.		b. Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat; c. Ketersediaan penyuluh perikanan yang belum memadai.
26. Pariwisata		
Sektor pariwisata belum berkembang optimal diindikasikan dari: penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Serang masih relatif kecil berkisar 2% - 3%.		a. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara cenderung menurun; b. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan belum optimal.
27. Pertanian		
Hasil pertanian dan peternakan menunjukan tren yang positif seperti pada komoditas padi, jagung, serta hasil dari sapi dan telur ayam. Akan tetapi, permasalahan pada sektor ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti akses terhadap permodalan masih rendah, akses terhadap teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas masih rendah.		a. Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dikarenakan masih sangat ketergantungan terhadap cuaca kemarau dan hujan; b. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern; c. Tingginya alih lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan permukiman penduduk; d. Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi.
28. Energi dan Sumber Daya Mineral		
Potensi panas bumi di Kabupaten Serang saat ini masih belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai substitusi energi terbarukan.		Pemanfaatan potensi energi terutama energi geothermal belum dimanfaatkan secara maksimal.
29. Perdagangan		
Meskipun sektor perdagangan memiliki nilai kontribusi yang tinggi, namun peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur penunjang perdagangan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan distribusi barang.		Peningkatan kelas usaha pelaku di bidang perdagangan belum optimal.
30. Perindustrian		
Sektor industri memiliki kontribusi yang signifikan terutama pada industri pengolahan, akan tetapi pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah masih belum optimal.		a. Peran sektor industri masih didominasi oleh satu industri besar; b. Pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah masih belum optimal; c. Masih minimnya klaster industri hijau.

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
31. Sekretarat Daerah		
Tata kelola pemerintahan menunjukan tren yang positif dengan reformasi birokrasi dan reformasi hukum yang baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain penyederhanaan regulasi, reformasi struktur pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik, memastikan kinerja ASN terukur, serta pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.		Tata kelola pemerintah belum optimal. Perlu untuk ditingkatkan terkait sistem kinerja birokrasi dan ASN yang terukur, peningkatan upaya pencegahan korupsi dan penyelewangan kewenangan, layanan berbasis digital.
32. Sekretariat DPRD		
Kapasitas dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.		SDM yang mendukung kinerja DPRD perlu dioptimalkan
33. Perencanaan		
Masalah dalam proses perencanaan diindikasikan oleh beberapa hal antara lain minimnya data sektoral pada perangkat daerah, keterlibatan berbagai stakeholder dalam penyusunan substansi perencanaan yang rendah.		a. Kapasitas dan kompetensi SDM perencana perlu ditingkatkan; b. Data pembangunan daerah yang masih minim terutama pada data sektoral.
34. Keuangan		
Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan belum adanya peningkatan derajat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) untuk membiayai proses pembangunan daerah di Kabupaten Serang secara optimal.		Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan daerah.
35. Kepegawaian		
Sistem manajemen pembinaan dan pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN belum optimal.		Belum optimalnya penerapan sistem kepegawaian yang terintegrasi untuk mengevaluasi kinerja ASN secara terukur.
36. Penelitian dan Pengembangan		
Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah masih belum optimal.		a. Kualitas dan kompetensi SDM di bidang penelitian dan pengembangan masih belum optimal; b. proposi anggaran penelitian dan pengembangan masih rendah dalam mendukung pembangunan daerah.
37. Inspektorat Daerah		

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045
Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal hal ini diindikasikan oleh jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas yang masih terbatas.		Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Serang.
38. Kecamatan		
Tata kelola pemerintahan serta pelayanan di tingkat Kecamatan masih belum optimal.		Belum optimalnya tata kelola yang akuntabel, transparan dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis digital.
39. Kesatuan Bangsa dan Politik		
Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Serang dalam kategori baik, akan tetapi regulasi terkait kerukunan umat beragama masih tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.		Potensi konflik kerukunan dalam umat agama yang sama masih berisiko cukup tinggi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana disajikan dalam Tabel di atas, maka dirumuskan permasalahan pokok daerah yang dijabarkan juga hingga permasalahan dan akar masalahnya yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.6. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Serang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
1. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya tingkat intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Masih rendahnya minat baca siswa dan kualitas pembelajaran matematika belum optimal, serta sarana dan prasarana pendukung masih kurang memadai	Pendidikan
		Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang merata dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi dan geografis yang kurang mendukung	
		Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan	
	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu masih belum optimal, serta masih terdapat kasus ibu melahirkan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan
		Koordinasi lintas sektor di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dalam upaya menurunkan prevalensi stunting masih belum optimal	
		Ketersediaan alat diagnosis Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi Tuberkulosis (TB) masih terbatas di Puskesmas dan Rumah Sakit serta belum optimalnya sistem pelaporan	
		Belum optimalnya penginputan data keluarga sehat dalam aplikasi yang digunakan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual di masyarakat	
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan	Belum terpenuhinya sarpras sesuai standar Kemenkes	Kesehatan
		Belum terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar Kemenkes sebagai rumah sakit pengampunan dan mitra JKN	
		Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan rumah sakit	
		Belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi	
		Belum optimalnya digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit	
	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap pola asuh anak, kepesertaan remaja dalam PIK-R dan belum optimalnya peran GenRe di masyarakat 2. Masih rendahnya kemandirian ekonomi keluarga 3. Adanya permasalahan sosial dalam rumah tangga, lemahnya hubungan antar anggota keluarga, kurang akuratnya data keluarga, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB
	Belum optimalnya Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1. Pelayanan kesehatan reproduksi yang disosialisasikan belum menjangkau seluruh wilayah. 2. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB belum optimal.	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
		3. Masih kurangnya edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal. 4. Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (Pos Kb dan sub Pos KB Desa) 5. Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	
	Data terkait angka Kelahiran total yang tidak sama antara pusat dan daerah	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 2. Pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah belum optimal	
	Cakupan kepesertaan MKJP masih rendah dan unmetneed yg msh tinggi	1. Penyampaian informasi bangga kencana belum optimal 2. Rasa takut terhadap alat kontrasepsi modern terutama MKJP	
	Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Minimnya akses pemuda terhadap pendidikan karakter dan kepemimpinan Belum tersedia pusat pengembangan olahraga berupa sport center yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemusatan pelatihan bagi atlet dan cabang olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
	Masih rendahnya literasi masyarakat	Urusan perpustakaan masih belum mendapatkan prioritas yang memadai dalam pengembangan sumber daya manusia	Perpustakaan
	Masih rendahnya Penanganan pemerlu palayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang inklusif	1. PPKS yang tertangani belum berjalan optimal 2. Masih kurangnya jumlah Pekerja Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan social 3. Masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan social 4. Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat 5. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial di masyarakat 6. Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat. 7. Koordinasi lintas bidang dalam penanganan masalah kesejahteraan masih belum optimal 8. Belum adanya rumah singgah sebagai shelter bagi PPKS yang terlantar 9. Belum Optimalnya peran dari lembaga lembaga sosial (PSKS), Stake Holder Terkait dan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial	Sosial
	Belum optimalnya pembangunan yang responsif gender (Pengarusutamaan gender) dan	1. Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. 2. Masih rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan politik.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	Pemenuhan hak anak (PUHA)	3. Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan (responsif gender) 4. Belum optimalnya OPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 5. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan perlindungan anak, yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemanfaatan data terpilah anak sebagai dasar perencanaan dan intervensi pembangunan. 6. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Minimnya data terpilah untuk mengidentifikasi kelompok Perempuan rentan 8. Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak	
	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen	Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin Perempuan	
	Kurang optimalnya peran serta organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender	1. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi Perempuan 2. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan 3. Kurangnya kepedulian keluarga terhadap kualitas hidup lansia	
	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak	1. Belum adanya komitmen kerja sama yang kuat dan sinergis antara semua pihak yang terkait 2. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan kurang memberikan efek jera	
	Belum optimalnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Keterbatasan dan ketidaklengkapan data perumahan	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Belum Optimalnya kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan berkualitas	Kurangnya perencanaan terintegrasi dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur fisik yang memadai	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Belum optimalnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Keterbatasan infrastruktur transportasi publik (halte, terminal, jalan akses)	Perhubungan
	Belum optimalnya daya saing industri	Infrastruktur pendukung industri belum memadai	Perindustrian
	Masih rendahnya nilai tambah perdagangan	Lemahnya perencanaan terintegrasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur yang mendukung perdagangan	Perdagangan
	Masih rendahnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Infrastruktur transportasi yang belum memadai menghambat distribusi produk UMKM ke masyarakat	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	Masih rendahnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Infrastruktur pendukung pariwisata (akses jalan, fasilitas umum, transportasi) belum memadai	Pariwisata
3. Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan sektor produktif berbasis potensi lokal	Tenaga Kerja
	Masih lemahnya daya tarik iklim investasi	Rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal	Penanaman Modal
	Masih Rendahnya Prosentase Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM)	1. Pengelolaan Administrasi Pemeritahan Desa belum memadai 2. Masih rendahnya Peran aktif masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan 3. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat 4. Rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola potensi yang ada	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Ketersediaan anggota Satpol PP belum memadai untuk pengamanan di seluruh wilayah	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Limas
	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai pentingnya pencegahan serta mitigasi terhadap kawasan rawan bencana	Wilayah geografis Kabupaten Serang cukup luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat belum merata	
4. Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya kesejahteraan petani	Rendahnya kapasitas dan keterampilan petani serta lemahnya kelembagaan	Pertanian
	Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Produktivitas lahan masih rendah akibat teknologi dan sarana produksi terbatas	Pangan
	Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Belum optimalnya rehabilitasi dan pelestarian ekosistem lamun serta akses modal yang sulit dan minimnya lembaga keuangan mikro yang menjangkau nelayan Pencemaran limbah tidak terkelola dan minimnya akses teknologi budidaya modern	Kelautan dan Perikanan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan	Belum optimalnya transformasi layanan publik berbasis digital	Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah	Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
berorientasi pada pelayanan publik prima masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya penegakan integritas aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas yang masih terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai	Pengawasan
	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya kapasitas SDM, rendahnya integrasi sistem informasi, serta belum memadainya data dan pengukuran kinerja pembangunan secara akuntabel	Perencanaan
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD	Keuangan
		Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi	
		Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	
	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian	Kepegawaian
	Belum optimalnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Belum tersedianya pusat data (data center) daerah	Statistik
	Masih rentannya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Belum adanya legalitas dan sistem keamanan yang mengatur penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persandian
	Masih rendahnya tata kelola arsip	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan arsip	Kearsipan
	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	- Masih ada penduduk Kabupaten Serang yang belum terdaftar dalam database kependudukan - Masih tidak sesuai data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, Akta Kelahiran serta data berbagai lintas instansi seperti BPJS Kesehatan, perbankan dan lain-lain. - Pengendalian mobilitas penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian penduduk non permanen dan pengendalian mobilitas kependudukan orang asing. - Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Masih rendahnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan yang masih terbatas dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan
	Belum optimalnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan,	Masih terbatasnya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi dan dapat diakses publik	Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	penggunaan, dan pemanfaatan tanah		
	Masih rendahnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Belum adanya regulasi terkait riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan
	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD masih terbatas	Sekretariat DPRD
6. Kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya kemajuan dalam bidang kebudayaan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan minimnya sarana dan prasarana pendukung	Kebudayaan

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi faktual serta akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Di Kabupaten Serang, dinamika pembangunan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan mendasar yang perlu segera direspons secara strategis dalam dokumen RPJMD. Identifikasi permasalahan ini tidak hanya mencerminkan capaian dan hambatan pembangunan masa lalu, namun juga menjadi pijakan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu isu sentral yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih menjadi penghambat utama bagi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Permasalahan ini tampak jelas dalam berbagai aspek, mulai dari masih rendahnya capaian mutu pendidikan, keterbatasan akses dan layanan kesehatan, hingga belum optimalnya ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk. Akar masalahnya mencakup keterbatasan sarana prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, belum maksimalnya program intervensi kesehatan ibu dan anak, serta lemahnya kapasitas kelembagaan yang menangani pembangunan keluarga. Rendahnya kualitas SDM secara langsung memengaruhi efektivitas pembangunan lintas sektor, termasuk upaya peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Di samping itu, permasalahan lain yang juga sangat fundamental adalah belum optimalnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang layak menjadi prasyarat utama dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Namun, di Kabupaten Serang masih ditemukan kesenjangan signifikan dalam hal akses terhadap jalan yang memadai, air bersih, sanitasi, serta fasilitas permukiman. Keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas teknis, dan kurangnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas infrastruktur. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada lambannya mobilitas barang dan jasa, namun juga membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang memadai, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil.

Permasalahan infrastruktur yang belum tertangani secara menyeluruh juga berimplikasi pada terbatasnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Serang menghadapi tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan. Terbatasnya realisasi investasi, rendahnya pemanfaatan potensi lokal, serta lemahnya dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah menjadi cerminan bahwa ekosistem ekonomi daerah belum berjalan secara optimal. Proses perizinan yang belum sepenuhnya efisien, promosi potensi daerah yang belum masif, serta minimnya inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi beberapa akar masalah yang perlu segera diatasi. Tanpa adanya upaya sistematis untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, maka peluang penciptaan lapangan kerja baru akan semakin sempit dan potensi kemiskinan akan terus mengintai.

Ketahanan pangan, sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, juga menjadi perhatian serius dalam perumusan RPJMD. Ketersediaan pangan yang stabil, aman, dan terjangkau masih menjadi tantangan akibat berbagai persoalan, seperti produktivitas pertanian yang fluktuatif, gangguan distribusi, serta lemahnya perlindungan terhadap petani. Permasalahan ini diperparah dengan kondisi infrastruktur pertanian yang tidak memadai, alih fungsi lahan yang terus terjadi, serta rendahnya akses petani terhadap sarana produksi dan teknologi pertanian. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan, maka ketahanan pangan daerah akan terus rapuh, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Pelayanan publik yang belum

responsif, akuntabilitas yang belum maksimal, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa masih diperlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan, integrasi sistem informasi yang belum optimal, serta belum meratanya kapasitas sumber daya aparatur menjadi beberapa faktor yang menghambat peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang lemah tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan.

Di tengah transformasi sosial yang semakin kompleks, permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah tergerusnya nilai-nilai religiusitas dan kebangsaan di tengah masyarakat. Fenomena menurunnya toleransi, melemahnya semangat gotong royong, serta meningkatnya konflik sosial berbasis identitas menunjukkan bahwa pembangunan karakter belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Kurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial-kultural, belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan adat, serta rendahnya literasi kebangsaan menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial yang tersembunyi. Pembangunan fisik yang tidak dibarengi dengan pembangunan mental dan karakter masyarakat justru akan menciptakan ketimpangan yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memengaruhi secara sistemik. Ketimpangan dalam satu sektor berpotensi menimbulkan efek domino yang memperburuk kondisi sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dan intersektoral dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. RPJMD Kabupaten Serang harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, memperkuat infrastruktur pendukung pertumbuhan, mendorong transformasi ekonomi lokal, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, permasalahan daerah yang telah diidentifikasi ini dapat ditangani secara tuntas untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang bahagia.

2.6.2 Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD 2021-2026, isu dalam RPJPD Kabupaten Serang tahap I (2025-2029), isu dalam RPJMN 2025-2029, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, RTRW Kabupaten Serang 2011-2031, tantangan dan isu lingkungan dinamis, dan KLHS RPJMD 2025-2029, serta potensi daerah yang diselaraskan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Skema dalam perumusan isu strategis Kabupaten Serang tersaji pada bagan berikut ini:

Gambar 2.6. 1 Skema Perumusan Isu Strategis Kabupaten Serang



2.6.3.1 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis diartikan sebagai kondisi dalam memahami faktor-faktor eksternal dan internal sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

1. Mandatori Isu Global dan isu Nasional

a. Rendahnya Produktivitas

Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh:

- Kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, khususnya pada perempuan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.
- Produktivitas sektor ekonomi yang rendah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015–2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.
- Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal
- Kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dimana Indeks modal manusia Indonesia tahun 2020 sebesar 0,54, lebih tinggi dari Filipina (0,45) namun tidak lebih besar dari Singapura (0,88). Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak terhadap beberapa hal antara lain produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun relatif rendah yang dipicu dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia atau PISA untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) relative rendah, rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang menyebabkan keterserapan tenaga kerja di pasar kerja relatif rendah di bidang keahlian menengah dan tinggi.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir. Selain itu, tingkat Kemiskinan Indonesia cenderung stagnan di angka 9,0% (rata-rata 2018 – 2024 sebesar 9,6%). Hal tersebut terjadi karena tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Agustus 2024 tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Akibatnya, jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, berbanding terbalik dengan populasi kelas menengah yang mengalami penurunan yang berakibat terjadinya risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mempengaruhi perekonomian global disebabkan oleh (i) peningkatan tarif impor Amerika Serikat, (ii) peningkatan produksi minyak AS yang mendorong penurunan harga minyak WTI, (iii) Kebijakan suku bunga The Fed yang cenderung tinggi, dan (iv) penguatan dollar dan pelemahan nilai tukar negara lain. Perekonomian China saat ini masih mengalami trend perlambatan. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,0 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi China, yaitu

permintaan domestik yang masih lemah dan penurunan kinerja sektor perumahan yang terus berlanjut.

Kinerja positif Emerging Market, khususnya perekonomian Vietnam. Perekonomian Vietnam terus menunjukkan kinerja positif, dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 7,09 persen. Kinerja perekonomian Vietnam didukung oleh relokasi sebagian proses produksi dari China. Tensi geopolitik berpotensi menurun. Pemerintahan Trump berkomitmen untuk mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, adanya deeskalasi konflik di Timur Tengah sebagai dampak dari gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dengan memastikan pemberantasan korupsi terus dilakukan. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022 namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya.

Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Pelayanan publik prima dan cepat masih dalam tantangan yang cukup besar di tingkat daerah, dimana capaian skor indeks pelayanan publik pada level provinsi dan kabupaten/kota masih relatif rendah dibanding K/L; (i) Kabupaten/Kota (3,27), (ii) Provinsi (3,88), dan (iii) K/L (4,00).

2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah, KLHS, dan Perencanaan Daerah Sekitar

a. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

Dalam RPJMN tahap pertama 2025–2029 memuat asta cita yang merupakan implementasi RPJPN tahun 2025–2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional. Asta cita tersebut diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Delapan prioritas nasional tersebut meliputi:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat.

b. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Banten dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029 yaitu “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”. Dalam dokumen tersebut sudah digariskan arah pembangunan masing-masing wilayah termasuk Kabupaten Serang. Kabupaten Serang dalam RPJMD Provinsi Banten diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) berupa program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang ditangkap sebagai potensi pembangunan di Kabupatn Serang antara lain Peningkatan Kualitas infrastruktur dasar menuju infrastruktur mantap (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sarpras pendidikan, kesehatan dan lain-lain), meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, optimalisasi kualitas permukiman dan perumahan layak huni yang menjadi kewenangan provinsi Banten, dan pengembangan koridor industri Cilegon–Serang–Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, dan baja). Adapun sektor unggulan wilayah Kabupaten Serang mencakup pariwisata, industri, dan pertanian.

c. Amanat RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 Tahap I

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap ke-1 menjadi acuan kerangka tematik penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Pada tahap ke-1, Kabupaten Serang diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Perwujudan penguatan modal dasar pembangunan melalui peningkatan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar, peningkatan peran UMKM, pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman, transportasi dan ekonomi, perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah, rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana, serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Sasaran pokoknya yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
2. Terwujudnya ekonomi tumbuh dan merata;
3. Terwujudnya tatakelola pemerintah yang berintegritas dan inovatif;
4. Terwujudnya masyarakat harmonis, tertib dan agamis serta lingkungan yang bersih dan sehat;
5. Terwujudnya infrastruktur mantap dan berkelanjutan.

Isu strategis RJPIPD Kabupaten Serang 2025-2045 dikelompokkan menjadi 6 tema besar yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan ekonomi;
3. Tata kelola pemerintahan;
4. Pembangunan lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Infrastruktur;
6. Budaya dan keagamaan.

d. RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

1. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Serang

RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2020. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2021 yang telah diubah, dan berfungsi sebagai pedoman penataan ruang yang bersifat umum di wilayah kabupaten untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan perkotaan. Rencana sistem perkotaan merupakan rencana penetapan pusat-pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan pada tingkat kawasan secara berhirarki. Sistem perkotaan terdiri dari beberapa pusat kegiatan yaitu:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

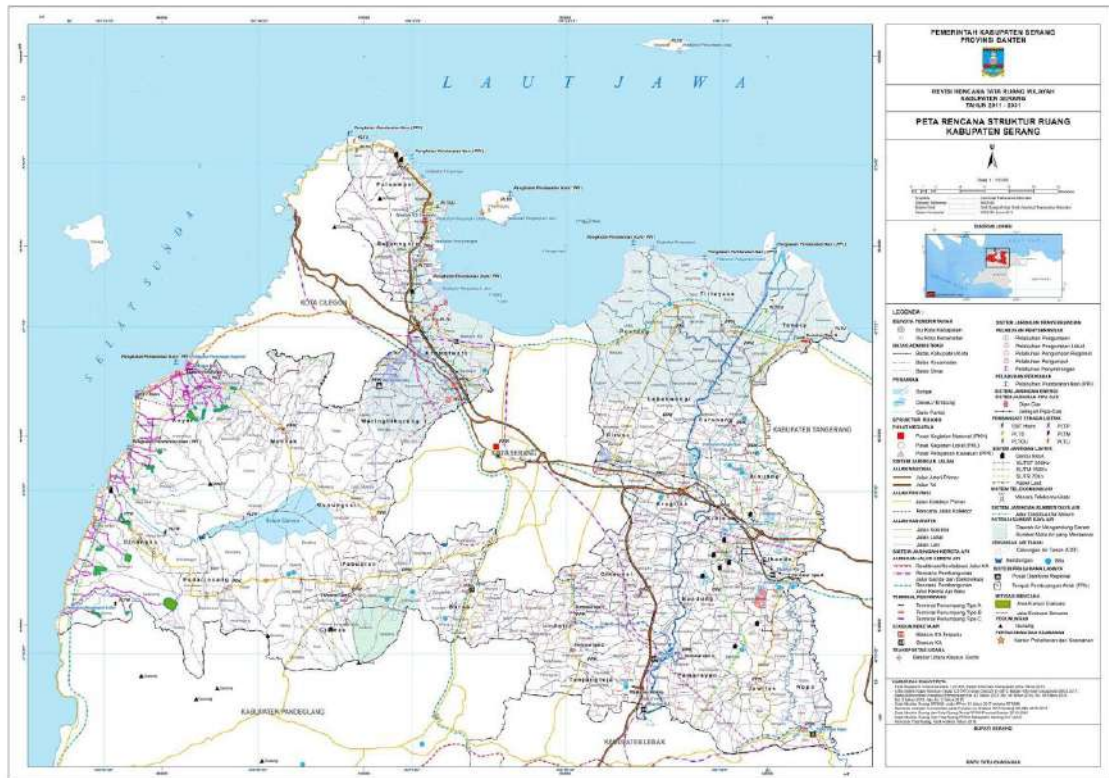
2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Serang meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah Serang
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada pada Kawasan Perkotaan Anyar, Baros, Ciruas dan Pontang.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Serang

Untuk lebih jelasnya, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Serang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.6. 2
Peta Rencana Struktur Ruang Pemerintah Kabupaten Serang



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Serang 2011-2031

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana di dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara yang meliputi:

- Rencana sistem jaringan transportasi darat terdiri: (1) rencana sistem jaringan jalan yang mencakup jaringan jalan kewenangan nasional, provinsi, kabupaten dan desa serta terminal penumpang, barang dan jembatan timbang; (2) rencana sistem jaringan kereta api yang terdiri atas rencana pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan barang dan/atau orang serta pengembangan stasiun kereta api; (3) Rencana sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan.
- Rencana sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: (1) pengembangan pelabuhan laut berupa Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Terminal khusus; serta (2) alur pelayaran laut.
- Rencana sistem jaringan sistem transportasi udara berupa pengembangan Bandar Udara Gorda sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.

2. Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi : (1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana pengembangan stasiun pipa gas bumi dan rencana jaringan pipa gas: serta (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, rencana pembangunan gardu induk, pengembangan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) Hidro dan Biomassa, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari dan tenaga sampah.

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas (1) pengembangan jaringan telekomunikasi tetap meliputi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan pengembangan serat optik serta (2) pengembangan jaringan telekomunikasi bergerak berupa pengembangan jaringan nirkabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas (1) sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; (2) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan (3) sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pengembangan sistem penyediaan air minum terdiri dari pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah berupa pengembangan instalasi pengolahan air limbah dan pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga.

c. Sistem Jaringan Persampahan wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah berupa: pengembangan Tempat Penampungan Sementara, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan teknologi dan sistem pemilahan sampah.

d. Sistem Jaringan Drainase

Pengembangan sistem pengelolaan drainase berupa perbaikan Kawasan bagian hulu/lindung tangkapan air hujan untuk menekan aliran air permukaan, pembuatan sempadan sungai pada bagian tengah dan hilir sungai, pembuatan saluran pada daerah tergenang luapan air sungai.

e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana pada Kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, tsunami dan letusan gunung berapi.

4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang

Rencana pola ruang meliputi Kawasan peruntukan lindung dan Kawasan peruntukan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan

atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

A. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Serang ditetapkan seluas lebih kurang 11.955 (sebelas ribu Sembilan ratus lima puluh lima) hektar yang terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya
Kawasan ini ditetapkan seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar yang terdiri atas (1) Kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Clomas, Padarincang, Pulo Ampel, dan Bojonegara; serta (2) Kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kecamatan Anyar, Bandung, Baros, Binuang, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Kibin, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran dan Tirtayasa.
2. Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk/situ dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) hektar dan tersebar pada wilayah kecamatan Anyar, Bojonegara, Cinangka, Kramatwatu, Pontang, Pulo Ampel, Tanara dan Tirtayasa.
Sempadan sungai ditetapkan sebesar kurang lebih 3.066 (tiga ribu enam puluh enam) hektar yang terletak diseluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai. Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas kurang lebih 6.923 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh tiga) hektar dan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Serang.
3. Kawasan konservasi
Kawasan konservasi ditetapkan seluas kurang lebih 6.238 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektar yang terdiri dari kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, dan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan suaka alam terdiri atas Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede.
Kawasan pelestarian alam ditetapkan seluas 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) hektar yang meliputi Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dan Taman Wisata Alam Laut di Pulau Sangiang. Sedangkan Kawasan konservasi pesisir terdapat di sekitar perairan Pulau Tunda dan Pulau Pamujan Besar.
4. Kawasan lindung geologi
Kawasan lindung geologi merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu sempadan mata air yang berupa daratan sekeliling air dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter pada air di luar Kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter pada mata air di dalam Kawasan permukiman untuk mempertahankan fungsi mata air. Kawasan ini ditetapkan pada mata air yang tersebar di Kecamatan Baros, Clomas, Padarincang dan Kramatwatu.
5. Kawasan rawan bencana
Kawasan rawan bencana di Kabupaten Serang berupa Kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami.
6. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Serang terdiri dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) hektar di Kecamatan Cinangka dan Padarincang, Kawasan wisata religi Syekh Nawawi Al Bantani di Kecamatan Tanara, Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa, Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuh Belas di Kecamatan Kramatwatu, Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros, Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Cikeusal dan Kawasan Ziarah Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara.

7. Kawasan ekosistem mangrove

Kawasan ekosistem mangrove ditetapkan seluas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar dan tersebar di Kecamatan Bojonegara, Pontang, Tanara dan Tirtayasa.

B. Kawasan Budi Daya

Kawasan peruntukan budi daya di Kabupaten Serang ditetapkan seluas kurang lebih 134.323 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar dan terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi ditetapkan seluas kurang lebih 5.684 (lima ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar dan terdiri dari (1) Kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di wilayah Kecamatan Anyar, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Mancak, Pabuaran dan Padarincang; dan (2) Kawasan hutan produksi tetap yang tersebar di Kecamatan Bojonegara, Ciomas, Gunungsari, Kramatwatu, Padarincang, Pulo Ampel dan Waringin Kurung.

2. Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 5.540 (lima ribu lima ratus empat puluh) hektar dan terletak di Kecamatan Bojonegara, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pulo Ampel dan Waringinkurung.

3. Kawasan pertanian

Kawasan pertanian ditetapkan seluas 57.202 (lima puluh tujuh ribu dua ratus dua) hektar, terdiri (1) Kawasan tanaman pangan dengan luas sebesar kurang lebih 32.229,36 (tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam) hektar dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan terletak diseluruh wilayah Kabupaten Serang; (2) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 24.793 (dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar ; dan (3) Kawasan peternakan yang diarahkan untuk pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing/domba, itik dan ayam ras pedaging serta ayam bukan ras yang tersebar diseluruh kecamatan.

4. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan ditetapkan seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektar yang terdiri dari Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan budi daya dan Kawasan perikanan tangkap. Kawasan perikanan budidaya tersebar di kecamatan Baros, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Tanara, Pontang, Pulo Ampel dan Tirtayasa.

Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada Kawasan Laut Selat Sunda dan Laut Jawa yang berada di wilayah Kecamatan Anyar, Cinangka, Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

5. Kawasan pertambangan dan energi
Kawasan pertambangan dan energi meliputi Kawasan pertambangan mineral, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, dan Kawasan pertambangan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral berupa mineral logam dan mineral non logam yang tersebar di Kecamatan Mancak, Bojonegara, Pulo Ampel, Jawilan dan Kopo.
Kawasan pertambangan gas dan minyak bumi berada pada perairan Laut Jawa dan perairan Selat Sunda. Sedangkan Kawasan pertambangan panas bumi berada pada Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Kaldera Danau Banten yang terletak di Kecamatan Clomas, Padarincang, Clnangka, Anyar, Waringinkurung, Gunungsari, Pabuaran dan Baros.
6. Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri ditetapkan sebesar 26.309 (dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan) hektar dan terdiri dari Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah. Kawasan industri meliputi:
 - a. Kawasan Industri dengan jenis kegiatan berupa industri logam dasar/huli, kimia dasar dan industri maritim yang tersebar di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel, Anyar, Mancak, Kramatwatu dan Tanara;
 - b. Kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa Aneka Industri yang ditetapkan di wilayah Kecamatan Ciruas, Jawilan, Cikande, Kibin, Kopo, Kragilan, Bandung, Binuang, Lebakwangi, Pamarayan, Carenang dan Tunjungteja;
 - c. Kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa industri minapolitan meliputi wilayah Kecamatan Pontang dan Tirtayasa.
 - d. Rencana pembangunan Kawasan industri prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang di Kecamatan Kramatwatu.
 Sedangkan sentra industri kecil dan menengah tersebar diseluruh kecamatan terutama pada sentra-sentra UMKM meliputi:
 - a. Sentra industri sepatu di Kecamatan Baros
 - b. Sentra kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Bandung
 - c. Sentra industri tas dan pandai besi di Kecamatan Petir
 - d. Sentra industri kecil dan pandai besi di Kecamatan Ciruas
 - e. Sentra industri kecil dan pandai besi di Kecamatan Ciomas
7. Kawasan pariwisata
Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang terdiri dari Kawasan pariwisata alam dan Kawasan pariwisata budaya.
8. Kawasan permukiman
Kawasan permukiman ditetapkan seluas 36.084 (tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) hektar yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Serang yang terdiri dari Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman perdesaan.
9. Kawasan pertahanan dan keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah Kabupaten Serang meliputi:
 - a. Kantor Koramil di setiap wilayah kecamatan
 - b. Rahlat Paskhas Gorda di Kecamatan Binuang
 - c. Pos TNI AL di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar
 - d. Pos TNI AL di Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel
 - e. Posmat Anyar di Kecamatan Anyar

e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Ada 12 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan air bersih wilayah Kabupaten Serang masih tergolong dalam klaster sedang dan rendah;
- Pengelolaan sampah, Kabupaten Serang belum memiliki TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) serta belum adanya program pengelolaan sampah mandiri di setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Serang;
- Peningkatan rerata Angka Harapan Sekolah yang merujuk pada peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Serang;
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Kerjasama Instansi Pendidikan dan Industri-Industri di Kabupaten Serang untuk memprioritaskan putra dan putri daerah;
- Peningkatan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan inovasi pentahelix, klasterisasi pariwisata dan ekspose desa pariwisata;
- Peningkatan kualitas lingkungan dalam pengelolaan udara dan air limbah terutama pada daerah-daerah didekat industri;
- Peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap regulasi dan ketaatan terhadap industri di wilayah Kabupaten Serang;
- Peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas guna percepatan pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan ekonomi daerah pada sektor pertanian dan perikanan;
- Penurunan persentase penduduk miskin disertai peningkatan penjaminan hak-hak penduduk miskin;
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas KKN disertai dengan pelayanan yang ramah.

Ditinjau dari realisasi pelaksanaan program terkait indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka terdapat isu-isu strategis yang terbagi ke dalam empat pilar TPB yang merupakan hasil penapisan dari seluruh indikator pada setiap pilar.

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
Sosial	Pengentasan penduduk miskin dalam semua dimensi serta penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan
	Penjaminan hak bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan, terhadap akses sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi, dan jasa keuangan yang tepat
	Peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan, terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
	Penjaminan akses terhadap sumber pangan dan pengentasan kasus kekurangan gizi

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
	Peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil serta akses terhadap lahan, sumber daya produktif, pengetahuan, hingga sumberdaya non pertanian
	Pengurangan signifikan terhadap rasio kematian ibu, bayi baru lahir, dan balita
	Peningkatan upaya dalam menekan dampak akibat epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya melalui pencegahan, pengobatan, dan peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan.
	Pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol
	Peningkatan akses kesehatan yang universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, pelayanan kesehatan yang baik, obat-obatan, dan vaksin dasar yang aman yang terjangkau serta penjaminan akses untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi
	Pengurangan angka kematian akibat keracunan
	Peningkatan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan
	Penjaminan pendidikan dasar kepada semua anak perempuan dan laki-laki yang terjangkau, setara, dan berkualitas
	Peningkatan jumlah tenaga terampil, termasuk teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
	Peningkatan pasokan dan kualitas guru yang berkualitas
	Pengentasan diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya terhadap perempuan serta penjaminan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan
Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita dan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, kewirausahaan, peningkatan dan inovasi teknologi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro
	Pengurangan signifikan terhadap angka pengangguran dan usia muda yang tidak menempuh pendidikan atau pelatihan
	Efisiensi promosi pariwisata yang berkelanjutan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mempromosikan budaya dan produk lokal
	Penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik dalam rangka perluasan akses perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua
	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dengan berfokus pada pemerataan dan keterjangkauan
	Peningkatan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto
	Peningkatan akses industri kecil dan UMKM terhadap jasa keuangan

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
	Penguatan riset ilmiah dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas teknologi melalui operasionalisasi bank teknologi dan sains Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta penyediaan akses internet yang universal Penstabilan pertumbuhan pendapatan penduduk di atas rata-rata nasional Penjaminan hak dan pengurangan kesenjangan hasil dengan penghapusan kebijakan dan praktik yang diskriminatif Pelaksanaan kebijakan fiskal yang secara progresif meningkatkan kesetaraan dan perlindungan sosial dan upah Penguatan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil secara efektif berbasis skema dan strategi kerja sama Peningkatan penyediaan data berkualitas yang tepat waktu dan valid serta relevan dengan konteks nasional Pengembangan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik
Lingkungan	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan akses untuk air minum dan sanitasi yang bersih dan aman Peningkatan kualitas air dengan pengurangan polusi, pembuangan, dan minimalisasi pelepasan material dan bahan kimia berbahaya Peningkatan kualitas pengelolaan sampah baik didesa, kecamatan atau lingkup kabupaten Peningkatan efisiensi konsumsi air di semua sektor dan penjaminan penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan disertai pengelolaan sumber daya air yang terpadu Penjaminan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar Konservasi warisan alam dan budaya Pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, terutama terhadap kualitas udara dan sampah kota Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan terjangkau oleh anak, perempuan, manula, dan penyandang disabilitas Pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan serta pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali Praktik berbasis pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan disertai integrasi informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan Penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam Pemulihan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan kekeringan dan banjir Penetapan integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan
Hukum dan Tata Kelola	Pengentasan segala bentuk kekerasan dan angka kematian

PILAR	ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB
	Pengentasan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak
	Pengentasan praktik korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk
	Penetapan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di setiap tingkatan
	Penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan
	Peningkatan pencatatan dan pemberian identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran
	Penjaminan akses publik terhadap informasi dan perlindungan terhadap kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional
	Penegakan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan

f. Potensi Daerah Kabupaten Serang

Potensi daerah Kabupaten Serang sangat strategis dan dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut ini adalah potensi-potensi utama Kabupaten Serang yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah antara lain:

1. Potensi Industri dan Kawasan Ekonomi

Kabupaten Serang merupakan salah satu pusat industri besar di Banten, baik di wilayah serang bagian timur maupun serang bagian barat. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Serang memberikan ruang yang tinggi kepada Kabupaten Serang untuk menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi nasional dan asing (PMA/PMDN). Luas Kawasan peruntukan industri yang tercantum dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Serang mencapai 26.309,34 Ha. Hingga saat ini, area yang telah terokupansi sebesar 25.813,87 Ha. Kawasan industri tersebut seperti modern cikande industrial estate dan kawasan industri wilmar.

Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud tersebar di seluruh kecamatan, terutama pada sentra-sentra UMKM meliputi:

- Kecamatan Baros, Desa Curug Agung sebagai sentra industri sepatu;
- Kecamatan Bandung, Desa Mander sebagai sentra kerajinan anyaman bambu;
- Kecamatan Petir, Desa Kadu Genep sebagai sentra industri tas dan pandai besi;
- Kecamatan Ciruas, Desa Kepandean sebagai sentra industri kecil dan pandai besi; dan
- Kecamatan Ciomas sebagai sentra industri kecil dan pandai besi.

Luas Kawasan Peruntukan Industri yang tercantum dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Serang mencapai 26.309,34 ha. Hingga saat ini, area yang telah memiliki KKPR dan dimanfaatkan sesuai peruntukan industri sebesar 25.813,87 ha. Terdapat 4 kawasan industri di Kabupaten Serang berdasarkan OSS.

Tabel 2.6. 3 Luas Kawasan Peruntukan Industri

No	Nama Kawasan	Pengelola Kawasan	Luas Lahan (Ha)
1	Kawasan Industri Terpadu Wilmar	PT. Multimas Nabati Asahan	710,70

No	Nama Kawasan	Pengelola Kawasan	Luas Lahan (Ha)
2	Modern Cikande Industrial Estate	PT. The New Asia Industrial Estate	760,00
3	Kawasan Industri Nikomas Gemilang	PT. Nikomas Gemilang	202,54
4	Modern Cikande Industrial Estate	PT. Modern Industrial Estate	890,00
5	CP Industrial Estate	PT. Comarindo Pratama	100,50
6	Kawasan Industri SBS	PT. Sumber Bina Sukses	233
7	Modern Cikande Industrial Estate	PT. Puncak Ardimulia Realty	255,00

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dengan luas lahan pertanian yang signifikan, Kabupaten Serang berpotensi menjadi lumbung padi di Banten yang mendukung terlaksananya swasembada pangan. Komoditas unggulan Kabupaten Serang seperti padi, jagung, cabai, dan hortikultura.

3. Kelautan dan Perikanan

Ekonomi biru menjadi salah satu konsep pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu unggulan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut. saat ini Wilayah pesisir seperti Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang memiliki potensi besar dalam sektor ini, seperti perikanan tangkap dan budidaya (udang, bandeng) serta tambak garam dan produk olahan laut.

4. Pariwisata dan Warisan Budaya

Kabupaten Serang juga memiliki potensi pariwisata dan warisan budaya yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat antara lain pantai di wilayah kecamatan Anyar dan Cinangka, situs kesultanan sultan ageng tirtayasa, wisata religi dan sejarah syekh nawawi al-bantani di Kecamatan Tanara serta gunung santri di Kecamatan Bojonegara.

Tabel 2.6. 4 Daftar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Serang Tahun 2022

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI/TEMPAT
I	<u>DAYA TARIK WISATA ALAM</u>	
1	Curug Cigumawang	Ds. Padarincang Kec. Padarincang
2	Curug Betung	Ds. Kubang Baros Kec. Cinangka
3	Curug Sawer	Ds. Ujung Tebu Kec. Ciomas
4	Curug Goong	Ds. Baros Jaya Kec. Cinangka
5	Curug Cikotak	Ds. Kadubeurem Kec. Padarincang
6	Curug Cikarakal	Ds. Kadubeurem Kec. Padarincang
7	Curug Hujan	Ds. Kamasan Kec. Cinangka
8	Curug lawang	Ds. Cikolelet Kec. Cinangka
9	Curug Kembar	Ds. Cikolelet Kec. Cinangka
10	Bukit Hijau	Ds. Mancak Kec. Mancak
11	Lembah Hijau	Ds. Bandulu Kec. Anyer
12	Gunung Pinang	Ds. Pejaten Kec. Kramatwatu
13	Goa Cilayang	Ds. Cilayang Kec. Cikeusal
14	Gunung Malang	Ds. Mekar Sari Kec. Cinangka
15	Puncak Manik	Ds. Banjarsari Kec. Anyer
16	Panenjoan	Kecamatan Gunungsari
17	Citra Alam Seaside	Kecamatan Anyer

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI/TEMPAT
	18 Puncak Sidapang 19 Leuwi Mangrod 20 Sungai Cikalumpang 21 Curug Ciwarijan	Kecamatan Anyer Padarincang Padarincang Ds. Bale Kencana Kec. Mancak
II	<u>DAYA TARIK WISATA BUATAN</u> 1 Wulandira Purnama 2 Tempat Pemancingan Domas 3 Duren Jatohan H. Arif 4 Baduy Outbound Baros 5 Jembatan Pelangi 6 Rumah Kupu-kupu 7 Taman Bunga Sinta 8 Taman Pesona Ratu 9 Taman Mahkota Ratu 10 Puncak Bukit Waru Wangi 11 Istana Taman Cadas 12 Kampung Sadanta	Jl. Raya Serang-Cilegon Kec. Kramatwatu Ds. Domas Kec. Pontang Ds. Panyirapan Kec. Baros Ds. Sukacai Kec. Baros Ds. Lontar Kec. Tirtayasa Kec. Anyer Kec. Pabuaran Desa Sukaratu Kec. Cikeusal Desa Sukaratu Kec. Cikeusal Kecamatan Padarincang - Cinangka Kecamatan Mancak Desa Katulisan, Kec. Cikeusal
III	<u>DAYA TARIK WISATA BAHARI</u> <u>/PANTAI/MARINA</u> 1 Pulau Tunda 2 Pulau Sanghiyang 3 Pulau Panjang 4 Pulau Kubur 5 Pulau Kalih Utara 6 Pulau Kalih Selatan 7 Pulau Pamojan Besar 8 Pulau Pamojan Kecil 9 Pulau Ular 10 Pantai Pasauran Indah 11 Pantai Tanjung Tum 12 Pantai Wisata Lestari Anyer 13 Pantai Patra Sambolo I 14 Pantai Patra Sambolo II 15 pantai Bandulu 16 Pantai Karang Suraga 17 Pantai Wisata Karang Bolong 18 Pantai Karang Suraga II 19 Pantai Tawing 20 Pantai Kelapa Gading 21 Pantai Karang Kitri 22 Pantai Saung Cibereum 23 Pantai Cibereum I 24 Pantai Cibereum II 25 Pantai Palem Cibereum 26 Pantai Legon Prima 27 Pantai Pasir Putih I 28 Pantai Pasir Putih II 29 Pantai Pasir Putih III 30 Pantai Pal Anyer 31 Pantai Anyar I 32 Pantai Anyar II 33 Pantai Batu Hideung / Batu saung 34 Pantai Muara Asri 35 Pantai Muara Cipacung 36 Pantai Baraya	Ds. Wargasara Kec. Tirtayasa Ds. Cikoneng Kec. Anyer Ds. Pualu Panjang Kec. Pulau Ampel Ds. Pontang Kec. Pontang Ds. Pulau Ampel Kec. Pulo Ampel Ds. Pulau Ampel Kec. Pulo Ampel Ds. Pontang Kec. Pontang Ds. Pontang Kec. Pontang Ds. Cikoneng Kec. Anyer Ds. Pasauran Kecamatan Cinangka Ds. Cikoneng Kecamatan Cinangka Ds. Cikoneng Kecamatan Cinangka Ds. Bandulu Kecamatan Anyer Ds. Bandulu Kecamatan Anyer Ds. Bandulu Kecamatan Anyer Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Karang Bolong Kecamatan Cinangka Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Sindang Laya Kecamatan Cinangka Ds. Sindang Laya Kecamatan Cinangka Ds. Kamasan Kecamatan Cinangka Ds. Kamasan Kecamatan Cinangka Ds. Kamasan Kecamatan Cinangka Ds. Kamasan Kecamatan Cinangka Kecamatan Cinangka Ds. Kamasan Kecamatan Cinangka Ds. Sindang Laya Kecamatan Cinangka Ds. Sindang Laya Kecamatan Cinangka Ds. Cikoneng Kecamatan Anyer Ds. Sindanglaya Kecamatan Cinangka Ds. Sindanglaya Kecamatan Cinangka Ds. Karang Bolong Kecamatan Cinangka Ds. Cikoneng Kecamatan Anyer Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Bulakan Kecamatan Cinangka

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI/TEMPAT
	37 Pantai Bulakan 38 Pantai Candaria 39 Pantai Karang Jogo 40 Pantai Nelayan 41 Pantai Jambu 42 Pantai Losari Indah 43 Pantai 234 44 Pantai Pasir Putih Florida Indah 45 Pantai Pasir Putih 121 46 Pantai Panjang 47 Pantai Mercusuar 48 Pantai Pasir Putih Tawing 49 Pantai Pasir Putih 234 50 Pantai Lagundi 51 Pantai Pasir Putih Florida Indah Anyer 52 Pantai Pasir Putih Sirih 53 Pantai Pasir Putih Tanpa Karang 54 Pantai Wirton 55 Pulau Tiga 55 Pulau Empat 55 Pulau Lima	Ds. Bulakan Kecamatan Cinangka Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Bulakan Kecamatan Cinangka Ds. Bulakan Kecamatan Cinangka Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Karang Suraga Kecamatan Cinangka Ds. Tambang Ayam Kecamatan Anyer Kecamatan Cinangka Kecamatan Anyer Kecamatan Anyer Kecamatan Anyer Kecamatan Anyer Kecamatan Anyer Kecamatan Cinangka Kecamatan Cinangka Kecamatan Cinangka Kecamatan Cinangka Kecamatan Cinangka Kecamatan Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu
IV	<u>DAYA TARIK WISATA TIRTA</u> 1 Kawah Naga (Air Panas) 2 Mata Air Cirahab 3 Batu Kuwung (Air Panas) 4 Bendungan Sungai Pamarayan 5 Pemandian Cikalerek 6 Situ Terate 7 Situ Blungun 8 River Tubing (Ngebolang) 9 Situ Ciherang 10 Situ Tasikardi 11 Taman Tirta Lestari 12 Pemandian Air Belerang 13 Pemandian Cibulakan 14 Binuang Waterpark 15 Subur Ciujung Indah 16 Kolam Renang Tanggul Tirta 17 Kolam Renang Sukacai 18 Pesona Waterpark 19 Cahaya Kolam Renang	Ds. Sindang Kerta Kec. Anyar Ds. Cisaat Kec. Padarincang Ds. Batukuwung Kec. Padarincang Ds. Panyabrangan Kec. Pamarayan Ds. Suka Bares Kec. Ciomas Ds. Terate Udik Kec. Cikande Ds. Sentul Kec. Kragilan Ds. Cikalumpang Kec. Padarincang Ds. Yuda Kec. Bandung Kecamatan Kramatwatu Kecamatan Cikande Kecamatan Kragilan Kecamatan Ciomas Kecamatan Binuang Kecamatan Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kecamatan Baros Kecamatan Bojonegara Kecamatan Cikande
V	<u>DAYA TARIK WISATA SEJARAH</u> 1 Mercusuar Kidul 2 Situs Situ Tasikardi 3 Makam Gunung Santri 4 Bendungan Lama Pamarayan 5 Sumur 17 (Tujuh belas) 6 Makam KH. Syam'un 7 Makam Nyimas Gamparan 8 Makam Sultan Ageng Tirtayasa 9 Makam Surya Manggala 10 Makam Kole 11 Makom Syech Nawawi 12 Makam Pangeran Sunya Raras 13 Masjid kuno Syech Nawawi 14 Musium (Bait Ilmi) Syech Nawawi	Ds. Cikoneng Kec. Anyar Ds. Margasna Kec. Kramatwatu Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Ds. Panyabrangan Kec. Pamarayan Ds. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Ds. Kamasan Kec. Cinangka Ds. Tanjung Sari Kec. Pabuaran Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa Ds. Ranca Sumur Kec. Kopo Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Ds. Tanara Kec. Tanara Ds. Tanara Kec. Tanara Ds. Tanara Kec. Tanara Ds. Tanara Kec. Tanara

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI/TEMPAT
15	Masjid Kuno Cikoneng	Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng
16	Batu Kereta	Ds. Ujung Tebu Kec. Ciomas
17	Sumur Tujuh	Kec. Waringinkurung
18	Batu Tumbung	Kec. Waringinkurung
19	Situs Patapan	Ds. Nagara Kec. Kibin
20	Situs Tirtayasa	Kec. Tirtayasa
21	Sumur Ciujung Indah	Kec. Pamarayan
22	Buyut Nyai Mas Carik	Ds. Sukabares, Kec. Waringin Kurung
23	Batu Lingga	Ds. Sidamukti , Kecamatan Baros
24	Anyar Lor	Ds. Anyar, Kec. Anyar
25	Kraton S.A Tirtayasa	Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa
26	Pecinan Tinggi	Ds. Pamengkang, Kec. Kramatwatu
27	Pengindelan Abang	Ds. Margasana, Kec. Kramatwatu
28	Rumah Benjol	Ds. Pamengkang, Kec. Kramatwatu
29	Mercusuar Anyar	Ds. Cikoneng, Kec. Anyar
30	Makam Pangeran Singarajan	Ds. Pontang, Kec. Pontang
31	Makam Ketengahan	Ds. Margasana, Kec. Kramatwatu
32	Bangunan Bunker Pulau Sanghiyang	Ds. Cikoneng, Kec. Anyar
33	Sirit Baduy	Ds. Waringin, Kec. Mancak
34	Cirampones	Ds. Sindang Mandi, Kec. Baros
35	Sukacai	Ds. Sukacai, Kec. Baros
36	Masjid Daarul Falah Cikoneng	Ds. Cikoneng, Kec. Anyar
37	Masjid Menara Baitul Mutaqin	Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara
38	Stasiun Kereta Api Cikeusal	Kecamatan Cikeusal
39	Stasiun Kereta Api Anyar	Ds. Cikoneng, Kec. Anyar
40	Makam Pangeran Singalarsa	Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa
41	Batu Lesung	Ds. Kosambiranyok, Kec. Anyar
42	Sirit Bedug	Ds. Kosambiranyok, Kec. Anyar
43	Jembatan Irigasi	Ds. Lempuyang, Kec. Tanara
44	Makam China	Ds. Lontar, Kec. Tanara
45	Naskah Kuno K.H . Kholid	Kecamatan Tanara
46	Masjid Jami Nawawi	Ds. Padaleman, Kec. Tanara
47	Batu Nisan Kampung Kapaten	Kecamatan Bojonegara
48	Rumah Kuno	Jl. Bojong Kadikaran Ciruas Kp. Setu
49	Rumah Kampong Setu	Ds. Waringin Kurung, Kec. Waringin Kurung
50	Stasiun Catang	Ds. Bojong Catang, Kec. Tunjung Teja
51	Batu Peta	Kecamatan Mancak
52	Petilasan Nyi Mas Gambaran	Ds. Tanjungsari, Kec. Pabuaran
VI	<u>DAYA TARIK WISATA SUAKA ALAM</u>	
	1 Gunung Puncak Pilar	Ds. Cikolelet Kec. Cinangka
	2 Gunung Puncak Cibaja	Ds. Cikolelet Kec. Cinangka
	3 Cagar Alam Rawa Dano	Ds. Panyirapan Kec. Gunung Sari
VII	<u>DAYA TARIK WISATA SENI/KERAJINAN</u>	
	1 Kerajinan Golok	Ds. Citaman Kec. Ciomas
	2 Kerajinan Gerabah	Ds. Bumi Jaya Kec. Ciruas
	3 Sentra Industri Tas	Ds. Kadu Genep Kec. Petir
VIII	<u>DAYA TARIK WISATA AGRO</u>	
	1 Agro Wisata Kebun Coklat	Ds. Sindang Karya Kec. Anyar
	2 Agro Wisata Kebun Coklat	Ds. Sindang Mandi Kec. Anyer
	3 Agro Wisata Kebun Buah Naga	Ds. Taman Sari Kec. Baros
IX	<u>DAYA TARIK WISATA BUDAYA</u>	
	1 Kp. Yudha Asri (Budaya)	Ds. Yudha Kec. Bandung
	2 Kesenian Buaya Putih	Ds. Padarincang Kec. Padarincang

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Serang, 2025

Tabel 2.6. 5 Daftar Nama Desa Wisata di Kabupaten Serang

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	TANGGAL	NO SK	POTENSI
1	DESA CIKOLELET	CINANGKA	6 November 2022	556/Kep.606-Huk/2017	PUNCAK CIBAJA, PUNCAK PILAR, CURUG LAWANG, CURUG KEMBAR
2	DESA SUKARATU	CIKEUSAL	30 September 2019	556/Kep.69-Huk.Disporapar/2019	PESONA RATU
3	DESA WARGASARA	TIRTAYASA	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	PULAU TUNDA, PANTAI BARAT, PENANAMAN MANGROVE, EKRAFT
4	DESA TAMBANG AYAM	ANYER	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	PANTAI SAMBOLO, BONSAI, SUMUR KINCLONG
5	DESA KUBANG BAROS	CINANGKA	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	CURUG BETUNG, BUKIT HERMIS, CURUG LILIA DAN SOUVENIR
6	DESA PAMARAYAN	PAMARAYAN	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	BENDUNGAN LAMA PAMARAYAN
7	DESA KADUBEUREUM	PADARINCANG	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	CURUG CIKOTAK, CURUG CIKARAKAL
8	DESA BANJARSARI	ANYER	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	PUNCAK MANIK
9	DESA LONTAR	TIRTAYASA	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	JEMBATAN PELANGI
10	DESA PULO PANJANG	PULO AMPEL	8 Februari 2021	556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021	PANTAI MUNIR, WISATA BAHARI, MANGROVE
11	DESA PADARINCANG	PADARINCANG	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	CURUG CIGUMAWANG DAN KACIDA CIBUNTU
12	DESA SITU TERATE	CIKANDE	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	DANAU SITU TERATE
13	DESA CURUG GOONG	PADARINCANG	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	CURUG GOONG, CIRAHAB
14	DESA SINDANGHEULA	PABUARAN	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	BENDUNGAN SINDANGHEULA
15	DESA LEBAK	CIOMAS	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	JERUK LEMON, GULA AREN
16	DESA CIKEDUNG	MANCAK	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	RAWA DANO
17	DESA UMBUL TANJUNG	CINANGKA	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	WISATA ANAK TANGGA
18	DESA KAMASAN	CINANGKA	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	MAKOM K.H SYAM'UN
19	DESA KATULISAN	CIKEUSAL	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	KAMPUNG SADANTA
20	DESA KADUGENEP	PETIR	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	SENTRA INDUSTRI TAS
21	DESA SASAHAN	WARINGIN KURUNG	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	WISATA ALAM BERKAH
22	DESA BANDULU	ANYER	25 Maret 2022	556/Kep.267-Huk.Disporapar/2022	PANTAI BANDULU, LEMBAH HIJAU
23	DESA MARGAGIRI	BOJONEGARA	21 November 2022	556/Kep.527-Huk.Disporapar/2022	AGRO WISATA KEBUN ANGGUR
24	DESA SUKADANA	CIOMAS	21 November 2022	556/Kep.527-Huk.Disporapar/2022	DANAU CIBANTEN
25	DESA SUKABARES	WARINGIN KURUNG	21 November 2022	556/Kep.527-Huk.Disporapar/2022	MAKAM NYAI MAS CARIK GAMPARAN
26	DESA MANDER	BANDUNG	21 November 2022	556/Kep.527-Huk.Disporapar/2022	WISATA BUDAYA YUDHA ASRI
27	DESA TANARA	TANARA	8 Februari 2023	148-Huk.Disporapar/2023	WISATA RELIGI MAKAM SYEKH NAWAWI AL-BANTANI

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	TANGGAL	NO SK	POTENSI
28	DESA PANYABRANGAN	CIKEUSAL	8 Februari 2023	148-Huk.Disporapar/2023	WISATA SEJARAH
29	DESA MEKARSARI	CINANGKA	8 Februari 2023	148-Huk.Disporapar/2023	PERIUK NANGKUP
30	DESA SUKABARES	CIOMAS	8 Februari 2023	148-Huk.Disporapar/2023	WISATA TIRTA
31	DESA TIRTAYASA	TIRTAYASA	16 Maret 2023	556/Kep. 178-Huk.Disporapar/2023	BUMI TIRTAYASA

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Serang, 2025

Tabel 2.6. 6

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2020-2024

NO	WISATAWAN NUSANTARA					WISATAWAN MANCANEGERA				TOTAL WISNUS DAN WISMAN
	TAHUN	AKOMODASI	OBYEK WISATA	RUMAH MAKAN	JUMLAH	AKOMODASI	OBYEK WISATA	RUMAH MAKAN	JUMLAH	
1	2020	396.512	817.888	154.674	1.369.074	4.889	43	37	4.969	1.374.043
2	2021	483.578	787.406	201.634	1.472.618	3.263	60	1.312	4.635	1.477.253
3	2022	574.910	1.293.829	295.676	2.164.415	10.338	9	3.203	13.550	2.177.965
4	2023	605.225	1.653.404	268.592	2.527.221	16.278	18	3.543	19.839	2.547.060
5	2024	595.139	2.418.692	268.084	3.281.915	32.133	-	6.050	38.183	3.320.098

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Serang, 2025

5. Letak Geografis Strategis

Kabupaten Serang berada di jalur utama nasional yang berdekatan dengan Jakarta. tersambung dengan tol Jakarta-Merak serta tol Serang-Panimbang, dan akses ke pelabuhan merak dan Kawasan industri Cilegon yang tidak jauh. Hal tersebut mendukung biaya dan akses distribusi logistik antar wilayah, menjadi simpul pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian barat, dan mendukung daya tarik tinggi untuk investasi masuk ke wilayah Kabupaten Serang.

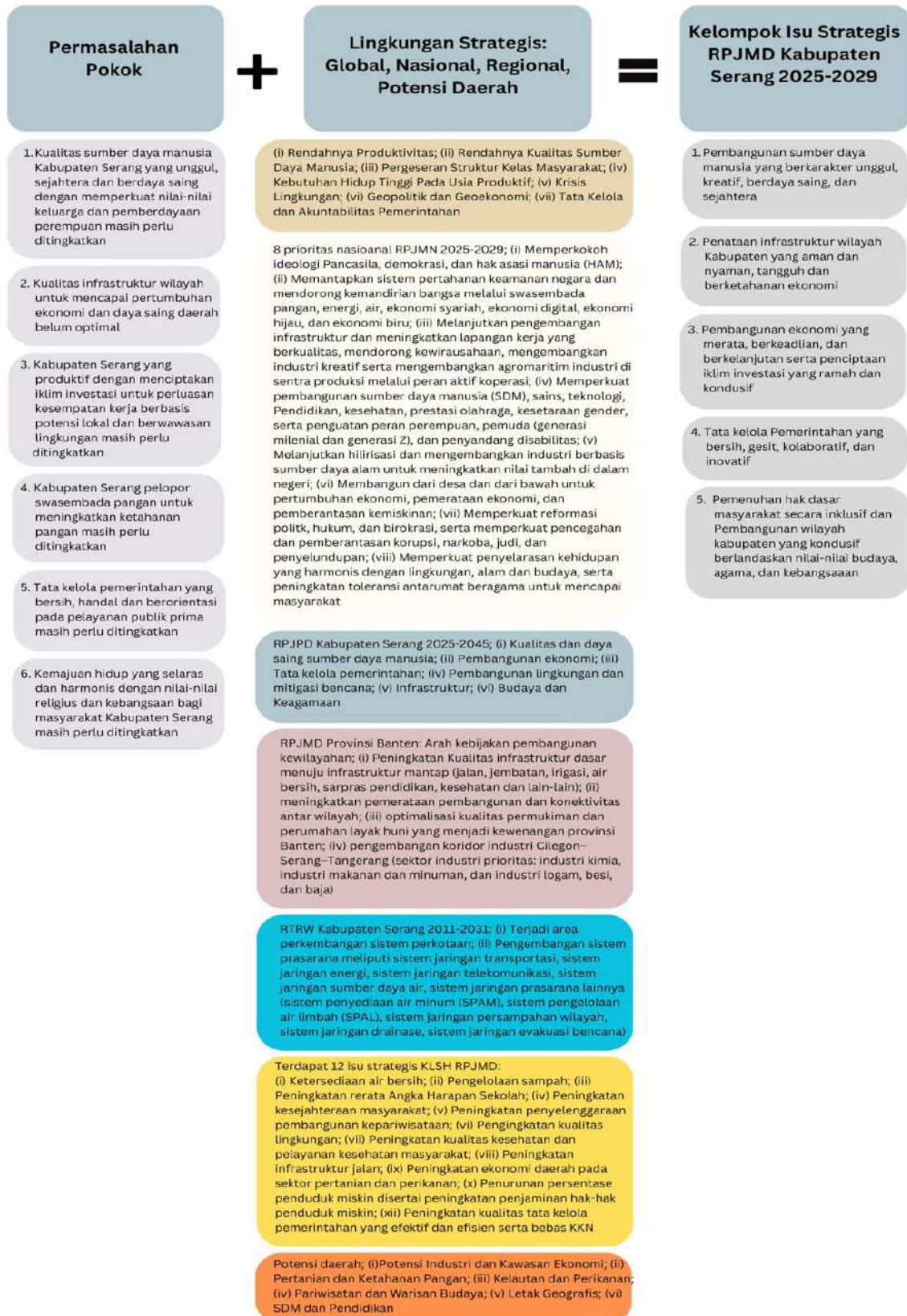
6. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Bonus demografi yang diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2045 menjadi potensi yang besar bagi wilayah Kabupaten Serang dengan melimpahnya sumber daya manusia (SDM) produktif. Potensi tersebut perlu untuk ditangkap dengan semaksimal mungkin oleh seluruh stakeholder terutama pada sektor Pendidikan dan Kesehatan. Adanya peran sekolah jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, serta kampus besar seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Syekh Nawawi Banten, menjadi gerbang utama dalam mendukung SDM Kabupaten Serang yang berdaya saing, unggul, dan inovatif. Selain itu, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, akan lebih banyak membutuhkan layanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pada tingkat pertama maupun tingkat lanjutan termasuk layanan rujukan.

2.6.3.2 Kelompok Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

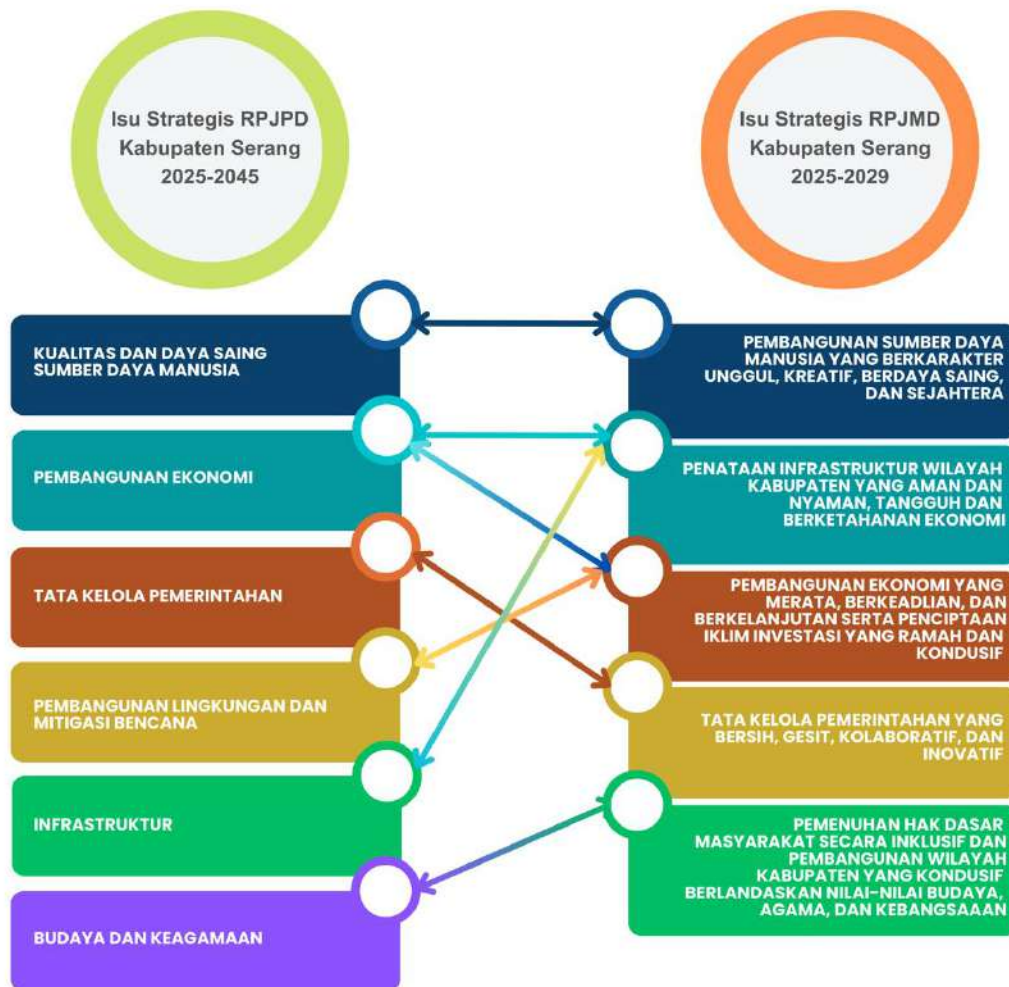
Perumusan isu strategis mendasarkan pada isu RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap I, isu dalam RPJMN 2025–2029, RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, tantangan Global, KLHS RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029, dan potensi daerah, dipadukan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Gambar 2.6. 3
Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029



Kelompok isu strategis RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 mengacu pada kelompok isu strategis RPJPD Kabupaten Serang tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Gambar 2.6. 4
Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029



Selanjutnya disajikan keterkaitan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dengan isu Strategis RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029.

Gambar 2.6. 5

Keterkaitan Isu Strategis RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029





BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi

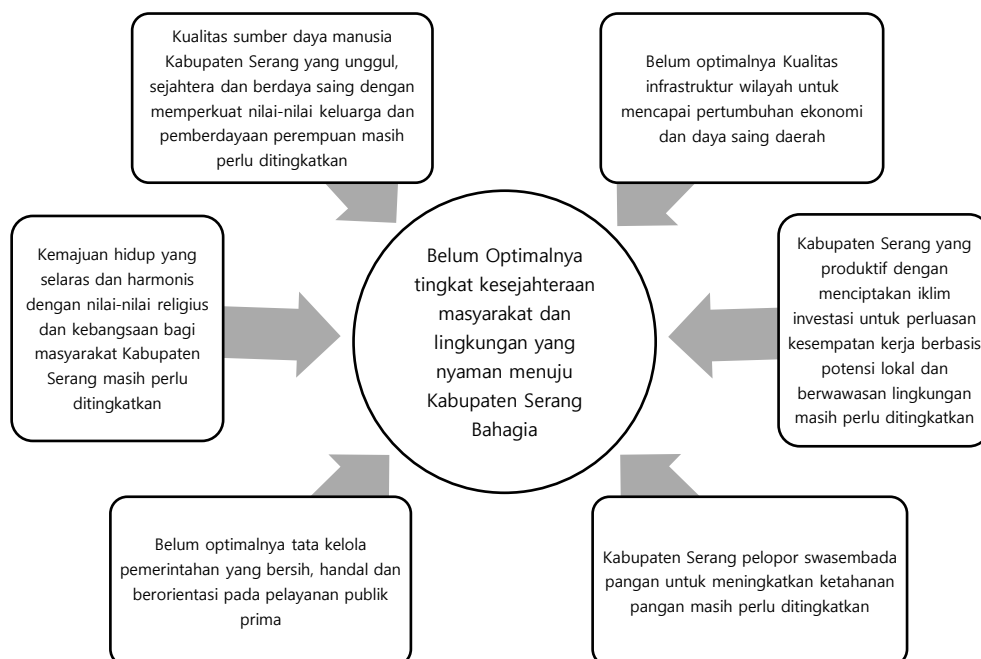
Visi pembangunan dapat diterjemahkan sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi akan menjadi landasan utama dalam memilih dan menetapkan misi, strategi, arah kebijakan, maupun rencana program pembangunan di suatu daerah guna mencapai tujuan atau target yang diinginkan tersebut. Dalam kerangka pembangunan daerah, visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diajukan pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang terpilih periode 2025-2029 mengusung visi :

“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”

Visi di atas didasari hasil telaahan dan kajian yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang menjelaskan bahwa “Tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman menuju Kabupaten Serang bahagia masih belum optimal” sehingga menjadi atensi yang serius untuk diselesaikan.

Gambar 3.1. 1 Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Serang



Visi tersebut akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Serang dalam pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Kebahagiaan yang didefinisikan sebagai **Perwujudan hasil pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman** baik secara fisik, sosial, maupun emosional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Kabupaten Serang adalah suatu wilayah dengan penduduk yang beragam baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu, Kabupaten Serang harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga akan melahirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

Kabupaten Serang Bahagia akan dapat diwujudkan (aktualisasi) melalui 2 (dua) upaya atau pendekatan utama pembangunan yaitu melalui:

- 1) Peningkatan kesejahteraan
Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dilakukan pada kehidupan baik itu **sejahtera finansial, mental, kesehatan, dan spiritual**. Peningkatan kesejahteraan ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat di semua wilayah Kabupaten Serang.
- 2) Menciptakan lingkungan yang nyaman
Menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan upaya mendasar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Serang sebagai daerah dengan **hunian, pendidikan, kreatifitas dan industri secara harmonis dan berkelanjutan**.

Gambaran dan keterkaitan antara visi pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Serang untuk periode 2025-2029.

Gambaran Visi

- **Visi RPJMN 2025-2029 (Nasional)** Visi nasional adalah "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini berfokus pada pembangunan yang membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang disebut Asta Cita.
- **Visi RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 (Provinsi)**. Visi Provinsi Banten adalah "Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi". Visi ini merupakan penjabaran dari cita-cita pembangunan Banten ke arah yang lebih baik dan tidak terlepas dari Visi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025-2045, yaitu "Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa". Visi ini diwujudkan melalui lima misi yang menjadi prioritas daerah.
- **Visi RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 (Kabupaten)**. Visi Kabupaten Serang adalah "Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia". Visi ini didasari oleh temuan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman belum optimal. Konsep "Bahagia" di sini diartikan sebagai perwujudan hasil pembangunan yang mencapai kondisi masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dengan lingkungan yang nyaman. Visi ini akan diaktualisasikan melalui dua pendekatan utama: peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lingkungan yang nyaman.

Keterkaitan antara ketiga visi ini menunjukkan adanya hierarki dan kesinambungan dalam perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah.

- **RPJMD Provinsi Banten** memiliki visi "Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi". Komponen "maju" dalam visi ini selaras dengan visi nasional "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Misi-misi di bawah RPJMD Provinsi Banten juga dirumuskan untuk mendukung tema nasional seperti "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan".

- **RPJMD Kabupaten Serang** dengan visinya "Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia" juga berupaya menyelaraskan diri dengan kebijakan nasional dan provinsi. Salah satu misinya, yaitu "Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan", secara eksplisit dinyatakan sejalan dengan prioritas nasional (Asta Cita) yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini menunjukkan bahwa visi dan misi pembangunan di Kabupaten Serang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar di tingkat provinsi dan nasional.

Visi Kabupaten Serang berfungsi sebagai penjabaran dan instrumen operasional untuk mendukung pencapaian visi RPJMD Provinsi Banten dan RPJMN, memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat lokal berkontribusi secara sinergis terhadap cita-cita pembangunan Indonesia di tingkat nasional.

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Serang untuk mewujudkan visi daerah. Dalam kerangka pembangunan, misi adalah langkah-langkah konkret yang dirumuskan untuk mencapai visi. Terdapat kesinambungan yang jelas antara misi-misi pada RPJMN (Nasional), RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Serang untuk periode 2025-2029. Misi pada setiap tingkatan menjadi instrumen untuk mewujudkan visi yang lebih besar, menciptakan sebuah rantai perencanaan yang terintegrasi.

RPJMN menetapkan misi-misi strategis yang digambarkan dalam Delapan Asta Cita atau Misi Presiden, seperti pemantapan pertahanan, swasembada pangan, dan reformasi birokrasi. Ini adalah agenda utama pemerintah pusat. Selanjutnya, **RPJMD Provinsi Banten** menerjemahkan agenda nasional tersebut ke dalam Prioritas Daerah (PD), yang mencakup reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi, dan pemerataan infrastruktur. Misi provinsi ini menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan regional. Terakhir, **RPJMD Kabupaten Serang** merumuskan misi yang spesifik untuk daerahnya, seperti menjadikan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan. Misi ini sejalan dengan prioritas nasional (Asta Cita) dan memastikan bahwa setiap program di tingkat kabupaten berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas di tingkat provinsi dan nasional.

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Serang adalah:

Misi 1 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam pembangunan daerah, mengingat manusia (masyarakat) merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, manusia harus memiliki kemampuan yang unggul dalam perencanaan maupun melaksanakan pembangunan yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu di era globalisasi ini, SDM harus menjadi insan yang unggul sekaligus memiliki daya saing tinggi sehingga mampu memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dan mengimbangi persaingan global.

Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing ini dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan. Pendekatan melalui ini keluarga ini bertolak dari pemikiran bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk watak, karakter

dan perilaku manusia. Untuk itu, melalui nilai-nilai kearifan dan kebaikan dalam sebuah keluarga diharapkan akan membentuk SDM unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Misi 2:

Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi diharapkan mampu menciptakan peluang dan kesempatan bekerja dan berusaha sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam memicu/menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah adalah ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan kegiatan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial di suatu wilayah.

Infrastruktur berperan sebagai pondasi utama yang mendukung berbagai aktivitas bisnis, produksi maupun distribusi barang dan jasa. Selain itu dalam konteks yang lebih luas, tersedianya infrastruktur di suatu daerah akan meningkatkan daya saing daerah serta akan menjadi daya tarik utama investor untuk melakukan pengembangan usaha/kegiatan sehingga akan mendorong pengembangan daerah baik secara kewilayahan maupun perekonomian.

Misi 3:

Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan

Misi ini dilandasi oleh sebuah pendekatan pemikiran holistik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan. Artinya bahwa dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan investasi yang dilaksanakan harus bisa menjamin perluasan dan penciptaan kesempatan kerja maupun usaha bagi masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, sehingga investasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi pihak tertentu saja tetapi juga harus menjamin dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan sekitar.

Misi 4:

Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok selain sandang (pakaian) dan papan (hunian/tempat tinggal), oleh karena itu pangan memiliki nilai strategis dalam kehidupan manusia. Kabupaten Serang sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sektor pertanian berupaya untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan guna meningkatkan ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan terutama untuk Kabupaten Serang. Kebijakan ini sejalan dengan prioritas nasional (Asta Cita) yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Upaya untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri (swasembada pangan) ini melibatkan peningkatan produktivitas pertanian pangan, diversifikasi tanaman pangan, perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

Misi 5:

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima

Wewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima merupakan tujuan yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang fektif dan berwibawa. Dalam pelaksanaan kebijakan ini melibatkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi.

Pelayanan publik yang prima menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Serang. Pelayanan publik yang prima meliputi pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Misi 6:

Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang

Perwujudan misi tersebut diatas adalah menciptakan kemajuan yang seimbang dan harmonis dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan karakter bangsa, ini mencakup pembangunan yang memperhatikan aspek spiritual sosial, dan kebangsaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup rukun dan sejahtera. Kemajuan hidup mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selaras dan harmonis mengandung pengertian bahwa pembangunan harus seimbang dan harmonis. Artinya tidak hanya fokus pada satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau terpinggirkan.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 serta harus mendukung Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN) yang merupakan misi (agenda) pembangunan dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam tabel dibawah dapat dilihat keterkaitan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan misi (agenda) pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1. 1

Keterkaitan Visi pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dengan Visi pada RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045	RPJPN 2025-2045
"Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agamis"	"Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa"	"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"
"Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia"	"Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi"	"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia” memiliki keterhubungan yang kuat dengan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045. Visi jangka panjang daerah yang berbunyi “Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agamis” menekankan empat pilar utama: kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan, dan nilai keagamaan. Visi “Kabupaten Serang Bahagia” merupakan turunan langsung dari pilar kesejahteraan dan kualitas hidup yang ingin diwujudkan secara bertahap selama periode jangka menengah. Dengan demikian, RPJMD 2025–2029 memegang peran sebagai fondasi tahapan awal untuk mencapai kondisi masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga bahagia dalam aspek sosial dan spiritual, selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas daerah.

Selanjutnya, visi RPJMD Kabupaten Serang juga memiliki keselarasan kuat dengan visi pembangunan Provinsi Banten dalam RPJMD 2025–2029, yaitu “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang bahagia tidak dapat dilepaskan dari terciptanya pemerataan pembangunan, kemajuan wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih sebagaimana menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten. Di tingkat nasional, visi RPJMN 2025–2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” menekankan percepatan pembangunan manusia, penguatan ekonomi, serta tata kelola yang efektif. Seluruh arah pembangunan tersebut bersinergi dengan tujuan Kabupaten Serang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kebahagiaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, visi RPJMD Kabupaten Serang menjadi bagian integral dari upaya pembangunan yang serasi antara pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus mendukung pencapaian visi besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

**Tabel 3.1. 2 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD dan RPJPD
Kabupaten Serang Tahun 2025-2029**

RPJPD Kabupaten Serang 2025- 2045	RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029	RPJMD Provinsi Banten 2025- 2029	RPJMN 2025- 2029
“Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agamis”	“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”	“Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”	“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”
Misi 1: Transformasi sosial untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber Kabupaten Unggul, Berdaya memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Misi 4: Mewujudkan pemerataan	Misi 3: Melanjutkan pengembangan

Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Misi 3: Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan	Misi 2: Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial. Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.	Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi 4: Transformasi tata Kelola pemerintahan akuntabel dan transparan serta pelayanan publik yang berkualitas	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	Misi 1: Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan Tangguh.	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima
Misi 5: Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	Misi 1: Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan Tangguh.	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Implementasi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja yang bersifat operasional. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun

2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Tujuan bersifat operasional dan dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, adapun tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan, memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan
 - b. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan
2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas
3. Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan, memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
 - b. Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan
4. Misi 4 : Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memiliki tujuan :
 - a. Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan
5. Misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima, memiliki tujuan :
 - a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
6. Misi 6 : Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan, memiliki tujuan :
 - a. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, adapun sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah.

1. Misi 1:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan, memiliki sasaran :

- a. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan
- d. Terwujudnya keluarga yang berkualitas
- e. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
- f. Meningkatnya literasi Masyarakat

Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan, memiliki sasaran

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif
- b. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak
- c. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

2. Misi 2:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas, memiliki sasaran :

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
- b. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
- c. Meningkatkan kontribusi KUMKM dalam perekonomian
- d. Meningkatkan daya saing industri
- e. Meningkatkan nilai tambah perdagangan
- f. Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Misi 3:

Tujuan 1 : Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, memiliki sasaran :

- a. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
- b. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan yang merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan, memiliki sasaran :

- a. Meningkatkan pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa
- b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
- c. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

4. Misi 4 :

Tujuan 1 : Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan, memiliki sasaran :

- a. Meningkatkan Produksi Pertanian
- b. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
- c. Meningkatkan Produksi Perikanan

5. Misi 5 :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki sasaran :

- a. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
- b. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
- e. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
- f. Terwujudnya profesionalitas ASN
- g. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
- h. Meningkatkan keamanan informasi
- i. Meningkatkan tata Kelola arsip
- j. layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif
- k. Meningkatkan tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan

- l. Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - m. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
 - n. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
6. Misi 6 :
- Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM, memiliki sasaran :
- a. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat
 - b. Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. 1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Manusia	73,83	74,78	75,60	76,45	77,62	78,2	
		S1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Kemampuan Literasi SD	54,46	56,96	59,46	61,96	64,46	66,96	Urusan Pendidikan
			Skor Kemampuan Numerasi SD	49,8	52,7	55,6	58,5	61,4	64,3	
			Skor Kemampuan Literasi SMP	61,80	62,90	64,00	65,10	66,20	67,30	
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	58,13	59,63	61,13	62,63	64,13	65,63	
			Harapan Lama Sekolah	13,48	13,67	13,84	14,08	14,33	14,57	
			Rata-Rata Lama Sekolah	7,89	8,1	8,31	8,51	8,72	8,93	
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,8	75,08	75,37	75,65	75,93	76,21	Urusan Kesehatan
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	95	96	97	98	98	98	
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥93%	≥94%	≥95%	≥96%	≥97%	≥98%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	78,52	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
			Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	69%	69,50%	70%	70,50%	71%	72%	
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,42	59,47	59,52	59,57	59,63	59,69	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57,04	57,33	57,61	57,90	58,19	58,48	Urusan Kependudukan dan Olahraga
			Indeks Partisipasi Olahraga	0,256	0,258	0,259	0,260	0,261	0,263	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		pembangunan dan prestasi olah raga								Urusan Perpustakaan
		S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	54,30	58,43	62,87	67,67	72,81	78,34	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	71,83	74,70	77,68	80,78	84,01	84,01	
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	0	70	75	80	85	90	
	T1.2: Mewujudkan pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	4,00-4,08	3,57-4,00	3,40-4,00	3,25-3,75	2,90-3,36	2,85-3,36	Urusan Sosial
		S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,67	58,17	58,67	59,17	59,67	60,17	
		S1.2.2:	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,72	92,91	93,10	93,28	93,47	93,66	
										Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,518	0,505	0,492	0,479	0,466	0,453	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,97	63,71	64,47	65,23	66	66,77	
		S1.2.3: Terpenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	5.52	7.11	9.78	12.44	15.1	16.69	
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	10.16	14.45	20.75	29.10	37.45	43.75	
			Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	62.72	64.44	66.16	67.88	69.6	71.32	
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,60-6,60	5,95	5,75-6,75	6,00-7,2	6,99-7,99	6,5-7,45	
		S2.1.1: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	66,25	67,5	68,25	68,90	69,65	70,50	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	Urusan Perhubungan
		S2.1.3: Meningkatkan kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	14.69	19.59	22.04	22.53	23.51	24.49	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Rasio Kewirausahaan	0,5	0,75	1	1	1	1	
			Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	51	52	52	53	53	53	
			Pertumbuhan Wirausaha	3	3	3	3	3	3	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan	1	1	1	1	1	1	
		S2.1.4: Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	46,70-47	47,00-47,2	47,2-47,5	47,5-48	48-48,45	48,5-49,5	Urusan Perindustrian
		S2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,10%	9,15%	9,20%	9,25%	9,30%	9,35%	Urusan Perdagangan
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,4	2,42	2,47	2,52	2,57	2,6	Urusan Pariwisata
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	9,18-9,74	8,93-9,18	8,85-9	8,50-8,75	8,20-8,53	7,75-8,53	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22,61	23,17	23,75	24,34	24,94	25,56	
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	84,94	85,75	86,57	87,40	88,40	89,09	Urusan Tenaga Kerja
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	86,82	89,42	92,11	94,87	97,72	100,00	Urusan Penanaman Modal
			Gini Ratio	0.262-0.266	0.257-0.262	0.254-0.262	0.250-0.262	0.243-0.262	0.240-0.261	
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan									
		S3.2.1:	Indeks Desa	67.51	67.78	68.04	68.30	68.57	68.83	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa								
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,77	68,02	68,09	68,50	68,78	68,81	Urusan Lingkungan Hidup
		S3.2.3: Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	65	67	69	71	73	75	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	8.06	7.88	7.72	7.53	7.35	7.08	
		S4.1.1: Meningkatkan Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian							Urusan Pertanian
			1. Tanaman Pangan	0,44	0,27	0,27	0,28	0,31	0,32	
			2. Hortikultura	5	5	5	5	5	5	
			3. Perkebunan	5	5	5	5	5	5	
			4. Peternakan	0,98	0,99	1	1	1,06	1,06	
		S4.1.2: Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81.76	82.14	82.51	82.88	83.26	83.63	Urusan Pangan
		S4.1.3: Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	64.368, 25	64.791, 29	65.439, 20	66.093, 58	66.754, 52	67.422, 25	Urusan Kelautan dan Perikanan
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	77,4	78,1	78,8	79	81	83,2	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,75						Urusan Komunikasi dan Informatika
			Indeks Pemerintahan Digital		1	1,1	1,2	1,3	1,4	Urusan Komunikasi dan Informatika
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	88,50	88,75	88,90	88,95	90,00	91,00	Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	Unsur Sekretariat Daerah
			Nilai SAKIP Pemda	78	78,25	78,50	79	80,10	81	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	Unsur Pengawasan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	95.25	95.75	96.25	96.75	97.25	97.50	Unsur Perencanaan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unsur Keuangan
			Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	Unsur Keuangan
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84,14	84,39	84,64	84,89	85,14	85,39	Unsur Kepegawaian
		S5.1.7:	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.60	2.65	2.69	2.72	2.74	2.75	Urusan Statistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan								
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (indeks KAMI)	497	597	697	772	829	832	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	61	65	68	70	75	80	Urusan Kearsipan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,5	86,5	88	89	90	
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	81	82	83	84	85	85	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		S5.1.11:: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,2	72,2	72,2	72,9	72,9	72,9	Kewilayahan
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5	87,5	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang termanfaatkan	55	61	67	73	81	89	Unsur Penelitian dan Pengembangan
Misi 6:	T6.1:	S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	Unsur Sekretariat DPRD
			Capaian Aksi HAM	85	86	87	88	89	90	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM									
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81	81.2	81.4	81.6	81.8	82	Unsur Pemerintahan Umum
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan	27,27%	36,36%	45,45%	54,55%	54,55%	63,64%	Urusan Kebudayaan

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagai implementasi Tahap I (2025-2029) dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, harus selaras dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJPD dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Keselarasan kebijakan antar dokumen perencanaan pembangunan ini diperlukan guna mencapai target pembangunan jangka menengah guna mendorong pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan daerah Kabupaten Serang.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 pada akhir periodenya merupakan masa transisi tahun 2030, dari RPJMD Tahun 2025-2029 ke periode RPJMD Tahun 2030-2034 sebagai Tahap Kedua RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045.

3.3.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk merumuskan strategi, perlu diperhatikan permasalahan, lingkungan dinamis serta potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Serang maupun di luar Kabupaten Serang secara langsung memengaruhi perkembangan/ pembangunan Kabupaten Serang. Perumusan strategi pembangunan Kabupaten Serang 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. 1
Perumusan Strategi Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Masih rendahnya tingkat intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dimana Indeks Modal Manusia Indonesia tahun 2020 sebesar 0,54, lebih tinggi dari Filipina (0,45) namun tidak lebih besar dari Singapura (0,88)	Adanya bonus demografi di Indonesia yang bisa menjadi potensi tersedianya penduduk usia produktif yang merupakan modal dasar pembangunan	Penguatan dan peningkatan akses serta mutu/kualitas layanan pendidikan formal dan non formal secara merata pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (<i>triple planetary crisis</i>) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Faktor ini selain berdampak terhadap ketahanan lingkungan hidup juga akan berimbas pada derajat /tingkat kesehatan masyarakat. fenomena tersebut, diperparah dengan faktor perilaku dan pola hidup (kebiasan) masyarakat juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah disamping masih minimnya akses sarana prasarana layanan dasar.	Telah terbangunnya fasilitas kesehatan masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Serang serta adanya kader kesehatan merupakan modal/potensi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan guna peningkatan derajat kesehatan.	Penguatan dan perluasan akses layanan kesehatan berkualitas termasuk upaya promotif-preventif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan	Masih berkembangnya anggapan bahwa layanan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tidak ramah, tidak berpihak kepada pasien, dan tidak berkualitas.	telah terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan oleh pihak swasta/non pemerintah berpotensi menjadi mitra pemerintah daerah sebagai fasilitas kesehatan rujukan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
	Sasaran 1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	❑ Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ❑ Data terkait angka kelahiran total tidak sama antara pusat dan daerah ❑ Cakupan kepesertaan MKJP masih rendah dan <i>unmetneed</i> yang masih tinggi	Pergeseran struktur kelas masyarakat dari kelompok keluarga kelas menengah menjadi calon kelompok rentan miskin sebagai akibat pemutusan hubungan kerja dampak pelambatan ekonomi dunia. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dan tingkat kesejahteraan keluarga	Adanya program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah	Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
	Sasaran 1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Bonus demografi yang terjadi merupakan peluang sekaligus tantangan besar bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan SDM yang tersedia.	Berkembangnya kelompok atau komunitas kepemudaan dapat menjadi modal dan mitra pemerintah dalam pembangunan	Peningkatan dan perluasan akses peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dan peningkatan prestasi olahraga
	Sasaran 1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Masih rendahnya literasi masyarakat	Kemajuan teknologi yang memunculkan berbagai aplikasi/platform digital dapat menjadi faktor pendorong turunnya minat baca (literasi) masyarakat	Berkembangnya layanan literasi (perpustakaan) yang berbasis digital	Pengembangan dan perluasan akses terhadap bahan bacaan berbasis digital
	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Masih Rendahnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang inklusif	Pelambatan perekonomian dunia dan di Indonesia memberi tekanan yang kuat pada penurunan pendapatan masyarakat, yang dapat berimbas pada meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Munculnya organisasi /kelompok/komunitas nirlaba yang secara katif melakukan pendampingan terhadap penyandang masalah sosial merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial	Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan perlindungan sosial yang adaptif serta pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial
	Menigkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	❑ Masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen ❑ Kurang optimalnya peranserta organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender			

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
		❑ Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak			
	Sasaran 1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Belum optimalnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Adanya rencana pemerintah pusat terkait program pembangunan 3 juta unit rumah	Ketersediaan lahan yang cukup luas, meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk, posisi strategis Kabupaten Serang yang didukung jaringan tol dan kereta, serta program daerah terkait peningkatan akses infrastruktur dan hunian layak, menjadi potensi besar untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta unit rumah.	Perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta peningkatan kualitas lingkungan hunian
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan berkualitas	Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, posisi strategis Kabupaten Serang di jalur tol dan kereta lintas Jawa, adanya ketimpangan infrastruktur antarwilayah, kondisi kerentanan bencana di wilayah pesisir dan selatan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah, serta dukungan program strategis pusat dan provinsi	Posisi strategis Kabupaten Serang di jalur tol, kereta, dan dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, adanya dukungan program strategis nasional dan provinsi, ketersediaan lahan untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur baru, serta peluang investasi dan kemitraan swasta, menjadi potensi penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar secara merata dan berkelanjutan
	Sasaran 2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Belum optimalnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Letak strategis Kabupaten Serang sebagai simpul transportasi utama di Jawa, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang meningkatkan kebutuhan mobilitas, ketergantungan pada transportasi jalan, keterbatasan transportasi umum lokal,	Adanya jaringan tol dan jalur kereta api nasional, kedekatan dengan pelabuhan dan bandara, peluang integrasi moda transportasi perkotaan dan	Peningkatan kualitas layanan konektivitas yang aman, nyaman dan terjangkau

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
			ketidakmerataan konektivitas antarwilayah, serta adanya dukungan program strategis nasional dan provinsi di bidang jalan tol dan kereta api.	regional, dukungan investasi pemerintah dan swasta, serta peran transportasi dalam mendukung sektor industri, perdagangan, dan pariwisata, menjadi potensi penting untuk mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau di Kabupaten Serang	
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Masih rendahnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Dominasi UMKM dalam struktur ekonomi daerah dengan kontribusi PDRB yang masih rendah, keterbatasan akses permodalan dan literasi keuangan, rendahnya kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi digital, tingginya persaingan pasar, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah dan peluang perkembangan ekonomi digital.	Besarnya jumlah UMKM di berbagai sektor, dukungan program pemerintah pusat dan daerah, pasar lokal dan regional yang luas karena posisi strategis, potensi ekonomi kreatif dan pariwisata, perkembangan e-commerce dan digitalisasi usaha, serta peluang kemitraan dengan industri besar, menjadi potensi penting dalam meningkatkan kontribusi KUMKM terhadap perekonomian daerah	Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM
	Meningkatnya daya saing industri				
	Sasaran 2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Masih rendahnya nilai tambah perdagangan	Posisi strategis Kabupaten Serang sebagai simpul perdagangan Jawa–Sumatera, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang mendorong konsumsi, dominasi perdagangan tradisional dengan nilai tambah rendah, keterbatasan akses UMKM ke pasar modern dan e-commerce, infrastruktur logistik yang belum merata, persaingan ketat dengan produk impor, serta adanya dukungan program pemerintah pusat dan daerah	Posisi geografis yang strategis dekat Jakarta dan pelabuhan, pertumbuhan pasar konsumen yang besar, peluang integrasi UMKM ke pasar modern dan e-commerce, dukungan program digitalisasi perdagangan, serta pengembangan infrastruktur logistik dan investasi nasional, menjadi	Peningkatan kualitas komoditas perdagangan dan perluasan akses pemasaran berbasis digital

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				potensi penting untuk meningkatkan nilai tambah perdagangan di Kabupaten Serang	
	Sasaran 2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Masih rendahnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	tren wisata global ramah lingkungan, perkembangan digitalisasi promosi, peningkatan akses transportasi, serta peluang kolaborasi dengan swasta dan komunitas. Tantangannya berupa persaingan antar destinasi, perubahan perilaku konsumen, dinamika ekonomi global, ancaman kerusakan lingkungan, dan cepatnya pembentukan citra melalui media digital.	Tren wisata ramah lingkungan, digitalisasi promosi, akses transportasi yang baik, serta kolaborasi dengan swasta dan komunitas. Persaingan antar destinasi mendorong inovasi, sementara perilaku konsumen yang selektif membuka peluang produk unik dan premium. Media digital dan dinamika global juga memberi kesempatan memperluas pasar serta memperkuat citra daerah.	Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata potensial dan unggulan serta perluasan pengembangan ekonomi kreatif
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Belum optimalnya peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	perubahan struktur ekonomi global, perkembangan industri 4.0 dan digitalisasi, persaingan antarwilayah, serta pergeseran pola kerja pasca-pandemi yang menuntut tenaga kerja adaptif dan berkompetensi tinggi, sementara potensi daerah terlihat dari besarnya bonus demografi, ketersediaan lembaga pendidikan vokasi dan balai latihan kerja, dukungan kebijakan peningkatan SDM, serta tumbuhnya sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang dapat menjadi motor penyerap tenaga kerja baru.	besarnya bonus demografi dengan ketersediaan tenaga kerja usia produktif, keberadaan lembaga pendidikan kejuruan dan balai latihan kerja yang dapat meningkatkan keterampilan, dukungan kebijakan pusat dan daerah dalam program vokasi serta sertifikasi, tumbuhnya sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja, kemitraan dengan dunia usaha dan asosiasi industri dalam membuka lapangan kerja, serta dukungan infrastruktur dasar yang semakin baik untuk	Peningkatan dan perluasan akses kesempatan kerja berbasis kompetensi

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				mendorong iklim investasi dan penciptaan pekerjaan baru.	
	Sasaran 3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Masih lemahnya daya tarik iklim investasi	Perubahan regulasi nasional terkait investasi dan kemudahan berusaha, persaingan antar daerah dalam menarik investor, perkembangan teknologi digital yang menuntut pelayanan perizinan berbasis elektronik, kondisi infrastruktur daerah, serta kebutuhan stabilitas politik dan tren investasi hijau yang kini menjadi perhatian global	lokasi Kabupaten Serang yang strategis di jalur industri dan perdagangan, ketersediaan lahan serta akses infrastruktur memadai, pertumbuhan sektor industri dan ekonomi kreatif, dukungan kebijakan promosi investasi dan penyederhanaan perizinan, ketersediaan tenaga kerja produktif, serta pembangunan infrastruktur dasar yang semakin meningkatkan daya tarik investasi.	Peningkatan dan pengembangan kemudahan dan keamanan investasi di daerah
	Sasaran 3.2.1: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masih Rendahnya Prosentase Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM)	Kebijakan nasional terkait dana desa dan pembangunan berbasis masyarakat, tuntutan transparansi dan partisipasi warga, dinamika sosial-ekonomi desa akibat urbanisasi dan digitalisasi, persaingan antar desa dalam mengembangkan potensi unggulan, kolaborasi multipihak, serta tantangan perubahan iklim yang memengaruhi ketahanan desa; sementara potensi daerah terlihat dari ketersediaan sumber daya alam dan lahan produktif, kekayaan budaya dan wisata desa, dukungan kebijakan dana desa, berkembangnya BUMDes dan kelembagaan lokal, bonus demografi dengan tenaga kerja muda, serta meningkatnya akses digital yang memperluas peluang usaha dan pemasaran produk desa.	Tersedianya sumber daya alam dan lahan produktif untuk pertanian, perikanan, dan usaha desa, kekayaan budaya serta potensi wisata desa yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru, dukungan kebijakan pemerintah melalui dana desa dan program pemberdayaan, tumbuhnya BUMDes dan kelembagaan ekonomi lokal sebagai motor penggerak desa, bonus demografi yang menyediakan tenaga kerja muda produktif, serta akses teknologi digital yang semakin luas sehingga membuka peluang inovasi	Peningkatan dan penguatan peranserta masyarakat dalam pembangunan guna mendorong kemandirian desa

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				usaha dan pemasaran produk desa secara lebih kompetitif.	
	Sasaran 3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya tekanan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas industri, dampak perubahan iklim global yang memicu bencana alam, regulasi nasional yang semakin ketat, tuntutan pembangunan berkelanjutan, perkembangan teknologi pengelolaan limbah dan energi terbarukan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat	Ketersediaan sumber daya alam yang dapat dikelola berkelanjutan, dukungan program nasional maupun daerah dalam pengelolaan sampah dan konservasi, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, peluang pengembangan energi terbarukan, peran lembaga pendidikan dan komunitas hijau, serta infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan.	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Sasaran 3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	❑ Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ❑ Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai pentingnya pencegahan serta mitigasi terhadap kawasan rawan bencana	Dipengaruhi oleh dinamika sosial akibat urbanisasi dan keragaman budaya, potensi konflik sosial karena kesenjangan ekonomi, meningkatnya risiko bencana alam maupun non-alam, kebijakan nasional dan daerah terkait penegakan hukum, serta perkembangan teknologi informasi yang berdampak ganda pada pengawasan dan kerawanan sosial	Keberadaan aparat keamanan dan aparat pemerintah, modal sosial berupa gotong royong dan kearifan lokal, dukungan regulasi dan program daerah, ketersediaan sarana prasarana pendukung keamanan dan mitigasi bencana, peluang kolaborasi multipihak, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.	Peningkatan rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya produksi pertanian	Masih rendahnya kesejahteraan petani	Masih tingginya ketergantungan pada iklim hujan dan kemarau, keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan teknologi tepat guna, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan permukiman, serta rendahnya kapasitas	Tren positif produksi komoditas pangan utama seperti padi, jagung, serta hasil peternakan, didukung keberadaan lahan pertanian berkelanjutan	Peningkatan dan pengembangan nilai tambah komoditas pertanian

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
			SDM petani dalam pengelolaan usaha tani modern	(KP2B) yang luas sehingga menjadi modal penting untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.	
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Tantangan krisis iklim, degradasi lahan, pertumbuhan penduduk, serta fluktuasi harga pangan yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan akses masyarakat, sehingga menuntut optimalisasi produksi lokal, distribusi, dan pemanfaatan teknologi pangan	Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Serang yang relatif baik dengan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan, ketersediaan cadangan beras dan jagung, serta dukungan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang mampu menyediakan sumber pangan berkualitas sekaligus memperkuat cadangan pangan daerah.	Optimalisasi ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau
	Meningkatnya produksi perikanan				
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	Sasaran 5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Belum optimalnya transformasi layanan publik berbasis digital	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keterbatasan pusat data daerah, rendahnya integrasi sistem informasi, serta masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam mengelola layanan digital	Adanya landasan hukum berupa Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital SPBE, dukungan tim koordinasi SPBE yang solid, kolaborasi lintas instansi dan pihak ketiga, serta penerapan berbagai aplikasi layanan public yang sudah berjalan baik dan mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan	Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan public berbasis digital
	Sasaran 5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya penegakan integritas aparatur, rendahnya kualitas pengawasan, keterbatasan kompetensi SDM pengawas, lemahnya sistem manajemen kepegawaian, serta belum terpadu dan transparannya pengelolaan keuangan serta perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi, adanya dukungan regulasi melalui Grand Design Reformasi Birokrasi, serta peluang penerapan digitalisasi pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, dan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil dan adaptif

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				profesionalisme ASN yang dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik	
	Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pengawas, lemahnya implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang masih pada level 3, serta kapabilitas APIP yang belum mengalami peningkatan berarti, sehingga efektivitas pengawasan belum maksimal	Tren opini laporan keuangan daerah yang konsisten meraih WTP, adanya dukungan regulasi reformasi birokrasi, serta peluang penguatan kapasitas pengawas melalui digitalisasi audit dan peningkatan integritas aparatur yang dapat mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan modern	Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Sasaran 5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Masih lemahnya integrasi perencanaan antar perangkat daerah, rendahnya pemanfaatan data dan riset sebagai basis perencanaan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengawal konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	Ketersediaan regulasi nasional maupun daerah yang mendukung perencanaan berbasis evidence, perkembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang semakin terintegrasi secara digital, serta dukungan demografi dan potensi wilayah yang dapat dijadikan basis perumusan kebijakan strategis sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Peningkatan dan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan	
	Sasaran 5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Perubahan regulasi nasional seperti PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, tuntutan transparansi publik melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, serta meningkatnya akuntabilitas dari lembaga pengawas	Tren peningkatan PAD dan transfer pusat, adanya program optimalisasi pencatatan serta pengelolaan aset, perkembangan sistem informasi keuangan berbasis digital, serta capaian opini WTP yang konsisten dari BPK sebagai modal kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.	Peningkatan dan pengembangan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah Diubah Jadi Peningkatan dan pengembangan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah serta peningkatan kekuatan desentralisasi fiscal daerah
	Sasaran 5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian, terbatasnya pembinaan karier berbasis kompetensi, serta rendahnya integrasi penilaian kinerja yang terukur sehingga kualitas aparatur dalam pelayanan publik belum sepenuhnya efektif	Adanya bonus demografi SDM produktif, dukungan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pemerintahan, serta peluang peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, penataan karier, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional dan berdaya saing.	Peningkatan dan pengembangan profesionalitas ASN
	Sasaran 5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Belum optimalnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Belum tersedianya pusat data daerah (data center), keterbatasan infrastruktur TIK, serta masih rentannya keamanan informasi akibat belum adanya sistem legalitas dan keamanan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai	Adanya bonus demografi dengan SDM produktif yang dapat diarahkan untuk penguatan pengelolaan data, dukungan kebijakan nasional terkait <i>Satu Data</i>	Peningkatan dan pengembangan kualitas data statistik sektoral daerah

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				Indonesia, serta letak geografis Kabupaten Serang yang strategis dengan akses dekat pusat industri dan pemerintahan, sehingga dapat menjadi basis pengembangan pusat data dan layanan statistik yang terintegrasi	
	Sasaran 5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Masih rentannya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Masih rentannya sistem persandian, keterbatasan infrastruktur serta sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi, dan belum adanya legalitas maupun tata kelola keamanan yang kuat sehingga menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data	Semakin meningkatnya kebutuhan layanan publik berbasis digital, dukungan regulasi nasional mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta peluang untuk memperkuat ekosistem keamanan siber melalui pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk menciptakan sistem keamanan informasi yang lebih tangguh dan andal.	Peningkatan dan pengembangan sistem keamanan data dan informasi berbasis digital
	Sasaran 5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Masih rendahnya tata kelola arsip	Perkembangan regulasi nasional kearsipan yang semakin menekankan digitalisasi, kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang sekaligus risiko keamanan data, meningkatnya tuntutan transparansi publik, keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan arsip, serta keterhubungan dengan sistem pemerintahan digital (SPBE)	Dukungan regulasi dan standar dari ANRI, ketersediaan teknologi digital dan aplikasi kearsipan, komitmen pemerintah daerah dalam RPJMD untuk memperbaiki tata kelola arsip, peluang kerjasama dengan perguruan tinggi atau arsiparis profesional untuk peningkatan kapasitas SDM, serta kebutuhan akuntabilitas pembangunan	Peningkatan dan pengembangan tata Kelola arsip daerah

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				daerah yang mendorong OPD mengelola arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban.	
	Sasaran 5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Masih adanya penduduk yang belum terdaftar dalam database kependudukan, ketidaksesuaian data identitas dengan dokumen resmi maupun data lintas instansi, tantangan mobilitas penduduk termasuk orang asing, rendahnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil tertentu seperti akta kematian, serta belum optimalnya infrastruktur digital dan akses internet masyarakat.	Tersedianya sistem administrasi kependudukan nasional yang terintegrasi lintas sektor, perkembangan teknologi digital yang mendukung layanan kependudukan, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan dokumen sebagai indikator RPJMD, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan untuk akses layanan publik, serta dukungan regulasi nasional untuk mewujudkan data kependudukan yang tunggal dan akurat.	Peningkatan dan perluasan akses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Sasaran 5.1.11: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Masih rendahnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Keterbatasan kapasitas SDM aparatur kecamatan dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, perkembangan regulasi nasional terkait pelayanan publik dan reformasi birokrasi, kebutuhan integrasi layanan digital hingga tingkat kecamatan, serta ketimpangan pelayanan antar wilayah akibat keterbatasan sarana prasarana	Komitmen pemerintah daerah melalui RPJMD untuk memperkuat tata kelola di kecamatan, dukungan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan SPBE, perkembangan teknologi digital yang memungkinkan inovasi pelayanan berbasis online, peluang peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan, serta kesadaran masyarakat yang	Peningkatan tata Kelola penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				semakin tinggi terhadap hak pelayanan publik sebagai dorongan perbaikan tata kelola kecamatan.	
	Sasaran 5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Belum optimalnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Terbatasnya data pertanahan yang terintegrasi, meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan konflik, ketimpangan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap kepemilikan serta pemanfaatan tanah, perubahan tata ruang wilayah dan investasi yang menuntut kepastian hukum, serta dinamika sosial-ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan secara cepat	Dukungan regulasi nasional dan kebijakan daerah terkait reforma agraria, perkembangan teknologi informasi geospasial untuk keterbukaan data pertanahan, dukungan pemerintah pusat melalui program sertifikasi tanah dan legalisasi aset, komitmen pemerintah daerah dalam RPJMD untuk meningkatkan keadilan akses tanah, serta peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan data serta advokasi pertanahan.	Peningkatan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
	Sasaran 5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Masih rendahnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur riset dan inovasi, rendahnya kualitas dan kompetensi SDM penelitian, minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan litbang, lemahnya kolaborasi riset antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha, serta tuntutan global yang mendorong peningkatan daya saing daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.	Komitmen pemerintah daerah dalam RPJMD untuk memperkuat peran riset dan inovasi, perkembangan teknologi digital yang membuka peluang riset berbasis data dan inovasi layanan publik, kerjasama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam riset terapan, dukungan kebijakan nasional melalui program dan pendanaan riset, serta ketersediaan sumber daya lokal dan	Peningkatan dan pengembangan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
				kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi inovasi berbasis potensi daerah.	
	Sasaran 5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Peningkatan kualitas layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, adanya potensi konflik sosial akibat perbedaan pemahaman keagamaan, tantangan globalisasi dan arus informasi digital yang memengaruhi nilai kebangsaan dan religiusitas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang menumbuhkan toleransi dan gotong royong, serta keterbatasan peran kelembagaan sosial keagamaan dalam membina kerukunan dan penguatan nilai kebangsaan	Dukungan regulasi nasional tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan, komitmen pemerintah daerah melalui RPJMD untuk meningkatkan aktualisasi nilai religius dan kebangsaan, peran strategis tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, tradisi lokal dan kearifan budaya yang selaras dengan nilai toleransi dan religiusitas, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai agama dan kebangsaan secara lebih luas.	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat
	Sasaran 6.1.2:	Belum optimalnya kemajuan dalam bidang kebudayaan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan, arus globalisasi dan modernisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal, lemahnya regenerasi pelaku seni dan budaya, serta terbatasnya pendanaan dan perhatian terhadap sektor kebudayaan dibandingkan sektor lain	Keanekaragaman seni, tradisi, dan warisan budaya Kabupaten Serang yang kaya, komitmen pemerintah daerah melalui RPJMD untuk mendorong pemajuan kebudayaan, adanya dukungan regulasi nasional, potensi pariwisata berbasis budaya yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, serta peran aktif	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal

Misi	Sasaran	Isu Strategis			STRATEGI
		Permasalahan	Faktor Lingkungan Dinamis	Potensi	
	Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan			komunitas budaya, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjaga dan melestarikan nilai budaya lokal.	

Sumber: hasil analisis 2025

Dalam perumusan strategi dan kebijakan perlu memperhatikan kebijakan tahap pertama (2025- 2029) RPJPD Kabupaten Serang 2025- 2045 serta RPJMN dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029. Untuk perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kab serang tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3. 2 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Serang dan RPJMD Provinsi Banten

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
1. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 2. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: ☐ Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	☐ Peningkatan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun; ☐ Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pendidik; ☐ Penguatan pengelolaan pendidik; ☐ Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan (agama, budaya, pendidikan karakter dan kewargaan, keluarga dan pengasuhan, serta STEM);	☐ Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional ☐ Pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas pada seluruh satuan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan ☐ Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah, penguatan kurikulum serta kemitraan pendidikan ☐ Penguatan kurikulum daerah yang adaptif melalui adopsi pembelajaran STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Penguatan dan peningkatan akses serta mutu/kualitas layanan pendidikan formal dan non formal secara merata pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah	☐ Penguatan Tata kelola sistem pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan Sarana prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang menengah dan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Peningkatan kompetensi peserta didik melalui pengembangan model pembelajaran dan penguatan budaya literasi berdasarkan

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
					standar pelayanan minimal yang berlaku
- Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Revitalisasi pendidikan nonformal - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	- Peningkatan pemerataan akses pendidikan menengah dengan ditunjang sarana-prasarana yang memadai dan pengembangan <i>center of excellence</i> sektor pendidikan dan kebudayaan; - Bantuan pendidikan atau insentif pendidikan bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah secara adil; - Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan	- Peningkatan rata-rata lama dan harapan lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun (Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun) termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus (disabilitas), melalui peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan tinggi dan program bantuan finansial yang inklusif hingga pendidikan tinggi - Penguatan upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta stimulus pemberian beasiswa pendidikan tinggi			Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk	Optimalisasi pembiayaan dan mutu layanan kesehatan;	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta layanan dasar kesehatan	Sasaran 1.1.2:	Penguatan dan perluasan akses layanan kesehatan berkualitas termasuk	Peningkatan kualitas dan perluasan akses layanan kesehatan termasuk pengembangan fasilitas

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif dalam menuju masyarakat sehat dan berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	upaya promotif-preventif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat	kehatan dan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
2. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:	☐ Peningkatan akses dan manajemen terpadu terhadap pelayanan kesehatan; ☐ Pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan;	☐ Penguatan kerjasama dan kolaborasi multisektoral dalam pengelolaan data dan layanan kesehatan ibu dan anak ☐ Penguatan upaya promotif-preventif dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.			☐ Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan lansia berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Penguatan dan pengembangan upaya pengendalian dan pencegahan kasus stunting melalui pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
☐ Penurunan kematian ibu dan anak;	☐ Pengembangan <i>center of excellence</i> sektor kesehatan dan keolahragaan	☐ Penguatan sistem kesehatan dan kelembagaan sebagai upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya penyakit TBC			☐ Pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan kesadaran dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
☐ Pencegahan dan penurunan stunting;		☐ Penguatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular seperti TBC melalui kerjasama lintas sektor dalam			☐ Peningkatan dan perluasan cakupan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❑ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ❑ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis 3. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada RSUD Banten (PHTC)		pendampingan keluarga dan masyarakat ❑ Penguatan upaya pemenuhan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat			❑ Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen layanan Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada RSUD Banten (PHTC)	❑ Pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan; ❑ Pengembangan <i>center of excellence</i> sektor kesehatan dan keolahragaan	❑ Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta layanan dasar kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif dalam menuju masyarakat sehat dan berkualitas ❑ Penguatan upaya pemenuhan jaminan kesehatan	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan	❑ Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
		nasional bagi seluruh masyarakat			Kemenkes sebagai rumah sakit pengampunan dan mitra JKN ❑ Peningkatan kemandirian rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Optimalisasi digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit
Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	❑ Menciptakan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif melalui penguatan pendidikan pra nikah dan keluarga;	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Sasaran 1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	❑ Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penguatan perekonomian keluarga ❑ Perlindungan jaminan sosial yang adil dan tepat sasaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Sinkronisasi data antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
	Pengembangan <i>center of excellence</i> sektor kesehatan dan keolahragaan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan	Sasaran 1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Peningkatan dan perluasan akses peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dan peningkatan prestasi olahraga	❑ Peningkatan peran dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah ❑ Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana olah raga

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
		di berbagai bidang pembangunan			☐ Peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di tingkat nasional
			Sasaran 1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Pengembangan dan perluasan akses terhadap bahan bacaan berbasis digital	☐ Pengembangan dan peningkatan bahan bacaan berbasis digital ☐ Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Pembangunan dan pengembangan fasilitas perpustakaan daerah
Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	Penyiapan regulasi dan pengembangan sarana dan prasarana guna meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, dan masyarakat melalui pemenuhan hak dasar serta mendorong dan memperluas kemandirian sosial secara inklusif, adaptif, dan responsif	☐ Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar ☐ Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perencanaan dan penganggaran, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan perlindungan sosial yang adaptif serta pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial	☐ Peningkatan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: ☐ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan	☐ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; ☐ Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan	Sasaran 1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta perluasan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	☐ Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam Pembangunan ☐ Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; ☐ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan.	anak secara holistik ditunjang dengan pusat layanan terpadu untuk konseling psikososial, advokasi hukum, dan pelatihan vokasi; ☐ Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG (pengarusutamaan gender) dalam proses pembangunan	di berbagai bidang pembangunan	dan perlindungan anak		
☐ Penanganan permukiman kumuh terpadu perkotaan ☐ Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cilegon-Serang (PHTC)	☐ Penguatan kebijakan dan skema pembiayaan; ☐ Peningkatan penyediaan hunian vertikal maupun perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi <i>backlog</i> kepemilikan rumah; ☐ Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu); ☐ Penataan kawasan kumuh, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dalam mewujudkan ekosistem permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan	Akselerasi pemenuhan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman serta penanganan sistem pertanahan yang mengedepankan kepastian hukum bagi pengelolaan tanah melalui skema land consolidation, land sharing, dan guided land development	Sasaran 1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta peningkatan kualitas lingkungan hunian	☐ Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Penyediaan dan pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☐ Penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❑ Penyusunan <i>masterplan</i> penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ❑ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ❑ Perencanaan dan penyiapan pembangunan interkoneksi Sumatera-Jawa ❑ Pembangunan TPST Regional Serang-Cilegon	❑ Penguatan regulasi, pembiayaan, kualitas SDM dan teknologi dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan; ❑ Dukungan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengintegrasian rencana pembangunan yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; ❑ Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan strategis untuk meningkatkan daya saing investasi sesuai zonasi dan tata ruang wilayah; ❑ Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;	❑ Penyediaan infrastruktur air baku dan air siap minum serta peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan dengan penguatan kerjasama antar daerah dan kemitraan ❑ Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim ❑ Penyediaan infrastruktur air baku dan air siap minum serta peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan dengan penguatan kerjasama antar daerah dan kemitraan ❑ Pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman dan berkelanjutan, pemenuhan akses sanitasi melalui pemenuhan fasilitas	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar secara merata dan berkelanjutan	❑ Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrastruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❑ Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkasbitung-Panimbang ❑ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah ❑ Pembangunan Bendung Cidanau ❑ Pembangunan Interbasin Transfer System Banten ❑ Pembangunan SPAM Regional Sindangheula ❑ Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah	❑ Peningkatan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak dan energi yang ramah lingkungan	- infrastruktur akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar ikut aktif dalam penyehatan lingkungan di masyarakat ❑ Penguatan ekosistem persampahan melalui inovasi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis keterlibatan seluruh unsur masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy			Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
❑ Peningkatan jalur KA Rangkasbitung-Merak	Penguatan kebijakan, pembentukan kelembagaan pengelola transportasi, dan pembiayaan dalam menyediakan pelayanan transportasi umum massal yang ramah lingkungan		Sasaran 2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi	Peningkatan kualitas layanan konektivitas yang aman, nyaman dan terjangkau	❑ Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman ❑ Penyediaan dan pengembangan sarana dan

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❑ Perencanaan dan penyiapan pembangunan interkoneksi Sumatera Jawa	bagi seluruh lapisan masyarakat yang menghubungkan antar kota dan desa serta pusat ekonomi		yang nyaman, aman dan terjangkau		prasarana penunjang keselamatan pada jalan kewenangan kabupaten
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas	❑ Penyiapan regulasi pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi; ❑ Pembentukan pusat inovasi dan kewirausahaan; ❑ Pemberian akses pembiayaan dan modal usaha dengan skema pembiayaan mikro dan hibah usaha; ❑ Mendorong pemanfaatan iptek untuk kesejahteraan masyarakat serta bantuan modal dalam bentuk kompetisi usaha konvensional dan syariah ❑	❑ Penguatan upaya peningkatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian ❑ Penguatan pemberdayaan usaha mikro dengan meningkatkan kualitas pendataan dan klasifikasi usaha mikro daerah ❑ Penguatan upaya pembinaan koperasi serta kualitas data dan sistem informasi bagi koperasi di daerah	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM	❑ Peningkatan pembinaan dan bantuan teknis untuk peningkatan mutu/kualitas produksi • Peningkatan kerjasama kemitraan antara pelaku UMKM dengan industri yang ada di Kabupaten Serang
❑ Pengembangan koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang (sector industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, dan baja)	❑ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah (sector industri, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata prioritas (religi, sejarah/budaya, alam, dan buatan), perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, dan sektor	Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan Industri potensial (seperti industri logam dan kimia dasar, industri makanan-minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri karet, industri elektronik, industri	Sasaran 2.1.4:	Pengembangan komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing industri	❑ Peningkatan dan pengembangan mutu / kualitas produksi

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❏ Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (kelapa sawit), dan pengembangan Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (industri kimia dan logam dasar)	unggulan lainnya) secara inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal; ❏ Pengembangan ekonomi yang berbasis inovasi, daya saing dan hilirisasi;	perikanan dan produk perikanan modern, dsb) berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada peningkatan produktivitas melalui hilirisasi, link and match system, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi, dan perkotaan	Meningkatnya daya saing industri		• Peningkatan pemanfaatan komoditas produk lokal dalam industri pengolahan
	❏ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah (sektor industri, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata prioritas (religi, sejarah/budaya, alam, dan buatan), perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, dan sektor unggulan lainnya) secara inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal; ❏ Optimalisasi ekonomi syariah, ekonomi biru, ekonomi hijau serta perkuatan ekosistem halal dan perluasan pasar sebagai bentuk terobosan baru terhadap peningkatan ekonomi daerah; ❏ Penguatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi daerah	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan	Sasaran 2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Peningkatan kualitas komoditas perdagangan dan perluasan akses pemasaran berbasis digital	❏ Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen ❏ Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pemasaran produksi
	❏ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah (sektor industri, perdagangan, jasa, ekonomi	❏ Penguatan pengembangan pariwisata dengan meningkatkan produktivitas	Sasaran 2.1.6:	Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata potensial dan unggulan	❏ Peningkatan promosi dan pemasaran potensi obyek wisata, daya tarik wisata alam dan buatan serta

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
"Penguatan Transformasi"	"Penguatan Modal Dasar"	Periode I (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
	kreatif, pariwisata prioritas (religi, sejarah/budaya, alam, dan buatan), perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, dan sektor unggulan lainnya) secara inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal;	sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan ❑ Penguatan ekosistem pariwisata fokus pada peningkatan multiplier effect economy pada sektor-sektor strategis dan potensial dengan mengadopsi pendekatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amneitas, ancillary, dan available package)	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	serta perluasan pengembangan ekonomi kreatif	ekonomi kreatif melalui platform digital ❑ Pengembangan desa wisata, paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan/atraksi wisata ❑ Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif ❑ Perencanaan, pengembangan dan diversifikasi obyek, daya tarik wisata serta ekonomi kreatif ❑ Fasilitasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif ❑ Pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem kreativitas
Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sector ketenagakerjaan	❑ Pengembangan akses kerja, kewirausahaan, dan peran pemuda;	Penguatan ekosistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan, dual system, dan kewirausahaan	Sasaran 3.1.1:	Peningkatan dan perluasan akses kesempatan kerja berbasis kompetensi	❑ Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
"Penguatan Transformasi"	"Penguatan Modal Dasar"	Periode I (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
	❑ Membangun platform <i>digital job matching</i> untuk mempertemukan pencari kerja dan industri; ❑ Menyelenggarakan inkubasi startup dan pelatihan skill 4.0 beserta akses pendanaan mikro dan ventura;	dalam meningkatkan keahlian angkatan kerja	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		❑ Peningkatan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Kejuruan, Balai Latihan Kerja Negeri, Balai Latihan Kerja Swasta maupun Balai Latihan Kerja Komunitas dengan industri ❑ Peningkatan fasilitasi kerjasama bursa tenaga kerja dengan pelaku industri/usaha di dalam dan luar negeri ❑ Peningkatan fungsi hubungan industrial, perlindungan serta jaminan sosial bagi tenaga kerja
	Mendorong pertumbuhan penanaman modal melalui: ❑ pengembangan sektor strategis dan prospektif yang memberikan dampak lanjutan (multiplier effect) dalam pertumbuhan ekonomi (ekonomi syariah, ekonomi biru, ekonomi hijau, dsb); ❑ Kemudahan perizinan berusaha khususnya pada wilayah banten selatan dan peningkatan kualitas perizinan; ❑ Mengedepankan transparansi dan efisiensi pada setiap proses	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha melalui skema regulasi ramah investasi, penyederhanaan peraturan dan mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghambat investasi modal dan pertumbuhan produktivitas	Sasaran 3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan dan pengembangan kemudahan dan keamanan investasi di daerah	❑ Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan ❑ Peningkatan promosi potensi unggulan daerah ❑ Peningkatan inovasi pelayanan kemudahan perizinan ❑ Pengembangan peta digital potensi investasi

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
	perizinan dengan memanfaatkan digitalisasi (OSS, SIMBG, dsb); ❑ Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan aset daerah yang didukung dengan kondusifitas daerah dan kesesuaian kebijakan/regulasi yang berlaku				❑ Pengendalian pelaksanaan perijinan dan penanaman modal
Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Serang	❑ Penyiapan dan pengembangan regulasi, sarana dan prasarana hingga kemudahan akses dan modal usaha; ❑ Bantuan insentif dana bagi desa bagi perbaikan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, rumah tidak layak huni, dsb), penyediaan sarana dan prasarana desa, mendorong pertumbuhan ekonomi kelokalan dengan tumbuhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Penguatan kapasitas desa, kerjasama antar desa lintas Kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan regulasi desa Pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan regulasi perpajakan sesuai kewenangan	Sasaran 3.2.1: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Peningkatan dan penguatan peranserta masyarakat dalam pembangunan guna mendorong kemandirian desa	❑ Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan ❑ Mendorong kemandirian desa melalui pengembangan usaha bersama berbasis potensi dan kearifan lokal Pengembangan kawasan perdesaan prioritas Kabupaten Serang
1. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: ❑ Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan;	❑ Penguatan tata kelola, pembiayaan, dan kualitas SDM dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup; ❑ Penguatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	❑ Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan secara luas dan merata di daerah ❑ Penguatan ekosistem pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman sumber daya	Sasaran 3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	❑ Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dalam pengelolaan sampah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ❑ Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
☑ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)/LUR (Lahan Uruk Residu). 2. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ☑ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; ☑ Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi; ☑ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik; ☑ Penerapan Internet of Things (IoT) di sector energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time;	untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem ☑ Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; ☑ Penguatan kebijakan, teknologi, dan pengembangan transisi energi terbarukan; ☑ Penguatan transisi energi yang mendukung penggunaan energi bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan serta sektor lainnya dalam mewujudkan <i>net zero emission</i>; dan pengawasan penggunaan energi bersih secara holistik	alam hayati berbasis konservasi dan preservasi serta penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan hidup			berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku ☑ Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ☑ Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan ☑ Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan ☑ Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
- Perluasan penggunaan kendaraan listrik. - Pembangunan Infrastruktur PLTP Rawadano					
Penerapan <i>Nature Best Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan perkotaan Cillegon dan Pesisir barat Banten (Megathrust Selat Sunda)	- Penguatan regulasi, sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana; - Meningkatkan ketersediaan pangan dan keberagaman pangan (diversifikasi pangan) yang lebih luas dan variatif bagi masyarakat	- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap pengendalian pelanggaran Trantibumlinmas serta pelaksanaan peraturan daerah - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi - Penguatan ekosistem penanggulangan bencana di daerah yang melibatkan banyak pihak secara bersama-sama	Sasaran 3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Peningkatan rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat	- Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan kemitraan dengan pihak terkait dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, bencana non alam dan kebakaran berdasarkan standar

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
					pelayanan minimal yang berlaku ❑ Pengembangan kompetensi SDM kebencanaan, peningkatan sarana prasarana mitigasi dan evakuasi bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendorong kesiapsagaan bencana alam dan kebakaran melalui penyebaran informasi kebencanaan terutama pada kawasan rawan bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
1. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 2. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah (sektor industri, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata prioritas (religi, sejarah/budaya, alam, dan buatan), perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, dan sektor unggulan lainnya) secara inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal;	❑ Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, keanekaragaman dan kualitas pangan melalui intensifikasi, penggunaan teknologi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water) dan diversifikasi produk ❑ Penyediaan infrastruktur air baku dan air siap minum serta peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan dengan penguatan	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan dan pengembangan nilai tambah komoditas pertanian	❑ Peningkatan akses petani terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi ❑ Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas pertanian

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
3. Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura 4. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan holtikultura 5. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: ❑ kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; ❑ reforma agrarian; redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; ❑ optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan ❑ peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 6. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan produksi, antara lain melalui: ❑ Penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas;		kerjasama antar daerah dan kemitraan			❑ Peningkatan dan pengembangan kapasitas petani serta pelibatan petani muda dalam pengelolaan pertanian

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
"Penguatan Transformasi"	"Penguatan Modal Dasar"	Periode I (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
☐ Mitigasi OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan kesehatan hewan; ☐ Peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; ☐ Peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen 7. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain, melalui: ☐ Peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; ☐ Penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; ☐ Pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; ☐ Perluasan akses asuransi usaha tani; ☐ Peningkatan infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan resi Gudang; ☐ Pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama. 8. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam					

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian					
1. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 2. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 3. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	❑ Penguatan regulasi, sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana; ❑ Meningkatkan ketersediaan pangan dan keberagaman pangan (diversifikasi pangan) yang lebih luas dan variatif bagi masyarakat	❑ Pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, serta kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi dalam ekosistem logistik ❑ Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, keanekaragaman dan kualitas pangan melalui intensifikasi, penggunaan teknologi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water) dan diversifikasi produk ❑	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Optimalisasi ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau	❑ Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penyimpanan komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan cadangan pangan ❑ Pengembangan dan diversifikasi komoditas pangan untuk memperkuat cadangan pangan daerah
Pemberdayaah aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan: perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah (sektor industri, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata prioritas (religi, sejarah/budaya, alam, dan buatan), perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, dan sektor unggulan lainnya) secara inklusif yang		Sasaran 4.1.3: Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau secara merata	❑ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan ❑ Peningkatan dan pengembangan kerjasama kemitraan pemanfaatan dan pemasaran hasil perikanan

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
	memberdayakan masyarakat lokal;				❑ Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas perikanan
1. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: - o Perluasan infrastruktur digital; - o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital; - o Pembangunan jaringan <i>broadband</i> hingga ke pelosok. 2. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: - o Penguatan tata Kelola dan infrastruktur pemerintahan digital;	❑ Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung layanan birokrasi yang <i>agile</i>; ❑ Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memenuhi prinsip <i>smart governance</i> sebagai fondasi pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas; ❑ Kolaborasi, integrasi, dan standarisasi penyelenggaraan digital pemerintahan	Penguatan koordinasi, perencanaan rumusan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sasaran 5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan public berbasis digital	❑ Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat ❑ Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial ❑ Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi ❑ Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
- o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; - o Digitalisasi layanan public prioritas; - o Pengembangan ekosistem layanan public digital.					
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ❑ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ❑ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ❑ Digitalisasi layanan publik prioritas	❑ Meningkatkan kualitas dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik melalui kerjasama daerah dan pengendalian pembangunan ❑ Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup terhadap berbagai aspek, deregulasi, akuntabilitas kinerja pemerintah; ❑ Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait akses layanan pemerintahan; ❑ Pengembangan wilayah untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas	❑ Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan rumusan kebijakan dan kolaborasi stakeholder terkait ❑ Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.) serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional ❑ Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan ❑ Penguatan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi serta penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko	Sasaran 5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil dan adaptif	❑ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta penerapan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel ❑ Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❑ Pengembangan ekosistem layanan publik digital		perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif ❑ Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik			
Memperkuat reformasi hukum, terutama di Banten, antara lain melalui: - o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); - o Penanggulangan judi dan penyelundupan; - o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Peningkatan birokrat yang berintegritas dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas	Penguatan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi serta penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif	Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	❑ Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan ❑ Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
	Meningkatkan kualitas dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik melalui kerjasama daerah dan pengendalian pembangunan	Penguatan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi serta penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif	Sasaran 5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan dan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah	❑ Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM perencanaan ❑ Peningkatan kualitas serta ketersediaan data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan ❑ Pengembangan kemitraan atau kerjasama dalam

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
"Penguatan Transformasi"	"Penguatan Modal Dasar"	Periode I (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
					perencanaan terutama dengan lembaga akademis dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan ❑ Peningkatan konsistensi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan
	Penguatan dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui: ❑ Optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah dan penggalan sumber pendapatan baru (ekonomi syariah, ekonomi biru, ekonomi hijau, dll); ❑ Inovasi pembiayaan inovatif, optimalisasi potensi keuangan syariah, serta penguatan sinergi pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan swasta	❑ Pemanfaatan idle asset daerah untuk dikelola oleh BUMD dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah dengan tetap menerapkan asas-asas good governance terutama pada aset yang berpotensi terhadap peningkatan produktivitas blue economy dan green economy ❑ Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.) serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Sasaran 5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan dan pengembangan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah	❑ Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah ❑ Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah ❑ Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
	dalam meningkatkan kapasitas fiskal; ❑ Adanya <i>special purpose vehicle</i> (SPV) sebagai akselerator pembangunan di provinsi banten dalam mengelola sumber pembiayaan pembangunan inovatif yang sah secara peraturan perundang-undangan; ❑ Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan salah satunya melalui tambahan penyertaan modal; ❑ Pembentukan BUMD berdasarkan potensi, kapasitas keuangan, dan sumber daya manusia				❑ Pengembangan sistem informasi keuangan dan penataan barang milik daerah berbasis digital
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ❑ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ❑ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ❑ Digitalisasi layanan publik prioritas	Menciptakan ASN yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui kesempatan pengembangan karir, adanya seleksi berbasis meritokrasi dalam penempatan talenta sesuai tingkat potensi dan kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas serta terwujudnya kesejahteraan bagi birokrat Provinsi Banten		Sasaran 5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Peningkatan dan pengembangan profesionalitas ASN	❑ Peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ❑ Pengembangan penilaian ASN berbasis bukti dan capaian kinerja ❑ Penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan keahlian

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
❑ Pengembangan ekosistem layanan publik digital					
			Sasaran 5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan dan pengembangan kualitas data statistik sektoral daerah	❑ Pengembangan dan peningkatan kualitas data dan informasi statistik sektoral sesuai standar yang ditetapkan ❑ Pengembangan ekosistem data dan informasi di daerah ❑ Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM bidang statistik
		Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan keamanan digital	Sasaran 5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Peningkatan dan pengembangan sistem keamanan data dan informasi berbasis digital	❑ Peningkatan keamanan data dan layanan publik berbasis digital ❑ Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sistem pengamanan data dan informasi digital
			Sasaran 5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Peninkatan dan pengembangan tata Kelola arsip daerah	❑ Peningkatan sistem, SDM pengelola arsip daerah, dan sarana pengelolaan arsip daerah ❑ Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip daerah berbasis digital
			Sasaran 5.1.10:	Peningkatan dan perluasan akses layanan administrasi	❑ Peningkatan dan perluasan akses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
			Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	kependudukan dan pencatatan sipil	☐ Peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap keamanan data kependudukan
☐ Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ☐ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ☐ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ☐ Digitalisasi layanan publik prioritas ☐ Pengembangan ekosistem layanan publik digital	☐ Pengembangan wilayah untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas ☐ Peningkatan birokrat yang berintegritas dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas		Sasaran 5.1.11: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Peningkatan tata Kelola penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	☐ Peningkatan dan pengembangan layanan publik yang mudah diakses, cepat dan terjangkau ☐ Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan publik
			Sasaran 5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	☐ Peningkatan kompetensi aparatur bidang pertanian melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis ☐ Peningkatan kualitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum ☐ Peningkatan peranserta dan kapasitas masyarakat dalam permasalahan pertanian

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
"Penguatan Transformasi"	"Penguatan Modal Dasar"	Periode I (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan kapasitas dan kelembagaan riset dan inovasi daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM riset, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi, iv) inisiasi innovation valley Kabupaten Serang, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di daerah	Sasaran 5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan dan pengembangan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	☐ Peningkatan dan pengembangan kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset ☐ Penyusunan kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah ☐ Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui penciptaan dan pemanfaatan inovasi berbasis potensi daerah
			Sasaran 5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	☐ Peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ☐ Pemenuhan kebutuhan penunjang layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	Penyiapan regulasi tata kelola sistem sosial dan politik dalam meningkatkan keamanan dan demokrasi di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang	Penguatan kerukunan umat beragama melalui rumusan kebijakan yang implementatif	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	☐ Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat ☐ Peningkatan dan pengembangan kemitraan

RPJMN 2025-2029	RPJMD Banten 2025-2029	RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029		
“Penguatan Transformasi”	“Penguatan Modal Dasar”	Periode I (2025-2029) “Penguatan Modal Dasar”	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		Strategi	Arah Kebijakan
	beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia		agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat		dalam upaya pengenalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten, antara lain melalui: - o Perlindungan dan pelestarian warisan budaya; - o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; - o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.	Sinergi kolaboratif melalui pendekatan budaya, kearifan lokal, sejarah, sosial-ekonomi dan paham kebhinekaan untuk menjadikan daerah kondusif dengan masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai pondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan	Penguatan regulasi perlindungan, pengembangan, dan pelestarian warisan kebudayaan dan cagar budaya sesuai nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Sasaran 6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal	☐ Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal ☐ Pengenalan budaya lokal kepada masyarakat khususnya pelajar

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.3. 3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia				
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	S1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Penguatan dan peningkatan akses serta mutu/kualitas layanan pendidikan formal dan non formal secara merata pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah	Penguatan Tata kelola sistem pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan Sarana prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang menengah dan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kompetensi peserta didik melalui pengembangan model pembelajaran dan penguatan budaya literasi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan dan perluasan akses layanan kesehatan berkualitas termasuk upaya promotif-preventif, pencegahan dan pengendalian	Peningkatan kualitas dan perluasan akses layanan kesehatan termasuk pengembangan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penyakit menular dan tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat	Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan lansia berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penguatan dan pengembangan upaya pengendalian dan pencegahan kasus stunting melalui pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan kesadaran dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan dan perluasan cakupan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat
				Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen layanan Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan	Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar Kemenkes sebagai rumah sakit pengampunan dan mitra JKN
				Peningkatan kemandirian rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Optimalisasi digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penguatan perekonomian keluarga
				Perlindungan jaminan sosial yang adil dan tepat sasaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Sinkronisasi data antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Peningkatan dan perluasan akses peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan peran dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah
				Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana olah raga
				Peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di tingkat nasional
		S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Pengembangan dan perluasan akses terhadap bahan bacaan berbasis digital	Pengembangan dan peningkatan bahan bacaan berbasis digital
				Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pembangunan dan pengembangan fasilitas perpustakaan daerah
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan	S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan perlindungan sosial yang adaptif serta pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial	Peningkatan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S1.2.2:	Peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta perluasan akses dan	Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta peningkatan kualitas lingkungan hunian	Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penyediaan dan pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas	S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar secara merata dan berkelanjutan	Peningkatan dan pengembangan infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrstruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan konektivitas yang aman, nyaman dan terjangkau	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman
				Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pada jalan kewenangan kabupaten
		S2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM	Peningkatan pembinaan dan bantuan teknis untuk peningkatan mutu/kualitas produksi
				Peningkatan kerjasama kemitraan antara pelaku UMKM dengan industri yang ada di Kabupaten Serang
		S2.1.4: Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing industri	Peningkatan dan pengembangan mutu/kualitas produksi
				Peningkatan pemanfaatan komoditas produk lokal dalam industri pengolahan
		S2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Peningkatan kualitas komoditas perdagangan dan perluasan akses pemasaran berbasis digital	Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
				Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pemasaran produksi
		S2.1.6:	Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata potensial	Peningkatan promosi dan pemasaran potensi obyek wisata, daya tarik wisata

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	dan unggulan serta perluasan pengembangan ekonomi kreatif	alam dan buatan serta ekonomi kreatif melalui platform digital
				Pengembangan desa wisata, paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan/atraksi wisata
				Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif
				Perencanaan, pengembangan dan diversifikasi obyek, daya tarik wisata serta ekonomi kreatif
				Fasilitasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif
				Pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem kreativitas
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan dan perluasan akses kesempatan kerja berbasis kompetensi	Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri
				Peningkatan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Kejuruan, Balai Latihan Kerja Negeri, Balai Latihan Kerja Swasta maupun Balai Latihan Kerja Komunitas dengan industri
				Peningkatan fasilitasi kerjasama bursa tenaga kerja dengan pelaku industri/usaha di dalam dan luar negeri
				Peningkatan fungsi hubungan industrial, perlindungan serta jaminan sosial bagi tenaga kerja

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan dan pengembangan kemudahan dan keamanan investasi di daerah	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan
				Peningkatan promosi potensi unggulan daerah
				Pengembangan Peningkatan inovasi pelayanan kemudahan perizinan
				peta digital potensi investasi
				Pengendalian pelaksanaan perijinan dan penanaman modal
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan	S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Peningkatan dan penguatan peranserta masyarakat dalam pembangunan guna mendorong kemandirian desa	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan
				Mendorong kemandirian desa melalui pengembangan usaha bersama berbasis potensi dan kearifan lokal
				Pengembangan kawasan perdesaan prioritas Kabupaten Serang
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dalam pengelolaan sampah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan
				Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Peningkatan rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
				Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kemitraan dengan pihak terkait dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, bencana non alam dan kebakaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pengembangan kompetensi SDM kebencanaan, peningkatan sarana prasarana mitigasi dan evakuasi bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendorong kesiapsiagaan bencana alam dan kebakaran melalui penyebaran informasi kebencanaan terutama pada kawasan rawan bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan	S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan dan pengembangan nilai tambah komoditas pertanian	Peningkatan akses petani terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas pertanian
				Peningkatan dan pengembangan kapasitas petani serta pelibatan petani muda dalam pengelolaan pertanian
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Optimalisasi ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penyimpanan komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan cadangan pangan
				Pengembangan dan diversifikasi komoditas pangan untuk memperkuat cadangan pangan daerah
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau secara merata	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan
				Peningkatan dan pengembangan kerjasama kemitraan pemanfaatan dan pemasaran hasil perikanan
				Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas perikanan
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan public berbasis digital	Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta penerapan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil dan adaptif	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD
				Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
				Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM perencanaan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan dan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas serta ketersediaan data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan
				Pengembangan kemitraan atau kerjasama dalam perencanaan terutama dengan lembaga akademis dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan
				Peningkatan konsistensi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan dan pengembangan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah	Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
				Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
				Pengembangan sistem informasi keuangan dan penataan barang milik daerah berbasis digital
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Peningkatan dan pengembangan profesionalitas ASN	Peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Pengembangan penilaian ASN berbasis bukti dan capaian kinerja
				Penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan keahlian
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan dan pengembangan kualitas data statistik sektoral daerah	Pengembangan dan peningkatan kualitas data dan informasi statistik sektoral sesuai standar yang ditetapkan
				Pengembangan ekosistem data dan informasi di daerah
				Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM bidang statistik
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Peningkatan dan pengembangan sistem keamanan data dan informasi berbasis digital	Peningkatan keamanan data dan layanan publik berbasis digital
				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sistem pengamanan data dan informasi digital
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Peningkatan dan pengembangan tata Kelola arsip daerah	Peningkatan sistem, SDM pengelola arsip daerah, dan sarana pengelolaan arsip daerah
				Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip daerah berbasis digital
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan	Peningkatan dan perluasan akses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dan perluasan akses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan pencatatan sipil yang efektif		Peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap keamanan data kependudukan
		S5.1.11:: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan		Peningkatan dan pengembangan layanan publik yang mudah diakses, cepat dan terjangkau
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan publik
				Peningkatan kompetensi aparatur bidang pertanian melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
				Peningkatan peranserta Peningkatan kualitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan dan pengembangan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	dan kapasitas masyarakat dalam permasalahan pertanian
				Peningkatan dan pengembangan kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset
				Penyusunan kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan dan pengembangan kualitas pembangunan daerah melalui penciptaan dan pemanfaatan inovasi berbasis potensi daerah	Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui penciptaan dan pemanfaatan inovasi berbasis potensi daerah
				Peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Pemenuhan kebutuhan penunjang layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat
				Peningkatan dan pengembangan kemitraan dalam upaya pengenalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal
				Pengenalan budaya lokal kepada masyarakat khususnya pelajar

Untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan isu daerah yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka ditetapkan penahapan pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.3. 4
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia								
				Peningkatan pengelolaan potensi daerah sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian daerah didukung tata kelola pemerintah yang baik dan ditunjang oleh infrastruktur berkualitas	Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik yang berkualitas dan infrastruktur wilayah sesuai dengan daya	Penguatan daya saing SDM dan perekonomian daerah didukung tata kelola pemerintahan berbasis digital dan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Pemantapan SDM yang unggul dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung pemerintahan yang adaptif dan infrastruktur berkualitas secara merata	Pemerataan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah didukung infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					dukung lingkungan hidup		dan berkelanjutan	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan peningkatan akses serta mutu/kualitas layanan pendidikan formal dan non formal secara merata pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah	Penguatan Tata kelola sistem pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Pengembangan tata kelola sistem pendidikan yang efektif dan efisien, penyediaan sarana dan prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penguatan partisipasi masyarakat melalui kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak, dan pemberian makanan bergizi gratis	Perluasan akses pendidikan, pengembangan model pembelajaran dan penguatan literasi serta penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional, penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak, dan pemberian makanan bergizi gratis	Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana utama dan penunjang untuk layanan pendidikan anak usia dini, peningkatan kompetensi peserta didik, dan penguatan tata Kelola sistem pendidikan	Penguatan dan peningkatan akses serta mutu/kualitas layanan pendidikan secara merata, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional, dan pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak
		Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan Sarana prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang menengah dan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Peningkatan kompetensi peserta didik melalui pengembangan model pembelajaran dan penguatan budaya literasi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku						
	Penguatan dan perluasan akses layanan kesehatan berkualitas termasuk upaya promotif-preventif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Peningkatan kualitas dan perluasan akses layanan kesehatan termasuk pengembangan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga	Pengembangan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan penguatan upaya pencegahan stunting melalui kampanye kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penguatan tata Kelola manajemen layanan kesehatan	Pembangunan atau peningkatan kualitas fasilitas kesehatan masyarakat, penngkatan kualitas tenaga kesehatan, pengembagn	Peningkatan cakupan jaminan perlindungan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan peningkatan akuntabilitas dan	Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi lansia. Evaluasi dan perbaikan program pencegahan stunting, dan	Pemantapan dan perluasan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk ibu dan anak serta lansia, perluasan cakupan jaminan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat	Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan lansia berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Penguatan dan pengembangan upaya pengendalian dan pencegahan kasus stunting melalui pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan kesadaran dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan dan perluasan cakupan	serta kesehatan ibu dan anak		program intervensi spesifik dan sensitive untuk pencegahan stunting	transparansi pengelolaan kesehatan	renovasi fasilitas kesehatan masyarakat	perlindungan masyarakat

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		jaminan perlindungan kesehatan masyarakat						
		Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen layanan Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan	Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar Kemenkes sebagai rumah sakit pengampuan dan mitra JKN Peningkatan kemandirian rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Optimalisasi pemenuhan sumber daya	Pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi sumber daya manusia	pengembangan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar, peningkatan kemandirian rumah sakit, pengembangan sistem informasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan fasilitas untuk peningkatan kapasitas pelayanan, peningkatan kualitas layanan	Pengembangan manajemen dan keuangan untuk mendorong kemandirian rumah sakit, optimalisasi digitalisasi layanan keseharatan, dan pengembangan layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan sesuai standar melalui peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi SDM	Pemantapan kemandirian rumah sakir

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Optimalisasi digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit						
	Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penguatan perekonomian keluarga	Pengembangan program-program ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas SDM dalam keluarga, sinkronisasi data	Perlindungan jaminan sosial, pengembangan program keluarga, peningkatan kapasitas keluarga	Penguatan perekonomian keluarga melalui pengembangan program ekonomi keluarga, sinkronisasi program	Peningkatan perlindungan jaminan sosial untuk keluarga miskin dan rentan, pengembangan program keluarga, dan peningkatan kapasitas keluarga	Penguatan perekonomian keluarga melalui pengembangan program ekonomi keluarga, evaluasi program	Penguatan peran keluarga dalam pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing
		Perlindungan jaminan sosial yang adil dan tepat sasaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Sinkronisasi data antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah						
	Peningkatan dan perluasan akses peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dan	Peningkatan peran dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah melalui pengembangan organisasi kepemudaan, Pembangunan dan	Pengembangan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Pembangunan fasilitas olahraga baru untuk meningkatkan akses dan kualitas olahraga., Peningkatan	Peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan program-program olahraga dan kompetisi.,	Peningkatan kualitas olahraga melalui pengembangan program-program olahraga dan pelatihan.	Peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan program-program olahraga dan kompetisi. Pengembangan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	peningkatan prestasi olahraga	Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana olah raga	pengembangan sarana prasarana olahraga di daerah, Peningkatan prestasi olahraga melalui pelatihan dan kompetisi	daerah, Peningkatan akses pemuda terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup., Peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan program-program olahraga.	kualitas pelatihan olahraga untuk meningkatkan prestasi., Pengembangan program-program kepemudaan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah	Pengembangan sarana prasarana olahraga untuk meningkatkan kualitas dan akses olahraga.	Pengembangan fasilitas olahraga untuk meningkatkan akses dan kualitas olahraga.	peran pemuda dalam pembangunan daerah melalui pengembangan organisasi kepemudaan
		Peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di tingkat nasional						
	Pengembangan dan perluasan akses terhadap bahan bacaan berbasis digital	Pengembangan dan peningkatan bahan bacaan berbasis digital	1. Pengembangan Bahan Bacaan Digital: Pengembangan bahan bacaan digital berkualitas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. 2. Peningkatan Akses Masyarakat: Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas melalui pengembangan fasilitas perpustakaan daerah. 3. Pembangunan Fasilitas Perpustakaan: Pembangunan fasilitas perpustakaan daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan. 3. Peningkatan Akses Digital:	1. Peningkatan Kualitas Bahan Bacaan: Peningkatan kualitas bahan bacaan digital untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. 2. Pengembangan Fasilitas Perpustakaan: Pengembangan fasilitas perpustakaan daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan. 3. Peningkatan Akses Digital:	1. Pembangunan Perpustakaan Digital: Pembangunan perpustakaan digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas. 2. Pengembangan Koleksi Digital: Pengembangan koleksi digital untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan bacaan. 3. Peningkatan Literasi Digital:	1. Peningkatan Akses Masyarakat: Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas melalui pengembangan fasilitas perpustakaan daerah. 2. Pengembangan Program Literasi: Pengembangan program literasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.	1. Pengembangan Fasilitas Perpustakaan: Pengembangan fasilitas perpustakaan daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan. 2. Peningkatan Akses Digital: Peningkatan akses digital untuk masyarakat melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi.	2. Peningkatan Kualitas Bahan Bacaan: Peningkatan kualitas bahan bacaan digital untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. 3. Pengembangan Peran Perpustakaan: Pengembangan peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas
		Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Pembangunan dan pengembangan fasilitas perpustakaan daerah						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			terhadap bahan bacaan.	Peningkatan akses digital untuk masyarakat melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi.	Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan.	3. Peningkatan Kualitas Bahan Bacaan: Peningkatan kualitas bahan bacaan digital untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.	3. Pengembangan Koleksi Digital: Pengembangan koleksi digital untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan bacaan.	
	Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan perlindungan sosial yang adaptif serta pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial	Peningkatan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	1. Peningkatan Perlindungan Sosial: Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program-program bantuan sosial. 2. Pembinaan dan Pemberdayaan: Pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial melalui program-program pelatihan dan pendidikan. 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan: Pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan.	1. Peningkatan Layanan Pembinaan: Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pengembangan program-program rehabilitasi. 2. Pengembangan Program Pemberdayaan: Pengembangan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penyandang masalah sosial. 3. Peningkatan Kualitas Layanan: Peningkatan kualitas layanan	1. Peningkatan Rehabilitasi: Peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial melalui program-program rehabilitasi. 2. Pengembangan Kapasitas SDM: Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan. 3. Peningkatan Akses Layanan: Peningkatan akses layanan kesejahteraan	1. Peningkatan Perlindungan Sosial: Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program-program bantuan sosial. 2. Pengembangan Program Pemberdayaan: Pengembangan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penyandang masalah sosial. 3. Peningkatan Kualitas Layanan: Peningkatan	1. Peningkatan Layanan Pembinaan: Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pengembangan program-program rehabilitasi. 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan: Pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan. 3. Peningkatan Akses Layanan:	1. Pencapaian Target: Pencapaian target-target pembangunan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan Kualitas Layanan: Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial melalui pengembangan standar layanan. 3. Pengembangan Peran Masyarakat: Pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program partisipasi masyarakat.

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				kesejahteraan sosial melalui pengembangan standar layanan.	sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	kualitas layanan kesejahteraan sosial melalui pengembangan standar	Peningkatan akses layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	
	Peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta perluasan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Peningkatan Perlindungan Sosial: Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program-program bantuan sosial. 2. Pembinaan dan Pemberdayaan: Pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial melalui program-program pelatihan dan pendidikan. 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan: Pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan.	1. Peningkatan Partisipasi Perempuan: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan dan pelatihan. 2. Pengembangan Program Perlindungan: Pengembangan program-program perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi. 3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak	1. Peningkatan Akses Kesehatan: Peningkatan akses kesehatan bagi perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup. 2. Pengembangan Program Pemberdayaan: Pengembangan program-program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi dalam pembangunan. 3. Peningkatan Perlindungan: Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi melalui program-program	1. Peningkatan Partisipasi Perempuan: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan dan pelatihan. 2. Pengembangan Kapasitas Lembaga: Pengembangan kapasitas lembaga dan organisasi yang menangani isu perempuan dan anak. 3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan	1. Peningkatan Perlindungan: Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi melalui program-program pencegahan dan penanganan. 2. Pengembangan Program Pemberdayaan: Pengembangan program-program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi dalam pembangunan. 3. Peningkatan Akses Pendidikan: Peningkatan akses pendidikan	1. Pencapaian Target: Pencapaian target-target pembangunan perempuan dan anak yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan Kualitas Hidup: Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan. 3. Pengembangan Peran Perempuan: Pengembangan peran perempuan dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan dan partisipasi.

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					pencegahan dan penanganan	perempuan dan anak.	bagi perempuan dan anak perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup.	
Perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta peningkatan kualitas lingkungan hunian		Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	1. Peningkatan Akses Kepemilikan Rumah: Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui program-program bantuan perumahan. 2. Penyediaan Prasarana: Penyediaan prasarana dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi di kawasan permukiman. 3. Penataan Kawasan Permukiman: Penataan kawasan permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian.	1. Peningkatan Kualitas Rumah: Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian melalui program-program perbaikan dan renovasi. 2. Pengembangan Sarana: Pengembangan sarana seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perdagangan di kawasan permukiman. 3. Peningkatan Utilitas: Peningkatan utilitas seperti listrik, air bersih, dan sanitasi di kawasan permukiman.	1. Penyediaan Hunian Layak: Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program-program perumahan subsidi. 2. Penataan Kawasan Permukiman: Penataan kawasan permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan mengurangi kemiskinan. 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan: Peningkatan kualitas lingkungan hunian melalui program-program penghijauan dan pengelolaan sampah. 2. Pengembangan Prasarana: Pengembangan prasarana seperti jalan, jembatan, dan drainase di kawasan permukiman. 3. Peningkatan Akses Kepemilikan Rumah: Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui program-program bantuan perumahan	1. Peningkatan Kualitas Rumah: Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian melalui program-program perbaikan dan renovasi. 2. Penyediaan Fasilitas: Penyediaan fasilitas seperti taman, lapangan, dan pusat komunitas di kawasan permukiman. 3. Peningkatan Keselamatan: Peningkatan keselamatan masyarakat melalui program-program keamanan dan penanggulangan bencana.	1. Pencapaian Target: Pencapaian target-target pembangunan permukiman yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan Kualitas Hidup: Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pembangunan permukiman yang berkelanjutan. 3. Pengembangan Kawasan Permukiman: Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
		Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Penyediaan dan pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					permukiman melalui program-program pemberdayaan.			
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar secara merata dan berkelanjutan	Peningkatan dan pengembangan infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	difokuskan pada pemetaan kebutuhan, penyusunan masterplan, serta inventarisasi kondisi eksisting jalan, jembatan, fasilitas pengolahan sampah, sistem irigasi, dan SPAM	rehabilitasi infrastruktur rusak berat, pembangunan akses dasar jalan-jembatan di wilayah tertinggal, serta pembangunan awal fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan	peningkatan kualitas jalan penghubung utama, pengembangan sistem irigasi kabupaten untuk mendukung ketersediaan air baku, serta pembangunan jaringan SPAM di pusat pertumbuhan	pembangunan jembatan strategis, perluasan fasilitas pengolahan limbah domestik, dan integrasi pengelolaan air baku dengan SPAM di kawasan prioritas	pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan, perbatasan, serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis	penguatan sistem pemeliharaan berkelanjutan, standarisasi kualitas infrastruktur, optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah ramah lingkungan, keberlanjutan SPAM dan irigasi, serta konsistensi implementasi tata ruang untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.
		Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrstruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan	Penyelaksanaan Pembangunan satu kantor Perangkat Daerah	Penataan lingkungan kawasan Pusat Pemerintahan	Pembangunan satu kantor Perangkat Daerah dan penataan kawasan Pusat Pemerintahan	Pembangunan satu kantor Perangkat Daerah dan penataan kawasan Pusat Pemerintahan	Pembangunan satu kantor Perangkat Daerah dan penataan kawasan Pusat Pemerintahan	Pembangunan satu kantor Perangkat Daerah dan penataan kawasan Pusat Pemerintahan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Peningkatan kualitas layanan konektivitas yang aman, nyaman dan terjangkau	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman	pemetaan kebutuhan transportasi umum, inventarisasi kondisi jalan kabupaten, serta penyusunan rencana induk layanan konektivitas dan keselamatan	diarahkan pada rehabilitasi sarana transportasi umum yang rusak, perbaikan prasarana jalan yang rawan kecelakaan, serta pembangunan awal fasilitas penunjang keselamatan seperti rambu, marka, dan penerangan	difokuskan pada peningkatan kualitas armada transportasi umum, penyediaan halte/terminal yang lebih representatif, serta pengembangan infrastruktur keselamatan jalan di jalur utama	perluasan jaringan transportasi umum ke wilayah dengan akses terbatas, integrasi layanan dengan moda lain, serta pembangunan fasilitas keselamatan tambahan di titik rawan	pemerataan ketersediaan transportasi umum yang nyaman dan terjangkau hingga wilayah perdesaan dan perbatasan, serta modernisasi sistem keselamatan berbasis teknologi	optimalisasi layanan transportasi umum yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dengan standar keselamatan jalan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.
		Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pada jalan kewenangan kabupaten						
	Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM	Peningkatan pembinaan dan bantuan teknis untuk peningkatan mutu/kualitas produksi	pemetaan potensi UMKM, identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas produk, serta penyusunan program pembinaan teknis	pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu produksi, standarisasi produk, serta pemberian bantuan teknis dan sarana produksi	penguatan branding, kemasan, dan sertifikasi produk UMKM, serta fasilitasi promosi dan pemasaran lokal	pengembangan jejaring kemitraan strategis antara UMKM dengan industri besar, perdagangan modern, dan sektor pariwisata	perluasan akses pasar nasional dan digitalisasi UMKM melalui e-commerce serta integrasi rantai pasok dengan industri daerah	penguatan daya saing UMKM secara berkelanjutan dengan penerapan inovasi, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar global.
		Peningkatan kerjasama kemitraan antara pelaku UMKM dengan industri yang ada di Kabupaten Serang						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengembangan komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing industri	Peningkatan dan pengembangan mutu/kualitas produksi	pemetaan potensi komoditas unggulan daerah, identifikasi rantai pasok, serta penyusunan rencana pengembangan industri berbasis komoditas lokal	peningkatan kapasitas produksi melalui pelatihan, bantuan teknis, dan penerapan standar mutu awal	engembangan hilirisasi produk, sertifikasi mutu, serta penguatan fasilitas pendukung industri pengolahan berbasis lokal	integrasi komoditas unggulan dengan industri pengolahan skala menengah dan besar serta penguatan promosi dan pemasaran regional	perluasan pemanfaatan produk lokal sebagai bahan baku industri strategis dan penetrasi pasar nasional	optimalisasi daya saing komoditas unggulan melalui inovasi, diversifikasi produk, serta peningkatan akses pasar global secara berkelanjutan.
		Peningkatan pemanfaatan komoditas produk lokal dalam industri pengolahan						
	Peningkatan kualitas komoditas perdagangan dan perluasan akses pemasaran berbasis digital	Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen	pemetaan potensi komoditas perdagangan unggulan, identifikasi kebutuhan perlindungan konsumen, serta penyusunan roadmap pemasaran digital	peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kualitas produk, standarisasi, serta pengenalan platform digital	difokuskan pada penguatan jejaring kerjasama perdagangan antar daerah dan antar pelaku usaha lokal dengan fasilitasi pemerintah, serta penyediaan sistem perlindungan konsumen yang lebih baik	diarahkan pada integrasi pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas, termasuk e-commerce dan marketplace daerah, serta promosi produk secara regional dan nasional	difokuskan pada perluasan akses pasar internasional, penerapan sistem perlindungan konsumen berbasis teknologi, dan peningkatan daya saing komoditas lokal di pasar global	optimalisasi ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan, inovatif, aman, serta mampu memperluas jaringan pemasaran komoditas unggulan daerah secara menyeluruh.
		Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pemasaran produksi						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata potensial dan unggulan serta perluasan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan promosi dan pemasaran potensi obyek wisata, daya tarik wisata alam dan buatan serta ekonomi kreatif melalui platform digital	pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif, penyusunan masterplan, serta awal promosi digital untuk memperkenalkan obyek wisata unggulan.	pembangunan dasar desa wisata, penyusunan paket wisata lokal, dan pelatihan dasar bagi pelaku usaha wisata serta ekonomi kreatif.	peningkatan mutu daya tarik wisata alam maupun buatan, diversifikasi produk wisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan promosi regional berbasis platform digital.	pembangunan fasilitas penunjang wisata (akomodasi, atraksi, aksesibilitas), penguatan kelembagaan desa wisata, serta fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.	pengembangan jejaring kerjasama pemasaran nasional dan internasional, peningkatan kompetensi lanjutan SDM wisata dan kreatif, serta integrasi ekonomi kreatif ke dalam rantai nilai pariwisata.	optimalisasi ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan melalui promosi global, pemanfaatan teknologi digital yang inovatif, serta penguatan sarana, prasarana, dan kelembagaan yang mendukung daya saing wisata unggulan daerah.
		Pengembangan desa wisata, paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan/atraksi wisata						
		Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif						
		Perencanaan, pengembangan dan diversifikasi obyek, daya tarik wisata serta ekonomi kreatif						
		Fasilitasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pelaku ekonomi kreatif						
		Pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem kreativitas						
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Peningkatan dan perluasan akses kesempatan kerja berbasis kompetensi	Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri Peningkatan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Kejuruan, Balai Latihan Kerja Negeri, Balai Latihan Kerja Swasta maupun Balai Latihan Kerja Komunitas dengan industri	pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis sektor unggulan, inventarisasi kompetensi yang dibutuhkan industri, serta penyusunan roadmap pelatihan kerja dan penguatan kelembagaan BLK.	penyelenggaraan pelatihan dasar sesuai kebutuhan industri, peningkatan kurikulum pendidikan kejuruan, serta perluasan kerjasama antara BLK dengan dunia usaha/industri lokal.	penguatan link and match pendidikan kejuruan dan industri, peningkatan pelatihan lanjutan berbasis teknologi, serta pengembangan awal bursa tenaga kerja daerah.	perluasan jaringan kerjasama bursa tenaga kerja dengan industri nasional dan internasional, fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta penguatan fungsi hubungan industrial.	integrasi sistem informasi pasar kerja berbasis digital, perluasan kesempatan magang kerja luar negeri, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja.	optimalisasi ekosistem ketenagakerjaan yang kompetitif, berdaya saing global, berkelanjutan, serta menjamin kesejahteraan tenaga kerja melalui sistem hubungan industrial yang harmonis.

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Peningkatan fasilitasi kerjasama bursa tenaga kerja dengan pelaku industri/usaha di dalam dan luar negeri						
		Peningkatan fungsi hubungan industrial, perlindungan serta jaminan sosial bagi tenaga kerja						
	Peningkatan dan pengembangan kemudahan dan keamanan investasi di daerah	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan	pemetaan potensi investasi daerah, penyusunan peta digital peluang investasi, serta peningkatan kapasitas dasar SDM aparatur pelayanan perizinan.	penguatan sistem pelayanan perizinan berbasis digital, peningkatan promosi awal potensi unggulan daerah, serta penyempurnaan mekanisme pengendalian perizinan.	pengembangan inovasi layanan perizinan terpadu, fasilitasi investasi prioritas daerah, serta promosi investasi secara regional dan nasional.	perluasan jaringan promosi investasi internasional, integrasi peta digital potensi investasi dengan platform nasional, serta penguatan pengendalian penanaman modal berbasis teknologi.	peningkatan keamanan dan kepastian investasi, penyempurnaan regulasi daerah yang pro-investasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi realisasi investasi.	optimalisasi ekosistem investasi yang transparan, inovatif, aman, dan berkelanjutan dengan pelayanan perizinan yang terintegrasi penuh serta promosi investasi yang berdaya saing global.
		Peningkatan promosi potensi unggulan daerah						
		Pengembangan Peningkatan inovasi pelayanan kemudahan perizinan						
		peta digital potensi investasi						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pengendalian pelaksanaan perijinan dan penanaman modal						
	Peningkatan dan penguatan peranserta masyarakat dalam pembangunan guna mendorong kemandirian desa	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan Mendorong kemandirian desa melalui pengembangan usaha bersama berbasis potensi dan kearifan lokal Pengembangan kawasan perdesaan prioritas Kabupaten Serang	pemetaan potensi desa, identifikasi permasalahan sosial-ekonomi, serta penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan rencana pengembangan kawasan perdesaan prioritas.	penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan.	pengembangan usaha bersama berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan, dan pembentukan kelembagaan ekonomi desa.	pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat, penguatan kerjasama antar desa, serta pengembangan awal kawasan perdesaan prioritas.	perluasan skala usaha bersama, peningkatan daya saing produk desa, serta optimalisasi pengelolaan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.	kemandirian desa yang berkelanjutan melalui inovasi berbasis kearifan lokal, penguatan jaringan kerjasama regional, serta konsolidasi kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Serang.
	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dalam pengelolaan sampah berdasarkan standar pelayanan	pemetaan permasalahan lingkungan, penyusunan roadmap pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, serta peningkatan kapasitas dasar SDM aparatur bidang lingkungan.	pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, penguatan kerjasama dengan pihak swasta/komunitas, serta kampanye	pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, pembinaan rutin terhadap pelaku usaha/industri, serta fasilitasi program lingkungan	peningkatan teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan sampah dan limbah, penyediaan sarana-prasarana tambahan penunjang	perluasan skala pengelolaan sampah melalui kerjasama antar daerah, penguatan program perlindungan ekosistem, serta konsolidasi	optimalisasi sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, integrasi program pembangunan daerah, serta terbangunnya

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		minimal yang berlaku		kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah.	berbasis masyarakat di desa/kelurahan.	lingkungan, serta intensifikasi pengawasan kepatuhan industri.	peran masyarakat sebagai mitra aktif pengelolaan lingkungan.	budaya masyarakat dan dunia usaha yang taat, sadar, dan peduli lingkungan.
		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						
		Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan						
		Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan						
		Peningkatan kapasitas SDM						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		bidang lingkungan hidup						
	Peningkatan rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat	Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan kemitraan dengan pihak terkait dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	pemetaan potensi kerawanan sosial, bencana, dan ketertiban umum, penyusunan roadmap ketenteraman masyarakat, serta kampanye kesadaran awal masyarakat tentang keamanan lingkungan.	penguatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, peningkatan kapasitas aparat penegak perda, serta pengembangan kemitraan awal dengan pihak keamanan dan lembaga terkait.	pelatihan dasar kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kebakaran, peningkatan kompetensi awal SDM kebencanaan, serta penyediaan sarana-prasarana mitigasi darurat di kawasan prioritas.	perluasan jaringan kemitraan lintas sektor untuk menjaga ketertiban wilayah, penguatan sistem informasi kebencanaan berbasis digital, serta peningkatan sarana evakuasi di kawasan rawan..	ntegrasi program perlindungan masyarakat dengan kesiapsiagaan bencana skala kabupaten, pengembangan pusat informasi dan edukasi bencana, serta peningkatan keterlibatan aktif masyarakat melalui program gotong royong keamanan.	optimalisasi ekosistem keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berkelanjutan, dengan pengawasan perda yang efektif, masyarakat yang sadar hukum, sistem kebencanaan yang tangguh, serta terbangunnya budaya aman dan siaga di seluruh wilayah kabupaten.

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, bencana non alam dan kebakaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Pengembangan kompetensi SDM kebencanaan, peningkatan sarana prasarana mitigasi dan evakuasi bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						
		Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendorong kesiapsagaan bencana alam dan kebakaran melalui penyebaran informasi kebencanaan terutama pada kawasan rawan bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	Peningkatan dan pengembangan nilai tambah komoditas pertanian	Peningkatan akses petani terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi	pemetaan potensi komoditas unggulan pertanian, identifikasi kebutuhan sarana-prasarana dan subsidi, serta penyusunan program perlindungan dasar bagi petani.	peningkatan akses petani terhadap benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan kelembagaan kelompok tani.	pelaksanaan program perlindungan dan jaminan petani, pengembangan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta keterlibatan generasi muda dalam usaha tani modern.	peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui teknologi tepat guna, fasilitasi akses pasar, serta diversifikasi pengolahan komoditas untuk menambah nilai tambah.	pengembangan jejaring kerjasama pertanian dengan industri pengolahan, perluasan perlindungan komoditas unggulan, serta promosi hasil pertanian daerah ke tingkat nasional.	optimalisasi sistem pertanian berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi inovatif, peningkatan daya saing komoditas hingga pasar internasional, serta kemandirian petani dan desa berbasis pertanian modern.
		Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas pertanian						
		Peningkatan dan pengembangan kapasitas petani serta pelibatan petani muda dalam pengelolaan pertanian						
	Optimalisasi ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penyimpanan komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan cadangan pangan	pemetaan kebutuhan cadangan pangan, identifikasi sarana prasarana penyimpanan yang ada, serta penyusunan roadmap penguatan cadangan pangan daerah.	pembangunan dan rehabilitasi gudang penyimpanan hasil pertanian, penguatan kelembagaan pangan, serta awal program diversifikasi pangan lokal.	peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana penyimpanan (cold storage, silo, gudang), serta pendampingan petani untuk	perluasan program diversifikasi pangan daerah, pemanfaatan teknologi pascapanen untuk memperpanjang umur simpan	penguatan cadangan pangan strategis melalui pengelolaan terintegrasi antara produksi, penyimpanan, dan distribusi, serta promosi	optimalisasi sistem cadangan pangan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap krisis, dengan sarana prasarana penyimpanan modern, diversifikasi pangan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau secara merata				menghasilkan komoditas pangan yang beragam dan berkualitas.	komoditas, serta integrasi penyimpanan dengan sistem distribusi pangan kabupaten.	konsumsi pangan alternatif berbasis lokal.	yang kuat, serta keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
		Pengembangan dan diversifikasi komoditas pangan untuk memperkuat cadangan pangan daerah						
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan	Pemetaan kebutuhan sarana & prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan; rehabilitasi awal infrastruktur perikanan (pelabuhan kecil, cold storage, pasar ikan); penyusunan skema perlindungan & jaminan bagi petani/nelayan.	Peningkatan kualitas sarana produksi (alat tangkap ramah lingkungan, tambak, perahu); penguatan fasilitas pemasaran (pasar ikan higienis, rantai dingin); implementasi perlindungan harga dasar & asuransi nelayan.	Pengembangan jaringan distribusi & logistik hasil perikanan antar wilayah; fasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan & eksportir; peningkatan kapasitas kelompok nelayan/petani ikan dalam manajemen usaha.	Perluasan pemasaran digital berbasis e-commerce perikanan; integrasi rantai pasok dengan industri pengolahan & pasar modern; penguatan perlindungan komoditas melalui sertifikasi mutu & keamanan pangan.	Konsolidasi program kemitraan perikanan berkelanjutan & inklusif; diversifikasi produk olahan ikan bernilai tambah; penguatan lembaga penjaminan hasil tangkapan & budidaya.	Optimalisasi sistem produksi, penyimpanan, & pemasaran hasil perikanan berbasis teknologi modern; ketersediaan cadangan pangan perikanan yang merata & terjangkau; sistem perlindungan nelayan/petani ikan yang adaptif & berkelanjutan.
		Peningkatan dan pengembangan kerjasama kemitraan pemanfaatan dan pemasaran hasil perikanan						
		Peningkatan perlindungan dan						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas perikanan						
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan public berbasis digital	Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi	Fokus pada pemetaan kebutuhan layanan publik digital, perluasan jaringan internet gratis di pusat pemerintahan, sekolah, dan desa prioritas, serta pengembangan aplikasi dasar layanan publik yang mudah diakses masyarakat.	Peningkatan kualitas layanan digital dengan penyempurnaan aplikasi layanan publik sektoral, perluasan jangkauan internet ke kawasan produktif (pasar, UMKM, kawasan wisata), serta pelatihan awal SDM aparatur tentang pelayanan digital.	Integrasi antar-aplikasi layanan publik menjadi satu platform terpusat, penguatan infrastruktur jaringan internet di seluruh kecamatan, dan peningkatan kapasitas SDM aparatur serta masyarakat pengguna layanan digital.	Pengembangan fitur lanjutan layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat (misalnya layanan perizinan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan), perluasan internet gratis ke seluruh desa, serta penguatan keamanan siber.	Konsolidasi sistem layanan publik digital terintegrasi, perluasan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan kebijakan, serta peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem digital daerah.	Optimalisasi layanan publik digital yang cerdas, cepat, aman, dan inklusif dengan pemanfaatan teknologi modern (AI, big data, cloud), keberlanjutan layanan internet gratis yang merata, serta SDM aparatur yang kompeten secara penuh dalam pengelolaan pelayanan berbasis digital.

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital						
	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil dan adaptif	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta penerapan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Fokus pada pemetaan kebutuhan reformasi birokrasi, peningkatan dasar kapasitas aparatur melalui pelatihan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta evaluasi awal kinerja BUMD untuk perbaikan tata kelola.	Implementasi sistem pemerintahan berbasis kinerja dan transparansi digital, penyusunan standar operasional tata kelola pelayanan publik, serta restrukturisasi awal BUMD agar lebih efisien dan kompetitif.	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang transparan, serta pengembangan model bisnis BUMD berbasis potensi lokal.	Perluasan penerapan sistem pemerintahan yang bersih dan adaptif di seluruh OPD, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui inovasi usaha.	Konsolidasi sistem tata kelola yang terintegrasi, penguatan budaya kerja birokrasi yang adil dan berorientasi hasil, serta kemitraan BUMD dengan sektor swasta untuk memperkuat daya saing daerah.	Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil, dan adaptif secara menyeluruh dengan aparatur profesional, sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta BUMD yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
		Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD						
	Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Pemetaan kebutuhan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi dasar SDM pengawas sesuai standar nasional, serta evaluasi awal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Implementasi pelatihan lanjutan bagi aparatur pengawas, penerapan instrumen pengawasan berbasis risiko, serta perbaikan tata kelola pengendalian	Integrasi sistem pengawasan dengan teknologi informasi, penguatan unit pengawasan internal di setiap OPD, serta peningkatan maturitas SPIP menuju level menengah.	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital secara menyeluruh, pembinaan berkelanjutan kompetensi pengawas, serta konsolidasi pengawasan	Penguatan kolaborasi pengawasan antara pemerintah daerah, BPK, BPKP, dan lembaga eksternal; peningkatan kualitas rekomendasi	Optimalisasi sistem pengawasan yang profesional, independen, adaptif, dan berbasis teknologi, dengan SDM pengawas yang berkompeten, serta SPIP yang matang untuk menjamin penyelenggaraan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				intern pada perangkat daerah.		lintas sektor untuk meningkatkan transparansi.	pengawasan; serta maturitas SPIP ditingkatkan menuju level lanjut.	pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
		Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah						
	Peningkatan dan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM perencanaan	Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas perencana, pelatihan dasar perencanaan berbasis data, serta penyusunan roadmap penguatan kualitas perencanaan sesuai regulasi.	Peningkatan kompetensi teknis SDM perencanaan (analisis data, permodelan pembangunan, perencanaan berbasis kinerja), pembangunan dan integrasi awal basis data daerah sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.	Penguatan kemitraan dengan lembaga akademis, riset, dan komunitas praktisi untuk mendukung kualitas produk perencanaan, serta implementasi awal sistem monitoring dan evaluasi pembangunan terintegrasi.	Optimalisasi ketersediaan data sektoral lintas OPD, penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis digital, serta penguatan konsistensi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.	Konsolidasi penerapan perencanaan berbasis bukti (<i>evidence-based planning</i>), integrasi penuh data perencanaan dengan sistem nasional, serta peningkatan peran kolaborasi lintas sektor dan akademisi dalam perencanaan daerah.	Optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang profesional, transparan, adaptif, dan berkelanjutan dengan SDM perencana yang kompeten, basis data yang komprehensif, dan produk perencanaan yang konsisten serta berkualitas tinggi.
		Peningkatan kualitas serta ketersediaan data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan						
		Pengembangan kemitraan atau kerjasama dalam perencanaan terutama dengan lembaga akademis						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan						
		Peningkatan konsistensi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan						
	Peningkatan dan pengembangan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah	Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan, keuangan dan barang milik daerah	Pemetaan kapasitas SDM pengelola keuangan, pendapatan, dan aset; pelatihan dasar manajemen keuangan daerah; serta inventarisasi awal barang milik daerah (BMD) untuk penataan administrasi.	Peningkatan kompetensi teknis SDM (akuntansi pemerintahan, manajemen aset, pengelolaan pendapatan daerah), penyusunan standar operasional pengelolaan pendapatan dan BMD, serta pengembangan awal sistem informasi keuangan berbasis digital.	Implementasi sistem informasi keuangan daerah terintegrasi dengan aset, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta penataan lanjutan BMD melalui sertifikasi, validasi, dan penertiban administrasi.	Optimalisasi kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan pajak/retribusi, serta perluasan pemanfaatan sistem informasi aset daerah berbasis digital untuk efisiensi dan akuntabilitas.	Konsolidasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, penguatan mekanisme audit internal, pemanfaatan teknologi untuk monitoring aset, serta peningkatan kontribusi aset daerah terhadap PAD.	Optimalisasi tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, digital, dan berkelanjutan, dengan SDM kompeten, sistem informasi terintegrasi penuh, serta aset daerah tertata rapi, produktif, dan mendukung pembangunan daerah.
		Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah						

Peningkatan dan pengembangan profesionalitas ASN	Peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemetaan kompetensi dan kebutuhan pengembangan ASN di seluruh perangkat daerah, pelatihan dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penyusunan sistem penilaian kinerja berbasis capaian.	Implementasi program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, penerapan awal penilaian ASN berbasis bukti (<i>evidence-based assessment</i>), serta penataan ASN melalui analisis jabatan dan beban kerja.	Penguatan mekanisme penempatan ASN sesuai keahlian dan kompetensi, pengembangan sistem karier berbasis kinerja, serta penguatan budaya kerja profesional, adaptif, dan berintegritas.	Optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk manajemen kinerja ASN, integrasi sistem penilaian kinerja dengan perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan program pengembangan kepemimpinan aparatur.	Konsolidasi sistem manajemen ASN berbasis merit yang transparan dan akuntabel, peningkatan pengelolaan talenta ASN (<i>talent management</i>), serta penguatan kapasitas ASN dalam inovasi pelayanan publik.	Optimalisasi profesionalitas ASN yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi kinerja, dengan sistem penempatan sesuai kompetensi, penilaian berbasis bukti yang matang, serta kontribusi signifikan ASN terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
	Pengembangan penilaian ASN berbasis bukti dan capaian kinerja						
	Penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan keahlian						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Peningkatan dan pengembangan kualitas data statistik sektoral daerah	Pengembangan dan peningkatan kualitas data dan informasi statistik sektoral sesuai standar yang ditetapkan	Pemetaan kondisi eksisting data sektoral, identifikasi kebutuhan standar data sesuai regulasi nasional, serta peningkatan kompetensi dasar SDM pengelola data di perangkat daerah.	Penguatan tata kelola data sektoral melalui penyusunan pedoman dan SOP, pembangunan basis data sektoral awal, serta pelatihan teknis statistik untuk aparaturnya daerah.	Pengembangan ekosistem data dengan integrasi lintas OPD, penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan data, serta pembinaan rutin SDM statistik untuk memastikan kualitas data sesuai standar..	Optimalisasi keterpaduan data sektoral dengan sistem data nasional, penerapan teknologi digital dalam manajemen data, serta peningkatan kualitas publikasi data sektoral daerah yang transparan dan akuntabel.	Konsolidasi ekosistem data daerah yang inklusif, peningkatan akses dan pemanfaatan data oleh publik dan pemangku kepentingan, serta penguatan peran SDM statistik sebagai pengelola dan analis data pembangunan.	Optimalisasi kualitas data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses, dengan SDM statistik yang profesional, serta ekosistem data daerah yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.
		Pengembangan ekosistem data dan informasi di daerah						
	Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM bidang statistik							
	Peningkatan dan pengembangan sistem keamanan data dan informasi berbasis digital	Peningkatan keamanan data dan layanan publik berbasis digital	Pemetaan kebutuhan keamanan data dan informasi digital, audit awal terhadap kerentanan sistem layanan publik berbasis digital, serta penyusunan roadmap penguatan keamanan data daerah.	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar pengamanan data (server, firewall, enkripsi), peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi, serta penerapan standar awal keamanan	Pengembangan pusat data daerah dengan sistem backup dan recovery, integrasi perangkat keamanan ke seluruh OPD, serta penyusunan SOP pengelolaan insiden siber.	Optimalisasi pengamanan data dengan teknologi lanjutan (intrusion detection, keamanan jaringan berbasis AI), serta penguatan monitoring keamanan layanan publik	Konsolidasi sistem keamanan data dan informasi antar OPD dengan sistem terintegrasi, penguatan kerjasama dengan lembaga nasional/otoritas keamanan siber, serta peningkatan	Optimalisasi keamanan data dan informasi digital yang tangguh, adaptif, dan berstandar tinggi, dengan sarana-prasarana modern, SDM yang kompeten, serta sistem pengamanan yang mampu menjamin keberlanjutan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				layanan publik digital.		digital secara real-time.	ketahanan data terhadap serangan digital.	layanan publik digital secara aman dan terpercaya.
		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sistem pengamanan data dan informasi digital						
	Peningkatan dan pengembangan tata Kelola arsip daerah	Peningkatan sistem, SDM pengelola arsip daerah, dan sarana pengelolaan arsip daerah	Pemetaan kondisi arsip daerah, inventarisasi arsip prioritas, serta peningkatan kapasitas dasar SDM pengelola arsip melalui pelatihan manajemen kearsipan sesuai standar nasional.	Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip (ruang arsip, peralatan penyimpanan, perangkat digitalisasi), serta penyusunan pedoman tata kelola arsip daerah.	Implementasi sistem pengelolaan arsip digital tahap awal dengan pilot project di OPD tertentu, serta pembinaan SDM arsiparis untuk mendukung transformasi digital.	Perluasan pengelolaan arsip digital ke seluruh OPD, integrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah, serta penguatan regulasi dan SOP pengelolaan arsip berbasis elektronik.	Konsolidasi sistem arsip digital terintegrasi lintas sektor, peningkatan aksesibilitas arsip bagi publik sesuai ketentuan, serta pengembangan kapasitas SDM dalam manajemen arsip elektronik yang lebih kompleks.	Optimalisasi tata kelola arsip daerah yang modern, profesional, berbasis digital penuh, dengan SDM arsiparis yang kompeten, sarana lengkap, serta sistem pengelolaan arsip yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip daerah berbasis digital						
	Peningkatan dan perluasan akses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dan perluasan akses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital	Pemetaan kebutuhan layanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah, peningkatan kapasitas awal SDM Disdukcapil, serta penyediaan	Penguatan infrastruktur digital untuk layanan administrasi kependudukan, implementasi awal	Perluasan layanan berbasis digital hingga ke desa/kelurahan, integrasi awal dengan sistem arsip daerah	Pengembangan layanan administrasi kependudukan terintegrasi lintas sektor (pendidikan,	Konsolidasi dan pemantapan sistem layanan kependudukan digital secara menyeluruh, peningkatan	Optimalisasi layanan administrasi kependudukan yang sepenuhnya digital, cepat, mudah,

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			sarana dasar layanan kependudukan di tingkat kabupaten/kecamatan.	sistem layanan online, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.	berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan data kependudukan digital.	kesehatan, perlindungan sosial), penguatan regulasi perlindungan data kependudukan, serta peningkatan sarana keamanan data.	jangkauan layanan bagi masyarakat di wilayah terpencil, serta evaluasi dan penguatan sistem pengamanan data kependudukan.	terintegrasi, dengan SDM profesional, sarana prasarana memadai, serta sistem keamanan data kependudukan yang adaptif dan terpercaya.
		Peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap keamanan data kependudukan						
	Peningkatan tata Kelola Penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Peningkatan dan pengembangan layanan publik yang mudah diakses, cepat dan terjangkau	Pemetaan kondisi layanan publik di kecamatan; peningkatan kapasitas dasar SDM kecamatan dalam tata kelola pelayanan; penyediaan sarana prasarana dasar layanan publik (loket, ruang layanan, sistem antrian).	Pengembangan standar pelayanan minimal di kecamatan; penerapan awal sistem layanan publik berbasis digital untuk layanan dasar; perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan.	Perluasan layanan publik digital ke berbagai jenis layanan administrasi kecamatan; penguatan kapasitas SDM dalam pelayanan prima berbasis teknologi; peningkatan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat desa/kelurahan.	Integrasi layanan publik antar kecamatan dengan kabupaten melalui sistem digital terhubung; penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di kecamatan; penyediaan sarana penunjang modern (aplikasi, ruang layanan terpadu).	Konsolidasi tata kelola pelayanan publik kecamatan agar lebih efektif, efisien, dan responsif; optimalisasi layanan publik terpadu di kecamatan; evaluasi menyeluruh pemenuhan sarana prasarana penunjang.	Terwujudnya kecamatan sebagai pusat layanan publik yang transparan, cepat, terjangkau, dan berbasis digital; optimalisasi peran kecamatan sebagai unit terdepan pemerintahan yang adaptif; penerapan inovasi layanan publik berstandar <i>smart kecamatan</i> .
		Pemenuhan sarana dan prasarana						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		penunjang layanan publik						
	Peningkatan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Peningkatan kompetensi aparatur bidang pertanian melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis	Pemetaan kondisi permasalahan pertanahan di Kabupaten; identifikasi kebutuhan pelatihan aparatur bidang pertanahan; pelaksanaan pelatihan dasar dan bimbingan teknis awal bagi aparatur; sosialisasi awal kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban pertanahan.	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan lanjutan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penguatan mekanisme penyelesaian masalah sengketa tanah di tingkat kabupaten; fasilitasi awal pengadaan tanah untuk proyek strategis daerah.	Perluasan program bimbingan teknis aparatur bidang pertanahan dengan standar nasional; penguatan koordinasi dengan lembaga terkait (ATR/BPN, pemerintah desa/kelurahan); pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum pertanahan.	Optimalisasi proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang lebih transparan dan partisipatif; penguatan sistem informasi pertanahan daerah; peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Konsolidasi praktik terbaik dalam penyelesaian masalah pertanahan; peningkatan integrasi data pertanahan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah; evaluasi efektivitas program pelatihan aparatur dan pemberdayaan masyarakat.	Terwujudnya tata kelola pertanahan yang adil, transparan, dan berkeadilan; aparatur yang profesional dan kompeten di bidang pertanahan; masyarakat berdaya dalam memahami hak dan kewajiban pertanahan; pengadaan tanah untuk kepentingan umum berjalan efektif dan minim konflik.
		Peningkatan peranserta						
		Peningkatan kualitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum						
		dan kapasitas masyarakat dalam permasalahan pertanahan						
	Peningkatan dan pengembangan peran riset dan inovasi dalam mendukung	Peningkatan dan pengembangan kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset	Pemetaan kebutuhan riset strategis daerah; penguatan kapasitas SDM riset dan inovasi; penyusunan agenda riset prioritas untuk	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset; pengembangan	Implementasi awal kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah berbasis hasil riset;	Peningkatan pemanfaatan inovasi berbasis potensi daerah dalam program pembangunan;	Konsolidasi dan evaluasi efektivitas rekomendasi kebijakan berbasis riset;	Terwujudnya tata kelola pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi;

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pembangunan daerah		mendukung kebijakan pembangunan; pilot project pemanfaatan riset untuk rekomendasi kebijakan awal.	kerja sama riset dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta; mulai menyusun kebijakan berbasis riset terkait potensi unggulan daerah.	penguatan ekosistem inovasi daerah melalui inkubasi dan pendampingan inovasi lokal; perluasan jejaring riset daerah.	pengintegrasian hasil riset ke dalam perencanaan pembangunan; pengembangan sarana/prasarana penunjang riset daerah.	penguatan hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan; pengembangan pusat data dan inovasi daerah.	pemanfaatan inovasi daerah secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pembangunan; kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah berjalan adaptif dan terukur.
		Penyusunan kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah						
		Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui penciptaan dan pemanfaatan inovasi berbasis potensi daerah						
	Peningkatan kualitas layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pemetaan kebutuhan layanan dukungan DPRD; penguatan kapasitas awal aparatur sekretariat DPRD; penyediaan sarana dan prasarana dasar penunjang kinerja DPRD.	Peningkatan kualitas layanan administrasi dan fasilitasi rapat DPRD; pengembangan sistem informasi pendukung kinerja DPRD; pemenuhan kebutuhan sarana tambahan untuk menunjang fungsi	Optimalisasi layanan pendukung melalui integrasi sistem informasi DPRD dengan sistem pemerintahan daerah; penguatan SDM sekretariat DPRD melalui pelatihan teknis;	Pengembangan inovasi layanan pendukung berbasis digital; penyediaan sarana dan prasarana modern yang mendukung efektivitas DPRD; penguatan fungsi komunikasi publik DPRD	Evaluasi efektivitas layanan dukungan DPRD; penguatan kapasitas sekretariat dalam mendukung penyusunan kebijakan strategis; konsolidasi	Terwujudnya layanan dukungan DPRD yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel; sarana dan prasarana pendukung kinerja DPRD terpenuhi; sistem dukungan kelembagaan DPRD berjalan efektif dan

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				legislasi, anggaran, dan pengawasan.	peningkatan kualitas layanan dokumentasi, publikasi, dan arsip DPRD.	dengan masyarakat.	layanan penunjang berbasis teknologi informasi.	adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
		Pemenuhan kebutuhan penunjang layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat	Pemetaan kondisi aktual pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM; penyusunan program sosialisasi dasar di sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat; pelatihan awal bagi aparatur dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.	Perluasan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM secara tematik sesuai isu lokal; pengembangan media edukasi cetak maupun digital; penguatan kemitraan awal dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil.	Peningkatan intensitas dialog publik, diskusi tematik, dan forum masyarakat mengenai penerapan nilai demokrasi dan HAM; perluasan jejaring kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi kepemudaan; pembentukan kader masyarakat peduli nilai kebangsaan.	Integrasi program pengembangan nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM ke dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan; penguatan program kemitraan lintas sektor; pengembangan inovasi kampanye publik berbasis digital.	Konsolidasi dan evaluasi efektivitas program edukasi nilai kebangsaan; penguatan kelembagaan mitra yang fokus pada demokrasi dan HAM; pembentukan forum kemitraan berkelanjutan antar-lembaga untuk mendukung penerapan nilai kebangsaan.	Terwujudnya masyarakat yang berdaya, demokratis, menjunjung tinggi nilai Pancasila dan HAM; terbentuknya ekosistem kemitraan yang kokoh dan berkesinambungan; nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan HAM terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten.
		Peningkatan dan pengembangan kemitraan dalam upaya pengenalan dan penerapan						

Visi/Misi	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat						
	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal Pengenalan budaya lokal kepada masyarakat khususnya pelajar	Pemetaan potensi budaya dan kearifan lokal; inventarisasi aset budaya takbenda dan benda; penyusunan program pengenalan budaya lokal di sekolah-sekolah; sosialisasi awal tentang pentingnya pelestarian budaya kepada masyarakat.	Peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi budaya lokal di kalangan pelajar dan generasi muda; pelatihan bagi komunitas budaya; fasilitasi awal kegiatan seni tradisional di ruang publik; penguatan kolaborasi dengan lembaga pendidikan.	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya daerah; penguatan kapasitas pelaku budaya dan komunitas seni; penyelenggaraan festival budaya tahunan sebagai wadah promosi dan regenerasi pelestarian budaya.	Integrasi program pelestarian budaya ke dalam pembangunan desa/kelurahan; penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan budaya; penguatan digitalisasi arsip budaya dan dokumentasi kearifan lokal.	Konsolidasi kegiatan perlindungan budaya melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas, dan lembaga adat; evaluasi efektivitas program pengenalan budaya lokal di sekolah; penguatan model ekonomi kreatif berbasis budaya.	Terwujudnya sistem perlindungan dan pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan; generasi muda memiliki pemahaman dan kebanggaan terhadap budaya lokal; kearifan lokal terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sebagai identitas dan daya tarik Kabupaten.

3.3.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Serang

Strategi kewilayahan adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan suatu wilayah atau daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti geografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut.

Strategi kewilayahan dapat meliputi berbagai aspek, seperti:

1. Pengembangan infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
2. Pengembangan ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi investasi.
3. Pengelolaan sumber daya alam: Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
5. Pengembangan masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Tujuan utama dari strategi kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut, serta menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya saing wilayah. Strategi kewilayahan dapat disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholders lainnya.

Dalam perumusan kebijakan atau strategi pembangunan kewilayahan daerah, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah di tingkat provinsi maupun nasional. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan keselarasan dalam pencapaian pembangunan di daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional. Perumusan atau tinjauan kebijakan pengembangan wilayah untuk merumuskan kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.

Untuk hasil perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Serang, langkah-langkah penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Acuannya meliputi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011–2031.

Penyelarasan arah Pembangunan kewilayahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. 5
Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
• Kawasan Pertumbuhan Perdesaan Kawasan Mandiri • Kawasan Pertumbuhan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang • Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Banten • Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi	Pembentukan unit layanan berpredikat zona integritas				• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta penerapan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel • Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima
		Sinergi peningkatan pendapatan daerah				• Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat • Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan, keuangan dan barang milik daerah • Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah • Pengembangan sistem informasi keuangan dan penataan barang milik daerah berbasis digital	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima
		Dukungan transformasi, efisiensi reformasi birokrasi dan perkuatan reformasi hukum, melalui: i) pencegahan dan pemberantasan korupsi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); ii) penanggulangan judi dan penyelundupan; dan iii) Pencegahan, Pemberantasan,				• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta penerapan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel • Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)				pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan	
		Dukungan pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: i) penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital; ii) pengembangan kompetensi dan budaya digital asn; iii) digitalisasi layanan publik prioritas; dan iv) pengembangan ekosistem layanan publik digital				• Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat • Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial • Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi • Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital • Peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima
	Investasi, kemudahan industri dan	Dukungan kemudahan izin usaha dalam mendorong penyediaan lapangan kerja dengan padat karya, akses dukungan permodalan bagi tuna karya serta pengutamaan tenaga kerja lokal				• Pengembangan Peningkatan inovasi pelayanan kemudahan perizinan	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
	penyerapan tenaga kerja					- Pengembangan peta digital potensi investasi - Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri	potensi lokal dan berwawasan lingkungan
		Dukungan pengelolaan kawasan industri berbasis padat karya berprinsip esg (<i>environmental, social, governance</i>) dan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan, mencakup: transportasi hijau, energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah, serta adopsi teknologi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular Dukungan hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, surfaktan, kelapa, perikanan tangkap dan produk unggulan sesuai karakteristik wilayah lainnya Dukungan pembangunan dan pengembangan industri halal/industri hijau/industri biru khususnya pada industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor sesuai potensi daerah yang ditetapkan oleh RTRW daerah Dukungan pengembangan koridor industri cilegon-serang- tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, industri logam, besi, dan baja) Dukungan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Kelapa Sawit), Kawasan Industri Bojonegara, Kawasan Ekosistem Industri Halal, Dan Kawasan Industri <i>Modern</i> Yang Disertai Pembangunan Pelabuhan Perdagangan Internasional	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	- Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri - Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri - Pembangunan kawasan industri prioritas - Pemberian insentif terhadap pengusaha yang mengelola industrinya secara berkelanjutan - Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	Kawasan Peruntukan Industri Serang Bagian Barat dan Timur	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrstruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman - Penyusunan rencana tata ruang pada	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	
	Zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi	Dukungan pengembangan UMKM terhadap akses pasar, perbankan, peningkatan kompetensi dan kualitas produk usaha sesuai unggulan wilayah, pendampingan terhadap inovasi produk dan layanan, menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan wirausaha				• Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen • Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pemasaran produksi • Peningkatan promosi dan pemasaran potensi obyek wisata, daya tarik wisata alam dan buatan serta ekonomi kreatif melalui platform digital • Pengembangan desa wisata, paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan/atraksi wisata • Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif • Perencanaan, pengembangan dan diversifikasi obyek, daya tarik wisata serta ekonomi kreatif • Fasilitasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						Pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem kreativitas	
		Dukungan pembangunan/revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas	Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berdaya saing global	Mendorong dan mengembangkan sentra industri menengah dan kecil yang produktif dengan mengolah produk berbasis bahan baku lokal	Kabupaten Serang	- Peningkatan pembinaan dan bantuan teknis untuk peningkatan mutu/kualitas produksi - Peningkatan kerjasama kemitraan antara pelaku UMKM dengan industri yang ada di Kabupaten Serang	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
		Dukungan pengembangan ekosistem Industri Kecil Menengah berbasis potensi industri koridor serang				- Peningkatan dan pengembangan mutu/kualitas produksi - Peningkatan pemanfaatan komoditas produk lokal dalam industri pengolahan	
		Dukungan optimalisasi Koperasi Merah Putih				- Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal - Pengenalan budaya lokal kepada masyarakat khususnya pelajar	Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang
	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Dukungan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten, melalui: i) desa budaya; ii) perlindungan, pelestarian, dan revitalisasi warisan budaya; iii) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan (cagar budaya, permuseuman, dan pusat kebudayaan lainnya); dan iv) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, sertifikasi kompetensi pelaku budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	- Penetapan batas kawasan cagar budaya - Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan cagar budaya - Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya	- Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kecamatan Cinangka dan Padarincang - Kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani - Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa		

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
				• Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan • Pelaksanaan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang telah ditetapkan	• Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuhbelas • Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros • Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Lama Pamarayan • Kawasan Situs Patapan di Kecamatan Kibin • Kawasan Ziarah Gunung Santri		
		Dukungan pengembangan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Wisata	• Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) • Pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata	• Kawasan Pariwisata Alam • Kawasan Pariwisata Budaya	• Peningkatan promosi dan pemasaran potensi obyek wisata, daya tarik wisata alam dan buatan serta ekonomi kreatif melalui platform digital • Pengembangan desa wisata, paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan/atraksi wisata	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
		Pengembangan pariwisata berupa <i>event tourism internasional</i> , wisata alam, wisata sejarah/budaya, wisata religi, wisata buatan dan event lainnya yang akan diintervensi lintas sektoral					
		Dukungan pengembangan atraksi wisata dan peningkatan 6A KPW Banten Lama sebagai kawasan wisata religi (Danau Tasikardi)					

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		Dukungan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi syariah, ekonomi biru, ekonomi hijau, maupun ekosistem ekonomi lainnya		• Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan • Mensinergikan kegiatan budaya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata • peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kepariwisataan • Peningkatan sistem informasi wisata		• Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif • Perencanaan, pengembangan dan diversifikasi obyek, daya tarik wisata serta ekonomi kreatif • Fasilitasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif • Pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem kreativitas	
		Dukungan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi wisata memanfaatkan percepatan transformasi digital, melalui: i) perluasan infrastruktur digital; ii) peningkatan kapasitas sdm digital dan literasi digital; dan iii) pembangunan jaringan <i>broadband</i> hingga ke pelosok					
			Pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan <i>sport center</i>	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	• Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan • Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi	Kabupaten Serang	• Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana olah raga • Peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di tingkat nasional
	Sekolah gratis untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten	Dukungan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) melalui: i) perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ii) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; iii) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; iv) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; v) revitalisasi pendidikan nonformal; vi) penguatan pengelolaan dan akselerasi	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	• Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan • Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi	Kabupaten Serang	• Penguatan Tata kelola sistem pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan Sarana	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; vii) <i>modernisasi dan akselerasi stem (science, technology, engineering, and mathematics)</i>				prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang menengah dan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Peningkatan kompetensi peserta didik melalui pengembangan model pembelajaran dan penguatan budaya literasi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		Dukungan pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita					
		Dukungan penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, penyediaan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja					

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		maupun layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan wilayah					
		Pelaksanaan pendidikan gratis tingkat pendidikan menengah dan khusus ditunjang dengan tenaga pendidik yang berkompeten sesuai keahlian					
		Pembangunan unit sekolah baru SMA, SMK dan Pendidikan Khusus (untuk anak berkebutuhan khusus) dengan memperhatikan kondisi wilayah	Perwujudan Sistem Perkotaan (Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan)	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan - Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial	Kabupaten Serang		
		Dukungan pengembangan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah					
		Dukungan pembangunan SDM perdesaan Kabupaten Serang					
		Dukungan percepatan transformasi digital, melalui: i) penyederhanaan proses bisnis; ii) perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; iii) pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; iv) perluasan layanan penyiaran digital; dan v) layanan digital terpadu, terpersonalisasi dan berfokus pada <i>user centric</i>				- Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat - Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial - Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi	Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital	
	Akses kesehatan bagi warga dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi	Dukungan optimalisasi fasilitas kesehatan (sarana dan prasarana yang memadai) dan program kesehatan yang adil dan merata	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan - Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi	Kabupaten Serang	- Peningkatan kualitas dan perluasan akses layanan kesehatan termasuk pengembangan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan lansia berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Penguatan dan pengembangan upaya pengendalian dan pencegahan kasus stunting melalui pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan kesadaran dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan
		Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut/kasus kesehatan mental/kasus multi-penyakit pada lanjut usia/kasus ketergantungan obat serta pembudayaan hidup sehat					
		Dukungan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: i) peningkatan kualitas layanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif; ii) penyediaan sarana-prasarana kesehatan primer dan rujukan; iii) pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular, dan tropis terabaikan; iv) penurunan kematian ibu dan anak; v) pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan penuntasan tbc; vi) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta kb dan kesehatan reproduksi; dan vii) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis					
		Dukungan pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita					

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						- Peningkatan dan perluasan cakupan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat - Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen layanan Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		Dukungan penguatan kesetaraan <i>gender</i> , pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: i) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan ii) penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG (pengarusutamaan <i>gender</i>) dalam proses pembangunan				- Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan
		Dukungan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia secara inklusif dalam proses pembangunan				- Peningkatan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	
		Dukungan pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan satu sistem regsosok maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)				• Perlindungan jaminan sosial yang adil dan tepat sasaran • Perlindungan jaminan sosial yang adil dan tepat sasaran • Sinkronisasi data antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan
		Dukungan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kab/kota				• Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar Kemenkes sebagai rumah sakit pengampuan dan mitra JKN • Peningkatan kemandirian rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						Optimalisasi digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit	
		Dukungan pencapaian UHC					
	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Dukungan pembangunan dan pelaksanaan sekolah rakyat	Perwujudan Sistem Perkotaan (Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan)	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan - Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial	Kabupaten Serang	Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan Sarana prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan
		Dukungan intervensi program makan bergizi gratis, bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC)				- Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penyimpanan komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan cadangan pangan - Pengembangan dan diversifikasi komoditas pangan untuk memperkuat cadangan pangan daerah	Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan
	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Dukungan peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan yang berkelanjutan					
		Dukungan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai karakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan (seperti pangan akuatik/ <i>blue food</i> , dsb)					
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi pertanian dan perikanan, serta				Peningkatan akses petani terhadap ketersediaan sarana	Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		pengendalian kepastian pasar, melalui: i) peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; ii) penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; iii) pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; iv) perluasan akses asuransi usaha tani; v) peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; vi) pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama				prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi • Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas pertanian • Peningkatan dan pengembangan kapasitas petani serta pelibatan petani muda dalam pengelolaan pertanian • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan • Peningkatan dan pengembangan kerjasama kemitraan pemanfaatan dan pemasaran hasil perikanan • Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas perikanan	meningkatkan ketahanan pangan
		Dukungan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan, pengembangan serta peningkatan produktivitas hortikultura dan peningkatan produktivitas perikanan (tangkap dan budidaya)	Perwujudan Kawasab Pertanian dan Kawasan Perikanan	• Pengembangan agribisnis tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan • Pengembangan Sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan • Peningkatan produksi tanaman perkebunan • Penetapan batas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang • Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang	Kabupaten Serang		
		Dukungan peningkatan daya guna lahan pertanian dan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, melalui: i) penyediaan dan perluasan akses alsintan <i>modern</i> /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; ii) mitigasi organisme pengganggu tumbuhan (opt) dan kesehatan hewan; iii) peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; dan iv) peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen					
		Dukungan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, melalui: i) kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; ii) reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; iii) optimalisasi dan					

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		revitalisasi lahan pertanian; dan iv) peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik Penguatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah dengan pendekatan terpadu few nexus (<i>food, energy, water</i>) Dukungan pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian Dukungan pemberdayaan aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan: perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura Dukungan optimalisasi kawasan agrikultur Kabupaten Serang		• Pengembangan kegiatan budidaya pertanian organik • Pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian • Mensinergikan kegiatan budidaya pertanian campuran • sosialisasi dan workshop penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang • Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya • Pengembangan agribisnis perikanan tangkap dan budi daya • Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan			

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
				pemasaran hasil perikanan tangkap - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional - Pengembangan Kawasan Minapolitan			
		Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Pulokali	Pengembangan Kawasan Perikanan	Pengembangan Saeana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Panjang, PPI Wadas, dan PPI Pulo Kali di Kecamatan Pulo Ampel		
		Pembangunan pusat distribusi provinsi dan ekspor-impor produk unggulan	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan	Pembangunan dan peningkatan terminal barang berupa Pembangunan Pusat Distribusi Regional	Kecamatan Kopo	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
	Pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air dan hunian layak	Dukungan penyusunan masterplan penataan kawasan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah secara terpadu	Pemantapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Penyusunan rencana detail tata ruang Bagian Wilayah Perencanaan	Kabupaten Serang	- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrastruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						elayanan minimal yang berlaku - Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	
		Pembangunan konektivitas kawasan produktif ekonomi (infrastruktur dan sistem logistik)	Perwujudan Sistem Transportasi	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi darat, meliputi : jalan, jaringan kereta api, jaringan sungai, danau dan penyeberangan dan sistem jaringan transportasi laut	Kabupaten Serang	- Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman - Penyediaan dan pengembangan sarana	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		Pembangunan PJU, sarana dan prasarana perhubungan serta transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, dan efisien	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kabupaten	Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang	Kabupaten Serang	dan prasarana penunjang keselamatan pada jalan kewenangan kabupaten	
		Dukungan pembangunan Bendungan Cidanau, pembangunan SPAM Regional Karian Barat dan pembangunan SPAM Regional Sindangheula	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan Pemeliharaan dan pengembangan jaringan bukan perpipaan Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaaan	Kabupaten Serang	- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrstruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
		Dukungan pembangunan Bendungan Cidanau	Pengembangan jaringan sumber daya air	Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas kabupaten berupa pengelolaan dan pengembangan bendung dan bendungan	Bendungan Cidanau di Kecamatan Cinangka		
		Dukungan pembangunan IPLT/IPAL dan SPAL Regional	Pengembangan prasarana pengelolaan limbah	Pengembangan instalasi pengolahan air limbah Pengembangan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga pada <i>on site treatment</i> berupa cubluk dan tangka septik yang memenuhi standar teknis Pembangunan sarana MCK dengan sistem <i>on site</i> dan <i>off site</i>	Kabupaten Serang		
		Dukungan penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, penanganan limbah/sanitasi,	Pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penataan permukiman perdesaan	Kabupaten Serang		

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, rumah/hunian layak huni dan ruang terbuka hijau) Dukungan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Serang		Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan Pengembangan aksesibilitas wilayah		- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	
		Pembangunan kebinamargaan Dukungan optimalisasi kebermanfaatan Jalan Tol Serang- Panimbang (khususnya <i>exit</i> tol Cikeusal, Petir Dan Tunjung Teja) Dukungan pelebaran jalan Ruas Palima-Baros Penyelesaian pembangunan ruas jalan kewenangan provinsi (Anyer- Pasar Teneng dan Pelebaran Ruas Palima-Untirta) Dukungan perencanaan dan penyiapan pembangunan interkoneksi Sumatera Jawa (seperti Jembatan Selat Sunda) Dukungan perencanaan dan penyiapan pembangunan jalan tol/jalan alternatif penopang optimalisasi/ekspansi Kawasan Industri Cilegon-Serang Dukungan pembangunan infrastruktur PLTP Rawadano	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Pembangunan jalan pendamping tol Serang Panimbang (Ruas Cikeusal-Tunjungteja) Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi (JKP-2) berupa ruas jalan Palima-Pasar Teneng, Ruas Jalan Palima-Baros	Jalan kewenangan Nasional, Jalan Kewenangan Provinsi dan Jalan Kewenangan Kabupaten di wilayah Kabupaten Serang	Peningkatan dan pengembangan infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
			Pengembangan jaringan	Pengembangan potensi tenaga	PLTU Jawa-7	Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan	Misi 2:

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
			infrastruktur ketenagalistrikan	listrik dengan sumber panas bumi • Pengembangan pembangkit tenaga listrik	PLTP Rawa Dano PLTU Banten	strategis dan prioritas di wilayah kabupaten	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
		Dukungan pengembangan terpadu pesisir utara jawa	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan	Penyediaan Sarana dan prasarana penunjang Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis	Kecamatan Pontang dan Tirtayasa	• Peningkatan dan pengembangan infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrstruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
						- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	
		Dukungan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah	Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air berupa pengelolaan jaringan irigasi	- Pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangan - Pelibatan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air - Peningkatan dan rehabilitasi kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap	Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	- Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
		Pembangunan PSU permukiman, pos layanan desa sejahtera, dan penataan permukiman kumuh terpadu kewenangan provinsi	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang	Kabupaten Serang	Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		Dukungan pembangunan rumah/hunian murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (PHTC)		permukiman perkotaan dan perdesaan Penyusunan masterplan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan Penyediaan fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman		berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Penyediaan dan pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku • Penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku	Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan
		Dukungan rintisan kereta api Tangerang-Serang	Pembangunan dan peningkatan jaringan kereta api	Pembangunan jaringan prasarana jalur kereta api baru yang menghubungkan kawasan industri dan simpul-simpul transportasi utama	Ruas Serang-Cikande-Cikupa-Parung Panjang Ruas Serang-Balaraja-Jakarta-Cikarang	• Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman • Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pada jalan kewenangan kabupaten	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
		Dukungan elektrifikasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Serang- Merak	Pengembangan jaringan prasarana jalur kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-	Pengembangan Pengembangan Jalur ganda dan elektrifikasi	jalur Rangkasbitung-Serang-Cilegon		

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
			simpul transportasi utama				
		Dukungan penyelesaian masalah persampahan terintegrasi hulu- hilir	Pengembangan sistem jaringan persampahan	- Pembangunan Tempat Penampungan Sementara sesuai standar pelayanan - Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Penerapan teknologi dan sistem pemilahan sampah - Optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan - Pengolaan sampah 3R - Pengembangan layanan pengangkutan sampah perkotaan pada kecamatan yang belum terlayani	Kabupaten Serang	- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dalam pengelolaan sampah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku - Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan
		Dukungan reformasi pengelolaan sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, melalui: i) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan; ii) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan di TPA/LUR; dan iii) adopsi teknologi pemrosesan sampah dan sanitasi yang berkelanjutan					
		Dukungan konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>cathment area</i> , terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh- Cipuntenageung-Cibama	Perwujudan kawasan konsevasi	- Pengawasan dan pemantaun untuk pelestarian kawasan konservasi - Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam	Kawasan Konservasi Cagar Alam Rawadano dan Tukung Gede, DAS, di wilayah Kabupaten Serang		
		Dukungan pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS					

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh- Cipuntenageung- Cibama		upaya pelestarian kawasan • pelestarian keanekaragaman hayati ekosistemnya			
		Dukungan optimalisasi fungsi dan konservasi wilayah sungai Ciujung, Ciujung, Cidurian					
		Dukungan optimalisasi fungsi konservasi, ekologi, edukasi dan Wisata Cagar Alam Rawadano					
	Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta resiliensi terhadap bencana	Dukungan peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				• Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, bencana non alam dan kebakaran • Pengembangan kompetensi SDM kebencanaan, peningkatan sarana prasarana mitigasi dan evakuasi bencana • Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendorong kesiapsiagaan bencana alam dan kebakaran melalui penyebaran informasi kebencanaan terutama pada kawasan rawan bencana	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan
		Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung ketahanan daerah melalui proses pendidikan dan penyadaran sejak dini					
		Dukungan <i>nature-based solution</i> dan <i>gray infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami					
		Dukungan peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau melalui pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan,	Perwujudan kawasan rawan peruntukan industri	• Pengembangan dan pengelolaan kawasan rawan peruntukan	Kabupaten Serang	• Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		pertanian dan hal lainnya sebagai upaya mengembalikan mutu air		industri secara berkelanjutan Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri		pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan	investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan
		Dukungan percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: i) pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; ii) penerapan jaringan cerdas (<i>smart grid</i>) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi; iii) adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik; iv) penerapan <i>internet of things</i> (iot) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara <i>real-time</i> ; dan v) perluasan penggunaan kendaraan listrik	Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	- Pengembangan potensi tenaga listrik dengan sumber panas bumi - Pengembangan pembangkit tenaga listrik - Pengembangan PLTM	PLTU Jawa-7 PLTP Rawa Dano PLTU Banten PLTM Bulakan PLTM Cidano	- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan - Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	
		Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi					
		Dukungan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik					
		Dukungan penguatan pengelolaan hutan lestari (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah)	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan produksi pada kawasan budidaya	Kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Anyar, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Mancak, Pabuaran dan Padarincang		
		Dukungan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah)		Penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi			
		Dukungan perlindungan dan pengamanan hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi					

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029			RTRW Kabupaten Serang Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	
Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Program Utama	Indikasi Program Utama	Lokasi	Arah Kebijakan	Misi
		terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah) Dukungan pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri		• Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian lahan • Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan • Mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitar	di Kecamatan Bojonegara, Ciomas, Gunungsari, Kramatwatu, Padarincang, Pulo Ampel dan Waringinkurung		

3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disinkronkan dengan program nomenklatur sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan *Cold Storage* ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas *stunting* (gizi buruk);
2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement* dan *e-reporting* untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;
4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;
6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;
7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;
8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;
10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;
11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;
12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu;
14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;
15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;
16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.

Tabel 3.3. 6 Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan <i>Cold Storage</i> ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas <i>stunting</i> (gizi buruk);	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, wajib belajar dinyah, Pelayanan Kesehatan dan penurunan <i>stunting</i> .
	2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;	
	4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);	
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;	2. Penataan Ruang Publik Terpadu dan Peningkatan Infrastruktur.
	6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;	
	7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;	5. Peningkatan akses air layak minum, sanitasi, kawasan kumuh dan lingkungan hidup berkelanjutan.
	15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;	
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, pariwisata, budaya dan kreatif.
	11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;	
	16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.	
	14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;	6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, pariwisata, budaya dan kreatif.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal	3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan e-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang handal.

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
dan berorientasi pada pelayanan publik prima	<i>planning, e-budgeting, e-procurement</i> dan <i>e-reporting</i> untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga; 10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;	
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, wajib belajar diniyah, Pelayanan Kesehatan dan penurunan stunting.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 3.4. 1 Penyelarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	01 - Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Dan Danau	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas	S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	- Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir - Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob - Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan	S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan	S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan	S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Program Pengelolaan Hutan					
02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan	S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan	S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan	S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara	09- Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor	3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada	S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru		Kreatif, Unggulan, Dan Potensial		pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	Pangan dan Ketahanan Pangan			
		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	05 - Pengembangan Spam Terintegrasi Hulu Ke Hilir	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas	S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru								
02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Air Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	06 - Penyediaan Dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, Dan Berketahanan Iklim Berbasis Cwis	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas	S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya layanan persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, Serta	01 - Penurunan Kematian Ibu Dan Anak	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan	S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas				nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.	penguatan peran perempuan dalam pembangunan			
04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	02 - Pencegahan Dan Penurunan Stunting			Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan	S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029		RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029				
Asta Cita (PN)	Kegiatan Prioritas Utama	Misi (PD)	Program Prioritas PD	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas PD
				nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.	penguatan peran perempuan dalam pembangunan			
06 - Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi Dengan PSU	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.	Tujuan 1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan	S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Selain itu, program prioritas pembangunan daerah juga harus diselaraskan dan mendukung program pendukung Asta Cita yang merupakan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebagai Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pemetaan asta cita Presiden yang termuat dalam prioritas nasional dijabarkan ke dalam Penyelenggaraan Urusan Pembangunan Daerah yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. 2 Pemetaan Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Nasional dalam Asta Cita Presiden

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		3	Komunikasi dan Informatika
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5	Sekretariat Daerah
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pangan
		2	Pertanian
		3	Kelautan dan Perikanan
		4	Energi dan Sumber Daya Mineral
		5	Lingkungan Hidup
		6	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Penelitian dan Pengembangan
		9	Perindustrian
		10	Pariwisata
		11	Komunikasi dan Informatika
		12	Sekretariat Daerah
		13	Tenaga Kerja
		14	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		15	Kesehatan
		16	Perhubungan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Pertanian
		3	Perhubungan
		4	Komunikasi dan Informatika
		5	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		6	Pariwisata
		7	Kebudayaan
		8	Perindustrian
		9	Perencanaan
		10	Persandian
		11	Penelitian dan Pengembangan
		12	Energi dan Sumber Daya Mineral
		13	Sekretariat Daerah
		14	Keuangan
		15	Perdagangan
		16	Kelautan dan Perikanan
		17	Lingkungan Hidup
		18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Pendidikan
		2	Perpustakaan
		3	Kesehatan
		4	Kepemudaan dan Olahraga
		5	Sosial
		6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		8	Tenaga Kerja
		9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Sekretariat Daerah
		12	Perencanaan
		13	Transmigrasi
		14	Komunikasi dan Informatika
		15	Statistika
		16	Sekretariat Daerah
		17	Penelitian dan Pengembangan
		18	Keuangan
		19	Kebudayaan
		20	Perhubungan
		21	Pendidikan dan Pelatihan
	5	1	Perindustrian
		2	Penanaman Modal
		3	Perdagangan
		4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Perhubungan
		6	Energi dan Sumber Daya Mineral
		7	Sekretariat Daerah
		8	Lingkungan Hidup
		9	Pertanahan
		10	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		12	Komunikasi dan Informatika
		13	Penelitian dan Pengembangan
		14	Tenaga Kerja
		15	Pendidikan
		16	Kelautan dan Perikanan
		17	Pangan
		18	Pertanian
		19	Pendidikan dan Pelatihan
		20	Kehutanan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Transmigrasi
		3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Perencanaan
		5	Sosial
		6	Komunikasi dan Informatika
		7	Persandian
		8	Statistika
		9	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		10	Tenaga Kerja
		11	Pertanian
		12	Lingkungan Hidup
		13	Pertanahan
		14	Kelautan dan Perikanan
		15	Pariwisata
		16	Perindustrian
		17	Keuangan
		18	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		19	Perdagangan
		20	Perhubungan
		21	Pendidikan
		22	Kebudayaan
		23	Kesehatan
		24	Sekretariat Daerah
		25	Pendidikan dan Pelatihan

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	26	Kehutanan
		1	Statistik
		2	Arsip
		3	Persandian
		4	Sekretariat Daerah
		5	Sekretariat DPRD
		6	Perencanaan
		7	Keuangan
		8	Kepegawaian
		9	Pendidikan dan Pelatihan
		10	Penelitian dan Pengembangan
		11	Pengawasan
		12	Kesatuan Bangsa dan Politik
		13	Pertanian
		14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		15	Transmigrasi
		16	Pendidikan
		17	Kebudayaan
		18	Kesehatan
		19	Lingkungan Hidup
		20	Energi dan Sumber Daya Mineral
		21	Tenaga Kerja
		22	Komunikasi dan Informatika
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Kehutanan
		2	Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		4	Lingkungan Hidup
		5	Kebudayaan
		6	Sosial
		7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		8	Kesehatan
		9	Pendidikan
		10	Pendidikan dan Pelatihan
		11	Arsip
		12	Perhubungan
		13	Kelautan dan Perikanan
		14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15	Energi dan Sumber Daya Mineral

Adapun dukungan program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. 3 Program Perangkat Daerah dalam Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		4	Pengembangan Pangan Lokal Dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		5	Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
		6	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		7	Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		12	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		13	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
		14	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		3	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		4	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		4	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
		5	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		6	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengembangan Kurikulum
		7	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		8	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

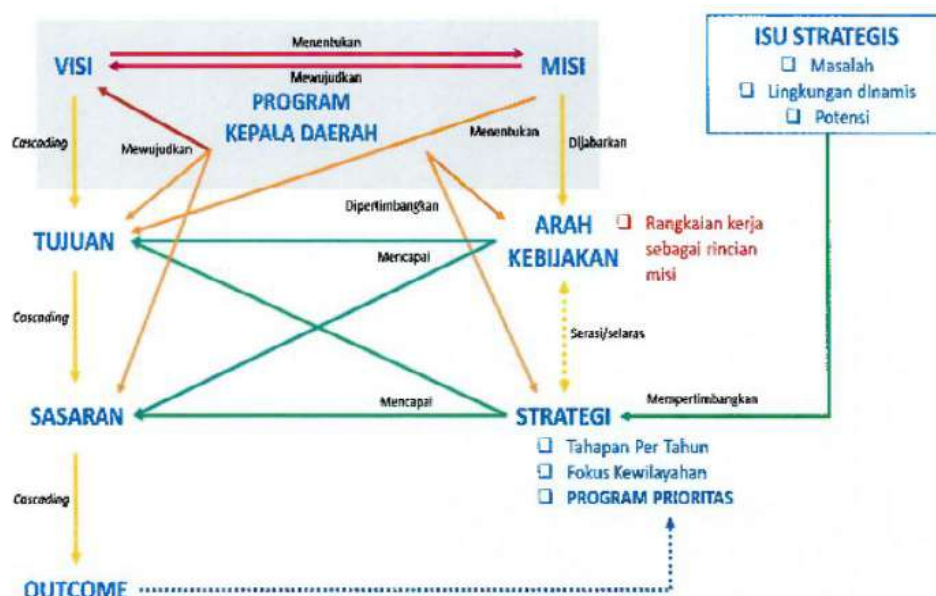
ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		9	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		10	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		11	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		12	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		13	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		14	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		15	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		16	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		17	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		18	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	19	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		20	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		1	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		3	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Timah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		6	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		7	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		8	Pengembangan Industri Kimia	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		9	Pembangunan Industri Semi konduktor	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	10	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		11	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		1	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		2	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program Pemberdayaan Sosial
		3	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		4	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		5	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Penataan Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		2	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		4	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		5	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Penguatan Karakter Dan Jati Diri Bangsa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		2	Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3	Peningkatan Ketahanan Lklm Pesisir Dan Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

3.4.1 Cascading dan Crosscutting dalam RPJMD

Cascading RPJMD merupakan proses penurunan kinerja dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan hingga Strategi pencapaiannya dalam bentuk Pogram Prioritas Daerah. Secara rinci proses cascading diuraikan dalam diagram konsep RPJMD sebagai berikut.

Gambar 3.1. 2 Konsep RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029



Adapun crosscutting adalah proses intervensi multi sektor yang diwakili oleh kinerja urusan dan unsur masing-masing Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan, sasaran hingga program prioritas. Secara rinci cascading dan crosscutting dalam RPJMD diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. 4 Cascading dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia						
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan.	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Indeks Pembangunan Manusia		
				Skor Kemampuan Literasi SD		Urusan Pendidikan
				Skor Kemampuan Numerasi SD		
				Skor Kemampuan Literasi SMP		
				Skor Kemampuan Numerasi SMP		
				Harapan Lama Sekolah		
				Rata-Rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	
				Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar		
				Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 dalam Pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya kualitas hasil belajar Peserta Didik	Skor Kemampuan Literasi SD		
				Skor Kemampuan Literasi SMP		
				Skor Kemampuan Numerasi SD		
				Skor Kemampuan Numerasi SMP		
			Meningkatnya Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		
			Meningkatnya Jumlah Pendidik PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
			Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Inklusiv pada Satuan Pendidikan Dasar	Nilai Inklusivitas SD			
				Nilai Inklusivitas SMP			
			Meningkatnya Keamanan di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Nilai Iklim Keamanan SD			
				Nilai Iklim Keamanan SMP			
			Meningkatnya proses pembelajaran SD yang mendukung toleransi agama, budaya dan komitmen kebangsaan	Nilai Iklim Kebinekaan SD			
				Nilai Iklim Kebinekaan SMP			
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru PAUD	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
				Indeks Pemerataan Guru SD			
				Indeks Pemerataan Guru SMP			
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD			
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD			
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP			
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup		Urusan Kesehatan	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)			
				Angka kematian balita (AKBa)			
				Angka kematian bayi (AKB)			
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)			
				Persentase Desa Stop BABS			
				Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi			
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan		Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit			
				Tingkat Kemandirian Rumah Sakit			
			Tercapainya Indikator Pelayanan Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Length of stay (LOS)			
				Bed Turn Over (BTO)			
				Turn Over Interval (TOI)			
				Angka Kematian bersih (NDR)			
				Angka Kematian Kasar (GDR)			
				ERTR (Emergency Response Time Rate)			
				Tercapainya SDM yang mengikuti diklat sesuai standar kompetensi			Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi
			Terlaksananya kegiatan pemenuhan standar akreditasi	Persentase elemen akreditasi yang mengalami peningkatan nilai	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan		
			S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Urusan Kesehatan
							Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/RTF</i>)	Program Pengendalian Penduduk	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Spesific Fertility/ASFR 15-19</i>)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
				Indeks Partisipasi Olahraga		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
		S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		Urusan Perpustakaan
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
				Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki		
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Indonesia	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
	Tujuan 1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan			Tingkat Kemiskinan		
		S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahteraan Sosial 6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Program Rehabilitasi Sosial	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		S1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Persentase penanganan Kawasan kumuh		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase unit rumah didalam perumahan yang terfasilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utikitas Umum) dan sudah diserahterimakan dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
			Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)				
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air				

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
			masyarakat terhadap irigasi				
				Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik	Program penataan bangunan gedung		
			Meningkatnya akses masyaraka terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan dan pengembangan system air limbah		
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas		Urusan Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal			
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran		
		S2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian			Persentase koperasi sehat		
					Rasio kewirausahaan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal		
				Pertumbuhan wirausaha		
				Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pertumbuhan wirausaha		
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan	Program Pengembangan UMKM		
		S2.1.4: Meningkatnya daya saing industri		Kontribusi sector industri terhadap PDRB		Urusan Perindustrian
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi investasi sector industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		S2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB		Urusan Perdagangan
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		Urusan Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal			Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sector prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi 1. PMA 2. PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Gini Ratio		
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan					
		S3.2.1:		Indeks Desa		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase fasilitasi tata kelola desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	
		S3.2.3: Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Ketenteraman dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
						Ketertiban Umum serta Linmas	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat			
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya			
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB			
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian		Persentase peningkatan produksi hasil pertanian 1. Tanaman Pangan 2. Holtikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan			
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Urusan Pertanian
				Peningkatan produksi holtikultura			
				Peningkatan produksi perkebunan			
		Peningkatan populasi komoditas peternakan					
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
			Persentase unit usaha panga nasal hewan yang memiliki				

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
		S4.1.2: Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		Urusan Pangan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase jumlah Cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Skor Pola Pangan Harapan (PHH Konsumsi)		
				Skor Pola Pangan Harapan (PHH Ketersediaan)		
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		S4.1.3: Meningkatkan Produksi Perikanan		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota		Urusan Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Reformasi Birokrasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Kepuasan Masyarakat		Urusan Komunikasi dan Informatika
				Indeks Pemerintahan Digital		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks PPID	Program Aplikasi Informatika	
				Indeks Pemerintahan Digital		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi public pemerintah daerah		Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Publik		Unsur Sekretariat Daerah
				Nilai Sakip Pemda		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		
				Kerja Sama Dalam Negeri		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
			Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan pemerintah daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		
			Meningkatnya layanan pendukung urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Tingkat capaian layanan urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Unsur Pengawasan
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Unsur Perencanaan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPd Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan		Unsur Keuangan
				Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
			Meningkatnya tata Kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik			
			Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar			Persentase penurunan SILPA
				Meningkatnya tata Kelola akutansi dan pelaporan			
			Meningkatnya tata Kelola aset daerah	Persentase penambangan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
			Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengasawab pengelolaan pendapatan			
			Meningkatnya tata Kelola akutansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu			
			S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN		
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Kepegawaian	
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			
		Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN		Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya			
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik			
		Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerialan Fungsional		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancanga, Pengembangan dan Evaluasi		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Statistik
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah		Urusan Kearsipan
			Meningkatnya tata Kelola arsip dinamis dan statis	Nilai hasil pengawasan kearsioan	Program Pengelolaan Arsip	
			Men ingkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip		
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip		
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase kepemilikan Kartu Identitas		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		S5.1.11:: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan		Unsur Kewilayahan
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya masyarakat yang diberdayakan	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya kententraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase kejadian kasus ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti/diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		Urusan Pertanahan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum tersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan pemerintah daerah	Persentase tahapan persiapan pengadaaana tanah bagi pembangunan yang diselesaikan tepat waktu	Program Penatagunaan Tanah	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang termanfaatkan		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			dalam dalam pembangunan			
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah		
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Sekretariat DPRD
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N		
				Persentase penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM			Capaian Aksi HAM		
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan		Indeks Kerukunan Umat Beragama		Unsur Pemerintahan Umum

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat				
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan		Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan		Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Program Pembinaan Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		

3.5 Program Nasional yang Disinergikan

3.5.1 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

Pembangunan Desa melalui konteks perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya. Keterpaduan ini diharapkan mendorong upaya pembangunan dan pelayanan Desa yang lebih cepat serta mendorong pemberdayaan masyarakat Desa. Konteks pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 84 ayat 1 ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan Desa dan kawasan perdesaan perlu dilakukan melalui kolaborasi pentahelix. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun kolaborasi peran para pihak, sehingga tercipta sinergisme dalam pembangunan kawasan perdesaan. Koordinasi dan sinergi perlu dilakukan untuk menghasilkan strategi percepatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan menjadi lebih baik, termasuk sinkronisasi kebijakan dan program yang dilakukan secara terukur dan terarah untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Masyarakat perdesaan dengan harapan kesejahteraannya meningkat.

Melalui pendekatan kawasan, potensi desa dapat dioptimalkan secara bersamasama, sementara tantangan dan permasalahan dapat ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Kawasan perdesaan dibentuk berdasarkan prinsip kedekatan geografis dan keterkaitan sosioekonomi antar desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016. Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa kawasan perdesaan merupakan satuan wilayah perencanaan terpadu yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kabupaten atau kota, yang saling berbatasan dan memiliki keterkaitan.

Dalam konteks pembangunan wilayah di Kabupaten Serang, pendekatan pembangunan kawasan perdesaan menjadi strategi yang relevan dan mendesak untuk diterapkan, khususnya di Kecamatan Mancak. Tiga desa yang menjadi fokus utama dalam pembangunan kawasan perdesaan ini adalah Desa Cikedung, Desa Sangiang, dan Desa Ciwarna. Ketiganya memiliki karakteristik dan dinamika yang saling melengkapi, namun juga menghadapi tantangan yang beragam.

Melihat kondisi ketiga desa ini, pendekatan pembangunan berbasis kawasan menjadi sangat relevan. Melalui pendekatan ini, sinergi antar desa dapat dibangun untuk mengoptimalkan potensi, saling mengisi kekurangan, dan menyelesaikan permasalahan secara kolektif. Pembangunan kawasan perdesaan memungkinkan Desa Cikedung yang tertinggal dapat terdorong maju melalui dukungan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Desa Sangiang dan Ciwarna, dalam satu sistem perencanaan yang terpadu.

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial ekonomi, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Cikedung, Sangiang, dan Ciwarna, maka pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agro Mina Wisata Kecamatan Mancak dengan menggali potensi kawasan pertanian, perikanan, dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan, dapat membuka peluang baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Mancak.

3.5.2 Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sejak dicanangkannya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Serang pada tanggal 18 September 2017, Pemerintah daerah Kabupaten Serang berkomitmen untuk mengintegrasikan pembangunan berbasis hak anak secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan melibatkan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak. Komitmen tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak dan

perlindungan anak agar anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Implementasi KLA juga memastikan bahwa anak akan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan haknya. Hak anak yang harus dipenuhi terdiri dari hak sipil kebebasan, Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar & Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus.

Sebagai bentuk wujud keberhasilan pelaksanaan KLA di Kabupaten Serang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan kepada Kabupaten Serang atas pencapaian dalam pemenuhan hak anak yang pada Tahun 2025 mendapatkan predikat Madya selama 3 (tiga) kali berturut-turut. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras semua perangkat daerah dengan melibatkan peran dunia usaha, masyarakat dan juga media massa.

3.5.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pemerintah daerah Kabupaten Serang sejak tanggal 01 November 2017, beserta seluruh perangkat daerah berkomitmen untuk membangun kesamaan kondisi bagi laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan di Kabupaten Serang. Untuk terwujudnya perencanaan yang berspektif gender dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, penyelesaian masalah anggaran daerah yang responsive gender (PPRG), meningkatkan kesetaraan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan Perempuan.

Pengarusutamaan gender mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender di setiap tahapan dan tingkat kebijakan, program dan kegiatan. Dalam implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Serang, kesenjangan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan masih terlihat jelas. Meskipun jumlah perempuan di Kabupaten Serang mencapai hampir separuh dari total penduduk, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis—baik di pemerintahan desa, BPD, maupun lembaga pengawasan sosial—masih sangat terbatas.

Analisis gender sangat penting untuk pengarusutamaan perspektif gender melalui tahap perencanaan dan berfungsi untuk menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merespon berbagai kebutuhan Perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi pijakan utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Serang Bahagia. Tantangan besar masih membayangi dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (PUGIS) sehingga menciptakan kesenjangan partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat di berbagai sektor kehidupan.

Sebagai bentuk wujud keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Serang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan kepada Kabupaten Serang atas pencapaiannya dalam Pengarusutamaan Gender melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang mendapatkan predikat Madya selama 4 (Empat) kali berturut-turut. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras semua perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Serang

3.5.4 Kabupaten Serang Sehat

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Konsep

Kota Sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan yang lebih ditekankan kepada suatu pendekatan kondisi sehat dan problem sakit saja, tetapi kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani, sebagaimana tertuang dalam Indonesia telah mengimplementasikan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat sejak tahun 2005 dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang merupakan salah satu regulasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat juga menjadi salah satu indikator dalam RPJMN 2025 – 2029.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia mengutamakan peran dari Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat yang berasal dari satuan perangkat daerah terkait dengan capaian indikator indikator prioritas serta ketercapaian standar pelayanan minimal yang harus tercapai dan Forum Kabupaten/Kota Sehat di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa yang berasal dari tokoh agama dan masyarakat dan lembaga lainnya yang diharapkan menjadi suatu fasilitator dan wadah untuk menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya untuk mewujudkan kabupaten/kota yang sehat untuk dihuni oleh warganya. Kedua tim tersebut berkolaborasi melaksanakan self assessment keberhasilan program KKS di kabupaten/kota masing-masing.

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang berproses dalam inisiasi penguatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat melalui Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. RPerpres tersebut akan mengatur diantaranya arah kerja yang bersinergi dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, kriteria keberhasilan dan diterjemahkan secara lanjut melalui indikator prioritas yang terhubung dari pusat sampai dengan daerah. Pelaksanaan selanjutnya diperkuat oleh peran pemerintah pusat dan daerah yang difasilitasi oleh tersedianya Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat dan peran masyarakat melalui Forum Kabupaten Kota Sehat.

Sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat yang juga dikenal dengan sebutan Penghargaan Swasti Saba dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali (tahun ganjil). Sejak diselenggarakan pada tahun 2005 hingga tahun 2023 tidak kurang dari 257 kabupaten/kota yang telah mendapatkan Penghargaan Swasti Saba yang terbagi dalam beberapa kategori. Penghargaan Swasti Saba dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan Penyelenggaraan KKS.

3.5.5 Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting (P3S)

Stunting merupakan kondisi naik di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggibadan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang -2 SD. Menurut Ruswati (2021) penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Serang tahun 2021-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya, baik itu hasil dari EPPGBM maupun SSGI. Namun ada kesenjangan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kemenkes dengan hasil elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.

Pada tahun 2023, pencapaian prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup bervariasi. Dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang

menempati peringkat 4 (empat) prevalensi tertinggi sebesar 23,9 dibawah Kota Serang sebesar 22,3. Masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Serang yang akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, maka upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Serang harus segera dilakukan dengan mengupayakan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan, melakukan pencegahan untuk tidak timbulnya kasus stunting baru, melakukan konvergensi, penyediaan pangan yang baik dan melakukan inovasi terbaru dan data yang tersedia dengan baik.

3.5.6 Program Makan Bergizi Gratis

Dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi angka stunting dan masalah gizi lainnya, meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM melalui pengadaan bahan makanan, mengurangi angka putus sekolah melalui peningkatan kesehatan dan gizi siswa.

Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (MGN) mengatur pelaksanaan program pemberian makanan bergizi gratis kepada sasaran prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-6 tahun, remaja putri, dan siswa sekolah (SD,SMP,SMA). Point penting didalam mekanisme penyaluran bahwa bantuan dapat disalurkan dalam bentuk uang/barang (makanan) melalui yayasan oleh mitra yang ditunjuk oleh BGN, program ini menyediakan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), dengan porsi sarapan dan makan siang yang disesuaikan, dan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis ini di biayai melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan.

3.5.7 Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah di tetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.2/290/SJ Tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang diturunkan ke dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam bentuk Surat Edaran Bupati Serang yang terbit pada tanggal 26 Maret 2025 dengan Nomor 100.3.4.2/2 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada Ulang Tahun di Kabupaten Serang.

Arah pembangunan kesehatan dalam Visi Misi Presiden Terpilih Tahun 2024-2029, dimana Visi nya adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” . dalam 8 misi Asta Cita pada misi No. 4 yang berbunyi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dalam 8 program hasil terbaik cepat (PHTC)/Quick Win bahwa menyelenggarakan pemeriksaan gratis menurunkan kasus TBC 50 % dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di Kabupaten, kemudian di dalam 17 program prioritas yang berbunyi bahwa menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) adalah adalah pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Tujuan utama PKG adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, mendeteksi dini berbagai penyakit untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih serius, mengurangi beban pelayanan kesehatan rujukan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Sasaran pemeriksaan kesehatan gratis yaitu bayi baru lahir hingga lansia, pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan sesuai siklus hidup dengan layanan yang berbeda untuk setiap kelompok, misal kan bayi baru lahir pemeriksaannya difokuskan pada deteksi dini kelainan bawaan, untuk anak usia sekolah pemeriksaan dilakukan skrining kesehatan sekolah pada setiap tahun ajaran baru, dan untuk dewasa dan lansia pemeriksaan dilakukan pada hari ulang tahun atau setelahnya.

Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia dan potensi masalah kesehatan terbanyak pada kelompok tersebut, seperti pemeriksaan dini gangguan pendengaran dan penglihatan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan Tuberculosis, pemeriksaan untuk mendeteksi talasemia dan diabetes melitus, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol dan pemeriksaan reproduksi.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan lainnya, pelaksanaan kesehatan gratis terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN), peserta akan menerima pengingat melalui notifikasi sebelum hari ulang tahun, Inovasi teknologi seperti Aplikasi SatuSehatMobile (SSM) dan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) digunakan untuk pencatatan dan pemantauan hasil pemeriksaan secara real time. Berikut target indikator Kementerian Kesehatan dalam Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Tabel 3.4. 5 Target Indikator PKG Kementerian Kesehatan

No	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk (%)	36	46	55	61	70
2	Presentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Gratis > 80% (%)	40	60	70	80	90
3	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir (%)	65	70	73	75	80
4	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan usia anak prasekolah (%)	50	55	60	65	70
5	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja (%)	20	35	45	60	70
6	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa (%)	35	45	56	60	70
7	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia (%)	50	55	60	65	70

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2025

Adapun target Pemeriksaan Kesehatan Gratis sesuai siklus hidup di Kabupaten Serang untuk tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4. 6 Target Pemeriksaan Kesehatan Gratis

No	Indikator	Target 2025	Jumlah Penduduk	Target Kabupaten Serang
1	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk (%)	36	1.791.795	645.047
2	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir (%)	65	16.571	10.771
3	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan usia anak prasekolah (%)	50	195.424	97.712
4	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja (%)	100	334.516	334.516
5	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa (%)	35	1.095.269	383.344
6	Presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia (%)	50	150.015	75.007

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2025



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam BAB IV Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030, yang akan menjadi tanggung jawab Kepala daerah periode Tahun 2030-2034. Program-program perangkat daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. 1
Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			791.759.641. 666		786.076.881.7 74		786.076.881.77 4		786.076.881.774		786.076.881.77 4		786.076.881.7 74	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,28	78,3		78,32		78,36		78,41		78,45		80		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	73.74	73.76		73.79		73.85		73.94		73.97		74,27		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rp.			360.078.465. 894		357.797.293.0 10		Rp355.827.182 .340		Rp355.797.182.3 40		Rp355.757.182. 340		Rp355.597.18 2.340	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1. Angka Partiipasi Sekolah usia 5-6 dalam PAUD	%	72,13	75,17		78,21		81,25		84,22		87,19		90,16		
	2. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar	%	98,92	99,15		99,38		99,6		99,83		100		100		
	3. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 dalam Pendidikan kesetaraan	%	36,88	41,85		46,83		51,81		56,78		61,76		66,74		
Meningkatnya kualitas hasil belajar Peserta Didik	4. Skor Kemampuan Literasi SD	%	51,96	54,46		56,96		59,46		61,96		64,46		66,96		
	5. Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60,7	61,8		62,9		64		65,1		66,2		67,3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6. Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46,9	49,8		52,7		55,6		58,5		61,4		64,3		
	7. Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56,63	58,13		59,63		61,13		62,63		64,13		65,63		
Meningkatnya Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	8. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	25,35	26,44		27,96		31,43		35,93		41,33		46,73		
Meningkatnya Jumlah Pendidik PAUD dengan kualifikasi S1/D4	9. Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	82,72	75,41		76,16		76,91		77,66		78,41		79,16		
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Inklusiv pada Satuan Pendidikan Dasar	10. Nilai Inklusivitas SD	%	54,95	57,45		59,95		62,45		64,95		67,45		69,95		
	11. Nilai Inklusivitas SMP	%	53,39	55,79		58,19		60,59		62,99		65,39		67,79		
Meningkatnya Keamanan di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12. Nilai Iklim Keamanan SD	%	70,25	71,15		72,05		72,95		73,85		74,75		75,65		
	13. Nilai Iklim Keamanan SMP	%	65,62	67,12		68,62		70,12		71,62		73,12		74,62		
Meningkatnya proses pembelajaran SD yang mendukung toleransi agama, budaya dan komitmen kebangsaan	14. Nilai Iklim Kebinekaan SD	%	67,28	68,28		69,28		70,28		71,28		72,28		73,28		
	15. Nilai Iklim Kebinekaan SMP	%	67,24	68,24		69,24		70,24		71,24		72,24		73,24		
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM		Rp.			434.468.300		161.896.530		545.957.000		545.957.000		545.957.000		545.957.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang	Persentase Satuan Pendidikan yang	%		100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kurikulum Pendidikan	Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal															
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rp.			20.049.962.000		4.156.000		71.040.000		71.040.000		71.040.000		71.040.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru PAUD	poin	0,2	0,19		0,18		0,17		0,16		0,15		0,14		
	2. Indeks Pemerataan Guru SD	poin	0,13	0,12		0,11		0,1		0,09		0,08		0,07		
	3. Indeks Pemerataan Guru SMP	poin	0,21	0,2		0,19		0,18		0,17		0,16		0,15		
	4. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD	%	32,15	33,29		34,43		35,57		36,96		39,49		49,79		
	5. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD	%	52,43	62,52		66,54		70,57		74,59		78,61		82,64		
	6. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP	%	37,85	60,45		88		100		100		100		100		
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Rp.					12.030.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGA									768.863.000		768.863.000		768.863.000		768.863.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N BAHASA DAN SASTRA																dan Kebudayaan
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			213.221.362. 567		201.906.669.8 95		201.906.669.89 5		201.906.669.895		201.906.669.89 5		201.906.669.8 95	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,3	76		77		78		79		80		80		DINKES
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,36	84		85		86		87		88		89		DINKES
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	%	95.92	100		100		100		100		100		100		DINKES
1.02.02 PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rp.			147.749.602. 075		118.143.614.4 02		117.393.614.40 2		117.393.614.402		117.393.614.40 2		118.143.614.4 02	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93,9	122		109		97		86		77		77		
	2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat	%	20,2	18.08		17,5		16,3		15,2		14,2		14,2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pendek) Pada Balita															
	3. Angka Kematian Balita (AKBa)	Per 1.000 KH	6	15		13,8		13,1		12,5		11,9		11,9		
	4. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	5,8	12,62		11,63		10,97		10,46		9,96		9,96		
	5. Cakupan Penemuan Tuberkulosis	%	75	90		90		90		90		90		98		
	6. Persentase pasien tuberkulosis sensitif obat yang memulai pengobatan	%	91	95		95		95		95		95		95		
	7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	90	90		90		90		90		90		90		
	8. Persentase Desa Stop BABS	%	55	59		65		73		81		88		100		
	9. Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	%	38	60		70		80		90		90		100		
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rp.			9.738.357.868		7.833.530.642		7.833.530.642		7.833.530.642		7.833.530.642		7.833.530.642	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Rp.			515.866.200		350.569.100		350.569.100		350.569.100		350.569.100		350.569.100	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Kualitas dan Sediaan Farmasi.	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi. Alat	%	98,3	80		80		80		80		80		80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan dan Makanan Minuman															
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rp.			359.950.500		57.258.300		57.258.300		57.258.300		57.258.300		57.258.300	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	82,6	75		75		75		80		80		85		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			321.364.975.017		303.862.685.780		303.862.685.780		303.862.685.780		303.862.685.780		303.862.685.780	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSDP)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,3	70		70,5		72,5		75		75		76		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,52	79		79,5		80		80,5		81		81,5		
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	%	99,97	89		90		90		90		90		90		
	Return Of Investment	%	4	6		7		7		7		7		7		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rp.			60.609.321.948		15.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		27.426.035.969	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSDP)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tercapainya Indikator Pelayanan Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	78	78		79		80		81		82		83		
	Length of stay (LOS)	Hari	4	4		4		3		3		3		3		
	Bed Turn Over (BTO)	Kali	68	45		45		45		50		50		50		
	Turn Over Interval (TOI)	Hari	1	2		2		1		1		1		1		
	Angka Kematian bersih (NDR)	Orang	8	<25		<25		<25		<25		<25		<25		
	Angka Kematian Kasar (GDR)	Orang	40	<45		<45		<45		<45		<45		<45		
	ERTR (Emergency Response Time Rate)	Menit	5	5		5		5		5		5		5		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			36.670.427.094		33.818.163.318		33.818.163.318		33.818.163.318		33.818.163.318		33.818.163.318	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		76		77		78		79		80		80		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		80		80		80		80		80		80		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rp.			5.507.193.940		2.778.698.000		2.778.698.000		2.778.698.000		2.778.698.000		2.778.698.000	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Perlindungan	%		10		25		45		65		85		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi	Kawasan Permukiman Rawan Banjir															
	2. Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	25	10		35		55		70		85		100		
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Rp.			19.386.020.116		2.282.307.562		2.282.307.562		2.282.307.562		2.282.307.562		2.282.307.562	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	73,66	75,13		76,63		78,16		79,69		81,28		82,91		
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Rp.			7.988.684.819		2.962.995.640		2.962.995.640		2.962.995.640		2.962.995.640		2.962.995.640	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	7,33	7,33		23,73		26,62		30,7		36,15		43,52		
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN		Rp.			3.765.384.181		1.430.358.071		1.430.358.071		1.430.358.071		1.430.358.071		1.430.358.071	PD Pengampu Urusan PUPR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N SISTEM AIR LIMBAH																
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	0,99	1,110		1,111		1,113		1,115		1,308		1,516		
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE		Rp.			3.874.792.54 3		2.445.106.338		2.445.106.338		2.445.106.338		2.445.106.338		2.445.106.338	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	58,08	6,6		13,2		19,9		26		33,2		40		
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rp.			19.397.927.1 62		5.893.569.100		3.500.000.000		20.145.408.966		35.126.892.405		58.500.000.00 0	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan dalam Kondisi Baik	%	78,57	82,45		84,21		85,96		87,72		89,47		91,23		
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A					1.941.322.52 8		4.517.761.900		4.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		14.000.000.00 0	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	21,05	26,32		36,84		47,37		57,89		68,42		78,95		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		Rp.			63.641.564.3 92		74.041.123.38 9		70.000.000.000		70.000.000.000		70.000.000.000		100.000.000.0 00	PD Pengampu Urusan PUPR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik	%		89.10.00		92		94.05.00		97		98.07.00		100		
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rp.			2.948.301.396		696.302.640		1.105.313.640		1.105.313.640		1.105.313.640		1.105.313.640	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%		80		100		100		100		100		100		
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAAN PENATAAN RUANG		Rp.			3.186.692.896		2.930.496.957		2.257.447.957		2.257.447.957		2.257.447.957		2.257.447.957	PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Penataaan Ruang	Tingkat Pemanfaatan Inforasi Tata Ruang Dalam Pembangunan	%	92	93		0,93		0,94		0,94		0,95		0,95		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			9.489.541.883		9.746.036.879		9.337.638.263		9.337.638.263		9.337.638.263		9.337.638.263	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,59	79		80		81		82		83		84		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,67	81,8		82		82,25		82,5		82,8		83		
1.04.02 PROGRAM		Rp.			732.876.400		108.552.000		148.237.952		148.237.952		148.237.952		148.237.952	PD Pengampu Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENGEMBANGA N PERUMAHAN																Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi/Kabupate n/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Rp.			5.690.976.78 7		1.084.933.100		1.999.914.760		1.999.914.760		1.999.914.760		1.999.914.760	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	3,92	5,52		7,11		9,78		12,44		15,1		16,69		
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Rp.			6.565.820.85 6		8.693.827.900		6.250.000.000		9.579.900.710		9.579.900.710		16.250.000.00 0	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7579	7363		7012		6495		5811		5127		4610		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Rp.			11.776.742.425		16.295.043.340		14.963.559.052		15.963.559.052		15.963.559.052		15.963.559.052	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dan sudah diserahterimakan dengan kondisi baik	%	61	62,72		64,44		66,16		67,88		69,6		71,32		
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Rp.			0		13.783.719		49.999.547		49.999.547		49.999.547		49.999.547	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	N/A	N/A		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			11.358.809.3 41		12.214.265.89 3		12.214.265.893		12.214.265.893		12.214.265.893		12.214.265.89 3	PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas (SATPOL PP)
		Rp.			10.470.259.3 35		10.163.834.23 6		10.163.834.236		10.163.834.236		10.163.834.236		10.163.834.23 6	PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas (BPBD)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,55	72,55		73		73,5		74		74,5		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	76,61		76,8		77		77,2		77,4		77,6		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61,95	70		70		70		80		80		80		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	80		80		80		80		80		80		
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			2.504.544.73 6		1.052.470.786		1.052.470.787		1.052.470.788		1.052.470.789		1.052.470.790	PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
terhadap Perda dan Perkada																
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	70	70		73		76		79		82		85		
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	38,89	40		45		50		55		60		65		
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.03 PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA		Rp.			3.069.490.40 6		2.178.097.344		2.178.097.344		2.178.097.344		2.178.097.345		2.178.097.346	PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	95	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	92	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Rp.			3.534.717.59 6		2.951.261.856		2.951.261.857		2.951.261.858		10.451.261.856		2.951.261.856	PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Edukasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	Na	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	96.67	100		100		100		100		100		100		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			7.611.326.383		7.127.223.972		7.127.223.972		7.127.223.972		7.127.223.972		7.121.652.148	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,22	74,7		74,95		75		75,7		75,85		76		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,82	75		76		76,5		77		77,5		78		
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Rp.			1.044.973.200		898.126.200		898.126.201		898.126.202		898.126.203		689.471.100	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	60	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	N/A	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Rp.			6.925.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.900.000	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	0	6		6		6		6		6		6		
	2. Perentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rp.			406.855.447		94.939.900		94.939.900		94.939.900		94.939.900		204.839.900	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		
	4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang	%	0	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya															
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		
	6.Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67		58,17		58,67		59,17		59,67		60,17		
	6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	N/A	38,42		42,64		46,86		51,08		55,3		55,3		
	7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	N/A	59,67		62,37		65,07		67,76		70,46		70,46		
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rp.			5.032.640.856		3.150.612.200		3.150.612.200		3.150.612.200		3.150.612.200		7.574.604.400	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	100	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100	100		100		100		100		100		100		
	6. Persentase Keluarga Miskin	%	10	10		10		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan															
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Rp.			932.795.575		668.428.000		668.428.000		668.428.000		668.428.000		713.618.000	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	94,68	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	100	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Rp.			64.627.050		35.075.000		35.075.000		35.075.000		35.075.000		36.275.000	PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makan Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			8.289.950.327		8.336.713.917		8.336.713.917		8.336.713.917		8.336.713.917		8.336.713.917	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,8	79,85		79,9		79,95		78		78,05		78,1		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,27	88,32		88,37		88,42		88,47		88,52		88,57		
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Rp.			95.866.250		130.900.000		130.900.000		130.900.000		130.900.000		130.900.000	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39	39		40		54		40		40		40		
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Rp.			884.861.956		2.114.195.900		2.114.195.900		2.114.195.900		2.114.195.900		2.114.195.900	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Rp.			452.233.984		665.453.500		665.453.500		665.453.500		665.453.500		665.453.500	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Peningkatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	48,56	50		51		52		53		54		55		
2.07.05 PROGRAM		Rp.			204.382.300		198.037.465		198.037.465		198.037.465		198.037.465		198.037.465	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
HUBUNGAN INDUSTRIAL																
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Perusahaa n	425	427		429		431		433		435		437		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			9.565.260.83 8		10.583.139.28 4		10.583.139.284		10.583.139.284		10.583.139.284		10.583.139.28 4	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	71		71,3		71,8		72,3		72,8		73,3		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80		80		80		80		80		80		
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN		Rp.			195.752.950		485.999.472		485.999.472		485.999.472		485.999.472		485.999.472	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraa n PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	2,43	3		3		3		3		3		3		
	2. Tingkat Partisipasi	%	51,86	52,62		53,39		54,18		54,97		55,78		56,61		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan															
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp.			225.639.975		118.560.000		118.560.000		118.560.000		118.560.000		118.560.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	65	70		75		80		85		90		95		
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rp.			19.301.325		49.999.984		49.999.984		49.999.984		49.999.984		49.999.984	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	75	75		77,25		79,56		81,9		84,3		86,8		
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Rp.			2.820.750		11.999.763		11.999.763		11.999.763		11.999.763		11.999.763	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	%	30	30		30		30		30		30		30		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan															
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Rp.			654.903.100		26.455.000		26.455.000		26.455.000		26.455.000		26.455.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	62,13	58		58,5		59		59,5		60		60,5		
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp.			618.870.460		627.509.122		627.509.122		627.509.122		627.509.122		627.509.122	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	65	70		75		80		85		90		95		
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	82,41	75		75,5		76		76,5		77		77,5		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp.			29.288.037.090		14.620.370.717		14.620.370.717		14.620.370.717		14.620.370.717		14.620.370.717	PD Pengampu Urusan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,36	65,5		66		67		68		69		71,2		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,42	83,42		83,5		83,65		83,75		83,8		84		
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Rp.			713.366.631		489.402.160		489.402.160		489.402.160		489.402.160		489.402.160	PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur lumbung pangan	%	83	33		44		67		78		89		100		
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Rp.			272.266.000		325.205.000		325.205.000		325.205.000		325.205.000		325.205.000	PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	165,66	85		85		85		85		85		85		
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	93,3	79,5		80		80,1		80,2		80,3		80,4		
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,55	92,55		92,7		92,8		92,9		93		93,1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Rp.			44.410.000		32.600.000		32.600.000		32.600.000		32.600.000		32.600.000	PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	9,2	15,34		15,03		14,72		14,42		14,11		13,80		
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Rp.			125.135.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	98	95		95		95		95		95		95		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Rp.			414.400.000		199.214.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH		Rp.			284.325.000		0		0		0		0		0	PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Ketersediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan yang Diselesaikan Tepat Waktu	%		100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			13.719.387.4 00		19.390.982.80 8		19.390.982.808		19.390.982.808		19.390.982.808		19.390.982.80 8	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	75		78		80		85		90		95		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,4	90		90		90		100		100		100		
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp.			333.227.130		96.000.000		96.000.000		96.000.000		96.000.000		96.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	25		40		50		60		80		80		
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp.			903.013.641		839.793.480		839.793.480		839.793.480		839.793.480		839.793.480	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	51,25	56,75		56,8		56,85		56,9		57,25		57,37		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indeks Kualitas Udara	Angka	83,25	71,66		72,25		72,38		73,35		73,85		73,86		
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)		Rp.			885.230.432		264.270.043		264.270.043		264.270.043		264.270.043		264.270.043	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%		47,02		47,03		47,04		47,06		47,08		47,08		
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Rp.			50.000.000		56.800.000		56.800.000		56.800.000		56.800.000		56.800.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 terkelola	%	0,13	20		36		40		44		48		0,5		
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Rp.			177.747.350		65.165.000		65.165.000		65.165.000		65.165.000		65.165.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha	Ketaatan Penanggung Jawab	%	0,55	65,79		69,74		73,68		86,32		98,95		0,99		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Ligkungan, Izin PPLH, dan PUU LH															
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Rp.			83.334.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	%	50	55		62		76		78		80		80		
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Rp.			60.065.000		52.134.000		52.134.000		52.134.000		52.134.000		52.134.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	25		30		40		50		60		60		
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp.			134.084.500		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	0,64	100		100		100		100		100		100		
2.11.11 PROGRAM		Rp.			23.020.967.767		26.928.161.443		24.588.787.443		24.588.787.443		24.588.787.443		24.588.787.443	PD Pengampu Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENGLOLAAN PERSAMPAHAN																Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	25,97	27,85		29,72		31,59		33,47		35,34		37,21		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL																
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			20.055.264.0 00		18.125.657.59 5		18.125.657.595		18.125.657.595		18.125.657.595		18.125.657.59 5	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,85	81		82		83		84		85		85		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,99	81		82		83		84		85		85		
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rp.		37,5	41.960.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	4,21	5		7		9		11		13		15		
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas	%	63,46	70		75		80		85		90		95		
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rp.		99,75	26.442.800		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependuduka

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																n dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	95,5	99		99		99		99		99		99		
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100		
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N		Rp.		100	132.237.000		72.735.600		72.735.600		72.735.600		72.735.600		72.735.600	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKA N		Rp.		100	28.620.000		7.929.000		7.929.000		7.929.000		7.929.000		7.929.000	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			8.111.347.17 4		8.365.201.363		8.365.201.363		8.365.201.363		8.365.201.363		8.365.201.363	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,95	74,85		76,35		76,95		80,15		80,9		81,8		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	85		86		86		87		87		88		
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		Rp.			159.284.080		24.200.000		24.200.001		24.200.002		24.200.003		24.200.004	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	0	100		100		100		100		100		100		
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Rp.			83.738.100		35.165.000		35.165.000		35.165.000		35.165.000		35.165.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Efektifitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	0	100		100		100		100		100		100		
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Rp.			8.027.265.53 2		7.231.191.600		7.231.191.600		7.231.191.600		7.231.191.600		7.231.191.600	PD Pengampu Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	51	17		15		15		15		15		15		
	2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	0	8		18		18		18		18		18		
2.13.05 PROGRAM		Rp.			11.656.466.1 08		11.825.537.00 0		11.825.537.000		11.825.537.000		11.825.537.000		11.825.537.00 0	PD Pengampu Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Umum Adat dalam Pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	0	16,56		16,56		16,56		16,56		16,56		17,18		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Rp.			767.836.750		473.735.850		473.735.850		473.735.850		473.735.850		473.735.850	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	2,1	2,08		2,1		2,1		2		2		2		
	2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	%	18	17,90		17,80		17,69		17,59		17,49		17,39		
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rp.			11.981.525.4 81		5.274.487.048		5.274.487.048		5.274.487.048		5.274.487.048		5.274.487.048	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta	1.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern	%	70,66	71,16		71,66		72,16		72,66		73,16		73,66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Contraceptive (mCPR)															
	2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,03	10,96		10,89		10,82		10,75		10,68		10,61		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Rp.			8.565.265.000		8.335.000.000		8.335.000.001		8.335.000.002		8.335.000.003		8.335.000.004	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	84,84	84,86		84,88		84,9		84,92		84,94		84,96		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			14.052.786.171		14.424.634.402		14.424.634.402		14.424.634.402		14.424.634.402		14.424.634.402	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SaKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	76		78		80		81		82		83		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	89	90		91		92		93		94		95		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU		Rp.			27.964.186.135		26.064.883.169		26.064.883.169		26.064.883.169		26.064.883.169		26.064.883.169	PD Pengampu Urusan Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	1. Konektivitas Darat	%	37,5	37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	37	38		39		44		48		53		58		
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Rp.			1.339.440.160		995.065.944		995.065.944		995.065.944		995.065.944		995.065.944	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	%	75	75		75		75		75		75		75		
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		Rp.			13.705.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	%	25	25		50		50		50		50		50		
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIA N		Rp.			2.106.446.400		2.050.274.496		2.050.274.496		2.050.274.496		2.050.274.496		2.050.274.496	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta API	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	88	88		100		100		100		100		100		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DAN INFORMATIKA																
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			9.717.262.07 4		8.046.484.426		8.046.484.426		8.046.484.426		8.046.484.426		8.046.484.426	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,8	78,81		78,83		78,85		78,87		80,01		80,03		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,69	81,8		82		82,25		82,5		82,75		83		
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp.			8.198.974.18 0		3.369.940.904		3.369.940.904		3.369.940.904		3.369.940.904		3.369.940.904	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	N/A	71,5		73,2		75,01		77,3		78,3		85,7		
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Rp.			5.246.636.01 4		2.487.282.404		2.487.282.404		2.487.282.404		2.487.282.404		2.487.282.404	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Angka	3,73	3,75												
	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai				1,2		1,2		1,3		1,3		1,4		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			11.883.789.9 11		12.093.602.64 5		12.093.602.645		12.093.602.645		12.093.602.645		12.093.602.64 5	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,65	79,65		79,7		79,7		79,8		79,8		79,8		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81		82		83		84		85		85		
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Rp.			126.043.500		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	25,31	25,31		25,5		25,6		25,75		25,8		25,8		
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Rp.			150.610.000		66.299.744		66.299.744		66.299.744		66.299.744		66.299.744	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	7,34	10		10		10		10		10		10		
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Rp.			41.090.000		12.705.200		12.705.200		12.705.200		12.705.200		12.705.200	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	76,37	77		78		78		78		79		80		
2.17.05 PROGRAM		Rp.			1.045.255.50 0		53.792.000		53.792.000		53.792.000		53.792.000		53.792.000	PD Pengampu Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N																Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	14,39	14,5		14,6		14,75		14,85		15		15		
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Rp.			54.000.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	11,51	11,6		11,7		11,8		11,9		12		12		
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rp.			1.900.569.524		199.962.313		199.962.313		199.962.313		199.962.313		199.962.313	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase Usaha Mikro yang bertranformasi dari informal ke formal	%	51,02	51		52		52		53		53		53		
	2. Pertumbuhan Wirausaha	%	2,8	3		3		3		3		3		3		
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM		Rp.			277.240.200		1.521.721.372		1.521.721.372		1.521.721.372		1.521.721.372		1.521.721.372	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan	%	1	1		1		1		1		1		5		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENANAMAN MODAL																
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			13.865.132.583		13.165.724.273		13.165.724.273		13.165.724.273		13.165.724.273		13.165.724.273	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,5	82,5		83,5		84,5		85,5		86,5		87,5		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,44	89,46		90,36		91,1		91,72		92,29		92,86		
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL		Rp.			379.314.375		157.994.400		157.994.400		157.994.400		157.994.400		157.994.400	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi															
	1. PMA	Rp (Trilyun)	12,42	12,79		13,18		13,57		13,98		14,40		14,83		
	2. PMDN	Rp (Trilyun)	6,53	8,26		8,53		8,79		9,05		9,32		9,60		
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rp.			70.750.000		134.704.000		134.704.001		134.704.002		134.704.003		134.704.004	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	91,51	65,64		67,61		69,64		71,73		73,88		76,10		
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rp.			127.805.000		84.957.000		84.957.000		84.957.000		84.957.000		84.957.000	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang	%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Berusaha Berbasis Resiko	Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan															
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rp.			281.534.200		125.844.100		125.844.100		125.844.100		125.844.100		125.844.100	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Rp.			193.939.875		182.601.000		182.601.000		182.601.000		182.601.000		182.601.000	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			6.350.499.323		5.956.141.299		5.956.141.299		5.956.141.299		5.956.141.299		5.956.141.299	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	49,32	52		61		65		70		72		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	75,00		76,20		77,80		79,50		81,00		83,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kelola Perangkat Daerah																
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Rp.			546.553.000		316.605.000		316.605.001		316.605.002		316.605.003		316.605.004	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	34,31	38,03		39,36		40,69		42,02		43,35		44,68		
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N		Rp.			6.397.562.800		5.451.116.334		4.678.439.048		4.678.439.048		4.678.439.048		4.678.439.048	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	37,49	44,08		52,72		61,36		70,01		91,36		100		
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Rp.			250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	99,57	99,64		99,71		99,78		99,86		99,93		100		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL		Rp.			524.187.936		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	PD Pengampu Urusan Statistik
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penvelenggaraa	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Point	2,55	2,6		2,65		2,69		2,72		2,74		2,75		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
n Sistem Statistik Nasional (SSN)																
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Rp.			287.471.904		240.401.904		240.401.904		240.401.904		240.401.904		240.401.904	PD Pengampu Urusan Persandian
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	395	497		597		697		772		829		832		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN		Rp.			707.270.000		706.371.300		960.000.000		970.000.000		980.000.000		980.000.000	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	55,75	56		56,25		56,5		56,75		57		57,25		
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL		Rp.			74.162.000		109.370.700		230.000.000		250.000.000		280.000.000		290.000.000	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	60,87	65,22		69,57		73,91		78,26		82,61		86,96		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Rp.			21.459.600		35.063.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		265.000.000	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	15,68	16,94		33,88		50,19		66,5		82,81		100		
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Rp.			281.020.000		341.861.800		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	39,47	39,47		42,11		44,74		47,37		50		52,63		
	2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan	%	9,97	9,97		11,29		12,6		13,91		15,22		16,54		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			9.649.013.521		7.677.443.538		7.677.443.538		7.677.443.538		7.677.443.538		7.677.443.538	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	75,15		75,50		78,10		80,35		85,20		90,15		
	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	82,27	82,45		85,10		87,15		88,20		89,50		90,10		
2.23.02 PROGRAM		Rp.			10.986.238.650		313.346.263		313.346.263		313.346.263		313.346.263		313.346.263	PD Pengampu Urusan Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Persentase	24,42	23,41		28,27		29,69		31,12		32,73		34,37		
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Rp.					16.573.752		16.573.752		16.573.752		16.573.752		16.573.752	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	0	0		60		65		70		75		80		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Rp.			259.276.560		146.300.700		146.300.700		146.300.700		146.300.700		146.300.700	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	49,98	50,23		50,48		50,73		50,80		51,23		52,23		
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		%			10.049.948		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	%	51,83	52,33		52,58		52,83		53,08		53,33		53,58		
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		%					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	PD Pengampu Urusan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100	100		100		100		100		100		100		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			9.607.178.748		10.546.381.734		10.546.381.734		10.546.381.734		10.546.381.734		10.546.381.734	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	29,14	41,8		45,2		50,2		55,2		60,1		62,1		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,60	81,80		82		83,60		85		86,60		88		
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Rp.			709.059.036		609.260.156		609.260.156		609.260.156		609.260.156		609.260.156	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	7226,67	7167,94		7261,04		7333,65		7406,98		7481,05		7556,05		
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Rp.			3.174.133.345		2.085.749.757		2.085.749.757		2.085.749.757		2.085.749.757		2.085.749.757	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	56434,24	57200,31		57530,25		58105,55		58686,6		59273,47		59866,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rp.			67.395.000		11.970.400		11.970.400		11.970.400		11.970.400		11.970.400	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di perairan Umum Daratan	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	%	19,38	23,13		30,42		34,55		38,24		42,43		46,44		
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Rp.			465.114.560		121.383.082		121.383.082		121.383.082		121.383.082		121.383.082	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Thn	42,53	43,15		43,58		43,97		44,12		44,53		44,96		
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rp.			1.131.659.800		421.559.505		421.559.505		421.559.505		421.559.505		421.559.505	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	30,35	13,98		14,89		14,99		15,07		15,5		15,6		
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rp.			689.028.500		279.182.400		279.182.400		279.182.400		279.182.400		279.182.400	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	n/a	14,29		14,29		25		30		30,77		35,29		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Rp.			14.580.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,82	5,63		7,32		9,58		12,68		16,9		22,54		
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Rp.			240.100.000		248.675.000		248.675.000		248.675.000		248.675.000		248.675.000	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	3,93	6,43		10		13,57		17,14		20,71		24,29		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN					1.764.905.09 6		5.853.734.871		5.853.734.871		5.853.734.871		5.853.734.871		5.853.734.871	PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan															
	- Produksi Padi	Ton	5874	2889		20		24		28		33		35		
	- Produksi Jagung	Ton	17	16		25		26		27		29		30		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Produksi Hortikultura															
	- Produksi Cabai Besar	Kuintal	-33.07	201.97		212,06		222,67		233,8		245,49		257,77		
	- Produksi Bawang Merah	Kuintal	118.92	25,79		680,94		749,04		823,94		906,34		996,97		
	- Produksi Buah- buahan	Kuintal	110,66	6,601.2 5		6931,3 1		7277,8 8		7641,7 7		8023,8 6		8425,0 5		
	Peningkatan Produksi Perkebunan															
	- Produksi Kelapa (Ton)	Ton	193,063.7 2	14,378. 10		15097		15851, 9		16644, 5		17476, 7		18350, 5		
	- Produksi Kopi (Ton)	Ton	-5,412.73	1,3		33		34,7		36,4		38,2		40,2		
	- Produksi Cengkeh (Ton)	Ton	-1,284.56	0,26		7,1		7,5		7,8		8,2		8,6		
	- Produksi Lada (Ton)	Ton	0	0		0,2		0,2		0,3		0,3		0,3		
	Peningkatan Populasi Komoditas Peternakan															
	- Populasi Sapi	Ekor	-1987	48		49		50		50		51		51		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN		Rp.			776.152.760		796.840.500		796.840.500		796.840.500		796.840.500		796.840.500	PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	28084. 29		32229, 36		32229, 36		32229, 36		32229, 36		32229, 36		
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Rp.			226.042.500		75.439.360		75.439.360		75.439.360		75.439.360		75.439.360	PD Pengampu Urusan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%		82.75		82,75		82,75		82,75		82,75		82,75		
	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veterinar)	%		52.63		57,89		63,16		68,42		73,68		84,21		
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN		Rp.			199.785.316		43.693.300		43.693.300		43.693.300		43.693.300		43.693.300	PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%		0,27		22,92		20,83		18,75		16,67		14,58		
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%		0,72		19,08		18,13		16,6		14,69		14,31		
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Rp.			0		18.245.200		18.245.201		18.245.202		18.245.203		18.245.204	PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya usaha pertanian yang terbina	Usaha Pertanian Terbina	Unit Usaha		10		10		10		10		10		10		
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Rp.			1.345.884.020		1.074.773.600		1.074.773.600		1.074.773.600		1.074.773.600		1.074.773.600	PD Pengampu Urusan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%		17		33		50		67		83		100		
	2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%		17		33		50		67		83		100		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Rp.			4.250.000		850.000		850.000		850.000		850.000		850.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase izin Usaha Perdagangan yang Difalisitasi	%		100		100		100		100		100		100		
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Rp.			954.020.744		30.822.600		30.822.600		30.822.600		30.822.600		30.822.600	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangann yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	85.71	85.71		85.71		92.85		92.85		92.85		92.85		
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Rp.			160.490.850		63.171.000		63.171.000		63.171.000		63.171.000		63.171.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Meningkatnva	Persentase Stabilitas Harga	%	100	100		100		100		100		1000		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting															
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR		Rp.			510.038.920		196.575.000		196.575.000		196.575.000		196.575.000		196.575.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	512	550		560		570		580		600		600		
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Rp.			136.744.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100		100		100		100		100		100		
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Rp.			196.169.340		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN		Rp.			958.720.032		823.880.000		823.880.000		823.880.000		823.880.000		823.880.000	PD Pengampu Urusan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEMBANGUNAN INDUSTRI																
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	3,77	3,77		3,77		3,75		3,78		3,75		3,75		
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Rp.			16.750.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Kualias Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	3,77	3,77		3,77		3,75		3,78		3,75		3,75		
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Rp.			19.188.200		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	100		100		100		100		100		100		
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGA N KAWASAN TRANSMIGRASI		Rp.			134.317.260		74.157.000		74.157.000		74.157.000		74.157.000		74.157.000	PD Pengampu Urusan Transmigrasi
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100		100		100		100		100		100		
4.01 SEKRETARIAT DAFRAH																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			66.140.675.5 41		60.242.278.10 0		60.242.278.100		60.242.278.100		60.242.278.100		63.808.047.14 0	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,30	75,40		75,50		78,10		80,35		85,20		90,15		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	84		85,5		86,5		88		89		90		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Tingkat Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Nilai		28		30		33		36		39		42		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,2		4,3		4,4		4,5		4,6		4,7		
Meningkatnya layanan pendukung urusan program penunjang	Tingkat capaian layanan urusan program penunjang	%		100		100		100		100		100		100		
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rp.			12.581.924.2 70		11.325.202.81 0		11.325.202.810		11.325.202.810		11.325.202.810		14.040.755.70 0	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,243	3		3.01		3,02		3,03		3,04		3,05		
Meningkatnya Kualitas fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen	8	10		13		17		22		26		30		
	Kerja Sama Dalam Negeri															
Meningkatnya Kualitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen		7		7		7		7		7		7		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen		9		9		9		9		9		9		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		4		4		4		4		4		4		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum	Nilai	4,08	98		98,2		98,4		98,6		98,8		99		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan pemerintah daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	49	65		66		67		68		69		70		
Meningkatnya layanan pendukung urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Tingkat capaian layanan urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		100		100		100		100		100		100		
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN		Rp.			3.437.854.355		1.505.341.600		1.505.341.600		1.505.341.600		1.505.341.600		2.805.489.411	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		5		5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		6		6		6		6		6		6		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		750		750		750		750		750		750		
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		750		750		750		750		750		750		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	Orang		50		50		50		50		50		50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa															
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		4		4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		4		4		4		4		4		4		
4.02 SEKRETARIAT DPRD																
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			62.857.155.7 98		69.129.547.80 5		69.129.547.805		69.129.547.805		69.129.547.805		69.690.399.66 0	SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		90		90		90		90		90		90		Setwan
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		88		88		88		88		88		88		Setwan
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Rp.			50.474.984.5 28		54.335.437.07 2		54.335.437.073		54.335.437.074		54.335.437.075		54.335.437.07 5	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100		100		100		100		100		100		DPRD
	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	2,59	100		100		100		100		100		100		DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	3,63	100		100		100		100		100		100		DPRD
5.01 PERENCANAAN																
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			12.668.891.603		12.276.164.080		12.276.164.080		12.276.164.080		12.276.164.080		12.276.164.080	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		79,55		80		80,25		80,5		80,75		81		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		77,62		78		78,5		79		79,5		80		
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Rp.			3.267.444.496		1.581.262.381		1.581.262.381		1.581.262.381		1.581.262.381		1.581.262.381	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		
	2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Rp.			1.338.414.01 4		720.090.929		720.090.929		720.090.929		720.090.929		720.090.929	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Renbang PPM
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Renbang PSDA
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang PPIK
5.02 KEUANGAN																
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			42.783.139.7 10		41.946.271.52 0		41.946.271.520		41.946.271.520		41.946.271.520		41.946.271.52 0	PD Pengampu Urusan Perencanaan (BPKAD)
		Rp.			61.416.537.5 42		52.438.969.50 6		52.438.969.506		52.438.969.506		52.438.969.506		52.438.969.50 6	PD Pengampu Urusan Perencanaan (Bapenda)
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78,15		78,30		78,45		78,55		78,70		78,85		BPKAD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,25	87,35		87, 50		88		88, 10		88,25		88 ,30		BPKAD
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80.60	80.65		80.68		80.70		80.75		80.78		80.80		BAPENDA
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.61	90.62		90.62		90.62		90.62		90.62		90.62		BAPENDA
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rp.			572.695.708. 050		531.553.702.7 65		531.553.702.76 5		531.553.702.765		531.553.702.76 5		531.553.702.7 65	PD Pengampu Urusan Perencanaan (BPKAD)
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30	30		30		30		30		30		30		
	2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	25	25		30		40		40		40		40		
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	90	90		90		90		90		90		90		
	2. Persentase Penurunan SILPA	%	5	5		5		5		6		6		6		
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Rp.			3.386.673.50 0		2.169.762.300		2.169.762.300		2.169.762.300		2.169.762.300		2.169.762.300	PD Pengampu Urusan Perencanaan (BPKAD)
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3	3		3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rp.			7.440.062.622		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700	PD Pengampu Urusan Perencanaan (Bapenda)
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	27,05	31,57		30,62		30,62		30,62		31,75		31,96		BAPENDA
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		BAPENDA
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	%	99,3	91		92		93		94		95		96		BAPENDA
5.03 KEPEGAWAIAN																
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			17.668.553.629		8.266.703.365		8.266.703.365		8.266.703.365		8.266.703.365		8.266.703.365	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		78		78		78		78		78		78		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		88		89		90		91		92		93		
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rp.			4.406.808.200		1.654.214.250		1.654.214.250		1.654.214.250		1.654.214.250		1.654.214.250	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%		7		8		8		8		8		8		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		5,7		5,7		5,7		5,8		5,8		5,8		
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%		95		95		95		95		95		95		
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%		95		95		95		95		95		95		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA		Rp.			2.820.654.000		1.242.487.400		1.242.487.400		1.242.487.400		1.242.487.400		1.242.487.400	PD Pengampu Urusan DIKLAT
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial an Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%		5		5		5		5		5		5		
Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%		95		95		95		95		95		95		
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%		6		6		6		6		6		6		
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%		20		20		20		20		20		20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N																
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH		Rp.			1.094.718.10 0		0		0		0		0		0	PD Pengampu Urusan LITBANG
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%		50												
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%		55												
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%		55												
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan	%		55												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Penerapan di Daerah															
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Rp.			0		824.579.000		824.579.000		824.579.000		824.579.000		824.579.000	PD Pengampu Urusan LITBANG
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%		n.a		61		67		73		81		89		
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%		n.a		61		67		73		81		89		
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%		n.a		61		67		73		81		89		
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%		n.a		50		51		52		53		54		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG		Rp.			23.834.872.026		26.267.352.028		26.267.352.028		26.267.352.028		26.267.352.028		26.267.352.028	INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA																
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81.25)	A (81,3 0)		A (81.35)		A (81,50)		A (82,00)		A (82,50)		A (83,00)		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,55	3,58		3,58		3,62		3,63		3,66		3,67		
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN		Rp.			1.644.948.00 0		2.546.155.000		2.546.155.001		2.546.155.002		2.546.155.003		2.546.155.004	INSPEKTORAT
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100		100		100		100		100		100		
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGA N DAN ASISTENSI		Rp.			668.832.300		616.687.000		616.687.000		616.687.000		616.687.000		616.687.000	INSPEKTORAT
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SKOR	3,204	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		3,5		
	2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	SKOR	3,10	3,15		3,20		3,25		3.30		3,35		3,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01 KECAMATAN																
1. KECAMATAN ANYAR																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.627.647.05 6		5.202.583.648		5.202.583.648		5.202.583.648		5.202.583.648		5.202.583.648	Kecamatan Anyar
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	80,10		80,20		80,30		80,35		85,20		90,15		Kecamatan Anyar
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	82		83		83		83		83		85		Kecamatan Anyar
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.181.504.14 4		517.033.600		517.033.600		517.033.600		517.033.600		517.033.600	Kecamatan Anyar
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Anyar
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			112.337.020		55.020.000		55.020.000		55.020.000		55.020.000		55.020.000	Kecamatan Anyar
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Anyar
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		Rp.			14.538.000		22.180.000		22.180.000		22.180.000		22.180.000		22.180.000	Kecamatan Anyar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DAN KETERTIBAN UMUM																
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Anyar
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			179.955.000		179.790.000		179.790.000		179.790.000		179.790.000		179.790.000	Kecamatan Anyar
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Anyar
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			55.873.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Anyar
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Anyar
2. KECAMATAN BANDUNG																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.109.678.912		3.126.334.760		3.126.334.760		3.126.334.760		3.126.334.760		3.126.334.760	
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,95	72		72		72		73		73		75		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	82		83		83		83		83		85		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			69.527.000		55.483.000		55.483.000		55.483.000		55.483.000		55.483.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	76,57	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			61.247.000		63.840.000		63.840.000		63.840.000		63.840.000		63.840.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	89,38	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	0	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN		Rp.			51.269.000		198.981.000		198.981.000		198.981.000		198.981.000		198.981.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEMERINTAHAN UMUM																
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	92,17	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			11.400.000		11.400.000		11.400.001		11.400.002		11.400.003		11.400.004	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	93,89	100		100		100		100		100		100		
3. KECAMATAN BAROS																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.297.735.340		3.548.664.928		3.548.664.928		3.548.664.928		3.548.664.928		3.548.664.928	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	59,5	65		68		70		71		72		73		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	81		81		82		82		83		83		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			868.670.416		544.302.800		544.302.800		544.302.800		544.302.800		544.302.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	77,31	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			101.639.000		50.281.500		50.281.500		50.281.500		50.281.500		50.281.500	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	97,81	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			9.823.000		16.352.600		16.352.600		16.352.600		16.352.600		16.352.600	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	99,67	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			175.228.000		189.426.900		189.426.900		189.426.900		189.426.900		189.426.900	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	97,51	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			77.688.000		35.652.600		35.652.600		35.652.600		35.652.600		35.652.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	55,69	100		100		100		100		100		100		
4. KECAMATAN BINUANG																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			2.854.688.992		2.999.506.136		2.999.506.136		2.999.506.136		2.999.506.136		2.999.506.136	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,75	70		71		71		72		73		73		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,35	81		81		82		82		83		83		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			67.629.200		130.740.800		130.740.800		130.740.800		130.740.800		130.740.800	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	43,11	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			51.664.400		83.677.200		83.677.200		83.677.200		83.677.200		83.677.200	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	46,47	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			29.942.000		17.479.200		17.479.200		17.479.200		17.479.200		17.479.200	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	43,07	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			50.983.000		208.638.200		208.638.200		208.638.200		208.638.200		208.638.200	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	72,87	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			71.961.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	27,77	100		100		100		100		100		100		
5. KECAMATAN BOJONEGARA																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp.			3.098.978.86 6		3.372.038.104		3.372.038.104		3.372.038.104		3.372.038.104		3.372.038.104	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,9	71		71		71		71		71		71		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	72.73	88		88		88		88		88		88		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			100.605.800		95.556.800		95.556.800		95.556.800		95.556.800		95.556.800	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	3,38	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			21.510.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	73.72	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			17.876.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	60.71	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			28.002.000		131.167.000		131.167.000		131.167.000		131.167.000		131.167.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	3,91	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			24.701.000		23.400.000		23.400.000		23.400.000		23.400.000		23.400.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	3,8	100		100		100		100		100		100		
6. KECAMATAN CARENANG																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			2.782.967.86 4		3.068.894.295		3.068.894.295		3.068.894.295		3.068.894.295		3.068.894.295	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,75	72		75		75		75		75		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	83		83		83		85		85		85		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN		Rp.			67.804.000		74.122.369		74.122.369		74.122.369		74.122.369		74.122.369	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	87,94	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			16.779.000		39.220.000		39.220.000		39.220.000		39.220.000		39.220.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	73,37	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			0		9.310.000		9.310.000		9.310.000		9.310.000		9.310.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	98,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			95.875.000		180.210.000		180.210.000		180.210.000		180.210.000		180.210.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaa n Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	85,73	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN		Rp.			20.400.000		30.240.000		30.240.000		30.240.000		30.240.000		30.240.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	81,12	100		100		100		100		100		100		
7. KECAMATAN CIKANDE																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.665.533.80 0		3.814.621.368		3.814.621.368		3.814.621.368		3.814.621.368		3.814.621.368	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,4	75		76		77		78		79		80		Kec. Cikande
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,23	80		81		82		83		84		85		Kec. Cikande
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.327.509.72 8		795.542.672		795.542.672		795.542.672		795.542.672		795.542.672	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	78,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			38.330.500		66.052.000		66.052.000		66.052.000		66.052.000		66.052.000	
Meningkatnya Keterampilan	Persentase Masvarakat vang	%	86,69	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat															
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			3.490.000		11.226.000		11.226.000		11.226.000		11.226.000		11.226.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	90,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			62.430.000		149.543.000		149.543.000		149.543.000		149.543.000		149.543.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	89,7	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			32.070.000		30.852.000		30.852.000		30.852.000		30.852.000		30.852.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	99,07	100		100		100		100		100		100		
8. KECAMATAN CIKEUSAL																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG		Rp.			2.904.253.308		3.002.888.408		3.002.888.408		3.002.888.408		3.002.888.408		3.002.888.408	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA																
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	59,5	65		68		70		73		75		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	91		91		92		92		92		95		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			77.445.000		56.649.000		56.649.000		56.649.000		56.649.000		56.649.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	81,88	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			57.817.500		55.080.000		55.080.000		55.080.000		55.080.000		55.080.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	93,67	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			4.930.000		10.880.000		10.880.000		10.880.000		10.880.000		10.880.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat	99,39	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Umum di Tingkat Kecamatan	Kecamatan yang Dikoordinasikan															
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			139.272.000		188.433.400		188.433.400		188.433.400		188.433.400		188.433.400	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	93,18	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			14.450.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	84,9	100	100		100		100		100		100		100		
9. KECAMATAN CINANGKA																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.504.215.051		3.386.195.612		3.386.195.612		3.386.195.612		3.386.195.612		3.386.195.612	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,25	66,25		85		85		85		85		90		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,1	3,1		3,1		3,1		3,1		3,1		3,5		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR		Rp.			1.137.173.480		797.326.860		797.326.860		797.326.860		797.326.860		797.326.860	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	76,18	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			59.714.000		57.686.100		57.686.100		57.686.100		57.686.100		57.686.100	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	79,07	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			0		8.222.000		8.222.000		8.222.000		8.222.000		8.222.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	69,26	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			101.453.000		212.540.000		212.540.000		212.540.000		212.540.000		212.540.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	84,65	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			64.493.000		38.344.000		38.344.000		38.344.000		38.344.000		38.344.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	81,41	100		100		100		100		100		100		
10. KECAMATAN CIOMAS																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.174.832.30 4		3.117.679.912		3.117.679.912		3.117.679.912		3.117.679.912		3.117.679.912	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,25	65		70		75		80		85		90		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	81		82		83		84		85		85		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			913.716.328		777.160.176		777.160.176		777.160.176		777.160.176		777.160.176	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	86,62	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT		Rp.			57.234.000		39.860.000		39.860.000		39.860.000		39.860.000		39.860.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	85,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			53.076.000		21.520.000		21.520.000		21.520.000		21.520.000		21.520.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	87,29	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			84.804.000		148.336.000		148.336.000		148.336.000		148.336.000		148.336.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	81,43	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			77.900.000		35.700.000		35.700.000		35.700.000		35.700.000		35.700.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	84,96	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11. KECAMATAN CIRUAS																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			4.281.574.09 2		4.995.999.796		4.995.999.796		4.995.999.796		4.995.999.796		4.995.999.796	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	54,7	65		70		70		71		73		73		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,25	80		80		81		81		81		81		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.249.636.13 6		679.596.504		679.596.504		679.596.504		679.596.504		679.596.504	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	98	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			86.465.000		59.891.000		59.891.000		59.891.000		59.891.000		59.891.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	85	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			17.693.000		11.474.000		11.474.000		11.474.000		11.474.000		11.474.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	92	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			66.529.900		142.559.500		142.559.500		142.559.500		142.559.500		142.559.500	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	91	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			48.570.000		43.800.000		43.800.000		43.800.000		43.800.000		43.800.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	73	100		100		100		100		100		100		
12. KECAMATAN GUNUNGSARI																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			2.961.301.538		3.203.150.760		3.203.150.760		3.203.150.760		3.203.150.760		3.203.150.760	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatkan Kualitas Tata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	75		80		81		83		87		90		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	80		85		90		90		90		90		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kelola Perangkat Daerah																
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			61.890.000		70.863.000		70.863.000		70.863.000		70.863.000		70.863.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	84,62	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			36.630.000		27.189.000		27.189.000		27.189.000		27.189.000		27.189.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	46,7	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			8.504.000		11.733.000		11.733.000		11.733.000		11.733.000		11.733.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	0	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			66.061.200		147.214.000		147.214.000		147.214.000		147.214.000		147.214.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	90,29	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			31.004.500		43.250.000		43.250.000		43.250.000		43.250.000		43.250.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	37,31	100		100		100		100		100		100		
13. KECAMATAN LEBAKWANGI																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.013.956.352		3.308.469.712		3.308.469.712		3.308.469.712		3.308.469.712		3.308.469.712	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	46,65	51,65		56,65		61,65		66,65		66,65		66,65		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	61,55	63,55		66,55		69,55		71,55		73,55		73,55		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			30.800.000		37.830.000		37.830.000		37.830.000		37.830.000		37.830.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	75,55	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			60.885.000		34.275.000		34.275.000		34.275.000		34.275.000		34.275.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	75,55	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			6.535.000		10.425.000		10.425.000		10.425.000		10.425.000		10.425.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	80,65	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			55.066.000		131.790.000		131.790.000		131.790.000		131.790.000		131.790.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	80,55	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			18.800.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penvelesaian	%	70,5	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Permasalahan Daerah															
14. KECAMATAN JAWILAN																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			2.861.822.859		3.353.826.555		3.353.826.555		3.353.826.555		3.353.826.555		3.353.826.555	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,4	75		76		77		78		79		80		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,23	80		81		82		83		84		85		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			51.838.000		70.060.000		70.060.000		70.060.000		70.060.000		70.060.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	78,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			38.597.000		36.420.000		36.420.001		36.420.002		36.420.003		36.420.004	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	86,69	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		Rp.			0		5.000.000		5.000.001		5.000.002		5.000.003		5.000.004	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DAN KETERTIBAN UMUM																
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	90,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			58.544.700		138.903.000		138.903.000		138.903.000		138.903.000		138.903.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	89,7	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			43.264.000		19.845.000		19.845.000		19.845.000		19.845.000		19.845.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	99,07	100		100		100		100		100		100		
15. KECAMATAN KIBIN																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			4.007.743.475		4.690.404.560		4.690.404.560		4.690.404.560		4.690.404.560		4.690.404.560	
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,75	70		70		71		72		73		73		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,35	81		81		82		82		83		83		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.365.373.416		530.020.000		530.020.000		530.020.000		530.020.000		530.020.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	43,11	100		71		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			61.658.900		27.672.000		27.672.000		27.672.000		27.672.000		27.672.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	46,47	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			94.314.800		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	43,07	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN		Rp.			103.257.100		110.586.200		110.586.200		110.586.200		110.586.200		110.586.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEMERINTAHAN UMUM																
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	72,87	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			136.144.050		23.880.000		23.880.000		23.880.000		23.880.000		23.880.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	27,77	100		100		100		100		100		100		
16. KECAMATAN KOPO																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.428.803.883		3.370.522.520		3.370.522.520		3.370.522.520		3.370.522.520		3.208.733.208	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,7	72,2		72,7		72,7		72,9		72,9		72,9		Kecamatan Kopo
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,45	80,75		80,85		81,25		81,45		81,75		82		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			57.918.000		69.035.000		69.035.000		69.035.000		69.035.000		69.035.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	85,5	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			56.485.200		78.651.200		78.651.200		78.651.200		78.651.200		78.651.200	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	87,54	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			0		40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	95,67	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			54.753.000		159.164.200		159.164.200		159.164.200		159.164.200		159.164.200	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	95,27	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			19.125.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	77,61	100		100		100		100		100		100		
17. KECAMATAN KRAGILAN																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			4.491.184.18 6		5.119.575.800		5.119.575.800		5.119.575.800		5.119.575.800		5.119.575.800	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	52,55	75		75		75		75		75		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		79		80		80		80		80		80		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.403.016.75 4		768.153.104		768.153.104		768.153.104		768.153.104		768.153.104	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			52.941.400		52.512.800		52.512.800		52.512.800		52.512.800		52.512.800	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			9.336.900		9.168.400		9.168.400		9.168.400		9.168.400		9.168.400	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			31.892.700		127.068.600		127.068.600		127.068.600		127.068.600		127.068.600	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			31.032.356		35.400.000		35.400.000		35.400.000		35.400.000		35.400.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
18. KECAMATAN KRAMATWATU																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp.			5.044.819.057		5.246.127.136		5.246.127.136		5.246.127.136		5.246.127.136		5.246.127.136	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,3	70		71		71		72		73		73		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,85	81		81		82		82		82		83		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.253.683.328		799.403.600		799.403.600		799.403.600		799.403.600		799.403.600	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	97,42	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			126.701.000		49.365.200		49.365.200		49.365.200		49.365.200		49.365.200	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	88,34	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			7.282.000		7.126.300		7.126.300		7.126.300		7.126.300		7.126.300	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	99,67	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			19.396.000		146.338.000		146.338.000		146.338.000		146.338.000		146.338.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	96,27	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			31.746.000		32.958.900		32.958.900		32.958.900		32.958.900		32.958.900	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	76,61	100		100		100		100		100		100		
19. KECAMATAN MANCAK																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.260.213.79 2		3.368.247.916		3.368.247.916		3.368.247.916		3.368.247.916		3.368.247.916	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,77	71		71		75		75		75		81		KEC. MANCAK
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	73,06	75		75		80		80		85		85		KEC. MANCAK
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN		Rp.			30.457.000		83.298.700		83.298.700		83.298.700		83.298.700		83.298.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	53,46	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					47.691.500		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	63,55	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			0		8.445.000		8.445.000		8.445.000		8.445.000		8.445.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	0	0		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			77.674.000		64.335.000		64.335.000		64.335.000		64.335.000		64.335.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	62,62	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN		Rp.			17.162.000		18.445.000		18.445.000		18.445.000		18.445.000		18.445.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	90,33	100		100		100		100		100		100		
20. KECAMATAN PABUARAN																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			2.806.823.76 5		3.542.047.656		3.542.047.656		3.542.047.656		3.542.047.656		3.542.047.656	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,05	80		80		80		80		80		80		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	75		75		75		75		75		75		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			1.019.427.53 6		411.836.000		411.836.000		411.836.000		411.836.000		411.836.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			91.679.000		52.845.000		52.845.000		52.845.000		52.845.000		52.845.000	
Meningkatnya Keterampilan	Persentase Masyarakat yang	%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat															
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			7.848.000		5.145.000		5.145.000		5.145.000		5.145.000		5.145.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			95.390.000		175.858.000		175.858.000		175.858.000		175.858.000		175.858.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			76.792.000		31.435.000		31.435.000		31.435.000		31.435.000		31.435.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
21. KECAMATAN PADARINCANG																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG		Rp.	4.352.094. 000		2.590.844.49 4		2.937.595.588		2.937.595.588		2.937.595.588		2.937.595.588		2.937.595.588	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA																
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,26	70		70		75		80		85		90		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	81		82		83		84		85		86		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.	49.935.90 0		919.882.365		375.126.500		375.126.500		375.126.500		375.126.500		375.126.500	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	54,08	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.	27.554.00 0		62.016.500		136.510.000		136.510.000		136.510.000		136.510.000		136.510.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	80,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.	10.000.00 0		5.076.000		12.265.000		12.265.000		12.265.000		12.265.000		12.265.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat	%	48,76	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Umum di Tingkat Kecamatan	Kecamatan yang Dikoordinasikan															
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	100.000.000		38.197.000		174.356.000		174.356.000		174.356.000		174.356.000		174.356.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	81,72	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.	34.700.000		70.366.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	74	100		100		100		100		100		100		
22. KECAMATAN PAMARAYAN																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			2.993.349.155		3.388.200.060		3.388.200.060		3.388.200.060		3.388.200.060		3.388.200.060	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,4	75		76		77		78		79		80		KEC. PAMARAYAN
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,23	80		81		82		83		84		85		KEC. PAMARAYAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR		Rp.			74.854.000		74.021.700		74.021.700		74.021.700		74.021.700		74.021.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	78,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			48.976.000		48.600.000		48.600.000		48.600.000		48.600.000		48.600.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	86,69	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			5.740.000		8.900.000		8.900.000		8.900.000		8.900.000		8.900.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	90,85	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			52.570.000		160.340.000		160.340.000		160.340.000		160.340.000		160.340.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	89,7	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			24.880.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	99,07	100		100		100		100		100		100		
23. KECAMATAN PETIR																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.242.348.360		3.294.782.062		3.294.782.062		3.294.782.062		3.294.782.062		3.294.782.062	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,13	71		73		73		74		74		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	89,5		89,5		89,5		91		91		91		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			71.043.400		137.271.650		137.271.650		137.271.650		137.271.650		137.271.650	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	75	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT		Rp.			29.955.400		53.710.600		53.710.600		53.710.600		53.710.600		53.710.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	70	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			4.210.000		9.988.400		9.988.400		9.988.400		9.988.400		9.988.400	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			32.674.000		145.075.200		145.075.200		145.075.200		145.075.200		145.075.200	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			2.700.000		20.936.800		20.936.800		20.936.800		20.936.800		20.936.800	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24. KECAMATAN PONTANG																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			3.355.585.18 8		4.329.413.000		4.329.413.000		4.329.413.000		4.329.413.000		4.329.413.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,45	75		75		75		75		75		75		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	81		81		81		81		81		81		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			992.828.836		473.191.712		473.191.712		473.191.712		473.191.712		473.191.712	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	78,55	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			161.527.400		45.430.000		45.430.000		45.430.000		45.430.000		45.430.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	60,35	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			3.600.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	23,66	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			62.508.000		143.431.136		143.431.136		143.431.136		143.431.136		143.431.136	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	79,71	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			112.856.300		35.520.000		35.520.000		35.520.000		35.520.000		35.520.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	31,77	100		100		100		100		100		100		
25. KECAMATAN PULOAMPEL																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			2.882.156.634		2.858.279.760		2.858.279.760		2.858.279.760		2.858.279.760		2.858.279.760	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,5	71		72		73,5		74		75		76		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,75	80		81		82		82		83		83		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			73.964.000		69.615.000		69.615.000		69.615.000		69.615.000		69.615.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	67,43	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			91.490.000		70.250.000		70.250.000		70.250.000		70.250.000		70.250.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	78,49	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			8.760.000		11.050.000		11.050.000		11.050.000		11.050.000		11.050.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	86,43	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			45.505.000		170.510.000		170.510.000		170.510.000		170.510.000		170.510.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	57,02	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			24.000.000		31.425.000		31.425.000		31.425.000		31.425.000		31.425.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	65,36	100		100		100		100		100		100		
26. KECAMATAN TANARA																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			2.892.560.390		2.799.425.408		2.799.425.408		2.799.425.408		2.799.425.408		2.799.425.408	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	54,2	60,2		60,9		61,4		61,4		62,5		63		Kecamatan Tanara
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	70,45	70,45		70,45		70,45		70,45		70,45		70,45		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			984.556.328		830.776.328		830.776.328		830.776.328		830.776.328		830.776.328	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	75,5	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			72.388.000		44.502.400		44.502.400		44.502.400		44.502.400		44.502.400	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	77,54	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			2.172.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	85,67	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.			140.045.000		163.315.000		163.315.000		163.315.000		163.315.000		163.315.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	85,27	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			17.115.000		13.350.000		13.350.000		13.350.000		13.350.000		13.350.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penvelesaian	%	77,61	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Permasalahan Daerah															
27. KECAMATAN TIRTAYASA																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.	3.072.104.296		3.121.607.124		3.620.577.240		3.620.577.240		3.620.577.240		3.620.577.240		3.620.577.240	CAMAT TIRTAYASA
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	57,2	75		75		75		75		80		80		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	80		80		80		80		85		85		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.	777.301.413		789.668.376		354.991.900		354.991.900		354.991.900		354.991.900		354.991.900	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	83,95	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.	115.642.000		107.405.000		63.570.000		63.570.000		63.570.000		63.570.000		63.570.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	92,7	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		Rp.	41.162.500		14.622.000		10.360.000		10.360.000		10.360.000		10.360.000		10.360.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DAN KETERTIBAN UMUM																
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	99,35	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	195.731.700		95.834.000		172.394.000		172.394.000		172.394.000		172.394.000		172.394.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	89,12	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.	69.916.000		68.706.000		50.180.000		50.180.000		50.180.000		50.180.000		50.180.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	86,2	100		100		100		100		100		100		
28. KECAMATAN TUNJUNGTEJA																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.			2.759.166.133		2.842.399.616		2.842.399.616		2.842.399.616		2.842.399.616		2.842.399.616	
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	41,45	80		80		80		80		80		80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,03	80,2		80,2		80,2		80,2		80,2		83		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.			82.200.000		67.508.000		67.508.000		67.508.000		67.508.000		67.508.000	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	83,27	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.			23.400.000		41.675.000		41.675.000		41.675.000		41.675.000		41.675.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	79,53	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.			5.400.000		16.400.000		16.400.000		16.400.000		16.400.000		16.400.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	99,96	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN		Rp.			100.467.000		154.474.000		154.474.000		154.474.000		154.474.000		154.474.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEMERINTAHAN UMUM																
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	92,27	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.			16.300.000		46.455.000		46.455.000		46.455.000		46.455.000		46.455.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaiaan Permasalahan Daerah	%	73,75	100		100		100		100		100		100		
29. KECAMATAN WARINGINKURU NG																
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Rp.	2.962.070. 560		3.214.369.35 4		2.968.464.436		2.968.464.436		2.968.464.436		2.968.464.436		2.968.464.436	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	53,35	75		75		75		75		75		75		CAMAT WARINGINKUR UNG
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	80		81		81		81		81		81		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.	839.384.4 00		916.786.328		803.526.648		803.526.648		803.526.648		803.526.648		803.526.648	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	80,09	100		100		100		100		100		100		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.	59.582.000		67.729.200		65.417.000		65.417.000		65.417.000		65.417.000		65.417.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	80,25	100		100		100		100		100		100		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.	15.400.000		3.400.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	99,35	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	187.939.500		115.207.000		191.427.500		191.427.500		191.427.500		191.427.500		191.427.500	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	92,21	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.	80.032.900		40.560.000		43.005.600		43.005.600		43.005.600		43.005.600		43.005.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	76,62	100		100		100		100		100		100		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK --> Unsur Pemerintahan Umum																
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.			6.525.154.700		5.955.552.730		5.955.552.730		5.955.552.730		5.955.552.730		6.573.998.680	BAKESBANGPOL
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB		BB		BB		BB		BB		BB		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		A		A		A		A		A		A		
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Rp.			2.467.518.200		1.131.368.000		1.131.368.000		1.131.368.000		1.131.368.000		1.867.518.200	BAKESBANGPOL
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kabangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kabangsaan	%		100		100		100		100		100		100		
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA		Rp.			42.890.171.500		2.736.143.000		2.736.143.000		2.736.143.000		72.911.903.000		2.911.903.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase		100		100		100		100		100		100		
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN		Rp.			434.110.000		52.103.000		52.103.000		52.103.000		52.103.001		52.103.002	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase		100		100		100		100		100		100		
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Rp.			777.406.800		185.905.000		185.905.000		185.905.000		185.905.000		185.905.000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di	Persentase		100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Daerah yang Dilaksanakan															
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Rp.			1.055.368.00 0		1.147.079.000		1.147.079.000		1.147.079.000		1.147.079.000		1.147.079.000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase		100		100		100		100		100		100		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan disajikan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berlaku untuk Tahun 2025-2030, dimana kinerja pada tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah tahun berikutnya.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 disajikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator terseleksi, termasuk didalamnya terdapat indikator makro daerah. IKU RPJMD Kabupaten Serang tertuang dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. 1
Indikator Makro RPJMN dan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

RPJMN 2025-2029					RPJMD Kab. Serang Tahun 2025-2029				
Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun	
			2025	2029				2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05	5,3	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,78	5,6-6,6	6,99-7,99
GNI per kapita (<i>baseline</i> 2023)	USD	4.870	5.410	8.000	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	60,01	63,58	71-90
Kontribusi PDB Maritim (<i>baseline</i> 2022)	%	7,9	8,1	9,1	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	46,69	46,70-47,00	48,5-49,5
Kontribusi PDB Manufaktur (<i>baseline</i> 2023)	%	18,67	20,8	21,9	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman	%	2,37	2,4	2,6
Global Power Index (<i>baseline</i> 2023)	peringkat	34	33	29	-	-	-	-	-
Tingkat Kemiskinan	%	9,03	7.0-8	4.5-5.0	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4,00-4,08	2,90-3,36
-	-	-	-	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,18	9,18-9,74	8,20-8,53
Rasio Gini	Indeks	0,379	0.378-0.382	0.372-0.375	Rasio Gini	Indeks	0,267	0,262-0,266	0,243-0,262
Kontribusi PDRB KTI (<i>baseline</i> 2023)	%	20,9	21,4	22,4	Kontribusi PDRB Kab. Serang terhadap Provinsi Banten	%	11,69	11,63	12,50
Indeks Modal Manusia (IMM) (<i>baseline</i> 2020)	Indeks	0,54	0,56	0,59	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,28	73,83	77,62
Penurunan intensitas emisi GRK (<i>baseline</i> 2022)	%	34,09	35,53	45,17	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	32,33	16,63	17,92
Indeks kualitas lingkungan hidup (<i>baseline</i> 2023)	Indeks	72,54	76,49	77,20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,38	67,77	68,78

Tabel 4.2. 2
Indikatif Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1.										
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan										
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,28	73,83	74,78	75,6	76,45	77,62	78,2	
	Skor Kemampuan Literasi SD	%	51,96	54,46	56,96	59,46	61,96	64,46	66,96	
	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60,70	61,80	62,90	64,00	65,10	66,20	67,30	
	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46,90	49,80	52,70	55,60	58,50	61,40	64,30	
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56,63	58,13	59,63	61,13	62,63	64,13	65,63	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,48	13,67	13,84	14,08	14,33	14,57	
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	7,89	8,10	8,31	8,51	8,72	8,93	
	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,91	74,8	75,08	75,37	75,65	75,93	76,21	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,04	95	96	97	98	98	98	
	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	≥91,44	≥93	≥94	≥95	≥96	≥97	≥98	
	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	%	69,08	69	69,5	70	70,5	71	72	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	59,37	59,42	59,47	59,52	59,57	59,63	59,69	
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		57,04	57,04	57,33	57,61	57,9	58,19	58,48	
	Indeks Partisipasi Olahraga		0,255	0,256	0,258	0,259	0,260	0,261	0,263	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	54,30	54,30	58,43	62,87	67,67	72,81	78,34	
	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4,00-4,08	3,57-4,00	3,40-4,00	3,25-3,75	2,90-3,36	2,85-3,36	
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67	58,17	58,67	59,17	59,67	60,17	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,54	92,72	92,91	93,10	93,28	93,47	93,66	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,531	0,518	0,505	0,492	0,479	0,466	0,453	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,23	62,97	63,71	64,47	65,23	66	66,77	
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	3,92	5,52	7,11	9,78	12,44	15,1	16,69	
	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	7,53	10,16	14,45	20,75	29,10	37,45	43,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	61	62,72	64,44	66,16	67,88	69,6	71,32	
Misi 2:										
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah										
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,78	5,60-6,60	5,95	5,75-6,75	6,00-7,2	6,99-7,99	6,5-7,45	
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	65,62	66,25	67,5	68,25	68,90	69,65	70,50	
	Rasio Konektivitas	%	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	46,69	46,70-47	47,00-47,2	47,2-47,5	47,5-48	48-48,45	48,5-49,5	
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,94	9,10	9,15	9,20	9,25	9,30	9,35	
	Persentase Koperasi Sehat	%	10,07	14,69	19,59	22,04	22,53	23,51	24,49	
	Rasio Kewirausahaan	%	0,2	0,5	0,75	1	1	1	1	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	2,37	2,4	2,42	2,47	2,52	2,57	2,6	
Misi 3.										
Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan										
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	9,18-9,74	8,93-9,18	8,85-9	8,50-8,75	8,20-8,53	7,75-8,53	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. Triliun	22,1	22,61	23,17	23,75	24,34	24,94	25,56	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/TK	41,50	84,94	85,75	86,57	87,40	88,40	89,09	
	Persentase Peningkatan Investasi	%	84,28	86,82	89,42	92,11	94,87	97,72	100	
	Indeks Gini	%	0,267	0,262-0,266	0,257-0,262	0,254-0,262	0,250-0,262	0,243-0,262	0,240-0,261	
	Indeks Desa	Angka	0	67,51	68,86	69,02	69,19	69,35	69,51	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	61,406	67,77	68,02	68,09	68,50	68,78	68,81	
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	-	65	67	69	71	73	75	
Misi 4.										
Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan										
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,06	8,06	7,88	7,72	7,53	7,35	7,08	
	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian									
	1. Tanaman Pangan	%	0,73	0,44	0,27	0,27	0,28	0,31	0,32	
	2. Hortikultura	%	173	5	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	3. Perkebunan	%	6	5	5	5	5	5	5	
	4. Peternakan	%	-29	0,98	0,99	1	1	1,06	1,06	
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	81,39	81,76	82,14	82,51	82,88	83,26	83,63	
	peningkatan produksi hasil perikanan	Ton	63.660,91	64.368,25	64.791,29	65.439,20	66.093,58	66.754,52	67.422,25	
Misi 5.										
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima										
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,77	77,4	78,1	78,8	79	81	83,2	
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	77,11	78	78,25	78,50	79	80,10	81	
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,204	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	n/a	95,25	95,75	96,25	96,75	97,25	97,5	
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	84,14	84,14	84,39	84,64	84,89	85,14	85,39	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,73	3,75						
	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai			1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	94,60	88,50	88,75	88,90	88,95	90,00	91,00	
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,55	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75	
	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	395	497	597	697	772	829	832	
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	51,33	61	65	68	70	75	80	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	84	85,5	86,5	88	89	90	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	76,99	81	82	83	84	85	85	
	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72,2	72,2	72,2	72,2	72,9	72,9	72,9	
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	55	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5	87,5	
	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang dimanfaatkan	%		55	61	67	73	81	89	
	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%		100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 6.										
Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang										
	Persentase Capaian Aksi HAM	point	83,9	85	86	87	88	89	90	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	70,8	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82	
	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan	%	18,18	27,27%	36,36%	45,45%	54,55%	54,55%	63,64%	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator makro dan IKK. Penentuan target penyelenggaraan Pemerintah Daerah disajikan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. 3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,39	81,76	82,14	82,51	82,88	83,26	83,63	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	2,13	2.123	2.116	2.109	2.102	2.095	2.088	
3	Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik	%	96,66	100	100	100	100	100	100	RPJPD
4	Akses Rumah Tangga terhadap Akses aman Air Perpipaan	%	12,87	12,92	13,00	13,2	13,4	13,6	13,8	RPJPD
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,406	67,77	68,02	68,09	68,5	68,78	68,81	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Skor	0,99	0,99	0,99	1	1	1	1	
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65,62	66,25	67,5	68,25	68,90	69,65	70,50	
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25,97	27,85	29,72	31,59	33,47	35,34	37,21	RPJPD
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		16,63	17,03	17,38	17,68	17,92	18,15	
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	123,3	123	120	115	110	105	100	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,71	0,73	0,76	0,77	0,81	0,87	0,9	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,229	1,354	1,482	1,61	1,738	1,866	1,994	
13	Rasio Penduduk	%	1,039	1,0391	1,0392	1,0393	1,0394	1,0395	1,0396	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	1159,9	1177,9	1195,9	1213,9	1231,9	1249,9	1267,9	
15	Kapasitas Air Baku	%	100	100	100	100	100	100	100	RPJPD
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78	5,60-6,60	5,95	5,75-6,75	6,00-7,2	6,99-7,99	6,5-7,45	
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4,00-4,08	3,57-4,00	3,40-4,00	3,25-3,75	2,90-3,36	2,85-3,36	
3	PDRB per Kapita	Rp Juta	60,01	60-63,58	65-70,18	68-73	70-75	85-90	88-95	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	9,18-9,74	8,93-9,18	8,85-9	8,50-8,75	8,20-8,53	7,75-8,53	
5	Indeks Gini	%	0,267	0,262-0,266	0,257-0,262	0,254-0,262	0,250-0,262	0,243-0,262	0,240-0,261	
6	Persentase BOR (Bed Occupancy Rate)	%	78%	≥78%	≥79%	≥80%	≥81%	≥82%	≥83%	
7	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	8	8	9	11	12	13	14	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,28	73,83	74,78	75,6	76,45	77,62	78,2	
9	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,91	74,8	75,08	75,37	75,65	75,93	76,21	
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,04	95	96	97	98	98	98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Prevalensi Stunting	%	20,20	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14,2	Perubahan target mengikuti RPJMN Kemenkes
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	7,89	8,1	8,31	8,51	8,72	8,93	
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,48	13,67	13,84	14,08	14,33	14,57	
14	Skor Kemampuan Literasi SD	%	51,96	54,46	56,96	59,46	61,96	64,46	66,96	
15	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60,70	61,80	62,90	64,00	65,10	66,20	67,30	
16	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46,90	49,80	52,70	55,60	58,50	61,40	64,30	
17	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56,63	58,13	59,63	61,13	62,63	64,13	65,63	
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	54,30	54,30	58,43	62,87	67,67	72,81	78,34	
19	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintah daerah	Nilai	51,33	61	65	68	70	75	80	
20	Indeks Literasi Digital	Angka	61,66	62,2	62,3	62,5	63,2	63,5	64	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	44,10	50,87	51,92	53,02	54,17	55,37	56,62	
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	70,8	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82	
23	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan	Angka	18,18	27,27	36,36	45,45	54,55	54,55	63,64	
24	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,23	62,97	63,71	64,47	65,23	66	66,77	
25	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	59,37	59,42	59,47	59,52	59,57	59,63	59,69	
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,531	0,518	0,505	0,492	0,479	0,466	0,453	
27	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,54	92,72	92,91	93,1	93,28	93,47	93,66	
28	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93,3/100.000 KH	122	109	97	86	77	77	
29	Cakupan Penemuan Tuberkulosis	%	75	90	90	90	90	90	90	
30	Persentase pasien tuberkulosis sensitif obat yang memulai pengobatan	%	91	95	95	95	95	95	95	
31	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	90%	90	90	90	90	90	90	
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,1	44,10	44,50	44,65	44,75	45	45,10	
33	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67	58,17	58,67	59,17	59,67	60,17	
34	Capaian Produksi Pertanian									
	1. Produksi Tanaman Pangan									
	- Produksi Padi	Ton	576.649	541.435	541.456	541.480	541.508	541.541	541.576	
	- Produksi Jagung	Ton	2.747	4.754	4.780	4.806	4.833	4.862	4.892	
	2. Produksi Hortikultura									
	- Produksi Cabai Besar	Kuintal	4.039	4.241	4.453	4.676	4.910	5.155	5.413	
	- Produksi Bawang Merah	Kuintal	6.190	6.809	7.490	8.239	9.063	9.970	10.967	
	- Produksi Buah-buahan	Kuintal	132.025	138.626	145.558	152.835	160.477	168.501	176.926	
	3. Produksi Perkebunan									
	- Produksi Kelapa	Ton	287.563	301.941	317.038	332.890	349.534	367.011	385.361	
	- Produksi Kopi	Ton	629	661	694	728	765	803	843	
	- Produksi Cengkeh	kg	136	142	149	157	165	173	182	
	- Produksi Lada	kg	4	5	5	5	5	6	6	
	3. Populasi Komoditas Peternakan									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	- Populasi Sapi	Ekor	4.875	4.923	4.972	5.022	5.072	5.123	5.174	
35	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota	ton	63.660,91	64.368,25	64.791,29	65.439,20	66.093,58	66.754,52	67.422,25	
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,62	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	43,62	43,75	43,97	44,10	44,32	44,68	44,81	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	46,69	46,70-47	47,00-47,2	47,2-47,5	47,5-48	48-48,45	48,5-49,5	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,37	2,4	2,42	2,47	2,52	2,57	2,6	
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,2	0,5	0,75	1	1	1	1	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,77	68,00	68,25	68,50	68,75	69,00	69,50	
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	36,90	37	37,5	38	38,5	39	40	
7	Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di wilayah Kabupaten Serang	%	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	RPJPD
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	22,1	22,61	23,17	23,75	24,34	24,94	25,56	RPJPD
9	Ekspor Barang dan Jasa	(\$ Juta)	116,96	115	117	118	119	120	121	
10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65,62	66,25	67,5	68,25	68,90	69,65	70,50	
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,24	98,29	98,37	98,48	98,52	98,67	98,78	
12	Persentase Desa Mandiri	%	4,60	5,21	7,67	8,28	8,90	9,51	10,12	
13	Indeks Desa	Angka	0	67,51	68,86	69,02	69,19	69,35	69,51	
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,56	0,57	0,58	0,59	0,57	0,58	0,59	
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	19,87	19,87	20	21	22,5	23	24	RPJPD
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	2,26	2,35	2,36	2,42	2,45	2,50	3	RPJPD
17	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	1,38	1,4	1,42	1,44	1,47	1,50	1,52	
18	Persentase Koperasi Aktif	%	76,37	77	78	78	78	79	79	
19	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,29	2,29	2,32	2,32	2,35	2,36	2,5	RPJPD
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,86	52,62	53,39	54,18	54,97	55,78	56,61	
21	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	%	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	
22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,94	9,10	9,15	9,20	9,25	9,30	9,35	
23	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp	41,50	84,94	85,75	86,57	87,40	88,40	89,09	
24	Persentase Peningkatan Investasi	%	84,28	86,82	89,42	92,11	94,87	97,72	100	
25	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	8,06	8,06	7,88	7,72	7,53	7,35	7,08	
26	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	3,88	3,95	3,98	4,01	4,04	4,08	4,09	
27	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	n/a	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,56	98	98,2	98,4	98,6	98,8	99	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor	3,73	3,75						
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	77,11	78	78,25	78,50	79	80,10	81	
4	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda	%	7,5	5	5	5	5	5	5	RPJPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka		65	67	69	71	73	75	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Poin	83,9	85	86	87	88	89	90	
7	Indeks Rasa Aman	%	98,6	99	99	99	99	99	99	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,68	3,68	3,6	3,65	3,67	3,71	3,75	
9	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah	Jumlah	17	17	17	20	20	20	20	RPJPD
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,77	77,40	78,10	78,80	79,00	81,00	83,20	
11	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3.204	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	
12	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	blm ada	95,25	95,75	96,25	96,75	97,25	97,5	
13	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
14	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	84,14	84,14	84,39	84,64	84,89	85,14	85,39	
15	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,55	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75	
16	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	51,33	61	65	68	70	75	80	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	84	85,5	86,5	88	89	90	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	76,99	81	82	83	84	85	85	
19	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72,2	72,2	72,2	72,2	72,9	72,9	72,9	
20	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	55	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5	87,5	
21	Persentase Hasil Riset, Inovasi dan Inovasi yang Termanfaatkan	%	n/a	55	61	67	73	81	89	
22	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
23	Jumlah Inovasi Pelayanan	Jumlah	0	0	2	2	2	2	2	
24	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Jumlah	10	10	7	7	7	7	7	
25	Jumlah Gedung UPT Pelayanan	Jumlah	17	29	29	29	29	29	29	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)										
A Pendidikan										
1	Angka Partipasi Sekolah usia 5-6 dalam PAUD	%	72,13	75,17	78,21	81,25	84,22	87,19	90,16	
2	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun dalam Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 dalam Pendidikan menengah pertama	%	99,81	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 dalam Pendidikan kesetaraan	%	36,88	41,85	46,83	51,51	56,78	61,76	66,74	
B Kesehatan										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93,3/100.000 KH	122	109	97	86	77	77	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (SSGI)	%	20,20	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14,2	Perubahan target mengikuti RPJMN Kemenkes
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	98,3	80	80	80	80	80	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	82,6	75	75	75	80	80	85	
6	Jumlah RS rujukan	Unit	8	8	9	11	12	13	14	Indikator Sebelumnya : Rasio RS rujukan
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	60	60	65	70	75	80	85	
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,60%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	86,37%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	88,17%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,31%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88,83%	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,01%	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60,87%	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,57%	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	84,58%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	90,32%	100	100	100	100	100	100	
20	Cakupan penerimaan pemeriksaan kesehatan gratis	%	N/A	36	46	55	61	70	70	
21	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	94,90%	90	90	95	95	95	95	
22	Proporsi Penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	N/A	65	66,1	67,9	69,7	80	80	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	Indikator Baru	10	25	45	65	85	100	
2	Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	100	10	35	55	70	85	100	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	73,66	75,13	76,63	78,16	79,69	81,28	82,91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	7,33	7,332	23,73	26,62	30,7	36,15	43,52	
5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	0,99	1,110	1,111	1,113	1,115	1,308	1,516	
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	58,06	06,06	13,02	19,09	26	33,02	40	
7	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik									
8	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	78,57	82,45	84,21	85,96	87,72	89,47	91,23	
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	21,05	26,32	36,84	47,37	57,89	68,42	78,95	
10	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap	%	89:10:00	89:10:00	92	94:05:00	97	98:07:00	100	
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	80	80	100	100	100	100	100	
12	Tingkat Pemanfaatan Inforasi Tata Ruang Dalam Pembangunan	%	92	93	93%	94%	94%	95%	95%	
13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Skor	100	100	100	100	100	100	100	
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	3,92	5,52	7,11	9,78	12,44	15,1	16,69	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	7579	7363	7012	6495	5811	5127	4610	
5	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dan sudah diserahterimakan dengan kondisi baik	%	61	62,72	64,44	66,16	67,88	69,6	71,32	
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Program baru dialokasikan 2026-2029, belum pernah terakomodir di tahun sebelumnya
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	70	70	73	76	79	82	85	
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	38,89	40	45	50	55	60	65	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	95	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	92	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Penyebaran Informasi Edukasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	96,67	100	100	100	100	100	100	
10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	10,9	15	15	15	15	15	15	
F	Sosial									
1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	60	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Baseline N/A Karena Indikator Baru
3	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	N/A	6	6	6	6	6	6	Baseline N/A Karena Indikator Baru
4	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	0	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	N/A	38,42	42,64	46,86	51,08	55,3	55,3	Baseline N/A Karena Indikator Baru
11	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	N/A	59,67	62,37	65,07	67,76	70,46	70,46	Baseline N/A Karena Indikator Baru
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	10	10	10	10	10	10	10	
16	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	94,68	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Baseline N/A Karena Indikator Baru
18	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Baseline N/A Karena Indikator Baru
19	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
G	Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39	39	40	40	40	40	40	
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	48,56	50	52	54	56	58	60	
4	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Perusahaan	425	427	429	431	433	435	437	
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	60,03	70	71	73	73	74	74	
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	51,26	53	55	57	59	60	62	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	2,43	3	3.067	3.077	3.087	3.095	3,1	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51,86	52,62	52,72	52,81	52,86	52,90	52,95	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Pendampingan Komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	65	70	75	80	85	90	95	
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	75	75%	75,50%	76,00%	76,50%	77,00%	77,50%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	30	30	30,2	30,4	30,6	30,8	31	
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	n/a	58	58,5	59	59,5	60	60,5	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Pendampingan Komprehensif			70	75	80	85	90	95	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	n/a	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
I	Pangan									
1	Persentase ketersediaan infrastruktur lumbung pangan	%	10 Unit	33	44	67	78	89	100	Jumlah lumbung terbangun tahun sebelumnya + jumlah lumbung terbangun tahun berjalan)/total target jumlah lumbung akhir perencanaan x 100%
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	410 Ton	85	85	85	85	85	85	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 (%)
3	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	93,3	79,5	80	80,1	80,2	80,3	80,4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Nilai)
4	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Angka	92,55	92,55	92,7	92,8	92,9	93	93,1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,68	50	49	48	47	46	45	Jumlah desa rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3)/Jumlah seluruh desa di Kab. Serang x 100%
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	97,82	95	95	95	95	95	95	Jumlah pangan yang aman lewat uji rapid test/jumlah seluruh pangan yang diuji rapid test x 100%
J	Pertanahan									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	30	50	50	50	50	50	50	
K	Lingkungan Hidup									
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	2	25	40	50	60	80	80	
2	Indeks Kualitas Air	point	51,25	56,75	56,80	56,85	56,90	57,25	57,37	
3	Indeks Kualitas Udara	point	83,25	71,66	72,25	72,38	73,35	73,85	73,86	
4	Persentase RTH	%		47,02	47,03	47,04	47,06	47,08	47,081	
5	Persentase Limbah B3 terkelola	%	10	20	36	40	44	48	50	
6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lgkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	%	50	65,79	69,74	73,68	86,32	98,95	98,95	
7	Persentase Penyuluh Lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	%	50	55	62	76	78	80	80	
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	20	25	30	40	50	60	60	
9	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	25,97	27,85	29,72	31,59	33,47	35,34	37,21	
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	point	61,406	67,77	68,02	68,09	68,5	68,78	68,81	
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	4,21	5	7	9	11	13	15	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	99	99	99	99	99	99	99	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	95,5	99	99	99	99	99	99	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	63,46	70	75	80	85	90	95	
10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	30	30	30	30	30	30	30	30	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	51	17	15	15	15	15	15	
4	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	0	8	18	18	18	18	18	
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	0	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	17,18	
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	100	0	0	0	0	0	
7	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	7,35	3,96	4,74	4,97	5,23	5,52	5,84	
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate / TFR</i>)	Persen	2,1	2,08	2,1	2,1	2	2	2	
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19</i>)	Persen	18	17,90	17,80	17,69	17,59	17,49	17,39	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	Persen	70,66	71,16	71,66	72,16	72,66	73,16	73,66	
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	11,03	9,96	9,93	9,90	9,87	9,84	9,81	
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	84,84	84,86	84,88	84,9	84,92	84,94	84,96	
O	Perhubungan									
1	Konektivitas Darat	%	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	37	38	39	44	48	53	58	
3	Konektivitas Laut	%	75	75	75	75	75	75	75	
4	Persentase Pengendalian KKOP	%	25	25	50	50	50	50	50	
5	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	%	88	88	100	100	100	100	100	
P	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	n/a	71,50	73,20	75,01	77,30	78,30	85,70	
2	Indeks SPBE	Indeks	3,73	3,75						
3	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai			1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Akses terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	25,31	25,31	25,5	25,6	25,75	25,8	25,8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	7,34	10	10	10	10	10	10	
3	Persentase Koperasi Aktif	%	76,37	77	78	78	78	79	79	
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	14,39	14,5	14,6	14,75	14,85	15	15	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	11,51	11,6	11,7	11,8	11,9	12	12	
6	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	51,02	51	52	53	54	55	55	
7	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,8	3	3	3	3	3	3	
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	%	1	1	1	1	1	1	1	
9	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	0,86	1,58	2,3	3,02	3,74	4,46	4,46	
10	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	11,51	10	10	10	10	10	10	
11	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	4,1	2	2	2	2	2	2	
R	Penanaman Modal									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp (Trilyun)	18,95	21,07	21,71	22,36	23,03	23,72	24,43	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	91,51	65,64	67,61	69,64	71,73	73,88	76,10	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	34,31	38,03	39,36	40,69	42,02	43,35	44,68	
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	37,49	44,08	52,72	61,36	70,01	91,36	100	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	99,57	99,64	99,71	99,78	99,86	99,93	100	
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	0,031	0,031	0,031	0,031	0,032	0,032	0,032	
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Angka	0,028	0,028	0,028	0,028	0,029	0,029	0,029	
6	Peningkatan prestasi olahraga	Angka	65	67	69	71	73	75	78	
T	Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,55	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data grid dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase OPD yang menggunakan data grid dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
U	Persandian									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	395	497	597	697	772	829	832	
V	Kebudayaan									
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		39,47	39,47	42,11	44,74	47,37	50	52,63	
W	Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	68,79	71,83	74,70	77,68	80,78	84,01	84,01	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	persentase	0	0	70	75	80	85	90	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	54,30	54,30	58,43	62,87	67,67	72,81	78,34	
4	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Nilai	0,099	2,084	2,0882	2,0923	2,0965	2,1006	2,1048	
5	Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan oleh Masyarakat	Indeks	1	6,9298	6,9436	6,9575	6,9713	6,9851	6,999	
6	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persentase	0,3582	0,0189	0,019	0,019	0,191	0,191	0,191	
7	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	1	20,3852	20,4259	20,4666	20,5073	20,548	20,5887	
8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat	Orang	0,2801	596	600	610	620	630	640	
9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi / dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah	0	0	1	2	2	3	4	
10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah	0	0	1	2	2	3	4	
11	Prosentase koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Persentase	0	0	70	75	80	85	90	
X	Kearsipan									
1	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persentase	49,98	50,2	50,4	50,7	50,8	51,23	52,23	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.	Persentase	51,83	52,33	52,58	52,83	53,08	53,33	53,58	
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	44,76	20,86	20,9	20,99	21,08	21,17	21,99	
6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	20,86	20,86	20,9	20,99	21,08	21,17	21,99	
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase	57,14	57,14	60	65	70	75	85	
9	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Kali	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Kali	1	1	1	1	1	1	1	
11	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Kali	1	1	1	1	1	1	1	
12	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	Kali	1	1	1	1	1	1	1	
13	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Kali	1	1	1	1	1	1	1	
14	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Kali	1	1	1	1	1	1	1	
Y	Kelautan dan Perikanan									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	7226,67	7167,94	7261,04	7333,65	7406,98	7481,05	7556,05	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	56434,24	57200,31	57530,25	58105,55	58686,6	59273,47	59866,2	
3	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	%	19,38	23,13	30,42	34,55	38,24	42,43	42,43	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	42,53	43,15	43,58	43,97	44,12	44,53	44,96	
Z	Pariwisata									
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	30,35	13,98	14,89	14,99	15,07	15,5	15,6	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	-	14,29	14,29	25	30	30,77	35,29	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,82	5,63	7,32	9,58	12,68	16,9	22,54	
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	3,93	6,43	10	13,57	17,14	20,71	24,29	
5	Tingkat hunian akomodasi	Angka	35,96	35,98	36	36,01	36,03	36,05	36,07	
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,26	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp.	42.080.339.208	44.184.356.168	46.393.573.977	48.713.252.676	51.148.915.309	53.706.361.075	56.391.679.129	
AA	Pertanian									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan									Selisih Produksi Tahun ke N – Produksi Tahun ke (N-1)
	Padi	Ton	5.874	2.889	20	24	28	33	35	
	Jagung	Ton	17	16	25	26	27	29	30	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura									Selisih Produksi Tahun ke N – Produksi Tahun ke (N-1)
	Cabai Besar	Kuintal	-33,07	201,97	212,06	222,67	233,8	245,49	257,77	
	Bawang Merah	Kuintal	118,92	619,04	680,94	749,04	823,94	906,34	996,97	
	Buah-Buahan	Kuintal	110.661	6.601,25	6.931,31	7.277,88	7.641,77	8.023,86	8.425,05	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kelapa	Ton	193.063,72	14.378,10	15.097,00	15.851,90	16.644,50	17.476,70	18.350,50	
	Kopi	Ton	-5.412,73	31,5	33	34,7	36,4	38,2	40,2	
	Cengkeh	Kg	-1.284,56	6,8	7,1	7,5	7,8	8,2	8,6	
	Lada	Kg	0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	
4	Peningkatan Populasi Komoditas Peternakan									Selisih Populasi Tahun ke N – Populasi Tahun ke (N-1)
	Sapi	Ekor	-1.987	48	49	50	50	51	51	- Jumlah Penjualan dan pemotongan sapi potong yang lebih besar daripada jumlah pemasukan (September sampai Desember tertunda) dan kelahiran sapi pada peternakan penggemukan sapi (Feedlot) di tahun 2024 - Adanya Perusahaan peternakan (Feedlot) yang tutup karena tidak mendapat perpanjangan izin di tahun 2024
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	n/a	28.084,29	32.229,36	32.229,36	32.229,36	32.229,36	32.229,36	Belum ada penetapan luas lahan pertanian menjadi LP2B tahun 2024
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	n/a	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	- Tidak ada perhitungan Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun 2024 -Rerata Persentase terkendalinya kejadian penyakit

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										PHMS di wilayah Kabupaten Serang (PMK, Rabies, Antrax, AI, Brucella, LSD)
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veterinar)	%	n/a	52,63	57,89	63,16	68,42	73,68	84,21	- Tidak ada perhitungan Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veterinar) tahun 2024 -Jumlah unit usaha produk hewan yang sudah menerapkan sertifikat NKV tahun ke-N / Total target unit usaha produk hewan (Total= 19 unit usaha)
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	n/a	6,25	22,92	20,83	18,75	16,67	14,58	- Perbedaan lokus penanganan dampak bencana pertanian -Luasan daerah bencana yang tertangani per tahun/Jumlah seluruh daerah bencana selama 5 tahunx100%) (Target Total 1.440 Ha)
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	n/a	17,18	19,08	18,13	16,6	14,69	14,31	- Tidak ada perhitungan Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Pertanian di tahun 2024 - Luasan daerah yang tertangani DPI setiap tahun/Jumlah seluruh daerah terdampak Perubahan Iklim selama 5 tahunx100%) (Target Total= 5.240 Ha)
10	Usaha Pertanian yang Terbina	Usaha Pertanian	n/a	10	10	10	10	10	10	Jumlah Usaha Pertanian yang terbina
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	n/a	17	33	50	67	83	100	- Tidak ada perhitungan Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan tahun 2024 - Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya per tahun/jumlah target SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya selama 5 tahunx100% (Target 120 Penyuluh)
12	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	n/a	17	33	50	67	83	100	- Tidak ada perhitungan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi tahun 2024 - Jumlah KEP yang terbentuk per tahun/jumlah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										target KEP terbentuk selama 5 tahunx100% (Target = 12 KEP)
AB	Perdagangan									
1	Persentase izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Sarana Perdagangann yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	85,71	85,71	85,71	92,85	92,85	92,85	92,85	
3	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	512	550	560	570	580	600	600	
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	68,25	70	70	75	75	80	80	
8	Persentase alat-alat; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	90	90	95	98	100	100	
AC	Perindustrian									
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	90,34	90,34	90,35	90,4	90,45	90,5	90,5	
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	50	50	50	50	50	50	50	
5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	70	80	80	90	95	100	100	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	50	50	50	100	100	100	
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
AD	Transmigrasi									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	Sekretariat Daerah									
1	Indeks Kematangan Penataan Perangkat Daerah	Peringkat / Nilai	n/a	Sedang/ 29	Sedang/30	Sedang/33	Sedang/36	Tinggi/ 39	Tinggi/ 42	Organisasi
2	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tapem
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Angka	3,243	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Tapem
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kesra
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Perekonomian
6	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka (Level)	3	3	3	3	3	3	3	ulp
7	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen		100	100	100	100	100	100	adpem
AF	Sekretaria DPRD									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	62,5	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	87,5	100	100	100	100	100	100	
AG	Perencanaan									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	
AH	Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30	30	30	30	30	30	30	BPKAD
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	25	25	30	40	40	40	40	BPKAD
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	90	90	90	90	90	90	90	BPKAD
4	Persentase Penurunan SILPA	%	5	5	5	5	6	6	6	BPKAD
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD
7	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	BAPENDA
8	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	BAPENDA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	%	99,3	91	92	93	94	95	96	BAPENDA
AI	Kepegawaian									
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%	n/a	7	8	8	8	8	8	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	n/a	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	n/a	95	95	95	95	95	95	
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	n/a	95	95	95	95	95	95	
AJ	Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	n/a	5	5	5	5	5	5	
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	n/a	95	95	95	95	95	95	
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	n/a	6	6	6	6	6	6	
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	n/a	20	20	20	20	20	20	
AK	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	n/a	50	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	n/a	55	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	n/a	55	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	n/a	55	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	n/a	n.a	50	51	52	53	54	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	n/a	n.a	61	67	73	81	89	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	n/a	n.a	61	67	73	81	89	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	n/a	n.a	61	67	73	81	89	Perubahan Indikator dari Litbang ke Rida

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AL	Inspektorat Daerah									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,204	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	
3	Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AM	Kecamatan									
1	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AN	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V PENUTUP

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan. RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029 tidak hanya berperan sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memuat strategi, sasaran, program, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional (RPJMN) dan provinsi, yaitu RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi, sehingga terdapat kesinambungan kebijakan dalam konteks pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, implementasi RPJMD ini memerlukan koordinasi lintas sektor, sinergi antar pemangku kepentingan, serta pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan.

Keberhasilan implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, serta peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, diharapkan RPJMD ini dapat menjadi instrumen pembangunan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga mampu menjawab tantangan serta peluang yang muncul dalam periode perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 mematuhi kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Kaidah-kaidah ini menekankan pada pengarusutamaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Implementasi RPJMD ini akan mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Pembangunan di Kabupaten Serang akan memastikan bahwa program dan kegiatan dapat diakses dan memberikan manfaat yang setara bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, usia, etnis, atau status sosial.
 - Pengarusutamaan Gender: Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
 - Inklusi Sosial: Memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.

2. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Seluruh program pembangunan akan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs. RPJMD ini akan berkontribusi pada pencapaian target SDGs melalui program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan lingkungan.
3. Pengarusutamaan Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
4. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon: Pembangunan akan diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang efektif.
5. Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim: Seluruh rencana pembangunan akan memperhitungkan risiko perubahan iklim, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana. Hal ini untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim.

Kaidah pelaksanaan disusun untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Serang, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025–2029 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2029.
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Serang, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit satuan kerja (Renja SKPD).
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja.
5. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil RPJMD 2025–2029, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah.
6. Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029.

5.3 Manajemen Resiko

Manajemen risiko dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau segala kemungkinan kejadian atau kondisi (risiko) yang berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sumber daya, dan faktor eksternal yang tidak selalu bisa dikontrol.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD; mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program Perangkat Daerah; memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang; serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengendalian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses menjamin bahwa dokumen RPJMD selalu akurat, relevan, mudah diakses, dan terlindungi dari perubahan yang tidak sah. Hal ini sangat penting karena RPJMD adalah dokumen strategis yang menjadi dasar bagi seluruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di daerah selama lima tahun, meskipun senantiasa terdapat dinamika karena adanya kebijakan nasional maupun daerah sehingga perlu penyesuaian. Pengendalian pelaksanaan dokumen RPJMD untuk memastikan:

- a. Program setiap Perangkat Daerah tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD;
- b. Sumber daya daerah, terutama terkait dengan anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang direncanakan;
- c. Potensi, kendala, hambatan, maupun risiko dapat diidentifikasi lebih awal; serta
- d. Setiap Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan RPJMD.

Selain pengendalian pelaksanaan yang berfokus pada proses untuk memastikan selama periode perencanaan, semua rencana berjalan on track, perlu diperhatikan juga evaluasi yang dilakukan pada periode tertentu (tengah atau akhir periode) untuk menilai efektivitas dan efisiensi keseluruhan rencana.

5.4 Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengantisipasi perubahan dalam periode transisi antara RPJMD yang sedang berjalan dengan perencanaan berikutnya, diperlukan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD tahun terakhir periode RPJMD harus tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045, RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, serta RPJMN 2025-2029, sehingga kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada agenda pembangunan nasional dan provinsi.
2. RKPD tahun pertama dari periode RPJMD berikutnya harus mencerminkan kesinambungan kebijakan dengan mempertimbangkan program-program strategis yang masih dalam tahap implementasi guna menghindari fragmentasi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian RPJMD sebelumnya harus dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan untuk periode berikutnya, sehingga proses perencanaan dapat berorientasi pada pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

4. Penyusunan RAPBD tahun transisi harus memperhitungkan prioritas pembangunan yang masih dalam proses pelaksanaan, serta mengakomodasi program baru yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang baru.
5. Penerapan prinsip good governance dalam proses transisi guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Melalui pedoman transisi ini, diharapkan tidak terjadi kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, serta mampu memastikan kesinambungan kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Serang.

5.5 Penutup

RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada inklusivitas, keberlanjutan, dan daya saing. Sebagai instrumen kebijakan strategis, RPJMD ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Serang di tingkat nasional maupun global.

Keberhasilan implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program serta kebijakan pembangunan yang telah dirancang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat guna menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global. Kabupaten Serang memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, visi pembangunan Kabupaten Serang dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.

BUPATI SERANG,



Hj. RATU RACHATUZAKIYAH, S.Pd., MM.

DOKUMEN DIGITAL
RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029



SCAN

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029

Dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Serang. Penyusunan RPJMD ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 menjadi pedoman pembangunan lima tahunan dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Seluruh proses perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, serta integrasi antara pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), sehingga menjamin keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah.

Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan visi Kabupaten Serang, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia"**, sebagai Perwujudan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi dimana masyarakat menikmati kualitas hidup yang baik dan merasakan kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial, maupun emosional, yang mencakup aspek sosial, kesehatan, lingkungan, dan rasa keadilan. Guna mendukung pencapaian visi tersebut, RPJMD ini juga memuat misi daerah yang menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang mampu mengarahkan pembangunan daerah secara terukur, terencana, dan berkesinambungan menuju terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia.

“
TERWUJUDNYA
KABUPATEN SERANG BAHAGIA
”

